Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 dapat terselesaikan dengan baik untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Timur. Hal ini menjadi sebuah kewajiban bagi setiap Pemerintah Daerah yang menyelenggaraan pemerintahan daerah untuk melaksanakan koreksi melalui evaluasi secara menyeluruh terhadap berjalannya suatu pemerintahan daerah. Di samping itu, laporan ini disusun untuk memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat.

LPPD bertujuan untuk meningkatkan citra pemerintahan daerah yang semakin transparan, akuntabel dan berorientasi pelayanan, sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai sarana laporan hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka laporan ini minimal menyajikan 3 (tiga) substansi pokok capaian kinerja yang disajikan, antara lain : capaian kinerja penyelenggaraan tugas desentralisasi yang diukur dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK), capaian kinerja penyelenggaraan tugas pembantuan, dan capaian kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Sebagai kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka struktur, ruang lingkup dan substansi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 dan secara teknis penyusunannya berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal

17 Desember 2018 Nomor : SE.120.04/9803/OTDA tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018.

Akhirnya, perkenankan kami atas nama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar - besarnya kepada semua pihak yang telah berperan aktif membangun Kabupaten Sidoarjo di berbagai sektor pembangunan, dengan produktivitas dan komitmen yang tinggi mewujudkan Kabupaten Sidoarjo Yang Inovatif, Sejahtera, Mandiri dan Berlanjutan. Semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 yang juga disertai dengan Lampiran Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2018 mempunyai banyak manfaat serta dapat dijadikan landasan bagi pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

BUPATI SIDOARJO,

H. SAIFUL ILAH SH., M.Hum.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GRAFIK

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Dasar Hukum 1

B. Gambaran Umum Daerah 2

1. Kondisi Geografis Daerah 2
2. Gambaran Umum Demografis 8
3. Kondisi Ekonomi 13
4. Sektor Potensial Daerah 15

C. Indikator Kinerja Utama (IKU) 21

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) 36

1. Visi dan Misi 38
2. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan 43
3. Prioritas Pembangunan Daerah 63

BAB III URUSAN DESENTRALISASI 66

A. Ringkasan Urusan Desentralisasi 66

1. Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan 66
2. Program Kerja yang diselenggarakan 68
3. Anggaran, Realisasi dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 71
4. Ketersediaan Personil Pelaksana Urusan Pemerintahan 74
5. Sarana dan Prasarana yang digunakan 77

B. Prioritas Urusan Wajib yang Dilaksanakan 81

1. Urusan Pendidikan 81
2. Urusan Kesehatan 95
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 117
4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 128

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 135
6. Urusan Sosial 157
7. Urusan Ketenagakerjaan 163
8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 168
9. Urusan Pangan 174
10. Urusan Pertanahan 180
11. Urusan Lingkungan Hidup 181
12. Urusan Administrasi Kepndudukan dan Catatan Sipil 199
13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 206
14. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 217
15. Urusan Perhubungan 222
16. Urusan Komunikasi dan Informatika 227
17. Urusan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 250
18. Urusan Penanaman Modal 263
19. Urusan Kepemudaan dan Olahraga 265
20. Urusan Statistik 272
21. Urusan Persandian 285
22. Urusan Kebudayaan 287
23. Urusan Perpustakaan 293
24. Urusan Kearsipan 299

C. Prioritas Urusan Wajib yang Dilaksanakan 304
1. Urusan Kelautan dan Perikanan 304
2. Urusan Pertanian 313
3. Urusan Pariwisata 321
4. Urusan Industri 340
5. Urusan Perdagangan 345
6. Urusan Transmigrasi 352

D. Unsur Penunjang 354
1. Unsur Penunjang Sekretariat Daerah 354
2. Unsur Penunjang Sekretariat DPRD 376
3. Unsur Penunjang Perencanaan Pembangunan 379
5. Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan 385

6. Unsur Penunjang Pengawasan 387
7. Unsur Penunjang Keuangan 392
8. Unsur Penunjang Kepegawaian dan Diklat 407

BAB IV STANDART PELAYANAN MINIMAL (SPM) 422
A. Urusan Pendidikan 422
B. Urusan Kesehatan 423
C. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 427
D. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 428
E. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 429
F. Urusan Sosial 431

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN 438

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN 440
A. Kerjasama Antar Daerah 440
B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga 442
C. Pembinaan Batas Wilayah 447
D. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah 450
E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana 452
F. Pengelolaan Kawasan Khusus 467
G. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 468

BAB VI PENUTUP 469

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Desa dan Kelurahan per Kecamatan	2
Tabel I.2	Letak, Tinggi, dan Luas Wilayah Menurut Kecamatan Tahun 2018	4
Tabel I.3	Luas Wilayah Menurut Kecamatan Berdasarkan Lapisan Batuan Tahun 2018	5
Tabel I.4	Luas Wilayah Menurut Kecamatan Berdasarkan Lapisan Batuan Tahun 2018	5
Tabel I.5	Luas Wilayah Menurut Kecamatan Berdasarkan Kondisi Air Tahun 2018	6
Tabel I.6	Jumlah Curah Hujan (mm) di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018	7
Tabel I.7	Penduduk Per Kecamatan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2018	9
Tabel I.8	Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2018	10
Tabel I.9	Penduduk Menurut Mata Pencaharian Tahun 2018	11
Tabel I.10	PDRB Kabupaten Sidaorjo Tahun 2018	13
Tabel I.11	Perkembangan Industri di Kabupaten Sidoarjo	16
Tabel I.12	Perkembangan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (Kw)	17
Tabel I.13	Obyek Wisata di Kabupaten Sidoarjo	19
Tabel I.14	Indikator IPM Kabupaten Sidoarjo	27
Tabel I.15	Statistik Ketenagakerjaan Tahun 2017 - 2018	33
Tabel II.1	Kerangka Visi Pembangunan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 - 2021	42
Tabel II.2	Konsistensi Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	44
Tabel II.3	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 - 2021	48
Tabel II.4	Tema dan Program Prioritas Pembangunan Tahun 2018	51
Tabel II.5	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Sidoarjo	53
Tabel II.6	Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Sidoarjo	54
Tabel II.7	Prioritas Pembangunan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018	64
Tabel III.A.1	Konsistensi Program Kerja OPD se – Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018	68
Tabel III.A.2	Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2018	71
Tebal III.A.3	Rincian Aset Daerah Tahun 2017 Rekapitulasi Data Kepegawaian Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018	74

Tabel III.A.4	Rincian Aset Daerah Tahun 2018	77
Tabel III.B.1	Jumlah keluarga sehat Kabupaten Sidoarjo tahun 2017 - 2018	99
Tabel III.B.2	Perkembangan kondisi jalan kabupaten	118
Tabel III.B.3	Lokasi genangan	120
Tabel III.B.4	Kondisi jembatan	121
Tabel III.B.5	Cakupan Layanan Irigasi Tahun 2018	123
Tabel III.B.6	Perkembangan Kondisi Saluran Irigasi dari tahun 2015 – 2018	124
Tabel IV.B.7	Jumlah sambungan langganan PDAM sampai akhir tahun 2018	132
Tabel IV.B.8	Perkembangan prosentase masyarakat yang terlayani sarana air bersih perpipaan PDAM dan non PDAM	133
Tabel IV.B.9	Jumlah masyarakat (jumlah KK) yang terlayani air bersih	133
Tabel IV.B.10	Hasil pengukuran IKD	139
Tabel IV.B.12	Data penanganan PMKS Tahun 2018	162
Tabel IV.B.13	Statistik ketenagakerjaan tahun 2017 - 2018	166
Tabel IV.B.14	Data rincian jenis kekerasan yang dialami Kabupaten Sidoarjo tahun 2018	172
Tabel IV.B.15	Skor PPH Ketersediaan Kabupaten Sidaorjo tahun 2018	177
Tabel IV.B.15	Skor PPH Konsumsi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018	178
Tabel IV.B.16	TPST Kawasan	191
Tabel IV.B.17	Luas ruang terbuka hijau	196
Tabel IV.B.18	Luas ruang terbuka hijau	196
Tabel IV.B.19	Status desa dalam Indeks Desa Membangun	208
Tabel IV.B.20	Usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera	211
Tabel IV.B.21	Usaha ekonomi desa simpan pinjam	212
Tabel IV.B.22	Program perempuan pengembang ekonomi lokal	213
Tabel IV.B.23	Badan Usaha Milik Desa	214
Tabel IV.B.24	Sarana Prasarana perhubungan	225
Tabel IV.B.25	Prestasi pemuda di Kabupaten Sidoarjo tahun 2018	266
Tabel IV.B.26	Prestasi olahraga di Kabupaten Sidoarjo tahun 2018	269
Tabel IV.B.27	Kelompok seni dan budaya lokal	287
Tabel IV.B.28	Prestasi seni dan budaya di tahun 2018	291
Tabel IV.B.29	Pembinaan monitoring kearsipan	300
Tabel IV.B.30	Pembinaan monitoring kearsipan di Desa	302
Tabel IV.C.1	Perkembangan produksi tanaman pangan dan hortikultura (kw)	313
Tabel IV.C.2	Realisasi produksi daging tahun 2017 dan 2018	317
Tabel IV.C.3	Obyek Wisata	322

Tabel IV.C.4	Kunjungan wisatawan	328
Tabel IV.C.5	Kunjungan wisatawan di hotel	330
Tabel IV.C.6	Industri Kreatif	336
Tabel IV.C.7	Standarisasi IKM	342
Tabel IV.D.1	Indeks Pelayanan Publik Unit Sampling	360
Tabel IV.D.2	Produk hukum yang dihasilkan	361
Tabel IV.D.3	Sengketa dan permasalahan hukum	361
Tabel IV.D.4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	366
Tabel IV.D.5	Manajemen Mutu Pelayanan ISO	368
Tabel IV.D.6	Inovasi Pelayanan Publik	370
Tabel IV.D.7	Konsistensi dokumen perencanaan daerah	381
Tabel IV.D.8	Dokumen penelitian dan pengembangan	386
Tabel IV.D.9	Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	388
Tabel IV.D.10	Rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat	389
Tabel IV.D.11	Maturitas SPIP Kabupaten Sidoarjo	391
Tabel IV.D.12	Opini BPK atas laporan keuangan	394
Tabel IV.D.13	Realisasi belanja langsung OPD realisasi dibawah 80%	395
Tabel IV.D.14	Struktur Pendapatan Asli Daerah	403
Tabel IV.D.15	Penerimaan Pajak Daerah dan Capaian Peningkatannya	404
Tabel IV.D.16	Perhitungan Indeks Profesionalitas ASN	409
Tabel IV.D.17	Jenis Kegiatan Bidang Diklat Tahun 2018	411
Tabel V.1	Penetapan Lokasi program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018	439
Tabel VI.1	Data dan Penanganan Akibat Bencana di Kabupaten Sidaorjo Tahun 2018	452

DAFTAR GRAFIK

Grafik I.1	Peta Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo	3
Grafik I.2	Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Sidoarjo	8
Grafik I.3	Komposisi Penduduk Menurut Usia Tahun 2018	10
Grafik I.4	Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2018	11
Grafik I.5	Share PDRB	15
Grafik I.6	Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura	18
Grafik I.7	Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya	18
Grafik I.8	Perkembangan Produktivitas Udang Windu dan Bandeng	19
Grafik I.9	Indeks Good Governance Kabupaten Sidoarjo	22
Grafik I.10	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sidoarjo	23
Grafik I.11	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidoarjo	24
Grafik I.12	Disparitas (Indeks GINI)	25
Grafik I.13	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sidoarjo	27
Grafik I.14	Indeks Kebahagiaan Kabupaten Sidoarjo	29
Grafik I.15	Indeks Infrastruktur Kabupaten Sidoarjo	29
Grafik I.16	Pengangguran Terbuka	32
Grafik I.17	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 - 2018	34
Grafik I.18	Garis Kemiskinan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 - 2018	35
Grafik III.B.1	Angka Harapan Lama Sekolah	82
Grafik III.B.2	Rata – Rata Lama Sekolah	83
Grafik III.B.3	Perkembangan Nilai Ujian Nasional	85
Grafik III.B.4	Perkembangan Guru / Pendidik yang memenuhi Standart kualifikasi S1 / D4	86
Grafik III.B.5	Guru / Pendidik yang telah bersertifikasi	87
Grafik III.B.6	Perkembangan satuan pendidikan akreditasi A	88
Grafik III.B.7	Angka Partisipasi Kasar (APK)	89
Grafik III.B.8	Angka Partisipasi Murni (APM)	91
Grafik III.B.9	Perkembangan Rasio Pendidik dan Peserta Didik	92
Grafik III.B.10	Rasio jumlah kelas belajar terhadap peserta didik	93
Grafik III.B.11	Angka Harapan Hidup Kabupaten Sidoarjo dan propinsi jawa timur tahun 2015 - 2017	96

Grafik III.B.12	Perbandingan angka harapan hidup berdasarkan jenis kelamin	97
Grafik III.B.13	Angka Kematian Bayi Tahun 2016 – 2018	102
Grafik III.B.14	Angka Kematina Ibu Tahun 2016 - 2018	103
Grafik III.B.15	Penyebab Kematian Ibu Tahun 2018	104
Grafik III.B.16	Angka Keberhasilan Pengobatan TB Paru	108
Grafik III.B.17	Angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk	110
Grafik III.B.18	Perkembangan kondisi jalan kabupaten	118
Grafik III.B.19	Lokasi genangan di Kabupaten Sidoarjo	120
Grafik III.B.20	Kondisi jembatan di Kabupaten Sidoarjo	122
Grafik III.B.21	Kondisi saluran irigasi	124
Grafik III.B.22	Bangunan ber - IMB	125
Grafik III.B.23	Trend Rumah Tidak Layak Huni	128
Grafik III.B.24	Trend liasan kawasan kumuh	129
Grafik III.B.25	Trend rumah tangga bersanitasi sehat	131
Grafik III.B.26	Trend rumah tangga pengguna air bersih	132
Grafik III.B.27	Indeks rasa aman di Kabupaten Sidoarjo	136
Grafik III.B.28	Indeks Resiko Bencana di Kabupaten Sidoarjo	140
Grafik III.B.29	Gangguan ketertiban dan ketentraman umum	142
Grafik III.B.30	Penambahan angggota satlinmas	144
Grafik III.B.31	Penyelesaian pelanggaran peratutan daerah	146
Grafik III.B.32	Tingkat Kemiskinan	158
Grafik III.B.33	Garis kemiskinan	159
Grafik III.B.34	Pengangguran Terbuka	164
Grafik III.B.35	Statistik pengangguran berdasarkan pendidikan	165
Grafik III.B.36	Tenaga kerja yang ditempatkan	166
Grafik III.B.37	Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Sidoarjo	168
Grafik III.B.38	Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Sidoarjo	170
Grafik III.B.39	Kasus kekerasan dan trafiking terhadap perempuan dan anak	171
Grafik III.B.40	Perkembangan pola pangan harapan (PPH) Ketersediaan	176
Grafik III.B.41	Perkembangan Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	178
Grafik III.B.42	Nilai SKM Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	200
Grafik III.B.43	Perkembangan penduduk ber-KTP-el	201
Grafik III.B.44	Penduduk memiliki kartu keluarga	202
Grafik III.B.45	Persentase penduudk usia 0 s.d 18 tahun ber-Akta kelahiran	204

Grafik III.B.46	Persentase capaian Lembaga Ekonomi yang Mandiri	214
Grafik III.B.47	Perkembangan tata kelola administrasi desa yang baik dan desa yang tidak baik	216
Grafik III.B.48	Perkembangan Peserta KB Aktif	218
Grafik III.B.49	Perkembangan wanita menikah di bawah umum	220
Grafik III.B.50	Nilai Indeks SPBE Kabupaten Sidoarjo	231
Grafik III.B.51	Perkembangan Usaha Mikro	252
Grafik III.B.52	Jumlah usaha mikro bersertifikasi SKKNI	253
Grafik III.B.53	Prosentase koperasi aktif	256
Grafik III.B.54	Koperasi aktif dan tidak aktif	257
Grafik III.B.55	Jumlah koperasi sehat	258
Grafik III.B.56	Jumlah anggota koperasi	259
Grafik III.B.57	Modal koperasi	260
Grafik III.B.58	Perkembangan volume usaha koperasi	261
Grafik III.B.59	Perkembangan Nilai Investasi daerah	263
Grafik III.B.67	Perkembangan Indeks Minat Baca masyarakat	293
Grafik III.B.68	Perkembangan jumlah pengunjung perpustakaan	295
Grafik III.B.69	Perkembangan jumlah buku perpustakaan	297
Grafik III.B.70	Perkembangan lembaga yang menyelenggarakan sistem kearsipan secara baku	299
Grafik III.C.1	Perkembangan Pendapatan Nelayan	305
Grafik III.C.2	Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya	306
Grafik III.C.3	Perkembangan Produktivitas Udang Windu dan Bandeng	308
Grafik III.C.4	Perkembangan nilai tambah produksi hasil olahan perikanan	310
Grafik III.C.5	Perkembangan tingkat konsumsi ikan	311
Grafik III.C.6	Produktivutas tanaman pangan dan hortikultura	315
Grafik III.C.7	Perkembangan produksi daging	317
Grafik III.C.8	Grafik perkembangan produksi telur (kg)	318
Grafik III.C.9	Perkembangan Produksi Susu	319
Grafik III.C.10	Kunjungan Wisatawan	335
Grafik III.C.11	Perkembangan jumlah industri	341
Grafik III.C.12	IKM Berstandarisasi	343
Grafik III.C.13	Grafik Perkembangan Nilai Ekspor non migas	346
Grafik III.C.14	Volume Perdagangan	347
Grafik III.D.1	Perkembangan Nilai SAKIP Kabupaten Sidoarjo	355
Grafik III.D.2	Perkembangan Hasil EKPPD Kabupaten Sidoarjo	357
Grafik III.D.3	Penerimaan Pajak Daerah	398

Grafik III.D.4	Penerimaan BPHTB Tahun 2016 – 2018	399
Grafik III.D.5	Realisasi PPJ Than 2016 – 2018	400
Grafik III.D.6	Realisasi PBB Tahun 2016 - 2018	402
Grafik III.D.7	Rasio Pajak Daerah	405
Grafik III.D.8	Indeks Kepuasan Aparatur	419

BAB I
PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 disusun berdasarkan pada peraturan sebagai berikut :

1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan pemerintahan Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 17 Desember 2018 Nomor : SE.120.04/9803/OTDA tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 – 2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo;

11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
14. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;

B. Gambaran Umum Daerah

1) Kondisi Geografis Daerah

Kabupaten Sidoarjo merupakan satu-satunya Kabupaten di Jawa Timur yang terletak diantara dua sungai besar yaitu sungai Porong (47 Km) dan sungai Surabaya (32,5 Km), sehingga terkenal dengan sebutan kota Delta. Secara geografis letak Kabupaten Sidoarjo adalah antara 112°5' – 112°9' Bujur Timur dan 7°3' – 7°5' Lintang Selatan, dengan batas wilayah :

1. Sebelah Utara : Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik
2. Sebelah Timur : Selat Madura
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Pasuruan
4. Sebelah Barat : Kabupaten Mojokerto.

Secara administratif Kabupaten Sidoarjo terbagi atas 18 Kecamatan, 322 Desa dan 31 Kelurahan. Sementara itu desa-desa di Kabupaten Sidoarjo terbagi menjadi desa pedesaan (*rural area)* dan desa perkotaan (*urban area*).

Tabel I.1

Desa dan Kelurahan per Kecamatan

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan
1.	Sidoarjo	10	14
2.	Buduran	15	-
3.	Candi	24	-
4.	Porong	13	6
5.	Krembung	19	-
6.	Tulangan	22	-

7.	Tanggulangin	19	-
8.	Jabon	15	-
9.	Krian	19	3
10.	Balongbendo	20	-
11.	Wonoayu	23	-
12.	Tarik	20	-
13.	Prambon	20	-
14.	Taman	16	8
15.	Waru	17	-
16.	Gedangan	15	-
17.	Sedati	16	-
18.	Sukodono	19	-
	JUMLAH	**322**	**31**

Sumber Data : Selayang Pandang Sidoarjo

Grafik I.1

Peta Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo

Sumber Data : Selayang Pandang Sidoarjo

Seperti halnya daerah lain yang berada di sekitar garis khatulistiwa, Kabupaten Sidoarjo beriklim tropis dan mengenal 2 musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau berkisar antara Bulan Mei sampai Bulan September dan di Bulan Oktober sampai Bulan April adalah musim hujan. Suhu udara berkisar antara 20 s.d 35 derajat Celsius. Luas wilayah Kabupaten Sidoarjo adalah 71.424,30 Hektar dan berdasarkan karakteristik topografinya terbagi atas tiga kelas, yaitu :

- 0 s.d 3 meter merupakan daerah pantai dan pertambakan yang berair asin / payau berada di belahan timur meliputi 29,99% dari luas wilayah;
- 3 s.d 10 meter merupakan daerah bagian tengah sekitar jalan protokol yang berair tawar meliputi 40,81% dari luas wilayah; dan
- 10 s.d 25 meter terletak di daerah bagian barat meliputi 29,20% dari luas wilayah.

Kondisi air ada dua jenis rasa air di Kabupaten Sidoarjo yaitu air asin dan air tawar, ada 8 kecamatan yang sebagian wilayahnya merupakan jenis air asin dan 10 kecamatan murni air tawar. Penggunaan lahan adalah informasi yang menggambarkan sebaran pemanfaatan lahan yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Pola penggunaan lahan di Kabupaten Sidoarjo dapat diklasifikasikan menjadi 7 (tujuh) jenis penggunaan lahan yaitu permukiman, lahan sawah dan perikanan, pertambangan, industri (gudang, zona industri dan kawasan industri), fasilitas umum, perdagangan dan jasa, serta kawasan khusus militer.

Tabel I.2

Letak, Tinggi, dan Luas Wilayah Menurut Kecamatan Tahun 2018

No.	Kecamatan	Tinggi Rata – Rata (m dpl)	luas Wilayah (Km2)
1	Sidoarjo	4	62.560
2	Buduran	4	41.030
3	Candi	4	40.670
4	Porong	4	29.820
5	Krembung	5	29.550
6	Tulangan	7	31.210
7	Tanggulangin	4	32.290
8	Jabon	2	81.000
9	Krian	12	32.500
10	Balongbendo	20	31.400
11	Wonoayu	4	33.920
12	Tarik	16	36.060
13	Prambon	10	34.230
14	Taman	9	31.540
15	Waru	5	30.320
16	Gedangan	4	24.060
17	Sedati	4	79.430
18	Sukodono	7	32.680
Jumlah			**714.240**

Sumber : Sidoarjo Dalam Angka 2018

Wilayah Kabupaten Sidoarjo juga memiliki kandungan gas bumi yang dibentuk oleh batuan *alluvium* seluas 686,89 Ha tersebar disemua kecamatan, batuan *plistosen fasien sedimen* terdapat di 6 kecamatan, tanah *alluvial* kelabu merata di 18 kecamatan, *assosiasi alluvial* kelabu dan cokelat kekuningan terdapat di 4 kecamatan, yaitu : Krembung, Balongbendo, Tarik, dan Prambon.

Tabel I.3

Luas Wilayah Menurut Kecamatan Berdasarkan Lapisan Batuan

Tahun 2018

No.	Kecamatan	Plistosen Fasien Sedimen (Ha)	Alluvium (Ha)	Jumlah (Ha)
1	Sidoarjo	42,00	6214,00	6256,00
2	Buduran	1.469,00	2.633,50	4.102,50
3	Candi	-	40,67	4.066,75
4	Porong	-	29,82	2.982,25
5	Krembung	-	29,55	2.955,00
6	Tulangan	-	31,21	3.120,50
7	Tanggulangin	-	32,29	3.229,00
8	Jabon	-	81,00	8.099,75
9	Krian	-	32,50	3.250,00
10	Balongbendo	-	31,40	3.140,00
11	Wonoayu	-	33,92	3.392,00
12	Tarik	-	36,06	3.606,00
13	Prambon	-	34,23	3.422,50
14	Taman	448,00	2.705,50	3.153,50
15	Waru	384,00	2.648,00	3.032,00
16	Gedangan	38,00	2.367,75	2.405,75
17	Sedati	355,00	7.588,00	7.943,00
18	Sukodono	-	32,68	3.267,75
Jumlah		**2.736,00**	**24.602,07**	**71.424,25**

Sumber : Sidoarjo Dalam Angka 2018

Tabel I.4

Luas Wilayah Menurut Kecamatan Berdasarkan Lapisan Batuan

Tahun 2018

No.	Kecamatan	Alluvial Kelabu (Ha)	As alluvial klb, coklat kuning (Ha)	Alluvial Hidromort (Ha)	Kelabu Tua (Ha)	Jumlah (Ha)
1	Sidoarjo	2.966,11	-	3.289,89	-	6.256,00
2	Buduran	1.480,02	-	1.853,22	769,26	4.102,50
3	Candi	1.552,88	-	2.513,87	-	4.066,75
4	Porong	2.083,07	-	899,18	-	2982,25

No.	Kecamatan	Alluvial Kelabu (Ha)	As alluvial klb, coklat kuning (Ha)	Alluvial Hidromort (Ha)	Kelabu Tua (Ha)	Jumlah (Ha)
5	Krembung	2.500,95	454,05	-	-	2.955,00
6	Tulangan	3.120,50	-	-	-	3.120,50
7	Tanggulangin	1.564,77	-	1.664,23	-	3.229,00
8	Jabon	2.580,20	-	5.519,55	-	8.099,75
9	Krian	3.250,20	-	-	-	3.250,00
10	Balongbendo	3.250,00	2.795,55	-	-	3.140,00
11	Wonoayu	3.392,00	-	-	-	3.392,00
12	Tarik	2.618,93	987,07	-	-	3.606,00
13	Prambon	2.688,94	733,56	-	-	3.422,50
14	Taman	3.153,50	-	-	-	3.153,50
15	Waru	2.020,67	-	1.011,33	-	3.032,00
16	Gedangan	2.304,31	-	-	101,44	2.405,75
17	Sedati	3.333,04	-	4.609,96	-	7.943,00
18	Sukodono	3.267,75	-	-	-	3.267,75
Jumlah		**47.017,64**	**4.970,23**	**21.361,23**	**870,70**	**71.424,25**

Sumber : Sidoarjo Dalam Angka 2018

Kondisi air tanah di Kabupaten Sidoarjo antara 0 – 5 meter di bawah permukaan tanah. Daerah banjir terbagi menjadi tiga, banjir karena hujan tersebar di 13 (tiga belas) kecamatan, banjir periodik di sebagian 5 (lima) kecamatan, dan banjir karena air pasang berada di sebagian 4 (empat) kecamatan.

Tabel I.5

Luas Wilayah Menurut Kecamatan Berdasarkan Kondisi Air Tahun 2018

No	Kecamatan	Daerah Air Asin	Daerah Banjir			Air Tanah 0 – 5 M
			Setelah Hujan	Periodik	Air Pasang	
1	Sidoarjo	4.063,62	308,14	-	-	6.256,00
2	Buduran	1.822,50	17,50	-	701,75	4.102,50
3	Candi	667,25	491,30	-	-	4.066,75
4	Porong	-	14,26	75,50	-	2.982,25
5	Krembung	-	17,00	12,00	-	2.955,00
6	Tulangan	-	48,00	-	-	3.120,50
7	Tanggulangin	640,75	21,25	-	-	3.229,00
8	Jabon	4.080,75	216,05	27,00	456,00	8.099,75
9	Krian	-	265,75	-	-	3.250,00
10	Balongbendo	-	30,00	-	-	3.140,00
11	Wonoayu	-	71,50	-	-	3.392,00
12	Tarik	-	8,75	-	-	3.606,00
13	Prambon	-	64,25	-	-	3.422,50
14	Taman	-	-	108,00	-	3.153,50

No	Kecamatan	Daerah Air Asin	Daerah Banjir			Air Tanah 0 – 5 M
			Setelah Hujan	Periodik	Air Pasang	
15	Waru	740,50	-	-	740,50	3.032,00
16	Gedangan	195,75	-	-	-	2.405,75
17	Sedati	4.101,57	-	387,90	120,30	7.943,00
18	Sukodono	-	-	-	-	3.267,75
Total		**16.312,67**	**1.573,75**	**610,40**	**2.018,55**	**71.424,25**

Sumber : Sidoarjo Dalam Angka 2018

Seperti halnya daerah lain yang berada di sekitar garis khatulistiwa, Kabupaten Sidoarjo beriklim tropis dan mengenal 2 (dua) musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Rata-rata curah hujan tertinggi pada bulan Februari dan terendah di bulan Agustus.

Tabel I.6

Jumlah Curah Hujan (mm) di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018

No	Lokasi Penakar Hujan	BULAN											
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Sumput	23.0	20.8	25.4	20.4	8	6	5	-	1	3	10	13
2	Banjar Kemantren	23.0	17.3	10.2	15.8	8	5	4	-	-	3	14	16
3	Durungbedug	15.3	22.6	13.3	16.5	6	5	4	-	-	4	16	17
4	Porong	13.8	17.1	16.0	16.8	5	1	4	-	2	3	14	20
5	Krembung	17.6	22.6	4.0	25.1	3	2	2	-	-	2	14	24
6	Kludan	13.4	16.2	1.0	22.3	5	1	3	-	-	1	18	18
7	Kedung Cangkring	10.9	13.9	3.0	18.2	5	-	4	-	-	3	16	12
8	Krian	14.4	24.9	26.2	20.0	4	2	5	-	1	3	13	22
9	Bakalan	17.3	23.1	40.3	13.3	3	1	3	-	1	4	11	21
10	Ketintang	16.4	16.7	18.8	13.9	3	6	5	-	1	1	16	20
11	Cepiples	12.7	14.3	17.1	11.8	8	9	5	-	2	3	10	19
12	Prambon	13.4	19.3	17.2	23.4	8	8	5	-	2	3	10	19
13	Ketegan	14.5	14.0	22.8	16.6	11	7	4	-	3	3	20	27
14	Bono	14.8	8.1	7.6	9.4	12	5	4	-	1	2	10	18
15	Sruni	25.6	14.6	13.3	16.9	1	11	5	-	2	2	18	20
16	Sedati	17.0	12.0	13.0	15.1	9	2	4	-	-	1	12	25
17	Karang Nongko	19.7	19.9	13.9	17.0	7	4	4	-	2	4	14	23
18	Kemlaten	14.3	30.3	22.4	17.2	1	1	2	-	1	2	11	26
19	Luwung	11.2	12.9	21.5	11.0	8	9	5	-	2	3	10	24
20	Ketawang	11.0	19.3	16.8	10.8	8	7	4	-	2	2	17	14
21	Botokan	19.5	23.7	13.0	9.4	9	9	4	-	1	4	18	14
22	Ponokawan	16.5	22.4	1.2	10.8	7	3	3	-	1	2	4	22
23	Putat	15.4	12.6	10.0	23.8	3	-	1	-	-	-	16	-
24	Sidoarjo	17.5	18.2	-	-	-	-	4	-	-	1	-	16
25	Klagen	14.8	11.6	9.9	9.6	6	5	3	-	-	3	13	14
26	Gedangrowo	13.7	15.2	14.7	18.9	8	8	5	-	2	3	10	15
27	Budug Bulus	15.6	20.5	11.0	9.9	2	-	1	-	-	1	17	15
28	Watu Tulis	20.2	29.7	31.5	27.7	1	1	4	-	1	1	12	13

No	Lokasi Penakar Hujan	BULAN											
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
29	Pertapan Maduretno	17.4	27.5	19.2	7.3	3	3	4	-	1	2	15	13
30	Lengkong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rata-Rata		**16.2**	**18.7**	**15.0**	**15.5**	**5.6**	**4.2**	**3.8**	**0.0**	**1.0**	**2.4**	**13.5**	**18.0**

Sumber : Sidoarjo Dalam Angka 2018

2) Gambaran Umum Demografis

Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Berdasarkan laporan perkembangan penduduk bulan Desember tahun 2018, penduduk Kabupaten Sidoarjo berjumlah 2.238.069 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk 1,62% pertahun, dengan menempati urutan ke – 4 (keempat) se – Jawa Timur setelah Kota Surabaya, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Jember. Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo dapat digambarkan sebagaimana grafik berikut :

Grafik I.2

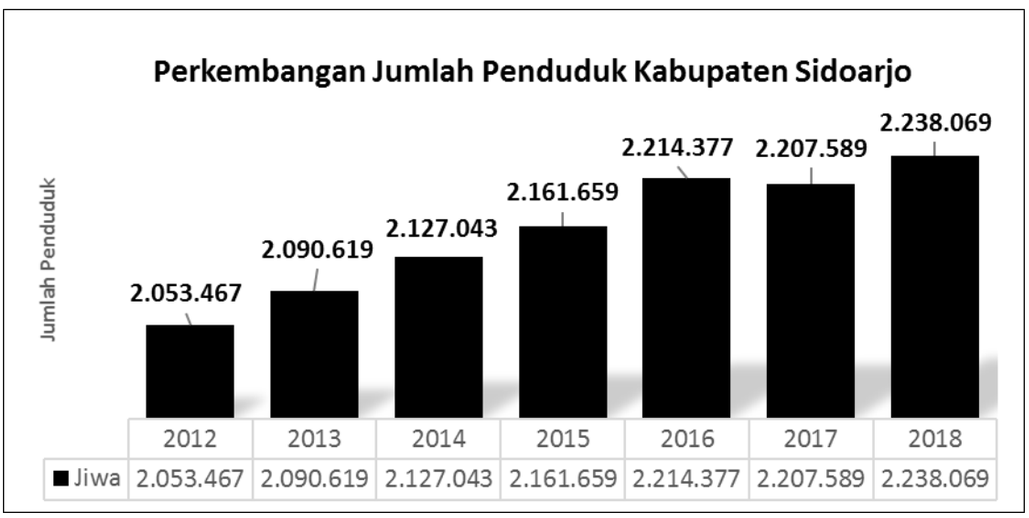

Sumber data : SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sedangkan berdasarkan jumlah penduduk per kecamatan, kecamatan Waru memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu 239.348 jiwa, sedangkan kecamatan Jabon memiliki jumlah penduduk terkecil yaitu 60.659 jiwa. Jumlah penduduk per Kecamatan menurut jenis kelamin berdasarkan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terlihat sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel I.7

Penduduk Per Kecamatan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2018

NO	KECAMATAN	LAKI LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	WARU	119,737	119,611	239,348
2	TAMAN	118,360	114,987	233,347
3	SIDOARJO	112,668	113,093	225,761
4	CANDI	83,326	82,226	165,552
5	KRIAN	69,884	67,934	137,818
6	GEDANGAN	67,564	65,958	133,522
7	SUKODONO	66,283	63,773	130,056
8	SEDATI	55,742	54,089	109,831
9	BUDURAN	53,699	52,541	106,240
10	TANGGULANGIN	53,445	52,558	106,003
11	TULANGAN	53,067	52,383	105,450
12	WONOAYU	44,882	44,327	89,209
13	PORONG	43,175	42,615	85,790
14	PRAMBON	42,529	41,566	84,095
15	BALONGBENDO	40,217	39,157	79,374
16	KREMBUNG	37,476	37,230	74,706
17	TARIK	35,877	35,431	71,308
18	JABON	30,437	30,222	60,659

Sumber Data : SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sedangkan berdasarkan struktur usia penduduk Kabupaten Sidoarjo membentuk Piramida jenis piramida muda (expansive), dimana sebagian besar penduduk berada dalam kelompok umur muda. Sidoarjo saat ini dalam bonus demografi dimana angka *dependency ratio* sebesar 18,91. Artinya orang usia produktif menanggung kurang dari 19 orang tidak produktif. Hal tersebut memberikan dampak positif bagi daerah karena tingkat produktifitas suatu wilayah akan jauh lebih tinggi karena banyaknya usia muda dan sedikitnya usia tua. Penduduk di Kabupaten Sidoarjo terbanyak berada di golongan usia produktif, yaitu antara 35 tahun sampai dengan 39 tahun.

Grafik I.3

Komposisi Penduduk Menurut Usia Tahun 2018

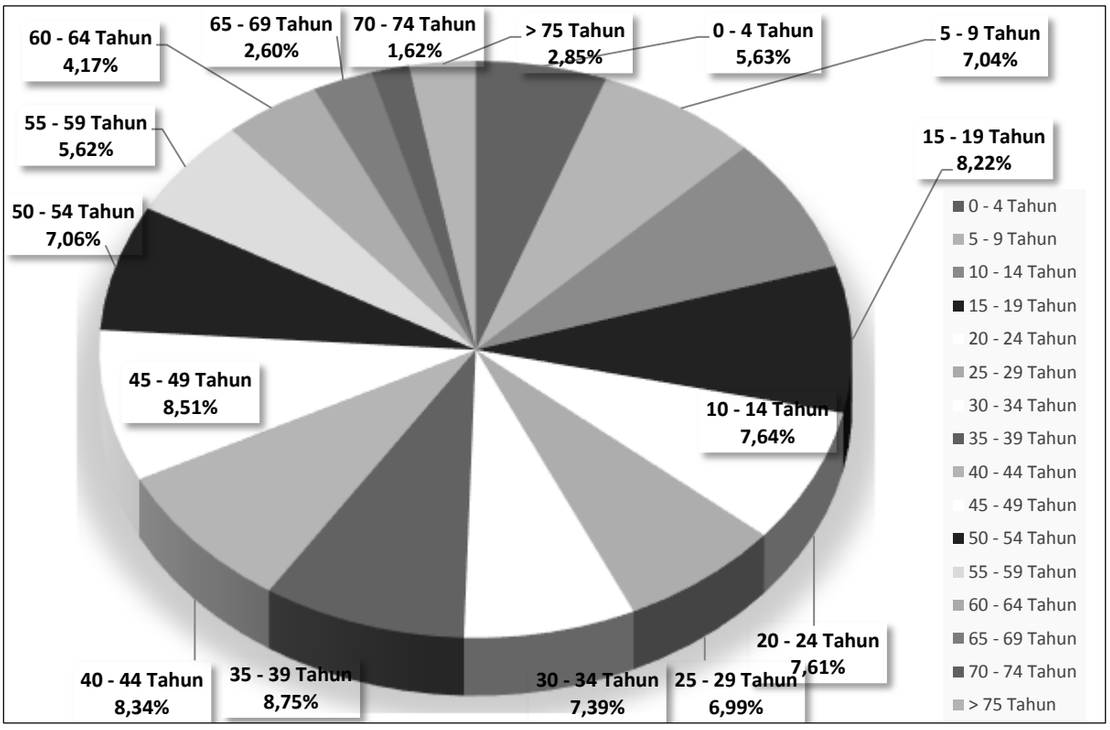

Sumber Data : SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel I.8

Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2018

NO	STRUKTUR UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1.	0 - 4	65,104	60,836	**125,940**
2.	5 - 9	81,366	76,116	**157,482**
3.	10 - 14	88,494	82,383	**170,877**
4.	15 - 19	94,910	88,995	**183,905**
5.	20 - 24	87,132	83,114	**170,246**
6.	25 - 29	79,699	76,827	**156,526**
7.	30 - 34	83,683	81,638	**165,321**
8.	35 - 39	96,939	98,784	**195,723**
9.	40 - 44	91,850	94,808	**186,658**
10.	45 - 49	94,601	95,749	**190,350**
11.	50 - 54	79,013	78,905	**157,918**
12.	55 - 59	62,711	63,070	**125,781**
13.	60 - 64	49,121	44,112	**93,233**
14.	65 - 69	29,952	28,162	**58,114**
15.	70 - 74	16,338	19,878	**36,216**
16.	>75	27,455	36,324	**63,779**
TOTAL		1,128,368	1,109,701	2,238,069

Sumber Data : SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sedangkan apabila dilihat dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin, terbanyak adalah penduduk laki-laki yaitu 1.128.368 jiwa atau 50,42%, sedangkan penduduk perempuan yaitu 1.094.701 jiwa atau 49,58%. Hal tersebut dapat dijelaskan melalui tabel dan grafik berikut :

Grafik I.4

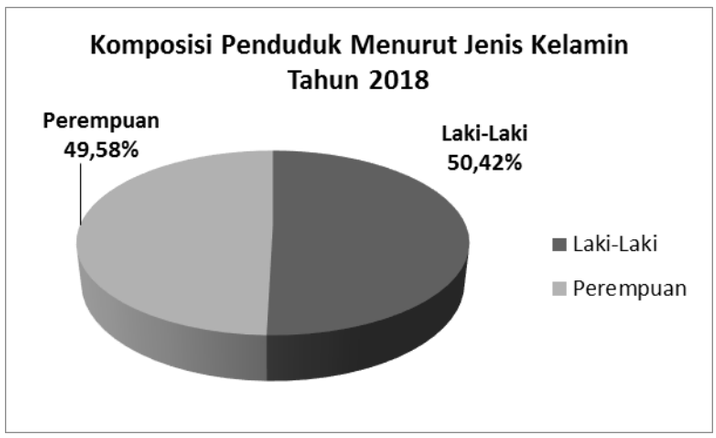

Sumber : SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sedangkan untuk komposisi penduduk Kabupaten Sidoarjo berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I.9

Penduduk Menurut Mata Pencaharian Tahun 2018

NO.	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH	NO.	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	689,009	45.	USTADZ/MUBALIGH	126
2	MENGURUS RUMAH TANGGA	114,167	46.	JURU MASAK	29
3	PELAJAR/MAHASISWA	367,885	47.	PROMOTOR ACARA	0
4	PENSIUNAN	18,506	48.	ANGGOTA DPR RI	5
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	32,852	49.	ANGGOTA DPD RI	2
6	TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)	18,395	50.	ANGGOTA BPK	4
7	KEPOLISIAN RI (POLRI)	5,897	51.	PRESIDEN	0
8	PERDAGANGAN	25,528	52.	WAKIL PRESIDEN	0
9	PETANI/PEKEBUN	49,110	53.	ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI	2
10	PETERNAK	49	54.	ANGGOTA KABINET KEMENTRIAN	0
11	NELAYAN/PERIKANAN	894	55.	DUTA BESAR	1
12	INDUSTRI	181	56.	GUBERNUR	0

13	KONSTRUKSI	198	57.	WAKIL GUBERNUR	0
14	TRANSPORTASI	205	58.	BUPATI	1
15	KARYAWAN SWASTA	781,140	59.	WAKIL BUPATI	1
16	KARYAWAN BUMN	6,091	60.	WALIKOTA	0
17	KARYAWAN BUMD	545	61.	WAKIL WALIKOTA	1
18	KARYAWAN HONORER	650	62.	ANGGOTA DPRD PROP.	1
19	BURUH HARIAN LEPAS	3,004	63.	ANGGOTA DPRD KAB./KOTA	19
20	BURUH TANI/PERKEBUNAN	2,075	64.	DOSEN	3,048
21	BURUH NELAYAN/PERIKANAN	238	65.	GURU	21,402
22	BURUH PETERNAKAN	22	66.	PILOT	35
23	PEMBANTU RUMAH TANGGA	514	67.	PENGACARA	126
24	TUKANG CUKUR	24	68.	NOTARIS	89
25	TUKANG LISTRIK	73	69.	ARSITEK	39
26	TUKANG BATU	1,079	70.	AKUNTAN	19
27	TUKANG KAYU	230	71.	KONSULTAN	70
28	TUKANG SOL SEPATU	28	72.	DOKTER	1,544
29	TUKANG LAS/PANDAI BESI	99	73.	BIDAN	1,255
30	TUKANG JAHIT	450	74.	PERAWAT	2,221
31	TUKANG GIGI	5	75.	APOTEKER	168
32	PENATA RIAS	49	76.	PSIKIATER/PSIKOLOG	15
33	PENATA BUSANA	7	77.	PENYIAR TELEVISI	1
34	PENATA RAMBUT	43	78.	PENYIAR RADIO	6
35	MEKANIK	248	79.	PELAUT	246
36	SENIMAN	64	80.	PENELITI	8
37	TABIB	18	81.	SOPIR	3,698
38	PARAJI	3	82.	PIALANG	6
39	PERANCANG BUSANA	7	83.	PARANORMAL	12
40	PENTERJEMAH	5	84.	PEDAGANG	14,965
41	IMAM MASJID	6	85.	PERANGKAT DESA	2,369
42	PENDETA	208	86.	KEPALA DESA	282
43	PASTOR	7	87.	BIARAWAN/BIARAWATI	18
44	WARTAWAN	171	88.	WIRASWASTA	65,814
			89.	PEKERJAAN LAINNYA	442
				JUMLAH	**2,238,069**

Sumber Data : SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa mata pencaharian terbesar adalah penduduk yang memiliki mata pencaharian sebagai karyawan swasta, sebesar 34,90%. Posisi kedua adalah penduduk yang bekerja sebagai wiraswasta, yaitu sebesar 2,94%, sedangkan posisi ketiga petani/pekebun sebesar 2,19%, yang berkutat pada bisnis perdagangan sebesar 1,14%, dan pedagang sebesar 0,69%. Komposisi penduduk

menurut mata pencaharisan ini tidak lepas dari struktur ekonomi Kabupaten Sidoarjo yang bertumpu pada sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan.

3) Kondisi Ekonomi

Angka PDRB Kabupaten Sidoarjo Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) selama kurun waktu tiga tahun terakhir adalah masing – masing 16.080,89 milyar rupiah, 160.020,65 milyar rupiah, dan 174.280,09 milyar rupiah.

Sementara angka PDRB Kabupaten Sidoarjo Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010, selama kurun waktu tiga tahun terakhir masing – masing 112.012,86 milyar rupiah, 118.179,19 milyar rupiah, dan 125.039,06 milyar rupiah.

Peranan sektoral terhadap pembentukan PDRB ADHB menurut lapangan usaha tahun 2018, terbesar pada kategori industri pengolahan 46,08%, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 16,15%. Sedangkan distribusi yang terendah pada kategori pengadaan air dan pengolahan sampah, limbah dan daur ulang yaitu sebesar 0,06%.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo terutama didukung oleh ppertumbuhan pada kategori penyediaan akomodasi dan amakan minum sebesar 7,98%, konstruksi 7,06%, serta informasi dan komunikasi 7,05%.

Rincian PDRB per sektor tahun 2018 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel I.10

PDRB KABUPATEN SIDOARJO Tahun 2018

NO	SEKTOR	Harga Berlaku	Harga Konstan
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4.055.643,40	2.654.505,09
2	Pertambangan dan Penggalian	159.920,40	151.053,31
3	Industri Pengolahan	80.314.622,80	61.596.911,10
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1.798.007,40	1.148.319,71
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	112.907,10	96.739,85
6	Konstruksi	16.006.572,00	11.538.528,64

7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi	28.139.685,50	20.271.721,91
8	Transportasi dan Pergudangan	21.275.283,40	10.401.337,23
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.013.345,70	4.344.217,83
10	Informasi dan Komunikasi	6.094.635,40	5.494.447,47
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.183.943,90	1.490.045,32
12	Real Estate	1.564.212,20	1.198.694,50
13	Jasa Perusahaan	275.386,80	197.605,47
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan	3.113.755,80	2.118.372,64
15	Jasa Pendidikan	2.024.850,70	1.451.228,79
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	533.989,50	407.266,33
17	Jasa Lainnya	613.325,00	478.061,17
	TOTAL	**174.280.087,00**	**125.039.056,37**

Sumber data : Sidoarjo Dalam Angka 2018

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa PDRB Kabupaten Sidoarjo tahun 2018 berdasarkan ADHK dan ADHB terdapat sektor yang menonjol memberikan sumbangan paling besar terhadap PDRB yaitu sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan. Berikut *share* PDRB Kabupaten Sidoarjo per sektor, sebagaimana grafik :

Grafik I.5

***Share* PDRB**

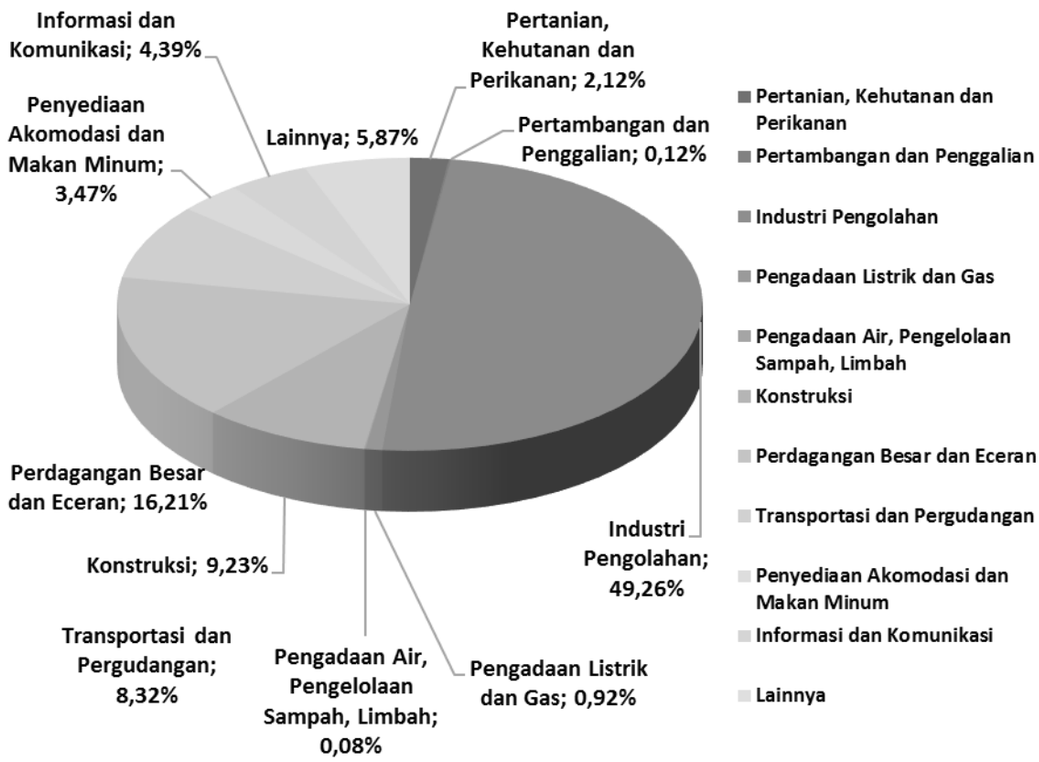

Sumber data : Sidoarjo Dalam Angka 2018

4) Sektor Potensial Daerah

Lokasi Kabupaten Sidoarjo yang strategis di kawasan GERBANG KERTASUSILA merupakan sebuah wilayah di Provinsi Jawa Timur yang mempunyai beberapa faktor pendukung diantaranya infrastruktur dan utilitas yang baik (jalan, bandara, terminal, telekomunikasi, dan sebagainya), serta sebagai kota industri, perdagangan dan jasa yang didukung dengan kegiatan perikanan dan pertanian yang maju.

Potensi unggulan Kabupaten Sidoarjo merupakan potensi yang dapat dikembangkan dan mempunyai daya saing, baik karena ciri-cirinya yang khas, kualitasnya, maupun harganya yang kompetitif. Disamping itu juga, potensi unggulan tersebut berasal dari pemanfaatan potensi yang berasal dari sumber daya alam dan kekayaan budaya lokal yang potensial untuk ditumbuh kembangkan.

Potensi unggulan Kabupaten Sidoarjo mencakup berbagai sektor antara lain :

a. Sektor Industri Pengolahan

Perkembangan Industri di Kabupaten Sidoarjo, dapat terlihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel I.11
Perkembangan Industri di Kabupaten Sidoarjo

NO	KECAMATAN	Industri Besar	Industri Sedang	JUMLAH
1	TARIK	2	5	7
2	PRAMBON	2	10	12
3	KREMBUNG	4	20	24
4	PORONG	5	26	31
5	JABON	5	31	36
6	TANGGULANGIN	16	30	46
7	CANDI	18	50	68
8	TULANGAN	3	28	31
9	WONOAYU	13	25	38
10	SUKODONO	6	18	24
11	SIDOARJO	13	39	52
12	BUDURAN	23	37	60
13	SEDATI	12	11	23
14	WARU	62	144	206
15	GEDANGAN	42	55	97
16	TAMAN	45	76	121
17	KRIAN	11	34	45
18	BALONGBENDO	15	40	55
		297	**679**	**976**

Sumber data : Sidoarjo Dalam Angka 2018

b. Sektor Perdagangan

Bentuk nyata usaha Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menggali potensi unggulan sektor perdagangan adalah dengan dicanangkannya beberapa sentra usaha antara lain :

1. Kampoeng Batik Tulis di Desa Jetis Kecamatan Sidoarjo
2. Kampoeng Sepatu dan Sandal di Desa Mojosantren Kecamatan Krian
3. Kampoeng Bebek dan Telur Asin di Desa Kebonsari Kecamatan Candi
4. Kampoeng Lele Kedungbocok di Desa Kedungbocok Kecamatan Tarik

5. Kampoeng Pot Bunga di Desa Kemangsen Kecamatan Balongbendo
6. Kampoeng Jamur di Desa Wadungasih Kecamatan Buduran
7. Kampoeng Jajanan di Desa Kedungsumur Kecamatan Krembung
8. Kampoeng Kerupuk di Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon
9. Kampoeng Olahan ikan di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati
10. Sentra Tas dan Koper di Desa Kedensari dan Desa Kludan Kecamatan Tanggulangin
11. Kerajinan Bordir di Desa Ketegan, Desa Boro dan Desa Kalidawir Kecamatan Tanggulangin
12. Kerajinan Logam di Desa Ngingas Kecamatan Waru.

c. Sektor Pertanian

Potensi unggulan di sektor pertanian meliputi berbagai komoditas yang patut dijadikan unggulan karena mempunyai peran yang cukup besar terhadap perekonomian daerah, produksi komoditas tersebut terdiri dari :

Tabel I.12

Perkembangan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (Kw)

JENIS/ TAHUN	2016	2017	2018
Padi	2.186.310	2.058.900	2.044.800
Jagung	7.170	11.788	12.905
Kacang Hijau	15.702	15.704	21.455
Kedelai	9.350	9.716	6.020

Sumber Data : Dinas Pangan dan Pertanian

Perkembangan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura sebagaimana terlihat pada grafik berikut ini :

Grafik I.6

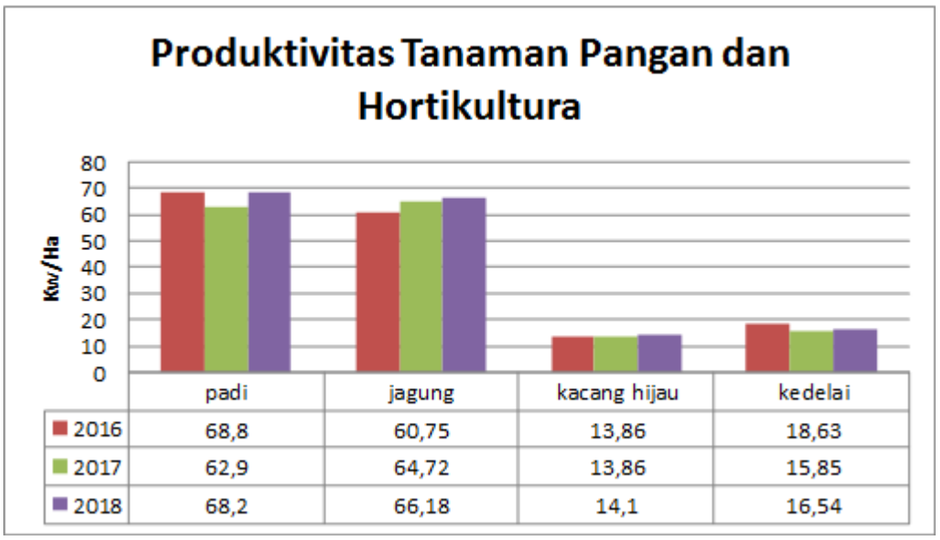

Sumber Data : Dinas Pangan dan Pertanian

d. Sektor Perikanan

Pada sektor perikanan di Kabupaten Sidoarjo mengandalkan udang dan bandeng sebagai komoditas unggulan yang dijadikan lambang Kabupaten Sidoarjo. Berikut perkembangan produksi perikanan budidaya di Kabupaten Sidoarjo :

Grafik I.7

Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya

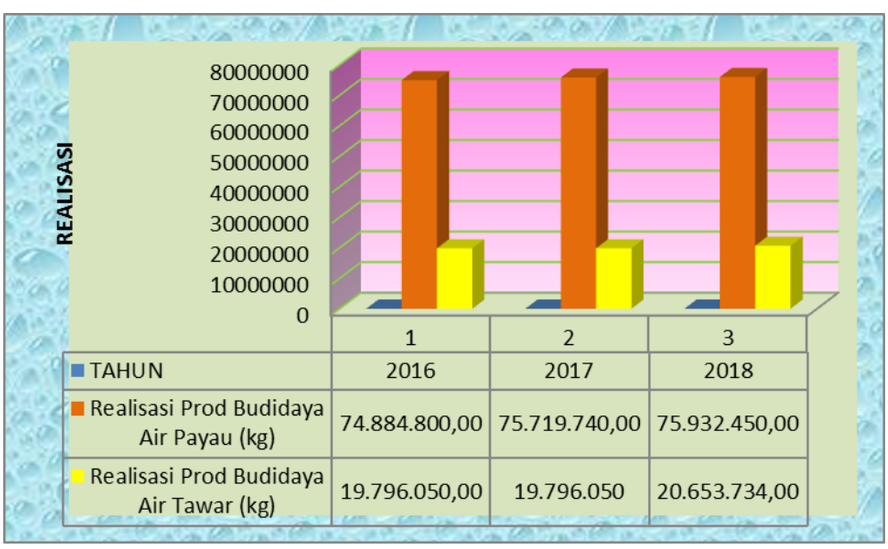

Sumber Data : Dinas Perikanan

Sedangkan produktivitas dari komoditas unggulan udang dan bandeng, sebagai berikut :

Grafik I.8

Sumber Data : Dinas Perikanan

e. Sektor Pariwisata

Kabupaten Sidoarjo mempunyai potensi yang cukup besar dalam mengembangkan sektor pariwisata, terlihat dari peningkatan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang semakin meningkat tiap tahunnya, dengan potensi obyek wisata, sebagai berikut :

Tabel I.13

Obyek Wisata di Kabupaten Sidoarjo

Wisata Alam : 4 Obyek
1. Pantai Kepetingan 2. Pantai Pucukan 3. Pantai Gesik Cemandi 4. Dermaga Tlocor dan Pulau LUSI

Wisata Minat Khusus dan Belanja : 11 Obyek
1. Industri Tas & Koper (INTAKO) 2. Sepatu Sandal Wedoro 3. Gedung Olah Raga (GOR) 4. Bursa Kupang dan Tanaman Hias Gedangan 5. Bandara Ir. Juanda 6. Glass Painting Lukisan Kaca 7. Kerajinan Emas dan Perak 8. Kerajinan Wayang Kulit 9. Kerajinan Batik Kenongo 10.Kerajinan Batik Jetis 11.Alun-Alun Sidoarjo
Wisata Sejarah : 18 Obyek
1. Museum Negeri Mpu Tantular 2. Monumen R.M. Mangundiprojo 3. Mounumen Perjuangan Rakyat Sidoarjo 4. Monumen Pesawat TNI-AL 5. Monumen Ponti XV-2000 6. Gedung Joang 45 Sidoarjo 7. Rumah Induk Bupati Sidoarjo 8. Stasiun Kereta Api Sidoarjo 9. Stasiun Kereta Api Gedangan 10.Stasiun Kereta Api Porong 11.Masjid Al.Abror 12.Masjid Agung Sidoarjo 13.13.Masjid Jami'Jetis 14.Klenteng Krian 15.Bekas PG Tanggulangin 16.PG.Tulangan 17.PG.Gula Watoetoelis 18.PG.Gula Krembung
Wisata Cagar Budaya : 20 Obyek
1. Candi Pari 2. Candi Sumur 3. Candi Darmo 4. Candi Pamotan 5. Candi Lemah Dhuwur 6. Candi Medalem dan Sumur kuno 7. Candi Tawang Alun 8. Candi Klagen 9. Situs Medowo 10.Situs Patar Kidul 11.Situs Kedung Klinter 12.Situs Watu Tulis 13.Situs Terung Wetan 14.Situs Candi Wangkal 15.Bakalan Prasasti 16.Prasasti Kemlagian 17.Prasasti Lingga 18.Prasasti Peripih 19.Fragmen Arca 20.Struktur Situs Plawangan

Wisata Religi : 2 Obyek
1. Makam Putri Ayu Dewi Sekardadu 2. Makam Mbah Ud
Wisata Geologi : 1 Obyek
1. Lumpur Sidoarjo
Wisata Edukasi : 1 Obyek
1. Alas Prambon

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1. Indeks Good Governance

Untuk memastikan berjalannya pemerintahan yang baik dan transparan sebagai prinsip pengelolaan tata kelola pemerintahan yang baik, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan menerapkan penilaian kinerja pemerintahan dengan mengukur indeks good governance. Tujuan menghitung indeks good governance adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi yang lebih akurat tentang kapasitas Pemda
2. Menjadi informasi bagi Pemda dalam mengukur daya saing dan keunggulan daerah
3. Menjadi salah satu bentuk dari pertanggung jawaban (akuntabilitas) Pemerintah Daerah terhadap stakeholders di daerah
4. Menjadi informasi bagi pihak swasta dalam membangun kerjasama dan atau kerjasama di daerah
5. Menjadi salah satu indikasi makro keberhasilan pembangunan yang dapat dikomparasi dengan daerah lainya

Pengukuran indikator indeks good governance yang diterapkan menggunakan indikator dari delapan prinsip good governance yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara, diantaranya :

1. Taat Hukum;
2. Partisipasi
3. Daya Tanggap
4. Transparansi
5. Akuntabilitas
6. Kesetaraan
7. Efektifitas dan Efisiensi

8. Visi Strategis

Berikut perkembangan Indeks Good Governance di Kabupaten Sidoarjo :

Grafik I.9

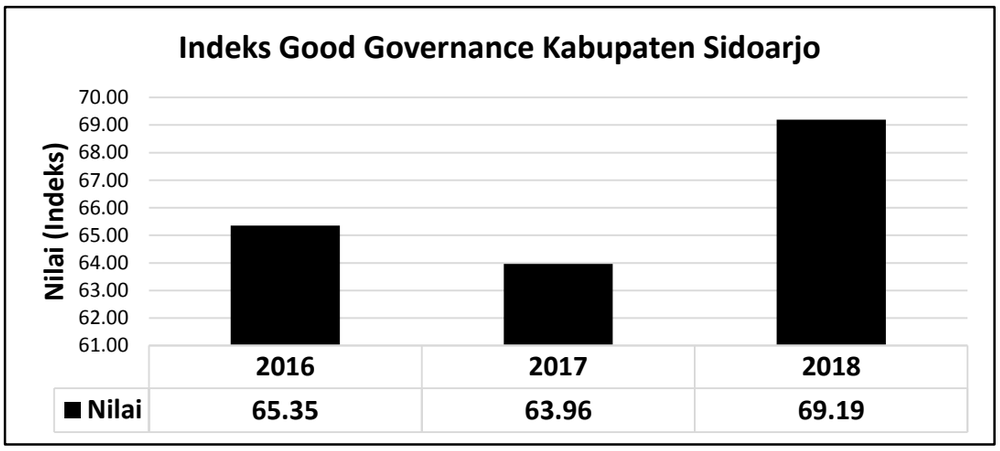

Sumber Data : Bappeda Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa Indeks Good Governance Kabupaten Sidoarjo meningkat dari tahun sebelumnya, hal ini menunjukkan bahwa sistem manajemen pemerintahan di Kabupaten Sidoarjo sudah lebih akuntabel. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2018 sebesar 67.33 maka tercapai hingga 102.76%. Nilai Indeks Good Governance 69.19 menggambarkan bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Sidoarjo berada pada kategori Baik. Berikut range / skala kategori dari Indeks Good Governance :

Nilai	Kategori
40.00 – 59.99	Buruk
60.00 – 79.99	Baik
80.00 – 100.00	Sangat Baik

2. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi birokrasi merupakan salah satu ukuran untuk mengetahui upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelangggaraan pemerintah dimana uang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi

menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Terdapat delapan area perubahan dalam reformasi birokrasi, yaitu :

1. Organisasi
2. Tata Laksana
3. Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur
4. Peraturan Perundang – Undangan
5. Pengawasan
6. Akuntabilitas
7. Pelayanan Publik
8. Budaya Kerja Aparatur

Berikut perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi di Kabupaten Sidoarjo :

Grafik I.10

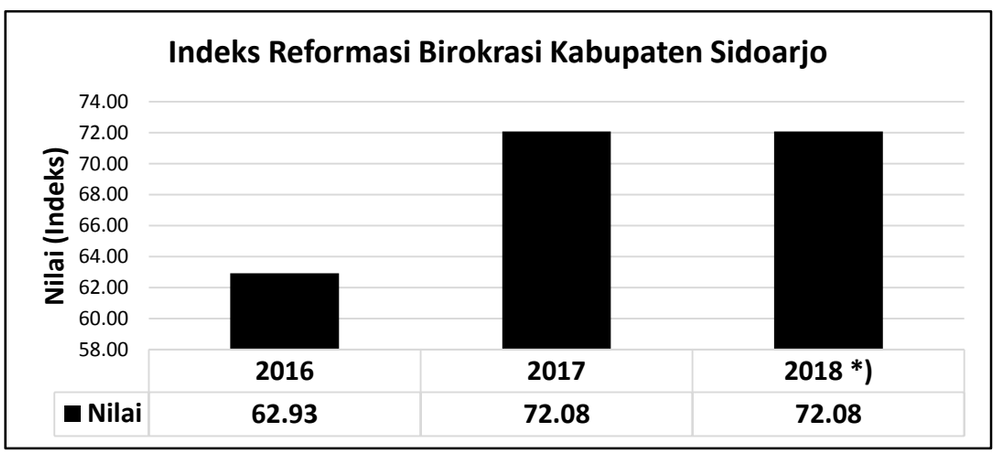

Sumber Data : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sidoarjo

Untuk penilaian Indeks Reformasi Birokrasi di tahun 2018 masih dalam tahap evaluasi, sehingga belum didapatkan hasilnya, namun seiring dengan meningkatnya hasil evaluasi akuntabilitas, pelayanan publik, integritas dan indeks profesionalitas, diharapkan mampu meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di Kabupaten Sidoarjo.

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2018 dengan nilai 73, maka tercapai 98,74% dari target. Sedangkan berdasarkan range kategori, maka

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sidoarjo masuk dalam kategori Sangat Baik.

3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu wilayah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.

Pertumbuhan Ekonomi dapat diukur berdasarkan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) suatu daerah. Perkembangan PDRB di Kabupaten Sidoarjo berdasarkan ADHK 2010 mengalami fase peningkatan, dimana dipengaruhi terutama oleh sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan.

Berikut perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sidoarjo :

Grafik I.11

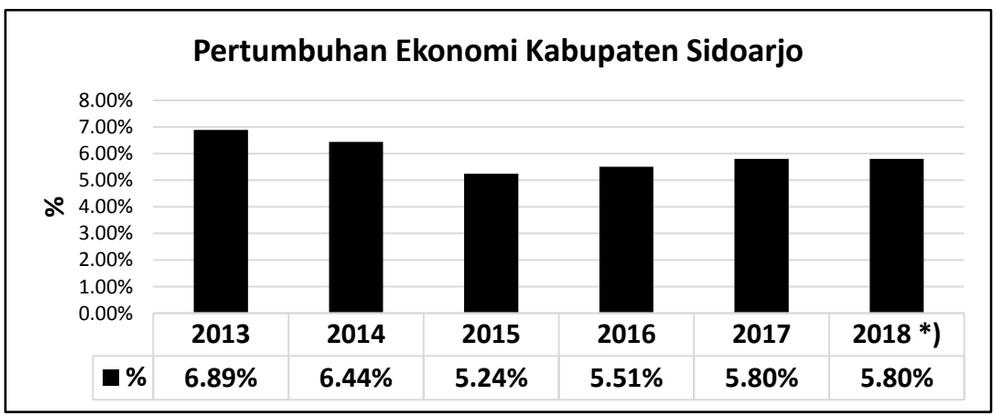

Sumber Data : BPS Kabupaten Sidoarjo

Dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa kondisi perekonomian Kabupaten Sidoarjo selalu membaik, dan diharapkan dapat bertahan sampai dengan akhir masa jabatan tahun 2021, dengan akselerasi sektor potensial daerah. Untuk persentase pertumbuhan ekonomi di tahun 2018 masih belum dapat diketahui, karena masih dalam tahap finalisasi survey. Namun apabila dibandingkan dengan target tahun 2018 sebesar 5,65% maka capaian sementara di tahun 2018 sudah memenuhi target. Sedangkan apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur yang

mencapai 5,45% dan pertumbuhan ekonomi Nasional yang mencapai 5,07%, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo masih berada diatas rata – rata Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

4. Indeks GINI

Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama.

Berikut perkembangan Disparitas (Indeks GINI) di Kabupaten Sidoarjo :

Grafik I.12

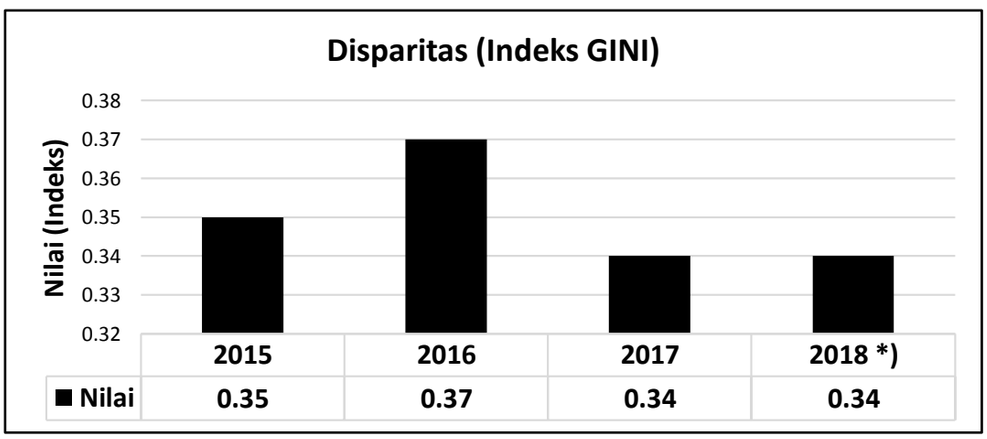

Sumber Data : BPS Kabupaten Sidoarjo

Gini rasio memiliki nilai antara 0 dan 1 (digunakan dalam bahasan ini), atau jika dalam persen maka nilainya antara 0 dan 100 persen. Berdasarkan nilai Gini rasio, terdapat 3 (tiga) kelompok ketimpangan, tinggi jika koefisien gini bernilai 0,50 atau lebih, sedang jika nilainya diantara 0,36-0,49 dan rendah jika kurang dari 0,36.

Perkembangan Indeks GINI di Kabupaten Sidoarjo masih berada dalam kisaran rendah, dimana telah dilakukan upaya pemerataan pembangunan infrastruktur untuk Sidoarjo wilayah barat dan wilayah timur, salah satunya adalah infrastruktur kesehatan yaitu Rumah Sakit di wilayah barat. Selain itu juga pembangunan infrastruktur irigasi dan jalan penghubung, sehingga usaha ekonomi masyarakat di semua wilayah di Kabupaten Sidoarjo dapat terhubung dengan baik, untuk mengurangi angka kesenjangan.

Untuk capaian tahun 2018 masih dalam proses finalisasi pengukuran, namun apabila dibandingkan dengan target tahun 2018 sebesar 0.37 maka capaian di tahun 2018 sudah melampaui target. Sedangkan apabila dibandingkan dengan Indeks GINI Provinsi Jawa Timur yang bernilai 0.39, maka capaian Indeks GINI Kabupaten Sidoarjo masih lebih baik.

5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) merupakan indeks komposit sederhana yang menjelaskan bagaimana penduduk suatu wilayah dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

UNDP menggunakan IPM ini sejak tahun 1990. Sebagai alat ukur tunggal dan sederhana, IPM sangat cocok sebagai alat ukur kualitas hidup dan kinerja pembangunan, khususnya pembangunan manusia yang dilakukan di suatu wilayah pada waktu tertentu atau secara lebih spesifik IPM merupakan alat ukur kinerja dari pemerintahan suatu wilayah.

Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup :

1. Umur Panjang dan Hidup Sehat (*a long and helaty life*)

   Dimensi ini dicerminkan oleh Angka Harapan Hidup (*life expectancy at age*)
2. Pengetahun (*knowledge*)

   Dimensi ini dicerminkan oleh dua kriteria, yaitu :

   a. Harapan Lama Sekolah (HLS)

   b. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
3. Standar Hidup Layak (*decent dtandard of living*)

   Dimensi ini dicerminkan oleh PDB per kapita. BPS merefleksikan dimensi ini melalui pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Berikut perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Sidoarjo :

Grafik I.13

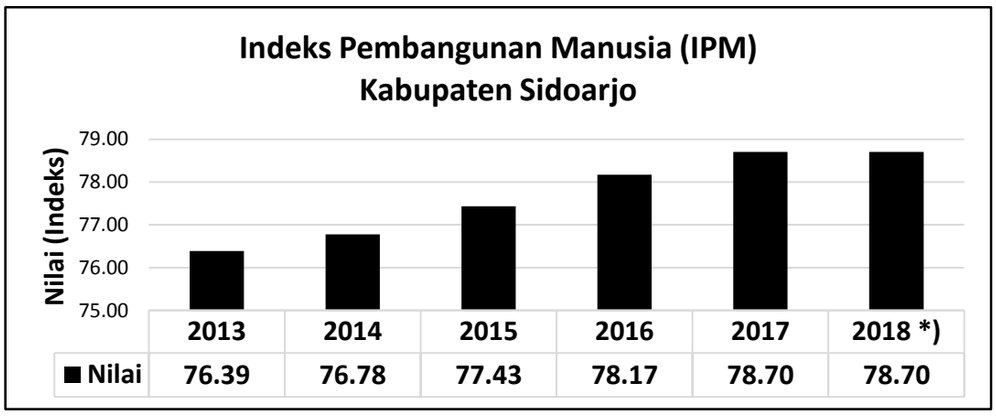

Sumber Data : BPS Kabupaten Sidoarjo

Besar Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Sidoarjo dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Angka IPM di kabupaten Sidoarjo mengalami kenaikan dari 76.39 tahun 2013 menjadi 78,70 tahun 2107, namun persentase kenaikan paling tinggi terjadi pada tahun 2016 yang mengalami kenaikan sebesar 0,96 persen. Sedangkan untuk skor IPM di tahun 2018 masih belum dapat ditentukan karena masih dalam tahap finalisasi survey. Namun apabila dibandingkan dengan target tahun 2018 sebesar 78.84, maka capaian tahun 2017 mencapai 99,82% dari target.

Komponen – komponen yang mempengaruhi perhitungan IPM di Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut :

Tabel I.14

Indikator IPM Kabupaten Sidoarjo

INDIKATOR	SKOR
- Angka Harapan Hidup (tahun)	73,71
- Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,34
- Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	10,23
- Pengeluaran perkapita riiel disesuaikan (Rp.000)	13.710

Sumber : BPS Kabupaten Sidoarjo

Kabupaten Sidoarjo menempati ranking 4 skor IPM se-Jawa Timur sekaligus mengungguli capaian IPM Provinsi Jawa Timur yang memiliki skor 70.27.

6. Indeks Kebahagiaan

Indeks kebahagiaan (IKH) merupakan rata-rata dari angka indeks yang dimiliki oleh setiap individu di Indonesia pada tahun 2014.Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan tingkat kehidupan yang semakin bahagia, demikian pula sebaliknya, semakin rendah nilai indeks maka penduduk semakin tidak bahagia. Indeks kebahagiaan (IKH) merupakan indeks komposit yang disusun oleh tingkat kepuasan terhadap 10 aspek kehidupan yang esensial. Kesepuluh aspek tersebut secara substansi dan bersama-sama merefleksikan tingkat kebahagiaan yang meliputi kepuasan terhadap :

1) kesehatan,
2) pendidikan,
3) pekerjaan,
4) pendapatan rumah tangga,
5) keharmonisan keluarga,
6) ketersediaan waktu luang,
7) hubungan sosial,
8) kondisi rumah dan aset,
9) keadaan lingkungan, dan
10) kondisi keamanan.

Dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sidoarjo dituangkan program untuk mengetahui seberapa besar tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sidoarjo dengan mengukur kebahagiaan dengan menggunakan formulasi perhitungan Indeks Kebahagian (IKH). Pengukuran indeks kebahagiaan (IKH) ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Menginformasikan tafsiran indeks kebahagiaan (IKH) penduduk Kabupaten Sidoarjo baik secara umum maupun indeks kebahagiaan menurut kondisi kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan keharmonisan keluarga.
2. Menginformasikan tafsiran indeks kebahagiaan (IKH) penduduk Kabupaten Sidoarjo menurut variabel hubungan sosial, lingkungan, ketersediaan waktu luang, kondisi rumah dan aset, serta kondisi keamanan.

3. Memberikan rekomendasi untuk peningkatan indeks kebahagiaan penduduk Kabupaten Sidoarjo

Berikut perkembangan Indeks Kebahagiaan di Kabupaten Sidoarjo :

Grafik I.14

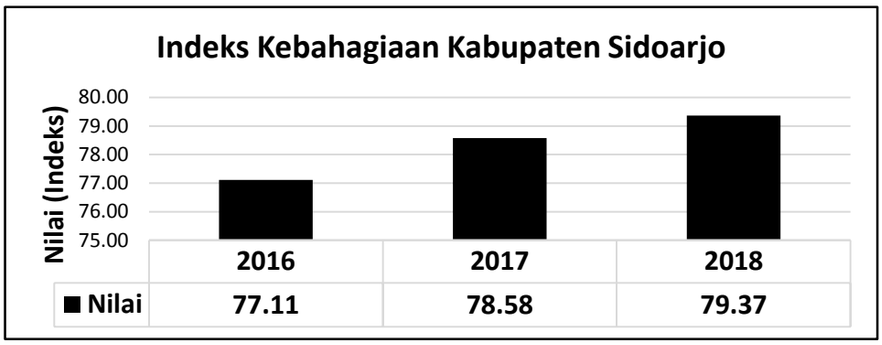

Sumber Data : Bappeda Kabupaten Sidoarjo

Indeks kebahagiaan Kabupaten Sidoarjo tahun 2018 adalah 79.37, indeks tersebut naik setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan peningkatan pada aspek keamanan, ketertiban, dan jaminan keadilan di Kabupaten Sidoarjo, sehingga penduduk merasa nyaman berada di Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target tahun 2018 sebesar 78,23 maka telah tercapai sebesar 101,46%.

7. Indeks Infrastruktur

Indeks pengukuran infrastruktur mengukur secara agregat dari beberapa jenis infrastruktur yang antara lain meliputi jalan dan jembatan, bendungan, pasar, rusunawa dan jalan kereta api.

Manfaat dari pengukuran indeks infrastruktur ini adalah untuk mengetahui tingkat ketersediaan, kelayakan, dan pelayanan dari pembangunan infrastruktur yang ada di Kabupaten Sidoarjo.

Berikut perkembangan Indeks Infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo :

Grafik I.15

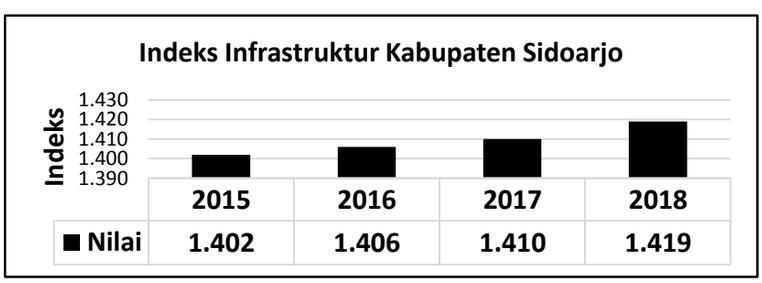

Sumber Data : Bappeda Kabupaten Sidoarjo

Peningkatan indeks infrastruktur dikarenakan komitmen dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam peningkatan pembangunan infrastruktur, yang meliputi berbagai aspek, yaitu pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, pengelolaan sampah, transportasi, perhubungan, telekomunikasi dan informatika, jalan, jembatan, pengendalian banjir, rusunawa, dan gedung terpadu pemerintahan. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target tahun 2018 sebesar 1.414, maka telah tercapai 100,35%.

8. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Kualitas Lingkungan hidup yang baik merupakan sarana penting bagi masyarakat untuk memberikan dukungan terhadap tingkat kesehatan yang lebih baik. Untuk menentukan kelayakan terehadap kondisi lingkungan hidup dilakukan analisa penghitungan melalui parameter IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah indeks yang dapat digunakan sebagai gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu.

Tujuan disusunnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah :

- Memberikan Informasi kepada para pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan tingkat nasional dan daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program-program pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Target yang ditetapkan di tahun 2018 dalam RPJMD untuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 51,01 sedangkan realisasi tahun 2018 sebesar 55,10 sehingga capaian kinerja di Tahun 2018 sebesar 108 %. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar 48,79 maka realisasi di Tahun 2018 mengalami peningkatan.

Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup didapatkan dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan / Vegetasi yaitu sebagai berikut :

Komponen Penilaian	Bobot	Nilai Indeks	Total Nilai = (Bobot x Nilai Indeks)
Indeks Kualitas Air	30 %	49,59	14,9
Indeks Kualitas Udara	30 %	85,04	25,5
Indeks Kualitas Tutupan Lahan / Vegetasi	40 %	36,77	14,7
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			**55,1**

Perkembangan Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2016-2018 sebagai berikut :

URAIAN	TAHUN		
	2016	2017	2018
Indeks Kualitas Air	49,54	49,77	49,59
Indeks Kualitas Udara	84,04	82,05	85,04
Indeks Kualitas Tutupan Lahan / Vegetasi	22,97	23,11	36,77
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	**49,26**	**48,79**	**55,1**

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Sidoarjo masih berada pada kisaran baik dan aman. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target tahun 2018 sebesar 51.01 maka pencapaian di tahun 2018 sudah melampaui target sebesar 108,02%.

9. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Untuk mengukur tingkat ketersediaan kesempatan kerja oleh pemerintah kabupaten maka tingkat pengangguran terbuka merupakan salah satu ukurannya.

Berikut grafik perkembangan tingkat pengangguran tahun 2015 sampai dengan 2018 :

Grafik I.16

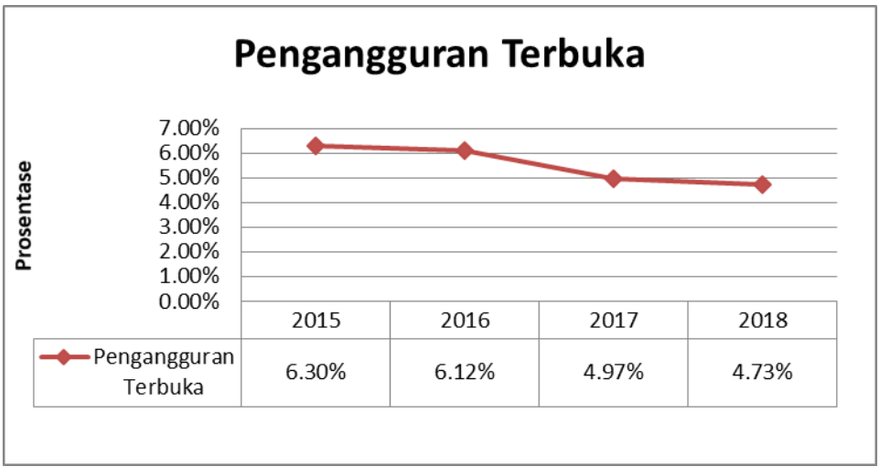

Sumber Data : BPS dan Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan Kemnaker RI

Dari grafik di atas terlihat bahwa tingkat pengangguran terbuka menunjukkan penurunan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Dari 6,30 pada tahun 2015 terus menurun menjadi 6,12% pada tahun 2016 dan penurunan yang cukup tinggi pada tahun 2017 yaitu sebesar 4,97% dan pada tahun 2018 kembali mengalami penurunan menjadi 4,73%.

Hal ini disebabkan karena adanya Stabilitas perekonomian di Kabupaten Sidoarjo yang cukup mendukung dan komitmen pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mempermudah investasi.

Capain target tahun 2018 tersebut diatas sudah melebihi dari target yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 4,84%.

Dalam perencanaan tenaga kerja daerah 2017 – 2021 perkembangan kesempatan kerja diproyeksikan akan terus meningkat sehingga angka pengangguran di Kabupaten Sidoarjo akan semakin menurun. Pada tahun 2015 jumlah penganggur di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 68.311 orang menurun menjadi 68.058 orang pada tahun 2016 dan menjadi 53.475 orang pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 kembali mengalami penurunan menjadi 51.773 orang. Namun pertumbuhan angkatan kerja bergerak secara fluktuatif dengan angkatan kerja pada tahun 2015 sebanyak 1.083.519 orang meningkat menjadi 1.112.691 orang pada tahun 2016 namun menurun pada tahun 2017 menjadi 1.075.359 orang dan pada tahun 2018 sebanyak 1.094.650.

Dalam upaya mengurangi pengangguran, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Tenaga Kerja berpedoman pada perencanaan tenaga kerja

melalui Buku Rencana Tenaga Kerja 2017-2021 yang bekejrasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI.

Upaya yang dilakukan untuk menekan angka pengangguran terbuka, antara lain :

1. Pemerintah Daerah melalui Dinas Tenaga Kerja Menyelenggarakan Pelatihan Berbasis Kompetensi sehingga keluaran hasil pelatihan tersertifikasi dan mampu bersaing pada dunia kerja.
2. Menyelenggarakan Bursa Kerja, baik Bursa Kerja Terbuka maupun Bursa Kerja Khusus.
3. Menjalin hubungan industrial yang kondusif guna mengurangi angka perselisihan hubungan industrial yang berdampak pada PHK.

Sebesar 30,92 % jumlah pengganggguran di Kabupaten Sidoarjo adalah lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), sebagaimana dalam grafik :

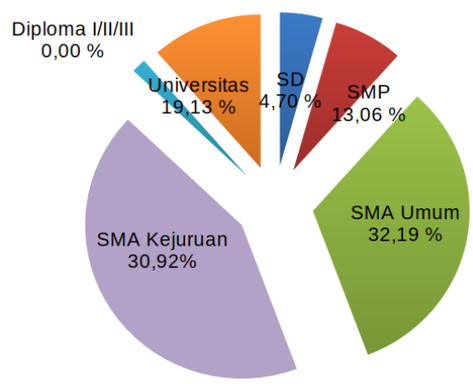

Sumber Data : BPS Kabupaten Sidoarjo

Tabel I.15

Statistik Ketenagakerjaan Tahun 2017 – 2018

URAIAN	2017	2018
1. TPAK (%)	64,54	64,53
2. TPT (%)	4,97	4,73
3. Bekerja (%)	95,03	95,27
4. Penduduk bekerja di :		
a. Sektor Primer	3,57	3,82
b. Sektor Sekunder	41,49	42,36
c. Sektor Tersier	54,94	53,82

Sumber Data : BPS Kabupaten Sidoarjo

Pada penyerapan tenaga kerja (TK), terjadi sedikit pergeseran dari ketiga kelompok sektoral : primer, sekunder dan tersier. Sektor sekunder yang pada 10 tahun yang lalu selalu mendominasi dengan penyerapan TK tertinggi, sejak 6 tahun terakhir posisinya sudah dilampaui oleh sektor tersier. Pada tahun 2017, penyerapan TK sektor tersier sebesar 53,82%; lebih besar dari sektor sekunder sebesar 42,36%.

Sektor ekonomi tersier disebut juga sebagai sektor jasa atau industri jasa, sektor sekunder adalah manufaktur, sedangkan sektor primer meliputi pertambangan, pertanian dan perikanan.

10. Tingkat Kemiskinan

Persentase kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 menunjukkan trend yang signifikan menurun. Persentase angka kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2013 masih mencapai 6,72%, kemudian turun berturut-turut hingga menjadi 5,69% di tahun 2018.

Selain memiliki trend menurun setiap tahunnya, persentase kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo juga masih di bawah persentase kemiskinan di Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

Dari total penduduk Sidoarjo Tahun 2018 sebesar 2,22 juta jiwa, sebanyak 126,26 ribu jiwa atau 5,69 persen nya merupakan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (miskin/ sangat miskin).

Perkembangan penduduk miskin di Kabupaten Sidoarjo terlihat pada grafik sebagai berikut :

Grafik I.17

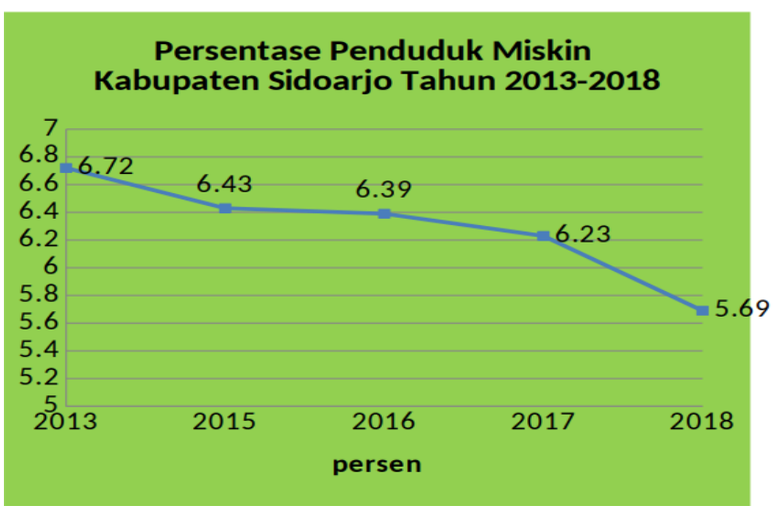

Sumber Data : BPS Kabupaten Sidoarjo

Sedangkan untuk garis kemiskinan atau batas kemiskinan minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di Kabupaten Sidoarjo digambarkan sebagai berikut :

Grafik I.18

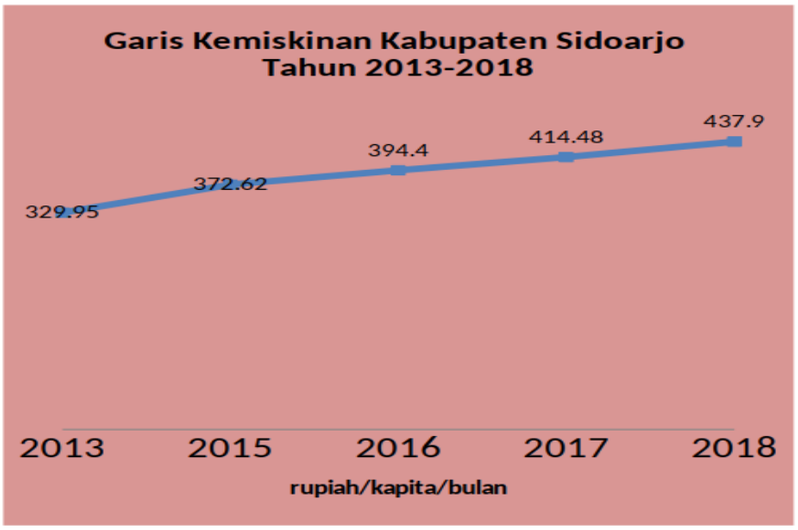

Sumber Data : BPS Kabupaten Sidoarjo

Upaya untuk mengurangi angka kemiskinan yaitu dengan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, menjaga stabilitas makro ekonomi, stabilisasi harga, menciptakan lapangan kerja produktif, menjaga iklim Investasi, menjaga regulasi perdagangan, meningkatkan produktivitas sektor potensial daerah, dan mengembangkan infrastruktur di wilayah tertinggal.

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

Untuk mewujudkan visi dan misi, beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 - 2021, diperlukan penetapan mengenai upaya mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut dalam bentuk strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 - 2021. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien dapat diwujudkan. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan pencapaian tujuan dan sasaran masing - masing misi dilaksanakan berpedoman pada strategi umum yang menjadi landasan utama pembangunan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 – 2021.

Berpijak pada permasalahan pembangunan, serta berbagai dinamika yang terjadi baik di tingkat internal maupun eksternal, maka RPJMD Kabupaten Sidoarjo berawal dari isu strategis sebagai berikut :

1. Lemahnya kapasitas kelembagaan dalam tata kelola pemerintahan;
2. Lemahnya inovasi untuk menunjang pelayanan publik pada penyelenggaraan pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa;
3. Kualitas dan pemerataan pendidikan rendah;
4. Belum optimalnya layanan dan Akses Kesehatan;
5. Rendahnya aksesibilitas kesehatan bagi masyarakat miskin;
6. Perselisihan perusahaan dan tenaga kerja meningkat;
7. Komitmen Terhadap Reformasi Birokrasi;
8. Letak Kabupaten yang Strategis dengan ibukota provinsi dan wilayah Gerbangkertasusila;
9. Iklim investasi yang Kondusif;
10. Pencemaran lingkungan dan kerusakan sumber daya alam seiring dengan pesatnya sektor industri dan perdagangan
11. Menurunnya kualitas permukiman sehingga tumbuh kawasan kumuh di perkotaan

12. Pencegahan konflik berbau SARA, dan Politik
13. Sarana dan prasarana kegiatan Kepemudaan yang masih minim
14. Degradasi Kebudayaan Lokal
15. Jumlah PMKS yang meningkat
16. Belum berkembangnya sektor industri kreatif dalam mendorong sektor pariwisata
17. Potensi Unggulan pada Sektor Industri pengolahan, ekonomi kreatif dan perikanan
18. Peningkatan pada penerimaan Retribusi dan pajak daerah
19. Afirmasi pusat terhadap infrastruktur
20. Arah dan Komitmen Pemerintah dalam Mewujudkan Industri Ramah Lingkungan
21. Belum produktifnya usaha ekonomi dan Kemandirian Pemerintahan Desa
22. Penanggulangan Banjir
23. Optimalisasi *Corporate Social Responsibility* (CSR), Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Kerjasama dengan Swasta
24. Penanggulangan kemiskinan
25. LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan)
26. Interchanges Tol dengan kawasan wilaah barat sidoarjo
27. Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT)
28. RTRW
29. Program 100-0-100
30. Frontage Road (FR)
31. Pelayanan Persampahan
32. Pengembangan kawasan geowisata
33. Pengembangan kawasan aerocity / aerotropolis
34. Smart City
35. Ruang Terbuka Hijau (RTH)
36. Limbah domestik
37. Kemacetan
38. Permukiman
39. Pencemaran industri
40. Lemahnya UMKM
41. Pasar tradisional

1. VISI DAN MISI

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Sidoarjo, agar lebih terarah dan berhasil guna serta berdaya saing, dengan mempertimbangkan potensi daerah, tantangan maupun ancaman di masa mendatang maka Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama – sama dengan masyarakat telah menetapkan visi, misi, dan strategi dalam mencapai harapan yang ingin diwujudkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 - 2021.

a. Visi

Memperhatikan berbagai kemajuan yang telah dicapai dan berbagai masalah serta kendala yang dihadapi pada periode pemerintahan Tahun 2010 - 2015, serta prakiraan dinamika kondisi, masalah dan tantangan utama yang dihadapi dan harus dipecahkan pada periode tahun berikutnya yaitu tahun 2016 – 2021. Selain itu juga mengacu pada visi 20 tahun dalam RPJPD Kabupaten Sidoarjo tahun 2006 – 2025, maka rumusan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo periode tahun 2016 – 2021, yaitu:

” KABUPATEN SIDOARJO YANG INOVATIF, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN”.

Perumusan dan penjelasan terhadap visi dimaksud, menghasilkan pokok - pokok visi yang diterjemahkan pengertiannya, sebagaimana berikut :

- ***Inovatif*** ; Melakukan proses pembangunan dengan menerapkan berbagai inovasi di bidang pembangunan fisik dan non fisik untuk mendukung akselerasi pembangunan menuju Kabupaten Sidoarjo yang Mandiri, Sejahtera, dan Berkelanjutan.
- ***Mandiri*** ; Cita-cita dan semangat kerja bahwa pada tahun 2021 Kabupaten Sidoarjo harus mampu mewujudkan masyarakat yang mampu mengembangkan potensi diri, mampu mencukupi kebutuhannya sendiri secara layak dengan mengoptimalkan berbagai keunggulan dan peluang yang dimiliki guna mencapai kesejahteraan.
- ***Sejahtera*** ; Makmur, aman, nyaman dan sentosa serta terlepas dari segala macam gangguan (tenteram), baik material maupun spiritual

pada dimensi ekonomi, sosial, budaya, hukum dan HAM. Unsur visi ini menegaskan bahwa Pasangan Kepala Daerah terpilih (KDH) untuk senantiasa mendedikasikan diri pada perjuangan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sidoarjo sampai tahun 2021 pada segala aspek kehidupan. Aspek kehidupan seperti, kesehatan, pendidikan, ekonomi, keadilan sosial budaya, stabilitas keamanan, ketertiban, kedamaian dan peradaban akan mencapai puncak sehingga masyarakat akan semakin beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, demokratis dan berbudaya tinggi yang mampu berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan Kabupaten Sidoarjo.

- ***Berkelanjutan*** ; Proses pembangunan yang berprinsip "memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan" (Brundtland Report, PBB 1987). Pembangunan Berkelanjutan (sustainable development) merupakan komitmen global dimana proses pembangunan tidak semata-mata mengeksploitasi alam secara maksimal demi mengejar kebutuhan masa kini saja, tetapi juga internalisasi konsep dan pola pembangunan yang memperdulikan kelestarian lingkungan dan sosial serta dampak yang lain bagi generasi masa depan. Unsur visi ini sangat strategis dan senada dengan komitmen global tentang *climate change*.

b. Misi

Sebagai penjabaran dari Visi RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 - 2021, maka rumusan visi tersebut perlu dioperasionalisasikan ke dalam beberapa Misi. Setiap misi dalam RPJMD merupakan penjabaran dari Visi yang telah diuraikan dalam bagian sebelumnya. Setiap unsur visi dijabarkan ke dalam tiap misi, sebagai berikut :

MISI	UNSUR VISI	PENJABARAN
Misi 1	Mandiri	Pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipasif dan transparan

Misi 2	Mandiri	Meningkatnya perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis Industri pengolahan, pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM dan Koperasi serta pemberdayaan masyarakat
Misi 3	Sejahtera	Meningkatnya kualitas dan standar pelayanan Pendidikan dan kesehatan
Misi 4	Sejahtera	Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berakhlaqul Karimah, berlandasan keimanan kepada Tuhan YME, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman, dan ketertiban
Misi 5	Berkelanjutan	Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan

Adapun penjelasan lebih lanjut terkait 5 misi utama Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut :

Misi 1: Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Aspiratif, Partisipasif dan Transparan.

Salah satu tolok ukur terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel adalah Indeks Good Governance dan Indeks Reformasi Birokrasi. Misi I Kabupaten Sidoarjo difokuskan untuk pencapaian tujuan diatas, dengan menetapkan 2 sasaran yakni Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi; .

Misi 2: Meningkatnya perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis Industri pengolahan, pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM dan Koperasi serta pemberdayaan masyarakat.

Untuk mencapai Misi II ditetapkan 1 Tujuan dan 2 Sasaran dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing. Untuk

mencapai hal tersebut dapat dicapai melalui 2 sasaran yaitu Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat; Meningkatnya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat.

Misi 3: Meningkatnya Kualitas dan Standar Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan.

Misi III Kabupaten Sidoarjo terfokus terhadap pelayanan dasar khususnya pendidikan dan kesehatan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator utama sebagai tolok ukur keberhasilan Misi III. Berdasarkan 3 indeks pembentuk IPM, Indeks Kesehatan dan Indeks Pendidikan secara representatif menggambarkan pencapaian IPM pada Misi III. Selain itu sasaran diarahkan terhadap pendidikan yang berkualitas, merata, dan berdaya saing dan Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

Misi 4: Meningkatnya Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berakhlaqul Karimah, Berlandaskan Keimanan kepada Tuhan YME, serta dapat Memelihara Kerukunan, Ketentraman dan Ketertiban.

Perspektif Misi IV lebih diarahkan terhadap peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat, yang menggunakan tolok ukur capaian dengan menggunakan Indeks Kebahagiaan, Indeks Rasa Aman, Indeks Resiko Bencana, dan Indeks Pembangunan Gender. Misi IV dapat dicapai dengan meningkatkan harmonisasi dan keamanan sosial.

Misi 5: Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Misi terakhir adalah terfokus terhadap peningkatan infrastruktur sebagai penunjang ekonomi, namun tetap harus memperhatikan kelestarian lingkungan

Menindak lanjuti terhadap 5 Misi Kabupaten Sidoarjo yang mendukung tercapainya Visi Kabupaten Sidoarjo 2016-2021, maka berikut ini merupakan kerangka arsitektur Visi Pembangunan Kabupaten Sidoarjo 2016 - 2021 sebagai dasar pijakan berdirinya pondasi dan pilar misi dalam pencapaian visi, yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel II.1

Kerangka Visi Pembangunan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 – 2021

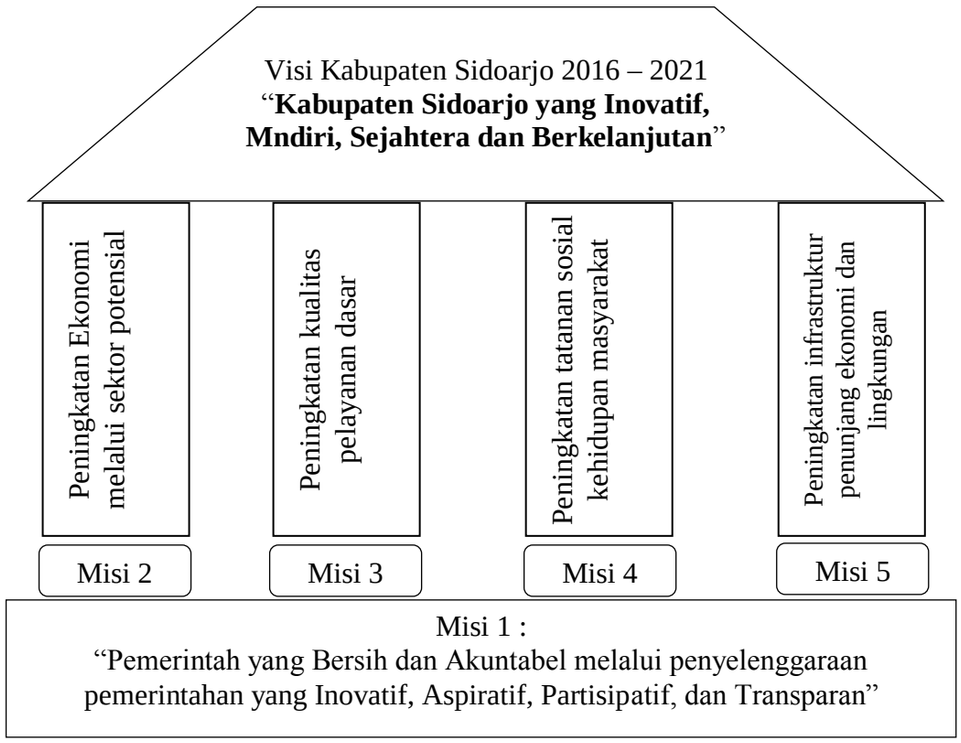

Sumber Data : RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021

Pada RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 – 2021, juga dipaparkan 10 (sepuluh) Program Prioritas Bupati yang antara lain, sebagai berikut :

1. Pendidikan Dasar 9 Tahun gratis dan berkualitas
2. Percepatan pembangunan infrastruktur, seperti gedung pemerintahan satu atap, frontage road, penanganan banjir, dan lain sebagainya
3. Pembangunan RSUD wilayah barat
4. Pembangunan Eco Industry
5. Penguatan kemandirian desa
6. Sidoarjo "Smart City"
7. Pengelolaan lingkungan yang sehat dan terintegratif
8. Modernisasi pasar tradisional
9. Peningkatan jumlah dan kualitas tenaga kesehatan
10. Beasiswa pelajar berprestasi dan pasca sarjana bagi pendidik

2. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

a. Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan 5 misi yang telah diuraikan di depan, maka ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 - 2021, sebagai berikut :

a) Tujuan

1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan transparan.
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
4. Mewujudkan lingkungan sosial masyarakat yang berbudaya, rukun, aman, tertib, nyaman dan berkeadilan
5. Meningkatakan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta kelestarian lingkungan hidup

b) Sasaran

1. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi.
3. Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat
4. Meningkatnya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat
5. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
6. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
7. Meningkatnya keamanan, kenyamanan, dan ketertiban umum yang berkeadilan
8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah
9. Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup

Berikut keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran beserta indikator keberhasilannya dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 – 2021, sebagaimana tabel :

Tabel II.2

Konsistensi Hubungan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Inovatif, Aspiratif, Partisipasif dan Transparan.	T.1 Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, inovatif, dan transparan	1. Indeks Good Governance	S1. Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Opini atas audit BPK
					2. Nilai SAKIP Kabupaten
					3. Nilai Kinerja EKPPD
					4. Tingkat Maturitas SPIP
			2. Indeks Reformasi Birokrasi	S.2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi	1. Indeks Pelayanan Publik (IPP)
					2. Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)
2	Meningkatnya perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis Industri pengolahan, pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM dan Koperasi serta pemberdayaan masyarakat	T.2 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing	1. Pertumbuhan Ekonomi	S.3 Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat	Pendapatan Perkapita
			2. Indeks GINI	S.4 Meningkatnya Pemerataan Distribusi Pendapatan Masyarakat	1. Tingkat Pengangguran Terbuka
					2. Tingkat Kemiskinan
					3. Persentase Desa Maju
3	Meningkatnya Kualitas dan Standar Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	T.3 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	S.5 Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	1. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)
					2. Rata-Rata Lama Sekolah (RTLS)
				S.6 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup
4	Meningkatnya Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berakhlaqul Karimah, Berlandaskan Keimanan kepada Tuhan YME, serta dapat Memelihara Kerukunan, Ketentraman dan Ketertiban.	T.4 Mewujudkan Lingkungan Sosial Masyarakat yang Berbudaya, Rukun, Aman, Tertib, Nyaman dan Berkeadilan	Indeks Kebahagiaan	S. 7 Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan, dan Ketertiban Umum yang Berkeadilan	1. Indeks Rasa Aman
					2. Indeks Resiko Bencana
					3. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

5	Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.	T.5 Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur serta kelestarian Lingkungan Hidup	1. Indeks Infrastruktur	S.8 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah	1. Persentase Jalan Kondisi Mantap
					2. Persentase Luas area rawan genangan banjir
			2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	S.9 Meningkatnya kelestarian Lingkungan Hidup	1. Indeks Kualitas Air
					2. Indeks Kualitas Udara
					3. Indeks Tutupan Lahan / Vegetasi

Sumber Data : RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021

b. Strategi Pembangunan Daerah

Penentuan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran atau kumpulan sasaran yang *inherent* adalah dengan terlebih dahulu melakukan analisis SWOT (*strength, weakness, opportunity*, dan *threats*). Bahan utama yang digunakan dalam analisis SWOT adalah hasil telaah dari isu-isu strategis yang telah dirumuskan sebelumnya, yang selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan pengaruh faktor internal dan eksternal yang melekat pada masing-masing isu.

Identifikasi faktor internal dan eksternal, serta analisis SWOT yang dirumuskan dalam strategi, sebagai berikut :

- Strategi S-O ; yang ditetapkan adalah <u>Penguatan Ekonomi yang berdaya saing melalui pengembangan sektor potensial daerah, pendapatan daerah, dan investasi yang berbasis *eco Industri*</u>.

  Dimaksudkan pada strategi ini yaitu Industri olahan, UMKM, Pertanian dan Perikanan kelautan merupakan sektor sektor potensial Kabupaten Sidoarjo yang perlu didorong oleh pemerintah. Sebab, sektor-sektor potensial tersebut menjadi kekuatan dari pertumbuhan ekonomi kabupaten Sidoarjo. agar pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak hanya akibat perubahan kondisi ekonomi makro, namun juga terbangun dari kapasitas ekonomi masyarakat (sektor riil) khususnya pada sektor, industri olahan, UMKM, pertanian, Perikanan dan kelautan. Pajak daerah dan restribusi merupakan salah satu penyumbang terbesar dari pendapatan asli daerah, hal ini tentunya perhatian dalam mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak Kabupaten Sidoarjo. investasi baik PMA maupun PMDN telah tumbuh pesat di

Kabupaten Sidoarjo, tentunya perlunya menciptkan lingkungan iklim investasi kondusif

- Strategi S-T ; yang ditetapkan adalah Harmonisasi pembangunan infrastruktur fisik penunjang ekonomi dan lingkungan hidup dalam perspektif Pembangunan berkelanjutan.

  Pembangunan Infrastruktur diarahkan pada peningkatan konektifikatas antar wilayah dan infrastruktur strategis penunjang perekonomian, serta pembangunan yang patuh akan rencanana tata ruang. Sesuai dengan Konsep *Sustainable Development*, maka pembangunan lingkungan hidup menjadi salah satu unsur yang perlu perhatian guna untuk generasi mendatang dan menjaga dari dampak perubahan iklim
- Strategi W-O ; yang ditetapkan adalah Mengembangkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintah melalui Smart Government.

  Pemerintah daerah mempunyai peran besar dalam mendorong Inovasi swasta dan masyarakat (kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dsb). Secara internal, nilai inovasi ditanamkan dalam setiap aktivitas pemerintahan dan pembangunan daerah melalui reformasi birokrasi untuk peningkatan pelayanan publik. Hal ini mengingat Reformasi Birokrasi merupakan prasyarat utama tatakelola pemerintahan yang inovatif dan akuntabel. Reformasi birokrasi merupakan pintu masuk seluruh elemen pemerintah dalam memanfaatkan peluang yang ada dengan pendekatan pembangunan yang inovatif secara substansial. Bisnis proses pemerintahan merupakan penerjemahan dari tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan layanan kepada masyarakat, merencanakan program, melaksanakan aktifitas pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi, serta mempertangungjawabkan hasil-hasil (outcome) pembangunan daerah. Agresifitas strategi ini terletak pada Perangkat Daerah memberikan sentuhan inovasi pada setiap aktivitas pembangunan. Smart governance prinsip dasar yaitu mengakolaborasikan dan mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat, mengembangkan operasional, meningkatkan managemen organisasi, membuat system database yang dapat diakses secara umum, mengolah informasi yang up to date, menggunakan teknologi yang mutakhir, adanya koordinasi stakeholder

- Strategi W-T (1) ; yang ditetapkan adalah Mendorong terciptanya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, melalui peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan.

  Membangun generasi yang profesional menjadi prioritas utama dalam Kabupaten Sidoarjo mengingat daya saing dan kompetensi semakin meningkat. Kualitas pendidikan yang baik selaras dengan akses seluruh lapisan masyarakat dapat menjangkau serta pemerataan pendidikan pada wilayah Kabupaten Sidoarjo dan Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Upaya yang bertujuan untuk mencegah, merawat dan mengobati, pemulihan kesehatan terjadinya penyakit dan gangguan kesehatan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat, upaya tersebut didorong dengan peningkatan kualitas pelayanan dan keterjangkauan seluruh lapisan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Masyarakat secara merata.
- Strategi W-T (2) ; yang ditetapkan adalah Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan sosial yang kondusif dan bereorientasi terhadap penguatan nilai wawasan kebangsaan.

  pada strategi ini mencipatkan adanya social sustainabilty, prinsip utamanya yaitu equity, individu mempunyai akses berpartisipasi secara penuh. kedua, *social inclusion and interaction*, adanya hak untuk kesempatan berpartisipasi baik meliputi partisipasi dalam pembangunan maupun dalam berpolitik. Ketiga, security jaminan untuk lingkungan yang aman dan mendukung. Terakhir yaitu adaptability kelenturan terhadap komunitas. Strategi ini juga menciptakan adanya penguatan pada demokrasi Pancasila.

Berdasarkan analisis diatas, strategi pembangunan daerah Kabupaten Sidoarjo dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintah melalui Smart Government.
2. Penguatan ekonomi yang berdaya saing melalui pengembangan sektor potensial daerah, pendapatan daerah, dan investasi yang berbasis *Eco Industry*.

3. Mendorong terciptanya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, melalui peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan sosial yang kondusif dan bereorientasi terhadap penguatan nilai wawasan kebangsaan.
5. Harmonisasi pembangunan infrastruktur fisik penunjang ekonomi dan lingkungan hidup dalam perspektif Pembangunan berkelanjutan

Strategi tersebut disusun dalam rangka pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah. Setiap strategi harus mampu di orientasikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan yang dituju, dan mendukung pencapaian misi yang telah ada. Strategi merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Berikut ini adalah peruntukan dan fungsi strategi pembangunan terhadap sasaran pembangunan yang ingin dicapai :

Tabel II.3

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 – 2021

Visi : **Kabupaten Sidoarjo yang Inovatif, Mandiri, Sejahtera, dan Berkelanjutan**		
Misi I "Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Inovatif, Aspiratif, Partisipasif dan Transparan"		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**
T.1 Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, inovatif, dan transparan	S1. Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Strategi: Mengembangkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintah melalui Smart Government
	S.2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi	

Misi II "Meningkatnya perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis Industri pengolahan, pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM dan Koperasi serta pemberdayaan masyarakat"		
T.2 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing	S.3 Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat	Strategi: Penguatan ekonomi yang berdaya saing melalui pengembangan sektor potensial daerah, pendapatan daerah, dan investasi yang berbasis Eco Industry.
	S.4 Meningkatnya Pemerataan Distribusi Pendapatan Masyarakat	
Misi III "Meningkatnya Kualitas dan Standar Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan"		
T.3 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	S.5 Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Strategi: Mendorong terciptanya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, melalui peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan
	S.6 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	
Misi IV "Meningkatnya Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berakhlaqul Karimah, Berlandaskan Keimanan kepada Tuhan YME, serta dapat Memelihara Kerukunan, Ketentraman dan Ketertiban"		
T.4 Mewujudkan Lingkungan Sosial Masyarakat yang Berbudaya, Rukun, Aman, Tertib, Nyaman dan Berkeadilan	S. 7 Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan, dan Ketertiban Umum yang Berkeadilan	Strategi: Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan sosial yang kondusif dan bereorientasi terhadap penguatan nilai wawasan kebangsaan
Misi V "Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan"		
T.5 Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur serta kelestarian Lingkungan Hidup	S.8 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah	Strategi: Harmonisasi pembangunan infrastruktur fisik penunjang ekonomi dan lingkungan hidup dalam perspektif Pembangunan berkelanjutan
	S.9 Meningkatnya kelestarian Lingkungan Hidup	

Sumber Data : RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021

c. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan pedoman dalam mengarahkan rumusan strategi yang sebelumnya telah dirumuskan agar lebih sistematis dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode pembangunan. Arah kebijakan memberikan pedoman dan arahan tema pembangunan serta prioritas tahunan apa yang harus dikerjakan. Pada tiap tahunnya diberikan penekanan terhadap prioritas tertentu sesuai dengan pemetaan strategi yang telah dirumuskan.

Dengan arah kebijakan, strategi dapat diterangkan secara logis kapan suatu strategi dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi strategi lainnya. Urut-urutan strategi dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun dipandu dan dijelaskan dengan arah kebijakan. Merujuk pada strategi pelaksanaan arah kebijakan diatas, maka arah kebijakan tahunan dituangkan dalam tema pembangunan yang ditetapkan sebagai berikut :

Tahun	Tema dan Prioritas Pembangunan
Tahun 2016	Mewujudkan Iklim Demokrasi yang Sehat Dan Kondusif Guna Menunjang Peningkatan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan Daerah
Tahun 2017	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Infrastruktur Publik Dalam Rangka Pembangunan Ekonomi Yang Berkelanjutan
Tahun 2018	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Daerah Dalam Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Guna Menciptakan Perluasan Kesempatan Kerja
Tahun 2019	Pemantapan Infrastruktur Penunjang Ekonomi dan Lingkungan Hidup dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat
Tahun 2020	Percepatan Pembangunan Ekonomi melalui akselarasi sektor-sektor potensial daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah
Tahun 2021	Menciptakan Stabilisasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidoarjo yang berdaya saing

Dengan arah kebijakan, strategi dapat diterangkan secara logis kapan suatu strategi dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi strategi lainnya. Urut-urutan strategi dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun dipandu dan dijelaskan dengan arah kebijakan. Merujuk pada strategi pelaksanaan arah kebijakan diatas, maka arah kebijakan tahunan yang dituangkan tema pembangunan dan prioritas pembangunan di tahun 2018 ditetapkan sebagai berikut :

Tabel II.4

Tema dan Program Prioritas Pembangunan Tahun 2018

TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS
Tema Pembangunan Tahun 2018 :	
"Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Daerah Dalam Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Guna Menciptakan Perluasan Kesempatan Kerja"	
Prioritas Pembangunan Tahun 2018 :	
1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengembangan tata kelola pemerintahan daerah yang baik	1. Program Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Kebinamargaan 2. Program Penumbuhan dan Pengembangan IKM 3. Program Pengembangan, Penyediaan Sarana Prasarana dan Peningkatan Pelayanan infrastruktur melalui kemitraan serta Pendapatan Pasar rakyat 4. Program Pembangunan Sarana Prasarana Permukiman dan Sanitasi Air Bersih
2. Meningkatkan inovasi, kemandirian dan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah	
3. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	5. Program Pengembangan Infrastruktur dan Lingkungan Perumahan 6. Program peningkatan hasil produksi pertanian 7. Program Perencanaan, Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemanfaatan Jaringan Irigasi 8. Program peningkatan produksi ikan dan pengawasan perikanan tangkap dan kawasan Pesisir 9. Program Pengembangan Objek, promosi, dan usaha pariwisata 10. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 11. Program Pemberdayaan dan Pengembangan, Usaha Koperasi dan Usaha Mikro. 12. Program Pendataan, Peningkatan
4. Meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam mewujutkan tatanan kehidupan masyarakat yang aman, nyaman, demokratis, berbudaya dan agamis	
5. Optimalisasi pembangunan system infrastruktur daerah yang terpadu dan berkelanjutan guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	

	dan Pengembangan Pajak Daerah. 13. Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Penyelenggaraan Transmigrasi 14. Program pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal 15. Program peningkatan mutu dan relevansi layanan pendidikan 16. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan 17. Program pendidikan sekolah dasar 18. Program pendidikan sekolah menengah pertama 19. Program perluasan dan aksesibilitas pendidikan 20. Program pengembangan perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca 21. Program pelayanan kesehatan masyarakat 22. Program pencegahan dan pengendalian penyakit 23. Program pengembangan sumber daya kesehatan 24. Program upaya kesehatan masyarakat 25. Program upaya kesehatan masyarakat di puskesmas 26. Program pengelolaan keluarga berencana dan keluarga sejahtera 27. Program peningkatan pelayanan pada badan layanan umum daerah 28. Program Pengelolaan, Fasilitasi dan Implementasi Teknologi Informatika 29. Program Peningkatan Kualitas Layanan Data Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Sumber Data : RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021

d. Target Kinerja Daerah

Target kinerja daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo selama kurun waktu jangka menengah lima tahun sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur keberhasilan tujuan RPJMD, dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) untuk mengukur keberhasilan sasaran RPJMD dan Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai sebuah indikator makro untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel II.5

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Sidoarjo

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2018
1.	Indeks Good Governance	Poin	67,33
2.	Indeks Reformasi Birokasi	Poin	73
3.	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,65
4.	Indeks GINI	Poin	0,37
5.	Tingkat Kemiskinan	%	6,37
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,74
7.	Indeks Infrastruktur	Poin	1.414
8.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	78,84
9.	Indeks Kebahagiaan	Poin	78,23
10.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	51,01

Sumber Data : RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021

Indikator Kinerja Daerah (IKD) secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcomes*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode tahun 2016 - 2021 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah. Ukuran keberhasilan / pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan publik dalam rangka perwujudan transaksi dan akuntabilitas penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Sidoarjo tersebut secara rinci disajikan pada tabel berikut :

Tabel II.6

Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Sidoarjo

SASARAN 1	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET TAHUN 2018
Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	1. Opini atas audit BPK	WTP
	2. Nilai SAKIP Kabupaten	BB (Sangat Baik)
	3. Nilai Kinerja EKPPD	ST (Sangat Tinggi)
	4. Tingkat Maturitas SPIP	level 3
URUSAN / SASARAN URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	TARGET TAHUN 2018
UNSUR PENUNJANG		
Meningkatnya Kualitas Penetapan Produk Hukum Daerah	1. Rancangan produk hukum daerah yang menjadi produk hukum daerah	
	- Peraturan Daerah	9 perda
	- Peraturan Bupati	115 perbup
	- Keputusan Bupati	851 keputusan
Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Permasalahan Hukum Daerah	2. Permasalahan hukum daerah yang telah diselesaikan	25 kasus
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	3. Nilai PMPRB	
Meningkatnya Sinergisitas Legislatif	4. Nilai IKAD (Indikator Kepuasan Anggota DPRD)	76
Meningkatnya Kualitas Pengawasan	5. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	99,00%
	6. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan inspektorat daerah yang ditindaklanjuti	99,65%
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	7. Nilai Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD)	3,89
	8. Persentase PD yang menyusun dokumen perencanaan dengan kualitas baik	95,00%
	9. Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang diakomodir RKPD	60,00%
Meningkatnya Kualitas Hasil Penelitian / Kajian dan Data	10. Persentase dokumen Penelitian / kajian yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan pembangunan daerah	70%

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	11. Persentase Realisasi Belanja Langsung terhadap Belanja Daerah	
	12. Persentase aset tetap dengan dokumentasi legal	99,73%
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pajak	13. Rasio penerimaan pajak daerah terhadap PAD (Pendapatan Asli Daaerah)	60 : 100
	14. Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	
Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur	15. Indeks Profesionalisme ASN	80
	16. Persentase penempatan ASN sesuai dengan kompetensinya	67%
SASARAN 2	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET TAHUN 2018
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	1. Indeks Pelayanan Publik (IPP)	80,35
	2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,88
URUSAN / SASARAN URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	TARGET TAHUN 2018
URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Persentase penduduk yang ber-KTP Elektronik	90%
	2. Persentase penduduk yang ber-Kartu Keluarga (KK)	99%
	3. Persentase penduduk usia 0 s.d. 18 tahun yang ber-akta kelahiran	90%
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi	1. Persentase jaringan OPD dan kecamatan terintegrasi	58%
	2. Persentase Jaringan Desa/Kelurahan terintegrasI	24%
	3. Persentase lokasi RTH yang terkoneksi internet	20%
Meningkatnya Keterbukaan Komunikasi dan Informasi Publik	4. Nilai SKM terhadap layanan keterbukaan komunikasi dan informasi publik	77
URUSAN STATISTIK		
Meningkatnya kualitas data statistik	Dokumen Statistik Daerah yang disusun	13 Dokumen

URUSAN PERSANDIAN		
Meningkatnya pengembangan implementasi teknologi informatika	Pelayanan keamanan informasi yang dilakukan	3 kegiatan
URUSAN KEARSIPAN		
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip	Persentase lembaga yang menyelenggarakan kearsipan secara baku	20,04%
UNSUR PENUNJANG		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1. Persentase unit kerja pelayanan dengan Nilai SKM Kategori minimal Baik	38 unit
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Kecamatan	2. Rata - Rata Nilai SKM pelayanan terpadu kecamatan	80,00
SASARAN 3	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET TAHUN 2018
Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat	Pendapatan perkapita	78.87 (juta/tahun)
URUSAN / SASARAN URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	TARGET TAHUN 2018
URUSAN PANGAN		
Meningkatnya ketahanan pangan daerah	1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	87,90
	2. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	89,36
URUSAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH		
Meningkatnya Aktivitas Ekonomi Masyarakat	1. Persentase pertumbuhan usaha mikro yang mandiri	18.15%
	2. Persentase Pertumbuhan Koperasi yang berkualitas	1.05%
	3. Persentase Koperasi Aktif	90.08%
	4. Persentase Koperasi Sehat	37.43%
	5. Sertifikasi Usaha Mikro	300
	6. Pemberdayaan Wirausaha Baru	1.300 wirausaha
URUSAN PENANAMAN MODAL		
Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Investasi Daerah	16.965.413.000.000
URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN		
Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Perikanan	1. Produksi perikanan budidaya dan tangkap	
	- Budidaya air payau	75.877.437,00

	- Budidaya air tawar	20.389.932,00
	2. Produksi perikanan tangkap	
	- Perikanan Laut	
	- Perairan Umum	
	3. Produktivitas hasil perikanan	
	- Udang windu	334,03
	- Bandeng	2.236,24
	4. Nilai tambah produksi hasil olahan perikanan	
	- Krupuk udang	58.000
	- Bandeng asap	125.000
	5. Tingkat Konsumsi makan ikan	32,00
	6. Pendapaatan Nelayan (Rp.)	30.000.000,00
URUSAN PERTANIAN		
Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Pertanian	1. Produksi pertanian	
	- padi	2.059.105,9 Kw
	- jagung	11.789,2 Kw
	- kacang hijau	15.705,6 Kw
	- kedelai	9.717 Kw
	- sawi	52.025,2 Kw
	- bayam	42.576,3 Kw
	- kangkung	43.321,3 Kw
	2. Produksi perkebunan	
	tebu	2.946.093,6 Kw
	3. Produksi peternakan	
	- daging	23.890.560 Kg
	- telur	2.634.085 Kg
	- susu	7.822.911 liter
	4. Pendapaatan Petani (Rp.)	
URUSAN PARIWISATA		
Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata	1. Rata - rata lama tinggal wisatawan	3 Hari
	2. Jumlah kunjungan wisatawan	969.000 orang
URUSAN PERINDUSTRIAN		
Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan	1. Pertumbuhan usaha industri	17.000 usaha
	2. IKM terstandarisasi	40 IKM
Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	1. Nilai Eksport Non Migas	$ 1.745.253.880,00
	2. Persentase Pasar yang memenuhi kriteria SNI	16%
SASARAN 4	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET TAHUN 2018
Meningkatnya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat	1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,74%

	2. Tingkat Kemiskinan	6,37%
	3. Persentase Desa Maju	23,60%
URUSAN / SASARAN URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	TARGET TAHUN 2018
URUSAN SOSIAL		
Menurunnya Angka PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)	1. Persentase penurunan PMKS terhadap penduduk	1.9%
	2. PMKS yang ditangani	900 orang
URUSAN TENAGA KERJA		
Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	1. Persentase Pencari Kerja yang telah ditempatkan	63,00%
	2. Persentase pencari kerja yang telah membuka usaha secara mandiri	5,00%
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Usaha Ekonomi masyarakat pedesaan	
	- UED-SP Dasar	43.85%
	- UED-SP Berkembang	34.62%
	- UED-SP Mandiri	21.54%
	- P3EL Dasar	59.37%
	- P3EL Berkembang	25.75%
	- P3EL Mandiri	15.88%
	- BUMDES Dasar	63.89%
	- BUMDES Berkembang	30.56%
	- BUMDES Mandiri	5.56%
URUSAN TRANSMIGRASI		
Meningkatnya penyelenggaraan transmigrasi	Jumlah transmigran yang diberangkatkan	0 KK
SASARAN 5	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET TAHUN 2018
Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	1. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	14,25 tahun
	2. Rata - Rata Lama Sekolah (RTLS)	10,75 tahun
URUSAN / SASARAN URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	TARGET TAHUN 2018
URUSAN PENDIDIKAN		
Meningkatnya Mutu dan Akses Pendidikan Dasar	1. Rata - Rata Nilai UN SD/MI	8,30
-	2. Rata - Rata Nilai UN SMP/MTs	6,87
-	3. APM SD/MI	96,54%
-	4. APM SMP/MTs	78,99%
-	5. APK PAUD	92,50%

-	6. APK SD/MI	107,93%
-	7. APK SMP/MTs	98,97%
-	8. Angka Kelulusan SD/MI	100%
-	9. Angka Kelulusan SMP/MTs	100%
-	10. Angka Putus Sekolah SD/MI	0.00%
-	11. Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,06%
-	12. Persentase SD yang terakreditasi A	70,17%
-	13. Persentase SMP yang terakreditasi A	65,63%
-	14. Persentase Guru/Pendidik yang telah bersertifikasi	47,75%
-	15. Rasio guru terhadap murid untuk jenjang SD	1:28
-	16. Rasio jumlah ruang kelas terhadap jumlah siswa untuk jenjang SD	1:28
-	17. Persentase bangunan ruang kelas SD kategori baik.	94,25%
-	18. Rasio guru terhadap murid untuk jenjang SMP	1:32
-	19. Rasio jumlah ruang kelas terhadap jumlah siswa untuk jenjang SMP	1:32
-	20. Persentase bangunan ruang kelas SMP kategori baik.	95,39%
-	21. Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi S1/D4	96,79%
URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olahraga	1. Jumlah pemuda yang berprestasi ditingkat regional, nasional, dan internasional	10 Orang
-	2. Jumlah prestasi olahraga tingkat Regional, Nasional dan Internasional	140 Prestasi
URUSAN PERPUSTAKAAN		
Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	1. Indeks Minat Baca Masyarakat	60
-	2. Jumlah Pengunjung Perpustakaan	150.000 Orang
-	3. Jumlah Koleksi Perpustakaan	92.000 Eksemplar
SASARAN 6	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET TAHUN 2018
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	73,68 tahun

URUSAN / SASARAN URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	TARGET TAHUN 2018
URUSAN KESEHATAN		
Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat	1. Persentase keluarga sehat	16%
	2. Angka Kematian Ibu (AKI)	64,12
	3. Angka Kematian Bayi (AKB)	4,38
	4. Persentase balita stunting	25,20%
	5. Persentase Desa/Kelurahan UCI	88%
	6. Angka Kesakitan HIV/AIDS	HIV 461 kasus AIDS 200 kasus
	7. Angka Keberhasilan pengobatan TB Paru	90%
	8. Angka kesakitan DBD	12,3
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	9. Rata - Rata Nilai SKM Puskesmas	80
	10. Puskesmas terakreditasi	Utama 16 unit Madya 8 unit Dasar 2 unit
Meningkatnya Kualitas Rumah Sakit Umum Daerah bertaraf Internasional	11. Cost Recovery Rate (CRR) tanpa gaji	
-	12. Cost Recovery Rate (CRR) dengan gaji	
-	13. Bed Occupancy Ratio (BOR)	75,10%
-	14. Average Length of Stay (ALOS)	4,50
-	15. Turn Over Interval (TOI)	1,40
-	16. Net Death Rate (NDR)	47,10
-	17. Persentase pasien keluar hidup	93,90%
-	18. Status Akreditasi	Paripurna / Akreditasi II
URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
Meningkatnya Partisipasi Aktif Keluarga Berencana	1. Prevalensi Peserta KB Aktif	83.61%
	2. Persentase Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)	0.40%
Terkendalinya Penduduk	3. TFR (Total Fertility Rate)	2,06 per WUS
-	4. CBR (Crude Birt Rate)	16,8

SASARAN 7	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET TAHUN 2018
Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan, dan Ketertiban Umum yang berkeadilan	1. Indeks Rasa Aman	73,89
	2. Indeks Resiko Bencana	130
	3. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,55
URUSAN / SASARAN URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	TARGET TAHUN 2018
URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
Menurunnya Tingkat Resiko Bencana	1. Persentase kejadian kebakaran yang ditangni dalam waktu tanggap sesuai SPM	45%
Menurunnya Potensi Konflik	2. Indeks Toleransi	81.33
	3. Persentase potensi konflik yang dapat dicegah	95%
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam berpendapat	4. Persentase partisipasi masyarakat dalam PEMILU (Pilkada, Pilgub, Pilpres dan Pileg)	75%
Meningkatnya Kualitas Perlindungan Masyarakat	5. Rasio jumlah anggota linmas terhadap Jumlah RT masyarakat yang diselesaikan	1 : 0.95
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban	6. Persentase penanganan gangguan tribumtranmas yang diselesaikan	100%
	7. Persentase penanganan pelanggaran perda yang diselesaikan	100%
URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Indeks Pemberdayaan Gender	64.65
	2. Persentase kasus kekerasan dan Traficking terhadap Perempuan dan Anak yang diselesaikan	100%
URUSAN KEBUDAYAAN		
Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya Daerah	Jumlah seni dan budaya daerah yang dilestarikan	2 kelompok
SASARAN 8	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET TAHUN 2018
Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah	1. Persentase Jalan Kondisi Mantap	85,00%

	2. Persentase penurunan luas wilayah rawan genangan banjir	79,03%
URUSAN / SASARAN URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	TARGET TAHUN 2018
URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Jalan	1. Jembatan dengan kondisi baik	380
Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Irigasi dan Pengendalian Banjir	2. Persentase cakupan sawah yang dapat dialiri irigasi	90.74%
	3. Luas irigasi dalam kondisi baik	381.096 m
Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai dengan Rencana Tata Ruang	4. Bangunan ber-IMB	281.918 bangunan
URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Dasar Perumahan dan Permukiman	1. Persentase luasan kawasan kumuh	72.78%
	2. Persentase Rumah Layak Huni	90%
	3. Persentase prasarana sanitasi yang disediakan sesuai target	94.01%
	4. Persentase prasarana air bersih yang disediakan sesuai target	40%
URUSAN PERTANAHAN		
Meningkatnya Penyelesaian Pertanahan	1. Persentase permasalahan pertanahan yang diselesaikan sesuai prosedur	72,00%
	2. Persentase pengadaan pertanahan yang diselesaikan	100,00%
URUSAN PERHUBUNGAN		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan	1. Nilai SKM Perhubungan	82
	2. Kecukupan sarana dan prasarana perhubungan	
	3. Layanan Uji KIR	
SASARAN 9	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET TAHUN 2018
Meningkatnya kelestarian Lingkungan Hidup	1. Indeks Kualitas Air	51,29
	2. Indeks Kualitas Udara	85,79
	3. Indeks Tutupan Lahan / Vegetasi	24,72

URUSAN / SASARAN URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	TARGET TAHUN 2018
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP		
Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	1. Persentase titik pantau air sungai yang memenuhi BOD sesuai baku mutu air	25,00%
	2. Persentase titik pantau udara ambien yang memenuhi SO2 dan NO2 sesuai Baku Mutu Udara	100,00%
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sampah	3. Persentase sampah yang terkelola menjadi bernilai guna	9,00%
Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	4. Proporsi luasan RTH terhadap baku Rencana luas RTH dalam Masterplan	1,67%

Sumber Data : RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021

3. **PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Prioritas pembangunan daerah tahun 2018 Kabupaten Sidoarjo disusun sebagai penjabaran RPJMD tahun 2016-2021 pelaksanaan tahun ketiga. Penyusunan prioritas dirumuskan berdasarkan hasil pencapaian kinerja pembangunan tahun 2016, peluang dan tantangan pembangunan daerah merujuk pada prioritas pembangunan nasional seperti termuat dalam RKP tahun 2018, RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2018 serta aspirasi masyarakat yang disepakati dalam hasil Musrenbang tahunan daerah Kabupaten Sidoarjo.

Dalam mewujudkan visi dan misi yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 – 2021, serta dengan memperhatikan kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur, maka dibutuhkan kerangka perencanaan pembangunan daerah tahun 2018 yang jelas agar setiap pelaksanaan tujuan dan sasaran pada setiap kegiatan pemerintahan daerah berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Kabupaten Sidoarjo. Kerangka perencanaan pembangunan yang jelas sekaligus menjadi arahan maupun pedoman pelaksanaan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun penunjang pemerintahan. Dengan demikian kebijakan pembangunan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 difokuskan pada isu-isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana tercantum dibawah ini :

1. Tuntutan optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Penguatan basis pangan daerah dalam rangka mewujudkan surplus pangan daerah
3. Belum efektifnya penanggulangan kemiskinan dan penanganan PMKS
4. Penyelenggaraan pemerataan kualitas pelayanan pendidikan belum optimal
5. Perlunya meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.
6. Reformasi terhadap penyelenggaraan birokrasi
7. Transportasi umum belum berjalan efektif
8. Urgensitas desiminasi usia layak menikah
9. Perlunya afirmasi pemerintah daerah dalam turut mengoptimalkan prioritas pembangunan pemerintah pusat (pembangunan dari pinggiran, kemaritiman, pembangunan desa)
10. Optimalisasi potensi sectoral
11. Tuntutan pembangunan infrastruktur publik yang berkualitas di Sidoarjo
12. Perlunya mewujudkan daya saing SDM daerah dalam menghadapi persaingan Global

Berdasarkan program prioritas nasional dan program prioritas Provinsi Jawa Timur tersebut, maka fokus serta program pembangunan daerah Kabupaten Sidoarjo yang dilaksanakan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel II.7

Prioritas Pembangunan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018

Prioritas Pembangunan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018	**Fokus Program**
1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengembangan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.	a) Peningkatan kualitas pelayanan publik
	b) Pengembangan ketatalaksanaan paska restrukturisasi organisasi pemerintahan daerah
	c) Peningkatan kapasitas sarana prasarana dan SDM aparatur
	d) Pengembangan e-government yang terintegrasi
	e) Pengembangan sistem perencanaan, penganggaran dan pengendalian pembangunan yang efektif

2. Meningkatkan inovasi, kemandirian dan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah.	a) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
	b) Pemberdayaan ekonomi lokal dan perluasan kesempatan kerja
	c) Pengembangan produk unggulan daerah yang berdaya saing global
	d) Peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna yang inovatif
	e) Peningkatan upaya intensifikasi pertanian dan perikanan yang berbasis agrobisnis
3. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.	a) Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan
	b) Peningkatan aksesibilitas dan kualitas kesehatan
4. Meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang aman, nyaman, demokratis, berbudaya dan agamis.	a) Peningkatan wawasan kebangsaan
	b) Peningkatan pendidikan politik masyarakat
	c) Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
	d) Peningkatan kerukunan antar umat beragama
	e) Pengembangan kelestarian budaya lokal
	f) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang responsif gender
	g) Penegakan supremasi hukum
5. Optimalisasi pembangunan sistem infrastruktur daerah yang terpadu dan berkelanjutan guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	a) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur daerah yang berkualitas, merata dan sinergis dengan potensi ekonomi daerah
	b) Pengendalian pembangunan yang berwawasan lingkungan
	c) Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang berkelanjutan
	b) Pengendalian pembangunan yang berwawasan lingkungan
	c) Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang berkelanjutan

BAB III
URUSAN DESENTRALISASI

A. Ringkasan Urusan Desentralisasi

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018, yang merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021. sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

1. Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan

Kabupaten Sidoarjo sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Pemerintahan Daerah. Urusan Wajib yang dilaksanakan di Kabupaten Sidoarjo tahun 2018, yaitu terdiri dari :

- Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yaitu:
  1. Urusan Pendidikan
  2. Urusan Kesehatan
  3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
  5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
  6. Urusan Sosial
- Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yaitu :
  1. Urusan Tenaga Kerja
  2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  3. Urusan Pangan
  4. Urusan Pertanahan

5. Urusan Lingkungan Hidup
6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9. Urusan Perhubungan
10. Urusan Komunikasi dan Informatika
11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
12. Urusan Penanaman Modal
13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga
14. Urusan Statistik
15. Urusan Persandian
16. Urusan Kebudayaan
17. Urusan Perpustakaan
18. Urusan Kearsipan

Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Pemerintahan Daerah. Urusan pilihan yang dilaksanakan di Kabupaten Sidoarjo tahun 2018, antara lain :

1. Urusan Kelautan dan Perikanan
2. Urusan Pariwisata
3. Urusan Pertanian
4. Urusan Perdagangan
5. Urusan Perindustrian
6. Urusan Transmigrasi

Unsur penunjang adalah yang melaksanakan fungsi-fungsi yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah antara lain kesekretariatan, perencanaan, pengawasan, kepegawaian, keuangan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta kewilayahan. Unsur penunjang yang dilaksanakan di Kabupaten Sidoarjo tahun 2018, antara lain :

1. Unsur Penunjang Sekretariat Daerah
2. Unsur Penunjang Sekretariat DPRD

3. Unsur Penunjang Perencanaan
4. Unsur Penunjang Keuangan
5. Unsur Penunjang Pengawasan
6. Unsur Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
7. Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan
8. Unsur Penunjang Kewilayahan

2. Program Kerja yang diselenggarakan

Pada tahun 2018 Kabupaten Sidoarjo mengembangkan Sistem Aplikasi RDS (Regional Development System) untuk menjaga konsistensi antara program / kegiatan mulai dari Perencanaan dalam RPJMD dan Renstra OPD, Penganggaran dalam RKA dan DPA, serta pada dokumen pelaporan. Berikut konsistensi Program / Kegiatan yang diselenggarakan Kabupaten Sidoarjo untuk tiap urusan pemerintahan di Tahun 2018, sebagai berikut :

Tabel III.A.1

Konsistensi Program Kerja OPD Se - Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018

NO	URUSAN DAN OPD PELAKSANA	JUMLAH PROGRAM				
		RPJMD	RKPD	RENJA OPD	RKA OPD	DPA OPD
	URUSAN WAJIB					
1	**Pendidikan**					
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12	12	12	12	12
2	**Kesehatan**					
	Dinas Kesehatan	9	9	9	9	9
	Rumah Sakit Umum Daerah	1	1	1	1	1
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**					
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11	11	11	11	11
4	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**					
	Dinas Perumahan dan Permukiman	7	7	7	7	7
5	**Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**					
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8	8	8	8	8
	Satuan Polisi Pamong Praja	8	8	8	8	8
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8	8	8	8	8
6	**Sosial**					
	Dinas Sosial	7	7	7	7	7

7	**Tenaga Kerja**					
	Dinas Tenaga Kerja	7	7	7	7	7
8	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**					
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana	1	1	1	1	1
9	**Pangan**					
	Dinas Pangan dan Pertanian	1	1	1	1	1
10	**Pertanahan**					
	Dinas Perumahan dan Permukiman	1	1	1	1	1
11	**Lingkungan Hidup**					
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	8	8	8	8	8
12	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**					
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8	8	8	8	8
13	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**					
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana	6	6	6	6	6
14	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**					
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana	2	2	2	2	2
15	**Perhubungan**					
	Dinas Perhubungan	8	8	8	8	8
16	**Komunikasi dan Informatika**					
	Dinas Komunikasi dan Informatika	7	7	7	7	7
17	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**					
	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	7	7	7	7	7
18	**Penanaman Modal**					
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8	8	8	8	8
19	**Kepemudaan dan Olahraga**					
	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	8	8	8	8	8
20	**Statistik**					
	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	1	1	1	1
21	**Persandian**					
	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	1	1	1	1
22	**Kebudayaan**					
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	1	1	1	1

23	**Perpustakaan**					
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7	7	7	7	7
24	**Kearsipan**					
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1	1	1	1	1
	URUSAN PILIHAN					
1	**Kelautan dan Perikanan**					
	Dinas Perikanan	8	8	8	8	8
2	**Pertanian**					
	Dinas Pangan dan Pertanian	8	8	8	8	8
3	**Pariwisata**					
	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	1	1	1	1	1
4	**Perindustrian**					
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5	5	5	5	5
5	**Perdagangan**					
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2	2	2	2	2
6	**Transmigrasi**					
	Dinas Tenaga Kerja	0	0	0	0	0
	UNSUR PENUNJANG					
1	**Kesekretariatan**					
	Sekretariat Daerah	12	12	12	12	12
	Sekretariat DPRD	8	8	8	8	8
2	**Perencanaan Pembangunan**					
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10	10	10	10	10
3	**Keuangan**					
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	6	6	6	6	6
	Badan Pelayanan Pajak Daerah	7	7	7	7	7
4	**Pengawasan**					
	Inspektorat	5	5	5	5	5
5	**Kepegawaian dan Diklat**					
	Badan Kepegawaian Daerah	9	9	9	9	9
6	**Kewilayahan**					
	Kecamatan Balongbendo	6	6	6	6	6
	Kecamatan Prambon	6	6	6	6	6
	Kecamatan Sedati	6	6	6	6	6
	Kecamatan Tanggulangin	6	6	6	6	6
	Kecamatan Tarik	6	6	6	6	6
	Kecamatan Buduran	6	6	6	6	6
	Kecamatan Candi	6	6	6	6	6
	Kecamatan Gedangan	6	6	6	6	6
	Kecamatan Jabon	6	6	6	6	6
	Kecamatan Krembung	6	6	6	6	6
	Kecamatan Krian	7	7	7	7	7

	Kecamatan Porong	7	7	7	7	7
	Kecamatan Sidoarjo	7	7	7	7	7
	Kecamatan Sukodono	5	5	5	5	5
	Kecamatan taman	6	6	6	6	6
	Kecamatan Tulangan	7	7	7	7	7
	Kecamatan Waru	6	6	6	6	6
	Kecamatan Wonoayu	6	6	6	6	6
JUMLAH		**346**	**346**	**346**	**346**	**346**

Sumber Data : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

3. Anggaran, Realisasi dan Pelaksana Urusan Pemerintahan

Tahun 2018 Kabupaten Sidoarjo melaksanakan 24 urusan wajib, 6 urusan pilihan, dan unsur penunjang. Adapun anggaran belanja, realisasi dan pelaksana untuk masing-masing urusan pemerintahan, adalah sebagai berikut :

Tabel III.A.2
Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2018

NO.		URUSAN / OPD	ANGGARAN	REALISASI	%
	1	**URUSAN PENDIDIKAN**			
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	**1,149,278,764,665.86**	**957,049,847,404.18**	**83.27%**
	2	**URUSAN KESEHATAN**			
		Dinas Kesehatan	**340,267,192,477.32**	**264,484,645,584.25**	**77.73%**
		Rumah Sakit Umum Daerah	**526,792,234,120.98**	**504,016,097,869.88**	**95.68%**
	3	**URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**			
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	**748,883,539,240.00**	**517,527,284,568.93**	**69.11%**
	4	**URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**			
		Dinas Perumahan dan Permukiman	**86,171,703,433.77**	**18,385,171,078.50**	**21.34%**
	5	**URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**			
		Satuan Polisi Pamong Praja	**27,226,373,263.00**	**25,233,627,664.00**	**92.68%**
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	**11,205,806,386.00**	**10,196,880,057.00**	**91.00%**
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	**24,636,425,036.00**	**22,326,079,713.05**	**90.62%**
	6	**URUSAN SOSIAL**			
		Dinas Sosial	**10,883,159,460.00**	**9,583,284,882.00**	**88.06%**
	7	**URUSAN TENAGA KERJA**			
		Dinas Tenaga Kerja	**11,578,469,663.00**	**10,175,227,239.00**	**87.88%**
	8	**URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**			
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana	**11,181,914,610.33**	**6,883,344,032.67**	**61.56%**
	9	**URUSAN PANGAN**			
		Dinas Pangan dan Pertanian	**10,485,872,212.00**	**9,710,486,931.46**	**92.61%**
	10	**URUSAN PERTANAHAN**			
		Dinas Perumahan dan Permukiman	**16,323,945,397.25**	**12,310,243,347.68**	**75.41%**
	11	**URUSAN LINGKUNGAN HIDUP**			
		Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	**227,572,330,943.00**	**185,050,448,217.00**	**81.32%**

	12	**URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**			
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	**18,432,623,312.00**	**16,953,633,307.00**	**91.98%**
	13	**URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**			
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana	**11,181,914,610.33**	**6,883,344,032.67**	**61.56%**
	14	**URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**			
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana	**11,181,914,610.33**	**6,883,344,032.67**	**61.56%**
	15	**URUSAN PERHUBUNGAN**			
		Dinas Perhubungan	**49,687,421,410.00**	**44,245,138,122.32**	**89.05%**
	16	**URUSAN KOMUNIKAIS DAN INFORMATIKA**			
		Dinas Komunikasi dan Informatika	**8,756,944,904.33**	**8,131,785,954.67**	**92.86%**
	17	**URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**			
		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	**18,847,822,645.00**	**17,455,112,563.00**	**92.61%**
	18	**URUSAN PENANAMAN MODAL**			
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	**15,192,773,233.00**	**13,918,792,403.96**	**91.61%**
	19	**URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**			
		Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	**12,066,439,259.50**	**10,758,219,006.74**	**89.16%**
	20	**URUSAN STATISTIK**			
		Dinas Komunikasi dan Informatika	**8,756,944,904.33**	**8,131,785,954.67**	**92.86%**
	21	**URUSAN PERSANDIAN**			
		Dinas Komunikasi dan Informatika	**8,756,944,904.33**	**8,131,785,954.67**	**92.86%**
	22	**URUSAN KEBUDAYAAN**			
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	**164,182,680,666.55**	**136,721,406,772.03**	**83.27%**
	23	**URUSAN PERPUSTAKAAN**			
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	**8,827,682,560.50**	**8,005,886,878.00**	**90.69%**
	24	**URUSAN KEARSIPAN**			
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	**8,827,682,560.50**	**8,005,886,878.00**	**90.69%**
	1	**URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**			
		Dinas Perikanan	**20,511,577,942.00**	**17,199,549,756.00**	**83.85%**
	2	**URUSAN PERTANIAN**			
		Dinas Pangan dan Pertanian	**29,532,402,339.33**	**20,971,744,424.00**	**71.01%**
	3	**URUSAN PARIWISATA**			
		Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	**12,066,439,259.50**	**10,758,219,006.74**	**89.16%**
	4	**URUSAN PERINDUSTRIAN**			
		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	**27,431,403,763.00**	**23,574,843,558.50**	**85.94%**
	5	**URUSAN PERDAGANGAN**			
		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	**27,431,403,763.00**	**23,574,843,558.50**	**87.96%**
	6	**URUSAN TRANSMIGRASI**			
		Dinas Tenaga Kerja	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
	1	**UNSUR PENUNJANG KESEKRETARIATAN**			
		Sekretariat Daerah	**62,952,575,655.00**	**53,117,837,766.08**	**84.38%**
		Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	**2,408,948,500.00**	**2,300,237,520.00**	**95.49%**
		Sekretariat DRPD	**78,847,499,366.00**	**58,089,676,413.00**	**73.67%**
		DPRD	**30,030,800,000.00**	**25,921,185,108.00**	**86.32%**
	2	**UNSUR PENUNJANG PENGAWASAN**			
		Inspektorat	**11,136,907,456.00**	**9,856,025,768.00**	**88.50%**

	3	**UNSUR PENUNJANG PERENCANAAN**			
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	**19,575,372,127.50**	**17,375,282,658.13**	**88.76%**
	4	**UNSUR PENUNJANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**			
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	**2,796,481,732.50**	**2,482,183,236.88**	**88.76%**
	5	**UNSUR PENUNJANG KEUANGAN**			
		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (OPD)	**16,663,401,035.00**	**15,486,712,837.00**	**92.94%**
		Badan Pelayanan Pajak Daerah	**54,529,577,183.00**	**46,812,771,166.00**	**85.85%**
		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	**816,949,034,403.64**	**758,149,361,385.00**	
	6	**UNSUR PENUNJANG KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT**			
		Badan Kepegawaian Daerah	**81,714,449,268.00**	**69,732,574,845.50**	**85.34%**
	7	**UNSUR PENUNJANG KEWILAYAHAN**			
		Kecamatan Sidoarjo	**24,537,540,335.00**	**22,524,507,918.00**	**91.80%**
		Kecamatan Candi	**5,099,587,395.00**	**4,216,366,242.00**	**82.68%**
		Kecamatan Buduran	**4,703,864,841.00**	**4,262,593,338.00**	**90.62%**
		Kecamatan Gedangan	**4,999,419,734.00**	**4,128,889,125.00**	**82.59%**
		Kecamatan Sedati	**5,312,918,171.00**	**4,701,879,424.00**	**88.50%**
		Kecamatan Waru	**6,109,624,576.00**	**5,512,109,145.00**	**90.22%**
		Kecamatan Taman	**16,817,838,588.00**	**16,054,804,968.00**	**95.46%**
		Kecamatan Krian	**8,591,335,349.00**	**7,705,911,967.00**	**89.69%**
		Kecamatan Wonoayu	**4,773,794,859.00**	**4,301,658,089.00**	**90.11%**
		Kecamatan Sukodono	**4,895,092,981.00**	**4,482,030,467.00**	**91.56%**
		Kecamatan Balongbendo	**4,502,092,221.00**	**4,151,964,423.00**	**92.22%**
		Kecamatan Tarik	**4,630,209,052.00**	**4,151,727,897.00**	**89.67%**
		Kecamatan Tulangan	**5,461,059,630.00**	**4,902,600,524.00**	**89.77%**
		Kecamatan Prambon	**5,503,374,071.00**	**5,119,402,135.00**	**93.02%**
		Kecamatan Krembung	**6,398,313,957.00**	**5,464,452,456.00**	**85.40%**
		Kecamatan Tanggulangin	**5,732,039,146.00**	**5,005,931,818.00**	**87.33%**
		Kecamatan Jabon	**4,648,098,621.00**	**3,803,251,990.00**	**81.82%**
		Kecamatan Porong	**8,239,603,917.00**	**7,108,908,319.00**	**86.28%**
		TOTAL BELANJA	**4,972,721,601,726.70**	**4,120,160,829,702.29**	**82.86%**

Sumber Data : BPKAD Kab. Sidoarjo cut off per tanggal 31 Desember 2018

2. Ketersediaan Personil Pelaksana Urusan Pemerintahan

Ketersediaan personil Pelaksana Urusan Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo tahun 2018, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.A.3

Rekapitulasi Data Kepegawaian Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018

No.	URUSAN / OPD	Jabatan Struktural Yang Harus Ada	Jabatan Struktural Yang Ada / Terisi	Non Struktural (Staf)	Jabatan Fungsional	Jumlah Pegawai
	URUSAN WAJIB					
1	**Pendidikan**					
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	25	21	590	5,879	6,490
2	**Kesehatan**					
	DINAS KESEHATAN	48	48	324	968	1,340
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	29	28	187	473	688
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**					
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	35	29	150	3	182
4	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**					
	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	14	13	25	0	38
5	**Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**					
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	14	12	22	1	35
	SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM	5	3	0	0	3
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	13	13	100	2	115
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	14	13	65	1	79
6	**Sosial**					
	DINAS SOSIAL	16	14	20	1	35
7	**Tenaga Kerja**					
	DINAS TENAGA KERJA	14	13	17	5	35
8	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**					
	DPMDP3AKB	4	4	5	0	9
9	**Pangan**					
	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	4	4	4	58	66
10	**Pertanahan**					
	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	3	3	2	0	5
11	**Lingkungan Hidup**					
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	23	19	291	1	311

12	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**					
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	21	19	33	2	54
13	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**					
	DPMDP3AKB	13	9	35	1	45
14	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**					
	DPMDP3AKB	7	7	4	0	11
15	**Perhubungan**					
	DINAS PERHUBUNGAN	23	18	61	14	93
16	**Komunikasi dan Informatika**					
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	13	10	20	5	35
17	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**					
	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	15	14	25	0	39
18	**Penanaman Modal**					
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	17	17	32	2	51
19	**Kepemudaan dan Olahraga**					
	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	10	9	50	1	60
20	**Statistik**					
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3	3	3	0	6
21	**Persandian**					
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4	4	7	0	11
22	**Kebudayaan**					
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	4	4	9	0	13
23	**Perpustakaan**					
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	11	9	10	4	23
24	**Kearsipan**					
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	3	3	7	3	13
	URUSAN PILIHAN					
1	**Kelautan dan Perikanan**					
	DINAS PERIKANAN	15	14	27	0	41
2	**Pertanian**					
	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	21	20	70	6	96
3	**Pariwisata**					
	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	4	4	6	0	10
4	**Perindustrian**					
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	8	8	13	4	25
5	**Perdagangan**					
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	13	13	150	9	172
6	**Transmigrasi**					
	DINAS TENAGA KERJA	1	1	2	0	3

	UNSUR PENUNJANG					
1	**Kesekretariatan**					
	SEKRETARIAT DAERAH	41	38	137	3	178
	SEKRETARIAT DPRD	15	14	41	2	57
2	**Perencanaan Pembangunan**					
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	18	16	17	7	40
3	**Penelitian dan Pengembangan**					
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3	3	3	2	8
4	**Keuangan**					
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	16	16	42	0	58
	BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH	24	13	59	1	73
5	**Pengawasan**					
	INSPEKTORAT	9	9	18	32	59
6	**Kepegawaian dan Diklat**					
	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	18	17	59	5	81
7	**Kewilayahan**					
	KECAMATAN BALONGBENDO	10	9	20	0	29
	KECAMATAN BUDURAN	10	9	20	1	30
	KECAMATAN CANDI	10	7	24	1	32
	KECAMATAN GEDANGAN	10	9	21	1	31
	KECAMATAN JABON	10	6	12	1	19
	KECAMATAN KREMBUNG	10	9	24	0	33
	KECAMATAN KRIAN	25	17	24	0	41
	KECAMATAN PORONG	40	14	31	1	46
	KECAMATAN PRAMBON	10	9	24	0	33
	KECAMATAN SEDATI	10	8	21	1	30
	KECAMATAN SIDOARJO	80	54	81	0	135
	KECAMATAN SUKODONO	10	8	22	1	31
	KECAMATAN TAMAN	50	34	38	1	73
	KECAMATAN TANGGULANGIN	10	6	24	1	31
	KECAMATAN TARIK	10	9	23	1	33
	KECAMATAN TULANGAN	10	8	32	0	40
	KECAMATAN WARU	10	9	21	1	31
	KECAMATAN WONOAYU	10	9	23	1	33
	JUMLAH	**946**	**783**	**3,227**	**7,507**	**11,517**

Sumber Data : BKD Kab. Sidoarjo cutt off per tanggal 31 Desember 2018

3. Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan oleh SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan prioritas masing-masing urusan, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.A.4

Rincian Aset Daerah Tahun 2018

NO	OPD	BAIK	RUSAK BERAT (Aset Lainnya)	JUMLAH	BAIK	RUSAK BERAT (Aset Lainnya)	JUMLAH
1	**Urusan Pendidikan**						
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	193.601	-	193.601	1.042.490.536.549,88	-	1.042.490.536.549,88
2	**Urusan Kesehatan**						
	Dinas Kesehatan	18.719	-	18.719	258.314.788.238,22	-	258.314.788.238,22
	RSUD	26.407	1600	28.007	485.410.791.715,30	5.491.568.317,90	490.902.360.033,20
3	**Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**						
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.116	564	6.680	2.972.414.640.693,47	1.874.817.811,67	2.974.289.458.505,14
4	**Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**						
	Dinas Perumahan dan Permukiman	2.872	201	3.073	388.996.547.931,24	1.617.684.895,54	390.614.232.826,77
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	996	29	1.025	27.798.225.607,00	109.695.000,00	27.907.920.607,00
5	**Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**						
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.095	69	1.164	5.758.487.625,00	159.964.200,00	5.918.451.825,00
	Satuan Polisi Pamong Praja	719	114	833	17.271.410.725,00	186.929.500,00	17.458.340.225,00
6	**Urusan Sosial**						
	Dinas Sosial	297	64	361	6.543.599.479,70	84.375.666,67	6.627.975.146,37
7	**Urusan Tenaga Kerja**						
	Dinas Tenaga Kerja	297	64	361	6.543.599.479,70	84.375.666,67	6.627.975.146,37
8	**Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**						
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana	853	16	869	7.034.291.356,33	39.688.333,33	7.073.979.689,67
9	**Urusan Pangan**						
	Dinas Pangan dan Pertanian	1.227	103	1.330	25.479.069.690,58	152.592.582,00	25.631.662.272,58

10	**Urusan Pertanahan**						
	Dinas Perumahan dan Permukiman	-	-	-	-	-	-
11	**Urusan Lingkungan Hidup**						
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	5.070	321	5.392	335.257.002.432,81	3.643.680.863,41	338.900.683.296,22
12	**Urusan Administarsi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**						
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	596	97	693	12.085.605.421,00	1.419.536.717,00	13.505.142.138,00
13	**Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**						
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana	853	16	869	7.034.291.356,33	39.688.333,33	7.073.979.689,67
14	**Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**						
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana	853	16	869	7.034.291.356,33	39.688.333,33	7.073.979.689,67
15	**Urusan Perhubungan**						
	Dinas Perhubungan	1.927	271	2.198	36.175.534.280,63	886.851.117,50	37.062.385.398,13
16	**Urusan Komunikasi dan Informasi**						
	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.558	291	2.849	45.031.849.639,83	941.411.713,70	45.973.261.353,53
17	**Urusan Penanaman Modal**						
	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.105	181	1.286	11.179.751.762,00	537.165.085,00	11.716.916.847,00
18	**Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**						
	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	122	8	129	5.719.720.941,81	25.258.850,00	5.744.979.791,81
19	**Urusan Kepemudaan dan Olahraga**						
	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	535	98	633	72.742.575.226,00	6.542.403.666,67	79.284.978.892,67
20	**Urusan Statistik**						
	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-	-	-
21	**Urusan Persandian**						
	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-	-	-
22	**Urusan Kebudayaan**						
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	535	98	633	72.742.575.226,00	6.542.403.666,67	79.284.978.892,67
23	**Urusan Kearsipan**						
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	14.080	17	14.097	8.100.439.179,50	35.166.622,50	8.135.605.802,00
24	**Urusan Perpustakaan**						
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	14.080	17	14.097	8.100.439.179,50	35.166.622,50	8.135.605.802,00

1	**Urusan Kelautan dan Perikanan**						
	Dinas Perikanan	1.516	17	1.533	187.363.324.399,00	49.273.600,00	187.412.597.999,00
2	**Urusan Pertanian**						
	Dinas Pangan dan Pertanian	1.110	139	1.249	50.330.445.745,50	224.483.225,00	50.554.928.970,50
3	**Urusan Pariwisata**						
	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	535	98	633	72.742.575.226,00	6.542.403.666,67	79.284.978.892,67
4	**Urusan Industri**						
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	122	8	129	5.719.720.941,81	25.258.850,00	5.744.979.791,81
5	**Urusan Perdagangan**						
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.333	206	1.538	394.074.835.584,47	679.758.850,00	394.754.594.434,47
6	**Urusan Transmigrasi**						
	Dinas Tenaga Kerja	297	64	361	6.543.599.479,70	84.375.666,67	6.627.975.146,37
1	**Unsur Penunjang Kesekretariatan**						
	Sekretariat Daerah	2.523	82	2.605	35.425.261.436,80	218.242.384,80	35.643.503.821,60
	Sekretariat DPRD	3.154	102	3.256	44.281.576.796,00	272.802.981,00	44.554.379.777,00
2	**Unsur Penunjang Pengawasan**						
	Inspektorat	750	36	786	6.890.635.310,00	264.069.100,00	7.154.704.410,00
3	**Unsur Penunjang Perencanaan**						
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.310	237	1.547	9.862.230.494,00	653.837.500,00	10.516.067.994,00
4	**Unsur Penunjang Keuangan**						
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.594	338	3.932	210.232.491.587,62	1.171.685.930,00	211.404.177.517,62
	Badan Pelayanan Pajak Daerah	49	17	66	180.776.618.715,40	35.355.000,00	180.811.973.715,40
5	**Unsur Penunjang Kepegawaian dan Diklat**						
	Badan Kepegawaian Daerah	1.379	242	1.621	21.443.587.714,00	785.289.433,00	22.228.877.147,00
6	**Unsur Penunjang Kewilayahan**						
	Kecamatan Balongbendo	508	4	512	5.761.172.451,84	5.600.000,00	5.766.772.451,84
	Kecamatan Prambon	509	135	644	6.000.732.108,84	86.658.800,00	6.087.390.908,84
	Kecamatan Sedati	607	81	688	4.590.951.230,84	79.440.000,00	4.670.391.230,84
	Kecamatan Tanggulangin	448	137	585	5.176.272.158,84	305.865.450,00	5.482.137.608,84
	Kecamatan Tarik	701	115	816	5.724.424.194,84	47.571.032,00	5.771.995.226,84
	Kecamatan Buduran	529	32	561	4.391.235.572,00	71.112.786,84	4.462.348.358,84
	Kecamatan Candi	702	67	769	7.997.215.120,00	203.143.286,84	8.200.358.406,84
	Kecamatan Gedangan	377	55	432	3.444.293.363,84	123.323.865,00	3.567.617.228,84
	Kecamatan Jabon	656	56	712	6.257.557.608,84	113.811.050,00	6.371.368.658,84

	Kecamatan Krembung	250	52	302	5.754.072.858,00	46.984.000,00	5.801.056.858,00
	Kecamatan Krian	493	44	537	43.548.860.241,00	131.015.000,00	43.679.875.241,00
	Kecamatan Porong	535	40	575	24.164.729.678,00	77.642.986,84	24.242.372.664,84
	Kecamatan Sidoarjo	1.765	2	1.767	111.130.794.247,84	1.950.000,00	111.132.744.247,84
	Kecamatan Sukodono	449	2	451	6.998.824.908,84	600.000,00	6.999.424.908,84
	Kecamatan taman	1.778	22	1.800	101.311.749.280,84	98.018.000,00	101.409.767.280,84
	Kecamatan Tulangan	426	77	503	6.577.981.172,00	188.980.986,00	6.766.962.158,00
	Kecamatan Waru	500	76	576	8.783.054.020,59	176.773.200,00	8.959.827.220,59
	Kecamatan Wonoayu	595	88	683	4.487.579.456,00	209.889.986,84	4.697.469.442,84
		325.012	**6.926**	**331.937**	**7.453.048.468.196**	**43.465.330.183**	**7.496.513.798.379**

Sumber Data : BPKAD Kab. Sidoarjo cutt off per tanggal 31 Desember 2018

B. Prioritas Urusan Wajib Yang Dilaksanakan

1. Urusan Pendidikan

a. Program

Program pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2018 meliputi :

1. Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
2. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
3. Program Peningkatan Mutu dan Relevansi Layanan Pendidikan
4. Program Perluasan dan Aksesibilitas Pendidikan
5. Program Pendidikan Sekolah Dasar
6. Program Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
7. Program Penyediaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Regional (BOSREG)

b. Realisasi Pelaksanaan Program Serta Permasalahan Dan Solusinya

Seluruh program urusan Pendidikan telah dilaksanakan, dan hasilnya dapat terlihat dari Meningkatnya Mutu dan Akses Pendidikan Dasar, diantaranya :

1. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 - 2021 target untuk angka harapan lama sekolah di tahun 2018 sebesar 14,25 tahun. Sedangkan realisasi tahun 2018 sebesar 14,34 tahun dengan angka ketercapaian sebesar 100,70%. Dibandingkan pada tahun 2017 realisasi untuk rata-rata lama sekolah sebesar 14,13 tahun. Hal tersebut bisa dikategorikan ada kenaikan sebesar 0,21 tahun.

Dengan realisasi angka 14,34 tahun tersebut dapat diartikan bahwa peserta didik lulusan SD sekarang di Kabupaten Sidoarjo punya potensi untuk bisa melanjutkan pada tingkat pendidikan Diploma II (DII).

Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah sampai dengan tahun 2018 sebagai berikut :

Grafik III.B.1

Angka Harapan Lama Sekolah

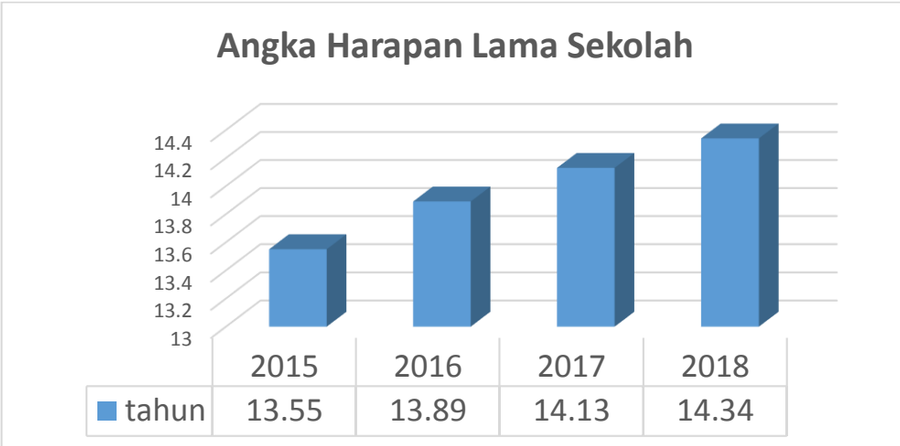

Sumber Data : Neraca Pendidikan Daerah (npd.data.kemdikbud.go.id)

Upaya – upaya yang telah dilakukan dalam mewujudkan peningkatan angka harapan lama sekolah, antara lain :

- Memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara umum dan secara khusus kepada pemangku kepentingan pendidikan termasuk kepada lembaga sekolah, madrasah dan lembaga-lembaga kursus yang menyelenggarakan pendidikan (pendidikan informal) untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan.
- Memberikan aksesibilitas yang seluas-luasnya tentang layanan pendidikan yang bermutu kepada masyarakat tentang pembiayaan sekolah gratis setingkat Wajar Dikdas 9 (sembilan) tahun.
- Pemerintah Kabupaten Sidoarjo agar memprogramkan subsidi biaya pendidikan setingkat SLTA sampai dengan S1 bagi masyarakat Sidoarjo yang kurang mampu baik yang menempuh di wilayah Kabupaten Sidoarjo dan di luar wilayah Kabupaten Sidoarjo.

2. Rata – Rata Lama Sekolah (RTLS)

Rata-Rata Lama Sekolah merupakan kombinasi angka partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan. Sedangkan definisi Lama Sekolah adalah banyaknya tahun seorang menjalankan pendidikan formal hingga saat dilakukan survey, baik yang sedang dijalani saat ini (sedang bersekolah) atau pun pendidikan yang

ditamatkan. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 - 2021 target untuk rata-rata lama sekolah di tahun 2018 sebesar 11,00 tahun. Sedangkan realisasi tahun 2018 sebesar 10,23 tahun dengan angka ketercapaian sebesar 93%. Dibandingkan pada tahun 2017 realisasi untuk rata-rata lama sekolah sebesar 10,22 tahun.

Dengan realisasi angka 10,23 tahun tersebut dapat diartikan bahwa masyarakat di Kabupaten Sidoarjo rata-rata sudah dapat menyelesaikan pendidikan pada tingkat Wajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan secara angka perhitungan ketercapaian rata-rata lama sekolah sudah mendekati Wajar Pendidikan Menengah 12 Tahun, pemenuhannya sebesar 1,68 tahun akan kita intervensi melalui program bersama dengan Pemerintah Propinsi Jawa Timur.

Grafik III.B.2

Rata - Rata Lama Sekolah

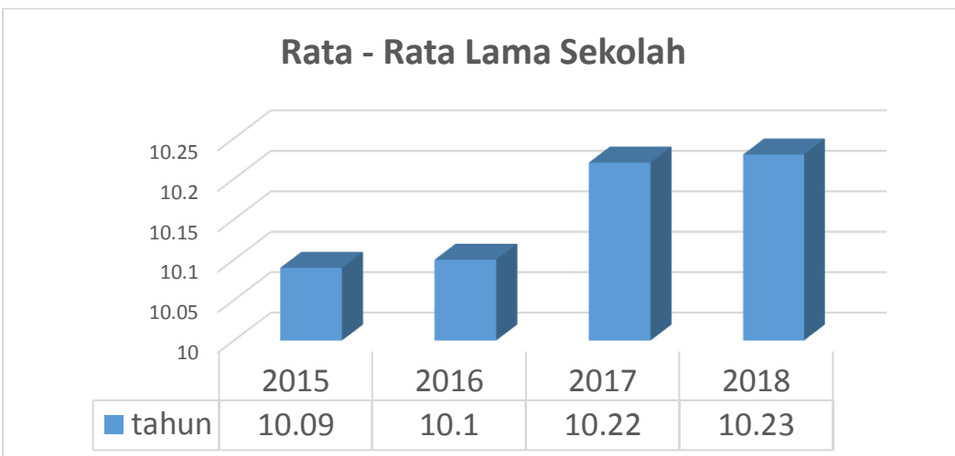

Sumber Data : Neraca Pendidikan Daerah (npd.data.kemdikbud.go.id)

3. Rata-Rata Nilai Ujian Nasional (UN) SD/MI dan SMP/MTs

Pengukuran Rata-Rata Nilai Ujian Nasional merupakan hasil akhir penilaian peserta didik yang merupakan salah satu gambaran pokok keberhasilan pendidikan yang dilakukan di setiap tingkatan pendidikan. Namun demikian nilai UN bukan merupakan ukuran yang mutlak keberhasilan pendidikan atau peningkatan kinerja pendidikan, melainkan masih banyak faktor yang mempengaruhi hasil penilaian ini.

Untuk setingkat SD/MI target yang ditetapkan untuk Nilai rata-rata UN tahun 2018 adalah sebesar 8,30 dengan realisasi sebesar 8,39 dengan angka ketercapaian 101,08%. Data tersebut diambil dari Laporan Hasil Ujian

Sekolah/Madrasah SD/MI Berstandar Nasional Tahun Ajaran 2017/2018 Provinsi Jawa Timur.

Dengan realisasi nilai 8,39 tersebut dapat diartikan bahwa layanan mutu pendidikan lebih meningkat sesuai dengan tujuan pendidikan yang bermutu dan berkualitas.

Untuk setingkat SMP/MTs target yang ditetapkan untuk Nilai rata-rata UN tahun 2018 adalah sebesar 6,87 dengan realisasi sebesar 5,16 dengan angka ketercapaian 75,10%. Data tersebut diambil dari Laporan Hasil Ujian Sekolah/Madrasah SMP/MTs Tahun Ajaran 2017/2018 Provinsi Jawa Timur.

Nilai capaian untuk Ujian Nasional SMP masih diatas rata-rata, baik Propinsi ataupun Nasional dengan penjelasan sebagai berikut : Rata- rata Propinsi 52,71 sedangkan untuk Nasional 51,10. Dengan Nilai yang dicapai Kab. Sidoarjo sebesar 53,93, sedangkan dalam tabel capaian Kabupaten itu melibatkan lembaga Madrasah sehingga berdampak pada nilai capaian secara keseluruhan yaitu SMP dan MTs, dengan penjelasan nilai MTs sebesar 49,33 terjadi penurunan sehingga berpengaruh terhadap realisasi Nilai capaian Ujian Nasional dengan kategori SMP dan MTs. sedangkan kewenangan Kabupaten adalah untuk lembaga SMP. Salah satu indikator penurunan realisasi ini terletak pada lembaga Madrasah Tsanawiyah yang mengalami penurunan, sehingga berdampak pada hasil rata-rata Nilai Ujian Nasional SMP/MTs. Yang pada intinya pengelolaan pengukuran mutu pendidikan Madrasah pada wilayah Kementerian Agama, sehingga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara normatif tidak mempunyai alat ukur untuk meningkatkan mutu.

Perkembangan nilai ujian nasional untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik III.B.3

Perkembangan Nilai Ujian Nasional

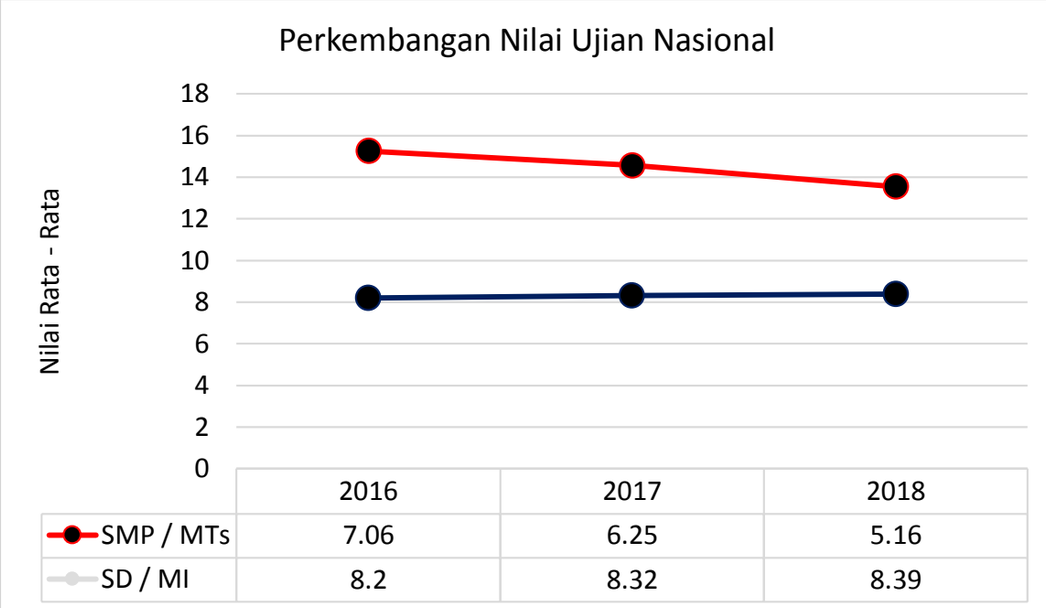

Sumber Data : Laporan Hasil Ujian Sekolah/Madrasah SD/MI dan SMP/MTs Tahun Ajaran 2017/2018 Provinsi Jawa Timur

Upaya – upaya yang telah dilakukan dalam mewujudkan peningkatan nilai ujian nasional, antara lain:

- Peningkatan sarana prasarana UNBK berupa komputer PC
- Meningkatkan pembinaan berupa simulasi UNBK
- Meningkatkan secara bersama layanan mutu pendidikan dengan Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo.

Dalam mendukung capaian indikator sasaran RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 – 2021, tujuan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan merata, dengan indikator sasaran program sebagai berikut :

1. **Guru/Pendidik yang memenuhi standar kualifikasi S1/D4**

   Untuk meningkatkan mutu tenaga pendidik sesuai dengan standar nasional pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama minimal S1/D4. Di Kabupaten Sidoarjo jumlah tenaga pendidik sesuai dengan Data Pendidikan Nasional (Dapodik) untuk lembaga negeri dan swasta sering terjadi perubahan seiring dengan perkembangan layanan

pendidikan yang berkualitas. Di Kabupaten Sidoarjo jumlah tenaga pendidik pada tahun 2018 sebanyak 11.635 orang, sedangkan yang sudah memenuhi standar kualifikasi S1/D4 sebanyak 11.352 orang atau mencapai 97,57%. Hal tersebut menunjukkan bahwa tenaga pendidik baik negeri dan swasta berupaya meningkatkan mutu kualifikasi pendidikan yang berdampak pada layanan mutu pendidikan di Kabupaten Sidoarjo.

Perkembangan Guru/Pendidik yang memenuhi standar kualifikasi S1/D4 pada tahun 2018 sebagai berikut :

Grafik III.B.4

Perkembangan Guru/Pendidik yang memenuhi Standart Kualifikasi S1/D4

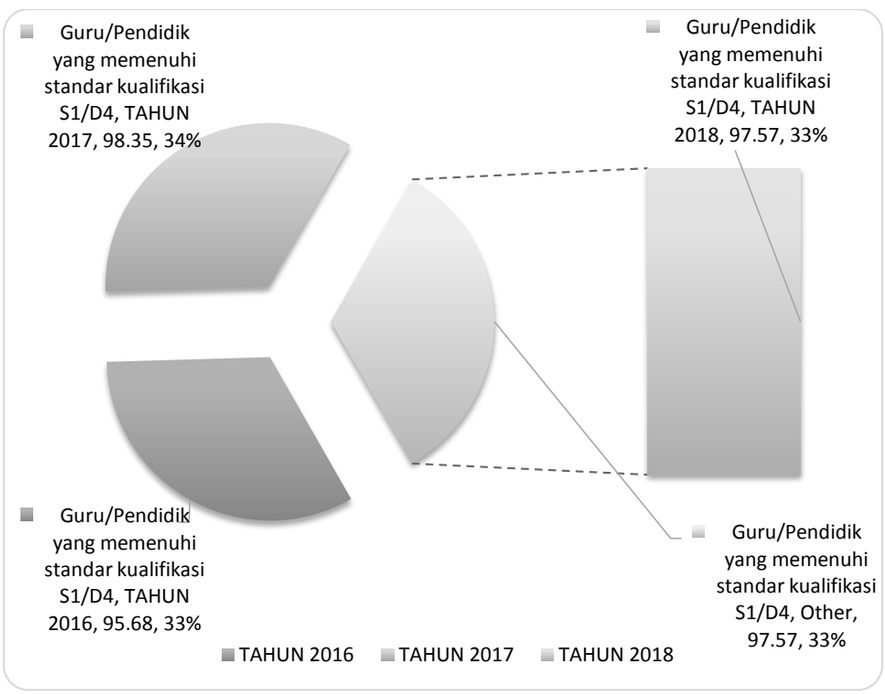

Sumber Data : Dapodik Tahun 2018

2. Guru/pendidik yang telah bersertifikasi

Persentase Guru/Pendidik yang telah bersertifikasi adalah merupakan salah satu indikator kinerja sasaran untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing. Di tahun 2018 ini target yang ditetapkan sebesar 47,75% terrealisasi sebesar 54,83%, dengan angka ketercapaian 114,83%.

Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan guru/tenaga pendidik yang bersertifikasi profesi mengalami peningkatan yang berdampak pada layanan mutu pendidikan yang berkualitas.

Perkembangan Guru/Pendidik yang telah bersertifikasi pada tahun 2018 sebagai berikut :

Grafik III.B.5

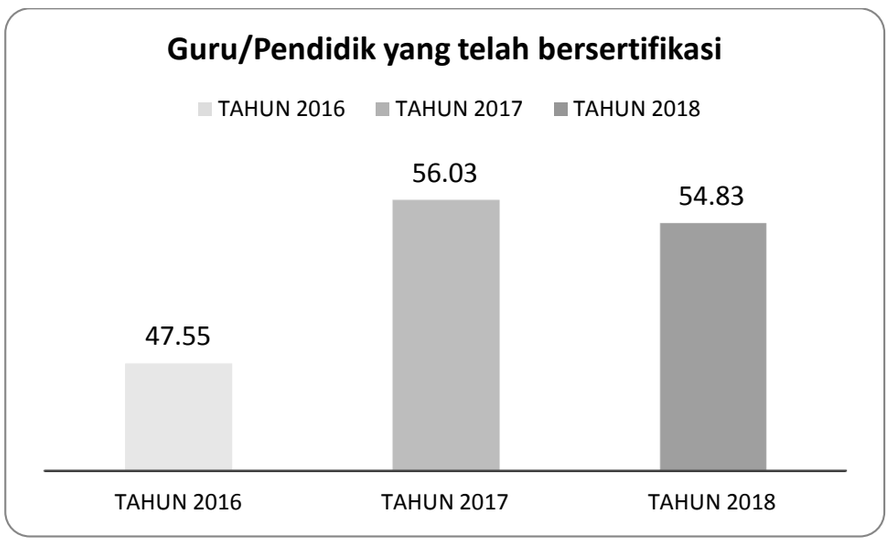

Sumber Data : Dapodik Tahun 2018

3. Persentase Satuan Pendidikan yang Terakreditasi

Di tahun 2018, target yang ditetapkan untuk Persentase SD yang terakreditasi A sebesar 70,17% terrealisasi sebesar 74,21%, dengan angka ketercapaian 105,76%. Untuk SMP target yang ditetapkan sebesar 65,63% terrealisasi sebesar 66,67% dengan angka ketercapaian 101,58%.

Perkembangan satuan pendidikan yang terakreditasi A pada masing-masing jenjang pendidikan pada tahun 2018 sebagai berikut :

Grafik III.B.6

Perkembangan Satuan Pendidikan Akreditasi A

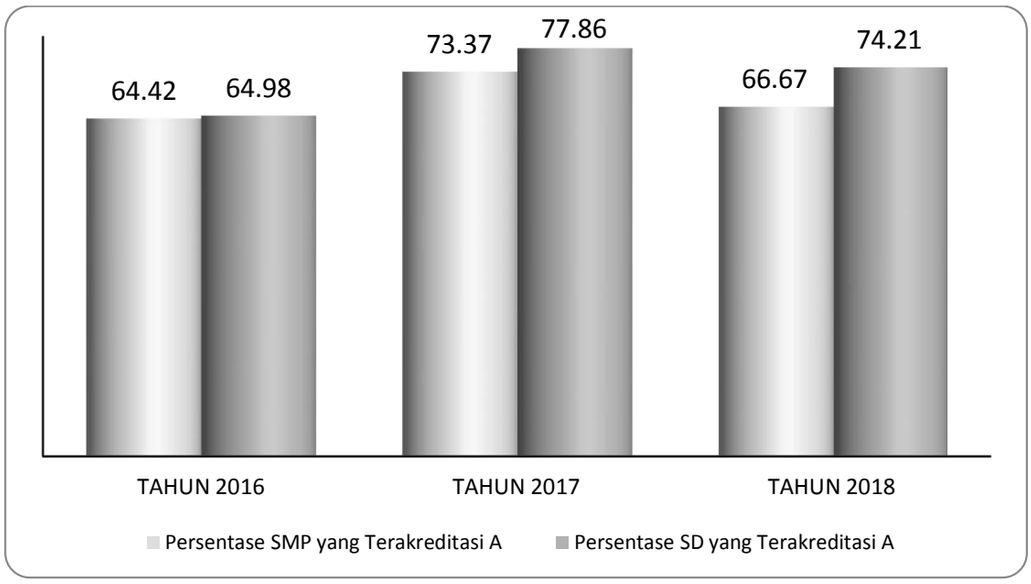

Sumber Data : Dapodik Tahun 2018

Upaya – upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan persentase SD dan SMP yang terakreditasi A yaitu: Peningkatan pemenuhan standar nasional pendidikan berupa :

1) Peningkatan sarana prasarana gedung sekolah/ruang kelas dan ruang penunjang lainnya.
2) Peningkatan standar proses/standar kelulusan berupa kegiatan-kegiatan penunjang evaluasi latihan Ujian Sekolah berupa Try Out.
3) Peningkatan standar pendidik dan tenaga kependidikan dengan memberikan tambahan kesejahteraan untuk Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap dan memberikan bantuan kesejahteraan kepada lembaga swasta untuk guru swasta.

4. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar merupakan perbandingan antara jumlah seluruh peserta didik sekolah untuk jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah seluruh anak usia sekolah untuk jenjang pendidikan tersebut.

Target yang ditetapkan untuk APK tahun 2018, PAUD sebesar 92,50%, SD/MI sebesar 107,93% dan SMP/MTs sebesar 98,97%. Sedangkan realisasi APK yang dicapai pada tahun 2018 untuk PAUD sebesar 92,80%,

SD/MI sebesar 107,97%, dan SMP/MTs sebesar 99,01%. Jika dibandingkan dengan Realisasi APK tahun 2017, maka terjadi kenaikan pada jenjang PAUD sebesar 0,02%, jenjang SD/MI mengalami kenaikan sebesar 0,26%, dan jenjang SMP/MTs mengalami kenaikan sebesar 0,16%.

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada masing-masing jenjang pendidikan pada tahun 2018 sebagai berikut :

Grafik III.B.7

Angka Partisipasi Kasar (APK)

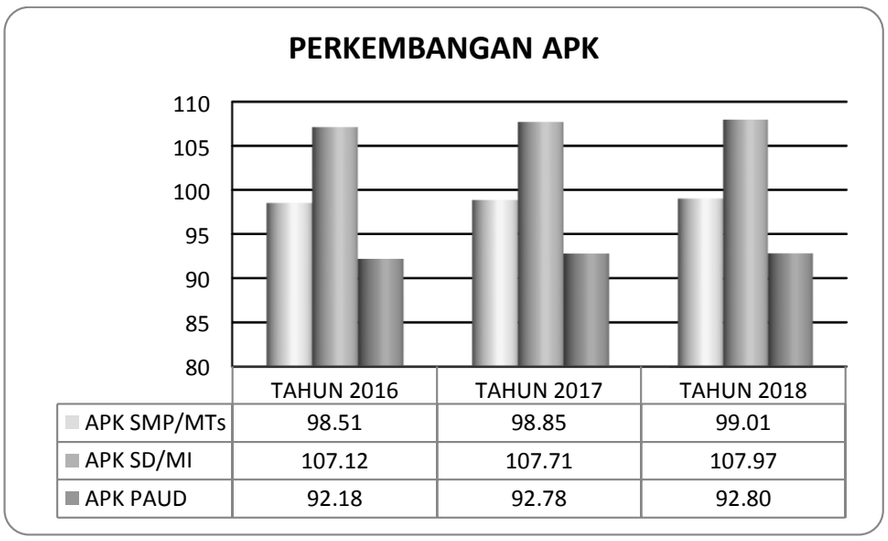

	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018
APK SMP/MTs	98.51	98.85	99.01
APK SD/MI	107.12	107.71	107.97
APK PAUD	92.18	92.78	92.80

Sumber Data : Dapodik dan Data Penduduk dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2018

Upaya – upaya yang telah dilakukan dalam mewujudkan peningkatan APK, antara lain :

1) Pemberlakuan Pendidikan Gratis bagi Sekolah Negeri untuk biaya investasi dan operasional dan untuk Sekolah swasta meringankan beban orang tua
2) Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru secara online
3) Pemberian bantuan kepada sekolah swasta berupa hibah partisipatif untuk penambahan ruang kelas baru.

5. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partispasi Murni (APM) merupakan perbandingan antara jumlah anak usia 7 s.d 12 tahun; 13 s.d 15 tahun dan 16 s.d 18 tahun yang bersekolah di SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK dibagi seluruh jumlah anak usia 7 s.d 12 tahun; 13 s.d 15 tahun dan 16 s.d 18 tahun untuk jenjang pendidikan tersebut.

Target APM yang ditetapkan pada tahun 2018 untuk SD/MI sebesar 96,54% dan SMP/MTs sebesar 78,99%. Sedangkan realisasi APM yang dicapai pada tahun 2018 untuk SD/MI sebesar 98,35% dan SMP/MTs sebesar 84,03%.

Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) yaitu :

1) Sistem PPDB pada penerimaan tingkat satuan pendidikan baik madrasah ataupun sekolah pada usia normatif terutama pada siswa kelas 1 (satu) sekolah swasta
2) Keberadaan siswa di wilayah perbatasan dengan Kabupaten Surabaya, Gresik, Mojokerto dan Pasuruan menentukan angka partisipatif
3) Masih banyak siswa melanjutkan di luar Kabupaten Sidoarjo pada Pondok Pesantren

Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) pada masing-masing jenjang pendidikan pada tahun 2018 sebagai berikut :

Grafik III.B.8

Angka Partisipasi Murni (APM)

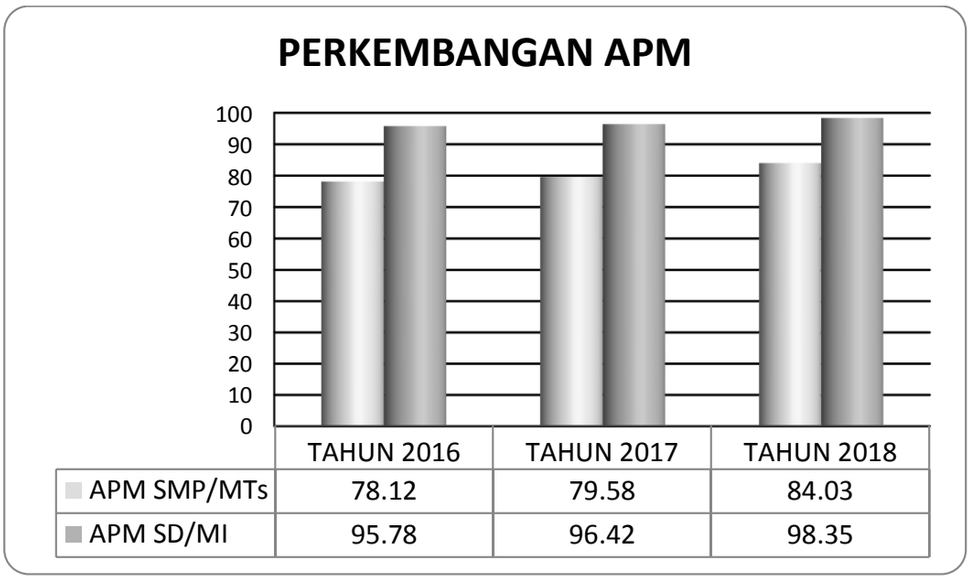

	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018
APM SMP/MTs	78.12	79.58	84.03
APM SD/MI	95.78	96.42	98.35

Sumber Data : Dapodik dan Data Penduduk dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2018

Upaya – upaya yang telah dilakukan dalam mewujudkan peningkatan APM, antara lain :

1) Kebijakan bersama tentang mekanisme penerimaan peserta didik baru antara Kementrian Agama Kabupaten Sidoarjo dan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo
2) Meningkatkan sarana dan prasarana serta mutu sekolah wilayah perbatasan sebagai sekolah rujukan
3) Mendorong sekolah formal untuk melakukan koordinasi dengan Kementrian Agama pada program Diniyah setingkat SD dan SMP dan pemberlakuan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

6. Rasio jumlah pendidik terhadap jumlah peserta didik

Rasio ini dapat dihitung dari jumlah pendidik dibanding dengan jumlah peserta didik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 pasal 17 dinyatakan bahwa Rasio minimal jumlah pendidik terhadap peserta didik untuk jenjang SD adalah 1:20 dan jenjang SMP 1:20. Realisasi tahun 2018 untuk rasio ini adalah pada jenjang SD sebesar 1:20 dan SMP sebesar 1:20.

Hal tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan guru SD dan SMP Negeri dan Swasta secara umum sudah terpenuhi, untuk meningkatkan mutu pendidik dalam mencapai mutu yang lebih baik, pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memberikan tambahan kesejahteraan pada Guru Tidak Tetap pada lembaga SD dan SMP Negeri.

Perkembangan Rasio jumlah pendidik terhadap jumlah peserta didik pada masing-masing jenjang pendidikan pada tahun 2018 sebagai berikut :

Grafik III.B.9

Perkembangan Rasio Pendidik dan Peserta Didik

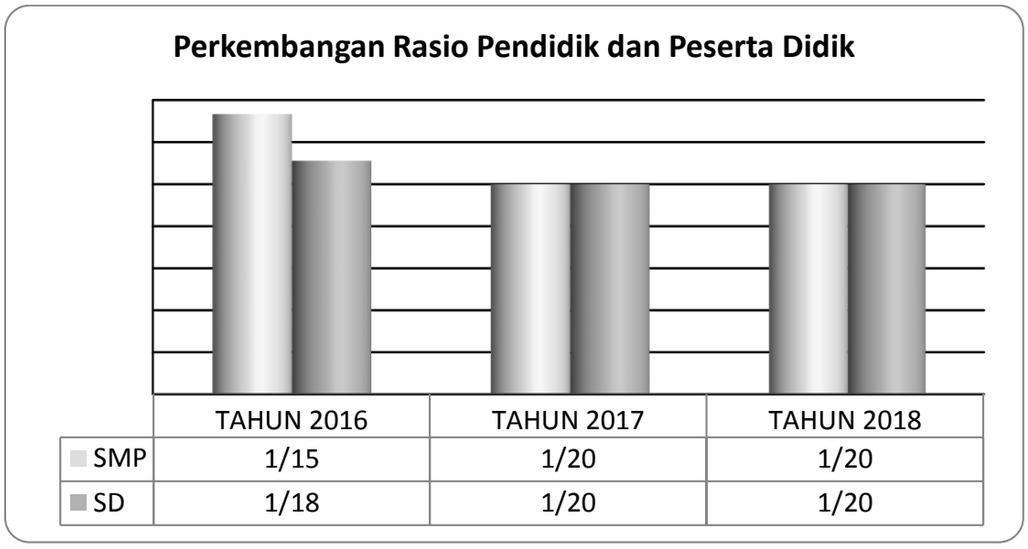

	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018
SMP	1/15	1/20	1/20
SD	1/18	1/20	1/20

Sumber Data : Dapodik Tahun 2018

9. Rasio jumlah ruang kelas belajar terhadap peserta didik

Rasio ini dapat dihitung dari jumlah kelas dibanding dengan jumlah peserta didik. Standar nasional berdasarkan standar ideal indikator pemerataan pendidikan yang ditetapkan melalui Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar proses satuan pendidikan dasar dan menengah adalah SD/MI sebesar 1:28 dan SMP/MTs sebesar 1:32.

Target yang ditetapkan untuk rasio jumlah kelas belajar terhadap peserta didik tahun 2018 untuk SD sebesar 1:28 dan untuk SMP sebesar 1:32. Realisasi tahun 2018 atas rasio ini adalah untuk SD sebesar 1:30 dan untuk SMP sebesar 1:32.

Dengan angka realisasi tersebut diatas, berarti pemenuhan terhadap Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 sudah sesuai dan dipenuhi. Secara

umum ketercukupan ruang kelas terhadap peserta didik sudah terpenuhi untuk lembaga swasta, untuk lembaga negeri masih terdapat proses belajar mengajar yang dilaksanakan di siang hari (double shift) sehingga untuk lembaga negeri perlu menyesuaikan terhadap Permendiknas Nomor 41 Tahun 2017 dengan konsekuensi menambah ruang kelas baru. Perhitungan 1 : 30 itu menggambarkan angka rata – rata secara Kabupaten bukan per lembaga.

Perkembangan Rasio jumlah ruang kelas belajar terhadap peserta didik pada masing-masing jenjang pendidikan pada tahun 2018 sebagai berikut :

Grafik III.B.10

Rasio Jumlah Kelas Belajar Terhadap Peserta Didik

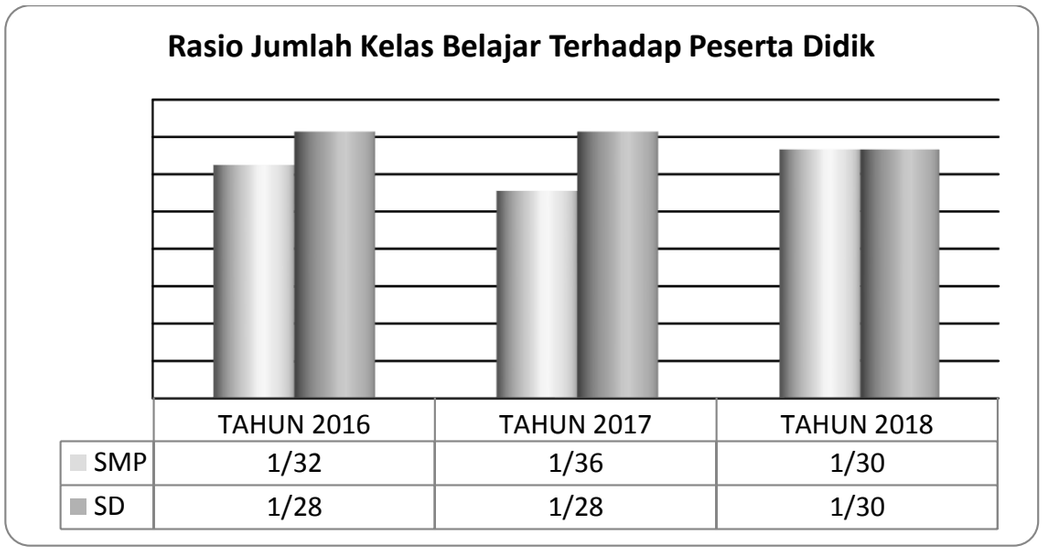

Sumber Data : Dapodik Tahun 2018

Adapun IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan pendidikan terdapat dalam buku lampiran.

c. SKPD Penyelenggara Urusan

Urusan pendidikan secara umum dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

d. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo berjumlah 6.490 orang. Secara rinci SDM penyelenggara urusan pendidikan menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir.

Sedangkan untuk jabatan fungsional yang tersedia sebagai berikut :

1. Guru Agama Islam
2. Guru Penjaskes
3. Guru Kelas
4. Guru Mata Pelajaran
5. Kepala Sekolah
6. Pengawas Dikmenum
7. Pengawas TK/SD
8. Penilik Dikmas
9. Pranata Komputer
10. Pranata Laboratorium Pendidikan

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran (per program)

Secara rinci anggaran dan realisasi masing masing program sebagaimana terlampir.

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp 52,811,925,200.00	Rp 38,877,900,600.00	73.62%
2	Program Peningkatan Mutu dan Relevansi Layanan Pendidikan	Rp 2,328,000,000.00	Rp 1,568,107,540.00	67.36%
3	Program Perluasan dan Aksesibilitas Pendidikan	Rp 111,653,961,600.00	Rp 97,229,513,476.00	87.08%
4	Program Pendidikan Sekolah Dasar	Rp 46,899,364,256.00	Rp 37,075,332,939.00	79.05%
5	Program Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Rp 7,531,280,750.00	Rp 3,684,327,620.00	48.92%
6	Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rp 22,791,763,000.00	Rp 21,359,190,200.00	93.71%
7	Program Penyediaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Regional (BOSREG)	Rp 146,024,499,775.00	Rp -	0.00%

f. Proses Perencanaan

Proses perencanaa urusan pendidikan dilaksanakan secara partisipatif dengan diawali masukan permasalahan dan usulan program kegiatan dari sekolah maupun dari Komite Sekolah. Penyelenggaran urusan pendidikan dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.

g. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagaimana terlampir

2. Urusan Kesehatan

a. Program

Program pembangunan untuk urusan kesehatan yang dilaksanakan pada tahun 2018 adalah :

1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
2. Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan
3. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
4. Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
5. Program Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas

b. Realisasi Program serta Permasalahan dan Solusinya

Program tersebut telah dilaksanakan untuk mendukung capaian indikator sebagai berikut :

1. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup waktu lahir (expectation of life at birth) yang biasanya dilambangkan dengan simbol eo dan sering disingkat dengan AHH adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan.

Tingginya Angka Harapan Hidup (AHH) mencerminkan makin membaiknya tingkat kesehatan masyarakat. Angka Harapan Hidup (AHH) yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) hanya sampai tahun 2017. Tren pencapaian AHH di Kabupaten Sidoarjo dibanding dengan capaian

AHH Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik III.B.11

Angka Harapan Hidup Kabuapten Sidoarjo dan Propinsi Jawa Timur Tahun 2015 - 2017

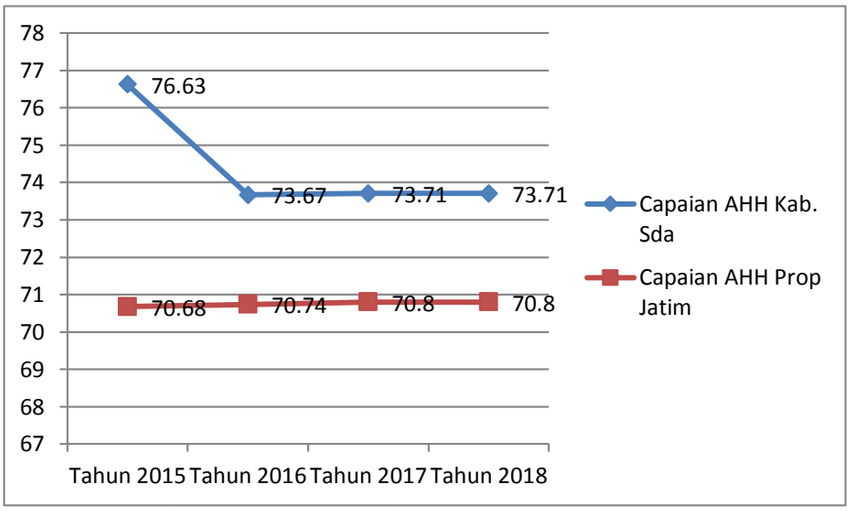

Sumber Data : BPS Kabupaten Sidoarjo

Dari grafik tersebut menggambarkan bahwa AHH di Kabupaten Sidoarjo dalam kategori sudah sangat baik. Untuk mempertahankan dan meningkatkannya, diupayakan budaya Perilaku/ Pola Hidup Sehat (PHBS) bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo.

Angka harapan hidup di Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan dari 73.67 pada tahun 2016 menjadi 73.71 pada tahun 2017. Untuk Angka Harapan Hidup di tahun 2018 masih belum dapat diketahui karena masih dalam tahap finalisasi survey. Sedangkan di tahun 2018 ini target angka harapan hidup adalah 73,68 tahun.

Berikut perbandingan harapan hidup berdasarkan jenis kelamin Laki – Laki dan Perempuan di Kabupaten Sidoarjo :

Grafik III.B.12

Perbandingan Angka Harapan Hidup Berdasarkan Jenis Kelamin

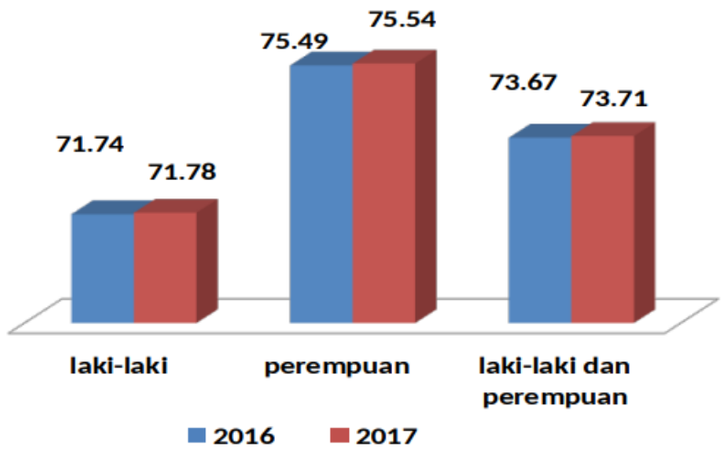

Sumber Data : BPS Kabupaten Sidoarjo

Pada tahun 2017 ini angka harapan hidup bagi laki-laki adalah sebesar 71,78 tahun, sedangkan angka harapan hidup perempuan sebesar 75,54 tahun. Angka harapan hidup ini memberikan gambaran bahwa bayi laki-laki yang dilahirkan sekitar tahun 2017 akan bisa hidup sampai pada usia 72 tahun sedangkan perempuan sampai pada usia 75 tahun. Angka harapan hidup perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki, yaitu terpaut sekitar 3 tahun.

Untuk mencapai peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH), Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dalam Renstra SKPD Dinas Kesehatan mencanangkan sasaran Utama "Meningkatnya pelayanan kesehatan dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat" dengan Indikator Kinerja Urusan adalah :

1. **Keluarga Sehat**
2. **Rata - Rata Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Puskesmas**

I. KELUARGA SEHAT

Sasaran dari Program Indonesia Sehat adalah meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Sasaran ini sesuai dengan sasaran

pokok RPJMN 2015-2019, yaitu: (1) meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak, (2) meningkatnya pengendalian penyakit, (3) meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan, (4) meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) kesehatan, (5) terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin, serta (6) meningkatnya responsivitas sistem kesehatan. Kesemuanya itu ditujukan kepada tercapainya keluarga-keluarga sehat.

Keluarga Sehat adalah adalah keluarga yang memenuhi Indeks Keluarga Sehat (IKS) ≥ 0,800 dari jumlah keluarga yang ada. Adapun indikator Keluarga Sehat , yaitu:

1. Keluarga mengikuti program KB (keluarga berencana)
2. Ibu hamil memeriksakan kehamilannya (*Ante Natal Care/ ANC*) sesuai standar
3. Bayi mendapatkan Imunisasi lengkap
4. Pemberian ASI eksklusif bayi 0 sd 6 bulan
5. Pemantuan pertumbuhan balita
6. Penderita TB Paru yang berobat sesuai standar
7. Penderita hipertensi yang berobat teratur
8. Penderita gangguan jiwa berat yang diobati
9. Tidak ada anggota keluarga yang merokok
10. Sekeluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
11. Mempunyai sarana air bersih
12. Menggunakan jamban keluarga

Kabupaten Sidoarjo mentargetkan 16% keluarga dengan kategori sehat pada tahun 2018. Hasil pelaksanaan Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga (PIS-PK) pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah keluarga yang disurvei sebanyak 66,43% (354.033 KK dari total KK 532.868).
2. Keluarga sehat sebanyak 27,95% dari jumlah keluarga yang disurvei atau 18,57% dari jumlah total keluarga yang ada.

Dibanding dengan capaian keluarga sehat tahun 2017 (14,01%), capaian keluarga sehat Kabupaten Sidoarjo tahun 2018 mengalami peningkatan. Selengkapnya untuk capaian keluarga sehat dari tahun 2016 sampai tahun 2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel III.B.1
Jumlah Keluarga Sehat Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2017 - 2018

Tahun	% Jumlah keluarga sehat yang disurvei	% keluarga sehat yang disurvei	% keluarga sehat dari total keluarga
2017	40%	34,49%	14,01%
2018	66,43	27,95	18,57

Sumber Data : Dinas Kesehatan

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian keluarga sehat adalah sebagai berikut :

1. pemberdayaan seluruh tenaga puskesmas agar melakukan pendataan sekaligus intervensi kepada keluarga yang dikunjunginya.
2. berkoordinasi dengan tenaga kesehatan yang menjadi jejaring puskesmas untuk ikut melakukan pendataan dan intervensi kepada masyarakat.
3. melakukan intervensi kepada keluarga sehingga keluarga pra sehat dapat meningkat menjadi keluarga sehat.
4. memberikan dukungan dana bagi perjalanan tenaga kesehatan ke keluarga di masyarakat.

II. RATA - RATA NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) PUSKESMAS

Seiring kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan perbaikan pelayanan. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pengguna layanan.

Target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) puskesmas di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 adalah ≥ 80. Dibanding dengan tahun 2017 (81,19), IKM Puskesmas di Kabupaten Sidoarjo tahun 2018 semakin meningkat. Rata-rata IKM puskesmas di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2018 adalah 82,44. Namun, ada 4 puskesmas (Puskesmas Sidoarjo, Puskesmas Kedungsolo, Puskesmas Kepadangan dan Puskesmas Krian) masih dibawah capaian target IKM, hal ini disebabkan beberapa hal, diantaranya karena kurangnya kenyamanan ruang tunggu pasien, dan kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan.

Puskesmas terus berbenah dalam peningkatan kualitas pelayanan yang berimbas pada semakin tingginya indeks kepuasan masyarakat dengan cara sebagai berikut :

1. Menstandarkan pelayanan kesehatan dengan terakreditasinya Puskesmas yang merupakan pengakuan dari lembaga independent tentang kualitas pelayanan di Puskesmas;
2. Berinovasi dalam memberikan pelayanan salah satunya dengan Sistem Antrian Pelayanan melalui SIAP TARIK (Puskesmas Tarik), CAK RAHMAN (Puskesmas Krembung), SI ELOK RUPA (Puskesmas Waru), pelayanan rekam medis paperless terintegrasi mulai antrian sampai mendapatkan obat;
3. Rekruitmen tenaga pelayanan Non PNS untuk memenuhi rasio jumlah tenaga pelayanan sesuai standar;
4. Menggalakkan upaya promotif dan preventif serta mensinergikan dengan upaya kuratif rehabilitatif (home visit, puskesmas dan PIS-PK);
5. Relokasi Puskesmas Gedangan ke area yang memenuhi standard;
6. Penambahan Puskesmas Induk baru di wilayah padat penduduk pada tahun 2019 seperti di wilayah kerja Puskesmas Candi.

Untuk mencapai 12 target indikator Keluarga Sehat, perlu dilakukan pencapaian juga terhadap indikator pendukung atau indikator program, antara lain :

PROGRAM	INDIKATOR
Upaya Kesehatan Masyarakat	1. AKI
	2. AKB
	3. Persentase Balita Stunting
	4. Persentase usia lanjut yang sehat

PROGRAM	INDIKATOR
	5. Persentase desa siaga aktif Purnama Mandiri
Pencegahan & Pengendalian Penyakit	1. Persentase Desa/Kel UCI
	2. Persentase penduduk > 18 Th dengan Hipertensi
	3. Persentase orang terinfeksi HIV positif mendptkan ARV
	4. Angka keberhasilan pengobatan TB
Pelayanan Kesehatan Masyarakat	1. Persentase Puskesmas dengan akreditasi minimal dasar
	2. Persentase FKTL dengan akreditasi
	3. Persentase penduduk memiliki jaminan kesehatan
	4. Presentase penyehat tradisional yang memiliki STPT (surat terdaftar pengobat tradisonal)
	5. Persentase keluarga yg disurvei KS
Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	1. Persentase nakes yg memiliki ijin praktek
	2. Persentase Puskesmas yg memiliki alat kesehatan sesuai standar
	3. Persentase IRTP yg mendapatkan sertifikat (ijin edar)
	4. Persentase ketersediaan obat dan vaksin
Upaya Kesehatan Masyarakat Di Puskesmas	Puskesmas Terakreditasi

1. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka kematian bayi (AKB) menunjukkan keberhasilan pelayanan kesehatan suatu wilayah. Di Kabupaten Sidoarjo, target Angka Kematian Bayi (AKB) tahun 2018 adalah 5,6 per 1.000 kelahiran hidup, sedang realisasi capaian sebesar 4,38 per 1.000 kelahiran hidup. Dibanding dengan capaian tahun 2017 (5,45), capaian AKB tahun 2018 cenderung turun. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa upaya dalam penurunan angka kematian bayi, antara lain:

- Peningkatan ketrampilan petugas tentang manajemen Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR), asfiksia, dan penanganan kegawat daruratan bayi;
- Adanya rujukan dini berencana;

- Melaksanakan *skill assesment* pada gawat darurat neonatal dengan sasaran tenaga kesehatan;
- Melakukan *Audit Maternal Perinatal* (AMP) pada kasus *near miss* dan atau kematian neonatal;
- Pemberian pelayanan *Ante Natal Care (ANC)* terpadu (10 T);
- Monev pasca latih.
- Pengembangan aplikasi software si CANTIK (Sidoarjo Cegah Kematian Ibu dan Anak) untuk pemantauan kesehatan anak (mulai dari lahir sampai dengan balita), dipantau tumbuh kembangnya untuk mengantisipasi terjadinya stunting.

Dibanding dengan capaian Angka Kematian Bayi nasional (24 per 1.00 Kelahiran Hidup), maka Kabupaten Sidoarjo dikatakan berhasil dalam program penurunan AKB.

Perkembangan Angka Kematian Bayi tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 terlihat pada grafik berikut ini :

Grafik III.B.13

Angka Kematian Bayi Tahun 2016 – 2018

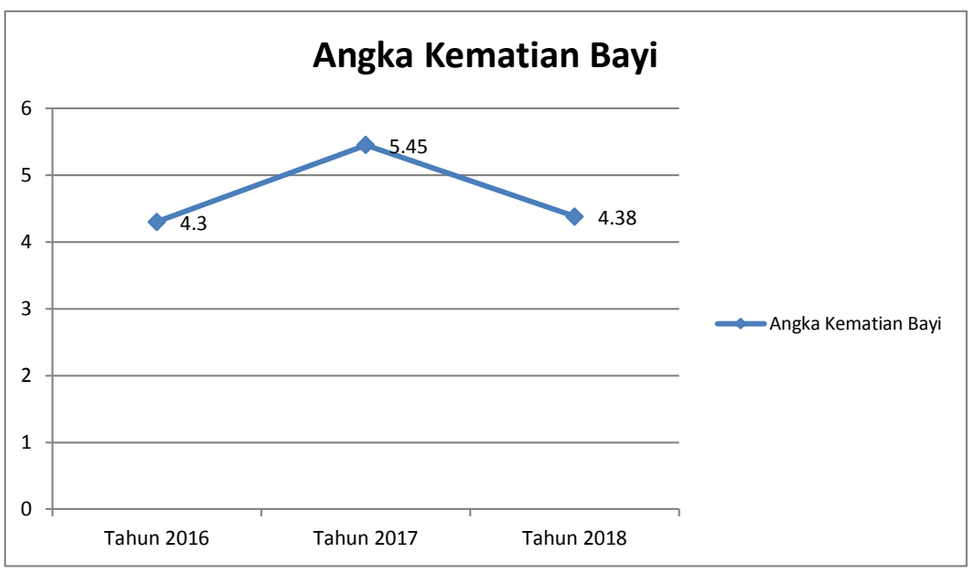

Sumber Data : Dinas Kesehatan

2. Angka Kematian Ibu (AKI)

Kematian Ibu adalah kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa kehamilan, persalinan dan masa nifas, kecuali kasus kecelakaan. Angka kematian ibu di kabupaten Sidoarjo tahun 2018 sebesar 64,13 per 100.000 kelahiran hidup lebih rendah dibanding tahun 2017 yaitu sebesar 82,62 per 100.000 kelahiran hidup. Dibanding target (71,4 per 100.000 kelahiran hidup), capaian Angka Kematian Ibu pada tahun 2018 di Kabupaten Sidoarjo menurun. Terlebih jika dibanding dengan capaian nasional (305 per 100.000 Kelahiran Hidup), maka Kabupaten Sidoarjo bisa dikatakan cukup berhasil dalam penanganan AKI. Ini dapat diartikan bahwa program-program yang telah dilaksanakan dalam upaya penurunan AKI berhasil guna.

Perkembangan angka kematian ibu tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 terlihat pada grafik berikut ini :

Grafik III.B.14

Angka Kematian Ibu Tahun 2016 – 2018

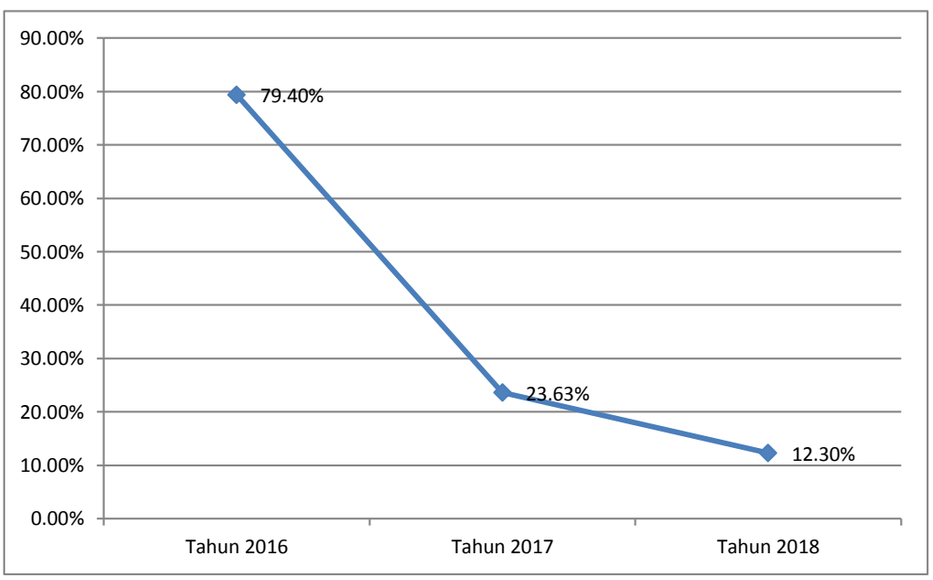

Sumber Data : Dinas Kesehatan

Adapun penyebab kematian ibu mayoritas disebabkan karena Pre eklamsia/ eklamsia sebesar 48% menyusul karena perdarahan sebesar 39%, infensi 9% dan karena jantung 4%.

Lebih rinci penyebab kematian ibu digambarkan sebagai berikut :

Grafik III.B.15
Penyebab Kematian Ibu Tahun 2018

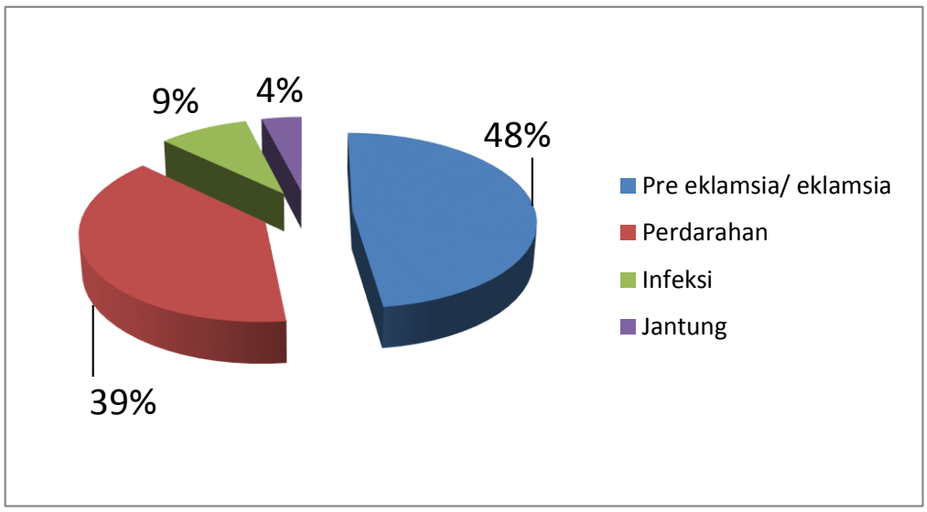

Sumber Data : Dinas Kesehatan

Masa kematian ibu mayoritas pada usia produktif (20 – 34 tahun) sebesar 69,6%, diatas 35 tahun 30,4%, terutama terjadi pada masa nifas.

Upaya – upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan angka kematian ibu yaitu :

- Pelaksanaan penerapan pelayanan standar ibu hamil (*Ante Natal Care*/ ANC terpadu-10T);
- Peningkatan ketrampilan tenaga kesehatan dalam APN (Peer Review Asuhan Persalinan Normal), kelas ibu, kegawatdaruratan;
- Pemanfaatan buku KIA bagi semua ibu dan tenaga kesehatan untuk memperoleh informasi dan memantau kesehatan ibu hamil;
- Refreshing deteksi risiko tinggi oleh masyarakat (kader kesehatan, PKK, dll)
- Optimalisasi dan Pemberdayaan Desa dengan P4K (Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi) termasuk penempelan stiker P4K dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan Masyarakat ini dibentuk dalam Pokja I (Pendataan, Penandaan, Pendampingan), Pokja 2 (Tabulin & Dasolin). Pokja 3 (Donor Darah), Pokja 4 (Ambulance Desa);

- Melakukan penilaian tatalaksana pada gawat darurat maternal dan neonatal melalui *skill assesment* dengan sasaran tenaga kesehatan (bidan);
- Optimalisasi sistem rujukan : kolaborasi SI CANTIK dengan SIMANIS RSUD, untuk kasus *emergency*/ rujukan darurat persalinan;
- Melakukan pengkajian dan pembelajaran *Audit Maternal Perinatal* (AMP) pada kasus near miss dan atau kematian ibu hamil, bersalin, ibu nifas dan pada perinatal dan neonatal.
- Optimalisasi jalinan kerjasama dan koordinasi di wilayah
- Evaluasi dan optimalisasi Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi (Penakib) Kabupaten Sidoarjo;
- Aplikasi Software Si Cantik (Sidoarjo Cegah Angka Kematian Ibu dan Anak), program bayi sampai dengan anak.

3. Persentase Balita Stunting

Balita stunting adalah balita yang panjang badannya/ tinggi badannya tidak sesuai dengan usia (Panjang badan menurut umur atau tinggi badan menurut umur < -2 SD

Stunting adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu lama, umumnya karena asupan makan yang tidak sesuai kebutuhan gizi. Stunting bisa terjadi mulai dari dalam kandungan, bayi baru lahir (dengan panjang badan < 48 cm) sampai dengan anak usia 2 tahun.

Kondisi di Kabupaten Sidoarjo, balita stunting tahun 2018 sebesar 23,74%, lebih baik dibandingkan dengan target (24%). Dengan angka ini, dapat dikatakan bahwa Kabupaten Sidoarjo berhasil dalam penanganan masalah gizi. Keberhasilan ini adalah bentuk komitmen kuat Pemerintah Daerah Sidoarjo untuk menanggulangi masalah gizi (stunting dan gizi buruk) yang dituangkan dalam Perda No 1 Tahun 2016 tentang Perbaikan Gizi dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

4. Cakupan Desa dengan *Universal Child Immunization* (UCI)

Desa yang mencapai UCI (*Universal Child Immunization*) adalah desa dimana 88% bagi di wilayah desa tersebut telah diimunisasi lengkap. Sedangkan target desa/ kelurahan UCI tahun 2018 sebanyak 88%. Pada tahun 2018, dari 353 desa/ kelurahan yang ada, terdapat 346 (98%) desa/ kelurahan yang telah mencapai UCI. Jika dibanding dengan capaian tahun 2017 sebanyak 93,48%, maka di tahu 2018 telah mengalami peningkatan capaian. Adapun desa yang belum UCI tahun 2018 adalah :

- Desa Kedungbendo : Puskesmas Tanggulangin, dengan capaian UCI sebanyak 94,7%
- Desa Renokenongo, Desa Jatirejo, Desa Siring, Desa Mindi, Desa Gedang, Desa Juwet : Puskesmas Porong, dengan capaian UCI sebanyak 40%

Desa/ kelurahan yang belum UCI tersebut disebabkan oleh karena 6 desa tersebut telah tenggelam oleh lumpur lapindo dan 2 desa penduduknya tinggal 30 – 40% oleh karena dampak lapindo. Secara statistik/ administrasi, desa/ kelurahan beserta penduduknya itu masih ada, namun secara riil, penduduknya sudah tidak ada dan pindah ke wilayah lain.

Meskipun UCI di Kabupaten Sidoarjo sudah melebihi target, namun tetap diwaspadai terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit PD3I (Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi) terutama di puskesmas yang UCI desanya belum mencapai target.

Upaya peningkatan kualitas dan kuantitas program imunisasi adalah dengan mengoptimalkan kegiatan-kegiatan, antara lain DQS (*Distric Quality Self Assesment*), survei *Effectif Vaksin Management* (EVM), dan *Rapid Convenience Assesment* (RCA) sweeping sasaran, Supervisi Supportif, peningkatan kapasitas (*knowledge skill*) petugas dan pemantauan kualitas penyimpanan vaksin, serta pemenuhan logistik pelayanan imunisasi, baik di layanan pemerintah maupun swasta.

5. Angka Morbiditas

Morbiditas adalah angka kesakitan (insiden atau prevalensi) dari suatu penyakit yang terjadi pada populasi dalam kurun waktu tertentu. Morbiditas berhubungan dengan terjadinya atau terjangkitnya penyakit di dalam populasi, baik fatal ataupun tidak. Angka morbiditas lebih cepat menentukan keadaan kesehatan masyarakat daripada angka mortalitas, karena banyak penyakit yang mempengaruhi kesehatan hanya mempunyai angka mortalitas yang rendah.

A. Angka Kesakitan TB

Tuberkulosis alias TB atau TBC adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini biasanya menyerang paru-paru sehingga disebut TB Paru. TB Paru masih menjadi momok penyakit yang menakutkan bagi masyarakat dunia, terutama di Indonesia. Angka keberhasilan pengobatan adalah angka yang menunjukkan prosentase pasien baru TB Paru terkonfirmasi bakterilogis yang menyelesaikan pengobatan (baik yang sembuh maupun pengobatan lengkap) diantara pasien baru TB Paru terkonfirmasi bakteriologis yang tercatat. Sembuh yaitu pasien TB Paru dengan hasil pemeriksaan bakteriologis positif pada awal pengobatan yang hasil pemeriksaan bakteriologis pada akhir pengobatan menjadi negatif pada salah satu pemeriksaan sebelumnya. Pengobatan lengkap yaitu pasien TB yang telah menyelesaikan pengobatan secara lengkap dimana pada salah satu pemeriksaan sebelum akhir pengobatan hasilnya negatif namun tanpa ada bukti hasil pemeriksaan bakteriologis pada akhir pengobatan.

Grafik III.B.16

Angka Keberhasilan Pengobatan TB Paru

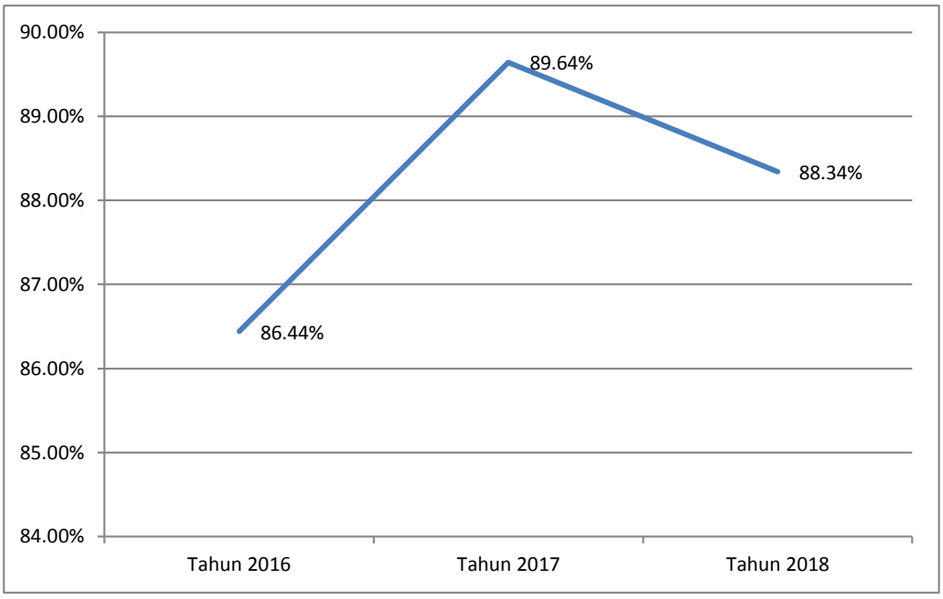

Sumber Data : Dinas Kesehatan

Tren angka keberhasilan pengobatan TB paru dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 cenderung fluktuatif. Realisasi angka keberhasilan pengobatan TB paru tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 berturut-turut adalah 86,44%, 89,64% pada tahun 2017 dan 88,34% pada tahun 2018. Target angka keberhasilan pengobatan TB Paru Tahun 2018 adalah 90%. Angka ini dinilai belum mencapai target yang ditetapkan. Adapun ketidakberhasilan dalam pengobatan antara lain disebabkan karena dropout (3,7%), gagal (0,8%), pindah (3,9%) dan meninggal (3,7%).

B. Angka Kesakitan HIV/AIDS

Pengendalian HIV/ AIDS merupakan salah satu isu strategis yang tertuang dalam rencana strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo 2016 – 2021.

HIV/ AIDS merupakan salah satu penyakit menular yang sama dengan penyakit infeksi yang lain dan harus dilakukan upaya pencegahan penularannya. Prevalensi HIV/AIDS adalah angka Perkiraan yang diperoleh dari Jumlah kasus HIV dibagi dengan Populasi *at Risk*

(populasi kunci). Pada saat ini di Kabupaten Sidoarjo belum ada data tentang populasi kunci karena tidak pernah dilakukan survei ke seluruh penduduk apakah memiliki perilaku beresiko terhadap penularan HIV/ tidak.

Estimasi penemuan kasus HIV-AIDS di Kabupaten Sidorajo sampai dengan tahun 2020 adalah 5.226 kasus. Adapun penemuan kasus kumulatif sampai dengan tahun 2018 adalah 2.964. Penemuan tahun 2018 sendiri untuk HIV adalah 461 kasus dan untuk AIDS sebanyak 201 kasus.

Tingginya penemuan kasus HIV/ AIDS disebabkan :

- Semakin aktifnya *system survelaince* HIV/AIDS;
- Semakin tingginya kesadaran penderita untuk memeriksakan diri;
- Semakin meluasnya informasi tentang HIV-AIDS;
- Semakin bertambahnya layanan tes HIV-AIDS.

Upaya pencegahan dan penanggulangan dilakukan melalui penyuluhan masyarakat, penjangkauan dan pendampingan kelompok resiko tinggi dan intervensi perubahan perilaku, layanan konseling dan testing HIV, layanan *Harm Reduction*, pengobatan dan pemeriksaan berkala penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS), pengamanan darah donor dan kegiatan lain yang menunjang pemberantasan HIV/AIDS. Serta penambahan Klinik Inisiasi Anti Retroviral Virus (ARV) yang saat ini menjadi 10 klinik, dinataranya puskesmas Krian, Porong, Waru, Prambon, Krembung, Sukodono, Gedangan, Sedati, Taman dan RSUD Sidoarjo.

C. Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD)

Demam berdarah adalah penyakit demam akut yang disebabkan oleh *virus dengue*, yang masuk ke peredaran darah manusia melalui gigitan nyamuk dari genus *aedes.* Penyakit ini sering muncul sebagai KLB dengan angka kesakitan dan kematian yang relatif tinggi.

Angka kesakitan DBD (*Inciden Rate*) di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2018 adalah sebesar 12,3 per 100.000 penduduk, sedang targetnya untuk tahun 2018 adalah < 49 per 100.000 penduduk. Dibanding tahun 2017 (23,63 per 100.000 penduduk), angka ini cenderung turun.

Perkembangan angka kesakitan DBD tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 terlihat pada grafik berikut ini :

Grafik III.B.17

Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk

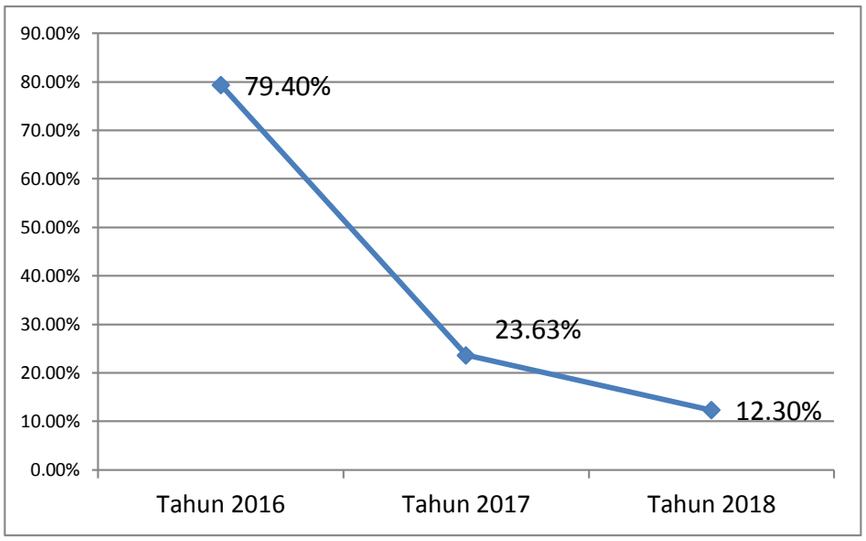

Sumber data: Dinas Kesehatan

Beberapa upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menekan penyebaran dan penularan DBD, antara lain :

- Meningkatkan kerjasama lintas sektor di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa;
- Meningkatkan kerjasama dengan Rumah Sakit dan Puskesmas untuk menetapkan wilayah sasaran pelaksanaan penanggulangan FOKUS;
- Memotivasi petugas DBD Puskesmas untuk meningkatkan kualitas dan frekuensi penyuluhan tentang DBD dan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M Plus (Menguras, menutup, mengubur serta mencegah gigitan nyamuk;
- Melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang DBD sehingga masyarakat dapat mencegah secara dini DBD dengan meningkatkan intensitas kegiatan PSN;
- Meningkatkan kualitas SDM juru pemantau jentik (Jumantik) Desa/Kelurahan melalui refreshing;

- Memotivasi tokoh masyarakat untuk mengajak masyarakat di sekitarnya melakukan gerakan 3M plus;
- Memberdayakan masyarakat secara berjenjang tentang strategi satu rumah satu jumantik.

Meskipun berhasil diturunkan, namun angka kesakitan DBD masih tetap ada dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan karena, antara lain :

1. Pemahaman tentang Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) belum sepenuhnya benar, sehingga Pelaksanaan PSN masih kurang tepat;
2. Pelaksanaan PSN belum serentak dan berkesinambungan;
3. Persepsi Masyarakat untuk memutuskan mata rantai penularan masih dominan dengan cara pengasapan, hal ini tampak pada Angka Bebas Jentik (ABJ) masih < 95%.

Adapun penyebaran kasus DBD terkonfirmasi terdapat pada semua wilayah Puskesmas, terdiri dari :

1. Desa endemis terdiri dari 109 Desa/ Kelurahan
2. Desa sporadis terdiri dari 222 Desa/ Kelurahan
3. Desa potensial terdiri dari 16 Desa/ Kelurahan
4. Desa bebas terdiri dari 6 Desa/ Kelurahan (Desa yang tenggelam).

Kabupaten Sidoarjo mempunyai 5% Desa/ Kelurahan Potensial. Desa potensial adalah wilayah dengan ABJ < 95% sehingga potensial sebagai wilayah endemis DBD, yang memungkinkan penularan DBD sangat tinggi. Hal ini juga dipengaruhi oleh curah hujan dan mobilitas penduduk yang tinggi, serta masalah lemahnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan PSN dengan benar, rutin dan berkesinambungan, juga lemahnya kesadaran masyarakat menjadikan anggota keluarganya menjadi pelaksana 1 R 1 J (Satu Rumah Satu Jumantik).

6. Akreditasi Puskesmas

Akreditasi adalah pengakuan yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah memenuhi standar Akreditasi. Tujuan akreditasi adalah meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien; meningkatkan perlindungan bagi sumber daya

manusia kesehatan, masyarakat dan lingkungannya, serta Puskesmas, Klinik Pratama, tempat praktik mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri dokter gigi sebagai institusi; dan meningkatkan kinerja Puskesmas, Klinik Pratama, tempat praktik mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri dokter gigi dalam pelayanan kesehatan perseorangan dan atau kesehatan masyarakat.

Terdapat 9 bab sebagai instrument penilaian akreditasi yang terdiri dari administrasi manajemen, upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP).

1. Administrasi Manajemen meliputi sistem penyelenggaraan Puskesmas, sarana prasarana, lokasi yang sesuai standar, ketenagaan dan pemeliharaan sarana prasarana
2. Upaya kesehatan masyarakat meliputi sistem penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat, komunikasi koordinasi dengan lintas sektor maupun lintas program, pelaksanaan dan evaluasi program di masyarakat.
3. Upaya kesehataan perorangan meliputi layanan kinis sesuai standar, obat, laboratorium, peralatan klinis, alat kesehatan sesuai standar, proses peningkatan dan pengembangan kompetensi bagi tenaga klinis
4. Mutu yang merupakan mutu puskesmas secara keseluruhan yaitu perbaikan mutu dan kinerja penyelenggaraan pelayanan Puskesmas baik di masyarakat maupun klinis perorangan secara brkesinambungan (continues quality improvement) untuk itu seluruh karyawan berkomitmen untuk menyelenggarakan pelayanan yang berfokus pada pelanggan, memperhatikan keselamatan pelanggan, dan melakukan penyempurnaan yang berkelanjutan

Klasifikasi kelulusan akreditasi :

1. PARIPURNA → Apabila semua standar dipenuhi lebih dari 80%
2. UTAMA → Apabila sistem pengelolaan Puskesmas, ukm dan ukp dijalankan lebih dari 80% dan mutu dijalankan lebih dari 60%
3. MADYA → Apabila sistem pengelolaan Puskesmas, ukm dan ukp dijalankan lebih dari 75% dan mutu dijalankan lebih dari 40%
4. DASAR → Apabila sistem pengelolaan Puskesmas, ukm dan ukp dijalankan lebih dari 75% dan mutu dijalankan lebih dari 20%

5. TIDAK TERAKREDITASI → Apabila sistem pengelolaan Puskesmas, ukm dan ukp dijalankan kurang dari 75% dan mutu dijalankan kurang dari 20%

Sebanyak 26 Puskesmas yang ada di Kabupaten Sidoarjo semuanya telah berstatus akreditasi pada tahun 2018.

Puskesmas yang telah terakreditasi sebanyak 26 tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

1. Terakreditasi Utama sebanyak 16 Puskesmas.
2. Terakreditasi Madya sebanyak 8 Puskesmas.
3. Terakreditasi Dasar sebanyak 2 Puskesmas.

Dinas Kesehatan berupaya untuk selalu mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan yang ada, melalui akreditasi dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. melakukan monitoring dan evaluasi mutu pelayanan secara berkala sesuai dengan standar yang ada.
2. pengajuan reakreditasi bagi Puskemas yang telah 3 tahun terakreditasi.
3. memotivasi Puskesmas untuk terakreditasi paripurna.
4. melakukan monitoring evaluasi pascaakreditasi untuk meningkatkan pencapaian standar Akreditasi secara berkesinambungan.

7. Prosentase desa siaga aktif Purnama Mandiri

Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri adalah desa yang berada pada tingkat perkembangan Purnama dan Mandiri. Hal ini sesuai dengan Kepmenkes No. 1529 Tahun 2010. Adapun kriteria dari desa Siaga Aktif Purnama dan Mandiri yaitu adanya 8 Indikator, antara lain :

1. Forum desa berjalan
2. Kader kesehatan ada 6-8 orang
3. Adanya Kemudahan akses pelayanan kesehatan
4. Posyandu & Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) lainnya didesa tersebut aktif
5. Dukungan dana untuk kegiatan tingkat desa terpenuhi oleh Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat serta dunia usaha.

6. Adanya dukungan peran serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.
7. Adanya Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bupati tentang hidup sehat
8. Adanya pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tingkat rumah tangga.

Pada tahun 2018, telah tercapai 98,3% desa/ kelurahan siaga, yang tersebar dalam kategori pratama sebanyak 6%, madya 47%, purnama dan mandiri 46%. Dibanding tahun 2017 (44%) capaian tahun 2018 desa/ kelurahan siaga dengan predikat purnama dan mandiri mengalami kenaikan.

8. Prosentase Penduduk Mempunyai Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Pada tahun 2019 seluruh masyarakat Indonesia harus sudah mempunyai Jaminan Kesehatan. Jaminan kesehatan tersebut bisa dari pemerintah maupun swasta. Ini sesuai dengan Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2017 bahwa Bupati dan walikota agar mengalokasikan anggaran dalam rangka pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional, memastikan seluruh penduduknya terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional, menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai standar kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan yang berkualitas di wilayah masing-masing serta lain hal sebagainya yang diatur dalam peraturan tersebut.

Pada tahun 2018 sebanyak 70,25 % penduduk Kabupaten Sidoarjo sudah memiliki Jaminan Kesehatan baik yang berasal dari Pemerintah, swasta maupun mandiri. Jaminan kesehatan dari pemerintah untuk masyarakat miskin berasal dari pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang akan diupayakan semuanya terintergrasi dalam BPJS. Hal ini sudah meningkat dibanding tahun 2017 yang masih mencapai 65,68%.

Adapun IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan kesehatan terdapat dalam buku lampiran.

2. SKPD Penyelenggara Urusan

Urusan kesehatan ini dilaksanakan oleh SKPD yaitu Dinas Kesehatan dengan Perangkat Puskesmasnya dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo.

3. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia untuk urusan kesehatan Kabupaten Sidoarjo berjumlah 1.340 orang dari Dinas Kesehatan dan 688 orang dari RSUD. Secara rinci SDM penyelenggara urusan pendidikan menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir.

Untuk jabatan fungsional yang tersedia di Dinas Kesehatan :

1. Administrator Kesehatan
2. Apoteker
3. Asisten Apoteker
4. Bidan
5. Dokter Gigi
6. Dokter Umum
7. Nutrisionis
8. Perawat
9. Perawat Gigi
10. Pranata Komputer
11. Pranata Laboratorium Kesehatan
12. Refraksionis
13. Sanitarian
14. Teknisi Elektromedis

Sedangkan untuk jabatan fungsional di RSUD, diantaranya :

1. Administrator Kesehatan
2. Apoteker
3. Asisten Apoteker
4. Bidan
5. Dokter Gigi
6. Dokter Pendidik Klinis
7. Dokter Spesialis

8. Dokter Umum
9. Fisioterapis
10. Nutrisionis
11. Perawat
12. Perawat Gigi
13. Perekam Medis
14. Pranata Komputer
15. Pranata Laboratorium Kesehatan
16. Radiografer
17. Refraksionis
18. Sanitarian
19. Teknisi Elektromedis

4. Alokasi dan Realisasi Anggaran (per program)

Secara rinci anggaran dan realisasi masing masing program sebagaimana terlampir.

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 34,118,934,663.00	Rp 23,655,339,007.00	69.33%
2	Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Rp 37,830,365,610.00	Rp 30,696,282,829.00	81.14%
3	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Rp 9,209,436,780.00	Rp 7,454,832,162.00	80.95%
4	Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	Rp 27,972,675,946.00	Rp 21,976,194,367.00	78.56%
5	Program Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas	Rp 102,399,785,596.32	Rp 78,846,287,714.25	77.00%

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Peningkatan Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah	Rp 478,168,634,120.98	Rp 459,432,219,179.88	96.08%

5. Proses Perencanaan

Proses perencanaan urusaan kesehatan dilaksanakan secara partisipatif dengan diawali masukan dari puskesmas, dinas kesehatan dan Rumah Sakit. Untuk Rumah Sakit karena di Sidoarjo rumah sakit daerah sudah berbentuk BLUD, maka rumah sakit dalam perencanaan, pelaksanaan maupun

monitoringnya dilakukan secara mandiri yaitu terpisah dengan Dinas Kesehatan.

6. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan kesehatan pada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit adalah sebagaimana terlampir

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Program

Program pembangunan untuk urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang dilaksanakan pada tahun 2018 adalah :

1. Program Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Kebinamargaan
2. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur Kebinamargaan
3. Program Perencanaan, Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemanfatan Jaringan Irigasi
4. Program Operasi, Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Penanganan Banjir
5. Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang
6. Program penataan bangunan

b. Realisasi Pelaksanaan Program serta Permasalahan dan Solusinya

Hasil pelaksanaan program tersebut dapat ditunjukkan pada pencapaian indikator sebagai berikut :

1. Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Mantap

Untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kebinamargaan maka pemerintah Kabupaten Sidoarjo harus menyediakan jalan dan jembatan bagi masyarakat. Panjang jalan kabupaten sampai dengan tahun 2018 mengalami peningkatan, menjadi sepanjang 1012,08 km. Adapun Jalan Mantap itu sendiri adalah jalan dengan kondisi konstruksi yang mana untuk penanganannya hanya membutuhkan kegiatan pemeliharaan. Jalan mantap konstruksi ditetapkan menurut Standar Pelayanan Minimal adalah jalan dalam kondisi baik dan sedang, dengan besar IRI < 6 m/km (Parameter kerataan jalan atau *International Roughness Index*). Sedangkan Jalan Tak Mantap Konstruksi adalah jalan dengan kondisi di luar koridor mantap yang mana untuk penanganan minimumnya adalah pemeliharaan berkala dan maksimum peningkatan jalan dengan tujuan untuk menambah nilai struktur konstruksi.

Berikut kondisi seluruh jalan kabupaten baik mantap maupun tak mantap sebagai berikut :

Tabel III.B.2

Perkembangan Kondisi Jalan Kabupaten

No	Kondisi	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%
1	Baik	848,68	*84,8*	849,446	*84,6*	887,153	*87,9*	826,68	*81,68*
2	Sedang	104,24	*10,4*	107,5	*10,7*	80,581	*8,0*	115,15	*11,38*
Jalan Mantap		952,92	*95,2*	956,946	*95,3*	967,734	*95,9*	941,83	*93,06*
3	Rusak	48,54	*4,8*	47,006	*4,7*	41,946	*4,1*	70,25	*6,94*
Jumlah		1001,46	*100*	1003,95	*100*	1009,68	*100*	1012,08	*100*

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Grafik III.B.18

Perkembangan Kondisi Jalan Kabupaten

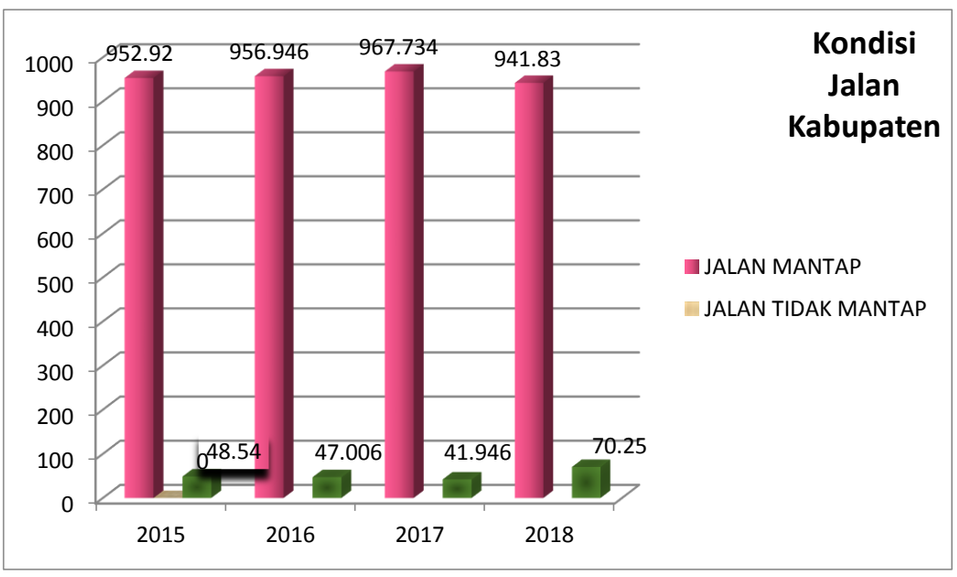

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dari tahun ke tahun kondisi jalan mantap mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 mengalami kenaikan dan kondisi jalan rusak dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 juga mengalami penurunan. Untuk tahun 2018 kondisi jalan mantap mengalami penurunan dan kondisi jalan rusak mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2017. Hal ini disebabkan karena :

1. Anggaran dialihkan kedalam kegiatan Peningkatan Jalan dengan konstruksi jalan beton, sehingga penanganannya menyebabkan kerusakan

jalan akibat dari pembiayaan jalan beton yang memerlukan biaya cukup besar;

2. Kegiatan pemeliharaan jalan rutin diarahkan kedalam kegiatan pemeliharaan berkala, sehingga masih banyak jalan rusak yang belum tertangani.

Meskipun begitu target tahun 2018 kondisi jalan kabupaten dalam kondisi mantap 85% dapat terealisasikan menjadi 93,06%, sehingga capaian atas target tersebut sebesar 109,48 %.

Adapun pada tahun 2018 upaya yang dilakukan untuk meningkatkan panjang jalan dalam kondisi mantap, antara lain :

1. Kegiatan Pembangunan Jalan sepanjang 2.889 meter dengan biaya Rp.24.299.704.200,00;
2. Kegiatan Peningkatan Jalan sepanjang 27.220 meter dengan biaya Rp.110.407.173.550,00;
3. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan sepanjang 323.670 meter dengan biaya Rp.63.113.528.325,00.

2. Persentase Penurunan Luas Wilayah Rawan Genangan Banjir

Untuk mengendalikan genangan / banjir di Kabupaten Sidoarjo yang merupakan daerah delta telah dilakukan pengendalian/ penanganan secara koordinatif antar dinas terkait.

Upaya yang telah dilakukan antara lain :

1. Operasional dan pemeliharaan pintu – pintu air pada Dam / bendung
2. Normalisasi saluran dan afvoer
3. Ketepatan dalam manajemen pengelolaan air
4. Pembangunan dan pemeliharaan saluran pembuang yang menuju afvoer utama
5. Operasional rumah pompa / busem

Pada tahun 2018 Luas daerah genangan di daerah pertanian di Kabupaten Sidoarjo seluas 405 Ha, mengalami penurunan seluas 85 Ha apabila dibandingkan dengan daerah genangan tahun 2017 yang seluas 490 Ha. Serta untukdaerah pemukiman juga mengalami penurunan seluas 14 Ha yang semula di tahun 2017 seluas 82 Ha menjadi seluas 68 Ha di tahun 2018.

Beberapa titik yang mengalami penurunan luas dan lama genangan antara lain wilayah Jabon, kawasan Permukiman Sidokare dan daerah Bringinbendo.

Rincian lebih lanjut lokasi genangan yang terjadi sampai dengan tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel III.B.3

Lokasi Genangan

	Lokasi	2015 (Ha)	2016 (Ha)	2017 (Ha)	2018 (Ha)
1	Pertanian	515	509	490	405
2	Permukiman	467	90	82	68
	Jumlah	**982**	**599**	**572**	**503**

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Adapun grafiknya adalah sebagai berikut :

Grafik III.B.19

Lokasi Genangan di Kabupaten Sidoarjo

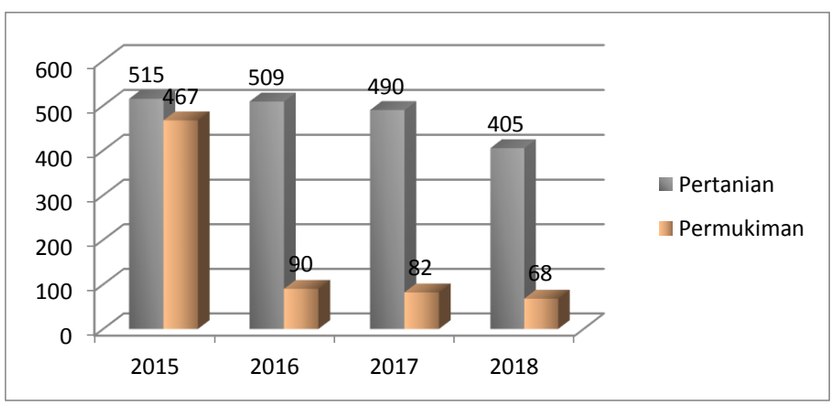

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Apabila dibandingkan dengan target penurunan luas genangan banjir di tahun 2018 yang sebesar 79,03% maka penurunan luas genangan di tahun 2018 masih sebesar 12,06% atau 15,26% dari target.

Penurunan luas genangan baik di pertanian dan pemukiman juga dikarenakan koordinasi antar stakeholder. Selain itu upaya penurunan genangan diantaranya adalah adanya peran serta pengembang untuk menyediakan lahan resapan/buzem serta peran masyarakat tidak membuang sampah di saluran, sehingga air yang tergenang dapat mengalir pada saluran yang tersedia.

Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanggulangan banjir dan meningkatkan cakupan irigasi untuk pertanian, maka Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Sidoarjo melaksanakan program Sidoarjo Peduli Sungai (SPS). Tahun 2018 telah dilaksanakan Launching SPS di Perum. Argenc Park Jl. Monginsidi Kelurahan Sidoklumpuk Kabupaten Sidoarjo dan dilaksanakan Roadshow SPS di 5 (lima) Kecamatan, diantaranya :

1. Wilayah Desa Semambung Kec. Jabon
2. Wilayah Desa Kedungbanteng Kec. Tanggulangin
3. Wilayah Desa Balonggarut Kec. Krembung
4. Wilayah Desa Pesawahan Kec. Porong
5. Wilayah Desa Kraton Kec. Krian

Pada setiap Kecamatan lokasi Roadshow SPS dibuatkan Pilot Project sungai yang dipasang jaring sampah pada setiap batas desa, setelah itu akan dilaksanakan normalisasi oleh Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Sidoarjo. Setiap tahun program dan kegiatan SPS akan terus dilaksanakan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dalam menjaga kebersihan sungai.

3. Penanganan Jembatan

Dalam hal penanganan jembatan jumlah total bangunan jembatan sampai dengan tahun 2018 sebanyak 10 Jembatan yang terbangun pada daerah yang secara teknis memerlukan pembangunan jembatan. Dari seluruh jembatan yang ada tersebut kondisi yang yang ada sebagai berikut :

Tabel III.B.4

Kondisi Jembatan

NO	KONDISI JEMBATAN	2015	2016	2017	2018	%
1	Jembatan dengan kondisi baik	366	367	370	380	96%
2	Jembatan dengan kondisi sedang	8	8	2	9	2,3%
3	Jembatan dengan kondisi rusak	4	5	18	7	1,7%
4	Jumlah jembatan terbangun	**378**	**380**	**390**	**396**	**100**

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Grafik III.B.20

Kondisi Jembatan di Kabupaten Sidoarjo

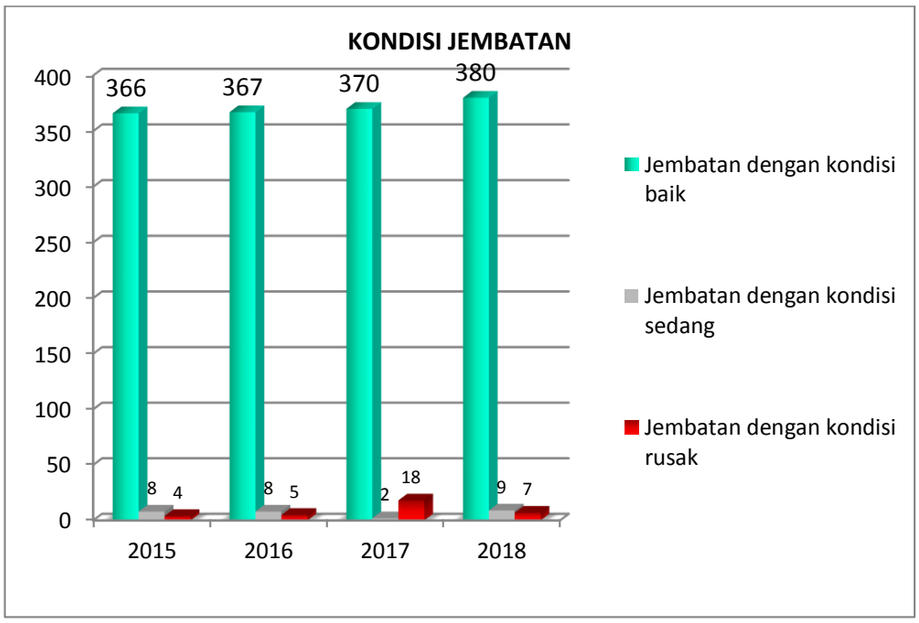

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Adapun target untuk pembangunan jembatan di tahun 2018 adalah sebesar 10 buah dan peningkatan jembatan adalah sebanyak 5 buah . Dari tabel di atas terlihat bahwa jembatan dalam kondisi baik di tahun 2018 sebanyak 380 jembatan, jika dibandingkan dengan jembatan dalam kondisi baik di tahun 2017 sebanyak 370, sehingga terjadi peningkatan jembatan dalam kondisi baik sebanyak 10 jembatan di Kabupaten Sidoarjo.

4. Persentase Cakupan Sawah yang dapat dialiri irigasi

Luas baku sawah Kabupaten Sidoarjo yang merupakan Daerah irigasi (DI) Delta Brantas pada tahun 2018 seluas 21,444 Ha, dengan kebutuhan air irigasi sebesar 12,785 liter/detik sesuai Rencana Tata Tanam Global (RTTG) Tahun 2018 sedangkan ketersediaan air irigasi untuk wilayah Daerah Irigasi (DI) Delta Brantas sebesar 11,668 liter/detik berdasarkan Pola Operasi Waduk dan Alokasi Air (POWAA) yang dikeluarkan oleh Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) wilayah Sungai Brantas.

Cakupan layanan irigasi tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel III.B.5

Cakupan Layanan irigasi Tahun 2018

URAIAN	ketersediaan (liter/detik)	kebutuhan (liter/detik)	%
2016	20235.56	23262.10	86.99%
2017	15185.00	16777.00	90.51%
2018	11668.00	12785.00	91.26%
Target 2018	15185.00	16777.00	
Realisasi atas Target 2018	76.84%	76.21%	

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Realisasi cakupan layanan irigasi tahun 2018 sebesar 91,26% ini dapat diatasi melalui :

1. Pemberian air yang dilakukan secara terus menerus maupun dengan pola giliran sesuai ketersediaan debit yang ada.
2. Pemenuhan air irigasi dari dam/ bendung suplisi yang berada di afvoer maupun bantuan pompa air, sehingga kebutuhan air dapat dicukupi
3. Pengaturan operasional DAM penerus sesuai dengan kebutuhan pola tata tanam

Untuk mendukung 3 (tiga) indikator sasaran tersebut diatas, didukung dengan indikator program yang memberikan konstribusi atas sasaran diatas yaitu :

1. Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik

Daerah Irigasi (DI) yang ada di Kabupaten Sidoarjo hanya 1 (satu), yakni DI Delta Brantas yang meliputi 2 Saluran Primer, yaitu Saluran Primer Porong Kanal sepanjang 35.581 m dan Saluran Primer Mangetan Kanal sepanjang 59.859 m, serta 46 Saluran Sekunder sepanjang 287.343 m sehingga total Saluran irigasi di wilayah Kabupaten Sidoarjo sepanjang 381.096 m. Sedangkan Daerah Irigasi (DI) yang menjadi kewenangan Kabupaten Sidoarjo ada 18 (delapan belas) Daerah Irigasi dimana masing – masing luasan < 1.000 Ha. Meningkatnya saluran irigasi dalam kondisi baik, karena adanya kegiatan rehabilitasi maupun peningkatan yang bertujuan untuk mempertahankan fungsi saluran irigasi. Adapun luas saluran irigasi adalah sebagai sebagai berikut :

Tabel III.B.6

Perkembangan Kondisi Saluran Irigasi dari Tahun 2015 – 2018

No	Kondisi	2015		2016		2017		2018	
		(%)	Panjang (m)	(%)	Panjang (m)	(%)	Panjang (m)	(%)	Panjang (m)
1	Baik	68	259.145,28	69	262.956,24	70	266.767,20	71	270.578,16
2	Sedang	15	57.164,4	14,5	55.258,92	14	53.353,44	13,5	51.447,96
3	Rusak	17	64.786,32	16,5	62.880,84	16	60.97 5,36	15,5	59.069,88
	Jumlah	100	381.096	100	381.096	100	381.096	100	381.096

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Grafik III.B.21

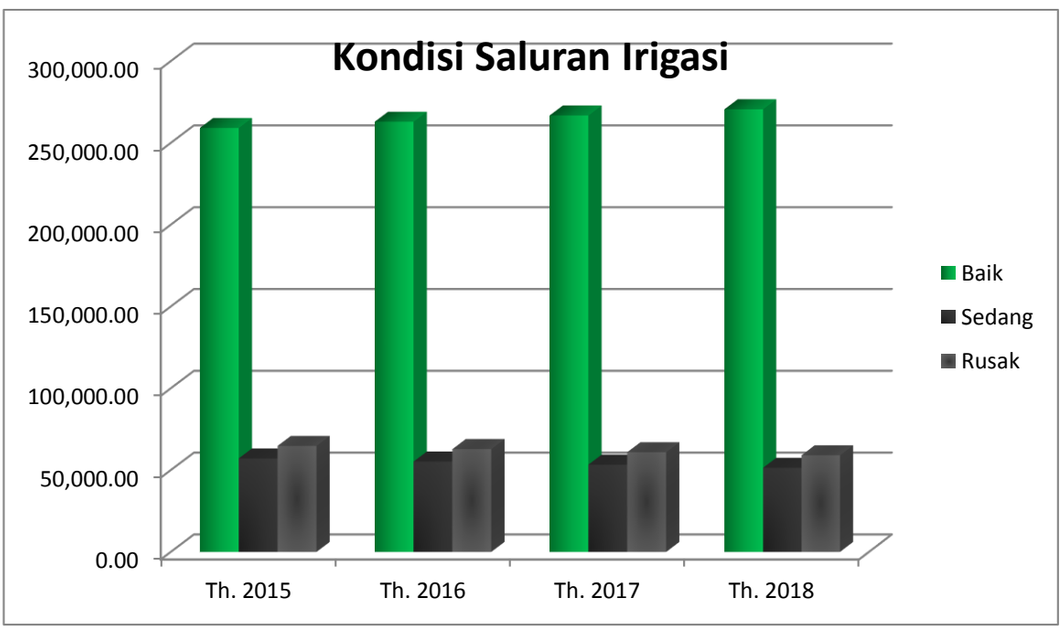

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dari tabel di atas diketahui bahwa dari tahun 2017 ke 2018 saluran dengan kondisi baik mengalami kenaikan sepanjang 3.810,96 m.

Upaya memperbaiki saluran irigasi yang rusak dilakukan seperti berikut :

1. Pembangunan dan peningkatan saluran irigasi, berupa pembuatan plengsengan dan peninggian tanggul.
2. Pemeliharaan dan rehabilitasi saluran irigasi berupa pengerukan dan pengambilan sampah yang ada di sungai.

3. Pengelolaan dan penataan aset pengairan berupa sosialisasi sidoarjo peduli sungai.

2. Bangunan ber-IMB

Adapun Untuk perkembangan jumlah bangunan ber IMB pada tahun 2018 ditunjukkan pada grafik dibawah ini.

Grafik III.B.22

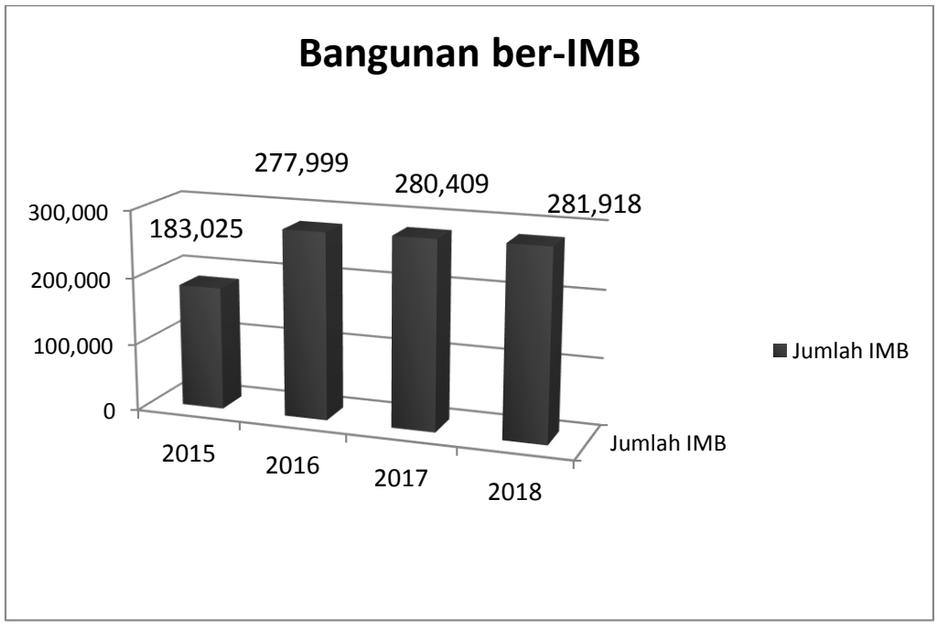

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Uraian	Th. 2015	Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018
1.	Bangunan ber-IMB	183.025	277.999	280.409	281.918

Dari grafik terlihat bahwa jumlah bangunan ber IMB dari tahun ke tahun semakin meningkat. Di tahun 2018 bangunan ber IMB sebesar 281.918 lebih banyak apabila dibandingkan dengan bangunan ber IMB di tahun 2017 sebanyak 280.409, dari tahun 2017 ketahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 1.509 bangunan yang ber IMB. Kenaikan bangunan ber IMB disebabkan :

1. Kesadaran masyarakat akan perijinan bangunan.
2. Adanya ketentuan yang mengharuskan bangunan ber-IMB untuk pengajuan ke Bank.
3. Kemudahan pelayanan perijinan berbasis Informasi Teknologi / IT.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam meningkatkan jumlah bangunan ber IMB adalah :

- Masih banyak pengajuan IMB yang tidak sesuai kondisi di lapangan
- Perkembangan pertumbuhan bangunan tidak sejalan dengan RTRW

3. Perkembangan pembangunan Sidoarjo Community Center / SCC

Gedung Serba Guna yang telah dibangun adalah Sidoarjo Community Center / SCC yang berfungsi sebagai :

1. Ruang pertemuan berkapasitas ± 2.000 orang dengan penataan ruangan yang eksklusif, tata lampu, tata suara, design ruangan yang mewah.
2. Ruang serba guna yang rencananya akan difungsikan sebagai mall pelayanan umum, untuk mempermudah masyarakat Sidoarjo dalam memperoleh layanan umum yang lengkap, mudah dan terintegrasi di satu tempat.

Gedung serbaguna merupakan salah satu program prioritas dari Bupati Sidoarjo. Di tahun 2018 SCC / Sidoarjo Community Center dimana pada tahun 2019 diharapkan untuk unit Mall Pelayanan Publik di gedung SCC sudah beroperasi selain itu juga di gedung tersebut juga ada Kantor Imigrasi Kelas I dimana masyarakat bisa mengurus perijinan passport tanpa harus ke Surabaya. Rencananya Pada Tahun 2019 akan dibangun sarana penunjang lainnya seperti teater area bermain, lahan parkir dan food court.

c. SKPD penyelenggara Urusan

Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dilaksanakan oleh SKPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

d. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Sidoarjo berjumlah 182 orang. Secara rinci SDM penyelenggara urusan pekerjaan umum dan penataan ruang menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir.

Sedangkan untuk posisi jabatan fungsional tersedia Arsiparis, Teknisi Jalan dan Jembatan, serta Teknisi Tata Bangunan dan Perumahan.

e. Alokasi dan Realisais Anggaran (per program)

Secara rinci anggaran dan realisasi masing masing program sebagaimana terlampir.

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Kebinamargaan	Rp 343,078,726,369.00	Rp 212,386,272,916.00	61.91%
2	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur Kebinamargaan	Rp 101,536,026,300.00	Rp 76,916,389,161.00	75.75%
3	Program Perencanaan, Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemanfatan Jaringan Irigasi	Rp 58,192,843,231.00	Rp 38,504,987,051.00	66.17%
4	Program Operasi, Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Penanganan Banjir	Rp 95,671,595,515.00	Rp 69,364,972,425.98	72.50%
5	Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	Rp 2,815,977,000.00	Rp 2,611,087,033.00	92.72%
6	Program penataan bangunan	Rp 122,169,215,502.00	Rp 95,580,048,537.85	78.24%

f. Proses Perencanaan

Proses perencanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dilaksanakan melalui usulan dari bidang-bidang untuk kegiatan survey. Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi atas pelaksanaan progam dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sidoarjo.

g. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana sebagai pendukung pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang adalah sebagaimana terlampir.

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a. Program

Program pembangunan untuk urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang dilaksanakan pada tahun 2018 adalah :

1. Program Pembangunan Sarana Prasarana Permukiman dan Sanitasi Air Bersih
2. Program Pengembangan Infrastruktur dan Lingkungan Perumahan

b. Realisasi Pelaksanaan Program serta Permasalahan dan Solusinya

Seluruh program telah dilaksanakan untuk mencapai kinerja sebagai berikut :

1. Persentase peningkatan rumah layak huni

Sampai Tahun 2017 kegiatan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni selain memperoleh bantuan dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) juga memperoleh bantuan dari APBD Propinsi yang dilaksanakan oleh KODIM dan dana Corporation Social Responbility (CSR). Dengan Jumlah rumah sebanyak 443.360 unit, telah dilakukan rehabilitasi sebanyak 442.857 unit rumah tinggal, atau sekitar 99,89% dari jumlah keseluruhan rumah tinggal di Kabupaten Sidoarjo. Sehingga pada akhir tahun tersebut diketahui terdapat 503 Unit rumah yang belum dilakukan rehabilitasi.

Grafik III.B.23

Trend Rumah Tidak Layak Huni

Tahun	2015	2016	2017	2018
Realisasi (Unit)	159	229	280	395

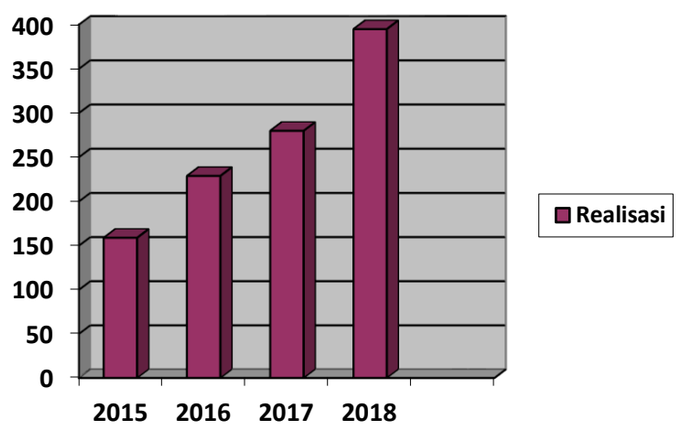

Sumber Data : Dinas Perumahan dan Permukiman

Untuk tahun 2018 terdapat 503 Unit rumah yang dijadikan *Baseline* untuk jumlah rumah tidak layak huni yang harus dilakukan perbaikan sampai Tahun 2021. Pada Tahun 2018 mempunyai target tahunan untuk rumah tidak layak huni sebanyak 116 unit, dan telah dilakukan rehabilitasi sebanyak 115 unit rumah atau terealisasi sebesar 99,91% dari target. Keberhasilan peningkatan rumah layak huni ini telah banyak dilakukan oleh kerjasama antara Pemerintah dan masyarakat, seperti halnya peningkatan rumah layak huni pada tahun 2018 diperoleh dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

2. Prosentase Penurunan Luas Kawasan Kumuh

Hingga tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui SK Bupati No.188/452/404.1.3.2/2015 tanggal 27 April 2015 tentang kawasan permukiman kumuh Kabupaten Sidoarjo menyebutkan bahwa Luasan kawasan kumuh adalah 301,08 Ha yang terbagi di 42 Desa,13 Kecamatan. Pada tahun 2017 telah dilakukan penanganan penurunan luasan permukiman kumuh di perkotaan tercapai 82,78% dari target tahunan 77,71%.

Pada tahun 2018 penangan penurunan luasan permukiman kumuh 79,95% dari target 76,8%.

Grafik III.B.24

Trend Luasan Kawasan Kumuh

Tahun	2015	2016	2017	2018
Realisasi (Ha)	301.08	300.03	298.98	249.85

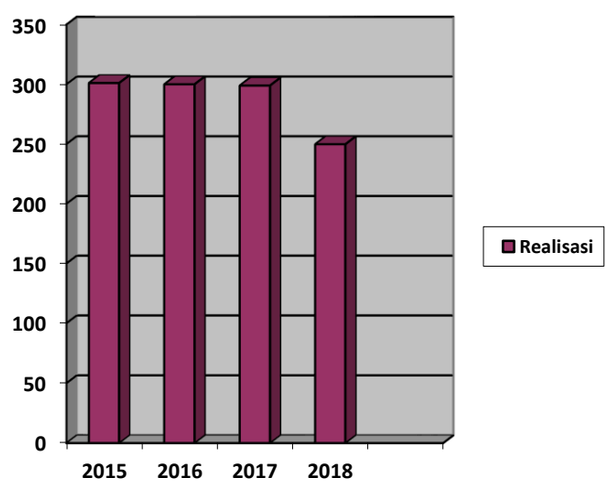

Sumber Data : Dinas Perumahan dan Permukiman

Dapat dilihat grafik trend di atas bahwa luasan kawasan permukiman kumuh terjadi penurunan dari Tahun 2015 sampai tahun 2018 total sebanyak 51,23 Ha. Pada tahun 2018 terjadi penurunan yang cukup tinggi sebanyak 49,13 Ha. Hal tersebut disebabkan oleh kerjasama yang cukup baik antara pemerintah dan masyarakat, serta terdapat program pusat yaitu Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

2016		**2017**		**2018**	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
77,71 %	85,54%	77,71 %	82,78%	76,8%	79,95%

Untuk mendukung 2 (dua) indikator sasaran tersebut diatas, didukung dengan indikator program yang memberikan konstribusi atas sasaran diatas yaitu :

1. **Rumah Tangga ber sanitasi sehat**

   Pembangunan sarana sanitasi lingkungan ini dilakukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap sanitasi lingkungan secara berkesinambungan kepada separuh dari proporsi penduduk yang belum mendapatkan akses sanitasi. Untuk realisasi prosentase masyarakat yang terlayani sarana sanitasi lingkungan pada tahun 2017 tercapai sebesar 94,43% yaitu sebnayak 415.057 RT. Untuk pada Tahun 2018 mempunyai target tahunan sebesar 94,01% dan realisasi pada Tahun 2018 telah tercapai sebesar 94,2% dengan jumlah masyarakat bersanitasi sehat menjadi 417.665 RT.

   Menurut pedoman dalam hibah sanitasi dan Peraturan menteri PUPR No 04 Th. 2017 untuk pembangunan sanitasi sehat disarankan untuk menggunakan bio septic agar kelestarian lingkungan tetap terjaga.

Grafik III.B.25

Trend Rumah Tangga Bersanitasi Sehat

Tahun	2017	2018
Realisasi (RT)	415.057	417.665

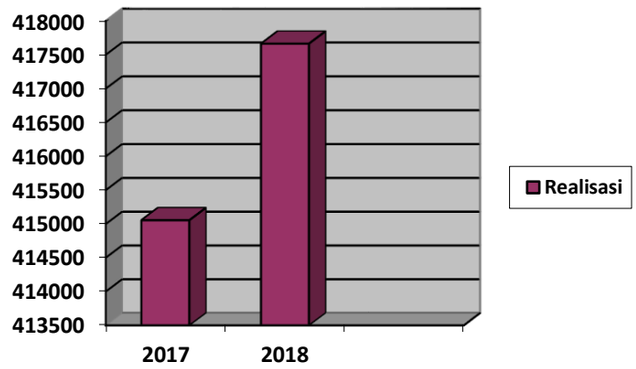

Perkembangan Prosentase masyarakat yang terlayani sarana sanitasi lingkungan (jamban)

2016 *)		**2017 *)**		**2018 *)**	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
70 %	94.40 %	93,8%	94.43%	94,01%	94,2%

Sumber Data : Dinas Perumahan dan Permukiman

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah rumah tangga ber sanitasi sehat, antara lain :

- Pembangunan jamban sehat di wilayah tidak padat penduduk
- Pembangunan IPAL Komunal di wilayah padat penduduk

2. Rumah Tangga pengguna air bersih

Berdasarkan RISPAM Kabupaten Sidoarjo, Dinas Perumahan dan Permukiman hanya mempunyai kewajiban sebesar 10% dari keseluruhan pemenuhan air bersih Kabupaten Sidoarjo.

Untuk mengukur jumlah masyarakat yang bisa mengakses sarana air bersih yang dibangun baik oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan PDAM adalah masyarakat yang bisa mengakses sarana air bersih dibagi total penduduk kabupaten dikalikan 100%.

Grafik III.B.26

Trend Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Tahun	2017	2018
Realisasi (RT)	134.663	137.094

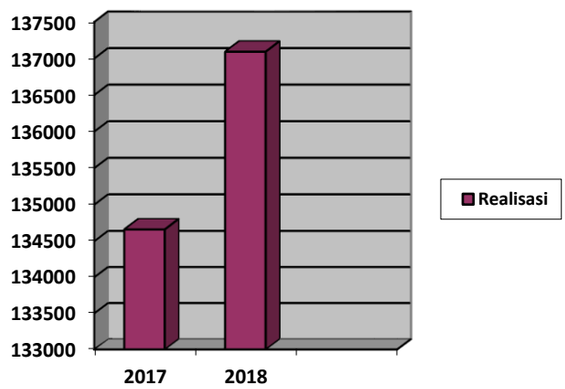

Sumber Data : Dinas Perumahan dan Permukiman

Untuk tahun 2017 jumlah masyarakat yang terlayani sarana air bersih yang dibangun oleh PDAM sebesar 134.663 KK dengan capaian sebesar 36,35%. Sedangkan untuk tahun 2018 jumlah masyarakat yang terlayani sarana air bersih yang dibangun oleh PDAM sebesar 137.094 KK.

Tabel III.B.7

Jumlah Sambungan Langganan PDAM sampai akhir tahun 2018

Kode Lokasi	JUMLAH (SR)
Sidoarjo.01	18,074
BNA Sidoarjo.02	18,564
Porong.03	853
Tanggulangin.04	5,324
Gedangan.05	7,843
Sedati.06	10,875
Sepanjang.07	28,542
Krian.08	5,177
Waru I.09	22,737
Tulangan.10	70
Waru II.11	18,623

Kode Lokasi	JUMLAH (SR)
Tangki	412
Jumlah	**137,094**

Sumber : PDAM 2018

Namun untuk jumlah masyarakat yang terlayani air bersih yang dibangun dari kegiatan Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Sidoarjo hanya sebesar 10% dari 675,391 KK. Dari data Cakupan layanan air bersih untuk rumah tangga Kabupaten Sidoarjo diatas terlihat bahwa pada tahun 2017 target telah dipenuhi.

Tabel III.B.8

Perkembangan Prosentase masyarakat yang terlayani sarana air bersih perpipaan PDAM dan non PDAM

2016		2017		2018	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
34 %	37,23 %	34 %	37,23 %	35%	32,21%

Sumber Data : Dinas Perumahan dan Permukiman

Tabel III.B.9

Jumlah masyarakat (jumlah KK) yang terlayani Air Bersih

TERLAYANI PDAM (KK)		***TERLAYANI PEMDA (KK)***		***KET***
2017	***2018***	***2017***	***2018***	***TAHUN***
134,897	137,094	3,001	4,624	***TERLAYANI***
675,391	675,391	675,391	675,391	***JUMLAM KK SE KAB SDA***
19.97	**20.30**	**0.44**	**0.68**	***% TERLAYANI***

Sumber Data : Dinas Perumahan dan Permukiman

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa cakupan pelayanan PEMDA Kabupaten Sidoarjo memang di bawah cakupan pelayanan PDAM. Hingga akhir Tahun 2018 terdapat selisih sebesar 19,62% pencapaian pelayanan antara PDAM dan Pemda Kabupaten Sidoarjo. Namun dari masing-masing pelayanan baik PDAM maupun Pemda Kabupaten Sidoarjo selama 2 tahun terakhir mengalami peningkatan jumlah penduduk terlayani yang cukup signifikan. Untuk PDAM mengalami kenaikan sebesar 0,33% , sedangkan untuk Pemda Kabupaten Sidoarjo mengalami kenaikan sebesar 0,24%.

c. SKPD Penyelenggara Urusan

Urusan Perumahan rakyat dan kawasan permukiman ini dilaksanakan oleh OPD yaitu Dinas Perumahan dan Permukiman.

d. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di urusan Perumahan rakyat dan kawasan permukiman Kabupaten Sidoarjo berjumlah 38 orang. Secara rinci SDM penyelenggara urusan Perumahan rakyat dan kawasan permukiman menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaiamana terlampir.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran (per program)

Secara rinci anggaran dan realisasi masing masing program sebagaimana terlampir.

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Pembangunan Sarana Prasarana Permukiman dan Sanitasi Air Bersih	Rp 41,917,199,106.00	Rp 26,357,918,114.39	62.88%
2	Program Pengembangan Infrastruktur dan Lingkungan Perumahan	Rp 15,730,121,810.00	Rp 13,052,042,818.06	82.97%

f. Proses Perencanaan

Proses perencanaan urusan Perumahan rakyat dan kawasan permukiman dilaksanakan melalui metodologi survey. Berdasarkan permasalahan yang ada disusun rencana kerja dan disempurnakan dengan melibatkan para pemangku kepentingan yang terdiri dari unsur dari Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk menyusun program kerja tahunan.

g. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan Perumahan rakyat dan kawasan permukiman pada Dinas Perumahan dan Permukiman adalah sebagaimana terlampir

5. Urusan Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

a. Program

Program pembangunan untuk urusan Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan pada tahun 2018 adalah :

1. Program pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
2. Program Pembinaan dan Pengawasan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah
3. Program Perlindungan Masyarakat
4. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
5. Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan
6. Pogram Peningkatan pendidikan politik masyarakat dan hubungan antar lembaga
7. Program Pencegahan Dini. Kesiapsiagaan. Tanggap Darurat dan Manajemen Logistik Kebencanaan
8. Program Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
9. Program Peningkatan Kesiagaan, Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

b. Realisasi Pelaksanaan Program serta Permasalan dan Solusinya

Hasil seluruh program Urusan Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang telah dilaksanakan dapat terlihat dengan tercapainya :

1. Indeks Rasa Aman

Indeks Rasa Aman digunakan untuk mengukur rasa aman yang dirasakan masyarakat di lingkungan tempat tinggal.

Target yang ditetapkan di tahun 2018 dalam RPJMD untuk indeks rasa aman adalah 73,89% (0 konflik), sedangkan capaian tahun 2018 adalah 60,96%, sehingga tercapai 82,50%.

Keamanan adalah keadaan bebas dari cedera fisik dan psikologis atau bisa juga keadaan aman dan tentram. Kenyamanan/rasa nyaman adalah suatu keadaan telah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia salah satunya yaitu kebutuhan akan ketentraman.

Mendasari definisi rasa aman diatas, indeks rasa aman dalam hal ini dapat diartikan sebagai petunjuk angka sebagai tolak ukur untuk mengukur dan

mengetahui sejauhmana tingkat rasa aman/nyaman/ketentraman yang dirasakan warga masyarakat Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan aktivitas kehidupannya sehari-hari.

Pada tahun 2018 telah dilakukan survey/pengukuran indeks rasa aman di Kabupaten Sidoarjo, dengan responden 100 orang tersebar di 6 (enam) kecamatan memperoleh hasil Nilai Indeks Rasa Aman / IRAn = 60,96% dengan kategori Rasa Aman Tinggi..

Berikut perkembangan Indeks Rasa Aman di Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2017 dan tahun 2018 :

Grafik III.B.27

Indeks Rasa Aman di Kabupaten Sidoarjo

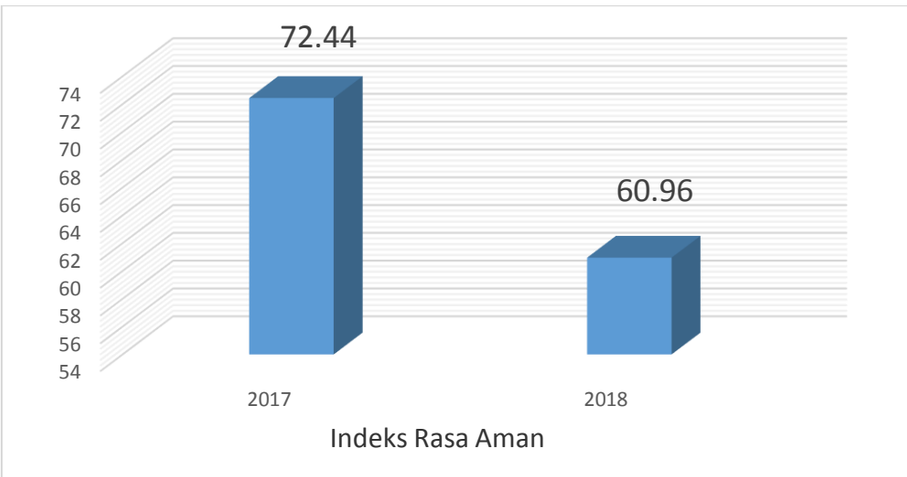

Sumber Data : Bappeda Kabupaten Sidoarjo

Dengan capaian tersebut masih dapat dikatakan bahwa Kabupaten Sidoarjo merupakan wilayah yang aman dari konflik. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target tahun 2018 sebesar 73,89 maka tercapai 82,50%.

2. Indeks Resiko Bencana

Pada Tahun 2014, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meluncurkan Index Resiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2013, yang merupakan potret resiko bencana di daerah.

IRBI 2013 ini berkontribusi dalam penyusunan RPJMN 2015 – 2019 bidang penanggulangan bencana.

Sumber : Peta Indeks Resiko Bencana BNPB 2013

Berikut ini adalah Index Resiko Bencana Daerah di wilayah Jawa Timur :

Provinsi	Kabupaten/ Kota Prioritas	Indeks Risiko	Tingkat Risiko	Struktur Ruang
BANTEN	Tangerang	200.8	TINGGI	PKN Jabodetabekjur
BANTEN	Cilegon	182.4	TINGGI	PKN
DI YOGYAKARTA	Kota Yogyakarta	124.8	SEDANG	PKN
DI YOGYAKARTA	Sleman	153.6	TINGGI	PKW
DKI JAKARTA	DKI Jakarta	123.3	SEDANG	PKN Jabodetabekjur
JAWA BARAT	Kota Bogor	107.2	SEDANG	PKN Jabodetabekjur
JAWA BARAT	Kota Depok	102.4	SEDANG	PKN Jabodetabekjur
JAWA BARAT	Bekasi	164.8	TINGGI	PKN Jabodetabekjur
JAWA BARAT	Cianjur	250	TINGGI	PKN Jabodetabekjur
JAWA BARAT	Kota Bandung	154	TINGGI	PKN Bandung Raya
JAWA BARAT	Bandung Barat	162	TINGGI	PKN Bandung Raya
JAWA BARAT	Cirebon	181.2	TINGGI	PKN
JAWA BARAT	Sukabumi	231.2	TINGGI	PKW
JAWA BARAT	Tasikmalaya	224.8	TINGGI	PKW
JAWA BARAT	Ciamis	215.2	TINGGI	PKW
JAWA BARAT	Pangandaran	215.2	TINGGI	PKW
JAWA TENGAH	Kota Semarang	183.6	TINGGI	PKN Kedungsepur
JAWA TENGAH	Kendal	167.2	TINGGI	PKN Kedungsepur
JAWA TENGAH	Demak	183.6	TINGGI	PKN Kedungsepur
JAWA TENGAH	Cilacap	215.2	TINGGI	PKN
JAWA TENGAH	Kebumen	203.2	TINGGI	PKW
JAWA TENGAH	Magelang	143.2	SEDANG	PKW
JAWA TIMUR	Malang	219.2	TINGGI	PKN
JAWA TIMUR	Gresik	175.2	TINGGI	PKN Gerbangkertosusila
JAWA TIMUR	Bangkalan	164.4	TINGGI	PKN Gerbangkertosusila
JAWA TIMUR	Kota Surabaya	166.8	TINGGI	PKN Gerbangkertosusila
JAWA TIMUR	Sidoarjo	149.6	TINGGI	PKN Gerbangkertosusila
JAWA TIMUR	Lamongan	174	TINGGI	PKN Gerbangkertosusila
JAWA TIMUR	Bojonegoro	150	TINGGI	PKW
JAWA TIMUR	Pacitan	215.2	TINGGI	PKW
JAWA TIMUR	Banyuwangi	219.2	TINGGI	PKW
JAWA TIMUR	Jember	219.2	TINGGI	PKW

Sumber : Indeks Resiko Bencana BNPB 2013

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Index Resiko Bencana Kabupaten Sidoarjo pada poin **149,6** dengan tingkat resiko **Tinggi**.

Merujuk pada tabel diatas, pada hakikatnya penyelenggaraan penanggulangan bencana baik di tingkat pusat dan daerah, jika berpedoman pada dokumen Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Bencana 2015-2019 adalah menurunkan indeks risiko bencana. Penurunan indeks risiko tersebut sangat

dipengaruhi oleh komponen penyusunnya yaitu komponen **bahaya/ancaman**, komponen **kerentanan** dan komponen **kapasitas**.

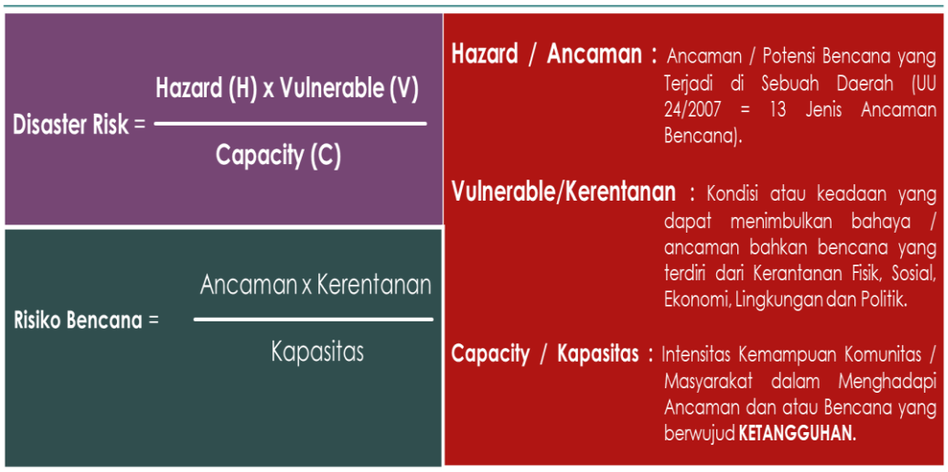

Dari ketiga komponen penyusun indeks risiko, komponen bahaya merupakan komponen yang sangat kecil kemungkinan untuk diturunkan, maka indeks risiko bencana dapat diturunkan dengan cara menurunkan tingkat kerentanan (komponen kerentanan) melalui **peningkatan tingkat kapasitas (komponen kapasitas)**. Pengaruh masing-masing komponen (bobot) dalam penentuan indeks risiko bencana adalah komponen bahaya 40%, komponen kerentanan 30% dan komponen kapasitas 30%. Jadi berdasarkan pengaruh dari ketiga komponen penyusun indeks risiko bencana, maka komponen kerentanan berupa coping capacities dan kapasitas merupakan komponen yang paling memungkinkan dilaksanakan untuk menurunkan indeks risiko bencana. Berdasarkan uraian pengaruh masing-masing komponen dalam penurunan indeks risiko bencana, maka target utama dalam penurunan indeks risiko bencana adalah **komponen *coping capacities* dan kapasitas sebesar 30% selama 5 tahun.**

Target penurunan IRBI di Kabupaten Sidoarjo sampai dengan tahun 2021 adalah sebesar :

$$149{,}6 \text{ x } 30\% = 44{,}88$$

Sehingga pada tahun 2021, diharapkan Indeks Resiko Bencana di Kabupaten Sidoarjo turun menjadi 104,72 atau turun sebesar **44,88** poin.

Pada akhir tahun 2018 BPBD Kabupaten Sidoarjo melakukan pengukuran Indeks Kapasitas Daerah (IKD) dalam penanggulangan bencana. Pengukuran dilakukan dengan melaksanakan *Focus Group Discussion* (FDG) yang

melibatkan OPD terkait diantaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman, DLHK, BAPPEDA, DPMPTSP, BPKAD, Bagian Hukum Setda, dan APIP.

Tabel III.B.10

Hasil Pengukuran IKD

NO.	TAHUN	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	IKD	KELAS
1	2013/2015	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	RENDAH
2	2016	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	RENDAH
3	2017	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	RENDAH
4	2018	0,85	0,73	0,69	0,77	0,45	0,55	0,79	0,63	SEDANG
5	2019									

Sumber : Hasil Perhitungan IKD Kab. Sidoarjo (2018)

Dari hasil perhitungan diatas berdasarkan isian kuesioner yang disebar dan \saat FGD maka dapat dinyatakan bahwa skor / nilai tertinggi berada pada fokus prioritas yang pertama yakni perkuatan kebijakan dan kelembagaan dengan nilai 0,85 sedangkan yang paling rendah ada pada fokus prioritas kelima yakni peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana sebesar 0,45. Dari data diatas dapat didekrispikan bahwa kegiatan dalam upaya perkuatan kebijakan dan kelembagaan penanggulangan bencana telah dilakukan dengan baik serta berupaya konsisten untuk terus mendukung dan melaksanakan instrumen-instrumen kebijakan serta peraturan perundangan penanggulangan bencana seperti UU 24/2007, PP 21/2008 serta Perka-Perka yang diterbitkan oleh BNPB. Salah satunya adalah bahwa sejak tahun 2014 telah diinisiasi dan atau dirumuskan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kab. Sidoarjo meskipun masih perlu dilakukan review dan ‘diformalkan’ dalam bentuk peraturan daerah. Selanjutnya untuk lebih memudahkan pemahaman sejumlah data diatas, maka berikut ini ditampilkan grafik jaring laba-laba yang didasarkan atas hasil perhitungan IKD Kab. Sidoarjo tahun 2018, sebagai berikut :

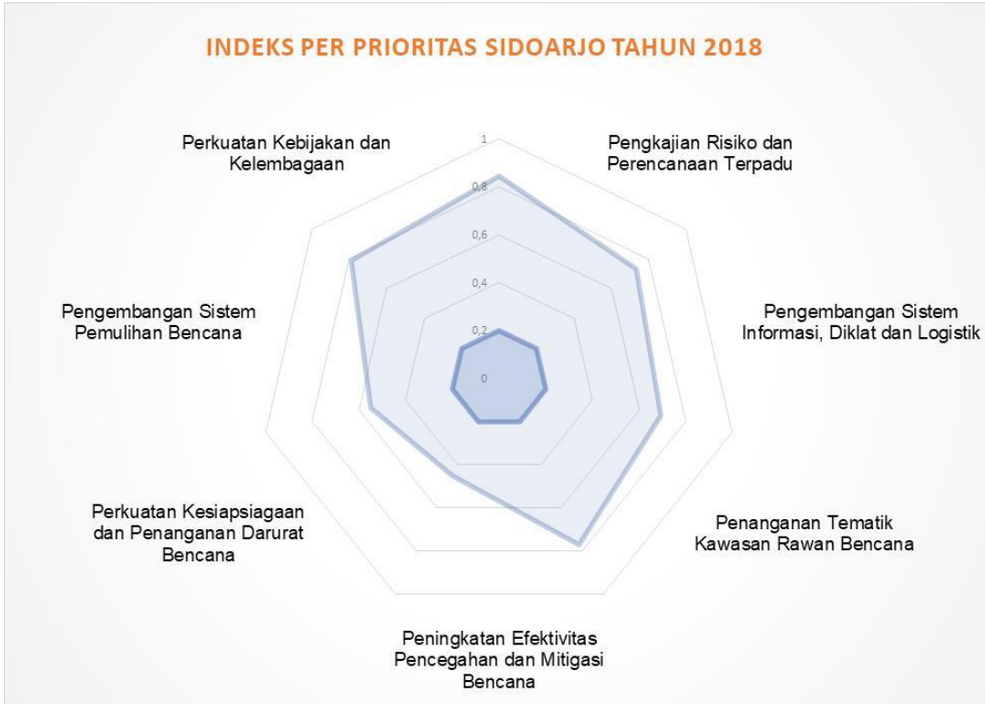

Berdasarkan hasil perhitungan IKD tahun 2018 sebagaimana tersebut diatas, maka dapat diperoleh skor Indeks Risiko Bencana Kab. Sidoarjo Tahun 2018 yakni dengan skor sebesar 130, serta secara hipotetis kecenderunggannya relatif tetap untuk tahun 2019, yakni dengan skor yang sama sebesar 130, seperti yang terlihat pada histogram dibawah ini :

Grafik III. B.28

Indeks Resiko Bencana di Kabupaten Sidoarjo

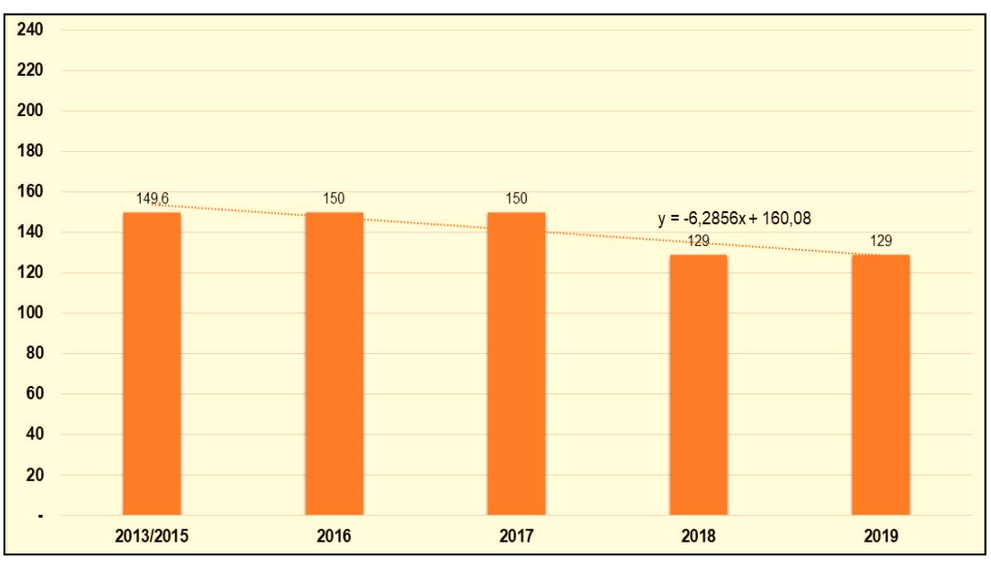

Sumber : Diolah dari hasil perhitungan IKD 2018

Pada grafik di atas dapat diketahui bahwa nilai IRB Kabupaten Sdioarjo adalah sebesar **128.6** atau turun **21 poin** dari baseline 149.6.

Berikut matriks capaian penurunan IRB Tahun 2018 :

Indeks Resiko Bencana	Target Th. 2021	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian (%)
149.6	104.7	131.65 (12%)	128.6 (14%)	103.68
149.6	104.7	131.65 (12%)	128.6 (14%)	116,67

Indikator	Target 2021	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian (%)
Indeks Resiko Bencana	104,7	131.65	128.6	131.67

Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Untuk mendukung indikator sasaran tersebut diatas, didukung dengan indikator program yang memberikan konstribusi atas sasaran diatas yaitu :

a. Persentase gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang diselesaikan

Penyelesaian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam hal ini adalah tindakan Non Yustisial. Temuan indikasi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarkat didapat dari hasil patroli dan penertiban non yustisial.

Berikut penyajian data penyelesaian gangguan tibumtranmas tahun 2018 :

NO	Jenis Gangguan Tibumtranmas	Jumlah Gangguan Tibumtranmas	Jumlah yang diselesaikan
1	PKL	344	344
2	PMKS	53	53
3	Bangunan Liar	242	242
4	RHU (Rumah hiburan umum)	89	89
5	Reklame Insidentil dan Tetap	68 (800m^2)	68 (800m^2)
	JUMLAH	**896**	**896**

Pada tahun 2018, prosentase gangguan terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, mengalami penurunan 5,31% dari tahun 2017 dari sebanyak 1.427 pelanggar (Thn 2017) menjadi sebanyak 896 pelanggar (thn 2018). Berikut grafik penyelesaian gangguan tibumtranmas per-tahunnya.

Grafik III. B.29

Gangguan Ketertiban dan Ketentraman Umum

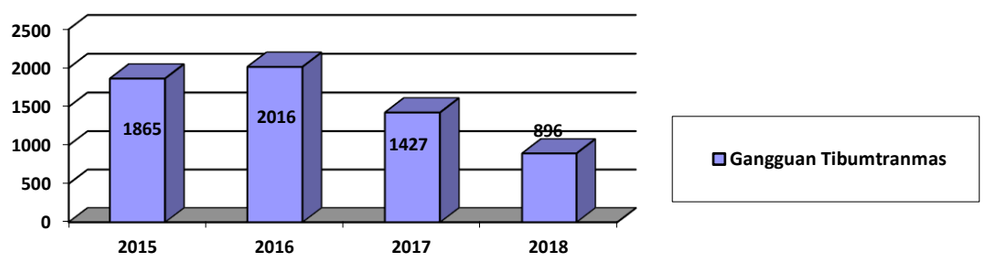

Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja

Penindakan terhadap gangguan tibumtranmas pada tahun 2018 fokus utamanya masih sama dengan tahun 2017 yaitu penertiban keberadaan bangunan liar dan sterilisasi lokasi dari keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Hal ini guna mendukung program-program yang dilakukan instansi/OPD teknis seperti pengendalian banjir, penataan parkir dan estetika kota. Mendasari hal tersebut, sepanjang tahun 2018 Satpol PP Kabupaten Sidoarjo telah menertibkan sejumlah 242 bangli di beberapa titik lokasi dan PKL sejumlah *Locus,* upaya penertiban bangli dan PKL dititiberatkan pada sepanjang 9 (sembilan) jalur utama, yaitu dari batas utara Jl. Raya Waru smpai dengan Batas selatan Jl. Raya Porong.

Sebagai bentuk upaya lanjutan dari tahun 2017, konsentrasi penertiban PKL terfokus pada pada Jl. Raya Gajah Mada dan Jl. Mojopahit serta jalur pendukung di sekitar Jl. Gajah Mada seperti pada Jl. Raden Patah dan JL. Sisingamangaraja. Khusus upaya stterilisasi PKL di Jl. Gajah Mada didukung juga dengan upaya penataan PKL yaitu memindahkan PKL ke tempat relokasi di lahan eks makam cina (dokumentasi terlampir). Sedangkan penertiban bangli dilakukan di Jl. Raya Sumorame, Candi.

Selain penertiban skala prioritas bangli dan PKL pada daerah tertentu, juga dilakukan penertiban di lokasi lain atas dasar aduan dan koordinasi dengan

pihak kecamatan dan OPD teknis, seperti di Kec. Tarik dan Desa Pagerwojo Kec. Buduran.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang diselesaikan dengan capaian kinerja 100% sesuai target kinerja yang ditetapkan..

b. Persentase anggota Satlinmas yang aktif dalam pengendalian lingkungan

Penjelasan mengenai indikator program ini menguraikan 2 (dua) variabel pendukung, antara lain sebagai berikut :

1. **Rasio jumlah Satlinmas terhadap Jumlah RT (Rukun Tetangga)**

   Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 ahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2008 Tentang Standard Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, disebutkan ideal komposisi personil Satlinmas di Kabupaten/Kota adalah jumlah personil Satlinmas berbanding dengan jumlah RT (Rukun Tetangga).

   Kondisi riil jumlah RT di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo sebanyak 8.427, sedangkan jumlah personil Satlinmas yang ada sampai dengan tahun 2017 terdata sebanyak 7.665 Personil. Target pemenuhan/penambahan anggota Satlinmas pada tahun 2018 adalah 5%/0,95% (383 personil). Pencapaian target dilakukan dengan kegiatan Pembinaan Potensi Masyarakat. Secara eksplisit kegiatan dimaksud berupa Sosialisasi terhadap warga masyarakat perihal urgensi keberadaan dan partispasi satlinmas dalam pengendalian keamanan lingkungan, ketentraman masyarakat, ketertiban umum dan tanggap bencana. Sasaran utama *locus* sosialisasi ditujukan pada Desa/Kelurahan yang masih minim jumlah personil satlinmasnya.

   Dari penetapan target tahun 2018 (0,95%/383 personil), pemenuhan/penambahan anggota satlinmas telah tercapai pada angka 353 personil. Berikut penyajian data perihal pemenuhan anggota satlinmas.

NO	URAIAN DATA	TARGET RENSTRA 2018	REALISASI KINERJA 2018
1	Rasio jumlah anggota linmas terhadap jumlah RT (sesuai SPM 1 RT / 1 anggota linmas)	1 : 0,95 (383 Orang)	1 : 0,94 (353 Orang)

NO	URAIAN DATA	JUMLAH
1	Jumlah RT Se-Kabupaten Sidoarjo	8.427
2	Jumlah linmas desa yang harus dipenuhi/direkrut selama 3 tahun (2017 – 2019)	1.109
3	Jumlah Linmas yang harus direkrut tahun 2018 (target)	383 (0,90)
4	Jumlah Linmas Desa yang telah direkrut tahun 2018 (pencapaian target)	386
5	Jumlah total anggota satlinmas se-Kabupaten Sidoarjo tahun 2017	8.051

Berikut Grafik Peningkatan/Penambahan Anggota Satlinmas di Kabupaten Sidoarjo

Grafik III. B.30

Penambahan Anggota Satlinmas

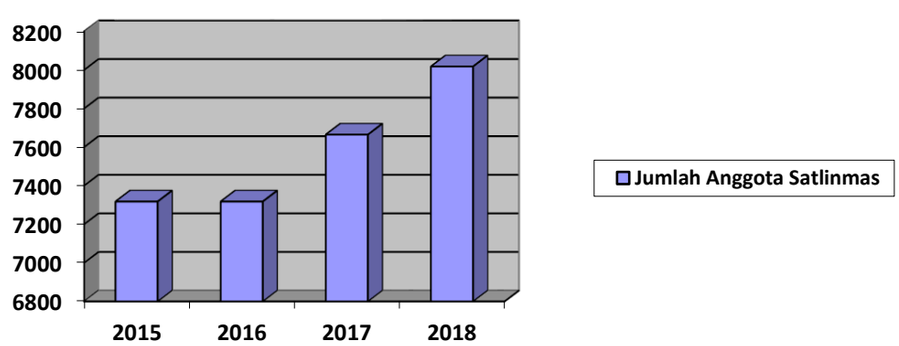

Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja

Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam perekrutan anggota satlinmas desa/kelurahan antara lain :

- Rata-rata personil anggota linmas di desa/kelurahan sudah lanjut usia
- Rendahnya minat masyarakat terhadap linmas sehingga menyulitkan proses perekrutan
- Pemerintah desa/kelurahan masih banyak yang belum memahami fungsi kelinmasan
- Pemerintah desa/kelurahan masih banyak belum mengalokasikan anggaran untuk kegiatan linmas

Upaya/langkah untuk pemenuhan personil Satlinmas pada tahun selanjutnya antara lain :

- Melakukan inventarisasi dan menganalisa jumlah satuan linmas yang dibutuhkan di tingkat RT
- Melakukan Sosialisasi tentang pentingnya kebutuhan Satlinmas di setiap RT kepada Kepala Desa/lurah dan Kepala RW
- Melakukan Sosialisasi peran dan fungsi linmas kepada Camat, Kepala desa/lurah, tokoh masyarakat dan LSM

2. Peran Aktif Satlinmas Dalam Pelaksanaan Fungsi Kelinmasan

Pengkoordinasian dan pengerahan satlinmas desa/kelurahan merupakan tupoksi dari Satpol PP Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan pengerahan anggota satlinmas desa/kelurahan ditujukan pada partsipasi dan fungsi kelinmasan seperti pemeliharaan keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, tanggap bencana dan kegiatan sosial kemasyarakatan (*sesuai Permendagri No. 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat*).

Pada tahun 2018 telah dilakukan pengerahan anggota satlinmas desa/kelurahan sejumlah 600 personil, sesuai target yang ditetapkan tahun 2018 sejumlah 600 personil. Fokus pengerahan dititikberatkan pada partisipasi pengamanan pilkada Gubernur Jatim dan penanganan bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

c. Persentase kasus pelanggaran peraturan daerah yang ditangani

Ruang lingkup penegakan peraturan daerah salah satunya adalah kegiatan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja untuk menyelesaikan setiap terjadinya pelanggaran peraturan daerah dengan langkah penindakan represif yustisial.

Bentuk pelaksanaannya diimplementasikan dengan penyelenggaraan Sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) bagi pelaku pelanggaran peraturan daerah.

Jumlah penyelesaian pelanggaran peraturan daerah melalui proses sidang tipiring pada tahun 2018 sebanyak 576 pelanggar. Kondisi ini mengalami peningkatan 20,19% dari tahun 2017 yang menyidangkan sebanyak 460 pelanggar.

Grafik III. B.31

Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah

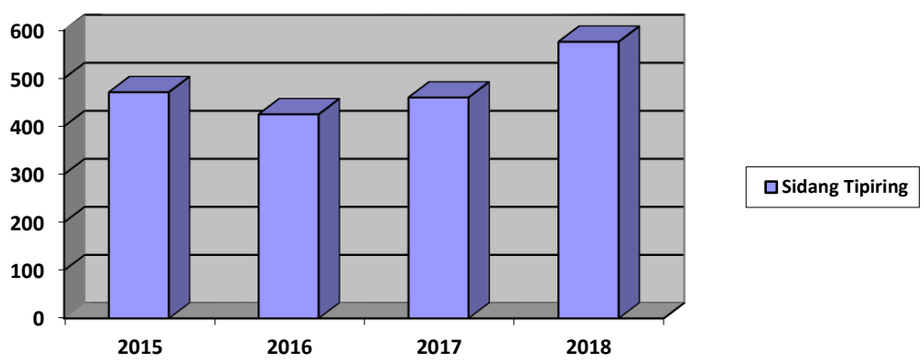

Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja

Dari data grafik diatas dapat diketahui terjadi peningkatan jumlah pelanggar yang ditindak secara pro yustisial pada tahun 2018, hal tersebut dikarenakan peningkatan jumlah frekuensi kegiatan penegakan peraturan daerah/sidang tipiring tahun 2018.

Penegakan peraturan daerah secara pro yustisial pada tahun 2018 dititikberatkan pada lokasi – lokasi yang ditentukan guna mendukung dan sinkron dengan penanganan gangguan tibumtranmas. Prioritas utama penegakan peraturan daerah dan gangguan tibumtranmas adalah pada

wilayah 9 (sembilan) jalur utama seperti yang dijelaskan pada point sebelumnya.

Peningkatan jumlah pelanggar peraturan daerah pada tahun 2018 tidak serta merta menjadi preseden negatif apabila dsinkronkan dengan asumsi tidak terjadinya penurunan pelanggaran peraturan daerah. Narasi positif yang dapat disampaikan dalam hal ini adalah peningkatan frekuensi penindakan pro yustisia dan peningkatan jumlah pelanggar peraturan daerah berefek pada peningkatan prosentase wilayah atau lokasi yang bebas pelanggaran peraturan daerah. Dalam hal ini dapat dilihat secara real di lokasi – lokasi seperti Jl. Gajah Mada, Jl. Mojopahit, Jl. Sisingamangaraja dan Jl. Raden Patah.

Berikut Tabel Jumlah Penindakan Yustisial terhadap Pelanggar Perda tahun 2018.

REKAPITULASI SIDANG TIPIRING
TAHUN 2018

No.	Tanggal Sidang	Tempat Sidang	Jenis Pelanggaran	Jumlah Pelanggar	Denda Minimal	Denda Maksimal	Jumlah Denda	
1	31 Januari 2018	PN Sidoarjo	Perda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	3	denda Rp 75.000,- + biaya perkara Rp. 1.000,- Subsidair, 3 hari kurungan.	denda Rp 200.000,- + biaya perkara Rp. 1.000,- Subsidair, 7 hari kurungan.	Rp.	353.000,00
2	7 Pebruari 2018	Satpol PP	Perda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	38	denda Rp 100.000,- + biaya perkara Rp. 1.000,- Subsidair, 14 hari kurungan.	denda Rp 250.000,- + biaya perkara Rp. 1.000,- Subsidair, 1 Bulan kurungan.	Rp.	5.388.000,00
3	21 Pebruari 2018	Satpol PP	Perda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	32	Denda Rp. 149.000,- biaya perkara Rp.1.000,- subsidair 7 hari kurungan.	Denda Rp. 299.000,- biaya perkara Rp.1.000,- subsidair 7 hari kurungan.	Rp.	6.850.000
4	07 Maret 2108	Satpol PP	Perda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	30	Denda Rp. 49.000,- biaya perkara Rp.1.000,- subsidair 3 hari kurungan.	Denda Rp. 349.000,- biaya perkara Rp.1.000,- subsidair 5 hari kurungan.	Rp.	3.950.000
5	14 Maret 2018	Satpol PP	Perda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	28	Denda Rp. 99.000,- biaya perkara Rp.1.000 subsidair 3 hari kurungan	Denda Rp. 199.000,- biaya perkara Rp.1.000 subsidair 3 hari kurungan	Rp.	3.650.000,00
6	28 Maret 2018	Satpol PP	Perda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	32	Denda Rp. 74.000,- biaya perkara Rp.1.000 subsidair 5 hari kurungan	Denda Rp. 144.000,- biaya perkara Rp.1.000 subsidair 6 hari kurungan	Rp.	2.895.000,00
7	11 April 2018	Satpol PP	Perda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	39	Denda Rp. 50.000,- biaya perkara Rp.1.000 subsidair 3 hari kurungan	Denda Rp. 200.000,- biaya perkara Rp.1.000 subsidair 3 hari kurungan	Rp.	3.025.000,00
8	25 April 2018	Satpol PP	Perda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	27	Denda Rp. 100.000,- biaya perkara Rp.1.000 subsidair 5 hari kurungan	Denda Rp. 200.000,- biaya perkara Rp.1.000 subsidair 3 hari kurungan	Rp.	2.700.000,00
9	09 Mei 2018	Satpol PP	Perda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	22	Denda Rp. 49.000,- biaya perkara Rp.1.000 subsidair 3 hari kurungan	Denda Rp. 124.000,- biaya perkara Rp.1.000 subsidair 3 hari kurungan	Rp.	3.825.000,00
10	11 Juli 2018	Satpol PP	Perda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	46	Denda Rp. 74.000,- biaya perkara Rp.1.000 subsidair 3 hari kurungan	Denda Rp. 199.000,- biaya perkara Rp.1.000 subsidair 3 hari kurungan	Rp.	4.950.000,00
11	25 Juli 2018	Satpol PP	Perda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	49	Denda Rp. 49.000,- biaya perkara Rp.1.000 subsidair 3 hari kurungan	Denda Rp. 299.000,- biaya perkara Rp.1.000 subsidair 3 hari kurungan	Rp.	5.350.000,00
12	08 Agustus 2018	Satpol PP	Perda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	54	Denda Rp. 49.000,- biaya perkara Rp.1.000 subsidair 3 hari kurungan	Denda Rp. 199.000,- biaya perkara Rp.1.000 subsidair 5 hari kurungan	Rp.	4.275.000,00
13	15 Agustus 2018	Satpol PP	Perda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	31	Denda Rp. 49.000,- biaya perkara Rp.1.000 subsidair 3 hari kurungan	Denda Rp. 299.000,- biaya perkara Rp.1.000 subsidair 3 hari kurungan	Rp.	2.750.000,00
14	19 September 2018	Satpol PP	Perda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	46	Denda Rp. 74.000,- biaya perkara Rp.1.000 subsidair 2 hari kurungan	Denda Rp. 199.000,- biaya perkara Rp.1.000 subsidair 5 hari kurungan	Rp.	5.850.000,00
15	26 September 2018	Satpol PP	Perda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	33	Denda Rp. 74.000,- biaya perkara Rp.1.000 subsidair 2 hari kurungan	Denda Rp. 149.000,- biaya perkara Rp.1.000 subsidair 3 hari kurungan	Rp.	2.375.000,00
16	31 Oktober 2018	Satpol PP	Perda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	42	Denda Rp. 50.000,- biaya perkara Rp.1.000 subsidair 2 hari kurungan	Denda Rp. 150.000,- biaya perkara Rp.1.000 subsidair 3 hari kurungan	Rp.	3.938.000,00
17	14 Nopember 2018	Satpol PP	Perda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	24	Denda Rp. 75.000,- biaya perkara Rp.1.000 subsidair 2 hari kurungan	Denda Rp. 350.000,- biaya perkara Rp.1.000 subsidair 3 hari kurungan	Rp.	2.900.000,00
				576			Rp.	65.024.000,00

Kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan peraturan daerah secara yustisial antara lain :

- Pelaksanaan sanksi administrasi belum berjalan dengan optimal (OPD pengampu perda belum optimal melaksanakannya)
- Kebanyakan perda yang ada saat ini memuat sanksi 6 (enam) bulan sehingga dalam penegakannya membutuhkan waktu yang lama (pemberkasan biasa)
- Tenaga PPNS yang ada saat ini kurang mencukupi
- Kurangnya dukungan anggaran di Kesekretariatan PPNS

Adapun upaya – upaya untuk pencegahan pelanggaran peraturan daerah antara lain :

- Intensifitas kegiatan penertiban dan pengawasan terhadap kegiatan di masyarakat yang berpotensi melanggar peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah
- Melaksanakan koordinasi dengan organisasi Perangkat Daerah (OPD) penginisiasi peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah
- Melakukan pengarahan/penyuluhan agar masyarakat dan badan hukum mematuhi peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah bersama dengan OPD lainnya; dan
- Melakukan pembinaan dan/atau sosialisasi kepada para pelanggar peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah

d. Indeks Toleransi

Indeks Toleransi digunakan untuk mengukur kohesi sosial, yaitu toleransi masyarakat dalam menerima kegiatan agama dan suku lain di lingkungan tempat tinggal, dengan tujuan :

a. mendeskripsikan tingkat toleransi masyarakat di Kabupaten Sidoarjo
b. Mendiskripsikan pengalaman masyarakat terkait toleransi di Kabupaten Sidoarjo

Pada tahun 2018 telah dilakukan survei/pengukuran indeks toleransi di Kabupaten Sidoarjo dengan 100 Responden/orang tersebar di 5 (lima) Desa dengan memperoleh hasil nilai indeks toleransi 72,25 dengan kategori Toleransi Tinggi.

- ***Upaya yang telah dilakukan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:***
  1. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas Warga Negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui pendidikan politik yang berkesinambungan;
  2. Mengembangkan kreatifitas masyarakat dengan memberikan dorongan kearah kehidupan politik yang menghormati HAM dan SARA, berkeadilan, bertanggung jawab dan mampu berkompetisi secara sehat dan dinamis;
  3. Menjalin komunikasi antar tokoh/pemuka agama mengenai pendirian rumah ibadah Harus kooperatif dengan warga di sekitar tempat ibadah yang didirikan. Persyaratan, kejujuran, tidak ada rekayasa dan arif dengan lingkungan tersebut berlaku untuk semua umat beragama tidak hanya untuk Islam saja atau Kristen saja;
  4. Menjalin kerukunan dan Intern umat beragama/kerukunan antar umat beragama dan saling menghormati antar sesamanya, menghindari dan tidak mempublikasikan informasi yang mempunyai tendensi menyinggung secara langsung dan negative masalah suku, agama, dan Ras (SARA), termasuk didalamnya usaha penghinaan, pelecehan, pendiskreditan, penyiksaan serta segala bentuk pelanggaran hak atas perseorangan, kelompok/lembaga instansi lain.

- ***Kendala/permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :***
  1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi dalam proses politik
  2. Pendirian tempat ibadah yang menyebabkan munculnya keresahan dan mengusik kedamaian kehidupan beragama

3. Masyarakat mudah terjerumus kedalam pertikaian berdasarkan agama, suku, ras dan golongan dan mempublikasikan informasi yang mempunyai tendensi
4. Lemahnya penegakan supremasi hukum, rendahnya kesadaran hukum pada masyarakat dan kurangnya perhatian terhadap kelompok masyarakat yang rentan akan pelanggaran HAM dan SARA

➢ ***Rencana Tindak Lanjut Tahun Berikutnya :***

1. Mendukung pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemilu yang lebih demokratis, jujur dan adil dalam rangka penegakan kedaulatan rakyat di segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
2. Meningkatkan pemahaman HAM di jajaran aparatur pemerintah dan masyarakat, kemampuan pemahaman terhadap masalah dan strategi pemecahan masalah guna menghindari terjadinya konflik yang berdampak pada disintegrasi bangsa
3. Untuk mewujudkan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat perlu dibentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di tingkat Kabupaten, Kecamatan sampai Kelurahan/Desa.
4. Menjalin kerukunan antar umat beragama dan kerukunan intern umat seagama harus juga seiring dengan kerukunan umat beragama dengan pemerintah, karena Pemerintah adalah lembaga yang berfungsi memberlakukan kebaikan Tuhan kepada manusia, pemelihara ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

e. Kegiatan Kewaspadaan, Keamanan dan Kenyamanan Daerah

Pada Tahun 2018 kegiatan Kewaspadaan, Keamanan dan Kenyamanan Daerah dilaksanakan sebanyak dua puluh (20) kegiatan, kegiatan tersebut antara lain :

1) Rapat Koordinasi Tim Terpadu Cipta Kondisi sosial Keamanan dan Kenyamanan daerah pada tanggal 27 April 2018
2) Rapat Koordinasi Deteksi dini terhadap bahaya radikalisme pada tanggal 2 April 2018

3) Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Penanggulangan Konflik pada tanggal 30 April 2018
4) Rapat Koordinasi Komunitas Intelejen Negara (KOMINDA) pada tanggal 16 April 2018
5) Rapat Koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) pada tanggal 05 April 2018
6) Sosialiasasi P3GN pada tanggal 2 Mei 2018
7) Rapat Koordinasi Komunitas Intelejen Negara (KOMINDA) pada tanggal 04 Mei 2018
8) Rapat Koordinasi Tim Terpadu Cipta Kondisi sosial Keamanan dan Kenyamanan daerah pada tanggal 11 Mei 2018
9) Rapat Koordinasi meningkatkan Kewaspadaan Terhadap Teroris pada tanggal 30 Mei 2018
10) Rapat Koordinasi Komunitas Intelejen Negara (KOMINDA) pada tanggal 08 Juni 2018
11) Rapat Koordinasi Tim Terpadu Cipta Kondisi sosial Keamanan dan Kenyamanan daerah pada tanggal 07 Juni 2018
12) Rapat Koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) pada tanggal 08 Juni 2018
13) Rapat Koordinasi Komunitas Intelijen Daerah Kab. Sidoarjo pada tanggal 4 Oktober 2018
14) Rapat Koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat pada tanggal 3 Oktober 2018
15) Rapat Koordinasi Tim Terpadu Cipta Kondisi sosial Keamanan dan Kenyamanan daerah pada tanggal 04 Oktober 2018
16) Rapat Koordinasi Tim Terpadu Cipta Kondisi sosial Keamanan dan Kenyamanan daerah pada tanggal 28 November 2018
17) Rapat Koordinasi Komunitas Intelejen Negara (KOMINDA) pada tanggal 26 Desember 2018
18) Rapat Koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) pada tanggal 19 Desember 2018

f. Kegiatan Peningkatan Wawasan Kebangsaan

Pada Tahun 2018 kegiatan Penigkatan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan sebanyak lima (5) kali kegiatan, kegiatan tersebut antara lain:

1. Kegiatan Pemantapan HAM bagi satuan kerja pada tanggal 24 April 2018
2. Peningkatan Wasbang Taruna Cinta Tanah Air bagi Pelajar SMA/SMK pada tanggal 25 s/d 26 Juli 2018
3. Laporan Kegiatan Pemantapan Generasi Muda Forum Kerukunan Umat Beragama (GEMA FKUB) pada tanggal 22 Pebruari 2018
4. Kegiatan Semalam Nusantara di Sidoarjo Pada tanggal 3 November 2018
5. Kegiatan peningkatan Wasbang dalam rangka Bela Negara di Kabupaten Sidoarjo

g. Kegiatan Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga

Pada Tahun 2018 kegiatan Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga dilaksanakan sebanyak tujuh (7) kali kegiatan, kegiatan tersebut antara lain :

1. Kegiatan Rencana Kegiatan Silaturahmi dan Penyerahan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun anggaran 2018 pada tanggal 13 Agustus 2018
2. Laporan Monitoring Kegiatan Sosialisasi Perundang-Undangan Keormasan (LSM) di Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 27 September 2018
3. Monitoring kegiatan Rakor Pra Kampanye Pemilu Tahun 2019 pada tanggal 17 September 2018
4. Kegiatan Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula Tahun 2018 pada tanggal 19 April 2018
5. Kegiatan Pendidikan Politik bagi Guru SMA/SMK dan Pemili Pemula Tahun 2018 pada tanggal 25 April 2018
6. Kegiatan Pendidikan bagi Pemilih Pemula/Siswa-Siswi SMA/SMK Se- Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 pada tanggal 03 Mei 2018

7. Monitoring kegiatan Launching dan kajian public tentang parker berlangganan pada tanggal 2 Oktober 2018
8. Monitoring tinjau lapang di Organisasi Padepokan Kendali Sodo di Tanggulangin pada tanggal 09 Oktober 2018
9. Monitoring Kegiatan sosialisasi persetujuan alat peraga kampanye pada tanggal 10 Oktober 2018
10. Kegiatan Penguasan fungsi dan peran Organisasi kemasyarakatan Tahun 2018 pada tanggal 25 Oktober 2018
11. Monitoring HUT Golkar ke 54 tahun 2018 di Kantor DPD Golkar Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 27 Oktober 2018
12. Monitoring Pelantikan PC. Pemuda Panca Marga Periode Tahun 2018-2022 Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 29 Oktober 2018
13. Monitoring sarasehan jurnalistik tentang sengketa berita ayo gunakan UU PERS pada tanggal 29 Oktober 2018
14. Monitoring kegiatan Susbalan 2018 pada tanggal 2 Nopember 2018
15. Sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih muda pada PEMILU tahun 2019 di Kecamatan Taman pada tanggal 14 Nopember 2018
16. Sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih muda pada PEMILU tahun 2019 di Kecamatan Waru pada tanggal 16 Nopember 2018
17. Sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih muda pada PEMILU tahun 2019 di Kecamatan Krian pada tanggal 17 Nopember 2018
18. Monitoring Rapat Kerja Lembaga Pemenangan PEMILU (LPP) 2018 DPOC pada tanggal 17 s/d 18 Nopember 2018
19. Sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih muda pada PEMILU tahun 2019 di Kecamatan Sedati pada tanggal 21 Nopember 2018
20. Monitoring kegiatan sosialisasi pengawasan partisipasi Netralitas ASN, TNI, POLRI dan Kepala Desa pada PEMILU Tahun 2019 pada tanggal 22 Nopember 2018
21. Sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih muda pada PEMILU tahun 2019 di Kecamatan Prambon pada tanggal 23 Nopember 2018
22. Sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih muda pada PEMILU tahun 2019 di Kecamatan Tanggulangin pada tanggal 24 Nopember 2018
23. Sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih muda pada PEMILU tahun 2019 di Kecamatan Candi pada tanggal 30 Nopember 2018

24. Sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih muda pada PEMILU tahun 2019 di Kecamatan Jabon pada tanggal 04 Desember 2018
25. Sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih muda pada PEMILU tahun 2019 di Kecamatan Tarik pada tanggal 05 Desember 2018
26. Monitoring kegiatan rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar pemilih tetap hasil perbaikan (DPTHP-2) Pemilu 2019 pada tanggal 07 Desember 2018
27. Kegiatan sosialisasi peraturan BPK No. 2 Tahun 2015 tentang pemeriksaan laporan pertanggung jawaban bantuan keuangan Partai Politik dari APBD TA 2018 pada tanggal 10 Desember 2018
28. Monitoring Rakor penertiban APK Pemilu Serentak 2019 pada tanggal 11 Desember 2018
29. Sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih muda pada PEMILU tahun 2019 di Kecamatan Tulangan pada tanggal 11 Desember 2018
30. Sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih muda pada PEMILU tahun 2019 di Kecamatan Sidoarjo pada tanggal 12 Desember 2018

h. Penanganan Kejadian Kebakaran di Tahun 2018 :

Berikut kejadian kebakaran yang terjadi di tahun 2018 :

Tabel III.B.11

Kejadian Kebakaran di Tahun 2018

No	Jenis Bangunan	Jumlah Kejadian	Penanganan (Tepat / Tidak)
1.	Industri	33	Tepat
2.	Perkantoran	7	Tepat
3.	Unit Dagang / Jasa	34	Tepat
4.	Kendaraan Bermotor	14	Tepat
5.	Rumah Penduduk	43	Tepat
6.	Lain – Lain (Lahan Kering, Lahan Tebu, Lahan Terbuka, dll)	228	Tepat

Sumber Data : BPBD Kab. Sidoarjo

Total kejadian kebakaran di dalam Kabupaten Sidoarjo tahun 2018 adalah sebanyak 359 kejadian, dimana 118 kejadian ditangani dalam waktu tanggap / respon time 15 menit. Sehingga persentase kejadian kebakaran yang ditangani dalam waktu tanggap adalah : 118 / 359 * 100% = 32,87%.

Rata –rata waktu penanganan kebakaran tahub 2018 adalah 21.57 Menit sejak laporan diterima, dengan jumlah kejadian sebanyak 359 kejadian.

Pada tahun 2017, rata-rata waktu penanganan kebakaran adalah 18,74 menit dengan jumlah kejadian sebanyak 262 kejadian.

Terdapat perbedaan rata-rata waktu penanganan kebakaran antara tahun 2017 dan tahun 2018, hal ini disebabkan karena :

- Kejadian kebakaran pada tahun 2018 lebih banyak daripada tahun 2017, yang terjadi di dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) rata-rata terjadi pada saat jam-jam kepadatan lalu lintas;
- Jarak lokasi kejadian kebakaran masih terlalu jauh dari jangkauan pos pemadam kebakaran (untuk memenuhi *respon time* 15 menit, jarak pos pemadam kebakaran dengan lokasi kejadian kebakaran adalah maksimal 2,5 km. Dasar : Permen PU Nomor 20 Tahun 2009), sehingga perlu penambahan jumlah pos Damkar baru.

c. SKPD Penyelenggara Urusan

Urusan Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ini dilaksanakan oleh OPD yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

d. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di urusan Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat berjumlah 35 orang dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 3 orang dari Komisi Pemilihan Umum, 115 orang dari Satuan Polisi Pamong Praja; dan 79 orang dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Secara rinci SDM penyelenggara urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaiamana terlampir.

Sedangkan untuk ketersediaan Jabatan Fungsional di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdapat pranata komputer; di Satuan Polisi Pamong Praja terdapat

pranata komputer dan arsiparis, sedangkan di BPBD terdapat fungsional pranata komputer.

e. **Alokasi dan Realisasi Anggaran (per program)**

Secara rinci anggaran dan realisasi masing masing program sebagaimana terlampir.

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Rp 6,663,181,000.00	Rp 6,375,045,280.00	95.68%
2	Program Pembinaan dan Pengawasan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	Rp 793,425,000.00	Rp 768,591,080.00	96.87%
3	Program Perlindungan Masyarakat	Rp 784,100,000.00	Rp 743,275,000.00	94.79%

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Rp 2,508,050,000.00	Rp 2,336,712,900.00	93.17%
2	Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Rp 1,390,230,000.00	Rp 1,289,370,000.00	92.75%
3	Pogram Peningkatan pendidikan politik masyarakat dan hubungan antar lembaga	Rp 842,075,000.00	Rp 780,038,000.00	92.63%

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Pencegahan Dini. Kesiapsiagaan. Tanggap Darurat dan Manajemen Logistik Kebencanaan	Rp 1,825,574,300.00	Rp 1,354,271,368.00	74.18%
2	Program Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Rp 572,401,700.00	Rp 471,827,625.00	82.43%
3	Program Peningkatan Kesiagaan, Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Rp 10,923,201,910.00	Rp 10,448,163,221.05	95.65%

f. **Proses Perencanaan**

Proses perencanaan urusan Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan para tokoh masyarakat, pemerintah desa, kecamatan, perguruan tinggi dan LSM. Proses ini diawali dengan rapat kerja dinas dan jajaran kecamatan untuk melakukan penyusunan awal rencana. Kemudian pelaksanaan musrenbang desa, dan musrenbang kecamatan, sebagai bahan penyusunan Renja SKPD. Selanjutnya musrenbang kabupaten dan perumusan rancangan akhir. Setelah mendapat kesepakatan dari seluruh pemangku kepentingan dilakukan penetapan rencana.

g. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagaimana terlampir

6. **Urusan Sosial**

a. Program

Program pembangunan untuk urusan sosial yang dilaksanakan pada tahun 2018 adalah :

1. Program Kesejahteraan Sosial (PMKS) LainnyaProgram Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

b. Realisasi Pelaksanaan Program serta Permasalahan dan Solusi

Seluruh program Urusan Sosial telah dilaksanakan dan hasilnya dapat dilihat dengan pencapaian :

1. Tingkat Kemiskinan

Persentase kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 menunjukkan trend yang signifikan menurun. Persentase angka kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2013

masih mencapai 6,72%, kemudian turun berturut-turut hingga menjadi 5,69% di tahun 2018.

Selain memiliki trend menurun setiap tahunnya, persentase kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo juga masih di bawah persentase kemiskinan di Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

Dari total penduduk Sidoarjo Tahun 2018 sebesar 2,22 juta jiwa, sebanyak 126,26 ribu jiwa atau 5,69 persen nya merupakan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (miskin/ sangat miskin).

Perkembangan penduduk miskin di Kabupaten Sidoarjo terlihat pada grafik sebagai berikut :

Grafik III.B.32

Tingkat Kemiskinan

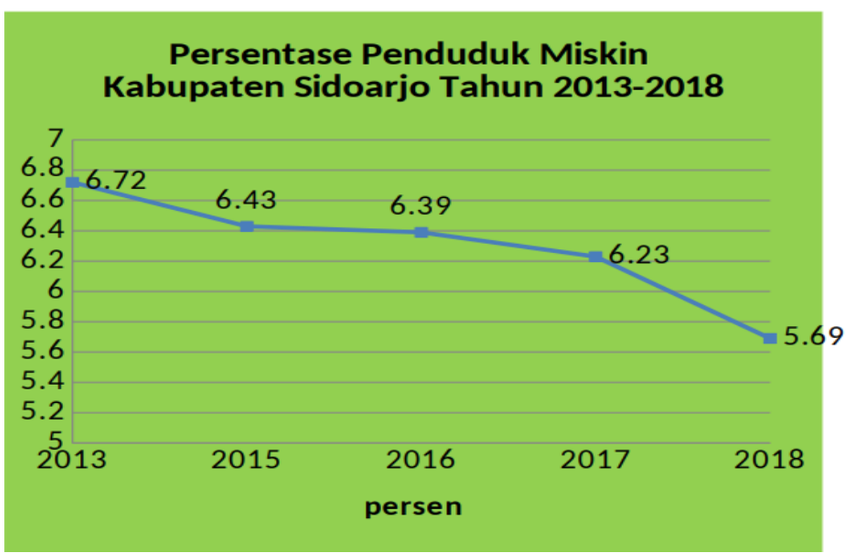

Sumber Data : BPS Kabupaten Sidoarjo

Sedangkan untuk garis kemiskinan atau batas kemiskinan minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di Kabupaten Sidoarjo digambarkan sebagai berikut :

Grafik III.B.33

Garis Kemiskinan

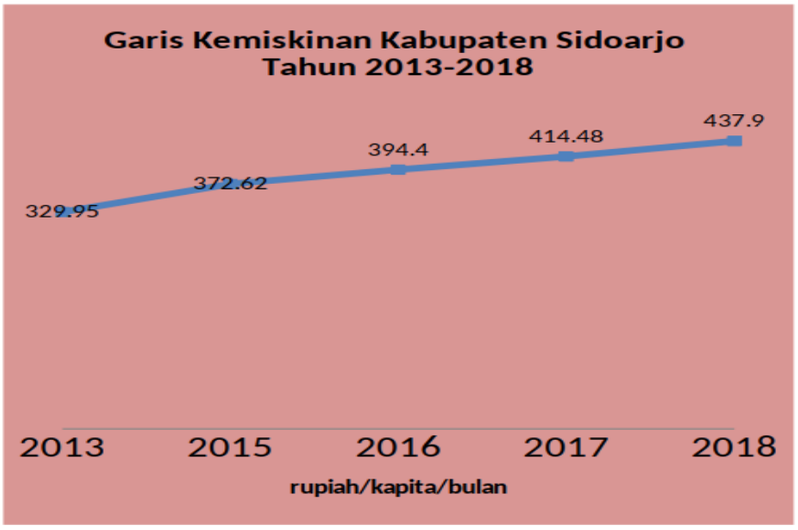

Sumber Data : BPS Kabupaten Sidoarjo

Upaya untuk mengurangi angka kemiskinan yaitu dengan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, menjaga stabilitas makro ekonomi, stabilisasi harga, menciptakan lapangan kerja produktif, menjaga iklim Investasi, menjaga regulasi perdagangan, meningkatkan produktivitas sektor potensial daerah, dan mengembangkan infrastruktur di wilayah tertinggal.

2. Penanganan PMKS

Tercapainya persentase Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terhadap penduduk dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Target Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terhadap penduduk Tahun 2018 sebesar 1,90%.
2. Pada tahun 2018 target penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah 106.151 orang, dan realisasi nya sebesar 95.618 (90,07%) orang.
3. Prosentase Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2017 sebesar 0,003% dari target 1,93%. pada Tahun 2018 sebesar 0,04 % dari target 1,90%
4. Terhadap jumlah PMKS pada tahun 2017 dilakukan penanganan/ pemberdayaan terhadap 31.667 orang/jiwa dan pada tahun 2018 dilakukan penanganan/ pemberdayaan terhadap 95.618 orang/jiwa sehingga ada

kenaikan penanganan PMKS pada tahun 2018 dibanding tahun 2017 sebesar 200%.

Penurunan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tersebut tidak lepas dari keberhasilan kegiatan Penanganan PKMS yang telah dilakukan antara lain :

1. Persentase Fakir Miskin yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya
   Indikator program ini bisa di lihat dari jumlah keluarga penerima manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari anggaran APBD sebanyak 4.548 per bulan yang terealisasi 100%;
2. Persentase Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN)
   Indikator program ini bisa dilihat dari jumlah Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) dari Anggaran APBD dengan target 97.726 Orang dan sudah terintegrasi sebanyak 87.159 jiwa yang terealisasi 89% dari target;
3. Persentase Tuna Sosial yang terlayani
   Target tuna sosial yang dilayani sebanyak 200 orang dari 1.116 tuna sosial yang ada, dengan demikian kontribusi capaian kinerja untuk indikator program ini adalah 100% dari target;
4. Persentase penyandang disabilitas yang terlayani
   Target penyandang disabilitas yang terlayani sebanyak 80 orang dari 2.585 penyandang disabilitas yang ada, dengan demikian kontribusi capaian kinerja untuk indikator program ini adalah 100% dari target;
5. Persentase anak dan lansia bermasalah sosial yang terlayani
   Target anak dan lansia bermasalah sosial yang terlayani sebanyak 450 anak/lansia dari 1.292 anak/lansia yang ada, dengan demikian kontribusi capaian kinerja untuk indikator program ini adalah 100% dari target pertahun;
6. Persentase PMKS yang terlayani di Liponsos
   Target Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terlayani dan berada di Liponsos sebanyak 75 orang/bulan (900 orang/tahun) dan sudah terlayani seluruhnya sehingga tersealisasi 100%

Kendala / Permasalahan yang di hadapi

Permasalahan / kendala yang dihadapi dalam upaya penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terhadap jumlah penduduk antara lain :

1. Jenis PMKS prioritas yang ditangani ada 5 (lima) yaitu :
   - Gelandangan
   - Gelandangan Psikotik (sakit jiwa)
   - Pengemis
   - Tuna Susila (WTS)
   - Anak Jalanan (anak-anak yang hidup di jalanan)

   Sedangkan jenis PMKS yang sulit untuk dilakukan pembinaan adalah gelandangan dan gelandangan psikotik.
2. Adanya urbanisasi penduduk yang tidak di imbangi dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai sehingga bisa menambah jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Sidoarjo

Rencana Tindak Lanjut adalah :

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program-program yang telah dilaksanakan.
2. Lebih meningkatkan pembinaan, motivasi dan pendampingan terhadap PMKS dan keluarga serta kelompok masyarakat di sekitar klien.
3. Memberi motifasi kepada keluarga agar mau dan mampu untuk ikut berperan serta aktif dalam memberikan pembinaan dan mau menerima kembali sebagai anggota keluarga besarnya.
4. Memberikan motivasi agar mau dan mampu untuk membentuk suatu kelompok kerja / kelompok usaha bersama dan memaksimalkan waktu yang ada dengan memberikan materi langsung lebih banyak praktek.
5. Memberikan motivasi dan mengoptimalkan para pendamping sosial dalam melakukan pendampingan.
6. Memberikan bimbingan kepada klien dan keluarganya.
7. Memberikan pembinaan / pelatihan ketrampilan praktis untuk bekal peningkatan ekonomi keluarga sesuai dengan minat bakatnya
8. Mengupayakan / mengkoordinasikan dengan bidang lain untuk melaksanakan implementaria program.

Tabel III.B.12

Data Penanganan PMKS Tahun 2018

NO	KEGIATAN	Realisasi Tahun 2017	Target 2018 Kegiatan (Orang)	Capaian 2018 Kegiatan (Orang)
1	Bantuan Permakanan Panti Asuhan	1.915	1.663	1.663
2	Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan PSM	1.000	450	450
3	Penanganan PMKS di Liponsos	900	900	900
4	PMKS tercover PBI JKN APBD	17.118	97.726	87.159
5	Bantuan Jaminan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas	21	27	25
6	BPNT APBD bagi Keluarga Penerima Manfaat	4.210	4.548	4.548
7	Pelatihan bagi Penyandang Disabilitas	20	80	80
8	Pembinaan ODHA	206	200	200
9	Pelatihan Bagi Tuna Sosial (Pelatihan Menjahit Bagi Ex. Penghuni Lapas	20	-	-
10	Bantuan Bagi Perintis Kemerdekaan	7	7	7
11	Bantuan Bagi Warakawuri	100	100	100
12	Pembinaan anak dan lansia	250	450	450
14	Keluarga Penerima Manfaat Prgram Keluarga Harapan yang mendapat jaminan perlindungan kesehatan APBD	5.900	-	-
	JUMLAH	**31.667**	**106.151**	**95.618**

c. SKPD Penyelenggara Urusan

Urusan Sosial ini dilaksanakan oleh OPD yaitu Dinas Sosial.

d. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di urusan Sosial berjumlah 35 orang. Secara rinci SDM penyelenggara urusan Sosial menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaiamana terlampir.

Sedangkan untuk jabatan fungsional tersedia pranata komputer.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran (per program)

Secara rinci anggaran dan realisasi masing masing program sebagaimana terlampir.

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Kesejahteraan Sosial (PMKS) LainnyaProgram Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah	Rp 939,966,700.00	Rp 898,018,240.00	95.54%
2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Rp 2,154,752,000.00	Rp 1,941,991,977.00	90.13%
3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp 302,606,000.00	Rp 257,427,700.00	85.07%

f. Proses Perencanaan

Proses perencanaan urusan sosial dilakukan secara partisipatif diawali dari rapat kerja dinas dan jajaran kecamatan, musrenbang desa, serta musrenbang kecamatan, sebagai bahan penyusunan Renja SKPD dengan melibatkan para tokoh masyarakat, Perguruan Tinggi, dan LSM.

g. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan soaial di Dinas Sosial sebagaimana terlampir.

7. Urusan Ketenagakerjaan

a. Program

Program pembangunan untuk urusan ketenagakerjaan yang dilaksanakan pada tahun 2018 adalah :

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Penyelenggaraan Transmigrasi
3. Program Pengembangan dan Perlindungan Ketenagakerjaan

b. Realisasi Pelaksanaan Program serta Permasalahan dan Solusi

1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Untuk mengukur tingkat ketersediaan kesempatan kerja oleh pemerintah kabupaten maka tingkat pengangguran terbuka merupakan salah satu ukurannya.

Berikut grafik perkembangan tingkat pengangguran tahun 2015 sampai dengan 2018 :

Grafik III.B.34

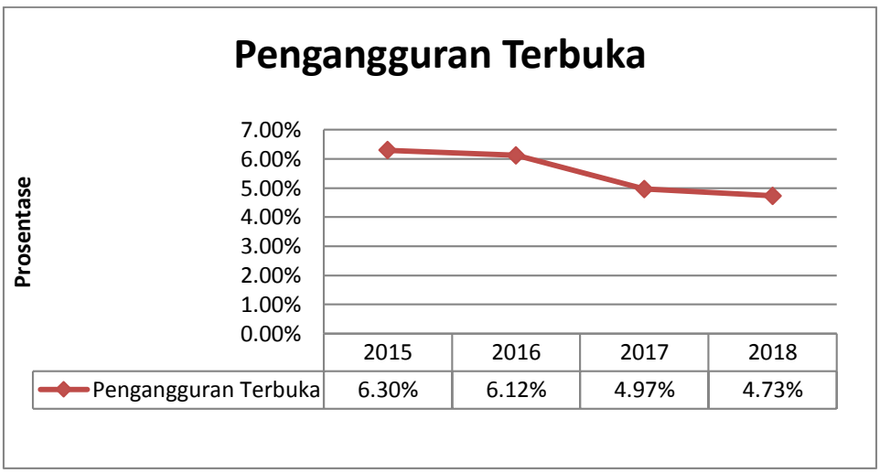

Sumber Data : BPS dan Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan Kemnaker RI

Dari grafik di atas terlihat bahwa tingkat pengangguran terbuka menunjukkan penurunan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Dari 6,30 pada tahun 2015 terus menurun menjadi 6,12% pada tahun 2016 dan penurunan yang cukup tinggi pada tahun 2017 yaitu sebesar 4,97% dan pada tahun 2018 kembali mengalami penurunan menjadi 4,73%.

Hal ini disebabkan karena adanya Stabilitas perekonomian di Kabupaten Sidoarjo yang cukup mendukung dan komitmen pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mempermudah investasi.

Capain target tahun 2018 tersebut diatas sudah melebihi dari target yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 4,84%.

Dalam perencanaan tenaga kerja daerah 2017 – 2021 perkembangan kesempatan kerja diproyeksikan akan terus meningkat sehingga angka pengangguran di Kabupaten Sidoarjo akan semakin menurun. Pada tahun 2015 jumlah penganggur di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 68.311 orang menurun menjadi 68.058 orang pada tahun 2016 dan menjadi 53.475 orang

pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 kembali mengalami penurunan menjadi 51.773 orang. Namun pertumbuhan angkatan kerja bergerak secara fluktuatif dengan angkatan kerja pada tahun 2015 sebanyak 1.083.519 orang meningkat menjadi 1.112.691 orang pada tahun 2016 namun menurun pada tahun 2017 menjadi 1.075.359 orang dan pada tahun 2018 sebanyak 1.094.650.

Dalam upaya mengurangi pengangguran, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Tenaga Kerja berpedoman pada perencanaan tenaga kerja melalui Buku Rencana Tenaga Kerja 2017-2021 yang bekejrasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI.

Upaya yang dilakukan untuk menekan angka pengangguran terbuka, antara lain :

1. Pemerintah Daerah melalui Dinas Tenaga Kerja Menyelenggarakan Pelatihan Berbasis Kompetensi sehingga keluaran hasil pelatihan tersertifikasi dan mampu bersaing pada dunia kerja.
2. Menyelenggarakan Bursa Kerja, baik Bursa Kerja Terbuka maupun Bursa Kerja Khusus.
3. Menjalin hubungan industrial yang kondusif guna mengurangi angka perselisihan hubungan industrial yang berdampak pada PHK.

Sebesar 30,92 % jumlah penggangguran di Kabupaten Sidoarjo adalah lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), sebagaimana dalam grafik :

Grafik III.B.35

Statistik Pengangguran Berdasarkan Pendidikan

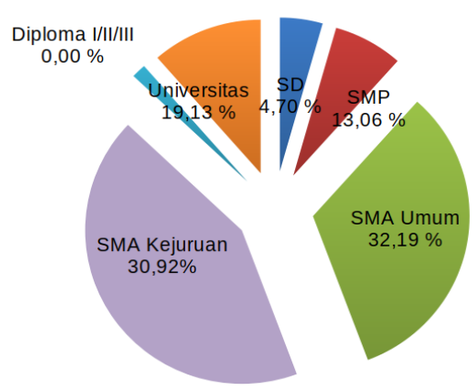

Sumber Data : BPS Kabupaten Sidoarjo

Tabel III.B.13

Statistik Ketenagakerjaan Tahun 2017 – 2018

URAIAN	2017	2018
1. TPAK (%)	64,54	64,53
2. TPT (%)	4,97	4,73
3. Bekerja (%)	95,03	95,27
4. Penduduk bekerja di :		
a. Sektor Primer	3,57	3,82
b. Sektor Sekunder	41,49	42,36
c. Sektor Tersier	54,94	53,82

Sumber Data : BPS Kabupaten Sidoarjo

Pada penyerapan tenaga kerja (TK), terjadi sedikit pergeseran dari ketiga kelompok sektoral : primer, sekunder dan tersier. Sektor sekunder yang pada 10 tahun yang lalu selalu mendominasi dengan penyerapan TK tertinggi, sejak 6 tahun terakhir posisinya sudah dilampaui oleh sektor tersier. Pada tahun 2017, penyerapan TK sektor tersier sebesar 53,82%; lebih besar dari sektor sekunder sebesar 42,36%.

Sektor ekonomi tersier disebut juga sebagai sektor jasa atau industri jasa, sektor sekunder adalah manufaktur, sedangkan sektor primer meliputi pertambangan, pertanian dan perikanan.

2. **Persentase pencari kerja yang ditempatkan**

Perkembangan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik III.B.36

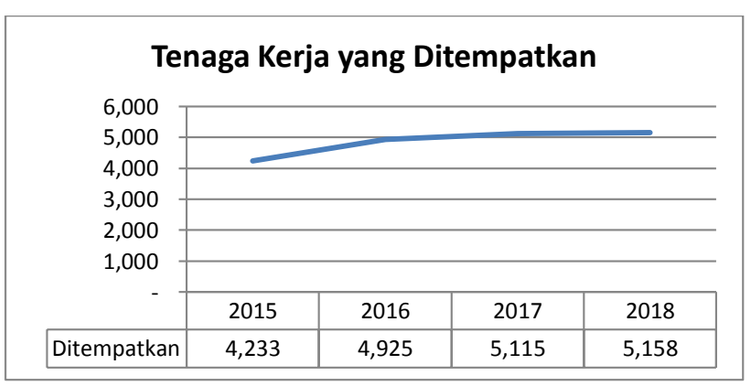

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja

Pada tahun 2017, jumlah tenaga kerja yang berhasil ditempatkan dan terlaporkan sebanyak 5.115 orang dan meningkat dari tahun 2016 sebanyak 190 orang atau 3,86% dan pada tahun 2018 sebesar 5158 orang. Hal ini menunjukkan adanya upaya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menanggulangi masalah pengangguran.

Upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan penempatan tenaga kerja, antara lain :

1. Melaksanakan kegiatan Bursa Kerja baik Bursa Kerja Terbuka Maupun Bursa Kerja Khusus.
2. Bekerjasama dengan sektor swasta dalam hal rekruitmen tenaga kerja

Adapun IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan Perencanaan Pembangunan terdapat dalam buku lampiran.

c. SKPD Penyelenggara urusan

Urusan Ketenagakerjaan ini dilaksanakan oleh OPD yaitu Dinas Tenaga Kerja.

d. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di urusan Ketenagakerjaan Kabupaten Sidoarjo berjumlah 35 orang. Secara rinci SDM penyelenggara urusan Ketenagakerjaan menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaiamana terlampir.

Untuk jabatan fungsional terdapat mediator hubungan industrial.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran (per program)

Secara rinci anggaran dan realisasi masing masing program sebagaimana terlampir.

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp 1,903,493,120.00	Rp 1,800,142,950.00	94.57%
2	Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Penyelenggaraan Transmigrasi	Rp 1,860,779,800.00	Rp 1,764,440,100.00	94.82%
3	Program Pengembangan dan Perlindungan Ketenagakerjaan	Rp 353,700,000.00	Rp 344,055,000.00	97.27%

f. Proses Perencanaan

Proses perencanaan urusan Ketenagakerjaan dilakukan secara partisipatif diawali dari rapat kerja dinas untuk menyusun rancangan awal, kemudian pelaksanaan musrenbang yang dimulai dari, musrenbang desa, serta musrenbang kecamatan, dan musrenbang kabupaten dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang berasal dari tokoh masyarakat, anggota legislatif, Perguruan Tinggi, dan LSM. Selanjutnya dari hasil musrenbang tersebut dilakukan perumusan rancangan akhir, berupa perumusan Renja SKPD dan RKPD. Pada akhir proses perencanaan dilakukan penetapan rencana.

g. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan Ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja adalah sebagaimana terlampir.

8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Program

Program pembangunan yang dilaksanakan untuk urusan ini pada tahun 2018 adalah Program Kesetaraan gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

b. Realisasi Pelaksanaan Program serta Masalah dan Solusi

Seluruh program Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah dilaksanakan, dan hasilnya dapat terlihat dengan pencapaian :

1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Gender Development Indeks (GDI) atau Indeks Pembangunan Jender (IPG) digunakan untuk mengetahui adanya ketimpangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki dengan memperhatikan disparitas jender. Komponen pendukung IPG sama dengan komponen pendukung IPM yaitu meliputi dimensi Kesehatan yang digambarkan dari Angka Harapan Hidup, Pengetahuan yang digambarkan dari Harapan Lama Sekolah dan Rata – rata lama Sekolah serta Ekonomi yang digambarkan dengan Pengeluaran Perkapita. Perbedaannya adalah bahwa dalam penghitungan Indeks Pembangunan Gender (IPG) komponen pendukungnya disesuaikan dengan mengakomodasikan perbedaan pencapaian antara perempuan dan laki-laki dengan nilai minimum dan maksimum

Perkembangan IPG adalah sebagai berikut :

Grafik III.B.37

Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Sidoarjo

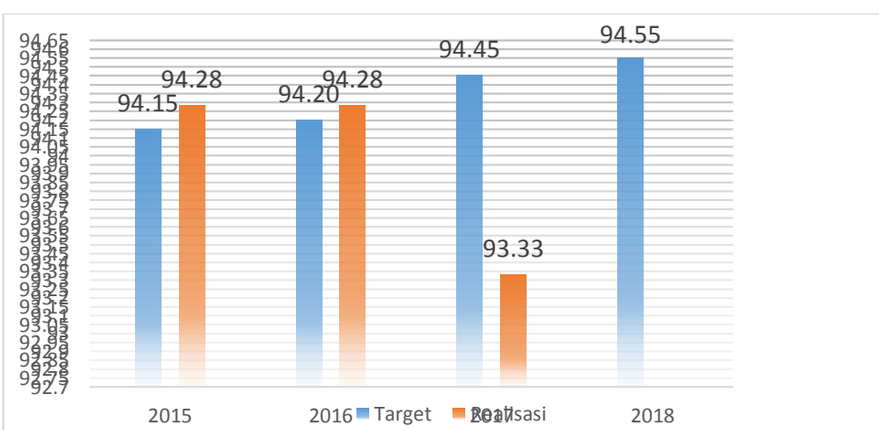

Sumber Data : BPS Kabupaten Sidoarjo

Adapun komponen pendukung IPJ Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1) Proporsi penduduk, jumlah penduduk laki-laki 50,24% sedangkan perempuan sebesar 49,76 %;
2) Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk Kabupaten Sidoarjo untuk penduduk laki-laki dari 71,78 tahun sedangkan untuk penduduk perempuan 75,54 tahun;
3) Harapan Lama Sekolah (HLS) yaitu untuk penduduk laki-laki 14,37% sedangkan untuk penduduk perempuan 14,28%;
4) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yaitu untuk penduduk laki-laki dari 10,77 tahun, sedangkan untuk penduduk perempuan 9,70 tahun;
5) Pengeluaran perkapita, laki-laki 19,05% sedangkan perempuan 13,23%;

Dari hasil penghitungan komponen pendukung Indek Pembangunan Gender (IPG) dapat dilihat bahwa pencapaian Indek Pembangunan Gender tahun 2017 sebesar 93,33 % atau tercapai 98,81% dari target IPG tahun 2017 sebesar 94,45%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 sebesar 94,28%, terjadi penurunan sebanyak 0,95% pada tahun 2017. Sedangkan capaian 2018 belum dapat diukur dengan target sebesar 94,55% karena belum dilakukan penghitungan oleh BPS. Namun apabila diperbandingkan dengan target tahun 2018 maka capaian tahun 2017 sebesar 98,71%.

Kendalanya yaitu : Kurangnya peran perempuan dalam pemberdayaan usaha ekonomi.

Upaya yang dilakukan yaitu : Memberikan pelatihan ketrampilan bagi perempuan untuk meningkatkan pemberdayaan usaha ekonomi.

2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Gender Empowerment Measurement (GEM) atau Indeks Pemberdayaan Jender (IDG) digunakan untuk mengkaji sejauh mana persamaan peranan perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik dan dalam pengambilan keputusan.

Perkembangan IDG adalah sebagai berikut :

Grafik III.B.38

Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Sidoarjo

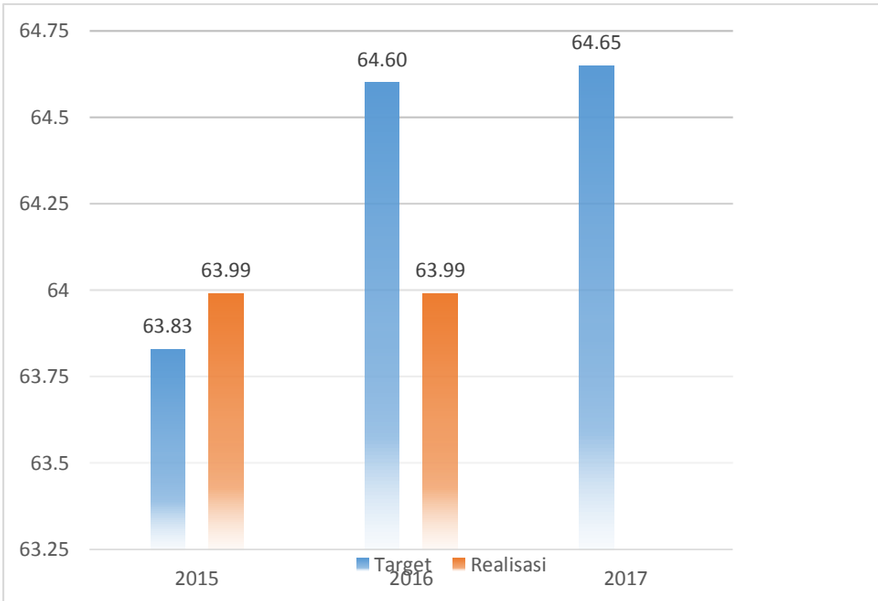

Sumber Data : Dinas PMD P3A KB

Adapun variabel penyusun IDJ Kabupaten Sidoarjo tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1) Proporsi penduduk, jumlah penduduk laki-laki 50,24% sedangkan perempuan sebesar 49,76%
2) Keterwakilan di parlemen, laki-laki 76,00 % sedangkan perempuan 14,00%
3) Proporsi manager, staf administrasi, pekerja profesional dan teknisi, laki-laki 52,79% sedangkan perempuan 47,21%
4) Proporsi angkatan kerja (persentase penduduk aktif dalam kegiatan ekonomi), laki-laki 70,64% sedangkan perempuan 29,36%

Dari hasil penghitungan komponen pendukung Indek Pemberdayaan Gender (IDG) dapat dilihat bahwa pencapaian Indek Pemberdayaan Gender tahun 2017 sebesar 64,65 % atau tercapai 100% dari target IDG tahun 2017 sebesar 64,65%. Sedangkan capaian 2018 dengan target IDG sebesar 64,70% belum dapat diukur karena belum ada penghitungan dari BPS.

Kendalanya yaitu : Kurangnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan, Jumlah keanggotaan Legeslatif perempuan belum mencapai 30% dan Kabupaten Sidoarjo hanya 7 orang atau 14% dari jumlah DPRD keseluruhan sebanyak 50 orang.

3. Kasus kekerasan pada perempuan dan anak

Untuk mengukur perhatian pemerintah kabupaten terhadap perlindungan perempuan dan anak adalah dengan mengukur sampai sejauhmana fasilitasi yang telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten terhadap tindak kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Kejadian tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Sidoarjo penanganannya di fasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sidoarjo.

Jumlah kejadian tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan tahun 2018 melalui P2TP2A sebanyak 137 kasus dan 100% teradvokasi.

Perkembangan Temuan Kasus kekerasan pada perempuan dan anak adalah sebagai berikut :

Grafik III.B.39
Kasus Kekerasan Dan Trafiking Terhadap Perempuan Dan Anak

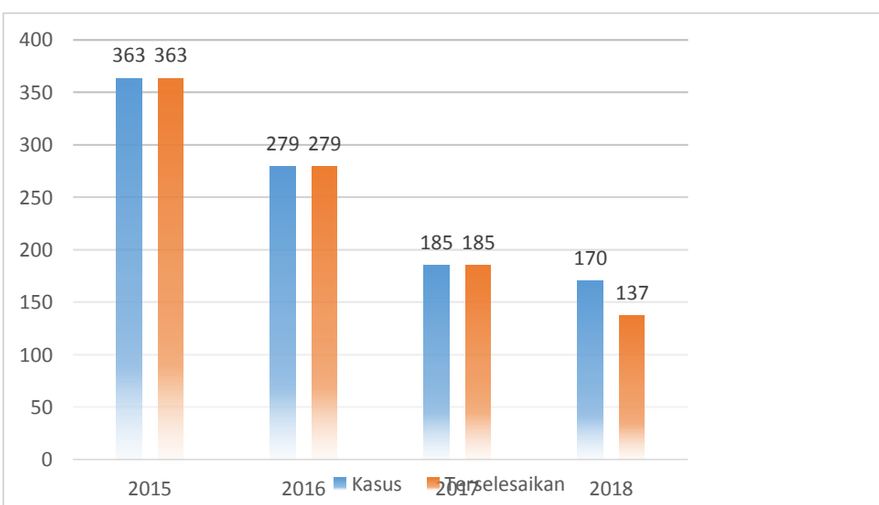

Sumber Data : Dinas PMD P3A KB

Tabel III.B.B.14
Data Rincian Jenis Kekerasan Yang Dialami
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018

NO	JENIS KASUS	JUMLAH KASUS	TERADVOKASI	%
1	KDRT UMUM	60	60	100
2	KDRT KHUSUS (Kekerasan Terhadap Istri / KTI)	0	0	0
3	KEKERASAN TERHADAP ANAK (KTA)	11	11	100
4	KEKERASAN DALAM HUBUNGAN KERJA (KDK)	0	0	0
5	KEKERASAN DALAM PACARAN (KDP)	4	4	100
6	KEKERASAN EKONOMI (KE)	11	11	100
7	PELECEHAN SEKSUAL	1	1	100
8	PENCABULAN	18	18	100
9	PERKOSAAN	0	0	0
10	TRAFIKING	0	0	0
11	PENGANIAYAAN	2	2	100
12	LAIN – LAIN	30	30	100
	TOTAL	**137**	**137**	**100**

Sumber Data : Dinas PMD P3A KB

Upaya advokasi yang dilakukan untuk menyelesaikan kasus kekerasan pada perempuan dan anak, yaitu :

1. Bekerjasama dengan LSM, Perguruan tinggi, Organisasi profesi, Organisasi masyarakat, Relawan dan Pemerintah
2. Membangun jaringan dengan kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Rumah Sakit Umum (RSU), Dinkes, Psikiater, Kemeterian Agama.
3. Melakukan validasi data korban kekerasan terhadap perempiuan dan anak kesemua pelayanan yang menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan yang berpotensi dialami dilakukan Pencegahan yaitu Mensosialisasikan tentang undang undang perlindungan perempuan dan anak melalui sekolah-sekolah,

Jaringan P2TP2A kecamatan, Organisasi kemasyarakatan dan Keluarga dan peran serta Desa dalam penyediaan anggaran untuk berperan aktif mensosialisasikan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

c. SKPD Penyelenggara Urusan

Urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan oleh OPD yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemnerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana.

d. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Sidoarjo berjumlah 9 orang. Secara rinci SDM penyelenggara urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaiamana terlampir. Tidak tersedia jabatan fungsional pada pelaksanaan urusan ini.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran (per program)

Secara rinci anggaran dan realisasi masing masing program sebagaimana terlampir.

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Kesetaraan gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp 2,924,018,300.00	Rp 2,198,429,657.00	75.19%

f. Proses Perencanaan

Proses perencanaan urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan secara partisipatif diawali dengan masukan permasalahan dan usulan-usulan, rapat kerja dinas dan jajaran kecamatan, musrenbang desa, serta musrenbang kecamatan, sebagai bahan penyusunan Renja SKPD. Penyelenggaraan urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari sejak perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi dilaksanakan secara multi sektoral.

g. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana adalah sebagaimana terlampir.

9. Urusan Pangan

a. Program

Program pembangunan untuk urusan pangan yang dilaksanakan pada tahun 2018 adalah Program Peningkatan Ketahanan pangan daerah

b. Realisasi Pelaksanaan Program serta Permasalahan dan Solusi

Seluruh program urusan Pangan telah dilaksanakan, hasilnya dapat terlihat dengan pencapaian :

Landasan perwujudan ketahanan pangan didasarkan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menyatakan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Sub sistem Ketahanan Pangan terdiri dari 3 (tiga) yaitu ketersediaan, distribusi konsumsi.

Sub sistem ketersediaan mencakup pengaturan kestabilan dan kesinambungan penyediaan pangan yang berasal dari produksi Kabupaten, cadangan pangan dalam Kabupaten maupun dari luar Kabupaten.

Sub sistem distribusi mencakup pengaturan untuk menjamin aksesibilitas penduduk secara fisik dan ekonomi terhadap pangan antar-wilayah dan waktu serta stabilitas harga pangan strategis.

Sub sistem konsumsi mencakup pengelolaan pangan di tingkat daerah maupun rumah tangga untuk menjamin setiap individu memperoleh pangan yang cukup dalam jumlah, gizi, keamanan, keragaman dan keterjangkauan sesuai kebutuhan dan pilihan.

Aspek ketersediaan pangan di Kabupaten Sidoarjo telah mencukupi sampai pelosok wilayah, walaupun produksi tidak cukup tersedia, sehingga untuk mencukupi ketersediaan diperlukan bahan pangan dari luar daerah Kabupaten Sidoarjo. Untuk aspek kualitas pangan dari semua unsur yang dibutuhkan yaitu karbohidrat, protein nabati maupun hewani telah tersedia dan cukup untuk dikonsumsi meskipun sebagian mendatangkan dari luar daerah.

Aspek distribusi yang berfungsi dengan baik akan mampu menggerakkan produk pangan kepada konsumen dalam waktu, tempat, bentuk dan mutu yang diinginkan dengan biaya minimal. Dengan demikian efisiensi sistem distribusi secara langsung ataupun tidak langsung akan berkaitan dengan daya beli masyarakat dan pendapatan petani.

Aspek konsumsi pangan dikatakan ideal apabila pangan masyarakat telah memenuhi kaidah pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA). Kondisi itu dapat dilihat dari aspek kuantitas dan aspek kualitas. Kuantitas pangan digunakan untuk mengetahui cukup atau tidaknya jumlah konsumsi pangan penduduk untuk hidup sehat dan produktif, sedangkan kualitas pangan digunakan untuk mengetahui keseimbangan gizi dari aneka ragam pangan yang dikonsumsi penduduk.

1. **Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan**.

Tingkat ketersediaan pangan selain dilihat dari kecukupan gizinya, baik energi dan protein, juga dinilai dari sisi keberagaman ketersediaan gizi berdasarkan Pola Pangan Harapan (PPH). PPH tingkat ketersediaan dihitung berdasarkan ketersediaan energi Neraca Bahan Makanan (NBM). Keberagaman pangan akan mendukung pencapaian keberagaman konsumsi pangan sehingga dapat dicapai sasaran konsumsi pangan yang diharapkan.

Dalam perhitungan dan pencapaian skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan mengalami perubahan rumusan. Untuk tahun 2015 dan tahun sebelumnya PPH Ketersediaan dihitung berdasarkan analisa GAP antara produksi dan konsumsi pangan di Kabupaten Sidoarjo. Tetapi mulai tahun 2016 PPH Ketersediaan dihitung berdasarkan produksi, cadangan dan pasokan pangan dari daerah lain yang dituangkan dalam Neraca Bahan Makan (NBM). Perubahan rumus dalam perhitungan PPH Ketersediaan ini dilakukan dalam rangka penyesuaian perhitungan PPH Ketersediaan yang dilakukan pusat.

Skor PPH tingkat ketersediaan berdasarkan Neraca Bahan Makanan tahun 2018 menunjukkan skor 88,72 persen, apabila dibandingkan dengan tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 0,6%.

Perkembangan realisasi pola pangan harapan ketersediaan tahun 2018 terlihat pada data berikut :

Grafik III.B.40

Perkembangan Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan

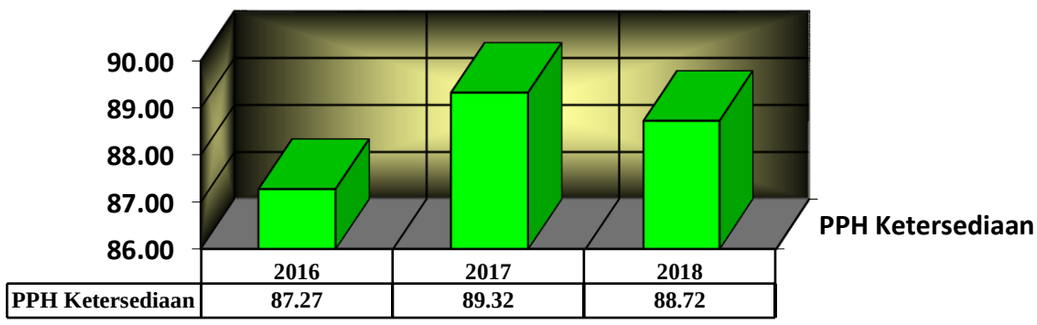

Sumber Data : Dinas Pangan dan Pertanian

Ketersediaan Pangan di Kabupaten Sidoarjo secara umum cukup dan Penurunan PPH Ketersediaan Pangan di Kabupaten Sidoarjo terjadi karena kelompok pangan tersebut sangat beragam yang mana tidak semua di produksi dari Kabupaten Sidoarjo namun masih mendatangkan dari luar kabupaten, khususnya buah, sayuran dan umbi-umbian.

Sedang PPH Ketersediaan Kab. Sidoarjo tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel III.Berikut :

Tabel III.B.15

Skor PPH Ketersediaan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018

No.	Kelompok Pangan	Skor AKE	Skor Maksimal	Gap Skor AKE dan Skor Maksimal	Skor PPH
1	Padi – Padian	25,1	25	0,1	25
2	Umbi – Umbian	0,8	2,5	-1,7	0,8
3	Pangan Hewani	206,3	24	182,3	24
4	Minyak dan Lemak	7,6	5	2,6	5
5	Buah/Biji Berminyak	0,1	1	-0,9	0,2
6	Kacang - Kacangan	12,8	10	2,8	10
7	Gula	4,8	2,5	2,3	2,5
8	Sayur dan Buah	21,2	30	-8,8	21,2
	Jumlah Skor PPH	146,2	100		88,7

Sumber Data : Dinas Pangan dan Pertanian

2. Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi

Adalah nilai capaian yang mencerminkan tingkat konsumsi pangan masyarakat dibanding tingkat konsumsi pangan ideal yang memenuhi kaidah pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA). Kondisi ini dapat dilihat dari aspek kuantitatif dan kualitatif. Dari aspek kuantitatif digunakan untuk mengetahui cukup tidaknya jumlah konsumsi pangan yang dikonsumsi, sedang kualitatif digunakan untuk mengetahui keseimbangan gizi dari aneka ragam pangan yang dikonsumsi penduduk.

Perkembangan realisasi pola pangan harapan konsumsi tahun 2018 terlihat pada data berikut :

Grafik III.B.41

Perkembangan Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

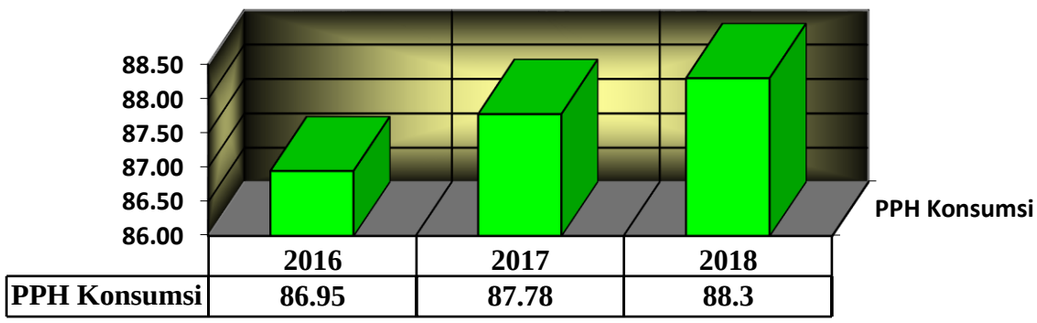

Sumber Data : Dinas Pangan dan Pertanian

Mutu konsumsi pangan penduduk dapat dilihat dari Skor PPH Konsumsi. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin berimbang dan seimbang Pangan yang dikonsumsi secara beragam dalam jumlah cukup dan seimbang akan mampu memenuhi kebutuhan zat gizi. Capaian Skor PPH Konsumsi pada tahun 2018 sebesar 88,3 , apabila dibandingkan dengan tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 0,52.

Sedang PPH Konsumsi Kab. Sidoarjo tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel III.Berikut :

Tabel III.B.15

Skor PPH Konsumsi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018

No.	Kelompok Pangan	Skor AKE	Skor Maksimal	Gap Skor AKE dan Skor Maksimal	Skor PPH
1	Padi – Padian	23,3	25	-1,7	23,3
2	Umbi – Umbian	1,3	2,5	-1,2	1,3
3	Pangan Hewani	30,6	24	6,6	24
4	Minyak dan Lemak	6,3	5	1,3	5
5	Buah/Biji Berminyak	1,8	1	0,8	1
6	Kacang - Kacangan	6,6	10	-3,4	6,6
7	Gula	1,6	2,5	-0,9	1,6
8	Sayur dan Buah	25,4	30	-4,6	25,4
	Jumlah Skor PPH	97	100		88,3

Sumber Data : Dinas Pangan dan Pertanian

Perkembangan pola pangan harapan diupayakan selalu meningkat dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

a. Mengembangkan rumah pangan lestari dengan menitikberatkan pada budidaya sayuran dan buah.
b. Pengaturan kestabilan dan kesinambungan penyediaan pangan yang berasal dari produksi kabupaten, cadangan pangan dalam maupun luar kabupaten
c. Internalisasi konsumsi B2SA untuk meningkatkan kesadaran konsumsi bahan lokal melalui advokasi, kampanye, promosi dan sosialisasi serta jalur pendidikan formal maupun informal

c. SKPD Penyelenggara Urusan

Urusan Pangan ini dilaksanakan oleh SKPD yaitu Dinas Pangan dan Pertanian.

d. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di urusan Pangan Kabupaten Sidoarjo berjumlah 66 orang. Secara rinci SDM penyelenggara urusan Pangan menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaiamana terlampir.

Sedangkan untuk jabatan fungsional terdapat pranata komputer dan penyuluh pertanian.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran (per program)

Secara rinci anggaran dan realisasi masing masing program sebagaimana terlampir.

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Peningkatan Ketahanan pangan daerah	Rp 1,365,795,000.00	Rp 1,321,260,045.00	96.74%

f. Proses Perencanaan

Proses Perencanaan urusan Pangan dilaksanakan dengan identifikasi dan inventarisasi potensi yang diawali dari rapat kerja dinas dan jajaran kecamatan, musrenbang desa, serta musrenbang kecamatan, sebagai bahan penyusunan Renja SKPD. Dalam pelaksanaan urusan Pangan melibatkan berbagai pemangku

kepentingan antara lain instansi terkait, Kadinda, dan Lembaga pengabdian masyarakat perguruan tinggi.

g. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan pangan di Dinas Pangan dan Pertanian adalah sebagaimana terlampir.

10. Urusan Pertanahan

a. Program

Program pembangunan yang dilaksanakan untuk urusan pertanahan pada tahun 2018 adalah Program Fasilitasi Permasalahan Pertanahan dan Pengadaan tanah

b. Realisasi Pelaksanaan Program serta Permasalahan dan Solusi

Hasil pelaksanaan program tersebut dapat ditunjukkan pada pencapaian kinerja penyelesaian pengadaan tanah yang terfasilitasi dan penyelesaian permasalahaan pertanahan.

c. Pelaksanaan SPM

Untuk urusan Pertanahan tidak ada SPM yang harus dilaksanakan.

d. SKPD Penyelenggara Urusan

Urusan Pertanahan dilaksanakan oleh SKPD yaitu Dinas Perumahan dan Permukiman

e. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di urusan Pertanahan Kabupaten Sidoarjo berjumlah 5 orang. Secara rinci SDM penyelenggara urusan Pertanahan menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaiamana terlampir. Tidak tersedia jabatan fungsional pada urusan pertanahan.

f. Alokasi dan Realisasi Anggaran (per program)

Secara rinci anggaran dan realisasi masing masing program sebagaimana terlampir.

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Fasilitasi Permasalahan Pertanahan dan Pengadaan tanah	Rp 64,498,360,000.00	Rp 52,312,292,603.00	81.11%

g. Proses Perencanaan

Proses perencanaan urusan pertanahan dilaksanakan secara partisipatif, diawali dengan rapat kerja dinas dan jajaran kecamatan, musrenbang desa, serta musrenbang kecamatan, sebagai bahan penyusunan Renja SKPD. Penyusunan renja SKPD diawali dengan evaluasi dan masukan kebutuhan dari desa dan kecamatan untuk melayani masukan.

h. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan pertanahan sebagaimana terlampir.

11. Urusan Lingkungan Hidup

a. Program

Program pembangunan untuk urusan lingkungan hidup yang dilaksanakan pada tahun 2018 adalah :

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
2. Program Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
3. Program Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran
4. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) dan penerangan jalan dan lingkungan

b. Realisasi Pelaksanaan Program serta Permasalahan dan Solusi

Seluruh Program urusan Lingkungan Hidup telah dilaksanakan, dan hasilnya dapat terlihat dengan pencapaian :

1. Indeks Kualitas Air

Indeks Kualitas Air merupakan hasil dari penjumlahan nilai status mutu air. Jumlah pemantauan kualitas air dilakukan sebanyak 49 pemantauan. Pemantauan kualitas air dilakukan di 3 sungai antara lain Saluran Buntung, Saluran Kedunguling dan Saluran Pucang. Pemantauan dilakukan masing-masing Saluran / kali terdapat 3 lokasi dengan intensitas 2 kali pemantauan

di Semester 1 dan 2. Target yang ditetapkan di tahun 2018 dalam RPJMD sebesar 51,29 Sedangkan realisasi tahun 2018 sebesar 49,59 sehingga capaian kinerja di Tahun 2018 sebesar 96,69 %. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar 49,77 maka realisasi di Tahun 2018 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh :

a. Posisi Kabupaten Sidoarjo yang berada di hilir Sungai Brantas akan menambah kontribusi pencemaran yang signifikan karena pencemaran air badan air sudah terjadi mulai dari hulu;
b. Adanya peningkatan jumlah penduduk dimana Kabupaten Sidoarjo merupakan wilayah yang strategis sebagai penyanggah Ibukota Provinsi Jawa Timur dan semakin diperparah oleh aktivitas sumber pencemar yang beragam di sepanjang sungai;
c. Adanya sumber pencemar yang tidak menentu dan tidak dapat diprediksi (*non-point sources*), misal: kegiatan rumah tangga atau permukiman yang tidak dilengkapi dengan IPAL Komunal, kegiatan pertanian dan peternakan;
d. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pembuangan sampah di sungai.

Nilai Indeks Kualitas Air didapatkan dari hasil sebagai berikut :

Status	Jumlah	Persen	Koefisien	Nilai
Memenuhi	0	0%	70	0,00
Ringan	48	98%	50	48,98
Sedang	1	2%	30	0,61
Berat	0	0%	10	0,00
Jumlah Pemantauan	49			
Nilai Indeks Kualitas Air				**49,59**

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Perkembangan Nilai Indeks Kualitas Air Tahun 2017-2018 dapat dilihat dalam Tabel III.Berikut ini :

URAIAN	TAHUN	
	2017	2018
Nilai Status Memenuhi	4,07	0,00
Nilai Status Ringan	43,60	48,98
Nilai Status Sedang	2,10	0,61
Nilai Status Berat	0,00	0,00
Nilai Indeks Kualitas Air	**49,77**	**49,59**

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas air, antara lain :

a. Penetapan konsep partisipasi masyarakat dalam kebijakan pengendalian pencemaran air;
b. Menyusun sistem informasi yang lengkap terkait kondisi kualitas sungai dalam mendukung kebijakan pengendalian pencemaran air dan dapat diakses oleh setiap orang;
c. Meningkatkan sarana dan prasarana pemantauan kualitas air;
d. Meningkatkan pembinaan/pelatihan pengolahan air limbah kepada masyarakat;
e. Meningkatkan pengelolaan limbah dengan pembuatan/pembangunan IPAL komunal;
f. Meningkatkan pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam pengolahan limbah;
g. Menetapkan kriteria baku terkait spesifikasi teknis metode peletakkan saluran outlet yang mengarah ke badan air sungai;
h. Melakukan pengolahan sampah berbasis “Zero Waste”;
i. Melakukan pengolahan sampah secara terpadu dan pengolahan sampah secara 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*) atau tuntas di tempat;
j. Penataan kawasan permukiman kumuh di sepanjang Sungai;
k. Melakukan normalisasi sungai;
l. Pembuatan taman di sempadan sungai;
m. Meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan industri dan kegiatan/usaha lainnya dalam pengendalian pencemaran air;
n. Melakukan kegiatan Patroli Air;

o. Melakukan kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar Air yang ditindaklanjuti dengan kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup bagi ekosistem air sungai;
p. Meningkatkan kesadaran pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam memenuhi Izin pembuangan Air Limbah;
q. Menutup dan melarang pembuatan saluran drainase/ outlet yang langsung dari sumber limbah (tanpa pengolahan) menuju badan air;
r. Penanganan perlakuan industri dan usaha/kegiatan lainnya terhadap perlakuan buangannya, yaitu dengan mengubah proses, mengelola limbah atau menambah alat bantu yang dapat mengurangi pencemaran;
s. Penegakan hukum terhadap pengendalian pencemaran air sesuai peraturan yang berlaku;
t. Mengangkat eceng gondok secara langsung dari badan air;
u. Memanfaatkan eceng gondok sebagai bahan pembuatan kertas, kompos, biogas, perabotan, kerajinan tangan, dan sebagainya;
v. Menggalakkan aksi bersih-bersih sungai yang melibatkan seluruh stakeholder termasuk masyarakat.

2. Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara merupakan hasil rerata IEU SO_2 dan IEU NO_2 yang selanjutnya dikonversi melalui persamaan Indeks Kualitas Udara. Indeks Kualitas Udara diperoleh dari data passive sampler di 4 Kawasan yaitu Transportasi, Industri / Agro Industri, Pemukiman dan Perkantoran / Komersial dilakukan sebanyak 2 kali pemantauan di Semester 1 dan 2. Target yang ditetapkan di tahun 2018 dalam RPJMD sebesar 85,79 Sedangkan realisasi tahun 2018 sebesar 85,04 sehingga capaian kinerja di Tahun 2018 sebesar 99,13 %. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar 82,05 maka realisasi di Tahun 2018 mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh :

a. Pelaku usaha dan/atau kegiatan di Kabupaten Sidoarjo semakin peduli terhadap pengendalian pencemaran udara;
b. Pelaku usaha dan/atau kegiatan di Kabupaten Sidoarjo semakin peduli terhadap penggunaan energi yang dulunya menggunakan bahan bakar minyak beralih menjadi bahan bakar gas;

c. Masyarakat semakin peduli dalam penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor yang ramah lingkungan;
d. Pengguna kendaraan bermotor semakin peduli dalam melakukan perawatan terhadap kendaraannya.

Nilai Indeks Kualitas Udara didapatkan dari hasil sebagai berikut :

Parameter	Rerata	EU	IEU
NO_2	12,30	40,00	0,31
SO_2	8,62	20,00	0,43
Rata-Rata			0,37
Indeks Kualitas Udara = 100-((50/0,9)*(Rata-rata-0,1))			**85,04**

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Perkembangan Nilai Indeks Kualitas Udara Tahun 2017-2018 dapat dilihat dalam Tabel III.Berikut ini :

URAIAN	TAHUN	
	2017	2018
IEU NO_2	0,39	0,31
IEU SO_2	0,45	0,43
Rata-Rata	0,42	0,37
Nilai Indeks Kualitas Udara	**82,05**	**85,04**

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas air, antara lain :

a. Menyusun sistem informasi yang lengkap terkait kondisi kualitas udara ambien dalam mendukung kebijakan pengendalian pencemaran udara dan dapat diakses oleh setiap orang;
b. Meningkatkan sarana dan prasarana pemantauan kualitas udara;
c. Melakukan monitoring kualitas udara ambien berkala;
d. Meningkatkan pembinaan/pelatihan pengendalian pencemaran udara kepada masyarakat, seperti: Sosialisasi Adaptasi Perubahan Iklim;
e. Memperbanyak lokasi Car Free Day;
f. Melakukan kegiatan pengujian emisi kendaraan bermotor secara berkala;
g. Melakukan kegiatan penghijauan dan reboisasi;

h. Meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan industri dan kegiatan/usaha lainnya dalam pengendalian pencemaran udara;
i. Penanganan perlakuan industri dan usaha/kegiatan lainnya terhadap perlakuan emisi cerobongnya, yaitu dengan memasang penyaring udara pada cerobong asap;
j. Penegakan hukum terhadap pengendalian pencemaran udara sesuai peraturan yang berlaku;
k. Menetapkan kawasan industri yang jauh dari kawasan permukiman warga;
l. Mengurangi pemakaian bahan bakar dari fosil (minyak bumi dan batu bara) pada industri dan pembangkit listrik;
m. Menggalakkan pemanfaatan energi yang lebih ramah lingkungan.

3. Indeks Tutupan Lahan / Vegetasi

Indeks Kualitas Tutupan Lahan / Vegetasi merupakan hasil pembagian luas tutupan lahan di Sidoarjo dan luas Wilayah Kabupaten Sidoarjo yang selanjutnya dikonversi melalui persamaan Indeks Kualitas Tutupan Lahan / Vegetasi. Target yang ditetapkan di tahun 2018 dalam RPJMD sebesar 24,72 Sedangkan realisasi tahun 2018 sebesar 36,77 sehingga capaian kinerja di Tahun 2018 sebesar 148,75 %. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar 23,11 maka realisasi di Tahun 2018 mengalami peningkatan. Capaian ini menunjukkan bahwa cakupan ruang terbuka hijau di Kabupaten Sidoarjo sudah memenuhi kriteria cukup.

Hal ini disebabkan oleh telah dilaksanakannya Kegiatan Inventarisasi Tutupan Vegetasi Tahun 2018 sehingga luas tutupan lahan/ vegetasi pada tahun 2018 dapat teriventarisasi dengan baik dan secara menyeluruh di Kabupaten Sidoarjo. Namun demikian kedepannya masih akan dilakukan peningkatan luas tutupan vegetasi melalui penambahan Ruang Terbuka Hijau.

Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan / Vegetasi Tahun 2018 diperoleh sebagai berikut :

Uraian	Nilai
Jumlah Penduduk	2.216.799
Luas Wilayah (km^2)	714,243
Luas Tutupan Vegetasi (km^2)	111,62
Vegetasi / Luas Wilayah	15,63 %
Indeks Kualitas Tutupan Lahan / Vegetasi = 100-((84,3-((Vegetasi/Luas Wilayah)*100))*(50/54,3))	**36,77**

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Perkembangan Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan / Vegetasi Tahun 2017-2018 dapat dilihat dalam Tabel III.Berikut ini :

Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018
Jumlah Penduduk	2.214.377	2.216.799
Luas Wilayah (km^2)	714,243	714,243
Luas Tutupan Vegetasi (km^2)	5,69	111,62
Vegetasi / Luas Wilayah	0,80 %	15,63 %
Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan / Vegetasi	**23,11**	**36,77**

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas air, antara lain :

a. Melakukan inventarisasi tutupan lahan/ vegetasi secara periodik;
b. Meningkatkan pengawasan atau monitoring bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di lokasi kegiatan sesuai Dokumen Lingkungan dan Siteplan yang telah ditetapkan;
c. Monitoring dan evaluasi kualitas tanah;
d. Penekanan laju lahan kritis;
e. Melakukan penghijauan dan reboisasi;
f. Meningkatkan penanaman mangrove di kawasan pesisir;
g. Meningkatkan pengetahuan dan partisipasi masyarakat tentang upaya penghijauan, seperti: melalui kegiatan pelatihan hidroponik, adiwiyata sekolah, desa berseri, Sidoarjo Bersih dan Hijau (SBH), dan lain-lain

Untuk mendukung keberhasilan peningkatan kualitas lingkungan hidup, didukung oleh indikator – indikator kinerja sebagai berikut :

- **Persentase titik pantau air sungai yang memenuhi BOD sesuai baku mutu air**

  Persentase titik pantau air sungai yang memenuhi BOD sesuai baku mutu air diperoleh dari Jumlah sample dengan BOD sesuai baku mutu air dibagi Jumlah sample Air Badan Air yang ada kemudian dikalikan 100 %. Jumlah pengujian kualitas air badan air sebanyak 110 (Seratus Sepuluh) pengujian. **Target yang ditetapkan di tahun 2018 dalam RPJMD sebesar 25 %** Sedangkan realisasi tahun 2018 sebesar 28,18 % sehingga capaian kinerja di Tahun 2018 sebesar 112,72 %. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar 25,58 % maka realisasi di Tahun 2018 mengalami peningkatan. Persentase titik pantau air sungai yang memenuhi BOD sesuai baku mutu air Tahun 2018 diperoleh sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Jumlah sample dengan BOD memenuhi	31 sample
Jumlah sample yang ada	110 sample
Persentase titik pantau air sungai yang memenuhi BOD sesuai baku mutu air (%)	**28,18**

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Perkembangan persentase titik pantau air sungai yang memenuhi BOD sesuai baku mutu air Tahun 2017-2018 dapat dilihat dalam Tabel III.Berikut ini :

Uraian	Jumlah	
	Tahun 2017	Tahun 2018
Jumlah sample dengan BOD memenuhi (sample)	22	31
Jumlah sample yang ada (sample)	86	110
Persentase titik pantau air sungai yang memenuhi BOD sesuai baku mutu air (%)	25,58	28,18

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Upaya - upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan kualitas air badan air antara lain :

a. Melakukan pemantauan air badan air secara periodik;
b. Melakukan Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar Air;
c. Melakukan penerbitan Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL);
d. Melakukan monitoring IPAL Komunal;
e. Melakukan kegiatan Sosialisasi bagi masyarakat di sepanjang sungai;
f. Melakukan kegiatan Sosialisasi bagi pelaku usaha yang berpotensi menghasilkan air limbah;
g. Melakukan Bintek Pengelolaan Limbah Industri dan Kegiatan Lainnya;
h. Melakukan kegiatan pengawasan langsung atau SKPL dalam upaya pengendalian pencemaran air;
i. Menindaklanjuti pengaduan lingkungan terkait pencemaran air;
j. Melakukan pengelolaan sampah secara terpadu utamanya tumpukan sampah di pinggiran sungai;
k. Pembangunan taman di sempadan sungai;
l. Menyediakan TPS di setiap wilayah untuk mengurangi pembuangan sampah ke badan air.

- **Persentase titik pantau udara ambien yang memenuhi SO_2 dan NO_2 sesuai Baku Mutu Udara**

  Persentase titik pantau udara ambien yang memenuhi SO_2 dan NO_2 sesuai Baku Mutu Udara diperoleh dari Jumlah sample dengan parameter SO_2 dan NO_2 sesuai baku mutu udara ambien dibagi Jumlah sample udara ambien yang ada dikalikan 100 %. Pemantauan kualitas mutu udara ambien tahun 2018 untuk wilayah Kabupaten Sidoarjo dilakukan di 46 (Empat Puluh Enam) titik lokasi. Pemantauan dilakukan sebanyak 2 (Dua) periode yaitu Semester 1 dan Semester 2. Pemantauan kualitas baku mutu udara ambien di titik lokasi sampling diuji terhadap 2 (Dua) parameter yaitu SO_2 dan NO_2. **Target yang ditetapkan di tahun 2018 dalam RPJMD sebesar 100 %** sedangkan realisasi tahun 2018 sebesar 100 % sehingga capaian kinerja di Tahun 2018 sebesar 100 %. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar 100 % maka realisasi di Tahun 2018 dapat mempertahankan

realisasi dari tahun sebelumnya. Nilai Persentase titik pantau udara ambien yang memenuhi SO_2 dan NO_2 sesuai Baku Mutu Udara Tahun 2018 diperoleh sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Jumlah sample dengan SO_2 dan NO_2 memenuhi (sample)	190
Jumlah sample yang ada (sample)	190
Persentase titik pantau udara ambien yang memenuhi SO_2 dan NO_2 sesuai Baku Mutu Udara (%)	**100**

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Perkembangan persentase titik pantau udara ambien yang memenuhi SO_2 dan NO_2 sesuai Baku Mutu Udara Tahun 2017-2018 dapat dilihat dalam Tabel III.Berikut ini :

Uraian	Jumlah	
	Tahun 2017	Tahun 2018
Jumlah sample dengan SO_2 dan NO_2 memenuhi (sample)	144	190
Jumlah sample yang ada (sample)	144	190
Persentase titik pantau udara ambien yang memenuhi SO_2 dan NO_2 sesuai Baku Mutu Udara (%)	100	100

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Upaya - upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan kualitas udara ambien antara lain :

(1) Melakukan kegiatan Sosialisasi Adaptasi Perubahan iklim;
(2) Melakukan penghijauan pada median dan pinggir jalan, utamanya tanaman penyerap polutan;
(3) Melakukan kegiatan pengawasan langsung atau SKPL dalam upaya pengendalian pencemaran udara;
(4) Melakukan kegiatan pengujian Emisi Kendaraan Bermotor Roda Empat secara berkala;
(5) Car Free Day;
(6) Monitoring kualitas udara ambien;
(7) Menggalakkan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau minimal 10% dari luas lahan utamanya

penyediaan tanaman penyerap polutan termasuk kebisingan yang tertuang dalam Dokumen Lingkungan;

(8) Melakukan pendampingan kegiatan Desa Berseri dan Program kampung Iklim (Proklim).

- **Penanganan sampah yang terkelola menjadi bernilai guna**

Indikator ini menggambarkan jumlah sampah yang berhasil dikelola Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menjadi bernilai guna. Dengan semakin banyaknya jumlah sampah yang terkelola maka dapat menghemat sumber daya alam, menghemat lahan tempat pembuangan akhir dan menambah nilai ekonomis suatu barang.

Penanganan sampah tersebut difasilitasi dengan adanya sarana prasarana yang mendukung seperti adanya Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) yang dibangun melalui APBD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Pada Tahun 2018, telah terbangun 88 (Delapan Puluh Delapan) TPST yang tersebar di 18 (Delapan Belas) Kecamatan, antara lain :

Tabel III.B.16

TPST Kawasan

No.	Kecamatan	Jumlah TPST	Jumlah Lokasi (Desa / Kelurahan) yang memiliki TPST
1	SIDOARJO	9	9
2	BUDURAN	6	6
3	CANDI	3	3
4	PORONG	2	2
5	KREMBUNG	2	2
6	TULANGAN	8	8
7	TANGGULANGIN	5	5
8	JABON	3	3
9	KRIAN	8	7
10	BALONGBENDO	6	6

No.	Kecamatan	Jumlah TPST	Jumlah Lokasi (Desa / Kelurahan) yang memiliki TPST
11	WONOAYU	4	4
12	PRAMBON	4	4
13	TAMAN	3	2
14	SUKODONO	5	4
15	GEDANGAN	9	8
16	WARU	4	4
17	SEDATI	7	7
	JUMLAH	**88 TPST**	**84 Lokasi**

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Target yang ditetapkan di tahun 2018 dalam RPJMD sebesar 9 % sedangkan realisasi tahun 2018 sebesar 27 % sehingga capaian kinerja di Tahun 2018 sebesar 300 %. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar 25 % maka realisasi di Tahun 2018 dapat meningkatkan realisasi dari tahun sebelumnya. Perkembangan persentase sampah yang terkelola menjadi bernilai guna Tahun 2016-2018 dapat dilihat dalam Tabel III.Berikut ini :

URAIAN	SATUAN	TAHUN		
		2016	2017	2018
Jumlah sampah yang terkelola menjadi bernilai guna	ton / hari	256	278	300
Jumlah timbulan sampah	ton / hari	1081	1104	1119
Persentase sampah yang terkelola menjadi bernilai guna	%	24	25	27

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Upaya yang dilakukan untuk pengelolaan sampah terkelola menjadi bernilai guna, antara lain :

1. Pengolahan Sampah Organik

   Yaitu pengolahan sampah rumah tangga yang berupa sampah organik atau sampah mudah busuk menjadi pupuk organik/kompos, sampah tersebut berasal dari sisa sampah dapur, dedaunan, tanaman hias, dan sebagainya yang dapat diproses menjadi pupuk organik atau kompos. Sarana pemrosesan kompos tersebut dengan menggunakan komposter dan takakura untuk pemrosesan kompos pada tingkat rumah tangga, windrus airrop digunakan untuk pemrosesan kompos pada TPS 3R atau TPST. Kompos hasil pengolahan sampah organik tersebut sebaiknya digunakan sebagai pemupukan tanaman di masing-masing rumah sehingga penghijauan dapat diwujudkan sesuai dengan harapan, jika pada masing-masing rumah kebutuhan kompos sudah tercukupi maka kompos hasil pengolahan sampah tersebut dapat dikemas menjadi produk unggulan rumah tangga yang siap dipasarkan.

2. Bank sampah

   Merupakan suatu sistem pengelolaan sampah kering secara kolektif yang mendorong masyarakat untuk berperan aktif didalamnya. Sistem ini akan menampung, memilah, dan menyalurkan sampah kering bernilai ekonomi pada pasar sehingga masyarakat mendapatkan keuntungan ekonomi dari menabung sampah. Selain itu bank sampah merupakan tempat yang efektif untuk melakukan edukasi lingkungan kepada masyarakat sekitar untuk memanfaatkan sampah kering yang ada menjadi kreasi inovatif kerajinan rumahan yang bernilai guna untuk dimanfaatkan kembali di masyarakat.

3. Makanan Ternak

   Banyak sisa kegiatan rumah tangga atau kegiatan pabrik yang bisa dijadikan makanan ternak. Sebagai contoh, sayur-mayur sisa di dapur, bisa dijadikan makanan sapi, kambing atau binatang ternak lainnya. Nasi yang basi bisa dicampur dengan dedak untuk makanan ayam. Kulit singkong, kulit pisang dan sejenisnya bisa juga dijadikan makanan

ternak. Di beberapa peternakan, ampas tahu dijadikan makanan domba, sehingga domba tumbuh dengan gemuk.

4. Pembuatan Gas Metan (CH_4)

   Dibalik sampah terdapat suatu kandungan yang mampu dimanfaatkan. Penelitian telah membuktikan bahwa dalam sampah terkandung gas yang sangat potensial bagi kehidupan, yaitu gas methan. Cara yang dilakukan ialah dengan menimbun sampah di dalam lapisan tanah kemudian diberi saluran pipa instalasi gas methan. Dan hasil gas tersebut disalurkan ke pemukiman warga untuk listrik dan bahan bakar kompor. Ini merupakan terobosan baru yang sangat menginspirasi kita.

5. Mengubah sampah anorganik menjadi produk kerajinan tangan

   Sampah anorganik berbahan dasar plastik dan kertas dapat diolah lebih lanjut menjadi produk kerajinan tangan yang unik dan menghasilkan. Contohnya adalah bros, tas plastik, dompet, hiasan ruangan dan lain sebagainya. Agar kualitas sampah plastik dan kertas yang digunakan sebagai bahan kerajinan ini tidak rusak, maka pisahkan sampah organik dan anorganik sejak awal supaya sampah plastik dan kertas tersebut tidak terkontaminasi sampah yang lain.

- **Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)**

  Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang mempunyai manfaat Ruang terbuka adalah ruang yang bisa diakses oleh masyarakat baik secara langsung dalam kurun waktu terbatas maupun secara tidak langsung dalam kurun waktu tidak tertentu. Ruang terbuka itu sendiri bisa berbentuk jalan, trotoar, ruang terbuka hijau seperti taman kota, hutan dan sebagainya. Ketersediaan RTH di Kabupaten Sidoarjo berpedoman pada Rencana luasan RTH dalam Masterplan yaitu sebesar 2510,88 Hektar. **Target yang ditetapkan di tahun 2018 dalam RPJMD sebesar 1,67 % (42 Hektar)** sedangkan realisasi tahun 2018 sebesar 1,66 % (41,58 Hektar) sehingga capaian kinerja di Tahun 2018 sebesar 99,4 %. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar 1,66 % maka realisasi di Tahun 2018 tetap (tidak mengalami peningkatan maupun penurunan). Realisasi Luas Wilayah RTH tersebut merupakan RTH yang masuk Inventarisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo.

Upaya dan Inovasi yang dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau yaitu :

1. Pembangunan RTH (taman interaktif, taman kota, pemakaman, hutan kota, lapangan olah raga) baru. Pemerintah dapat membeli/membebaskan lahan terutama di permukiman padat untuk dibangun menjadi taman.
2. Bekerja sama menghijaukan sempadan sungai dan situ/waduk/danau (dinas pekerjaan umum dan Jasa Tirta), sempadan rel kereta api (PT KAI), Sutet (PLN), Kolong jalan layang (Jasa Marga) yang dikembangkan sebagai taman penghubung RTH kota.
3. Mendorong masyarakat terlibat dalam pembangunan taman kota.
4. Untuk jalur hijau yang ada di jalan-jalan keberadaannya perlu dimanfaatkan secara maksimal, seperti dengan penanaman bunga, pepohonan, lampu hias, dan lain-lain yang mempunyai nilai seni dan estetika
5. Untuk kawasan konservasi pada bantaran sungai, dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau secara maksimal, yang berfungsi penahan erosi, resapan air, dan taman kota / hutan kota
6. Perlu adanya pengembangan kawasan-kawasan yang merupakan daerah aliran air (tangkapan air), terutama di musim hujan dengan menjadikan kawasan sekitar mata air perusahaan daerah air minum sebagai daerah resapan air sekaligus taman/hutan kota;
7. Lapangan olah raga direncanakan penyebarannya ke tiap subpusat kota / kecamatan, selain mempertahankan yang sudah ada dan dihindari untuk peralihan fungsi sebagai kawasan terbangun, dan hanya difungsikan untuk ruang terbuka hijau, baik berupa taman, tempat olah raga, maupun sebagai daerah resapan air;
8. Dibuatnya kawasan penyangga (buffer zone) antara kawasan industri dengan kawasan permukiman
9. Pengembangan hutan kota pada tiap subpusat kota.

Rekapitulasi Luasan RTH Publik yang Dikelola sampai dengan tahun 2018 :

Tabel III.B.17

Luas Ruang Terbuka Hijau

No	Jenis RTH	Luas RTH
		m^2
1	Taman Aktif	135.537,94
2	Taman Pasif	22.922,77
3	Median Jalan	50.469,20
4	Bahu Jalan	10.874,00
5	Pedestrian	42.710,72
Jumlah		262.514,63
Luasan RTH dalam Ha		**26,25**

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Sedangkan taman kota yang telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Sidoarjo, diantaranya :

Tabel III.B.18

Luas Ruang Terbuka Hijau

No	Taman	Lokasi	Keterangan
1	Taman Tanjung Puri	Desa Bluru Kidul, Kec. Sidoarjo	Bekas tempat pembuangan akhir (TPA)
2	Taman Abirama	Perum. Pondok Jati, Kec. Sidoarjo	Fasum Perum. Pondok Jati
3	Taman Apkasi	Jl. Raya Porong Kec. Porong	Bekas Pasar Porong
4	Taman Dwarakerta	Jl. Raya Porong Kec. Porong	Bekas Kawedanan Porong
5	Taman Abirupa	Tambak kemerakan, Kec. Krian	Bekas Pasar Sapi
6	Taman RTH Abisatya	Depan Kantor Kelurahan Taman, Kec. Taman	Ex. Tanah TKD Kelurahan Taman
7	Taman RTH Makam Mbah Djaelani	Desa Kajeksan, Kec. Tulangan	Tanah TKD Kelurahan Jatirejo, Kec. Porong
8	Taman Jinan	Kecamatan Sedati	Median Jl. Djuanda
9	Taman Mangundiprojo	Kecamatan Buduran	Sempadan Fly Over Buduran
10	Taman Monumen Perjuangan	Kecamatan Gedangan	Sempadan jalan dan Rel KA

No	Taman	Lokasi	Keterangan
11	Taman RTH Kec. Wonoayu	Desa Mulyo Dadi, Kec. Wonoayu	Kebun Bibit
12	Taman ASEAN	Kelurahan Pagerwojo, Kec. Buduran	Tanah DPRD Kab Sidoarjo
13	Taman RTH Gading Fajar	Desa Sepande, Kec. Candi	Sempadan Sutet
14	Taman Asa	Desa Siwalanpandji, Kec. Buduran	Sempadan Rel KA
15	Taman 90	Kelurahan Pucang Kec. Sidoarjo	Depan SMAN 1 Sidoarjo
16	Taman Kali Kemambang	Raya Jenggolo	Depan MAN Sidoarjo
17	Taman Perahu	Jalan Raya Pucang	Sempadan Kali Pucang
18	Taman Jati Kepuh	Raya Mojopahit	Depan Kantor BKD Sidoarjo
19	Taman Dermaga	Raya Pagerwojo	Sempadan Kali Pagerwojo
20	Fasum Pondok Jati Sisi Timur	Raya Pagerwojo	

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Untuk mendukung keindahan dan dekorasi kota, dipenuhi pula ketersediaan penerangan jalan dan lingkungan, dengan jumlah titik Penerangan Jalan Umum (PJU) 33.458 titik dimana 82,5 % dalam kondisi layak fungsi dan 82,5 % jalan Kabupaten yang telah mendapatkan PJU kondisi layak fungsi tersebut.

c. SKPD Penyelenggara Urusan

Urusan lingkungan hidup dilaksanakan oleh OPD yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

d. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo berjumlah 311 orang. Secara rinci SDM penyelenggara urusan Lingkungan Hidup menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir.

Untuk jabatan fungsional terisi pranata komputer.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran (per program)

Secara rinci anggaran dan realisasi masing masing program sebagaimana terlampir.

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Rp 80,489,455,000.00	Rp 51,404,665,136.00	63.87%
2	Program Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Rp 2,808,033,440.00	Rp 1,822,053,469.00	64.89%
3	Program Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran	Rp 1,524,337,600.00	Rp 1,449,399,869.00	95.08%
4	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) dan penerangan jalan dan lingkungan	Rp 113,295,195,600.00	Rp 102,568,567,217.00	90.53%

f. Proses Perencanaan

Proses Perencanaan urusan Lingkungan Hidup diawali dengan evaluasi dan masukan kebutuhan dari desa dan kecamatan untuk melayani administrasi kependudukan dan dilaksanakan melalui rapat kerja dinas dan jajaran kecamatan, musrenbang desa, serta musrenbang kecamatan, sebagai bahan penyusunan Renja SKPD.

g. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan adalah sebagaimana terlampir.

12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Program

Program pembangunan yang dilaksanakan untuk urusan ini pada tahun 2018 adalah :

1. Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk
3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
4. Program pelayanan pencatatan sipil

b. Realisasi Pelaksanaan Program serta Permasalahan dan Solusi

Seluruh Program urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah dilaksanakan, dan hasilnya dapat terlihat dengan pencapaian :

1. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap kualitas layanan administrasi kependudukan

Pada tahun 2018 juga telah dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengetahui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. IKM yang didapatkan setelah survei adalah sebesar 85,17 yang termasuk dalam mutu pelayanan kategori A dengan kategori kinerja yang baik Berikut grafik perkembangan capaian Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Grafik III.B.42

Nilai SKM Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

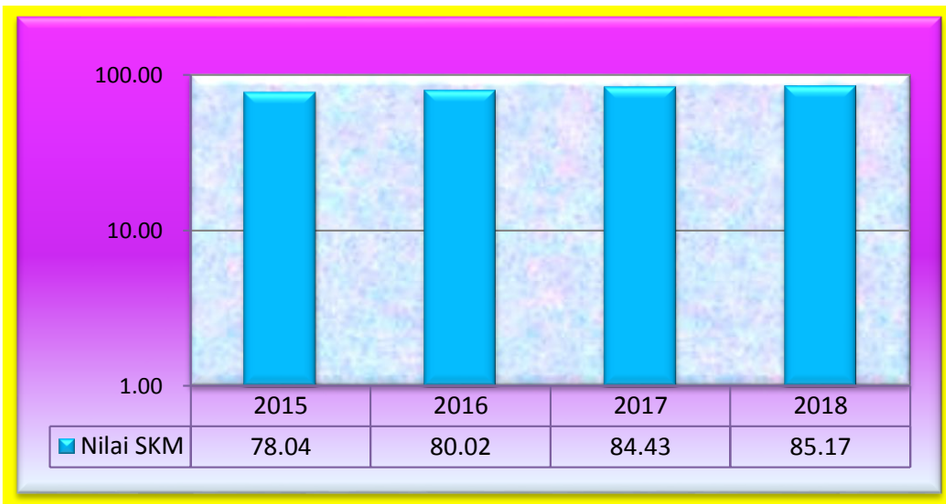

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo.

Dari grafik di atas dapat dilihat perkembangan nilai capaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dari tahun 2016 hingga tahun 2018 yang terus meningkat. Pada tahun 2016 capaian Nilai SKM sebesar 80.02 dan nilai tersebut meningkat di tahun selanjutnya, pada 2017 nilainya menjadi 84,43 dan di tahun 2018 mencapai 85.17.

Hasil tersebut dapat dicapai dengan melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan pelayanan, antara lain :

1. Pengurusan Akta Pencatatan Sipil tanpa dipungut biaya retribusi (gratis).
2. Frekuensi kegiatan penyuluhan/sosialisasi akta pencatatan sipil lebih ditingkatkan dan dilaksanakan secara berkesinambungan.
3. Tanggap terhadap keluhan dan pengaduan masyarakat.
4. Pelayanan Akta Kelahiran secara Jemput Bola (*One Day Service*) di Desa/Kelurahan, Kecamatan, Puskesmas, UPTD Cabang Dinas Pendidikan, Panti Asuhan, sekolah sekolah, dll.
5. Meminimalkan gangguan pada jaringan SIAK.
6. Melaksanakan Bimbingan Teknis para petugas Operator (Kecamatan dan Dispendukcapil), SIAK versi 7.
7. Pelayanan akta kematian,akta perkawinan dan akta perceraian sistem paket, artinya dalam satu proses pelayanan akta-akta tersebut diatas pemohon membawa pulang 3 (tiga) produk layanan, yaitu akta kematian/

perkawinan/perceraian, KK dan KTP-EL baru sesuai perubahan elemen data kependudukan yang baru.

8. Menerapkan inovasi-inovasi pelayanan, antara lain ALAMAK, e-tamat, salam 30 menit dll.

Capaian Indikator Kinerja tersebut diatas didukung dengan capaian Indikator Kinerja di tingkat SKPD/OPD (Renstra) dan ditingkat Program yaitu antara lain:

2. Kepemilikan KTP elektronik

Kepemilikan KTP bukan saja merupakan pemenuhan hak perorangan tetapi juga untuk keperluan tertib administrasi kependudukan.

Kartu Tanda Penduduk elektronik atau KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dibuat secara elektronik, dalam artian baik dari segi fisik maupun penggunaannya berfungsi secara komputerisasi. Program KTP-el diluncurkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Berikut grafik perkembangan kepemilikan KTP-el :

Grafik III.B.43

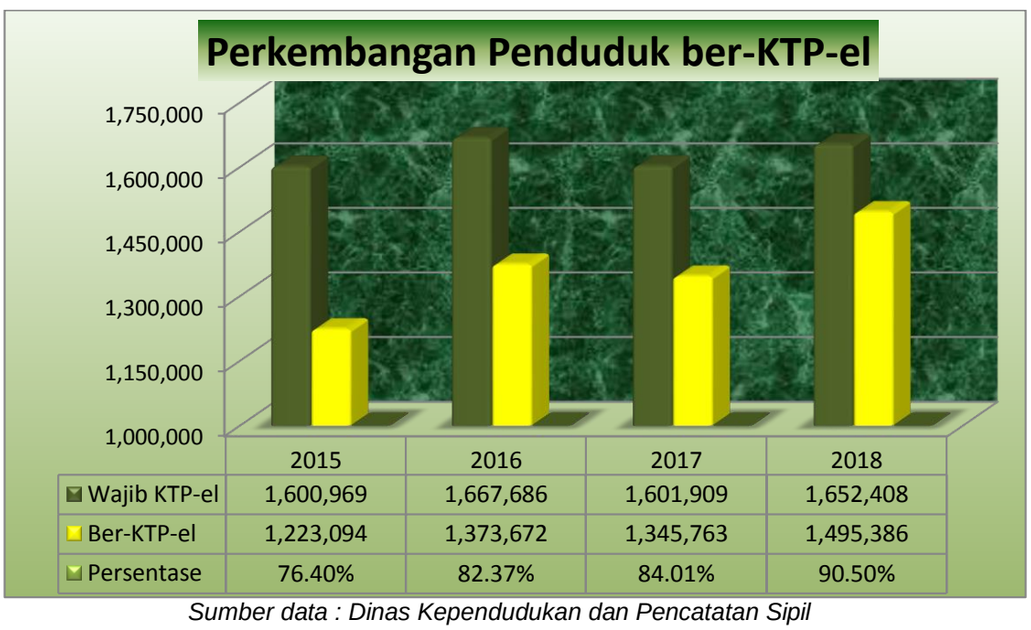

	2015	2016	2017	2018
Wajib KTP-el	1,600,969	1,667,686	1,601,909	1,652,408
Ber-KTP-el	1,223,094	1,373,672	1,345,763	1,495,386
Persentase	76.40%	82.37%	84.01%	90.50%

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dari grafik di atas dapat dilihat Jumlah penduduk wajib KTP-el pada tahun 2018 adalah 1.652.408 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang sudah memiliki KTP-el sampai dengan tahun 2018 sebanyak 1.495.385 jiwa atau sekitar 90,50% dari jumlah wajib KTP-el melampuai dari target yang ditetapkan sebesar 90%. Jumlah wajib KTP el pada tahun 2018 ada kenaikan sebesar

6,49 % dari tahun sebelumnya atau tepatnya sekitar 149,623 jiwa. Hal ini disebabkan berbagai faktor, antara lain adanya Perkembangan mobilitas penduduk yang cukup tinggi di Kabupaten Sidoarjo yang diakibatkan dari perkembangan infrastruktur yang baik, jaminan kesehatan dan pendidikan yang baik, dan lain- lain.

Sedangkan untuk capaian target kepemilikan e-KTP pada Tahun 2018 terjadi peningkatan sebesar 6,49 % dari tahun lalu (Tahun 2017 kepemilikan KTP-el 84,01%). Kenaikan tersebut disebabkan karena adanya program percepatan pencetakan KTP el, baik yang dilaksanakan di kantor Disdukcapil maupun di KecamatanKecamatan (Dukcapil juga melaksanakan program jemput bola jemput bola pelayanan rekam dan cetak di Kecamatan melalui pelayanan "***One Days Services***", Jemput Bola di Lapas-Lapas dan sekolah-sekolah untuk menjaring pemilik KTP-el Pemula

3. **Kepemilikan Kartu Keluarga**

Di samping kepemilikan KTP-el, masing-masing keluarga perlu memiliki Kartu Keluarga untuk mendukung data kependudukan terutama bagi anggota keluarga yang belum wajib ber-KTP-el. Perkembangan keluarga yang memiliki Kartu Keluarga seperti terlihat pada grafik berikut ini :

Grafik III.B.44

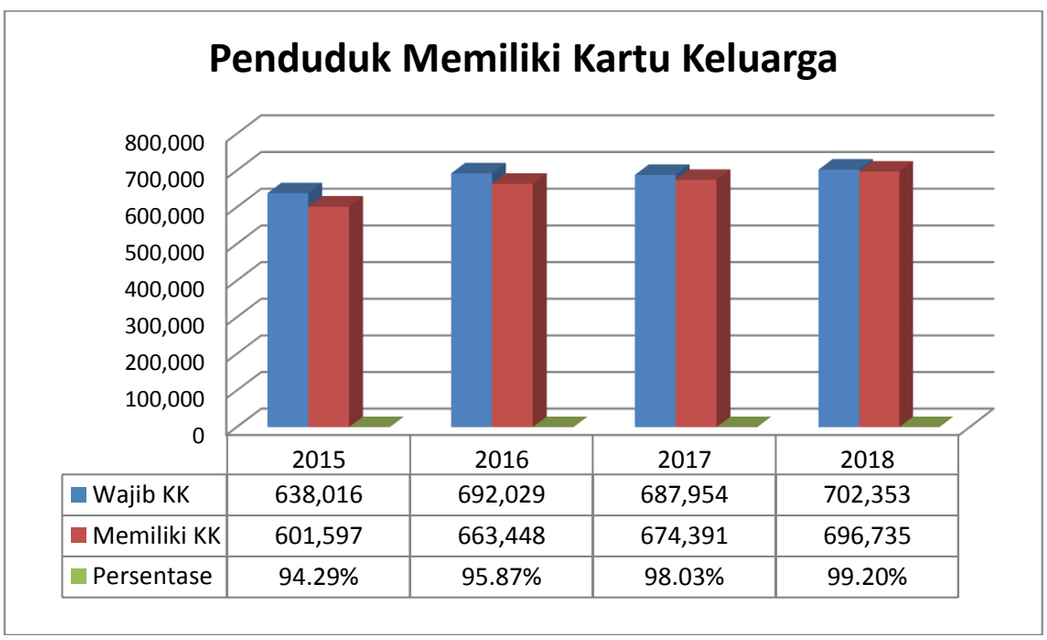

	2015	2016	2017	2018
Wajib KK	638,016	692,029	687,954	702,353
Memiliki KK	601,597	663,448	674,391	696,735
Persentase	94.29%	95.87%	98.03%	99.20%

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dari grafik di atas dapat dilihat jumlah wajib KK yang naik dari tahun sebelumnya sebanyak 2,09 % atau sejumlah 14,399 wajib KK. Kenaikan jumlah tersebut dapat disebabkan oleh faktor masyarakat sudah memiliki kesadaran yang cukup tinggi terhadap pentingnya Kartu Keluarga (KK) dan kemudahan dalam mengurus perubahan data KK. Sedangkan prosentase capaian penduduk yang memiliki KK tahun 2018 sebesar 99,20 % melampaui dari target yang ditetapkan sebesar 99% serta dibandingkan tahun 2017 yang sebesar 98,03 % ada peningkatan sebesar 3,31 %.

Peningkatan penduduk yang memiliki KK ini disebabkan adanya upaya sebagai berikut :

1. Kesadaran masyarakat yang tinggi akan pentingnya pembaruan Kartu Kaluarga (KK).
2. Terwujudnya efektifitas dan konsistensi sosialisasi di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang mendukung pelaksanaan program KK.
3. Dilakukannya bimbingan teknis bagi SDM Operator SIAK Kecamatan dan Dispendukcapil secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

4. Kepemilikan Akta Kelahiran

Untuk meregistrasi penduduk yang baru lahir maka perlu diterbitkan Akta kelahiran. Akta kelahiran ini dikeluarkan bagi seluruh penduduk di Kabupaten Sidoarjo.

Pada tahun 2018 jumlah penduduk di Kabupaten Sidoarjo mengalami kenaikkan sebesar 1,38 % atau sejumlah 30.469 orang yang disebabkan oleh faktor mutasi penduduk pindah masuk (adanya mobilitas penduduk). Pada Tahun 2017 jumlah penduduk 2,207,600 orang dan pada tahun 2018 jumlah penduduk 2.238.069 orang.

Sedangkan penduduk yang mengurus Akta kelahiran sesuai data yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo sebanyak 34.211 orang, sehingga sampai dengan tahun 2018 penduduk yang memiliki akta kelahiran sebanyak 942.763 orang atau 42,12 % dari jumlah penduduk, ada kenaikan jumlah penduduk yg memiliki Akta Kelahiran dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 1,85 %, dimana penduduk

yang memiliki Akta kelahiran pada tahun 2017 sebesar 40,27% atau 907.552 orang.

Upaya peningkatan Kepemilikan Akta Kelahiran antara lain :

1. Pelaksanaan pelayananan Akta Kelahiran secara “jemput bola’ (One Day Service) di Desa/Kelurahan, Kecamatan, Puskesmas, UPTD Cabang Dinas Pendidikan, Panti Asuhan, dll.
2. Pengurusan Akta Kelahiran Tanpa dipungut biaya retribusi (gratis).
3. Inovasi pelayanan akta kelahiran ‘ALAMAK’ (Anak Lahir Membawa Akta Kelahiran) yang bekerja sama dengan RSUD dan Puskesmas.
4. Inovasi pelayanan penerbitan akta kelahiran ‘Salam 30 Menit’, yaitu penerbitan akta kelahiran dalam waktu 30 menit untuk anak usia 1 s/d 3 tahun..
5. Frekuensi kegiatan penyuluhan/sosialisasi tentang prosedur, kegunaan dan syarat-syarat pengurusan Akta Kelahiran lebih ditingkatkan serta dilaksanakan secara berkesinambungan.

Sedangkan untuk kepemilikan akta kelahiran anak pada penduduk usia 0 s.d 18 th pada tahun 2018 adalah sebesar 455.169 orang dari jumlah penduduk usia 0 s.d 18 th sebanyak 503.325 orang atau 89,54 %. Jumlah ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 jumlah penduduk usia 0 s.d 18 th yang memiliki Akta Kelahiran sebanyak 422.717 orang dari jumlah penduduk usia 0 s.d 18 th sebanyak 528.329 orang. Jumlah ini meningkat sebesar 7,69 % dari tahun sebelumnya, seperti terlihat pada grafik berikut :

Grafik III.B.45

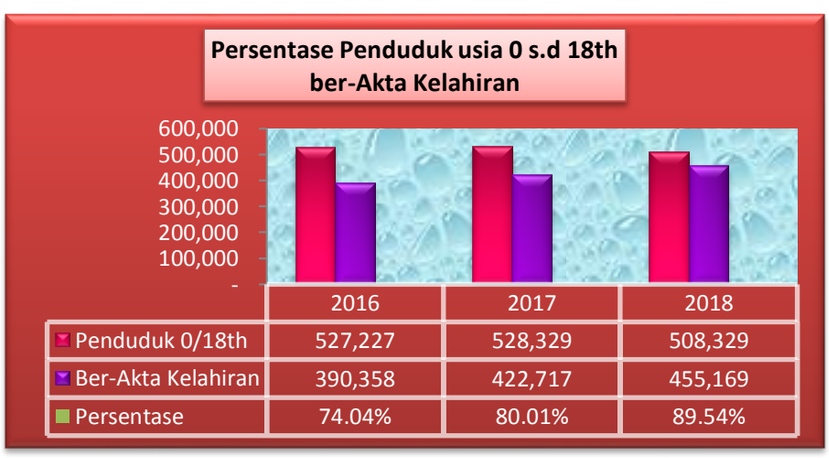

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

c. SKPD Penyelenggara Urusan

Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dilaksanakan oleh SKPD yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

d. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Sidoarjo berjumlah 54 orang. Secara rinci SDM penyelenggara urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaiamana terlampir.

Untuk jabatan fungsional tersedia pranata komputer dan arsiparis.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran (per program)

Secara rinci anggaran dan realisasi masing masing program sebagaimana terlampir.

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Rp 973,125,000.00	Rp 845,813,840.00	86.92%
2	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Rp 3,854,643,500.00	Rp 3,666,589,780.00	95.12%
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp 2,863,100,000.00	Rp 2,601,370,914.00	90.86%
4	Program pelayanan pencatatan sipil	Rp 1,086,717,500.00	Rp 953,880,140.00	87.78%

f. Proses Perencanaan

Proses Perencanaan berlangsung secara sinergis dan terkoordinasi baik antar bidang/seksi maupun lintas sektor yang berkaitan dengan tugas dan fungsi OPD. Penyusunan rencana kerja OPD dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan masukan kebutuhan dari desa dan kecamatan melalui mekanisme musrenbang.

g. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagaimana terlampir.

13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Program

Program pembangunan untuk urusan Pemberdayaan masyarakat dan desa yang dilaksanakan pada tahun 2018 adalah :

1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan;
2. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

b. Realisasi Pelaksanaan Program serta Permasalahan dan Solusi

Seluruh program urusan Pemberdayaan masyarakat dan desa telah dilaksanakan, dan hasilnya dapat dilihat dari pencapaian :

1. **Persentase Desa Maju**

Pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan diantaranya terdapat pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM), yaitu Indek Komposit yang dibentuk dari Indek Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indek Ketahanan Lingkungan (IKL) untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menangani pengentasan Desa Sangat Tertinggal dan peningkatan Desa Maju.

Tujuan penyusunan Indeks Desa Membangun adalah :

a. menetapkan status kemajuan dan kemandirian Desa; dan
b. menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan Desa.

Ruang lingkup pengaturan Indeks Desa Membangun ini meliputi :

a. komponen Indeks Desa Membangun;
b. status kemajuan dan kemandirian Desa; dan
c. penggunaan dan pengelolaan data Indeks Desa Membangun.

Secara umum Pedoman Indeks Desa Membangun (IDM) disusun untuk memberikan panduan kepada pemerintah pusat, daerah, dan Desa dalam memanfaatkan data dan informasi Indeks Desa Membangun sebagai salah satu basis dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pembangunan Desa.

Tujuan khusus penyusunan Indeks Desa Membangun adalah agar bisa digunakan sebagai basis data (base line) pembangunan desa yang menjadi dasar dalam menilai kemajuan dan kemandirian desa, salah satu input (fokus) dalam perumusan isu-isu strategis dan permasalahan utama yang terkait dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, masukan dalam perumusan targeting (sasaran lokasi) terkait dengan target pembangunan nasional dan instrumen koordinasi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah daerah dan desa, guna efektifitas capaian sasaran pembangunan nasional.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 52 Tahun 2018 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Masyarakat Desa Nomor 30 Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandiriam Desa di Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut :

Dalam RPJMD ditetapkan Status Desa Maju sebesar 22,98% atau 74 Desa dengan capaian sebesar 6,52% atau 21 Desa. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2017 jumlah desa maju sebanyak 66 Desa atau 20,49%, maka capaian tahun 2018 terjadi penurunan sebanyak 45 desa atau 13,97%. Apabila dibandingkan dengan target RPJMD diakhir periode (tahun 2021) yaitu 31,06 maka capaian kinerja Desa Maju tercapai 20,99%.

Tabel III.B.19

Status Desa Dalam Indeks Desa Membangun

No.	Status Desa	THN 2018		THN 2017		THN 2016	
		Jumlah Desa	%	Jumlah Desa	%	Jumlah Desa	%
1.	Desa Mandiri	0 desa	0%	0 desa	0%	0 desa	0%
2.	Desa Maju	21 desa	6,52%	66 desa	20,49%	57 desa	17,70%
3.	Desa Berkembang	177 desa	54,97%	207 desa	64,29%	189 desa	58,70%
4.	Desa Tertinggal	90 desa	27,95%	48 desa	14,91%	71 desa	22,05%
5.	Desa Sangat Tertinggal	34 desa	10,56%	1 desa	0,31%	5 desa	1,55%
	JUMLAH DESA	322 desa		322 desa		322 desa	

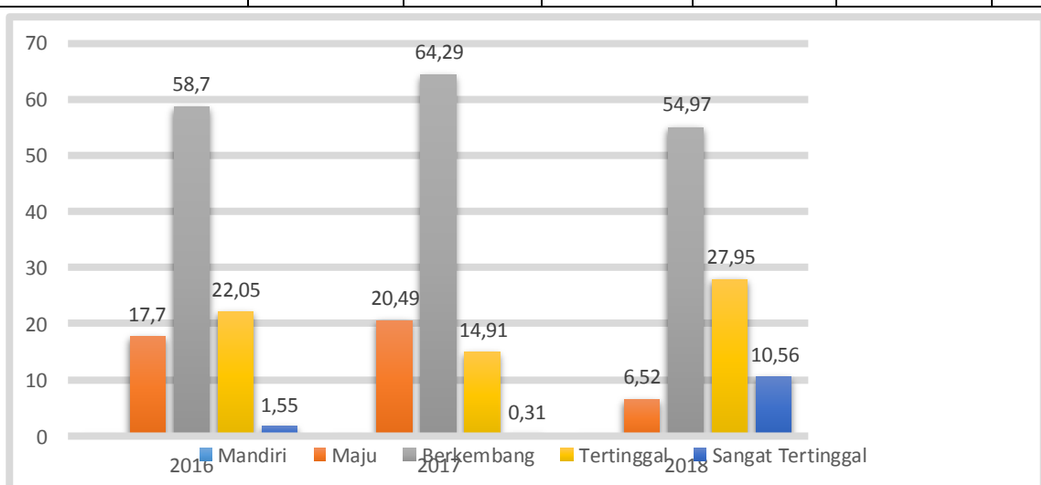

Sumber Data : Dinas PMD P3A KB

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa beberapa perkembangan status desa yang dihasilkan antara lain :

- Desa Maju tercapai sebanyak 21 desa atau 6,52% dari 322 desa yang ada atau tercapai 27,63% dari target yang ditetapkan sebanyak 76 desa atau 23,60%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2017 yaitu 66 desa atau 20,49% dari 322 desa yang ada, maka capaian tahun 2018 mengalami penurunan sebanyak 45 desa atau 13,98% dari 322 desa.
- Desa Berkembang tercapai sebanyak 177 desa atau 54,97% dari 322 desa yang ada atau tercapai 80,46% dari target yang ditetapkan

sebanyak 220 desa atau 68,32% dari 322 desa. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2017 yaitu 207 desa atau 64,29% dari 322 desa yang ada, maka capaian tahun 2018 mengalami penurunan sebanyak 30 desa atau 9,32% dari 322 desa.

- Desa Tertinggal tercapai 90 desa atau 27,95% dari 322 desa yang ada, atau tercapai 321,26% dari target yang direncanakan yaitu sebanyak 28 desa atau 8,70%, Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2017 yaitu 48 desa atau 14,91% dari 322 desa yang ada, maka capaian tahun 2018 mengalami peningkatan 42 desa atau 13,04% dari 322 desa.
- Desa Sangat Tertinggal tercapai 34 Desa yaitu 10,46% dari 322 Desa yang ada dengan target 0 desa. Jika dibandingkan dengan tahun 2017 capaiannya sebesar 1 desa atau 0,31% dari 322 desa yang ada maka pada tahun 2018 Desa Sangat Tertinggal mengalami peningkatan sebanyak 33 Desa atau 10,15%.

Kendala dihadapi tidak tercapainya target desa Maju dan perkembangan desa lainnya yaitu :

- Pemahaman Desa terhadap Indek Desa Membangun belum optimal
- Belum terbentuknya Pokja Pelaksana pengisian Indek Desa Membangun
- Pengisian Indek Desa Membangun melalui Quesioner oleh Desa belum optimal dan tidak sesuai dengan kondisi riil yang ada dilapangan
- Ketersediaan sumber data didesa untuk pengisian questioner Indek Desa Membangun masih sangat minim
- Pencapaian Desa Mandiri masih terlalu jauh diukur dengan keadaan desa-desa di sidoarjo saat ini yang mempunyai PADes rata-rata Rp125.000.000,00 / tahun dan paling tinggi saat ini sementara sebesar Rp345.000.000,00
- Percepatan untuk menuju kearah Desa Mandiri adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Desa yang salah satu penyokong utama PADes adalah dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Pengembangan BUMDES baru kita galakkan mulai tahun 2017, sehingga menuju BUMDES yang berhasil yang akhirnya untuk meningkatkan PADes masih membutuhkan waktu.

Upaya - upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan status perkembangan desa antara lain :

- Sosialisasi, Bimbingan dan Pendampingan terhadap pengukuran Indek Desa Membangun kepada Desa perlu ditingkatkan
- Perlu adanya penguatan terhadap pembentukan Pokja Pelaksana Pengisian Indek Desa Membangun baik tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa
- Perlu adanya ketersediaan sumber data yang cukup valid, akurat di desa dari segala bidang utamanya untuk Ketahanan Slsial, Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Lingkungan
- Perlu adanya aplikasi on line untuk Indek Desa Membangun sehingga informasi terkait dengan klasifikasi desa akan tersedia dengan cepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan

Dalam Pencapaian indikator tersebut didukung pula oleh indikator – indikator pendukung lainnya sebagai berikut :

1) Tingkat Usaha Ekonomi Pedesaan

Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat di pedesaan melalui perkembangan usaha ekonomi yaitu Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), Program Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

Apabila dilihat dari perkembangan usaha ekonomi melalui UPPKS, P3EL, UED-SP dan BUMDES, dapat disimpulkan bahwa:

Pencapaian kelompok UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) Mandiri

- Realisasi kelompok UPPKS Mandiri tahun 2018 sebesar 19% dari 221 kelompok usaha yaitu 42 kelompok. Dan capaian kinerja tercapai sebesar 90,48% dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yaitu 21%. Jika dibandingkan dengan capaian 2017 yaitu 18,84% atau 39 kelompok, maka capaian UPPKS Mandiri tahun 2018 meningkat sebesar 0,16% atau sebanyak 3 kelompok usaha.

  Apabila realisasi capaian kinerja UPPKS Mandiri tahun 2018 sebesar 19,00%, dan jika dibandingkan dengan target Renstra akhir periode (2021)

sebesar 39% maka capaian kinerja UPPKS Mandiri tercapai sebesar 48,72%.

Tabel III.B.20

Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera

	2015		2016		2017		2018	
	Jumlah UPPKS	%	Jumlah UPPKS	%	Jumlah UPPKS	%	Jumlah UPPKS	%
UPPKS Mandiri	31	16,15	37	18,69	39	18,84	42	19,00
UPPKS Berkembang	69	35,94	63	31,82	65	31,40	71	32,13
UPPKS Dasar	92	47,92	98	49,49	103	49,76	108	48,87
	192		198		207		221	

Sumber Data : Dinas PMD P3A KB

Pencapaian UED-SP (Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam) Mandiri

- Realisasi UED-SP Mandiri tahun 2018 sebanyak 28 kelompok usaha atau 21,54% dari jumlah kelompok usaha keseluruhan yaitu sebanyak 130 kelompok. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2018 yaitu sebesar 21% maka capaian kinerja dari UED-SP Mandiri tahun 2018 sebesar 102,57% .
- Jika dibandingkan dengan realisasi capaian kinerja UED-SP Mandiri Tahun 2017 sebesar 20,00% atau 26 kelompok usaha dari 130 kelompok usaha, sedangkan realisasi tahun 2018 sebanyak 28 kelompok atau 21,54% maka kelompok usaha UED-SP Mandiri tahun 2018 terdapat peningkatan sebanyak 2 kelompok atau 1,54%.
- Apabila realisasi capaian kinerja UED-SP Mandiri tahun 2018 sebesar 21,54%, jika dibandingkan dengan target Renstra akhir periode (2021) sebesar 33% maka capaian kinerja UPPKS Mandiri tercapai sebesar 65,27%.

Tabel III.B.21

Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam

	2015		2016		2017		2018	
	Jumlah UED-SP	%	Jumlah UED-SP	%	Jumlah UED-SP	%	Jumlah UED-SP	%
UED-SP Mandiri	21	16,15	26	20,00	26	20,00	28	21,54
UED-SP Berkembang	47	36,15	44	33,85	44	33,85	45	34,62
UED-SP Dasar	62	47,69	60	46,15	60	46,15	57	43,85
	130		130		130		130	

Sumber Data : Dinas PMD P3A KB

Pencapaian P3EL (Program Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal) Mandiri

- Dalam tahun 2018 realisasi P3EL Mandiri sebanyak 37 kelompok usaha atau 15,88% dari jumlah kelompok usaha keseluruhan yaitu sebanyak 233 kelompok. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2018 yaitu sebesar 17% maka capaian kinerja dari P3EL Mandiri tahun 2018 sebesar 93,41%.
- Jika dibandingkan dengan realisasi capaian kinerja P3EL Mandiri Tahun 2017 sebesar 16,06% atau 35 kelompok usaha dari 218 kelompok usaha, sedangkan realisasi tahun 2018 sebesar 15,88% dari 233 kelompok yaitu 37 kelompok, maka kelompok usaha P3EL Mandiri tahun 2018 terjadi penurunan sebanyak 0,18%.
- Apabila realisasi capaian kinerja P3EL Mandiri tahun 2018 sebesar 15,88% jika dibandingkan dengan target Renstra akhir periode (2021) sebesar 32% maka capaian kinerja P3EL Mandiri tercapai sebesar 49,63%.

Tabel III.B.22

Program Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal

	2015		2016		2017		2018	
	Jumlah P3EL	%	Jumlah P3EL	%	Jumlah P3EL	%	Jumlah P3EL	%
P3EL Mandiri	30	15,07	35	17,07	35	16,05	37	15,88
P3EL Berkembang	62	31,16	57	27,81	57	26,15	60	25,75
P3EL Dasar	107	53,77	113	55,12	126	57,80	136	58,37
	199		205		218		233	

Sumber Data : Dinas PMD P3A KB

Pencapaian BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) Mandiri

- Dalam tahun 2018 realisasi BUMDES Mandiri sebanyak 6 kelompok usaha atau 5,56% dari jumlah kelompok usaha keseluruhan yaitu sebanyak 108 kelompok. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2018 yaitu sebesar 20% maka capaian kinerja dari BUMDES Mandiri tahun 2018 sebesar 27,80%
- Jika dibandingkan dengan realisasi capaian kinerja BUMDES Mandiri Tahun 2017 sebesar 4,55% atau 4 kelompok usaha dari 88 kelompok usaha, sedangkan realisasi tahun 2018 sebesar 5,56% maka kelompok usaha BUMDES Mandiri tahun 2018 terjadi peningkatan sebanyak 1,01%
- Apabila realisasi capaian kinerja BUMDES Mandiri tahun 2018 sebesar 5,56% jika dibandingkan dengan target Renstra akhir periode (2021) sebesar 28% maka capaian kinerja BUMDES Mandiri tercapai sebesar 19,86%.

Tabel III.B.23

Badan Usaha Milik Desa

	2015		2016		2017		2018	
	Jumlah BUMDES	%	Jumlah BUMDES	%	Jumlah BUMDES	%	Jumlah BUMDES	%
BUMDES Mandiri	3	16,67	4	9,76	4	4,55	6	5,56
BUMDES Berkembang	2	11,11	10	24,39	10	11,36	33	30,56
BUMDES Dasar	13	72,22	27	65,85	74	84,09	69	63,89
	18		41		88		108	

Sumber Data : Dinas PMD P3A KB

Perkembangan capaian Lembaga Ekonomi yang Mandiri tersebut dapat dilihat dalam grafik berikut :

Grafik III.B.46

Persentase Capaian Lembaga Ekonomi yang Mandiri

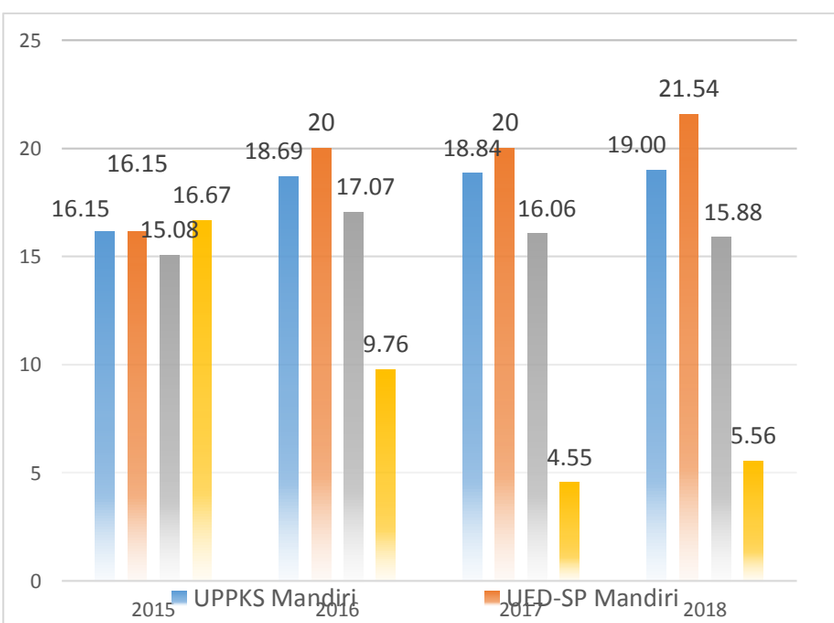

Sumber Data : Dinas PMD P3A KB

Dari grafik terlihat bahwa perkembangan usaha ekonomi masyarakat pedesaan mencerminkan keberhasilan peningkatan peran serta dan inovasi masyarakat.

Adapun upaya yang dilakukan untuk peningkatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan yaitu :

1. Meningkatkan sumberdaya manusia secara profesional dalam pengelolaan lembaga ekonomi
2. Mencari trobosan dan kerja sama dengan pihak lain dalam mengembangkan lembaga ekonomi

2) Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai ketentuan

Dalam tahun 2018, desa yang melaksanakan administrasi pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan di Kabupaten Sidoarjo tercapai sebesar 100%, yaitu sebanyak 322 desa dari jumlah desa yang ada sebanyak 322 desa. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2017 yaitu sebanyak 312 desa atau 96,89% yang melaksanakan administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan, maka tahun 2018 terdapat peningkatan sebanyak 10 desa.

Pelaksanaan tata kelola pemerintaha desa yang baik meliputi :

1. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJMDes)
2. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes)
3. Penyusunan RAPBDes
4. Penyusunan Laporan Penyelengggaraan Pemerintah Desa (LPPDes)
5. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPDes)
6. Laporan Realisasi APBDes beserta Dokumen Perdes Keuangan
7. Mengisi buku Inventaris Kekayaan dan Aset desa
8. Pelaksanaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa

Grafik III.B.47
Perkembangan Tata kelola Administrasi Desa Yang Baik dan Desa yang Tidak Baik

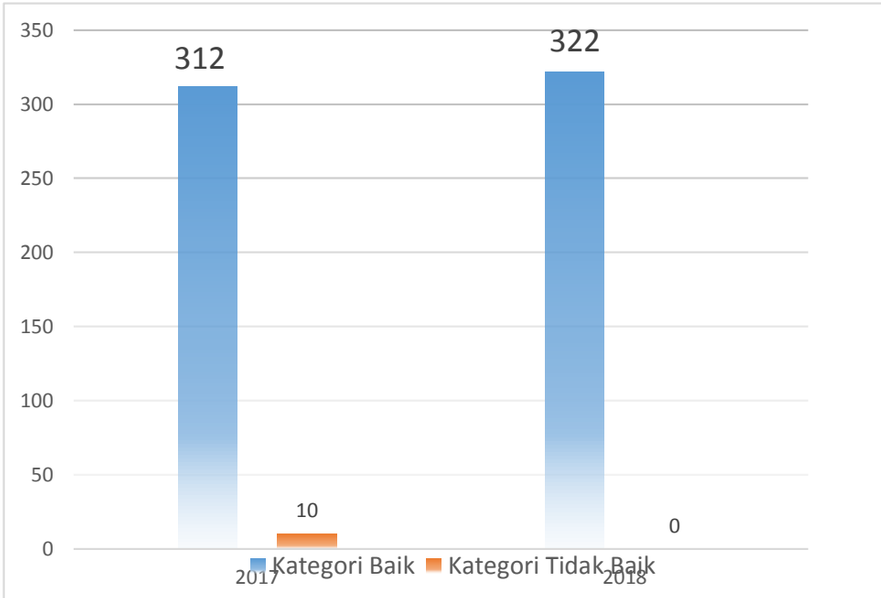

Sumber Data : Dinas PMD P3A KB

Upaya pembinaan yang ditempuh untuk mewujudkan tata kelola administrasi pemerintahan desa yang baik antara lain :

1. Pembinaan ke kecamatan secara rutin kepada Kepala Desa, Sekdes, Bendahara dan Kaur. Perencanaan
2. Monitoring dan Evaluasi secara rutin

c. SKPD Penyelenggara Urusan

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini dilaksanakan oleh SKPD yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana.

d. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo berjumlah 45 orang. Secara rinci SDM penyelenggara urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaiamana terlampir. Terdapat satu jabatan fungsional yaitu pranata komputer.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran (per program)

Secara rinci anggaran dan realisasi masing masing program sebagaimana terlampir.

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Rp 1,950,698,600.00	Rp 1,719,882,290.00	88.17%
2	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Rp 2,056,506,500.00	Rp 1,761,095,500.00	85.64%

f. Proses Perencanaan

Proses perencanaan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diawali dari rapat kerja dinas dan jajaran kecamatan, musrenbang desa, serta musrenbang kecamatan, sebagai bahan penyusunan Renja SKPD.

g. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana adalah sebagaimana terlampir.

14. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Program

Program pembangunan untuk urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dilaksanakan pada tahun 2018 adalah :

1. Program Pengelolaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
2. Program Analisis kebijakan dan pengolahan data kependudukan

a. Realisasi Pelaksanaan Program Serta Permasalahan Dan Solusinya

Seluruh program tersebut dilaksanakan untuk mencapai Terwujudnya kesetaraan gender di berbagai aspek, diantaranya :

a. Prevalensi Peserta KB Aktif

Tingkat prevalensi Peserta KB Aktif atau disebut juga Persentase PUS yang ikut KB atau Contraceptive Prevalence Rate (CPR) adalah perbandingan antara jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Peserta KB Aktif, dibandingkan dengan jumlah seluruh Pasangan Usia Subur (PUS) yang terdapat di suatu daerah/wilayah dalam suatu periode yang sama.

Dalam tahun 2017, tingkat prevalensi Peserta KB Aktif atau Persentase PUS yag ikut KB atau CPR di Kabupaten Sidoarjo adalah sebesar 81,29%, yaitu perbandingan antara jumlah Peserta KB Aktif sebanyak 306.116 akseptor dengan jumlah seluruh PUS yaitu sebanyak 376.576 pasangan. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2016 yaitu sebesar 80,25%, maka tingkat prevalensi Peserta KB Aktif tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 1,04%. Perkembangan Peserta KB Aktif terlihat pada grafik berikut :

Grafik III.B.48

Perkembangan Peserta KB Aktif

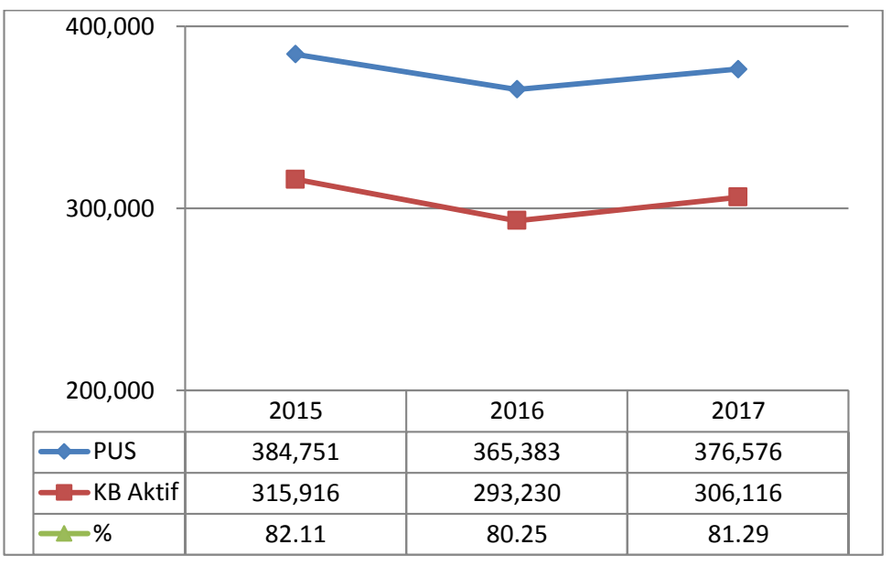

	2015	2016	2017
PUS	384,751	365,383	376,576
KB Aktif	315,916	293,230	306,116
%	82.11	80.25	81.29

Sumber : Dinas PMD,P3A,KB

Perkembangan peserta KB Aktif ini disebabkan karena adanya peningkatan dalam pemberian Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat melalui Kampung KB. Selanjutnya perlu dilakukan pembinaan bagi peserta KB Aktif secara terus menerus agar tidak terjadi drop out dalam penggunaan alat kontrasepsi.

b. **Persentase Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)**

Salah satu upaya penurunan angka kelahiran selain penggunaan alat kontrasepsi adalah Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) bagi penduduk perempuan, sedangkan tolok ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan PUP tersebut adalah persentase perkawinan dibawah umur, yang dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk perempuan yang melangsungkan perkawinan pertama pada usia dibawah 20 tahun (<20 tahun) dengan jumlah keseluruhan penduduk wanita yang melangsungkan perkawinan pertama dalam periode yang sama.

Dalam tahun 2017, capaian PUP di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 12.056 orang atau 99,60%, dari perkawinan pertama secara keseluruhan yaitu 12.104 orang dengan persentase perkawinan dibawah umur sebesar 0,40% atau sebanyak 48 orang terjadi di 7 (tujuh) kecamatan. Jika dibandingkan dengan capaian perkawinan dibawah umur tahun 2016 sebanyak 22 orang atau 0,20% dari jumlah keseluruhan penduduk perempuan yang melangsungkan pernikahan pertama yaitu sebanyak 10.960 orang, maka terjadi peningkatan, yang disebabkan oleh “ Pergaulan bebas serta pengaruh dari perkembangan teknologi informasi “.

Dengan pengertian semakin kecil pernikahan pertama bagi perempuan dengan usia dibawah 20 tahun maka Pendewasaan Usia Perkawinan di kabupaten sidoarjo semakin berhasil. Perkawinan dibawah umur atau peningkatan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dapat berhasil disebabkan meningkatnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi.

Perkembangan Persentase Wanita Menikah di Bawah Umur (<20 tahun) terlihat pada grafik berikut :

Grafik III.B.49

Perkembangan Wanita Menikah di Bawah Umur

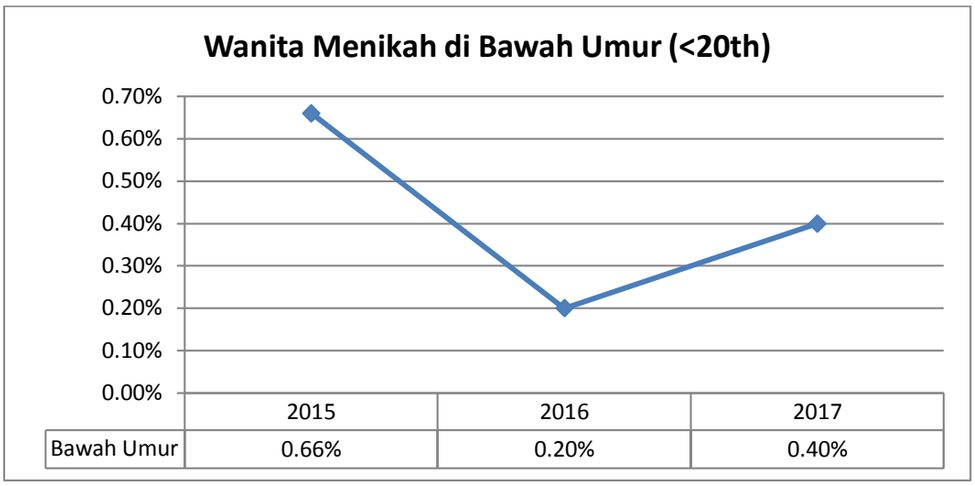

Sumber : Dinas PMD,P3A,KB

c. **TFR (Total Fertility Rate)**

Total Fertility Rate (TFR) ini menunjukkan rata rata jumlah anak yang dimiliki Wanita Usia Subur (WUS) sepanjang siklus kehidupan reproduksinya.

Realisasi Total Fertility Rate tahun 2017 sebesar 1,98 / WUS. Jika dibandingkan capaian TFR tahun 2016 sebesar 1,99 /WUS maka capaian tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 0,01 / WUS. Jika dibandingkan dengan target TFR tahun 2017 sebesar 2,08/WUS maka capaian TFR tahun 2017 sebesar 95,19% semakin kecil terjadinya kelahiran semakin baik.

Dengan tercapainya Total Fertility Rate tahun 2017 sebesar 1,98 /WUS, pembinaan kepada Pasangan Usia Subur (PUS) dalam memberikan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) tetap dilakukan secara kontinyu, atau memberikan informasi kepada masyarakat agar peduli terhadap Kesehatan Reproduksi dengan cara mengatur jarak kelahiran dan membatasi jumlah anak yang dilahirkan melalui Program Keluarga Berencana.

d. CBR (Crude Birt Rate)

Salah satu ukuran yang sering dipakai untuk mengetahui tingkat kelahiran di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu adalah Angka Kelahiran Kasar atau Crude Birt Rate (CBR). Nilai CBR dapat dimanfaatkan untuk acuan mengetahui tingkat populasi penduduk di suatu wilayah.

Realisasi Crude Birt Rate (CBR) tahun 2017 sebesar 16,8 /1000 penduduk yang menunjukkan bahwa di Kabupaten Sidoarjo terjadi kelahiran 16 orang atau 17 orang per 1000 penduduk

3. SKPD Penyelenggara Urusan

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana secara umum dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana.

4. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Anak berjumlah 11 orang. Secara rinci SDM penyelenggara urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir. Tidak tersedia jabatan fungsional pada urusan ini.

5. Alokasi dan Realisasi Anggaran (per program)

Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program sebagaimana terlampir.

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Pengelolaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Rp 8,702,876,599.00	Rp 5,759,468,600.00	66.18%
2	Program Analisis kebijakan dan pengolahan data kependudukan	Rp 235,913,250.00	Rp 216,726,450.00	91.87%

6. Proses Perencanaan

Proses perencanaan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan berawal dari penyerapan masukan desa,kecamatan, tokoh masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya ditunjang dengan kompilasi data yang sudah terinventarisasi. Data dan inventarisasi masalah yang terkompilasi menjadi dasar bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana untuk menyusun usulan program dan kegiatan.

7. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana adalah sebagaimana terlampir

15. Urusan Perhubungan

a. Program

Program pembangunan untuk urusan Perhubungan yang dilaksanakan pada tahun 2018 adalah :

1. Program peningkatan pelayanan angkutan
2. Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan
3. Program Penyusunan Kebijakan Teknis, Norma, Standart Prosedur dan Sistem Informasi Dibidang Perhubungan
4. Program Evaluasi Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

b. Realisasi Pelaksanaan Program Serta Permasalahan Dan Solusinya

Seluruh program tersebut dilaksanakan untuk mencapai Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas dalam Penyediaan Infrastruktur penunjang perekonomian, diantaranya :

1. Indek/Survey Kepuasan Masyarakat

Indek/Survey Kepuasan Masyarakat merupakan salah satu sarana atau cara untuk mengetahui secara obyektif tingkat kepuasan masyarakat terhadap kegiatan layanan perhubungan yaitu :

Tahun	Unit Kerja	Indeks IKM	Target IKM	Kriteria
2016	UPT. PKB	72, 43	80	Baik
	Bidang. Angkutan	73,93	80	Baik
2017	UPT. PKB	78,98	81	Baik
	Bidang. Angkutan (Rekomendasi Izin Trayek)	75,00	81	Baik
	Bidang. Menrek (rekomendasi Andalalin)	75,00	81	Baik
2018	UPT. PKB	79,15	82	Baik
	Bidang. Angkutan (Terminal Porong)	79,28	82	Baik
	Bidang. Menrek (rekomendasi Andalalin)	75,00	81	Baik

Sumber Data : Dinas Perhubungan

a. IKM UPT PKB (Pengujian Kendaraan Bermotor)

Secara umum seluruh mutu unsur pelayanan publik di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo dengan kategori “ Baik “.

Nilai IKM dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 terus mengalami kenaikan sebagai gambaran tahun 2016 sebesar 72, 43 dengan kategori “Baik” tahun 2017 sebesar 78,98 dengan kategori “ Baik “ tahun 2018 sebesar 79,15 dengan kategori “ Baik “ hal tersebut dikarenakan semakin baiknya prosedur pelayanan dan waktu pelayanan terutama waktu tunggu hasil pengujian kendaraan.

b. IKM Bidang Angkutan (Terminal Porong)

Nilai IKM terminal Porong sebesar 79,28 dengan kategori " Baik' ini menggambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan pelayanan masyarakat dalam sector perhubungan dengan menambah sarana dan prasarana terutama terminal Porong

c. IKM Bidang Menrek (Rekomendasi Andalalin)

Nila IKM Rekomendasi Andalalin sebesar 75 dengan kategori " Baik " ini menggambarkan pelayanan rekomendasi andalalin perlu ditingkatkan, sebagaimana diketahui bahwa andalalin digunakan sebagai dasar pengembangan transportasi kabupaten Sidoarjo, sehingga rekomendasi andalalin sebagai variable persyaratan pelaksana pelayanan, penanganan pengaduan , saran dan masukan.

2. Pelayanan uji KIR

Indikator ini menggambarkan tingkat keberhasilan uji KIR atas angkutan Umum secara lebih bekualitas, sehingga diharapkan adanya pengurangan pelangaran terhadp kemampuan angkut kendaraan serta secara kualitas akutan umum yang telah dilakukan uji KIR menjadi angkutan yang layak untuk dioperasikan.

Berikut perkembangan pelayanan uji KIR melalui kendaraan yang wajib uji dan lulus uji pada tahun 2018 :

No	Uraian	Satuan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1.	Kendaraan Wajib Uji Berkala	Unit	42.512	44.688	39.575
2.	Pengujian Berkala (2 kali)	Unit	51.950	89.376	57.068
3.	Lulus Uji Berkala	Unit	50.256	49.322	51.763
4.	% Kelulusan	%	96,73 %	55,18 %	90,70 %

Sumber Data : Dinas Perhubungan

Upaya untuk meningkatkan pelayanan uji KIR, antara lain :

- Melakukan uji berkala terhadap alat uji kendaraan
- Meningkatkan pelayanan dengan menambah pos drive thru sehingga waktu pelayanan bisa dipersingkat

- Mengadakan pelayanan uji keliling dengan maksud mengurangi beban jalan dan kemacetan di depan kantor Dinas Perhubungan dengan mendatangi wajib uji yang sudah habis masa uji

3. Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Jalan

Indikator ini menggambarkan upaya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menyediakan/mendukung sarana dan prasarana Perhubungan yang layak sebagai bentuk upaya peningkatan pelayanan jalan kepada masyarakat.

Adapun definisi Sarana adalah segala sesuatu dalam hal ini adalah angkutan umum yang dapat dipakai/difungsikan untuk memperlancar arus angkutan orang sesuai dengan tujuannya sebagai alat dalam mencapai maksud tujuan.

Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses

Berikut sarana dan prasarana perhubungan yang layak fungsi :

Tabel III.B.24

Sarana Prasarana Perhubungan

No	Alat Perlengkapan Jalan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1.	Pengadaan APILL (Alat Pendahulu Isyarat Lalulintas)			
a.	Traffic Light	3 Lokasi	-	6 Lokasi
b.	Pengadaan Paku Jalan	283 Unit	-	-
c.	Warning Light/ Flashing Light	4 Lokasi	4 Lokasi	26 Lokasi
d.	Pelican Crossing	-	2 Lokasi	3 Lokasi
2.	Pengadaan RPPJ / Rambu Jalan			
a.	Rambu Peringatan , Larangan dan Perintah	102 Unit	19 Unit	-
b.	Rambu Pendahulu petunjuk jalan	33 Unit	-	-
	- RPPJ elektronik	-	-	3 Unit
	- Rambu lalulintas tiang F	-	-	-
	- Rambu Tiang biasa	-	100 Unit	150 Unit
3.	Pengecatan marka Jalan			
a.	Dana APBD	1,175 m2	-	12. 203 m
b.1	Dana DAK	260,75 m2	-	-
b.2	Speed Trap (pita kejut)	221,70 m2	-	-

4.	Revitalisasi Guardrill	3 titik	-	-
5.	Cermin tikung	-	20 Unit	10 Unit
6.	Rambu papan himbauan parkir	-	20 unit	-
7.	Pengadaan Mobil Sky walker	-	-	1 Unit
8.	Pengadaan moil derek	-	-	1 Unit
9.	Pengadaan mobil Uji keliling	-	-	1 Unit

Sumber Data : Dinas Perhubungan

Selain itu juga harus didukung dengan Kecukupan Jumlah alat kelengkapan Jalan yang berfungsi dengan baik.

Alat perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan, meliputi :

1) Alat pemberi isyarat ;
2) Rambu lalu lintas;
3) Marka jalan;
4) Alat penerangan jalan;
5) Alat pengendali pemakai jalan,terdiri atas alat pembatas kecepatan, dan alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan

Berfungsinya alat kelengkapan jalan secara baik dengan jumlah yang cukup diharapkan akan dapat mengurang titik - titik kemacetan diwilayah perkotaan dan kecamatan Kabupaten Sidoarjo

c. SKPD Penyelenggara Urusan

Urusan Perhubungan secara umum dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.

d. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di urusan Perhubungan berjumlah 93 orang. Secara rinci SDM penyelenggara urusan Perhubungan menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir.

Untuk jabatan fungsional terdapat 14 orang Penguji Kendaraan Bermotor.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran (per program)

Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program sebagaimana terlampir.

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program peningkatan pelayanan angkutan	Rp 2,154,370,000.00	Rp 2,014,261,900.00	93.50%
2	Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Rp 19,446,394,025.00	Rp 16,600,825,709.32	85.37%
3	Program Penyusunan Kebijakan Teknis, Norma, Standart Prosedur dan Sistem Informasi Dibidang Perhubungan	Rp 1,712,505,000.00	Rp 1,609,360,500.00	93.98%
4	Program Evaluasi Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Rp 12,012,021,012.00	Rp 11,468,876,120.00	0.00%

f. Proses Perencanaan

Proses perencanaan urusan Perhubungan dilaksanakan berawal dari penyerapan masukan desa, kecamatan, tokoh masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya ditunjang dengan kompilasi data yang sudah terinventarisasi.

g. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan Perhubungan pada Dinas Perhubungan adalah sebagaimana terlampir

16. Urusan Komunikasi dan Informatika

a. Program

Program pembangunan untuk urusan Komunikasi dan Informatika pada tahun 2018 sebagai berikut :

1. Program pelayananan informasi, pemberitaan dan pengelolaan pengaduan masyarakat
2. Program pengelolaan, fasilitasi dan implementasi teknologi informatika

b. Realisasi Pelaksanaan Program Serta Permasalahan Dan Solusinya

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program pembangunan urusan komunikasi dan informatika, sebagai berikut :

1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Evaluasi SPBE merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Agar penilaian ini dilaksanakan secara efektif dan obyektif, maka perlu disusun pedoman evaluasi yang dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan evaluasi SPBE.

Pedoman Evaluasi SPBE disusun untuk memberikan petunjuk dalam rangka melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Pedoman evaluasi ini mengatur tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil evaluasi SPBE. Ruang lingkup penyelenggaraan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang akan dievaluasi sedikitnya mencakup tata kelola SPBE, layanan SPBE, dan kebijakan SPBE

Tujuan Evaluasi SPBE :

1. Mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada Instansi pusat
2. Dan Pemerintah daerah;
3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE;
4. Menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

<u>Metodologi Evaluasi SPBE</u>

- **Tingkat Kematangan SPBE**

  Tingkat kematangan SPBE merupakan kerangka kerja yang mengukur derajat pengembangan SPBE ditinjau dari tahapan kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkatan kematangan mengarahkan pengembangan SPBE pada keluaran dan dampak yang lebih baik. Tingkat kematangan yang rendah menunjukkan kapabilitas dan keberhasilan yang rendah, sedangkan tingkat kematangan yang tinggi menunjukkan kapabilitas dan keberhasilan yang lebih tinggi.

  Tingkat kematangan pada kapabilitas proses terdiri dari lima tingkat yaitu rintisan, terkelola, terstandardisasi, terintegrasi dan terukur, optimum. Sedangkan tingkat kematangan pada kapabilitas fungsi teknis terdiri lima tingkat yaitu informasi, interaksi, transaksi, kolaborasi, dan optimalisasi.

Setiap tingkat (level) memiliki karakteristik masing-masing yang dapat secara jelas membedakan antara tingkat satu dengan tingkat yang lain. Karakteristik pada tingkat (level) yang lebih tinggi mencakup karakteristik pada tingkat (level) yang lebih rendah.

- **Struktur Penilaian dalam SPBE**

  Penilaian pada pelaksanaan SPBE dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari:

  1. Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai;
  2. Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai;
  3. Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai

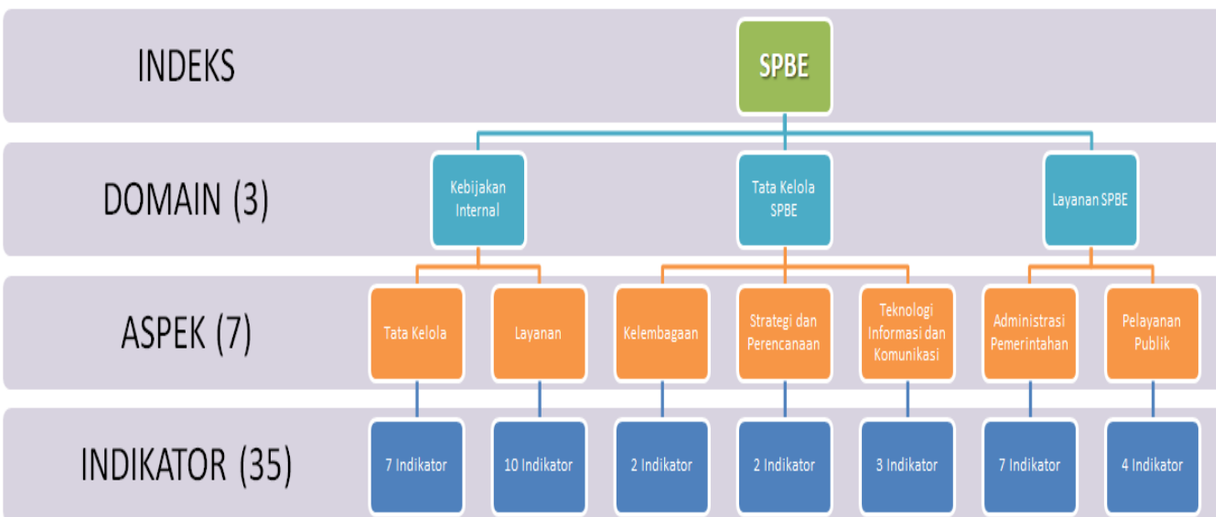

- **Tingkat Kematangan Kapabilitas**

  Tingkat kematangan pada kapabilitas proses diterapkan pada domain tata kelola SPBE dan domain kebijakan internal SPBE. Berikut adalah karakteristik tingkat kematangan pada kapabilitas proses :

Rintisan	• Pengaturan dalam bentuk konsep yang belum ditetapkan. • Proses tata kelola dilaksanakan secara *ad-hoc.*
Terkelola	• Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi sebagian kebutuhan di Instansi Pemerintah • Proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen yang telah didefinisikan dan didokumentasikan.
Terstandardisasi	• Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi semua kebutuhan di Instansi Pemerintah. • Proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standardisasi.
Terintegrasi dan Terukur	• Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi kebutuhan hubungan antar Instansi Pemerintah. • Proses tata kelola dilaksanakan dengan pengukuran kinerja secara kuantitatif.
Optimum	• Pengaturan telah ditetapkan dan dievaluasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal. • Proses tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas secara berkesinambungan.

- **Tingkat Kematangan Kapabilitas Fungsi SPBE**

  Tingkat kematangan pada kapabilitas fungsi SPBE diterapkan pada domain layanan SPBE. Berikut adalah karakteristik tingkat kematangan pada kapabilitas fungsi :

Informasi	• Layanan SPBE dalam bentuk informasi satu arah.
Interaksi	• Layanan SPBE dalam bentuk informasi dua arah.
Transaksi	• Layanan SPBE dalam bentuk pertukaran informasi dan layanan.
Kolaborasi	• Layanan SPBE terintegrasi dengan layanan SPBE lain.
Optimalisasi	• Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal.

- **Metode Pelaksanaan Evaluasi SPBE**

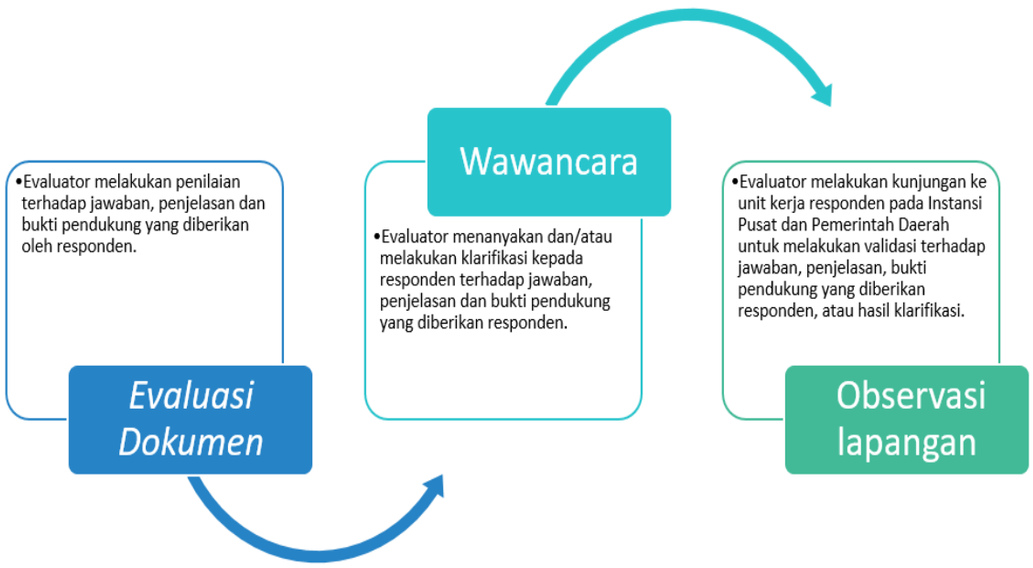

Grafik III.B.50

Nilai Indeks SPBE Kabupaten Sidoarjo

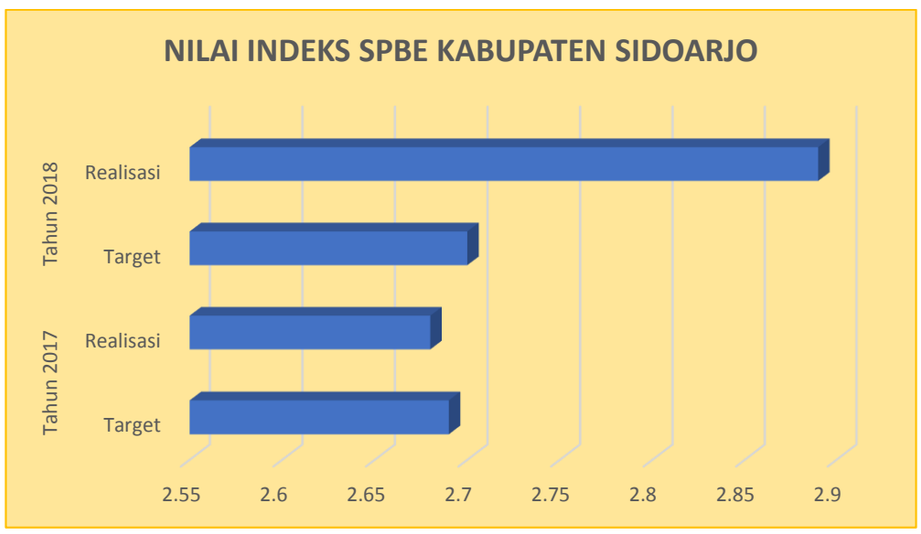

Tahun 2017		Tahun 2018	
Target	**Realisasi**	**Target**	**Realisasi**
2,69	2,68	2,7	2,89

Sumber Data : Dinas Komunikasi dan Informatika

Penjelasan Peningkatan / Penurunan

Pada Tahun 2017 tidak dilakukan penilaian PEGI oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika atau sekarang diganti nama dengan SPBE yaitu Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sehingga hasil yang dilakukan sama dengan yang diterima Kabupaten Sidoarjo Pada Tahun 2015 yaitu 2,68 dengan peringkat nomer 8.

PeGI Tingkat Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2015

NO	KABUPATEN/KOTA	DIMENSI					NILAI RATA-RATA	KATEGORI
		KEBIJAKAN	KELEMBAGAAN	INFRASTRUKTUR	APLIKASI	PERENCANAAN		
1	Kota Surabaya	3.53	3.60	3.73	3.67	3.60	3.63	SANGAT BAIK
2	Kota Malang	3.20	3.33	3.53	3.33	3.20	3.32	BAIK
3	Kabupaten Bojonegoro	3.33	3.07	3.20	3.07	3.06	3.15	BAIK
4	Kabupaten Lamongan	3.22	3.06	3.18	3.13	3.04	3.13	BAIK
5	Kabupaten Gresik	2.93	2.83	2.87	2.70	3.00	2.87	BAIK
6	Kabupaten Banyuwangi	2.73	2.67	2.83	2.87	3.00	2.82	BAIK
7	Kota Pasuruan	2.47	2.83	2.67	2.73	2.73	2.69	BAIK
8	Kabupaten Sidoarjo	2.60	2.60	2.67	2.73	2.80	2.68	BAIK
9	Kota Probolinggo	2.70	2.93	2.40	2.73	2.40	2.63	BAIK
10	Kabupaten Malang	2.60	2.70	2.73	2.33	2.73	2.62	BAIK
	RATA-RATA	2.9	3.0	3.0	2.9	3.0	3.0	BAIK

Sumber : Dirjen APTIKA-KEMENKOMINFO

Namun pada tahun 2018 Nilai PeGi berubah nama menjadi Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dan hasil yang diperoleh mengalami Peningkatan menjadi 2,89 setelai dinilai oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

DOMAIN	INDEKS
Kebijakan	3.06
Tata Kelola	3.00
Layanan	2.79
INDEKS SPBE	2.89

Sumber : Bidang Pengembangan Informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika

PEMANFAATAN INFRA TIK

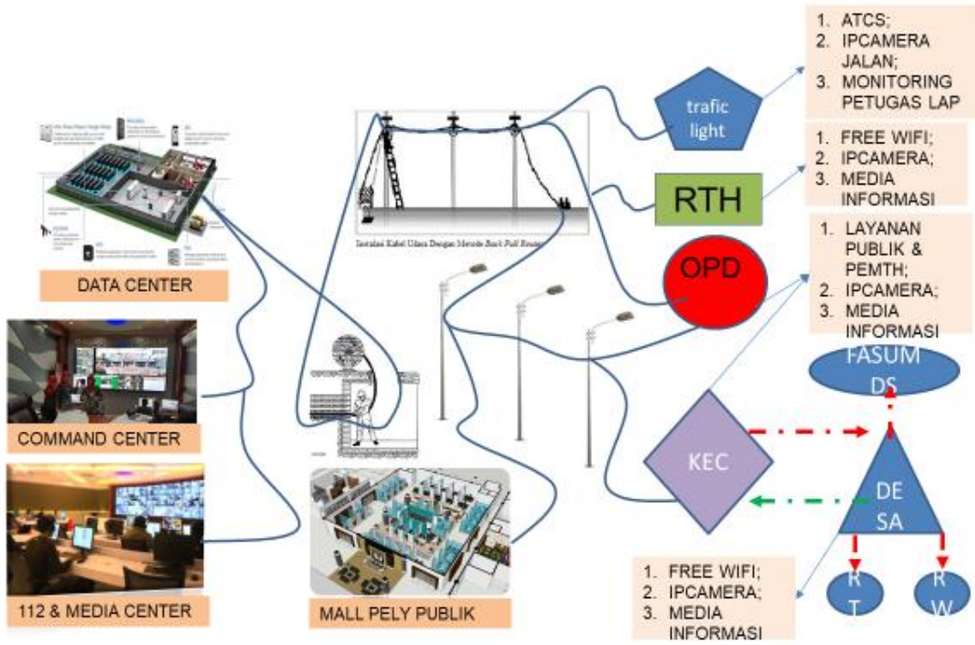

FO CONNECTION DELTA RING

2. **Pengembangan Informatika**

Pengembangan Informatika berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, SOTK dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki tugas pokok pada pengelolaan Sistem Elektronik mulai dari pembuatan sampai dengan pengembangannya. Pada Tahun 2017 dalam upaya penyelenggaraan Tata Kelola E-Government, Bidang Pengembangan Informatika telah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Hasil dari Monitoring dan Evaluasi Aplikasi adalah terdapat 61 aplikasi di seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo :

Pengajuan Aplikasi 2017

NAMA APLIKASI	OPD	FUNGSI APLIKASI
1. SIKOOLING	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sistem layanan kepada masyarakat berupa permohonan terkait dokumen lingkungan secara online
Progress: Sudah live sejak akhir tahun 2017 dengan alamat subdomain: sikoling.sidoarjokab.go.id		
2. SIPPADU	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sistem Informasi untuk pelayanan perijinan terpadu dimana user dapat melakuakn proses perijinan melalui website dengan S&K berlaku
Progress: Sudah live sejak tahun 2016 dengan alamat subdomain: sippadu.dpmptsp.sidoarjokab.go.id dan sudah live di android, tersedia di google play store		
3. BMW (Berkas Mlaku Dewe)	Kecamatan Sukodono	Aplikasi untuk mengelola pelayanan publik di lingkungan Kecamatan Sukodono
Progress: Sudah live sejak akhir tahun 2017 dengan alamat subdomain: sikoling.sidoarjokab.go.id		
4. P3M (Pusat Pelayanan Pengaduan Masyarakat)	Dinas Komunikasi dan Informatika	Aplikasi pengaduan berbasis website untuk masyarakat Sidoarjo
Progress: Sudah live sejak akhir tahun 2017 dengan alamat subdomain: p3m.sidoarjokab.go.id		
5. RDS (Regional Development System)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Aplikasi yang mengakomodir kebutuhan OPD terkait perencanaan program-program kegiatan
Progress: Sudah live sejak tahun 2017 dengan alamat subdomain: rds.sidoarjokab.go.id		
6. E-MUSRENBANG	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Aplikasi Musyawarah Rencana Pembangunan yang menghimpun seluruh usulan mulai dari tingkat bawah sampai level pusat Pemkab Sidoarjo

Progress: Sudah live sejak tahun 2017 dengan alamat subdomain: musrenbang.sidoarjokab.go.id		
7. SIGAP (Sidoarjo Tanggap)	Badan Penanggulanan Bencana Daerah	Apliakasi pengelolaan kebencanaan di Sidoarjo yang mengakomodir aduan, tindak lanjut serta pelaporannya
Progress: Sudah live sejak tahun 2017. Aplikasi berjalan pada versi android dan terkoneksi dengan server BPBD di alamat subdomain: bpbd.sidoarjokab.go.id		
8. SIPETEK (Sistem Pelayanan Terpadu Kecamatan)	Kecamatan Buduran	Aplikasi untuk mengelola administrasi pelayanan terpadu di Kecamatan Buduran
Progress: Aplikasi belum diserahkan ke Dinas Kominfo dan berjalan di server mandiri kecamatan.		
9. CEPET MULEH	Kecamatan Tulangan	Aplikasi untuk mengelola administrasi pelayanan terpadu di Kecamatan Tulangan
Progress: Aplikasi belum diserahkan ke Dinas Kominfo dan berjalan di server mandiri kecamatan.		
10. e-Reklame	Badan Pelayanan Pajak Daerah	Aplikasi untuk pengajuan permohonan ijin reklame dan monitoring pengawasan reklame di Kabupaten Sidoarjo
Progress: Aplikasi sudah berjalan sejak tahun 2017. Berbasis android dan sudah tersedia di Google Play Store		
11. Aplikasi e-Monkas	Badan Pelayanan Pajak Daerah	Aplikasi untuk menghubungkan komunikasi data antara aplikasi android dengan database server menggunakan SDK (Software Developer Kits) Oracle Instance Client.
Progress: Aplikasi sudah berjalan sejak tahun 2017. Berbasis android dan sudah tersedia di Google Play Store		

12. Aplikasi e-PBB	Badan Pelayanan Pajak Daerah	Aplikasi untuk pembayaran PBB berdasarkan NOP dan NJOP
Progress: Aplikasi sudah berjalan sejak tahun 2017. Berbasis android dan sudah tersedia di Google Play Store		
13. Aplikasi Simporda	Badan Pelayanan Pajak Daerah	Sistem Informasi Pelaporan Pajak Daerah untuk manajemen pelaporan piutang pajak, realisasi, surat tagihand an surat teguran
Progress: Aplikasi berjalan di server dan jaringan lokal BPPD		
14. E-SPTPD	Badan Pelayanan Pajak Daerah	Aplikasi untuk pelaporan omset wajib pajak setelah mendapat surat pemberitahuan secara mandiri atau self assesment
Progress: Aplikasi berjalan di server dan jaringan lokal BPPD		
15. SIAP TARIK (Sistem Informasi Antrian Puskesmas)	Puskesmas Tarik	Aplikasi antrian pasien di Puskesmas Tarik berbasis mobile apps Android
Progress: Aplikasi sudah berjalan sejak tahun 2017. Berbasis android dan sudah tersedia di Google Play Store		
16. CUTI ONLINE	Badan Kepegawaian Daerah	Aplikasi untuk pengajuan cuti oleh PNS serta manajemen pengelolaannya oleh pengelola kepegawaian
Progress: Sudah live sejak awal tahun 2018 dengan alamat subdomain: cuti.sidoarjokab.go.id		
17. E-KINERJA / SKP Online	Badan Kepegawaian Daerah	Aplikasi manajemen kinerja pegawai beserta laporan dan pencatatannya yang terintegrasi baik oleh atasan langsung maupun bawahan
Progress: Sudah live sejak awal tahun 2015 dan terus mengalami peningkatan. alamat subdomain: skp.sidoarjokab.go.id		
18. SIPJAKI	Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah	Apliakasi pengelolaan jasa kontruksi
Progress: Aplikasi belum diserahkan ke Dinas Kominfo.		

19. EKRAV (Ekonomi Kreatif)	Bagian Pembangunan & SDA Sekretariat Daerah	Aplikasi yang mencatat seluruh pelaku ekonomi di kabupaten Sidoarjo dan memeringkatkannya berdasarkan volume produksinya
Progress: Sudah live sejak awal tahun 2018 dengan alamat subdomain: ekraf.sidoarjokab.go.id		
20. INKAM RS	Rumah Sakit Umum Daerah	Aplikasi internal untuk petugas medis di RSUD dalam pengelolaan kamar pasien
Progress: Aplikasi berjalan di server dan jaringan lokal RSUD. Aplikasi sudah didaftarkan di layanan Kementerian Kominfo dengan nilai capaian 100%		
21. REMICS	Rumah Sakit Umum Daerah	Aplikasi internal untuk petugas medis di RSUD dalam pengelolaan rekam medis pasien
Progress: Aplikasi berjalan di server dan jaringan lokal RSUD. Aplikasi sudah didaftarkan di layanan Kementerian Kominfo dengan nilai capaian 100%		
22. SANTRI	Rumah Sakit Umum Daerah	Aplikasi internal untuk petugas medis di RSUD dalam pengelolaan antrian pasien berbasis layanan SMS
Progress: Aplikasi berjalan di server dan jaringan lokal RSUD. Aplikasi sudah didaftarkan di layanan Kementerian Kominfo dengan nilai capaian 90% Memanfaatkan fitur SMS Gateway dan pada pengembangannya tahun 2018 telah dibuat versi Androidnya.		
23. E-PERPUS	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sistem Informasi Perpustakaan berbasis web yang mengatur tentang pendaftaran anggota baru, jumlah pengunjung, peminjaman, jumlah buku, catalog online secara terintegrasi
Progress: Sudah live sejak awal tahun 2018 dengan alamat subdomain: e-perpus.sidoarjokab.go.id		
24. Sistem Pengujian Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	Aplikasi untuk memudahkan petugas Dishub dalam menguji KIR kendaraan bermotor
Progress: Aplikasi berjalan di server dan jaringan lokal Dinas Perhubungan.		

Aplikasi sudah didaftarkan di layanan Kementerian Kominfo dengan nilai capaian 90%		

Pengajuan Aplikasi 2018 [Tribulan 1]

NAMA APLIKASI	OPD	FUNGSI APLIKASI
1. E-SURAT	Bagian Umum Sekretariat Derah	Aplikasi untuk mempermudah pengelolaan surat-menyurat di lingkungan Sekretariat Daerah
Progress: Aplikasi masih dalam tahap pengujian di seksi aplikasi, sedang ada kendala di implementasi database. Saat ini sedang dikoordinasikan dengan rekanan Bagian Umum terkait kendala tersebut diatas.		
2. Pengaduan Online DLHK	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Aplikasi pengaduan oleh DLHK yang fokus menangani laporan gangguan PJU, pertamanan dan lainnya sesuai kewenangan yang dimiliki OPD
Progress: Aplikasi belum diserahkan ke Dinas Kominfo. Sesuai dengan pembahasan bisnis proses, aplikasi berjalan di Android.		
3. Si Cantik	Dinas Kesehatan	Sistem informasi untuk memudahkan rujukan bagi ibu melahirkan agar mendapatkan pelayanan secepat mungkin guna mencegah kematian ibu dan anak
Progress: Aplikasi belum diserahkan ke Dinas Kominfo. Namun sudah digunakan oleh tenaga kesehatan. Saat ini sedang dikoordinasikan pemindahan server ke Dinas Kominfo.		
4. Rumah Sidoarjo	Dinas Komunikasi dan Informatika	Merupakan aplikasi induk/*dashboard* yang mengakomodir seluruh aplikasi dalam suatu sistem terintegrasi

Progress: Aplikasi sudah tersedia di Play Store dan berjalan di Android. Namun ada kendala terkait pengembangan menu/fitur dan proses integrasi lintas instansi.		
5. SIOKO (Sistem Informasi Online Kamar Operasi)	Rumah Sakit Umum Daerah	Sistem informasi internal untuk petugas medis dalam mengelola kamar operasi
Progress: Aplikasi berjalan di server dan jaringan lokal RSUD		
6. Dataku	Dinas Komunikasi dan Informatika	Aplikasi yang mendukung ketersediaan data dari berbagai entitas terkait dengan Kabupaten Sidoarjo
Progress: Sudah live sejak awal tahun 2018 dengan alamat subdomain: dataku.sidoarjokab.go.id		
7. SKPL	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Aplikasi penilaian pelaporan status kinerja pengelolaan lingkungan hidup
Progress: Aplikasi belum diserahkan ke Dinas Kominfo.		

Pengajuan Aplikasi 2018 [Tribulan 2]

NAMA APLIKASI	OPD	FUNGSI APLIKASI
1. POSIKANDU	Dinas Perikanan	Aplikasi untuk mengukur kejernihan air bagi pertumbuhan ikan
Progress: Sudah live sejak awal tahun 2018 dengan alamat subdomain: usper.sidoarjokab.go.id		
2. SISDA	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pengumpulan data untuk mencatat database perindustrian di Kabupaten Sidoarjo
Progress: Aplikasi belum diserahkan ke Dinas Kominfo karena belum selesai dibangun.		
3. Integrasi KGB dengan SIM Gaji	Badan Kepegawaian Daerah	Diharapkan dengan integrasi kedua aplikasi ini dapat membuat laporan gaji user/PNS langsung

		ter-*update* secara otomatis di SIM Gaji setelah mendapat Kenaikan Gaji Berkala
Progress: Aplikasi belum diserahkan ke Dinas Kominfo karena belum selesai dibangun.		
4. TUKUO LOCAL tukuo2.sidoarjokab.go.id	Dinas Koperasi & UMKM	Merupakan *market place* untuk para pelaku UMKM memasarkan produk-produknya dan sekaligus mencatat transaksi jual beli antara penjual dan pembeli dalam suatu sistem berbasis web
Progress: Sudah live sejak awal tahun 2019 dengan alamat subdomain: tukuo.sidoarjokab.go.id		
5. TAKESI (Tata Kelola Surat Dengan Aplikasi)	Kecamatan Taman	Pengelolaan surat menyurat di lingkungan Kecamatan selama ini belum terkomputerisasi, masih manual, aplikasi Takesi diharapkan mempermudah pengguna dalam pengelolaan surat masuk maupun surat keluar
Progress: Aplikasi belum diserahkan ke Dinas Kominfo dan berjalan di server mandiri kecamatan.		
6. E-PATEN	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Pelayanan administrasi terpadu kecamatan, yaitu aplikasi yang mencakup seluruh produk layanan di kecamatan
Progress: Aplikasi masih dalam tahap pengujian di seksi aplikasi dan seksi keamanan informasi. Saat ini terkendala dengan adanya temuan di sisi keamanan informasi dan masih dalam perbaikan oleh konsultan.		
7. REKAP TPP	Bagian Umum Sekretariat Daerah	Rekap TPP adalah aplikasi untuk mempercepat dan mempermudah penghitungan skor kehadiran maupun pencatatan harian aktivitas untuk memudahkan pengguna dalam mendapatkan laporan rekapitulasinya
Progress: Aplikasi belum diserahkan ke Dinas Kominfo.		

8. Tata Ruang & Advise Plan	Bagan Perencanaan Pembangunan Daerah	Aplikasi layanan permohonan untuk tata ruang dan advise plan
Progress: Aplikasi belum diserahkan ke Dinas Kominfo.		

Pengajuan Aplikasi 2018 [Tribulan 3]

NAMA APLIKASI	OPD	FUNGSI APLIKASI
1. E-PARLEMEN	Sekretariat DPRD	Aplikasi online yang mencakup informasi tentang Mata Delta, perundang-undangan dan kegiatan DPRD
Progress: Aplikasi belum diserahkan ke Dinas Kominfo.		
2. Registrasi Pendaftaran Seleksi Penerimaan CPNS, Pengembangan Sipekat dan Pengembangan SKP	Badan Kepegawaian Daerah	Aplikasi untuk mempermudah proses seleksi penerimaan CPNS dan rencana pengembangan aplikasi Sipekat dan SKP
Progress: Aplikasi belum diserahkan ke Dinas Kominfo.		
3. Berkas Mlaku Dhewe (BMW) Kecamatan Krian	Kecamatan Krian	Replikasi dari aplikasi BMW Sukodono, untuk mempermudah pelayanan di Kecamatan Krian
Progress: Aplikasi belum diserahkan ke Dinas Kominfo dan berjalan di server mandiri kecamatan.		
4. Rencana Operasional Program Kegiatan LIVE ropk.sidoarjokab.go.id	Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah	Untuk mempermudah pencatatan program-program kegiatan daerah dan pelaporannya
Progress: Sudah live sejak awal tahun 2018 dengan alamat subdomain: ropk.sidoarjokab.go.id		
5. Elektronik Rencana Pelaksanaan Pengadaan / E-RPP	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	Untuk mempermudah pencatatan aktivitas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
Progress: Aplikasi belum diserahkan ke Dinas Kominfo.		
6. Sistem Informasi Kearsipan / SEMAR LIVE semar.sidoarjokab.go.id	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sistem Informasi manajemen kearsipan di OPD, untuk mencatat aktivitas pengelolaan arsip

Progress: Sudah live sejak awal tahun 2019 dengan alamat subdomain: semar.sidoarjokab.go.id		
7. E-Dagulir LOCAL dagulir2.sidoarjokab.go.id	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Aplikasi Dana Bergulir berfungsi untuk memfasilitasi kredit bagi masyarakat Sidoarjo dengan syarat dan ketentuan berlaku. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro bekerja sama dengan Bank Jatim dalam proses pencairan kredit.
Progress: Sudah live sejak awal tahun 2019 dengan alamat subdomain: dagulir.sidoarjokab.go.id		
8. E-BPHTB LIVE bphtb.pajakdaerah.sidoarjokab.go.id	Badan Pelayanan Pajak Daerah	Aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mengelola permohonan Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan secara online.
Progress: Sudah live sejak tahun 2018 dengan alamat subdomain: bphtb.pajakdaerah.sidoarjokab.go.id		
9. Aplikasi Arsip	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Aplikasi yang memfasilitasi pengelolaan surat menyurat di internal Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Aplikasi berjalan di jaringan lokal dan berbasis web.
Progress: Aplikasi belum diserahkan ke Dinas Kominfo.		
10. Website Investasi LIVE investasi.sidoarjokab.go.id	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Website yang mengedepankan informasi tentang prosedur dan tata cara berinvestasi di Kabupaten Sidoarjo
Progress: Sudah live sejak tahun 2018 dengan alamat subdomain: investasi.sidoarjokab.go.id		
11. Aplikasi SKPL Online	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Aplikasi online untuk mempermudah dan mempercepat pemrosesan data program penilaian Status Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (SKPL) di Kabupaten Sidoarjo.

Progress: Aplikasi belum diserahkan ke Dinas Kominfo.		

Pengajuan Aplikasi 2018 [Tribulan 4]

NAMA APLIKASI	OPD	FUNGSI APLIKASI
1. Aplikasi Santri Andoid	Rumah Sakit Umum Daerah	Aplikasi antrian untuk calon pasien berbasis android yang akan melakukan pemeriksaan/penanganan medis di RSUD Kabupaten Sidoarjo.
Progress: Aplikasi sudah berjalan sejak tahun 2018. Berbasis android dan sudah tersedia di Google Play Store		
2. SEMeS	Rumah Sakit Umum Daerah	Manajemen pelayanan kegawatdaruratan di RSUD Kabupaten Sidoarjo yang berbasis layanan call center.
Progress: Aplikasi belum diserahkan ke Dinas Kominfo.		
3. Sistem Informasi Ijin Penelitian Online (SI-IPIN) LIVE Sidali.sidoarjokab.go.id	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Aplikasi untuk mengakomodasi pengurusan ijin penelitian oleh mahasiswa, dosen maupun masyarakat umum
Progress: Sudah live sejak tahun 2018 dengan alamat subdomain: sidali.sidoarjokab.go.id		
4. SMI Layanan E-Sedot Tinja	Dinas Perumahan dan Permukiman	Aplikasi untuk memudahkan proses pelayanan sedot lumpur tinja baik bagi internal pemerintahan maupun bagi pelanggan/masyarakat
Progress: Aplikasi belum diserahkan ke Dinas Kominfo.		
5. Aplikasi Antrian	BPPD	Untuk mendukung pengelolaan pajak daerah
Progress: Aplikasi belum diserahkan ke Dinas Kominfo.		
6. Tanda tangan digital	BPPD	Untuk mendukung pengelolaan pajak daerah

Progress: Aplikasi belum diserahkan ke Dinas Kominfo.		
7. Dashboard pajak	BPPD	Untuk mendukung pengelolaan pajak daerah
Progress: Aplikasi belum diserahkan ke Dinas Kominfo.		
8. Sidira (Sidoarjo Information Digital Library) LIVE Sidira.sidoarjokab.go.id	Dinas Perpustakaan & Kearsiapan	Sistem informasi tentang Kabupaten Sidoarjo dalam bentuk digital
Progress: Sudah live sejak awal tahun 2019 dengan alamat subdomain: sidira.sidoarjokab.go.id		
9. Aplikasi Smart Visitor Management dan Aplikasi Sirasa (Sistem Informasi Rawat Sarana Prasarana)	Bagian Umum Setda	Aplikasi untuk pengelolaan layanan pengunjung yang memerlukan pencatatan dan aplikasi untuk pengelolaan inventarisasi sarana dan prasarana terkait tupoksi Bagian Umum.
Progress: Aplikasi belum diserahkan ke Dinas Kominfo.		
10. Aplikasi Pengajuan TPP dan Uang Makan	Bagian Umum Setda	Aplikasi untuk pengelolaan pengajuan TPP dan Uang Makan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo
Progress: Aplikasi belum diserahkan ke Dinas Kominfo.		
11. Aplikasi antrian online dan pengelolaan surat LOCAL antrian.disdukcapil.sidoarjokab.go.id skm.disdukcapil.sidoarjokab.go.id	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Aplikasi untuk pengelolaan antrian berbasis online dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar.
Progress: Untuk aplikasi antrian, sudah live sejak awal tahun 2019 dengan alamat subdomain: antrian.disdukcapil.sidoarjokab.go.id		

3. Pengelolaan Komunikasi Publik

Untuk meningkatkan hubungan dan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan masyarakat diperlukan suatu media informasi dan komunikasi.

Semakin banyak media informasi dan komunikasi yang tersedia diharapkan akan semakin baik hubungan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakatnya.

Bentuk media / sarana komunikasi yang tersedia, diantaranya :

1. PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)

   Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi.

   Media komunikasinya dapat diakses secara online melalui alamat website http://ppid.sidoarjokab.go.id .

   Kegiatan – kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 dalam rangka koordinasi PPID, yaitu :

   a. Permintaan Data PPID dari LSM/Pribadi
   b. Rapat PPID
   c. PPID Award tingkat Provinsi

2. KIM (Kelompok Informasi Masyarakat)

   Media komunikasi tersebut bertujuan menunjang kelancaran komunikasi antar anggota dan pengurus kelompok informasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna informasi yang ada.

   Sedangkan pada tahun 2017 telah diadakan kegiatan dalam rangka media komunikasi, yaitu :

   a. Pameran KIM diadakan Provinsi
   b. Pembinaan KIM (1 Tahun 2 kali)

3. P3M (Pusat Pelayanan Pengaduan Masyarakat)

   Pusat Pelayanan Pengaduan Masyarakat (P3M) berfungsi menerima, melaporkan dan menindaklanjuti pengelolaan pengaduan.

   Media komunikasinya dapat diakses secara online melalui alamat website http://p3m.sidoarjokab.go.id .

Berdasarkan laporan aduan yang ada sebanyak 410 aduan dilaporkan oleh masyarakat dan sebanyak 390 aduan telah ditindaklanjuti atau sekitar 95% sedangkan pengaduan yang belum di respon sebanyak 20 pengaduan.

Pada Agustus 2017 dibentuk Forum Bakohumas ini dimaksudkan untuk mengakomodir pengaduan masyarakat secara langsung dan tepat sasaran.

Pengaduan Masyarakat yang dari Bakohumas Jumlah yang diterima 131 aduan, yang direspon 110 aduan sekitar 83%. Selama tahun 2017 ini sudah dilakukan pengaduan masyarakat dengan melalui Media Sosial (facebook, twitter,instagram, Whatsapp).

Kedepan akan dilakukan pengembangan akses pengelolaan pengaduan lebih baik dengan upaya :

a. Optimalisasi melalui Media Sosial (facebook, twitter,instagram, Whatsapp);
b. Melalui Email.

4. LAPOR! SPAN

   LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) adalah sebuah sarana aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial yang mudah diakses dan terpadu dengan 81 Kementerian/Lembaga, 5 Pemerintah Daerah, serta 44 BUMN di Indonesia. LAPOR! dikembangkan oleh Kantor Staf Presiden dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pengawasan program dan kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik.

   LAPOR! diinisiasikan oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP) dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus interaksinya dengan pemerintah dalam rangka pengawasan program pembangunan dan pelayanan publik.

   Hingga April 2015, LAPOR! telah digunakan oleh lebih dari 290.000 pengguna dan menerima rata-rata lebih dari 800 laporan masyarakat per harinya. LAPOR! menjadi cikal-bakal sistem aspirasi dan pengaduan masyarakat yang terpadu secara nasional. Saat ini LAPOR! SPAN Dibawah KEMENPAN-RB, dan awal tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo lewat Dinas Komunikasi dan Informatika mengimplementasikan LAPOR! kepada masyarakat.

5. Media Center merupakan lembaga strategis dalam mempublikasikan berbagai program kerja, kegiatan dan himbauan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kepada masyarakat.

Didalam mengelola media center saat ini banyak mengalami beberapa kendala diantaranya media center yang kurang maksimal karena tempat/ruangan, fasilitas kurang memadai dan hanya dimanfaatkan oleh masyarakat media.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan fungsi media center sebenarnya sebagai media komunikasi publik, adalah sebagai berikut :

a. Ruangan yang representatif sebagai ruangan media komunikasi publik bukan hanya dimanfaatkan oleh masyarakat media saja namun dapat digunakan untuk masyarakat bukan media;
b. Fasilitas media center memadai ;
c. Tersedianya data-data yang diperlukan oleh masyarakat.

6. Media Pers

Keberadaan Media Pers yang bermitra/bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dibawah koordinasi Dinas Komunikasi dan Informatika berjumlah 69, diantaranya adalah:

a. Media Cetak Harian : 13;
b. Media Cetak Mingguan/Tabloid : 22;
c. Media Online : 17;
d. Media elektronik (TV/Radio) : 17.

Disamping media tersebut diatas Dinas Komunikasi dan Informatika mengkoordinasi Radio LPPL (Suara Sidoarjo), tugas Suara Sidoarjo menyampaikan pesan kepada masyarakat atas keberhasilan pembangunan Sidoarjo.

Bentuk Kerjasama/kemitraan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan media massa sebagai berikut :

1. Pembinaan Insan Pers;
2. Jumpa Pers;
3. Advetorial;
4. Study Komparatif Insan Pers

7. Klipping dan Majalah

Dalam mendokumentasi berita harian dari berbagai media massa kami melakukan Klipping ”**Sidoarjo Hari Ini**”, di samping itu juga Dinas Komunikasi dan Informatika juga menerbitkan majalah ”**Gema Delta**” kedua media ini memberikan informasi mengenai hal-hal yang tejadi di Sidoarjo dan

Pembangunan Sidoarjo yang lebih baik. Kedua media ini diberikan kepada Semua OPD di Sidoarjo.

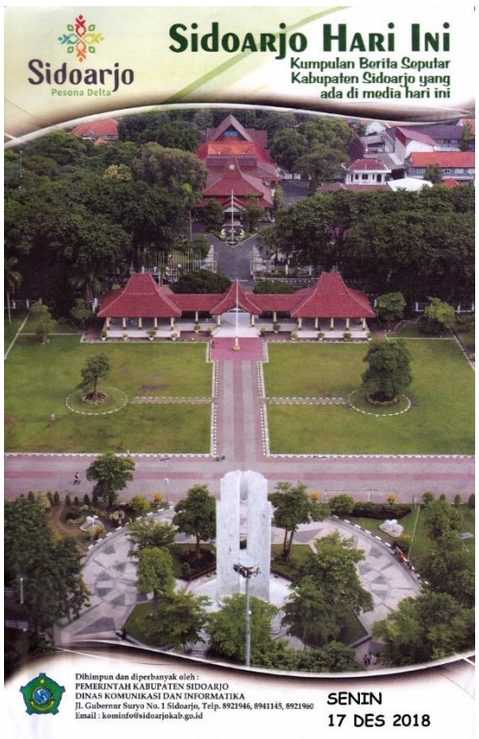

c. SKPD Penyelenggara Urusan

Penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika ini utamanya dilaksanakan oleh Dinas komunikasi dan informatika.

d. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di urusan komunikasi dan informatika berjumlah 35 orang. Secara rinci SDM penyelenggara urusan komunikasi dan informatika menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir.

Jabatan fungsional yang tersedia terdiri dari pranata komputer dan pranata hubungan masyarakat.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran (per program)

Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program sebagaimana terlampir.

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program pelayananan informasi, pemberitaan dan pengelolaan pengaduan masyarakat	Rp 1.537.540.000,00	Rp 1.422.320.000,00	92,51%
2	Program pengelolaan, fasilitasi dan implementasi teknologi informatika	Rp 790,420,000.00	Rp 630,324,700.00	79.75%

f. Proses Perencanaan

Proses perencanaan urusan komunikasi dan informatika dilaksanakan berdasarkan usulan masyarakat dan pertimbangan teknis dilakukan survei kebutuhan pemeliharaan dan peningkatan prasarana dan sarana perhubungan. Selanjutnya berdasarkan data dan permasalahan yang diperoleh dari hasil survey disusun rencana kerja.

g. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika pada Dinas komunikasi dan informatika adalah sebagaimana terlampir

17. Urusan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

a. Program

Program pembangunan untuk urusan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada tahun 2018 sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Usaha Koperasi
2. Program Peningkatan Pemanfaatan Bantuan Permodalan

b. Realisasi Pelaksanaan Program Serta Permasalahan Dan Solusinya

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program pembangunan urusan Urusan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ditunjukkan pada pencapaian, sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Usaha Mikro yang Mandiri

Usaha Mandiri merupakan usaha yang berkemampuan berdiri sendiri dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan cara berinisiatif dan bekerja keras dalam mengurus dan mengembangkan organisasi usaha, menyediakan modal, menghitung resiko, mengambil keputusan dan mempertanggungjawabkannya berdasarkan percaya kepada kemampuan diri sendiri.

Untuk menciptakan usaha mikro yang mandiri, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro telah melaksanakan berbagai macam program pemberdayaan bagi usaha mikro yang sudah ada/terbentuk, yaitu berupa :

- Pembinaan
- Pendampingan Produk dan Perijinan
- Pembiayaan
- Pemasaran

Selain pembinaan yang intens terhadap kualitas produk dan kemasan, pemasaran produk-produk usaha mikro juga menjadi kata kunci untuk melejitkan kompetensi dan daya saing usaha mikro. Untuk meningkatkan dan memperluas akses pasar produk usaha mikro, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memfasilitasi para pelaku usaha mikro melalui program sinergi temu usaha (*bussiness matching)* yaitu sebuah pertemuan bisnis antara pelaku usaha mikro dengan partner seperti toko modern, pasar swalayan dan toko oleh-oleh. *Bussiness Matching* ini dapat membantu pelaku usaha mikro makin produktif dan memperkuat sinergi dengan jejaring pasar modern sehingga akan meningkatkan omzet penjualan produk usaha mikro dan menjadi usaha mikro yang mandiri.

Perkembangan jumlah usaha mikro selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik III.B.51

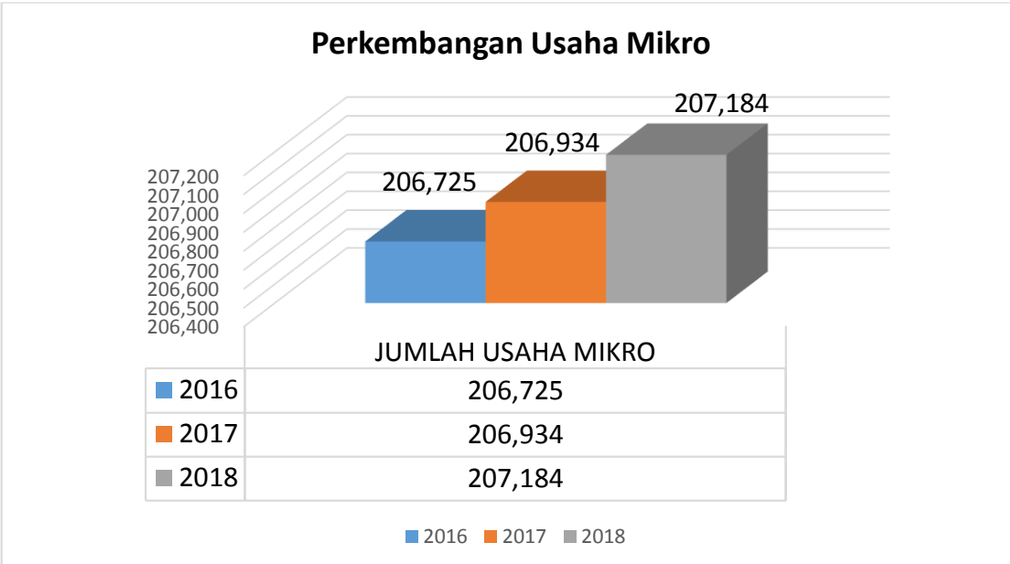

Sumber Data : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Prosentase Jumlah Usaha Mikro pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 12 % dibandingkan tahun 2017 yaitu dari 206.934 unit usaha mikro meningkat menjadi 207.184 unit usaha mikro. Lima besar kelompok usaha mikro di Kabupaten Sidoarjo meliputi :

1. Makanan dan Minuman
2. Fashion
3. Pengrajin Produk Kulit
4. Handicraft
5. Batik

Sedangkan untuk realisasi prosentase usaha mikro yang mandiri juga sedikit melampaui target yang ditentukan yaitu dari 0,73% atau sejumlah 1.510 usaha mikro mandiri menjadi 0,89% atau sejumlah 1.848 usaha mikro mandiri, yang artinya pada tahun 2018 ada peningkatan jumlah usaha mikro yang mandiri sebesar 338 usaha mikro.

Pencapaian target ini diperoleh melalui kegiatan berupa :

1. Pembinaan dan Pemberdayaan Usaha Mikro
2. Pelatihan Kewirausahaan
3. Pemagangan
4. Pendampingan

5. Mengikutsertakan usaha mikro dalam kegiatan pameran baik di dalam daerah maupun luar daerah

2. Sertifikasi Usaha Mikro

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang menyatakan bahwa semua profesi wajib bersertifikasi termasuk usaha mikro, maka untuk meningkatkan kompetensi Usaha Mikro dalam menghadapi era globalisasi, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memfasilitasi uji kompetensi bagi usaha mikro.

Sertifikasi kompetensi usaha mikro merupakan proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional yang diubah dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional.

Perkembangan jumlah usaha mikro yang bersertifikasi selama tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Grafik III.B.52

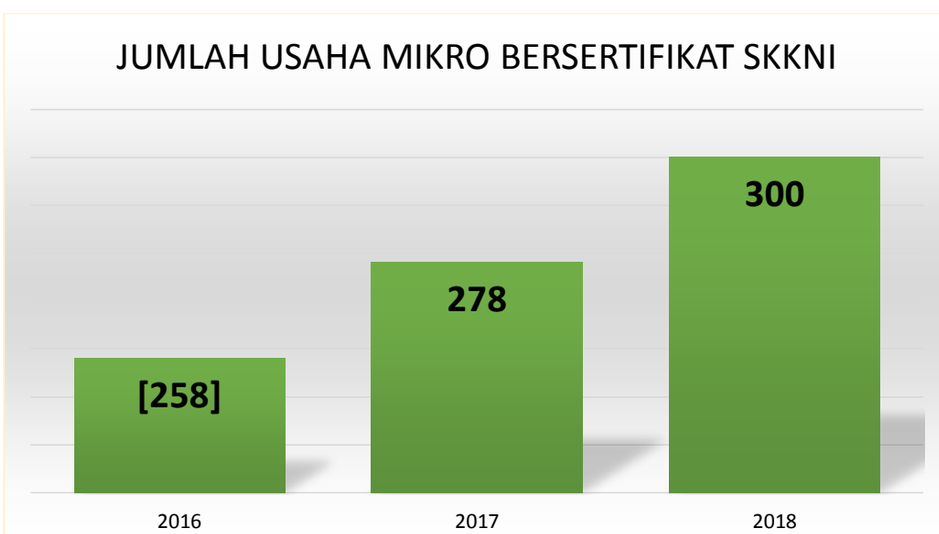

Sumber Data : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Pada tahun 2018 jumlah usaha mikro yang dinyatakan lulus uji sertfikasi kompetensi di bidang wirausaha mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017 yaitu dari 278 usaha mikro menjadi 300 usaha mikro.

3. Pencetakan Wirausaha Baru

Wirausaha Baru merupakan upaya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk menumbuhkan usaha mikro yang mandiri dan mengembangkan kewirausahaan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi ketrampilan dan kemandirian berusaha yang dapat membangkitkan potensi lokal dan siap menghadapi daya saing global serta untuk menjawab permasalahan yang dihadapi mulai dari tingkat pengangguran, tingkat kesejahteraan dan tingkat kemiskinan.

Pencetakan wirausaha baru mulai dilakukan pada tahun 2017 dengan target sasarannya adalah masyarakat baik mahasiswa, pelajar dan pemuda maupun masyarakat yang sudah mempunyai usaha (minimal 1 tahun).

Tujuan pencetakan wirausaha baru ini antara lain :

1. Mendorong dan memacu motivasi untuk berwirausaha.
2. Menciptakan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif sebagai bekal dalam berwirausaha.
3. Membangun kemandirian dan daya saing dalam berwirausaha.
4. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang mampu menciptakan kesempatan kerja bagi dirinya sendiri maupun orang lain.
5. Memberikan kontribusi dalam meningkatkan perekonomian daerah.

Adapun proses pencetakan Wira Usaha Baru sebagai berikut :

1. Rekruitmen Calon Peserta yang dilakukan secara online/offline, seleksi dan penetapan.
2. Pelatihan Kewirausahaan
3. Pemagangan
4. Pendampingan
5. Promosi/Pameran/Pemasaran

Tahun 2018 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro telah mencetak wirausaha baru sebanyak 300 wira usaha baru. Dalam pelaksanaan untuk pencetakan wirausaha baru, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menggandeng akademisi, pelaku usaha dan komunitas.

4. Persentase Koperasi yang berkualitas

Koperasi berkualitas adalah koperasi yang memiliki kinerja baik dalam bidang kelembagaan, usaha, keuangan serta bermanfaat bagi anggota sebagai badan hukum aktif dan badan usaha yang dicirikan oleh prinsip-prinsip kohesivitas dan partisipasi anggota yang kuat dengan kinerja usaha yang semakin sehat dan berorientasi kepada usaha anggota serta memiliki kepedulian sosial.

Parameter yang menjadi dasar koperasi berkualitas adalah apabila memenuhi 5 (lima) aspek yang terdiri dari :

1. Aspek Kelembagaan Koperasi, meliputi legalitas badan hukum aktif keanggotaan, kepengurusan, program kerja, standar operasional prosedur, standar operasional manajemen, peraturan khusus, rapat anggota dan karyawan, rasio peningkatan jumlah anggota serta persentase kehadiran dalam rapat anggota.
2. Aspek Usaha Koperasi, ditunjukkan dengan membaiknya keterikatan anggota terhadap anggota lain maupun terhadap organisasi dalam hal rasa tanggungrenteng atau kemauan untuk berbagi resiko (*risk sharing*), tingkat pemanfaatan pelayanan koperasi, penambahan asset, peningkatan volume usaha, peningkatan kapasitas produksi dan peningkatan keuntungan.
3. Aspek Keuangan Koperasi, ditunjukkan dengan struktur permodalan, kondisi kemampuan penyediaan dana serta ukuran-ukuran kuantitatif lainnya seperti prosentase pelunasan simpanan wajib dan prosentase besaran simpanan sukarela.
4. Aspek Manfaat Koperasi terhadap Anggota, ditunjukkan dengan meningkatkan penghasilan anggota, menawarkan barang dan jasa yang lebih murah, menumbuhkan motif berusaha yang berperikemanusiaan, menumbuhkan sikap jujur dan terbuka.
5. Aspek Manfaat Koperasi terhadap Masyarakat, ditunjukkan dengan seberapa jauh usaha yang dijalankan koperasi dapat menyerap tenaga kerja setempat serta seberapa banyak jumlah layanan koperasi yang dapat dinikmati oleh

masyarakat umum termasuk peran koperasi ikut mereduksi kemiskinan masyarakat setempat.

5. Persentase Koperasi Aktif

Koperasi yang aktif tentunya telah memiliki legalitas yang lengkap dan jelas dari pemerintah seperti memiliki nomer induk koperasi (NIK), Surat Keputusan Anggaran Dasar oleh Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia oleh Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dan dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota.

Koperasi aktif mendukung parameter koperasi berkualitas dari sisi aspek badan usaha aktif.

Realisasi persentase koperasi aktif pada tahun 2018 sedikit melampaui target yang ditentukan yaitu sebesar 88,03% dimana sebanyak 1289 unit koperasi dinyatakan masih aktif beroperasi dari 1.462 unit koperasi. Jika dibandingkan dengan tahun 2017 maka persentase koperasi aktif terjadi sedikit peningkatan sebesar 0,14% yaitu dari 88,17% atau sejumlah 1.287 koperasi menjadi 89,14% atau sejumlah 1.289 koperasi yang artinya pada tahun 2018 ada peningkatan jumlah koperasi aktif sebesar 2 koperasi. Target prosentase koperasi aktif tahun 2018 dapat dicapai melalui kegiatan berupa Revitalisasi Koperasi.

Perkembangan prosentase koperasi aktif selama tiga tahun terakhir, terlihat pada grafik berikut :

Grafik III.B.53

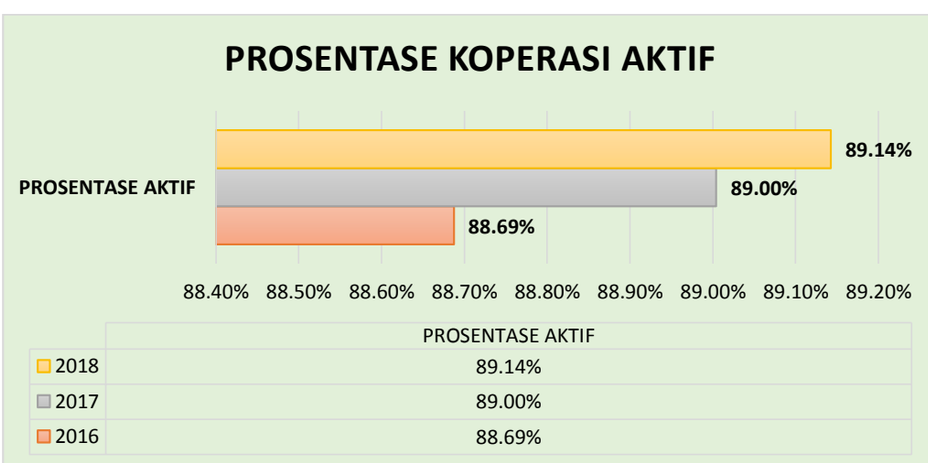

Sumber Data : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Perkembangan jumlah koperasi aktif dan tidak aktif selama tiga tahun terakhir, terlihat pada grafik berikut :

Grafik III.B.54

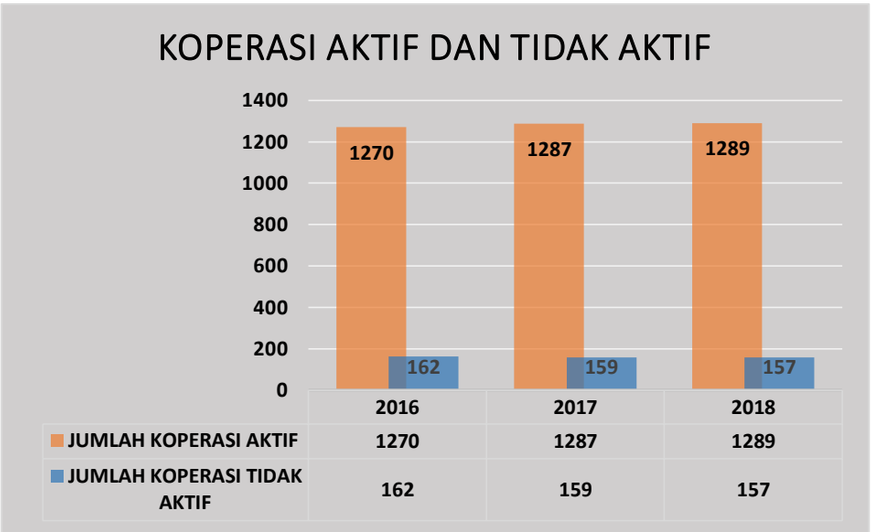

Sumber Data : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

6. Persentase Koperasi Sehat

Koperasi yang sehat dapat dilihat dari berbagai segi. Selain telah memiliki legalitas yang lengkap dan jelas dari pemerintah tentunya koperasi yang sehat juga mengupayakan sehat secara organisasi, mental dan usaha. Sehat organisasi dilihat dari rapat anggota dan badan pengurus yang optimal, sehat mental dilihat dari tanggung jawab para anggota dan badan pengurus serta adanya aktivitas maupun kegiatan pengabdian pada masyarakat, sedangkan sehat usaha dilihat dari pengelolaan koperasi yang berlandaskan azas serta prinsip-prinsip dasar koperasi.

Berdasarkan Peraturan Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi maka koperasi wajib dinilai kesehatannya setiap tahunnya. Adapun penilaian kesehatan koperasi dilakukan terhadap aspek sebagai berikut :

1. Permodalan
2. Kualitas Aktiva Produktif
3. Manajemen

4. Efisiensi
5. Likuiditas
6. Kemandirian dan Pertumbuhan
7. Jatidiri Koperasi

Koperasi sehat mendukung parameter koperasi berkualitas dari sisi aspek usaha koperasi, aspek keuangan koperasi, aspek manfaat koperasi terhadap anggota, aspek manfaat koperasi terhadap masyarakat.

Perkembangan jumlah koperasi sehat selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik III.B.55

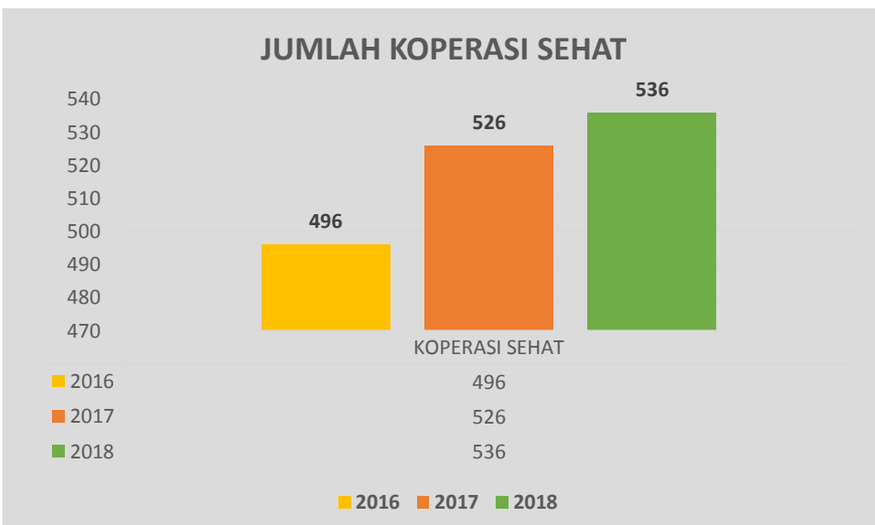

Sumber Data : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Jika dibandingkan dengan tahun 2017, realisasi persentase koperasi sehat pada tahun 2018 terjadi peningkatan target yaitu dari 36,38% atau sejumlah 526 koperasi menjadi 36,66% atau sejumlah 536 koperasi. Hal ini berarti ada peningkatan jumlah koperasi sehat sebesar 10 koperasi. Target prosentase koperasi sehat tahun 2018 dapat dicapai melalui kegiatan berupa :

1. Pembinaan, Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Koperasi
2. Monitoring dan Evaluasi Koperasi

Dalam mendukung capaian Indikator Koperasi Sehat dan Aktif tersebut dapat dilihat dari indikator-indikator dukungan sebagai berikut :

a. Pertumbuhan Koperasi

Pertumbuhan koperasi didasarkan pada peran anggota di dalam koperasi. Pertumbuhan jumlah anggota yang terus meningkat didukung dengan tingginya partisipasi anggota untuk menyimpan dan dipergunakan kembali oleh anggota akan semakin meningkatkan jumlah modal untuk memenuhi kebutuhan usaha dan kegiatan operasional sehari –hari. Perkembangan jumlah anggota koperasi selama tiga tahun terakhir terangkum pada grafik berikut ini :

Grafik III.B.56

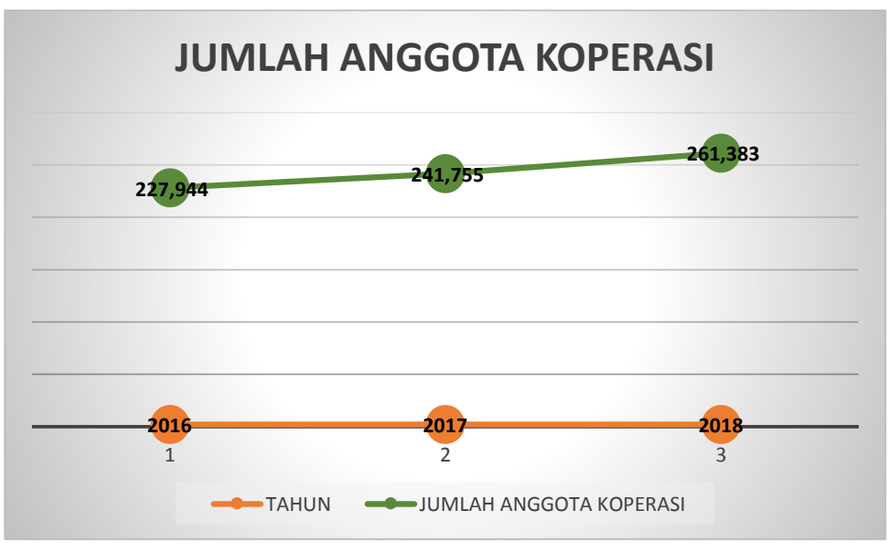

Sumber Data : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Jumlah anggota pada tahun 2017 sebanyak 241.755 anggota menjadi 261.383 ditahun 2018 atau terjadi peningkatan sebanyak 19.628 anggota yang tersebar di seluruh koperasi yang ada di Kabupaten Sidoarjo.

b. Meningkatnya Jumlah Modal Koperasi

Permodalan merupakan salah satu input usaha koperasi. Semakin besar modal koperasi semakin tinggi kemampuan koperasi melakukan ekspansi usaha. Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal luar/pinjaman.

Perkembangan jumlah modal koperasi selama tiga tahun terakhir terangkum pada grafik berikut ini :

Grafik III.B.57

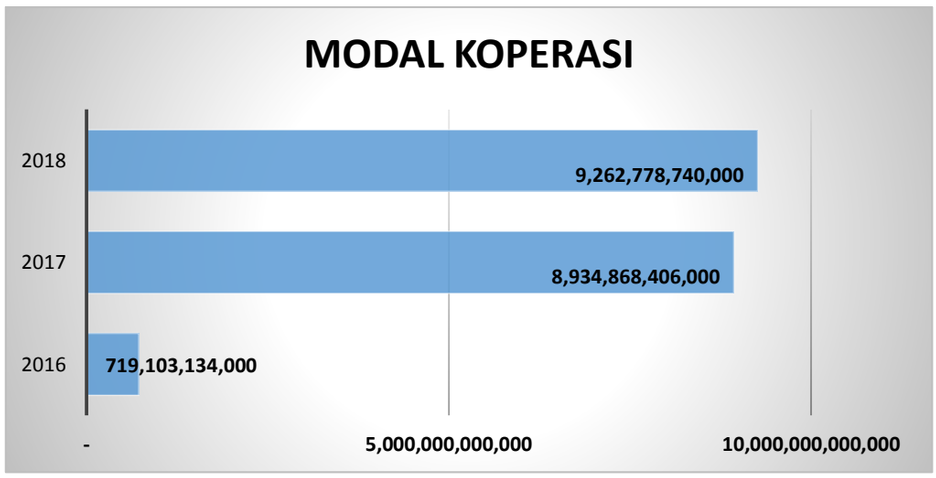

Sumber Data : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Realisasi jumlah modal koperasi pada tahun 2018 meningkat dibanding tahun 2017 dari Rp.8.934.868.406.000 menjadi Rp.9.262.778.740.000.

Kenaikan modal sudah pasti akan lebih besar dari kenaikan SHU, karena SHU merupakan salah satu komponen dari modal sendiri selain simpanan pokok, simpanan wajib, donasi/hibah maupun cadangan resiko dan pinjaman bank serta titipan uang dari anggota pada koperasi (modal luar).

c. Meningkatnya Jumlah Volume Usaha Koperasi

Volume usaha koperasi merupakan total seluruh transaksi usaha yang bersumber dari anggota. Volume usaha berkaitan dengan skala ekonomi, semakin besar volume usaha suatu koperasi berarti semakin besar potensinya sebagai perusahaan, sehingga dapat memberikan pelayanan dan jasa yang lebih baik kepada para anggota. Sejalan dengan identitas koperasi yang menyatakan bahwa anggota dan pelanggan adalah orang yang sama, maka volume usaha terutama harus berasal dari jasa anggota. Loyalitas dan partisipasi aktif anggota sangat menentukan besarnya volume usaha koperasi khususnya yang berasal dari anggota. Berikut ini perkembangan jumlah volume usaha koperasi selama tiga tahun terakhir terangkum pada grafik :

Grafik III.B.58

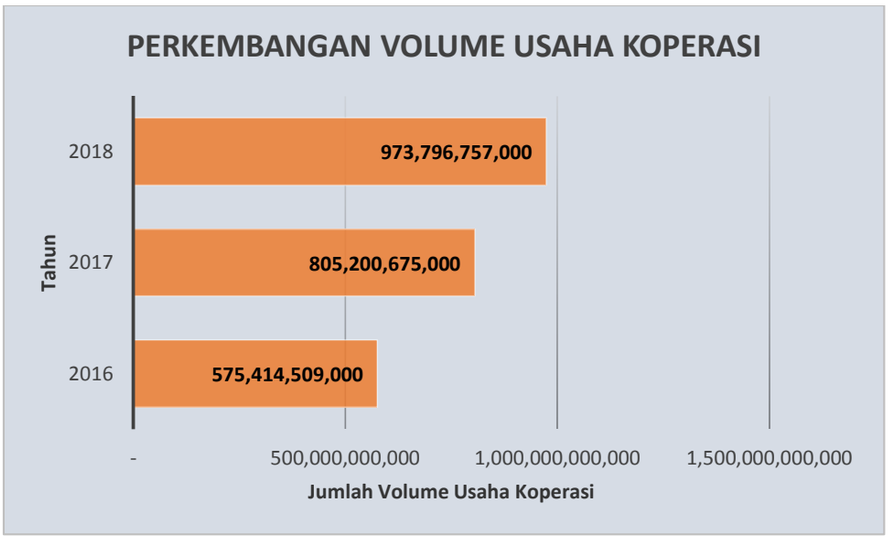

Sumber Data : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Realisasi jumlah volume usaha koperasi pada tahun 2018 meningkat dibanding tahun 2017 dari Rp.805.200.675.000 menjadi Rp.973.796.757.000. Kenaikan volume usaha koperasi menunjukkan bahwa usaha dan pendapatan koperasi yang ada di Kabupaten Sidoarjo telah berkembang. Hal ini juga tidak lepas dari pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro melalui pelaksanaan bimbingan teknis antara lain bintek kelembagaan, bintek usaha, bintek pembentukan wirausaha baru.

c. SKPD Penyelenggara Urusan

Urusan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilaksanakan SKPD yaitu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

d. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di urusan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berjumlah 39 orang. Secara rinci SDM penyelenggara urusan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir. Sedangkan untuk ketersediaan jabatan fungsional tidak ada untuk urusan ini.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran (per program)

Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program sebagaimana terlampir.

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Rp 1.097.052.500,00	Rp 1.062.304.275,00	96,83%
2	Pemberdayaan dan Pengembangan, Usaha Koperasi dan Usaha Mikro	Rp 9.495.532.000,00	Rp 9.233.566.900,00	97,24%
3	Program Pengendalian dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro	Rp 564.304.000,00	Rp 553.637.050,00	98,11%

f. Proses Perencanaan

Proses perencanaan urusan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilaksanakan dengan identifikasi kebutuhan dan perkembangan teknologi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan yakni perguruan tinggi dan pakar telekomunikasi, LSM serta diawali dengan rapat kerja dinas dan jajaran kecamatan, musrenbang desa, serta musrenbang kecamatan, sebagai bahan penyusunan Renja SKPD.

g. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adalah sebagaimana terlampir

18. Urusan Penanaman Modal

a. Program

Program pembangunan untuk urusan penanaman modal yang dilaksanakan pada tahun 2018 adalah :

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
3. Program Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan

b. Realisasi Pelaksanaan Program Serta Permasalahan Dan Solusinya

Hasil pelaksanaan program Urusan penanaman modal ditunjukkan pada pencapaian Meningkatnya investasi daerah, sebagai berikut :

Investasi menjadi hal penting karena merupakan modal utama dalam menggerakkan potensi-potensi ekonomi vang dimiliki oleh suatu daerah.

Salah satu ukuran untuk mengetahui tingginya investasi daerah adalah dengan menghitung pertumbuhan nilai investasi daerah tahun berjalan dengan nilai investasi daerah tahun sebelumnya.

Perkembangan pertumbuhan nilai investasi Kabupaten Sidoarjo terlihat pada grafik berikut :

Grafik III.B.59

Perkembangan Nilai Investasi Daerah

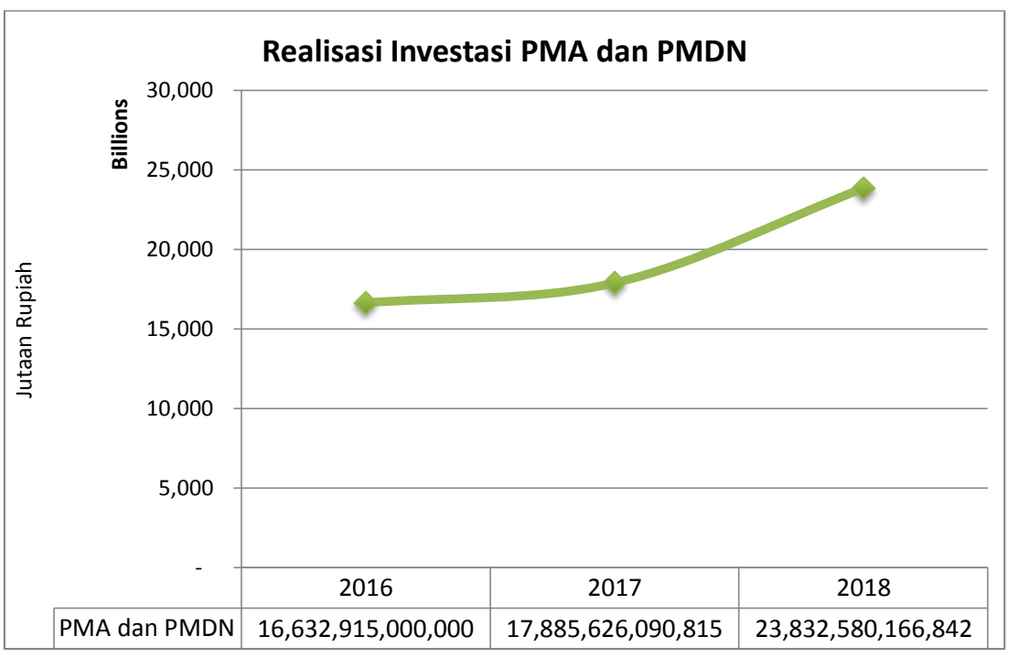

	2016	2017	2018
PMA dan PMDN	16,632,915,000,000	17,885,626,090,815	23,832,580,166,842

Sumber Data : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Sidoarjo

Nilai investasi tersebut didalamnya termasuk investasi PMA dan investasi PMDN. Pada tahun 2018 terealisasi sebesar Rp.23.832.580.166.842,00 atau 140,48% dari target yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar Rp.16.965.413.000.000,00 dan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar Rp.17.885.626.090.815,89 terjadi peningkatan sebesar Rp.6.867.167.166.842,00 (38,94%).

Upaya untuk meningkatkan pertumbuhan investasi daerah, yaitu :

1) Peningkatan kualitas dan penambahan jumlah sarana prasarana penunjang pelayanan perijinan dan penanaman modal.
2) Optimalisasi pelayanan perijinan online sehingga mempercepat waktu penyelesaian dan menghemat biaya.
3) Pengembangan pelayanan perijinan berbasis system online, sehingga efisien dan akmulasi database terukur.
4) Mengintensifkan fungsi koordinasi dan konsultasi di Internal Organisasi maupun OPD teknis terkait, sehingga proses pemberian pelayanan perijinan dan penanaman modal menjadi lebih baik sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.
5) Optimalisasi kegiatan sosialisasi, Workshop/Gathering Promosi pelayanan perijinan dan penanaman modal sehingga tepat sasaran, termasuk keikutsertaan dalam pameran promosi investasi dan pelayanan public secara rutin, sehingga menarik minat investor dalam dan luar negeri untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Sidoarjo.

c. SKPD Penyelenggara Urusan

Urusan penanaman modal dilaksanakan oleh OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

d. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di urusan penanaman modal berjumlah 51 orang. Secara rinci SDM penyelenggara urusan penanaman modal menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir.

Sedangkan untuk jabatan fungsional terdapat jabatan pranata komputer dan arsiparis

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran (per program)

Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program sebagaimana terlampir.

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Rp 1.909.921.200,00	Rp 1.688.121.237,00	88,39%
2	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Rp 624.810.000,00	Rp 547.274.650,00	87,59%
3	Program Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Rp 189.475.000,00	Rp 147.238.500,00	77,71%

f. Proses Perencanaan

Proses perencanaan urusan penanaman modal dilaksanakan melalui hasil survey untuk mengetahui kualitas dari pelayanan terpadu satu pintu.

g. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan penanaman modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagaimana terlampir

19. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

a. Program

Program pembangunan yang dilaksanakan untuk urusan ini pada tahun 2017 adalah :

1. Program peningkatan peran serta kepemudaan
2. Program Pelayanan Pemanfaatan Fasilitas Keolahragaan
3. Program Peningkatan peran serta dan pemberdayaan keolahragaan

b. Realisasi Pelaksanaan Program Serta Permasalahan Dan Solusinya

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program pembangunan urusan kepemudaan dan olahraga, sebagai berikut :

1. Jumlah Prestasi Pemuda yang Diperoleh di Tingkat Regional, Nasional dan Internasional

Indikator ini mengukur tingkat keberhasilan pembinaan pemuda di Kabupaten Sidoarjo dengan menghitung jumlah pemuda yang berprestasi pada berbagai bidang di skala Regional, Nasional atau Internasional.

Pencapaian indikator ini pada tahun 2018 sebanyak 22 prestasi, tercapai 130 % dari target RPJMD sebanyak 10 prestasi.

Capaian indikator ini meningkat 10 prestasi dibandingkan dengan tahun 2017 sebanyak 9 prestasi.

Rincian prestasi tahun 2018 tersebut antara lain :

Tabel III.B.25

Prestasi Pemuda di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018

No	NAMA	PRESTASI	KETERANGAN
1	Nur Rahman	Paskibraka Provinsi Jawa Timur Tahun 2018	Provinsi Jawa Timur
2	Clarezza	Paskibraka Provinsi Jawa Timur Tahun 2018	Provinsi Jawa Timur
3	Yonathan Toar Sangari	Juara I Pemuda Pelopor Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018	Kabupaten Sidoarjo
		Juara I Pemuda Pelopor Provinsi Jawa Timur Bidang Inovasi	Provinsi Jawa Timur
4	Moh. Sabiqi Sulaiman	Duta Pemuda Indonesia Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 di Bangka Belitung	Nasional, Provinsi Jawa Timur.
5	Andra Pratama Julianto	Duta Pemuda Kabupaten Sidoarjo	Provinsi Jawa Timur
6	Chusnul Chotimah	Duta Pemuda Kabupaten Sidoarjo	Jawa Timur
7	Raden Bagus Reinaldy Subiakto	Duta Pemuda Kabupaten Sidoarjo	Jawa Timur

No	NAMA	PRESTASI	KETERANGAN
8	Ajeng Adinda Putri	Duta Pemuda Kabupaten Sidoarjo	Jawa Timur
9	Hammy Dany Zakaria	Duta Pemuda Kabupaten Sidoarjo	Jawa Timur
10	Mei Rinta Sukma Firdaus	Duta Pemuda Kabupaten Sidoarjo	Jawa Timur
11	Akbar Reiki	Duta Anti Narkoba	Sidoarjo
12	Iga Rahma Azhari	Duta Anti Narkoba	Sidoarjo
13	Aliyya Zara Edwina	Duta Remaja Peduli Aids	Sidoarjo
14	M. Alifiano	Duta Remaja Peduli Aids	Sidoarjo
15	Fahri Fauzan	Duta Pariwisata Kabupaten Sidoarjo	Sidoarjo
16	Yuanita Puspita Sari	Duta Pariwisata Kabupaten Sidoarjo	Sidoarjo
17	Erinda Nabila	Duta Pariwisata Kabupaten Sidoarjo Duta Pariwisata Jawa Timur Raki Berbakat	Jawa Timur
18	Aldyan Faizal	Duta Pariwista Kabupaten Sidoarjo	Jawa Timur
19	Dwi Prasetyo	Juara I Pemuda Pelopor Kabupaten Sidoarjo Bidang : Sosial, Budaya, Pariwisata dan Bela Negara Save Street Child Sidoarjo, Gerakan Peduli Anak Jalanan dan Anak Marginal	Sidoarjo
20	Jainul Rakhmat Aripin, SE.	Juara I Pemuda Pelopor Kabupaten Sidoarjo, Bidang : Pendidikan	Sidoarjo
21	M. Habib Ali	Juara I Pemuda Pelopor Kabupaten Sidoarjo Bidang : Pengeloaan Sumber Daya	Sidoarjo

No	NAMA	PRESTASI	KETERANGAN
		Alam dan Lingkungan Mengajak dan merangkul masyarakat agar sadar terhadap kbersihan lingkungan	
22	Radhitya Probo Ratu Wagoro	Juara I Pemuda Pelopor Kabupaten Sidoarjo Bidang : Pangan = Budidaya Daun Luntas	Sidoarjo

Sumber Data : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Keberhasilan capaian indikator kinerja ini disebabkan :

1. Adanya kerjasama dan motivasi yang baik diantara Instansi dan masyarakat.
2. Tersedianya fasilitas yang mendukung untuk menjadi lebih baik.
3. Adanya pembinaan yang kompeten dibidangnya.

Untuk lebih meningkatkan prestasi pemuda akan dilakukan pembinaan yang lebih terfokus pada bidang unggulan yang terindentifikasi berpotensi meraih prestasi di tingkat Nasional.

2. Jumlah pemuda yang berwirausaha (sebagai Wira Usaha Baru, WUB)

Untuk meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan, maka pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Sidoarjo perlu dibina secara berkelanjutan, dan dibuka wawasannya mengenai wirausaha sehingga mereka mampu menciptakan lapangan kerja sendiri dan memberdayakan masyarakat yang ada di sekitarnya. Target pemuda yang berwirausaha sebagai Wira Usaha Baru (WUB) tahun 2017 sebanyak 18 orang dapat terealisasi sebanyak 18 orang atau 100%, antara lain yaitu :

1. Jonathan Toar
2. Risky
3. Simon
4. Chaca
5. Achmad Irfandi
6. Koko

7. Yusuf Hanafi
8. Muhammad Fuad
9. Ammy Yoga Prajadi
10. Devi Sholehah
11. Titania Ali
12. Nicho Priambogo

Capaian indikator ini sama2 dengan tahun 2017 sebanyak 12 orang WUB. Kenaikan capaian indikator kinerja ini disebabkan :

1. Kepedulian dari atasan kepada bawahan;
2. Adanya koordinasi yang baik dari para peserta dan pihak penyelenggara/pelaksana;
3. Tersedianya fasilitas yang mendukung kegiatan tersebut;
4. Kemampuan dari para peserta yang mampu mengikuti kegiatan.

3. Jumlah Prestasi Olahraga di tingkat Regional, Nasional dan Internasional

Pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah melakukan upaya-upaya pembinaan terhadap seluruh potensi keolahragaan yang ada. Prestasi di bidang olahraga pada tahun 2018 sebanyak 452 prestasi tercapai % dari target 150 prestasi.

Capaian indikator ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2017 sebanyak 384 prestasi. Rincian prestasi tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel III.B.26

Prestasi Olahraga di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018

No	Cabang Olah Raga	PRESTASI			
		Daerah	Provinsi	Nasional	Internasional
1	Aeromodelling	2	-	-	-
2	Anggar	-	-	-	-
3	Angkat Besi	8	-	-	-
4	Atletik	-	18	-	-
5	Basket	-	-	-	-
6	Bilyard	1	-	-	-
7	Bola Voli Indoor	-	12	-	-
8	Bola Voli Pantai	1	2	-	6

No	Cabang Olah Raga	PRESTASI			
		Daerah	Provinsi	Nasional	Internasional
9	Bulu Tangkis	26	-	-	-
10	Catur	-	11	-	-
11	Dayung	43	-	-	-
12	Gulat	-	10	-	-
13	Judo	-	13	-	-
14	Karate	-	-	-	-
15	Muaythai	-	17	-	-
16	Panahan	-	9	-	-
17	Panjat Tebing	-	13	-	-
18	Pencak Silat	-	-	-	-
19	Petanque	6	-	-	-
20	Poco-poco	1	1		-
21	Polo Air	-	-	-	-
22	Renang	-	39	-	-
23	Selam	19	24	-	-
24	Senam	1	-	1	-
25	Senam Fornas	-	-	-	-
26	Sepak Takraw	-	-	-	-
27	Sepatu Kosti Fornas	-	-	-	-
28	Sepatu Roda	84	47	-	-
29	Taekwondo	-	-	-	-
30	Tenis Lapangan	-	-	-	-
31	Tinju Amatir	4	4	4	-
32	Wushu	-	27	-	-
33	Senam	-	-	-	-
	Total	**196**	**247**	**5**	**6**

Sumber Data : Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata

Kenaikan prestasi olah raga dikarenakan :

1. Di masing-masing induk cabang olah raga (cabor) diadakan latihan yang berkesinambungan dan berlapis dan berjenjang dari pemula sampai senior;
2. Adanya sarana dan prasarana yang menunjang latihan tiap cabor yang ada di Kabupaten Sidoarjo;
3. Adanya koordinasi yang baik cabor dengan Pemerintah yang difasilitasi oleh KONI Kabupaten Sidoarjo;

4. Dengan banyaknya latih tanding ditingkat yunior dan senior maka akan meningkat prestasi atlet tiap cabor.

4. Tingkat Kepuasaan Pengunjung Fasilitas Olahraga

Untuk memasyarakatkan olahraga di masyarakat dan untuk meningkatkan prestasi olahraga yang ada di Kabupaten Sidoarjo, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyediakan sarana olahraga yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Jumlah sarana olahraga milik pemerintah tahun 2017 berjumlah tiga kawasan yaitu Kawasan Gelora Delta, Stadion Jenggolo dan Gedung Bulutangkis. Agar tujuan/sasaran yang diinginkan tercapai maka sarana dan prasarana olahraga tersebut perlu dikelola dan dipelihara dengan baik.

Pada Tahun 2018, Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo telah melakukan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pengunjung fasilitas olah raga dan hasilnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai angka sebesar 76,68 dan masuk tataran “baik”. Angka ini mengalami kenaikan dari IKM Tahun 2017 yang hanya mencapai 74,93.

Untuk ke depannya Kabupaten Sidoarjo akan terus meningkatkan kualitas pemeliharaan sarana dan prasarana olah raga sehingga bisa meningkatkan pelayanan fasilitas olah raga.

c. SKPD Penyelenggara Urusan

Urusan Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan oleh SKPD yaitu Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

d. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di urusan Kepemudaan dan Olahraga berjumlah 60 orang. Secara rinci SDM penyelenggara urusan Kepemudaan dan Olahraga menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir. Terdapat satu jabatan fungsional yaitu pranata komputer.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran (per program)

Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program sebagaimana terlampir.

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Rp 3.017.045.000,00	Rp 2.802.518.600,00	92,89%
2	Program Pelayanan Pemanfaatan Fasilitas Keolahragaan	Rp 691.500.000,00	Rp 532.116.917,00	76,95%
3	Peningkatan peran serta dan pemberdayaan keolahragaan	Rp 8.262.645.000,00	Rp 6.981.787.083,48	84,50%

f. Proses Perencanaan

Proses perencanaan urusan Kepemudaan dan Olahraga diawali dengan melakukan pemetaan potensi dari para pemuda di Kabupaten Sidoarjo untuk kemudian ditetapkan rencana pemberdayaannya agar menjadi pemuda berprestasi.

g. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan Kepemudaan dan Olahraga pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata adalah sebagaimana terlampir

20. Urusan Statistik

a. Program

Program pembangunan untuk urusan Statistik yang dilaksanakan pada tahun 2018 yaitu Program pengembangan data/informasi/statistik daerah, bertujuan untuk Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan Teknologi Informasi.

b. Realisasi Pelaksanaan Program Serta Permasalahan Dan Solusinya

Hasil pelaksanaan program tersebut ditunjukkan pada pencapaian, yaitu :

Dokumen Statistik Daerah yang disusun

Pada tahun 2018 telah dilaksanakan kegiatan penyusunan dokumen statistik daerah untuk mendukung informasi pembangunan. Berikut Dokumen-dokumen yang disusun diantaranya :

1. Indikator Ekonomi;
2. Indikator Sosial;
3. Indeks Harga Konsumen;
4. Indikator Tenaga Kerja;
5. Analisa Gender;
6. ICOR;
7. Sidoarjo Dalam Angka;
8. PDRB;
9. Indeks Pembangunan Manusia;
10. Kecamatan Dalam Angka;
11. Statistik Daerah;
12. Data Statistik Sektoral.

Dokumen- dokumen yang disusun diantaranya :

1. Indikator Ekonomi;

Pembangunan ekonomi merupakan serangkaian usaha bersama antara pemerintah, swasta serta masyarakat untuk mencapai tumjuan peningkatan taraf hidup dan kesejateraan masyarakat. Pembangunan harus dilaksanakan secara berkesinambungan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Diperlukan perencanaan dan penentuan prioritas pembangunan, monitoring dari proses pembangunan yang sedang berlangsung maupun evaluasi hasil yang pembangunan yang telah dicapai secara terus-menerus untuk lebih mempercepat pencapaian tujuan pembangunan itu sendiri.

Beberapa indikator ekonomi yang ada di Kabupaten Sidoarjo tahun 2018 adalah sebagai berikut :

a. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo tahun 2017 yaitu tumbuh sebesar 5,80 persen, naik dari tahun sebelumnya sebesar 5,51 persen.
b. Tiga sektor ekonomi yang selalu dominan kontribusinya di Kabupaten Sidoarjo yaitu: 1) Industri Pengolahan, 2) Perdagangan, Hotel dan Restoran, 3) Pengangkutan dan komunikasi.

c. Inflasi Kabupaten Sidoarjo tahun 2017 sebesar 4,11 persen. Inflasi tertinggi pada bulan Januari sebesar 1.53 persen dan terendah bulan Agustus yaitu -0,21 persen.
d. Harga eceran di perdesaan untuk konsumsi makanan di Kabupaten Sidoarjo pada 2017 cenderung stabil antar bulannya.
e. Gini rasio kabupaten Sidoarjo selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir berada pada kisaran 0.30, dalam arti bahwa Kabupaten Sidoarjo masuk dalam kategori ketimpangan distribusi pendapatan rendah.
f. Realisasi belanja barang dan jasa selama tahun 2017 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, sebesar 22,49 persen.
g. Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2017 mencapai 4 trilyun rupiah. Secara agregat, Pendapatan Asli Daerah mampu penyumbang 1,67 trilyun rupiah terhadap pendapatan daerah Kabupaten Sidoarjo.
h. Capaian IPM Kabupaten Sidoarjo selama 7 tahun terakhir terus naik. IPM Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2017 adalah sebesar 78,70 (tergolong tinggi)

2. Indikator Sosial;

Penyusunan Indikator Sosial menyajikan analisis deskriptif dari berbagai indicator yang tersedia di Kabupaten Sidoarjo. Indikator sosial yang disajikan meliputi: kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan indikator sosial lainnya.

Beberapa indikator sosial yang ada di Kabupaten Sidoarjo mengindikasikan kondisi sosial masyarakat Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017. Posisi geografis yang berbatasan langsung dengan Kota Surabaya sebagai ibukota provinsi dan pusat perekonomian menjadikan Kabupaten Sidoarjo sebagai wilayah alternatif untuk hunian bagi para komuter selain juga digunakan sebagai wilayah pengembangan usaha. Indikator bidang pendidikan yang dipresentasikan melalui rasio murid terhadap guru dan juga rasio murid terhadap sekolah masih perlu untuk mendapatkan perhatian, terutama untuk jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) swasta. Keberadaan tenaga kesehatan dan juga fasilitas kesehatan perlu

untuk ditingkatkan mengingat rasio dokter terhadap penduduk dan rasio rumah sakit serta puskesmas terhadap penduduk yang masih relatif tinggi.

Masih tingginya tindak kejahatan perlu mendapatkan solusi yang tepat meskipun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sudah mengalami penurunan. Program untuk menambah tingkat keamanan melalui sistem keamanan lingkungan dan lain sebagainya diharapkan akan bisa membantu aparat keamanan, mengingat personil keamanan yang relatif cukup terbatas. Sistem keamanan mandiri dari masyarakat akan menjadi peringatan dini bagi pihak berwenang untuk mengambil tindakan yang diperlukan bagi peningkatan keamanan masyarakat. Kerawanan bencana masih merupakan permasalahan yang perlu penanganan serius mengingat kejadian bencana terutama bencana kebakaran masih relatif tinggi dan meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. **Indeks Harga Konsumen;**

Indeks Harga Konsumen merupakan penghitungan Inflasi, dimana hasil penghitungan inflasi Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan nilai Konsumsi Dasar adalah 2012 = 100 dengan acuan Kota Surabaya.

Inflasi Kabupaten Sidoarjo pada bulan Desember adalah sebesar 0.61 persen,

atau telah terjadi kenaikan indeks dari 129.17 di bulan November 2018 menjadi 130.10 di bulan Desember 2018.

Untuk Kumulatif Inflasi Januari 2018 sampai dengan Desember tahun 2018 Kab Sidoarjo berada pada angka 2.70 persen. Angka tersebut dapat disebut juga inflasi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018. Dilihat dari Inflasi ‘year on year’ (Desember 2017 terhadap Desember 2018), Kabupaten Sidoarjo mengalami inflasi ‘Y-O-Y’ 2.70 persen persen lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017 sebesar 4.11 persen.

4. **Indikator Tenaga Kerja;**

Informasi mengenai ketenagakerjaan merupakan hal penting yang dapat digunakan sebagai perencanaan dan evaluasi pembangunan baik di bidang ekonomi maupun bidang sosial, misalnya dapat memberikan gambaran tentang daya serap perekonomian terhadap pertumbuhan dan produktivitas tenaga kerja. Selain menggambarkan daya serap perekonomian terhadap

pertumbuhan tenaga kerja, indikator ketenagakerjaan juga dapat menggambarkan tingkat produktivitas tenaga kerja menurut sektor, yang tentunya berguna bagi para investor untuk strategi investasi dan bagi pemerintah untuk pengembangan sumber daya manusia. Indikator tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo memuat ulasan dan indikator ketenagakerjaan yang mengacu pada konsep Labour Force yang telah direkomendasikan oleh International Labour Organization (ILO).

Berdasarkan uraian dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas (usia kerja) di Kabupaten Sidoarjo dari hasil Sakernas 2017 sebanyak 64,54 persen masuk dalam kelompok angkatan kerja dan bukan angkatan kerja 35,46 persen.
b. Secara umum kegiatanutama dalam seminggu yang lalu dari penduduk usia 15 tahun keatas adalah bekerja yaitu sebesar 61,33 persen; Mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha/sudah punya pekerjaan tapi belum bekerja 3,21 persen; sekolah 11,73 persen; mengurus rumahtangga 19,78 persen; dan kegiatan lainnya 3,95 persen
c. Sebagian besar tenaga kerja bekerja di sektor sekunder dan tersier, dengan total 96,43 persen, hanya sekitar 3,57 persen yang bekerja di sektor primer (pertanian dan penggalian).
d. Tingkat pengangguran terbuka laki-laki sebesar 4,54 persen, perempuan sebesar 5,64 persen dan tingkat pengangguran terbuka laki-laki dan perempuan sebesar 4,97 persen.
e. Tingkat kesempatan kerja laki-laki sebesar 95,46 persen, perempuan sebesar 94,36 persen dan laki-laki dan perempuan sebesar 95,03 persen.

5. Analisa Gender

Analisa Gender Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 disusun dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan di Kabupaten Sidoarjo sudah berperspektif gender. Analisa Gender ini berisikan tentang informasi mengenai kondisi sosial demografi perempuan dan laki-laki serta penghitungan IPG Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017.

Kesetaraan Gender berarti bahwa peluang dan hak-hak seseorang bukan ditentukan oleh kondisi seksual biologi mereka. Dengan demikian kesetaraan dan keadilan Gender merupakan suatu agenda untuk menciptakan status yang setara antara laki-laki dan perempuan dan memberikan kesetaraan kondisi kehidupan dan kesempatan yang sama untuk memahami potensi dan hak-hak dasar masingmasing. Kesetaraan dan keadilan Gender juga berarti bahwa baik laki-laki maupun perempuan dapat berpartisipasi secara imbang dan optimal pada bidang politik, sosial, ekonomi, budaya dan agama serta bersama-sama mampu mendapatkan manfaatnya.

Beberapa komponen hasil Analisa Gender :

a. Jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo tahun 2017 (hasil proyeksi Sensus Penduduk 2010) sebesar 2.183.682 jiwa yang terdiri dari 1.097.094 lakilaki dan 1.086.588 perempuan dengan sex ratio 100,97.
b. Angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Sidoarjo tahun 2017 sebesar 93,33.
c. Pada tahun 2017 Angka Komponen IPG di bidang kesehatan yaitu angka harapan hidup untuk laki–laki sebesar 71,78 tahun sedangkan perempuan 75,54 tahun.
d. Pada tahun 2017 Angka Komponen IPG di bidang pendidikan yaitu Harapan Lama Sekolah untuk laki-laki sebesar 14,37 persen dan perempuan sebesar 14,28 persen, sedangkan untuk rata-rata lama sekolah untuk laki-laki sebesar 10,77 tahun dan perempuan sebesar 9,70 tahun.
e. Angka Komponen IPG di bidang ekonomi dari segi pengeluaran perkapita untuk laki-laki sebesar 19,05 juta dan perempuan sebesar 13,23 juta.
f. Angka IDG (Indeks Pemberdayaan Gender) Kabupaten Sidoarjo tahun 2017 adalah sebesar 64,65.

Nilai IDG (Indeks Pemberdayaan Gender) di Kabupaten Sidoarjo tahun 2017 relatif lebih rendah dibandingkan dengan nilai IPM Kabupaten Sidoarjo yang sebesar 78,70

6. ICOR (*Incremental Capital Output Ratio)*

ICOR adalah suatu besaran yang menunjukkan besarnya tambahan kapital (dalam hal ini investasi, $\Delta K = I$) baru yang dibutuhkan untuk menaikkan/menambah satu unit output (dalam hal ini PDRB, ΔY) baik secara fisik maupun nilai. Dalam prakteknya penghitungan ICOR dilakukan dalam bentuk nilai dan dinilai dengan harga konstan

Analisa ICOR Kabupaten Sidoarjo tahun 2012 - 2017 ini berusaha melihat pengaruh investasi terhadap perkembangan perekonomian Kabupaten Sidoarjo. Sehingga dapat ditentukan perkiraan investasi yang dibutuhkan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang ditentukan. Hasil Analisis ICOR sebagai berikut :

a. Perkembangan investasi di Kabupaten Sidoarjo tahun 2012 - 2017 secara umum cukup menggembirakan. BPS mencatat bahwa selama kurun waktu lima tahun dari 2012 hingga 2017 laju pertumbuhan rata-rata tumbuh 4,23 persen setiap tahunnya. Posisi investasi tahun 2017 mencapai Rp.50,06 Triliun (ADHB) dimana 40,17 persen ditanamkan pada sektor industri pengolahan.
b. Peranan investasi dalam perekonomian Kabupaten Sidoarjo cukup besar yakni menempati posisi kedua setelah pengeluaran konsumsi rumah tangga. Tahun 2017, peranan komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga dan PMTB masing-masing sebesar 56,70 persen dan 29,87 persen.
c. Terjadi pergeseran investasi menurut sektor di Kabupaten Sidoarjo selama kurun lima tahun terakhir. Investasi sektor Informasi dan komunikasi pada tahun 2012 menduduki posisi keempat dengan share sebesar 7,16 persen untuk total investasi di tahun tersebut, pada tahun 2017 berada di posisi ke lima.
d. Sektor yang mempunyai rata-rata ICOR selalu berada di atas rata-rata ICOR Kabupaten Sidoarjo, baik menggunakan lag-0, lag-1 maupun lag-2, yaitu sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Sektor Transportasi dan Pergudangan, Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Sektor Informasi dan Komunikasi, Sektor Jasa Perusahaan, Sektor Administrasi Pemerintah,

pertahanan dan jaminan social wajib, sektor Jasa pendidikan, Sektor jasa kesehatan dan kegiatan social serta sektor jasa lainnya

7. Sidoarjo Dalam Angka

Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2018 merupakan publikasi tahunan yang berupa kumpulan data dan secara komprehensif dari berbagai bidang/ sektor. Tujuan utama publikasi ini dimaksudkan untuk memberi gambaran secara global keadaan Kabupaten Sidoarjo setiap tahun yang berisikan data sebabagi berikut:

a. Keadaan Geografis
b. Pemerintahan
c. Penduduk dan Tenaga Kerja
d. Sosial
e. Pertanian
f. Industri
g. Perdagangan
h. Perhubungan
i. Keuangan dan Harga-Harga
j. Pendapatan regional Regional Income

8. PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ini menyajikan angka-angka periodik, yang masing-masing disusun menurut lapangan usaha, baik atas dasar harga berlaku (*Curent Prices*) maupun atas dasar harga konstan (*Constant Prices*).

a. Pada Tahun 2017 angka PDRB (atas dasar harga berlaku) sebesar 174.280.087,00 juta rupiah dan angka PDRB (atas dasar harga konstan 2010) sebesar 118.179.189,9 juta rupiah.
b. Nilai PDRB Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 atas dasar harga konstan 2010, mencapai 125,04 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 118,18 triliun rupiah pada tahun 2016. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama

tahun 2017 terjadi pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 5,51 persen.

c. Selama 3 tahun terakhir, kinerja lapangan usaha industry pengolahan stabil memberikan kontribusi sebesar 46 persen. Kinerja kategori ini terutama ditopang oleh hasil produksi industry makanan dan minuman, industry kertas dan barang dari kertas, percetakan dan reproduksi, industry kimia farmasi dan obat tradisional serta industry logam dasar.
d. Dari 17 Lapangan usaha ekonomi yang ada,seluruhnya mengalami pertumbuhan yang positif. Sembilan lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif sebesar lima puluh persen. Sedangkan delapan usaha lainnya berturut –turut tercatat mengalami pertumbuhan positif tetapi lebih rendah, yaitu kurang dari lima persen.
e. Sembilan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif sebesar lima hingga sepuluh persen tersebut antara lain: lapangan usaha penyediaan akomodasi makan minum; konstruksi; informasi dan komunikasi; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, limbah dan Daur Ulang sebesar 6,39 persen; Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 6,36 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 5,77 persen; Industri Pengolahan Besar 5,70 persen; Jasa Perusahaan sebesar 5,48 persen; dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 5,04 persen.

9. Indeks Pembangunan Manusia

Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) merupakan indeks komposit sederhana yang menjelaskan bagaimana penduduk suatu wilayah dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup :

a. Umur Panjang dan Hidup Sehat (a long and helaty life) Dimensi ini dicerminkan oleh Angka Harapan Hidup (life expectancy at age 0: eo)
b. Pengetahun (knowledge) Dimensi ini dicerminkan oleh dua kriteria, yaitu : Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

c. Standar Hidup Layak (decent dtandard of living) Dimensi ini dicerminkan oleh PDB per kapita. BPS merefleksikan dimensi ini melalui pengeluaran per kapita yang disesuaikan

Indeks Pembangunan Manusia menjadi salah satu indikator yang penting dalam melihat sisi lain dari pembangunan. Manfaat penting IPM antara lain sebagai berikut :

a. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (penduduk)
b. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah
c. IPM merupakan data strategis; selain sebagai ukuran kinerja pemerintah juga sebagai salah satu alokator penentu Dana Alokasi Umum (DAU)

Capaian IPM Kabupaten Sidoarjo selama 7 tahun terakhir terus naik. IPM Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2017 adalah sebesar 78,70. Besaran IPM ini tergolong dalam kategori “tinggi”. Selama peroide 2010-2016 angka IPM Kabupaten Sidoarjo sudah masuk dalam range “tinggi”. Pada tahun 2010 angka IPM Sidoarjo sebesar 73,75. Pada tahun 2011 sebesar 74,78; tahun 2012 sebesar 75,14; tahun 2013 sebesar 76,39; tahun 2014 sebesar 76,78 ; tahun 2015 sebesar 77,43 dan di tahun 2016 sebesar 78.17.

10. Kecamatan Dalam Angka

Kecamatan Dalam Angka 2018 merupakan publikasi tahunan yang berupa kumpulan data dan secara komprehensif dari berbagai bidang/ sektor. Tujuan utama publikasi ini dimaksudkan untuk memberi gambaran secara global keadaan masing-masing kecamatan (18 Kecamatan) di Kabupaten Sidoarjo setiap tahun yang berisikan data sebabagi berikut:

a. Keadaan Geografis Kecamatan
b. Pemerintahan Kecamatan
c. Kependudukan Kecamatan
d. Sosial Kecamatan
e. Pertanian Kecamatan
f. Industri Kecamatan

g. Perhubungan Kecamatan
h. Keuangan dan Harga-harga Kecamatan

11. Statistik Daerah

Publikasi Statistik Daerah Kabupaten Sidoarjo 2018 berisi berbagai data dan informasi terpilih seputar kondisi sosial-ekonomi di Sidoarjo yang dianalisis secara sederhana untuk membantu pengguna data memahami perkembangan pembangunan serta potensi yang ada di Sidoarjo. Publikasi ini diterbitkan untuk melengkapi publikasi-publikasi statistik yang sudah terbit secara rutin setiap tahun. **Berbeda dengan publikasi-publikasi yang sudah ada, publikasi ini lebih menekankan pada analisis**, tema pembahasan analisis diantaranya :

a. Iklim dan Geografi
b. Pemerintahan
c. Kependudukan
d. Ketenagakerjaan
e. Pendidikan
f. Kesehatan dan Keluarga Berencana
g. Perumahan dan Fasilitasnya
h. Kemiskinan
i. Pembangunan Manusia
j. Pertanian
k. Industri Pengolahan
l. Listrik
m. Air Minum
n. Hotel
o. Perdagangan
p. Transportasi
q. Keuangan dan Investasi
r. PDRB
s. Pertumbuhan Ekonomi

Masing-masing tema tersebut dibahas terperinci disertai analisisnya, tidak hanya sekedar data.

12. Data Sektoral

Buku Data Statistik Sektoral ini disusun berdasarkan data yang diperoleh dari Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo hasil Survey Data Statistik Sektoral Tahun 2018, Data Dinamis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018.

Dengan penyusunan data statistik sektoral Kabupaten Sidoarjo maka diharapkan dapat diketahui potensi pembangunan di Kabupaten Sidoarjo dilihat dari berbagai sektor yang nantinya bisa digunakan sebagai data dalam menyusun kebijakan-kebijakan di Kabupaten Sidoarjo. Data sektoral tersebut menjadikan sebuah dasar acuan masing-masing organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan masing-masing tugas pokok fungsi (tupoksi) yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah daerah. Sehingga, data tersebut dapat berfungsi dalam memberikan keterbukaan informasi kepada publik yang dapat dipertanggungjawabkan, dan juga menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan/kebijakan untuk mengatasi berbagai isu maupun tantangan khususnya di Kabupaten Sidoarjo.

Untuk pelaksanaan pembuatan dokumen Indikator Ekonomi, Indikator Sosial, Indeks Harga Konsumen, Indikator Tenaga Kerja, ICOR dan Analisa gender pelaksanaan penyusunan dokumen tersebut Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika bekerjasama dengan BPS Kabupaten Sidoarjo, Sedangkan untuk Dokumen Sidoarjo Dalam Angka, PDRB, Indeks Pembangunan Manusia, Statistik Daerah, dan Kecamatan Dalam Angka merupakan produk BPS yang dipublikasikan dan digandakan oleh Bidang Statistik untuk kepentingan umum. Kegiatan Pengumpulan Data Sektoral merupakan produk Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika.

Diharapkan informasi-informasi yang dihimpun tersebut dapat memberikan manfaat untuk peningkatan pembangunan Kabupaten Sidoarjo di masa mendatang.

c. SKPD Penyelenggara Urusan

Urusan Statistik dilaksanakan oleh OPD yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika.

d. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di urusan Statistik berjumlah 6 orang. Secara rinci SDM penyelenggara urusan Statistik menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir. Tidak terdapat jabatan fungsional pada urusan ini.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran (per program)

Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program sebagaimana terlampir.

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Rp 637.752.000,00	Rp 605.893.800,00	95,00%

f. Proses Perencanaan

Proses perencanaan urusan statistik mendasarkan pada rencana strategis yang mengacu pada RPJMD, RPJP. Hasil perencanaan menggunakan data hasil monitoring dan evaluasi, kebijakan pimpinan dan masukan masyarakat dan stakeholders terkait sebagai bahan penyusunan RKPD.

g. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan Statistik adalah sebagaimana terlampir.

21. Urusan Persandian

a. Program

Program pembangunan untuk urusan Persandian yang dilaksanakan pada tahun 2018 adalah Program peningkatan kualitas layanan data teknologi informasi dan komunikasi (TIK)

b. Realisasi Pelaksanaan Program Serta Permasalahan Dan Solusinya

Hasil pelaksanaan program tersebut ditunjukkan pada pencapaian, sebagai berikut :

pelayanan keamanan informasi yang dilakukan

Pada tahun 2018 telah dilaksanakan kegiatan untuk meningkatkan pelayanan terhadap keamanan informasi, diantaranya :

1) Pemasangan Firewall Jaringan

2) Pengadaan perangkat keamanan yang berfungsi untuk mengidentifikasi, memproteksi pelanggaran terhadap sistem jaringan data center Dinas Komunikasi dan Informatika.

3) Penyusunan SOP Keamanan

4) Menyusun SOP untuk pengelolaan database terintegrasi pada data center Dinas Komunukasi sebagai standarisasi keamanan informasi menuju ISO : 27001 Tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)

Adapun firewall yang telah dipasang perangkat/lisensi pendukung firewall pada data center yaitu dengan fungsi IDS/IPS (Intrusion Detection System/Intrusion Prevention System) dan penambahan satu buah perangkat firewall jaringan untuk memantau dan mengidentifikasi dan mencegah ancaman terhadap keamanan server dengan melakukan pembatasan akses maupun melakukan pemblokiran terhadap akses ke sistem jaringan lokal, dan telah dilakukan konfigurasi lebih lanjut pada perangkat untuk menyesuaikan rule-rule yang ditetapkan sesuai kebutuhan data center.

Sesuai dengan fungsi seksi keamanan informasi dan telekomunikasi terkait layanan keamanan informasi e-government, diperlukan kebijakan keamanan informasi yang mengatur norma, standard, prosedur dan kriteria pelaksanaan/inplementasi keamanan e-government di pemerintah kabupaten Sidoarjo agar implementasi keamanan informasi e-government dapat berjalan

dengan baik sesuai yang diharapkan dan mendapatkan dukungan dari semua pihak.

c. SKPD Penyelenggara Urusan

Urusan Persandian dilaksanakan oleh OPD yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika.

d. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di urusan Persandian berjumlah 11 orang. Secara rinci SDM penyelenggara urusan Persandian menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir. Untuk urusan persandian belum tersedia jabatan fungsional.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran (per program)

Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program sebagaimana terlampir.

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program peningkatan kualitas layanan data teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	Rp 14.868.560.000,00	Rp 14.307.108.436,00	96,22%

f. Proses Perencanaan

Proses perencanaan urusan Persandian disusun berdasar rencana strategis yang mengacu pada RPJMD.

g. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagaimana terlampir

22. Urusan Kebudayaan

a. Program

Program pembangunan yang dilaksanakan untuk urusan ini pada tahun 2017 adalah Program Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan.

b. Realisasi Pelaksanaan Program Serta Permasalahan Dan Solusinya

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program pembangunan urusan kebudayaan adalah sebagai berikut :

1. Budaya Daerah yang Dilestarikan

Untuk menopang pelestarian seni dan budaya daerah maka harus dijaga eksistensi kelompok seni dan budaya yang ada di masyarakat. Pada Tahun 2018, adat budaya yang dilestarikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, antara lain sebagai berikut :

Tabel III.B.27

Kelompok Seni dan Budaya Lokal

NO	KECAMATAN	BENTUK KEARIFAN LOKAL	NAMA KEARIFAN LOKAL	DISKRIPSI
1	Sidoarjo	Lelang / Pameran	**Lelang Bandeng**	Lelang Bandeng adalah salah satu budaya kearifan lokal masyarakat Sidoarjo, yaitu melelang bandeng kawakan yang berusia 5-10 tahun dengan berat 7-10 kg dan diadakan di alun-alun, kegiatan ini diadakan setiap tahun sekali untuk memperingati Maulud Nabi Muhammad SAW dan menjujung tinggi nilai-nilai Maulud Nabi Muhammad SAW juga untuk mempromosikan hasil kekayaan daerah serta memberi semangat untuk meningkatkan produksi hasil tambaknya. Hasil dari lelang bandeng semuanya untuk kegiatan sosial dan keagamaan.Peserta lelang bandeng adalah petani tambak yang ada di Sidoarjo.
2	Candi Sidoarjo Buduran	Perayaan/Ruwatan cara mengambil kupang di laut	**Nyadran**	Nyadran adalah salah satu budaya kearifan lokal yang ada di Kecamatan Candi, Sidoarjo dan

				Buduran. Tradisi tersebut dinamakan pesta nyadran. Nyadran merupakan upacara adat bagi para nelayan kupang desa Balongdowo Candi, desa Bluru Kidul Sidoarjo dan Kepetingan Buduran sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan YME. Bentuk kegiatan nyadran berupa pesta peragaan cara mengambil kupang di tengah laut selat Madura. Mereka berangkat diiringi seluruh keluarga nelayan sejak tengah malam . Perjalanan dimulai dari Bandar Balongdowo, Candi menempuh jarak sekitar 12 km menuju Dusun Kepetingan, Sawohan, Buduran. Sekitar pukul 04.30 BBWI peserta iring-iringan perahu tiba di Dusun Kepetingan, Sawohan. Rombongan peserta Nyadran langsung menuju makam Dewi Sekardadu untuk mengadakan kenduri. Sambil menunggu fajar tiba, peserta Nyadran tersebut berziarah, bersedekah dan berdoa di makam tersebut agar berkah terns mengalir. Menurut cerita rakyat Balongdowo, Dewi Sekardadu ini putri Raja Blambangan bernama Minak Sembuyu, yang pada waktu meuinggainya dikelilingi “ikan keting”, maka dusun tersebut dinamakan Kepetingan tapi orang-orang sering menyebut Dusun Ketingan. Pada pagi harinya, sekitar pukul 07.00 BBWI usai mengadakan selamatan, perahu menuju Selat Madura dengan membentuk lingkaran, sedangkan peserta Nyadran turun untuk mandi dan memperagakan cara mengambil kupang. Perjalanannya cukup menarik bagi rnsyarakat yang belum pernah mengikuti pesta nyadran sebab di sisi kiri dan kanan perahu dipenuhi dengan tumbuhan bakau yang

				dihiasi panorama terbitnya sinar matahari. Sering dijumpai burung bangau berterbangan terusik oleh deru mesin perahu. Tidak seorang pun tampak susah, semua bergembira, berjoget berpesta dan makan bersamasama di atas perabu. Itulah oleh masyarakat Balongdowo dinamakan "NYADRAN".Sekitar pukul 10.00 BBWI, iring-iringan perahu tersebut mulai meninggalkan selat Madura. Kemudian mereka kembali ke desa Balongdowo.
3	Buduran	Pertunjukan	**Remo Munali Patah**	Remo Munali Patah adalah hasil pengembangan seni tari remo yang sudah ada sebelumnya yaitu tari remo jawa timuran yang ada di Surabaya, Mojokerto, Jombang, Malang, dan Madura. Atas dedikasi dan keseriusan Cak Munali Patah dalam berkesenian Ludruk, beliau mengembangkan tari remo yang lebih dinamis, gagah, berwibawa dan muda untuk dibawahkan Gerakannnya patah-patah. Unruk itu hasil kreasi beliau dinamakan Tari Remo Munali Patah yang berasal dari Kecamatan Buduran.
4	Sedati	Pertunjukan	**Reog Cemandi**	Reog Cemandi adalah Kesenian khas yang ada di Desa Cemandi Kecamatan Sedati. Reog Cemandi tidak sama dengan reog Ponorogo, reog cemandi tidak ada waroknya dan topengnya tidak ada bulu meraknya. Topeng terbuat dari kayu randu dan dicat. Musiknya memakai kendang kecilyang terbuat dari kayu nangkah dan angklung dimainkan sangat sederhana Jumlah pemain sekitar 11 orang, diantaranya dua orang memakai topeng barongan lanang (laki-laki) dan barongan wadon (perempuan), enam orang penabuh kendang dan tiga orang penabuh angklunrg. Dan semua alat musik dan topeng yang ada saat ini adalah alat musik dan topeng asli seperti saat pertama

				kali kesenian ini ada.
5	Porong	Pertunjukan	**Gagrak Wayang Kulit Porongan**	Gagrak wayang kulit porongan ada hasil pengembangan wayang kulit di jawa, khusunya jawa timuran. Di Jawa Timur sendiri wayang kulit jawa timuran juga disebut wayang kulit jeg dong. Ada 4 versi di jawa timur yaitu Lamongan, Mojokerto, Malang dan Sidoarjo. Untuk wayang kulit di Sidoarjo ada Gagrak Wayang Kulit Porongan dengan Ki Dalang Suswedi. Beliau ini yang mengembangkan versi porongan. Kesenian wayang kulit jawa timuran itu sendiri hampir merata ada di kecamatan Sidoarjo, Candi, Porong, Krembung, Tulangan, Tarik, Balongbendo, Krian, Sukodono, Taman, Gedangan, Waru, Prambon, Buduran. Dalang wayang kulit jawa timuran ada 50 an yang tersebar di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Sumber Data : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Untuk melestarikan seni budaya, peran kelompok seni budaya yang ada di masyarakat sangat besar. Kelompok seni budaya yang terbentuk terbagi dalam beberapa bidang seni yaitu : Ludruk, Wayang Kulit, Reog Ponorogo, Patrol, Jaranan/Bantengan, Musik (Orkes Melayu, Hadrah, Samroh, Gambus, Al Banjari dan Keroncong), Kentrung,Tari,Teater, Karawitan, Campursari dan Mocopat.

Di Kabupaten Sidoarjo juga terdapat daerah pesisir yang melestarikan budaya nelayan pesisir. Sampai saat ini budaya nelayan pesisir dilestarikan oleh enam desa, yaitu :

1) Desa Balong Dowo Kecamatan Candi
2) Desa Balong Gabus Kecamatan Candi
3) Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi
4) Desa Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo
5) Desa Gisik Cemandi Kecamatan Sedati
6) Desa Kepetingan Kecamatan Sidoarjo

Tradisi ini sampai beberapa tahun terakhir masih terpelihara dan terjaga kelestariannya. Upaya yang dilakukan untuk melestarikan tradisi tersebut antara lain :

1. Menyelenggarakan pentas seni budaya
2. Menyelenggarakan festival seni budaya
3. Mengadakan seminar, workshop, diskusi dan lain-lain tentang seni budaya
4. Memberikan penghargaan kepada seniman berprestasi

2. Prestasi dalam bidang seni Budaya

Pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah melakukan upaya-upaya pembinaan terhadap seluruh potensi budaya yang ada. Hal ini di lakukan dalam rangka memelihara nilai-nilai kearifan lokal yang sudah tumbuh dan berkembang di masyarakat. Prestasi di bidang budaya pada tahun 2018, antara lain :

Tabel III.B.28

Prestasi Seni dan Budaya di Tahun 2018

No.	Event	Prestasi	Tingkat (Regional / Nasional / Internasional)
1	FKPU (Festival Kesenian Pesisir Utara)	Piagam penghargaan atas partisipasinya dalam pagelaran Festival Kesenian Pesisir Utara	Tingkat Nasional
2	Kolaborasi drama tari dalam pagelaran seni budaya Kab. Sidoarjo dengan judul “ Candi Tawangalun “	Piagam penghargaan dari Kantor Perwakilan Propinsi Jawa Timur di Jakarta atas partisipasinya dalam pagelaran budaya daerah di Anjungan Jawa Timur Taman Mini Indonesia Indah Jakarta	Tingkat Nasional
3	Jatim Specta Nigth Carnival 2018	Penyaji Unggulan Terbaik	Tingkat Nasional

Sumber Data : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

c. SKPD Penyelenggara Urusan

Urusan kebudayaan dilaksanakan oleh OPD yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

d. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di urusan Kebudayaan berjumlah 13 orang. Secara rinci SDM penyelenggara urusan Kebudayaan menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir. Sedangkan untuk jabatan fungsional tidak tersedia.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran (per program)

Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program sebagaimana terlampir.

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan	Rp 2.212.059.750,00	Rp 1.072.917.400,00	48,50%

f. Proses Perencanaan

Proses perencanaan urusan kebudayaan dilaksanakan dengan melakukan identifikasi permasalahan sosial yang dominan dengan melibatkan pemangku kepentingan, untuk menghasilkan program dan kegiatan yang komprehensif dan terintegratif.

g. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan kebudayaan sebagaimana terlampir

23. Urusan Perpustakaan

a. Program

Program pembangunan yang dilaksanakan untuk urusan ini pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan Koleksi dan Pelayanan Perpustakaan
2. Program Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca

b. Realisasi Pelaksanaan Program Serta Permasalahan Dan Solusinya

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program pembangunan urusan perpustakaan adalah sebagai berikut :

Indeks Minat Baca

Indeks ini digunakan untuk mengukur minat baca melalui Sistem Reading Record (RR) yaitu sistem yang menciptakan kontras (perbedaan yang benar – benar nyata) diantara mereka yang gemar membaca dan yang tidak. Hal ini dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan melalui budaya gemar membaca.

Target yang ditetapkan di tahun 2018 dalam RPJMD untuk indeks minat baca adalah 60. Realisasi Indeks Minat Baca Masyarakat tahun 2018 tercapai sebesar 69 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar 42, maka realisasi tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 27 atau 64,29%. Bila dibandingkan dengan target tahun 2018 sebesar 60, maka capaian Indeks Minat Baca Masyarakat telah tercapai sebesar 115%.

Perkembangan Indeks Minat Baca Masyarakat dari tahun 2016 s/d tahun 2018 :

Grafik III.B.67

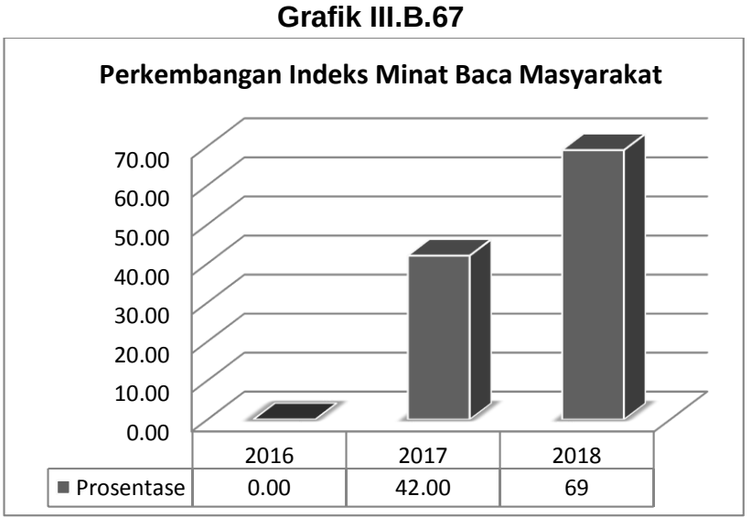

Sumber Data : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Berdasarkan tabel/grafik, pencapaian kinerja di Tahun 2018 mengalami peningkatan, hal ini disebabkan :

- Dilaksanakannya promosi gerakan gemar membaca dengan mengadakan pameran, gelar baca, lomba mendongeng, lomba literasi, lomba perpustakaan sekolah/desa
- membentuk perpustakaan percontohan di Desa/ Kelurahan
- sosialisasi pengelolaan perpustakaan di desa maupun di masyarakat
- peningkatan kualitas SDM perpustakaan baik melalui pembinaan, bimbingan dan pelatihan

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan Indeks Minat Baca Masyarakat, antara lain :

(1) Mensosialisikan Permendes No. 16 tahun 2018 tentang pemanfaatan dana desa untuk perpustakaan.

(2) Mensosialisikan UU No. 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan utamanya untuk pembudayaan literasi di sekolah

(3) Pembinaan dan memotivasi Kades/Kakel dan Kepala Sekolah untuk mengembangkan perpustakaan

(4) Mengadakan Bimtek/pelatihan untuk petugas pengelola perpustakaan desa dan sekolah

(5) Melakukan sosialisasi dan motivasi serta pembinaan

(6) Mengadakan kegiatan - kegiatan yang melibatkan masyarakat dan mitra perpustakaan seperti :
   - Lomba mendongeng
   - Pameran Literasi
   - lomba perpustakaan sekolah/desa
   - lomba literasi

Capain atas indikator indeks minat baca dapat dijelaskan melalui target kinerja utama OPD dan target kinerja program yaitu antara lain:

a. Meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan

Realisasi jumlah pengunjung perpustakaan tahun 2018 tercapai sebanyak 151.463 pengunjung dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar 164.385 pengunjung, maka realisasi tahun 2017 mengalami penurunan

sebesar 12.922 pengunjung atau 7,86%. Bila dibandingkan dengan target tahun 2018 sebesar 150.000 pengunjung, maka capaian target tingkat kunjungan perpustakaan telah tercapai sebesar 108,97%.

Perkembangan Jumlah pengunjung perpustakaan tahun 2018 seperti terlihat pada grafik berikut ini :

Grafik III.B.68

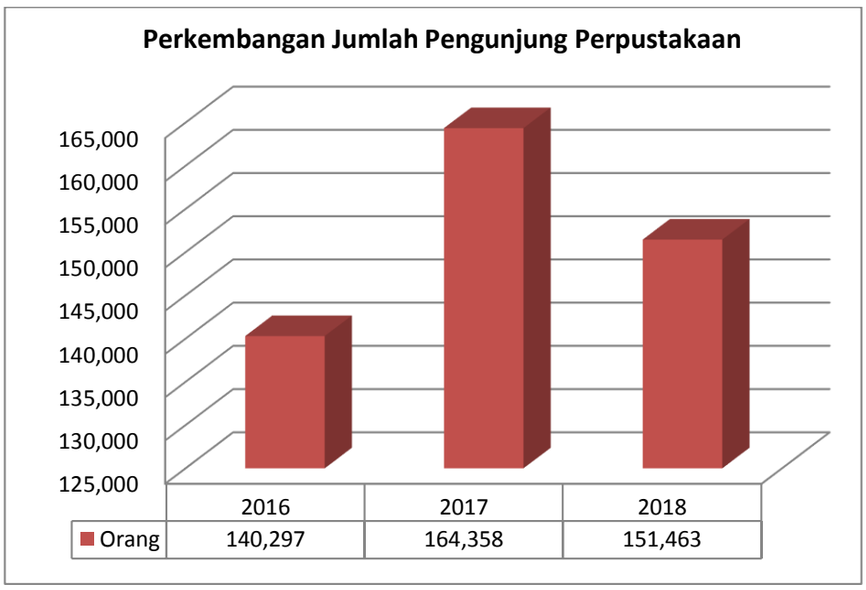

Sumber Data : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Berdasarkan tabel/ grafik, Jumlah pengunjung perpustakaan di Tahun 2018 mengalami penurunan, hal ini disebabkan :

- Perubahan perilaku pengguna yang menuntut akses informasi yang cepat dan akurat
- Kurangnya jumlah bahan pustaka (variasi judul dan eksemplar)
- Kurangnya ketepatan waktu pelayanan
- SDM pelaksana yang terbatas
- Fasilitas gedung dan sarana pendukung yang kurang lengkap

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kunjungan ke perpustakaan, antara lain :

(1) Menyebarkan brosur kepada sekolah-sekolah di Kabupaten Sidoarjo dan pengunjung perpustakaan
(2) Mengoperasionalkan Mobil Perpustakaan Keliling ke sekolah - sekolah dan ke Desa/Kelurahan serta mengikuti kegiatan car free day setiap minggu
(3) Memberikan layanan yang mudah dan cepat pada pengunjung perpustakaan dalam hal pembuatan kartu anggota maupun dalam hal peminjaman koleksi perpustakaan (layanan yang sudah terkomputerisasi, e-tamu)
(4) Penyederhanaan sistem pelayanan di perpustakaan
(5) Publikasi koleksi buku – buku yang ada di perpustakaan melalui jejaring sosial dan web perpustakaan serta pembuatan Bibliografi
(6) Penambahan koleksi Buku
(7) Penambahan Jam pelayanan dari 9 jam menjadi 11 jam
(8) Promosi melalui Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) sebanyak 5 (lima) unit
(9) Pemberian hadiah saat kunjungan ke perpustakaan

b. Meningkatnya koleksi buku perpustakaan

Realisasi jumlah buku pada tahun 2018 tercapai sebanyak 99.998 eksemplar. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebanyak 88.656 eksemplar, maka realisasi tahun 2017 mengalami peningkatan sebanyak 11.342 eksemplar atau 12,79%.

Rincian koleksi buku perpustakaan, sebagai berikut :

GOLONGAN	JUMLAH	
	Judul	Eksemplar
000 KARYA UMUM	6.356	16.790
100 FILSAFAT	1.608	4.325
200 AGAMA	4.232	11.834
300 ILMU - ILMU SOSIAL	5.761	14.492
400 BAHASA	1.468	3.679
500 ILMU - ILMU MURNI	2.619	7.156

GOLONGAN	JUMLAH	
	Judul	Eksemplar
600 ILMU - ILMU TERAPAN	6.548	17.978
700 KESENIAN, OLAHRAGA	1.960	5.901
800 KESUSASTERAAN	4.675	12.863
900 SEJARAH, BIOGRAFI, GEOGRAFI	1.873	4.980
JUMLAH	37.100	99.998

Sumber Data : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Realisasi jumlah koleksi buku perpustakaan tahun 2018 tercapai sebanyak 99.998 eksemplar dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar 88.656 eksemplar, maka realisasi tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 11.342 eksemplar atau 12,79%. Bila dibandingkan dengan target tahun 2018 sebesar 92.000 eksemplar, maka capaian target jumlah koleksi buku perpustakaan telah tercapai sebesar 108,69%.

Dengan semakin banyaknya koleksi buku yang dimiliki oleh perpustakaan diharapkan akan semakin meningkatkan minat masyarakat untuk mengunjungi perpustakaan.

Perkembangan jumlah buku perpustakaan tahun 2018 seperti terlihat pada grafik berikut ini :

Grafik III.B.69

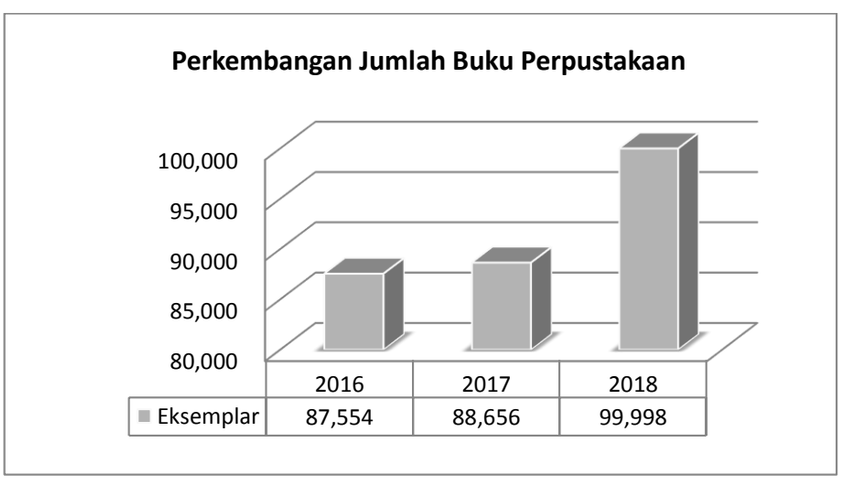

Sumber Data : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

c. SKPD Penyelenggara Urusan

Urusan perpustakaan dilaksanakan oleh OPD yaitu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

d. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di urusan perpustakaan berjumlah 23 orang. Secara rinci SDM penyelenggara urusan perpustakaan menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir, dengan jabatan fungsional Pustakawan.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran (per program)

Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program sebagaimana terlampir.

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Pengembangan Koleksi dan Pelayanan Perpustakaan	Rp 5.417.727.000,00	Rp 5.115.406.046,00	94,42%
2	Program Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca	Rp 2.107.556.700,00	Rp 2.018.476.550,00	95,77%

f. Proses Perencanaan

Proses perencanaan urusan perpustakaan dirumuskan bertolak dari permasalahan dan rencana pengembangan potensi dan disusun menjadi prioritas dengan tujuan untuk mengembangkan budaya baca.

g. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah sebagaimana terlampir

24. Urusan Kearsipan

a. Program

Program pembangunan yang dilaksanakan untuk urusan ini pada tahun 2017 adalah Program Pengelolaan, Pelayanan dan Dokumentasi Kearsipan;

b. Realisasi Pelaksanaan Program Serta Permasalahan Dan Solusinya

Hasil pelaksanaan program tersebut untuk mendukung pencapaian sebagai berikut :

1. Penerapan arsip secara baku

Realisasi Jumlah Lembaga yang menerapkan sistem kearsipan yang baku tahun 2018 sebanyak 83 Lembaga.

Upaya untuk peningkatan penerapan penyelenggaraan sistem kearsipan dengan standar yang ditentukan, antara lain melalui :

1. Melakukan pembinaan dan pendampingan dalam penyelenggaraan sistem kearsipan sesuai standar yang dibakukan;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan;
3. Memberikan penghargaan terhadap lembaga yang sudah melaksanakan pengelolaan arsip sesuai dengan standar kearsipan.

Perkembangan Jumlah Lembaga yang telah menyelenggarakan 299ystem kearsipan secara baku seperti terlihat pada grafik berikut ini :

Grafik III.B.70

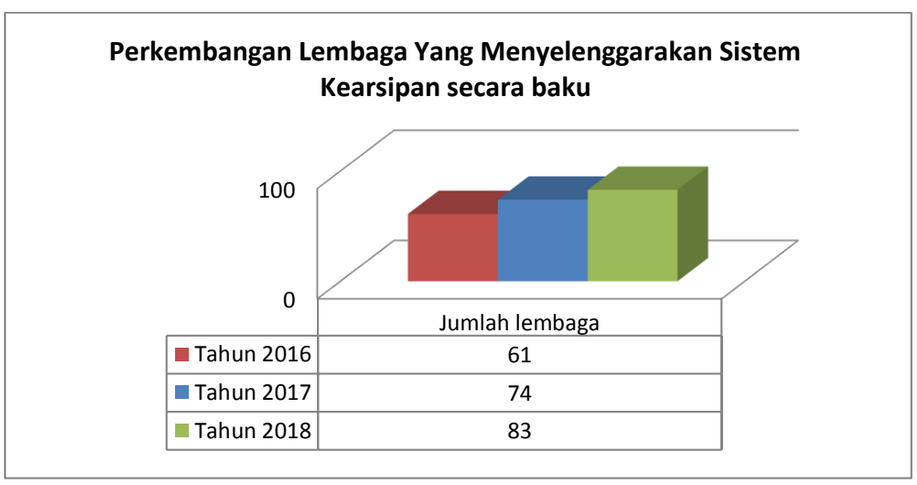

Sumber Data : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Realisasi Jumlah Lembaga yang telah menyelenggarakan sistem kearsipan dengan baku tahun 2018 tercapai sebanyak 83 lembaga dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar 74 lembaga, maka realisasi tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 9 lembaga atau 12,16%. Bila dibandingkan dengan target tahun 2018 sebesar 83 lembaga, maka capaian target Jumlah Lembaga yang telah menyelenggarakan sistem kearsipan dengan baku telah tercapai sebesar 100%.

Kegiatan pembinaan dan monitoring kearsipan yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan antara lain :

Tabel III.B.29

Pembinaan Monitoring Kearsipan

No.	Lokasi Pembinaan	Waktu Pelaksanaan
1.	a. Dinas Tenaga Kerja	Senin, 5 Maret 2018
	b. Dinas Sosial	
2.	a. Dispendukcapil	Selasa, 6 Maret 2018
	b. Dinas Kominfo	
3.	a. Dinas Perumahan dan Permukiman	Rabu, 7 Maret 2018
	b. Bakesbangpol	
4.	a. BPBD	Kamis, 8 Maret 2018
	b. Bagian Umum	
5.	a. BPKAD	Senin, 12 Maret 2018
	b. BPPD	
6.	a. RSUD	Selasa, 13 Maret 2018
	b. Inspektorat	
7.	a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rabu, 14 Maret 2018
	b. Dinas Pangan dan Pertanian	
8.	a. DPMPTSP	Kamis, 15 Maret 2018
	b. DPMDP3, KB	
9.	a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Senin, 19 Maret 2018
	b. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	

No.	Lokasi Pembinaan	Waktu Pelaksanaan
10.	a. Dinas Perikanan	Selasa, 20 Maret 2018
	b. Dinas Kesehatan	
11.	a. DLHK	Kamis, 22 Maret 2018
	b. SATPOl PP	
12.	a. Badan Kepegawaian Daerah	Senin, 26 Maret 2018
	b. Dinas Perhubungan	
13.	a. BAPPEDA	Selasa, 27 Maret 2018
	b. Sekretariat DPRD	
14.	a. PT. Delta Artha	Rabu, 28 Maret 2018
	b. PDAM “Delta Tirta”	
15.	a. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Kamis, 29 Maret 2018
	b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
16.	a. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Senin, 2 April 2018
	b. KPU	
17.	a. Kecamatan Sidoarjo	Senin, 9 April 2018
	b. Kecamatan Candi	
18.	a. Kecamatan Tanggulangin	Selasa, 10 April 2018
	b. Kecamatan Jabon	
19.	a. Kecamatan Porong	Rabu, 11 April 2018
	b. Kecamatan Krembung	
20.	a. Kecamatan Tarik	Kamis, 12 April 2018
	b. Kecamatan Balongbendo	
21.	a. Kecamatan Buduran	Senin, 16 April 2018
	b. Kecamatan Sedati	
22.	a. Kecamatan Gedangan	Selasa, 17 April 2018
	b. Kecamatan Waru	
23.	a. Kecamatan Krian	Rabu, 18 April 2018
	b. Kecamatan Prambon	
24.	a. Kecamatan Wonoayu	Kamis, 19 April 2018
	b. Kecamatan Tulangan	
25.	a. Kecamatan Sukodono	Senin, 23 April 2018
	b. Kecamatan Taman	

Sumber Data : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kegiatan Monitoring Kearsipan di Desa :

Tabel III.B.30

Pembinaan Monitoring Kearsipan di Desa

No.	OPD/BUMD/ DESA/KELURAHAN	Jumlah Monev Arsip Pada :	Rentang Waktu Pelaksanaan	Kesimpulan Hasil Monev
1.	Pemerintahan Desa	100 Desa/Kelurahan	30 Juli s/d	83 Desa/Kelurahan
			5 Desember 2018	Sesuai standar kearsipan yaitu pemakaian
				lembar disposisi, agenda surat masuk dan
				surat keluar, klasifikasi arsip, sarana
				penyimpanan arsip.
				17 Desa
				Belum sesuai standar kearsipan :
				Belum semua arsip disimpan berdasarkan
				klasifikasi arsip

Sumber Data : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

c. SKPD Penyelenggara Urusan

Urusan kearsipan dilaksanakan oleh OPD yaitu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

d. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di urusan Kearsipan berjumlah 12 orang. Secara rinci SDM penyelenggara urusan Kearsipan menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran (per program)

Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program sebagaimana terlampir.

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Pengelolaan, Pelayanan dan Dokumentasi Kearsipan	Rp 1.180.113.300,00	Rp 1.112.678.050,00	94,29%

f. Proses Perencanaan

Proses perencanaan urusan Kearsipan disesuaikan dengan peningkatan intensitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang semakin banyak dan luas. Pemeliharaan dokumen dokumen strategis secara tertib merupakan prioritas program yang dikelola kearsipan daerah.

g. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah sebagaimana terlampir

C. Prioritas Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

a. Program

Program stratejik pembangunan untuk urusan Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan pada tahun 2018 meliputi :

1. Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
2. Program peningkatan produksi ikan dan pengawasan perikanan tangkap
3. Program pengolahan, kesehatan ikan dan lingkungan

b. Realisasi Pelaksanaan Program Serta Permasalahan Dan Solusinya

Seluruh program tersebut dilaksanakan untuk mendukung capaian sebagai berikut :

1. Peningkatan Pendapatan Nelayan

Produksi perikanan tangkap di Kabupaten Sidoarjo dimanfaatkan sebagian besar masyarakat setempat sebagai sumber mata pencaharian, salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan Nelayan adalah tingkat pendapatan nelayan . Pendapatan Nelayan merupakan selisih antara penerimaan dengan biaya penangkapan yang benar-benar dikeluarkan baik per trip maupun pertahun atau disebut juga dengan Pendapatan/ Tahun.

Untuk mengetahui realisasi pendapatan nelayan terlebih dahulu kita uraikan Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap. Perikanan Tangkap terdiri dari Perikanan Laut dan Perikanan Umum. Realisasi Perikanan Laut Tahun 2018 meningkat sebesar 1,08% dan melebihi target yang ditetapkan sebesar 1%. Jika dikuantitatifkan Perikanan laut tahun 2018 sebesar 15.219.800 kg mengalami peningkatan sebesar 162.400 kg dari tahun 2017 sebesar 15.057.400 kg dan melebihi target 2018 sebesar 15.200.000 kg. Realisasi produksi Perikanan Umum tahun 2018 meningkat sebesar 1,15% dan memenuhi target sebesar 1% jika dikuantitatifkan Produksi Perikanan

Umum tahun 2018 sebesar 536.100 kg mengalami peningkatan sebesar 100 kg dari tahun 2017 sebesar 530.000 kg dan melebihi target tahun 2018 sebesar 536.000kg.

Realisasi pendapatan Nelayan Tahun 2018 Rp. 30.040.860 jika dibandingkan dengan pendapatan nelayan tahun 2017 sebesar Rp. 28.800.000 maka pendapatan nelayan tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 4,31% dan melebihi target Dinas Perikanan sebesar 1%. Perkembangan Pendapatan Nelayan dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik III.C.1

Perkembangan Pendapatan Nelayan

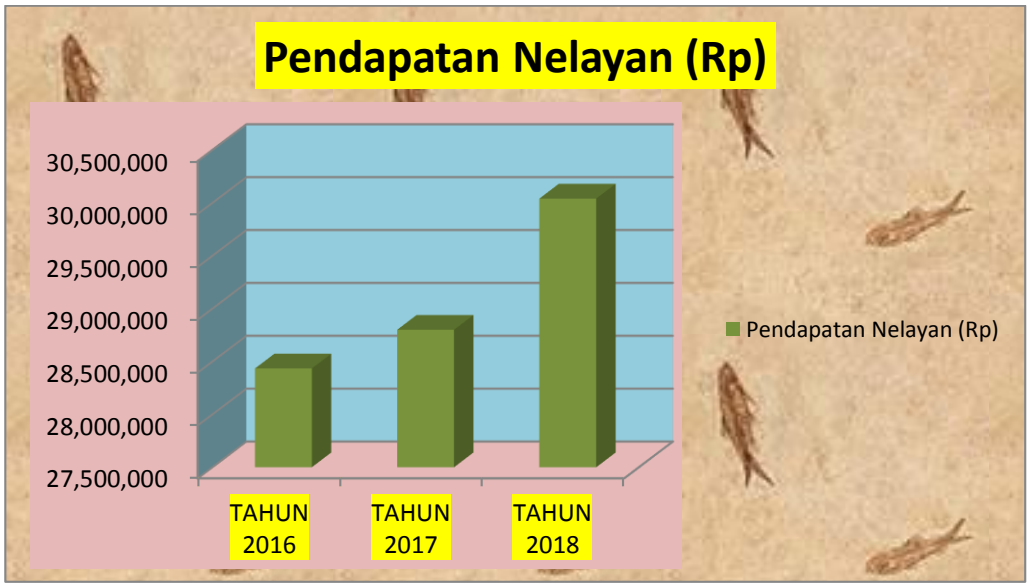

Sumber Data : Dinas Perikanan

Upaya – upaya untuk meningkatkan pendapatan nelayan adalah sebagai berikut :

- Penebaran benih ikan di perairan umum ;
- Pembinaan/pelatihan kepada nelayan dan masyarakat pesisir berupa pelatihan penangkapan ikan yang ramah lingkungan, kelembagaan, kapasitas nelayan ;

- Pelatihan penanganan ikan segar secara baik adalah dengan bekerja cepat, rapi, bersih dan selalu dalam rantai dingin.

2. Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya

Meningkatnya persentase produksi perikanan budidaya terdiri dari budidaya air payau dan budidaya air tawar. Realisasi peningkatan perikanan air payau tahun 2018 sebesar 0,2% sesuai target yang ditetapkan sebesar 0,2%. Peningkatan 0,2% jika dikuantitatifkan sebesar 75.877.437 kg dengan realisasi 75.932.450 kg dan mengalami peningkatan sebesar 157.697 kg dari tahun 2017 sebesar 75.719.740 kg .

Realisasi peningkatan produksi perikanan air tawar pada tahun 2018 sebesar 4,3% dan melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 3%. Secara kuantitatif realisasi produksi perikanan air tawar pada tahun 2018 sebesar 20.653.734 kg dan sudah melampaui target 20.389.932 kg dan mengalami peningkatan sebesar 857.684 kg dari tahun 2017 sebesar 19.796.050 kg. Grafik perkembangan produksi perikanan budidaya dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik III.C.2

Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya

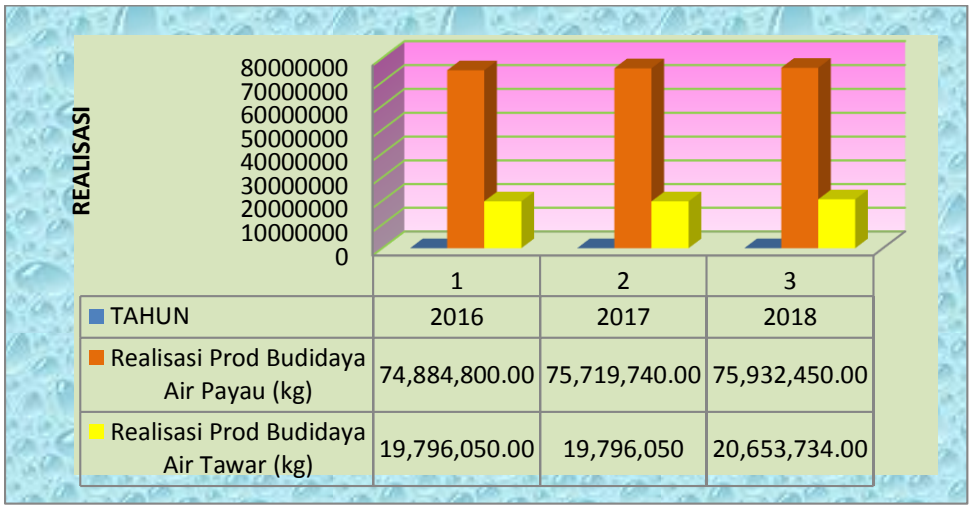

	1	2	3
TAHUN	2016	2017	2018
Realisasi Prod Budidaya Air Payau (kg)	74,884,800.00	75,719,740.00	75,932,450.00
Realisasi Prod Budidaya Air Tawar (kg)	19,796,050.00	19,796,050	20,653,734.00

Sumber Data : Dinas Perikanan

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya antara lain :

- Pemberian hibah kepada pembudidaya berupa kolam, benih, pakan dan pupuk
- Penyediaan sarana prasarana budidaya
- Pengawasan pemakaian OIKB (obat ikan kimia dan biologi)
- Penerapan CBIB (cara budidaya yang baik)
- Penggunaan probiotik
- Pembinaan/pelathan terhadap pembudidaya air payau dan air tawar
- Layanan Posikandu (Pos kesehatan ikan terpadu) membantu pembudidaya dalam menangani permasalahan terhadap kesehatan ikan, pengambilan sampel residu (ikan/udang dan tanah) , pelayanan vaksinasi, jasa konsultasi, maupun pusat informasi baik yang sifatnya aktif maupun pasif

2. Produktivitas hasil perikanan

Komoditi unggulan Kabupaten Sidoarjo adalah Bandeng dan Udang Windu yang mempunyai ciri khas yang berbeda dibanding daerah lain. Luas total Tambak di Kabupaten Sidoarjo 15.530 Ha dengan menggunakan sistem budidaya polikultur udang dan bandeng dari luas tersebut 10.860 Ha ditebari Udang Windu dan 15.220 Ha ditebari Bandeng. Meningkatnya produktivitas udang Windu dan Bandeng digambarkan dengan jumlah produksi udang windu dan bandeng per hektar per tahun dengan satuan kg/ha/th.

Perkembangan produktivitas udang windu dan bandeng tahun 2016, 2017 dan 2018 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik III.C.3

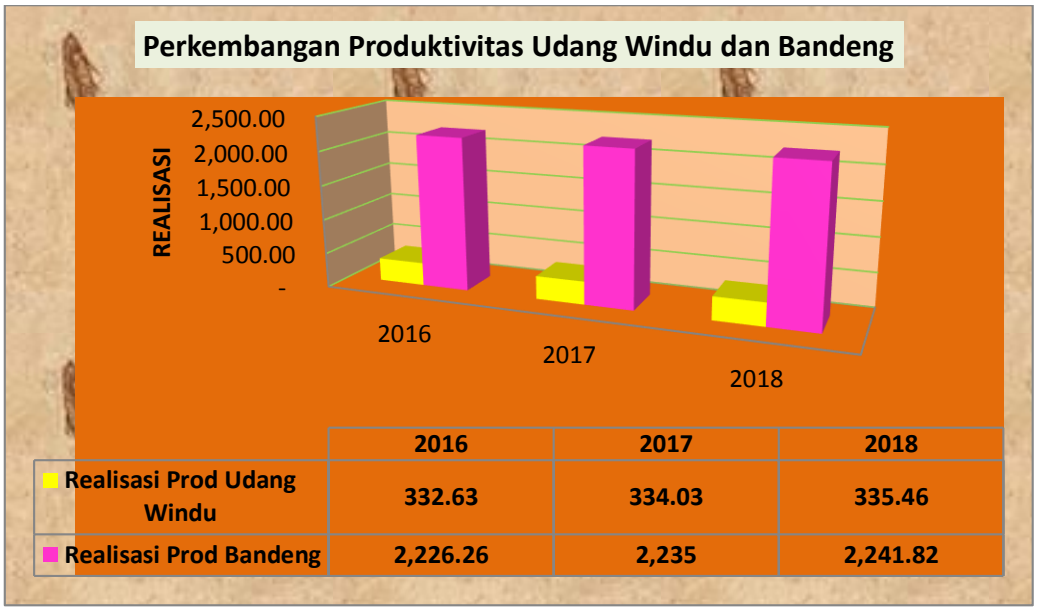

	2016	2017	2018
Realisasi Prod Udang Windu	332.63	334.03	335.46
Realisasi Prod Bandeng	2,226.26	2,235	2,241.82

Sumber Data : Dinas Perikanan

Realisasi produktivitas Udang Windu pada tahun 2018 sebesar 335,46 kg/ha/th meningkat sebesar 1,46 kg/ha/th dari tahun 2017 sebesar 334 kg/ha/th dan mencapai target tahun 2018 sebesar 334,03 kg/ha/th.

Sedangkan realisasi produktivitas bandeng pada tahun 2018 sebesar 2.241,82 kg/ha/th meningkat sebesar 6,82 kg/ha/th dari tahun 2017 sebesar 2.235 kg/ha/th dan mencapai target 2018 sebesar 2236,24 kg/ha/th

Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas adalah :

- Padat penebaran tinggi
- Daya dukung lahan cukup
- Berkurangnya pencemaran

3. Nilai Tambah produksi olahan hasil perikanan

Produk hasil olahan perikanan sudah beragam dari yang menggunakan nama lokal dengan bentuk yang spesifik sampai yang modern dengan formulasi khusus. Peluang usaha yang semakin terbuka untuk pasar produk olahan ikan memungkinkan setiap pembudidaya ikan atau nelayan terjun langsung menjadi pengolah dan pemasar produk olahan hasil perikanan . Jenis olahan perikanan antara lain : Bandeng Asap, otak-otak, bandeng presto, siomay, krupuk udang, petis, terasi, nugget, bakso, kripik kulit, dan lain sebagainya, dari jenis olahan tersebut yang menjadi produk unggulan adalah krupuk udang dan bandeng asap, krupuk udang Sidoarjo rasanya gurih dan tidak berbau karena bahannya dari udang segar dengan sentra produksi di wilayah Sidoarjo, Buduran, Candi .

Nilai tambah (value added) merupakan pertambahan nilai suatu komoditas karena mengalami proses pengolahan, pengangkutan ataupun penyimpanan dalam suatu produksi. Dalam proses pengolahan nilai tambah dapat didefinisikan sebagai selisih antara nilai produk dengan nilai biaya bahan baku dan input lainnya termasuk tenaga kerja. Realisasi Nilai tambah produksi hasil olahan perikanan yang berupa krupuk udang tahun 2018 sebesar Rp. 60.000/kg Dengan target sebesar Rp. 58.000/kg sedangkan nilai tambah untuk bandeng asap tahun 2018 sebesar Rp.130.000/kg dengan target sebesar Rp. 125.000/kg.

Upaya -upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah produksi hasil olahan perikanan sebagai berikut :

- Pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat dan POKLAHSAR (kelompok pengolah dan pemasar
- Menjaga Keamanan Produk Olahan Perikanan
- Menjalin kemitraan dengan berbagai stake holder
- Temu bisnis antar pelaku usaha perikanan

Perkembangan Nilai Tambah produk hasil olahan perikanan tahun 2016, 2017 dan 2018 terlihat pada grafik berikut ini :

Grafik III.C.4

Perkembangan Nilai Tambah Produksi Hasil Olahan Perikanan

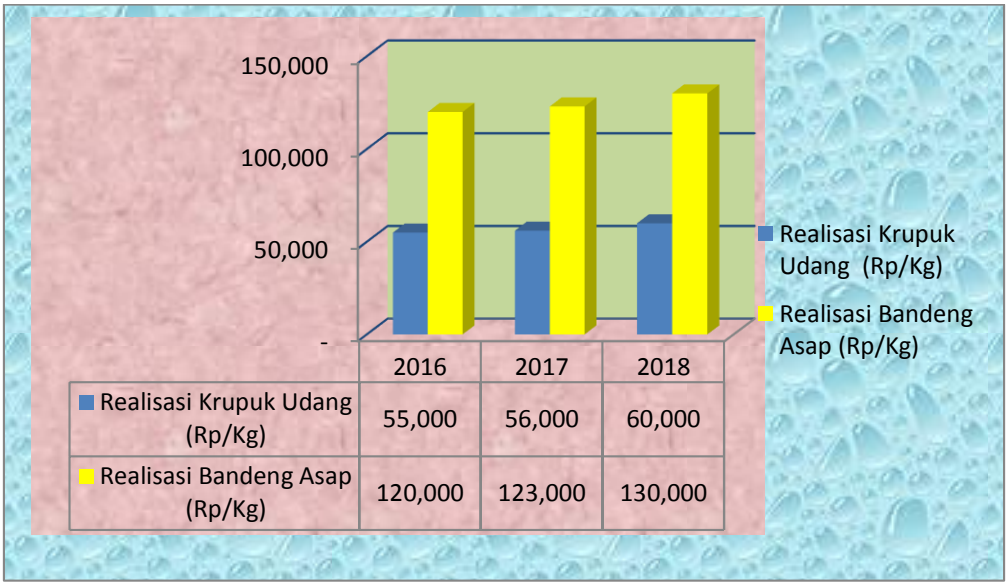

	2016	2017	2018
Realisasi Krupuk Udang (Rp/Kg)	55,000	56,000	60,000
Realisasi Bandeng Asap (Rp/Kg)	120,000	123,000	130,000

Sumber Data : Dinas Perikanan

4. Tingkat konsumsi makan ikan

Tingkat konsumsi ikan masyarakat Sidoarjo tahun 2018 sebesar 32,20 kg/kapita/th dibandingkan dengan tahun 2017 yang sebesar 30,51 kg/kapita/th terjadi peningkatan konsumsi ikan sebesar 1,69 kg/kapita/th. Meningkatnya konsumsi ikan masyarakat Sidoarjo karena meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi ikan, protein hewani asal ikan sudah terbukti mampu meningkatkan perkembangan sel-sel otak karena di dalam protein hewan asal ikan mengandung asam amino Omega 3 selain itu harga ikan relatif lebih murah.

Upaya untuk memotivasi masyarakat dalam mengkonsumsi ikan melalui :

- Menyelenggarakan Gebyar GEMARIKAN (gerakan makan ikan) dan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan)
- Promosi , roadshow/safari gemarikan di sekolah-sekolah dasar dan taman kanak – kanak
- Bandeng murah untuk masyarakat Sidoarjo yang dilaksanakan dua kali dalam satu tahun pada saat bulan Ramadhan dan Maulid Nabi Muhammad SAW
- Introduksi Produk ikan/memberi pengetahuan mengolah ikan kepada masyarakat untuk dikonsumsi keluarga sendiri maupun sebagai peluang usaha.

Perkembangan tingkat konsumsi ikan tahun 2016, 2017 dan 2018 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik III.C.5

Perkembangan Tingkat Konsumsi Ikan

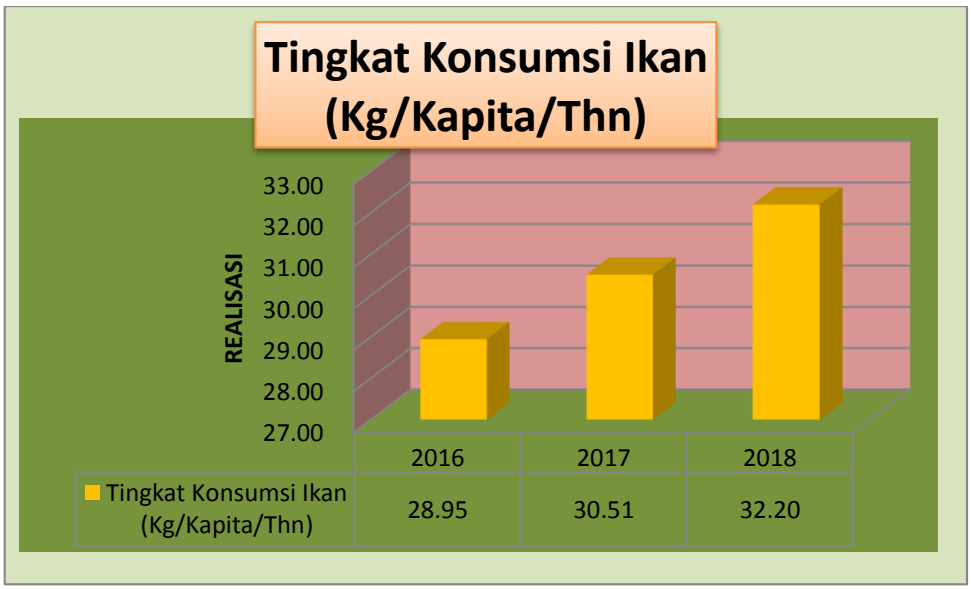

Sumber Data : Dinas Perikanan

c. SKPD Penyelenggara Urusan

Urusan kelautan dan perikanan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan.

d. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia penyelenggara urusan kelautan dan perikanan di Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo berjumlah 41 orang. Secara rinci SDM penyelenggara urusan Kelautan dan Perikanan menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir. Sedangkan untuk jabatan fungsional untuk urusan kelautan dan perikanan tidak tersedia.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran (per program)

Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program sebagaimana terlampir.

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Rp 9,920,655,503.00	Rp 9,326,406,867.00	94.01%
2	Program peningkatan produksi ikan dan pengawasan perikanan tangkap	Rp 667,225,500.00	Rp 650,741,909.00	97.53%
3	Program pengolahan, kesehatan ikan dan lingkungan	Rp 2,176,371,750.00	Rp 1,396,780,750.00	64.18%

f. Proses Perencanaan

Proses perencanaan urusan Kelautan dan Perikanan melalui sinkronisasi usulan dari hasil musrenbang kecamatan dengan rencana kerja Dinas Perikanan.

g. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan Kelautan dan Perikanan pada Dinas Perikanan adalah sebagaimana terlampir.

2. Urusan Pertanian

a. Program

Program stratejik pembangunan untuk urusan Pertanian yang dilaksanakan pada tahun 2018 meliputi :

1. Peningkatan Hasil Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
2. Program Peningkatan Produksi Hasil Perkebunan
3. Program Peningkatan Kualitas Produksi Peternakan/Kehewanan dan Hasil Hewan
4. Program penyuluhan dan pemberdayaan penyuluh

b. Realisasi Pelaksanaan Program Serta Permasalahan Dan Solusinya

Keseluruhan program tersebut dipadukan untuk mencapai keberhasilan kinerja, diantaranya :

1. Produksi dan Produktivitas tanaman pangan dan hortikultura.

Perkembangan produksi tanaman pangan dan hortikultura sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.C.1

Perkembangan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (Kw)

JENIS/ TAHUN	2016	2017	2018	Target 2018	% Capaian Target
Padi	2.186.310	2.058.900	2.044.800	2.059.105,9	99,30%
Jagung	7.170	11.788	12.905	11.789,2	109,46%
Kacang Hijau	15.702	15.704	21.455	15.705,6	136,60%
Kedelai	9.350	9.716	6.020	9.717,0	61,95%
Sawi	42.610	52.020	70.194	52.025,2	134,92%
Bayam	40.062	42.572	40.588	42.576,3	95,33%
Kangkung	34.457	43.317	46.809	43.321,3	108,05%

Sumber Data : Dinas Pangan dan Pertanian Kab. Sidoarjo

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa produksi tanaman pangan dan hortikultura pada tahun 2018 rata-rata mengalami peningkatan, tetapi komoditas padi mengalami penurunan sebesar 14.100 kw atau 0,68% dari 2.058.900 Kw menjadi 2.044.800 Kw, hal ini disebabkan oleh luas lahan yang menurun, ketersediaan air yang kurang sehingga petani tidak bisa tanam padi. Sedangkan komoditas lainnya seperti jagung dan kacang hijau mengalami peningkatan dari tahun 2017 . Peningkatan yang paling signifikan terjadi pada komoditas Kacang hijau yaitu meningkat sebesar 36,62% atau sebanyak 5.751 Kw dari 15.704 Kw menjadi 21.455 Kw. Hal ini disebabkan adanya program pemerintah melalui dana APBN berupa bantuan benih kacang hijau mendukung perluasan tanam di beberapa Kecamatan, musim kemarau yang panjang mendukung untuk menanam kacang hijau karena kacang hijau tidak membuatuhkan banyak air dan terpengaruh adanya luas lahan produktif yang berkurang karena adanya peralihan fungsi.

Apabila dibandingkan dengan target yang sudah ditentukan pada tahun 2018 produksi jagung dan kacang hijau sudah mencapai target yang ditentukan. Realisasi jumlah Produksi kedelai mencapai 61.95% dari target sebesar 9.717 Kw, Hal ini disebabkan banyak petani yang beralih menanam dari komoditas kedelai menjadi kacang hijau karena mempunyai harga yang cukup baik dan pada musim sebelumnya petani mengalami kerugian karena kedelai terserang OPT.

Perkembangan produksi hortikultura pada tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 terjadi peningkatan yang signifikan. Hal tersebut terlihat pada produksi sayuran Sawi yang mengalami kenaikan sebesar 42,62% dibanding tahun 2017 yaitu kenaikan sekitar 22.174 kw, dikarenakan harga sawi pada tahun 2018 cenderung lebih mahal dibanding sayuran daun lainnya, sehingga petani memilih bertanam sawi daripada tanaman sayur daun lainnya. Pada sayuran Bayam produksi tahun 2018 terjadi penurunan sebesar 4,77% dibandingkan tahun 2017 yaitu sekitar 1.988 kw, hal ini disebabkan petani

beralih tanam ke tanaman sawi. Sedangkan pada sayuran Kangkung terlihat tidak terjadi perubahan peningkatan produksi yang signifikan yaitu 8,06% sekitar 3.492 kw hal ini dikarenakan ada tambahan luas tanam dari kecamatan yang mulai menanam kangkung seperti Kecamatan Buduran.

Perkembangan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura sebagaimana terlihat pada grafik berikut ini :

Grafik III.C.6

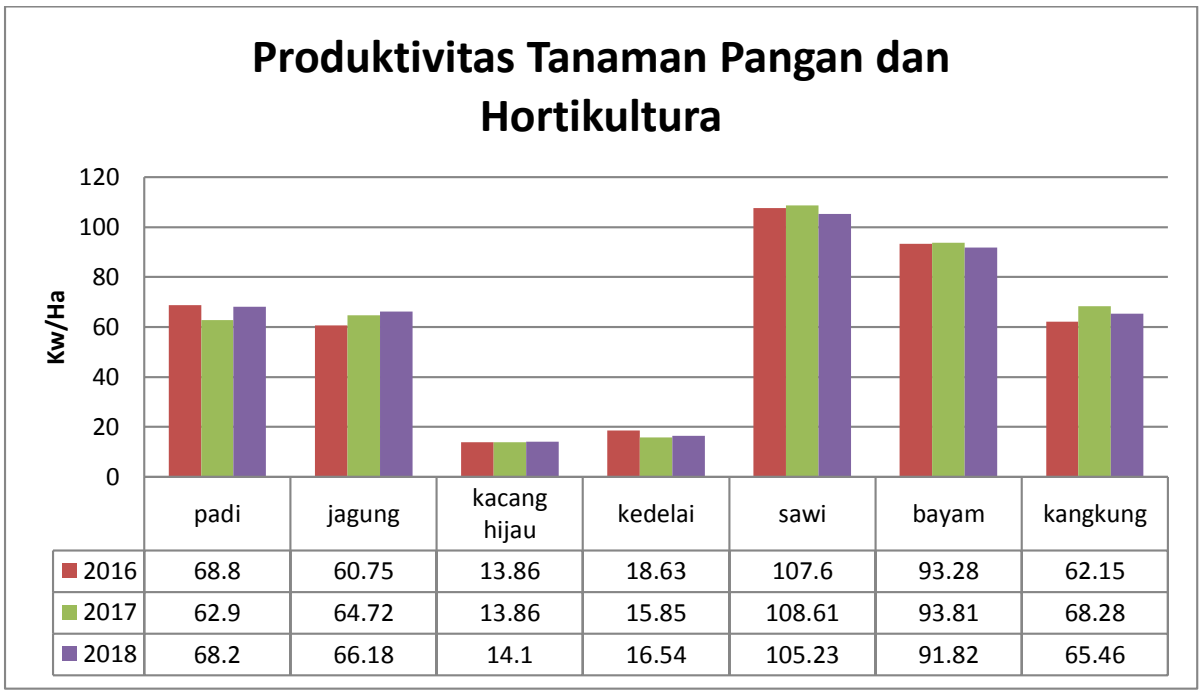

	padi	jagung	kacang hijau	kedelai	sawi	bayam	kangkung
2016	68.8	60.75	13.86	18.63	107.6	93.28	62.15
2017	62.9	64.72	13.86	15.85	108.61	93.81	68.28
2018	68.2	66.18	14.1	16.54	105.23	91.82	65.46

Sumber Data : Dinas Pangan dan Pertanian Kab. Sidoarjo

Produktivitas tanaman pangan dan hortikultura pada tahun 2018 semua mengalami peningkatan yaitu komoditas padi naik sebesar 8,42% atau 5,3 Kw/Ha. Sedangkan komoditas jagung naik sebesar 1,46 Kw/Ha. Produktivitas kacang hijau naik 0,24 kw/ha dari 13,86 Kw/Ha menjadi 14.1 Kw/Ha. Produktivitas kedelai naik 0,69 kw/ha dari 15,85 Kw/Ha menjadi 16,54 Kw/Ha. Meskipun produktivitas tanaman pangan dan hortikultura mengalami peningkatan tetapi untuk tanaman kedelai belum dapat meningkatkan

produksi. Hal ini disebabkan luas panen mengalami penurunan 249 ha. Pada tahun 2017 luas panen kedelai sejumlah 613 ha sedangkan pada tahun 2018 hanya sejumlah 364 ha.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura agar dapat mencapai target adalah sebagai berikut :

a. Melakukan sosialisasi dan pendampingan penerapan teknologi tepat guna.
b. Menyediakan dan menggunakan benih / bibit unggul berlabel.
c. Menggunakan sarana dan prasarana mekanisasi pertanian.
d. Gerakan pengendalian bersama – sama untuk menekan populasi OPT sehingga kerusakan yang lebih parah dapat dihindari.
e. Menambah persediaan pestisida agar penanganan/ pengendalian hama cepat dapat ditangani.

Sedangkan untuk meningkatkan minat petani dalam mengelola usahanya maka dilakukan dengan mengikuti dan menggunakan Klaim Asuransi Pertanian (AUTP) Untuk penanganan kendala puso.

2. Produksi peternakan

1) Daging

Produksi daging tahun 2018 sebesar 27.640.811 kilogram. Apabila dibandingkan dengan produksi tahun 2017 terjadi peningkatan produksi sebesar 11,59% atau 2.871.795 Kilogram.

Tabel III.C.2

Realisasi produksi daging tahun 2017 dan 2018

No	Jenis Ternak	2017	2018	Persentase
1	Sapi Potong	6.833.840	7.522.583	10
2	Kambing	1.685.378	3.326.419	97
3	Domba	13.057	15.565	19
4	Unggas	16.236.740	16.776.245	5,39
	Jumlah	**24.796.016**	**27.640.811**	**11,59**

Sumber Data : Dinas Pangan dan Pertanian Kab. Sidoarjo

Hal ini dikarenakan :

a. Kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi daging ternak terutama daging sapi dan unggas semakin tinggi sehingga permintaan dan pemotongan ternak naik

b. Harga daging yang terus naik (mahal) sehingga banyak peternak yang mengambil tindakan melakukan penggemukan sapi jantan

c. Banyaknya permintaan daging kambing dan domba untuk Aqiqah

Perkembangan produksi daging dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik IIII.C.7

Perkembangan Produksi Daging

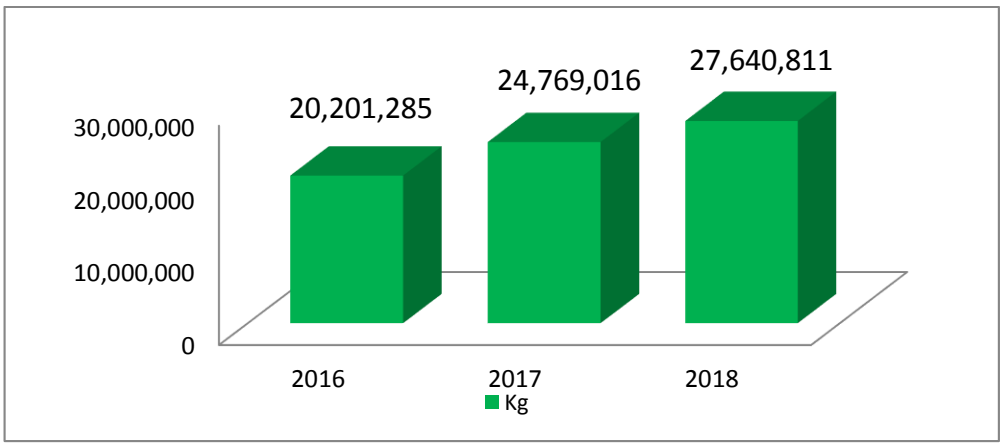

Sumber Data : Dinas Pangan dan Pertanian Kab. Sidoarjo

2) Telur (kg)

Produksi telur pada tahun 2018 sebesar 2.647.150 Kg, apabila dibandingkan dengan produksi telur 2017 sebesar 2.799.930 kg terdapat penurunan sebesar 152.780 kg atau 5,4%.

Hal ini disebabkan meningkatnya harga jagung sebagai bahan pakan ternak karena jagung dari petani sudah dibeli oleh pabrikan pakan ternak karena pabrik pakan dilarang import jagung.

Untuk meningkatkan produksi telur, maka Pemerintah memberikan subsidi harga jagung import melalui Bulog dengan harga Rp. 4.000/kg. Pada Tahun 2018 Dinas Pangan dan Pertanian banyak melakukan kegiatan pelatihan dan pengawasan biosecurity pada peternak sehingga para peternak semakin menyadari pentingnya penanganan kesehatan, higienis sanitasi kandang dan manajemen pakan yang baik akan meningkatkan produktifitas telur yang dihasilkan, selain itu kami juga melakukan survey harga pasar yang sangat bermanfaat untuk menjaga stabilitas harga pemasokan antara farm, agen sampai konsumen.

Perkembangan produksi telur dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik III.C.8

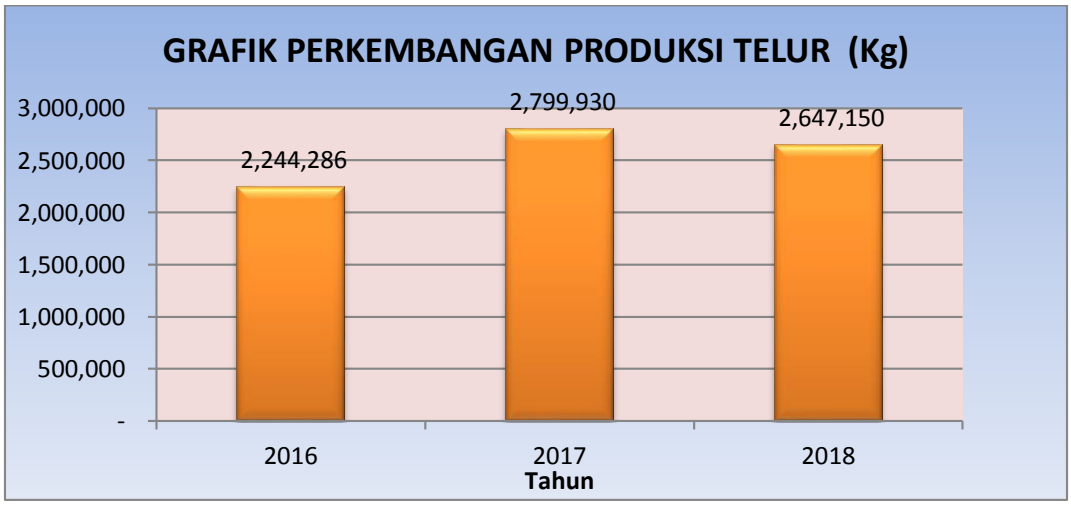

Sumber Data : Dinas Pangan dan Pertanian Kab. Sidoarjo

3) Susu (Liter)

Produksi susu pada tahun 2018 sebanyak 8.267.863 liter, apabila dibandingkan tahun 2017 dengan produksi sebanyak 7.300.702 liter terdapat peningkatan 967.161 liter atau 11,6%.

Produksi susu meningkat dan mencapai target dikarenakan adanya kontrol veteriner terhadap kewaspadaan penyakit hewan menular (lalu lintas hewan, mutu hasil produksi susu secara laboratorium dan biosecurty), Optimalisasi fungsi Puskeswan (Pusat Kesehatan Hewan) yang sudah tersebar di 4 (empat) Kecamatan yaitu Porong, Krian, Taman dan Tarik

Dengan adanya program Gangrep (Gangguan Reproduksi) dan Upsus Siwab (Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting) sehingga sapi sehat, diinseminasi dan bunting kemudian beranak sehingga produksi susu juga meningkat. Selain itu melakukan perbaikan gizi pakan melalui pembinaan pembuatan pakan ternak secara sederhana sehingga mudah dilaksanakan.

Perkembangan produksi susu dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik III.C.9

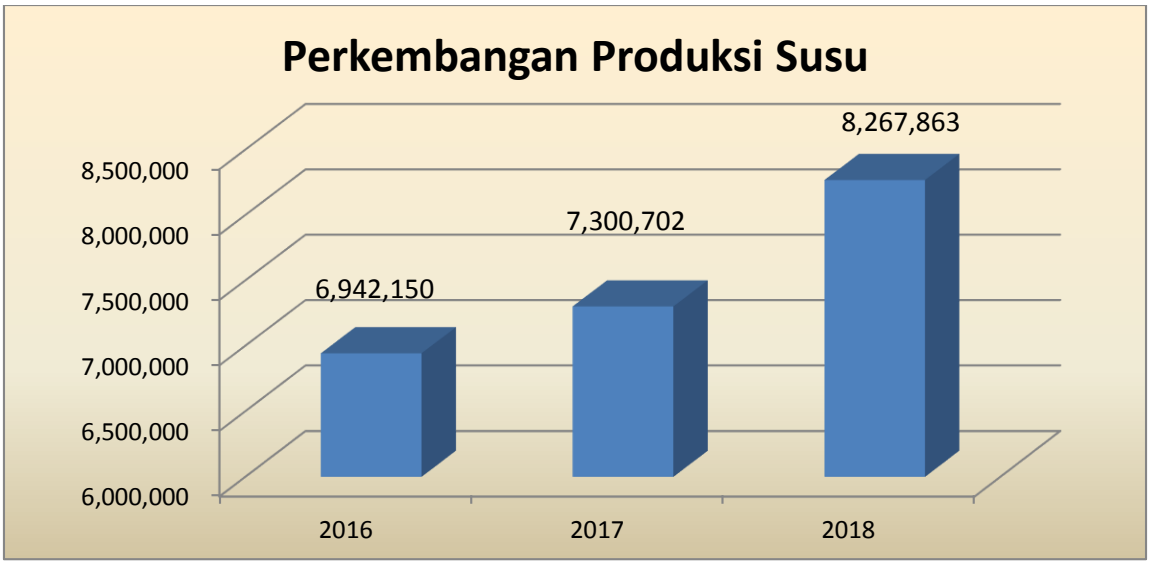

Sumber Data : Dinas Pangan dan Pertanian Kab. Sidoarjo

c. SKPD Penyelenggara Urusan

Urusan pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pangan dan Pertanian.

d. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia penyelenggara urusan pertanian di Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo berjumlah 96 orang. Secara rinci SDM penyelenggara urusan pertanian menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran (per program)

Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program sebagaimana terlampir

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Peningkatan Hasil Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Rp 1,292,150,000.00	Rp 1,240,392,000.00	95.99%
2	Program Peningkatan Produksi Hasil Perkebunan	Rp 2,270,575,000.00	Rp 476,710,000.00	21.00%
3	Program Peningkatan Kualitas Produksi Peternakan/Kehewanan dan Hasil Hewan	Rp 15,946,209,200.00	Rp 7,133,120,942.00	44.73%
4	Program penyuluhan dan pemberdayaan penyuluh	Rp 1,230,567,000.00	Rp 1,103,837,000.00	89.70%

f. Proses Perencanaan

Proses perencanaan urusan pertanian melalui sinkronisasi usulan dari hasil musrenbang kecamatan dengan rencana kerja Dinas Pangan dan Pertanian. Penyelenggaran urusan pertanian dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dilaksanakan oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo.

g. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan pertanian pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo sebagaimana terlampir.

3. Urusan Pariwisata

a. Program

Program stratejik pembangunan untuk urusan pariwisata yang dilaksanakan pada tahun 2018 meliputi Program Pengembangan Objek,Promosi, dan Usaha Pariwisata

b. Realisasi Pelaksanaan ProgramSerta Permasalahan Dan Solusinya

Hasil pelaksanaan program tersebut dapat ditunjukkan pada pencapaian kinerja, sebagai berikut :

Jumlah kunjungan wisatawan/Rata – Rata Lama Tinggal Wisatawan

Rata – Rata Lama Tinggal Wisatawan adalah tingkat rata – rata lamanya seluruh wisatawan berada di suatu daerah atau negara tujuan wisatawan.

Untuk kunjungan wisatawan di Kabupaten Sidoarjo, rata–rata tinggal selama **2** hari (angka sementara) didasarkan pada tingkat hunian hotel di Sidoarjo pada tahun 2018.

Capaian ini memenuhi 100 % dari target RPJMD selama **2** hari tinggal.

Indikator Rata – Rata Lama Tinggal Wisatawan, didukung dengan Saran SKPD dengan Indikator sevagai berikut :

1. **Jumlah Kunjungan Wisatawan**

   Kabupaten Sidoarjo memiliki berbagai obyek wisata yang dipetakan dalam beberapa jenis antara lain adalah wisata alam, wisata minat khusus dan belanja,wisata sejarah, wisata cagar budaya, wisata religi,wisata geologi, Wisata Edukasi, Wisata Buatan , Wisata Pemancingan, Hiburan lain, serta

wisata olahraga dan ruang terbuka hijau. Berikut adalah beberapa objek unggulan dari masing-masing jenis obyek wisata tersebut diatas, yaitu :

Tabel III.C.3

Obyek Wisata

Wisata Alam	4 Obyek
Obyek Unggulan : 1. Pantai Kepetingan 2. Pantai Pucukan 3. Pantai Gesikan Cemandi 4. Dermaga Tlocor dan Pulau LUSI	
Wisata Minat Khusus dan Belanja	11 Obyek
Obyek Unggulan : 1. Industri Tas & Koper (INTAKO) 2. Sepatu Sandal Wedoro 3. Gedung Olah Raga (GOR) 4. Bursa Kupang & Tanaman Hias Gedangan 5. Bandara Ir. Juanda 6. Glass Painting Lukisan Kaca 7. Kerajinan Emas dan Perak 8. Kerajinan Wayang Kulit 9. Kerajinan Batik Kenongo 10. Kerajinan Batik Jetis 11. Alun-Alun Sidoarjo	
Wisata Sejarah	17 Obyek
Obyek Unggulan : 1. Museum Negeri Mpu Tantular 2. Monumen R.M. Mangundiprojo 3. Monumen Perjuangan Rakyat Sidoarjo 4. Monumen Pesawat TNI-AL 5. Monumen Ponti XV-2000 6. Gedung Joang 45 Sidoarjo 7. Rumah Induk Bupati Sidoarjo 8. Stasiun Kereta Api Sidoarjo 9. Stasiun Kereta Api Gedangan 10. Stasiun Kereta Api Porong 11. Masjid Al.Abror 12. Masjid Agung Sidoarjo 13. Klenteng Krian 14. Bekas PG Tanggulangin	

15. PG.Tulangan 16. PG.Gula Krembung 17. PG.Gula Watoetoelis	
Wisata Cagar Budaya	20 Obyek
Obyek Unggulan : 1. Bakalan Prasasti 2. Candi Pari 3. Candi Dermo 4. Candi Sumur 5. Candi Pamotan 1 dan 2 6. Candi Lemah Dhuwur 7. Candi Klagen 8. Candi Medalem & Sumur Kuno 9. Candi Tawangalun 10. Situs Watu Tulis 11. Situs Patar Kidul 12. Situs Medowo 13. Situs Kedung Klinter 14. Situs Terung Wetan 15. Situs Candi Wangkal 16. Struktur Situs Plawangan 17. Prasasti Lingga 18. Prasasti Kemlagian 19. Prasasti Peripih 20. Fragmen Arca	
Wisata Religi	3 Obyek
Obyek Unggulan : 1. Makam Dewi Ayu Sekardadu 2. Makam Mbah Ali Mas'Ud 3. Makam Adipati Terung	
Wisata Geologi	1 Obyek
Obyek Unggulan : 1. Lumpur Sidoarjo	
Wisata Edukasi	1 Obyek
Obyek Unggulan : 1. Alas Prambon	

Wisata Buatan	30 Obyek
Obyek Unggulan : 1. Antares Green Park 2. Kolam Renang Taman Hiburan Krian Indah 3. Kolam Renang Tivoli Sport Club BCF 4. Kolam Renang dan Tempat Bermain Jala Sari (Ponari) 5. Kolam Renang Sendang Delta GOR 6. Kolam Renang Suko Asri 7. Kolam Renang Water Park Sun City 8. Kolam Renang Delta Fishing 9. Kolam Renang Embun Jati Mas 10. Kolam Renang Candi Pari 11. Kolam Renang Permata 12. Kolam Renang Kedung Galih Tirta 13. Kolam Renang Rahayu Park 14. Kolam Renang Jedong Cangkring 15. Kolam Renang Citra Harmoni Park 16. Kolam Renang Surya Bagus 17. Kolam Renang Sport Club Pondok Tjandra 18. Kolam Renang PT.Unimas Wahana Indonesia 19. Kolam Renang Graha Tirta 20. Kolam Renang Delta Sport Club 21. Kolam Renang Tirta Krida Juanda (TNI AL) 22. Kolam Renang Golden Aquatic 23. Kolam Renang Tirta Agung 24. Kolam Renang Tirta Rani 25. Kolam Renang Legok Asri 26. Kolam Renang Ketegan Waterpark 27. Klapa Dream Club 28. Kraton Waterpark 29. Sport Club Puri Surya Jaya 30. Water Fantasi Citra Garden	
Wisata Pemancingan	39 Obyek
Obyek Unggulan 1. Kolam Pancing dan Outbond Kusuma Tirta Minapolitan 2. Kolam Pancing dan Lesehan Podorejo 3. Kolam Pancing Nelayan Bluru 4. Kolam Pancing dan Lesehan “ Bu	

Retno “ 5. Kolam Pancing Delta Fishing 6. Kolam Pancing Barongan 7. Kolam Pancing Banyu Mili Sidoarjo 8. Kolam Pancing Pak Basuki 9. Kolam Pancing Candi 10. Kolam Pancing Diqqi 11. Kolam Pancing Monstero Fishing 12. Kolam Pancing .Tiga Putra 13. Kolam Pancing dan Lesehan Apung”Saung Bungahe Ati 14. Kolam Pancing Teguh Jaya 15. Kolam Lomba Makarya Binangun 16. Kolam Pancing Soponyono 17. Kolam Pancing Rahayu Jaya Abadi 18. Kolam Pancing Kotero 19. Kolam Pancing Tambak Jaya 20. Kolam Pancing Bandeng Besar-Tambak Jaya 21. Kolam Pancing Tombro Kharisma Juanda 22. Kolam Pancing APS 23. Kolam Pancing Siap Saji 24. Kolam Pancing Arjuna 25. Kolam Pancing Tamasya 26. Kolam Pancing Candi Bang 27. Kolam Pancing Juanda Fishing 28. Kolam Pancing Pak Ri 29. Kolam Pancing Tombro “Elok” 30. Kolam Pancing Gt Patin Ss (Lomba) 31. Kedai Makan Putri dan Kolam Pancing Lesehan Bu Retno 32. Kusuma Tirta Minapolitan 33. Mega Prima Fishing 34. Gafina Jaya Makmur (Harian & Kiloan) Pengelola Pak Koyo 35. Sumber Bening – Eks Anggun Sejahtera 36. Tambak Laguna 37. Tambak Gumilang 1 & 2 38. Tambak Sumber Rejeki 39. Warung Lesehan dan Kolam Pancing CSDW	

Hiburan Lain	17 Obyek
Obyek Unggulan : 1. Yayang Cafe I 2. Yayang Cafe II 3. King Karaoke 4. NAV Karaoke Keluarga 5. VIP Karaokedan KTV Pool (Karaoke Keluarga , Resto & Billard) 6. X2 Karaoke,Home Theater & Resto (Sherin Yuliasin) 7. Rumah Makan & Karoke Top (Budi Sugiarto) 8. Matahari Rumah Makan and Live Music 9. MX, Karaoke dan Resto 10. Inul Viesta 11. K-BRO Karaoke 12. Mom Viesta Karaoke 13. C.B.Karaoke 14. Scorpion 2 Karaoke Live Musik 15. D' yyas Cafe 16. Mitra Karaoke (PT.Sukses Bina Mitra) R.M dan Live Musik (Sout Sitompul) 17. Karaoke Keluarga Wonderland	
Wisata Industri dan Belanja	42 Obyek
Obyek Unggulan :	
1. Indah Bordir 2. Industri Sayangan 3. Industri Topi 4. Industri Logam (Komponen Listrik,Telepon, Alat Pertanian, Sepeda dll) 5. Industri Sandal 6. Industri Ikan Asin 7. Produk Sayur Mayur 8. Industri Tahu 9. Industri Tempe 10. Industri Kerupuk Ikan 11. Industri Kerupuk Kupang 12. Industri Anyaman Bambu (Rakitan Dapur) 13. Industri Kerajinan Perak 14. Industri Bando 15. Industri Jamu Tradisional 16. Industri Bandeng 17. Industri Pengrajin Tempe 18. Industri Kerupuk	

19. Industri Anyaman Bambu (Jrebeng) 20. Industri Anatomi Tubuh 21. Industri Batik Tulis 22. Industri Kaca Cermin 23. Industri Wayang Kulit 24. Industri Sayuran 25. Industri Kupang 26. Industri Udang Windu 27. Industri Mainan Anak 28. Industri Kerupuk 29. Industri Buah Belimbing 30. Industri Sepatu 31. Industri Tahu dan Susu 32. Industri Kendaraan Mobil 33. Industri Sandal Spoon 34. Industri Tempe 35. Industri Udang Windu 36. Industri Jamur Merang 37. Industri Bandeng 38. Industri Udang Windu 39. Kampung Telor Asin 40. Bursa Kupang 41. Kampung Jajanan 42. Pasar Kuliner ”PAZKUL	
Wisata Ruang Terbuka Hijau (RTH)	5 Obyek
Obyek Unggulan : 1. Taman Tanjung Puri 2. Taman Abhirama 3. Taman Apkasi 4. Taman Dwarakerta 5. Taman Abhirupa	
Wisata Olahraga	3 Obyek
Obyek Unggulan : 1. Stadion Jenggolo 2. Kompleks GOR Sidoarjo 3. Gedung Bulutangkis Sidoarjo	

Sumber Data : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Realisasi kunjungan wisatawan tahun 2018 adalah sebanyak 1.990.903 pengunjung yang terdiri dari kunjungan hotel sebesar 292.740 pengunjung yaitu wisatawan mancanegara sebanyak 3.364 pengunjung dan wisatawan

nusantara sebanyak 289.376 pengunjung. Serta kunjungan obyek wisata sebesar 1.698.163 pengunjung yaitu wisatawan mancanegara sebanyak 7.843 pengunjung dan wisatawan nusantara sebanyak 1.690.320 pengunjung. Obyek wisata yang paling sering dikunjungi dan data kunjungan hotel antara lain sebagai berikut :

Tabel III.C.4

Kunjungan Wisatawan

No	Nama Obyek	Lokasi	Pengunjung		Total
			Wisman	Wisnus	
1	Alas Outbond Prambon	Desa Simpang , Kecamatan Prambon	-	16.729	16.729
2	Batik Al.Huda	Perum Sidokare, Sepande ,Kecamatan Candi	210	7.003	7.213
3	Candi Dermo	Desa Candinegoro, Kecamatan Wonoayu	-	1.073	1.073
4	Candi Medalem	Desa Medalem, Kecamatan Tulangan	-	565	565
5	Candi Pamotan	Desa Pamotan, Kecamatan Porong	-	682	682
7	Candi Sumur	Desa Candi Pari, Kecamatan Porong	-	4.362	4.362
8	Candi Tawangalun	Dukuh Kampung Baru RT 10 RW 05 Desa Buncitan, Kecamatan Sedati	-	2.236	2.236
9	Candi Wangkal	Desa Wangkal, Kecamatan Krembung	-	411	411
10	Intako Tanggulangin	Kendensari , Kecamatan Tanggulangin	4.494	137.927	142.421
11	Kampung Batik Jetis	Kelurahan Jetis, Kecamatan Sidoarjo	-	5.494	5.494
12	Kraton Waterpark Krian	Kraton, Kecamatan Krian	-	95.120	95.120
13	Kolam Pancing Delta Fishing	Desa Prasung, Kecamatan Buduran	-	196.815	196.815

14	Kolam Renang Sendang Delta GOR	Jln.Pahlawan No.200, Kecamatan Sidoarjo	-	107.682	107.682
15	Kolam Renang Antares	Jln. Kyai Mojo No.235 Sedeganmijen, Kecamatan Krian	-	2.145	2.145
16	Kolam Renang Candi Pari	Jl.Purbakala,Porong, Candipari, Kecamatan Porong	-	19.729	19.729
17	Kolam Renang Citra Garden	Perumahan Citra Garden , Ruko Sentra Niaga Blok Rk-32, Ental Sewu, Kecamatan Buduran	4	198.177	198.181
18	Kolam Renang Citra Harmoni	Jl.Raya Trosobo KM.20, Bringinbendo, Kecamatan Taman	-	125.362	125.362
19	Kolam Renang Golden Aquatic	Jl.Suko Selatan ,Suko Kecamatan Sukodono	-	15.793	15.793
20	Kolam Renang Ketegan Waterpark	Tanggulangin	-	11.625	11.625
21	Kolam Renang Puri Surya Jaya	Perumahan Puri Surya Jaya Taman Pasadena Blok CI no.1, Kecamatan Gedangan	-	26.886	26.886
22	Kolam Renang Suko Asri	Jl.Raya Suko Salam,Suko ,Kecamatan Sidoarjo	-	2.199	2.199
23	Kolam Renang Waterpark Suncity	Lemahputro, Jln.Pahlawan No.1 Sidokumpul, Kecamatan Sidoarjo	-	236.444	236.444
24	Kusuma Tirta Minapolitan	Ds.Kedungpeluk, Kecamatan Candi	-	10.514	10.514
25	Makam Dewi Ayu Sekardadu	Kepetingan, Kecamatan Buduran	-	19.657	19.657
26	Makam Adipati Terung	Dusun Kasak Desa Terungkulon, Kecamatan Krian	-	471	471
27	Makam Mbah Ud	Pagerwojo, Kecamatan Buduran	-	270.902	270.902

28	Museum Mpu Tantular	Jl. Raya Buduran Jembatan Layang, Siwalan Panji, Kecamatan Sidoarjo	130	40.838	40.968
29	Permata Tas dan Koper Tanggulangin	Desa Kendensari, Kecamatan Tanggulangin	3.005	100.318	103.323
30	Permata Waterpark Tanggulangin	Permata Sidoarjo Regency Blok N 9 Jl.Mangga No.4 Kecamatan Tanggulangin	-	11.219	11.219
31	Prasasti Kemlagian	Desa Tropodo, Kecamatan Krian	-	345	345
32	Situs Watu Tulis	Desa Watu Tulis, Kecamatan Prambon	-	1.730	1.730
33	Wisata Bahari Tlocor	Telocor, Kupang,Kecamatan Jabon	-	5.194	5.194
	Total		**7.843**	**1.690.320**	**1.698.163**

Sumber Data : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Adapun data kunjungan wisata terlampir di kolom berikutnya :

Tabel III.C.5

Kunjungan Wisatawan di Hotel

No	Nama Hotel	Pengunjung		Total
		Wisman	Wisnus	
1	Chiaro Hotel	-	2.178	2.178
2	Delta Sinar Mayang Hotel	83	6.033	6.116
3	Diamon Hotel	-	2.398	2.398
4	Garuda Express	-	256	256
5	Griya Melati Putih	-	575	575
6	Harapan Putra Jaya	-	5.463	5.463
7	Home Stay Caisar	-	370	370

8	Home Stay Pondok Nirwana	-	1.274	1.274
9	Hotel Mandiri 1 & 2	-	693	693
10	Hotel Wiston	24	2.073	2.097
11	Hotel AL-Munawaroh	15	1.944	1.959
12	Hotel Asa Graha	-	1.342	1.342
13	Hotel Barcelono	-	470	470
14	Hotel Benteng Portugis	-	350	350
15	Hotel Bungur	-	2.684	2.684
16	Hotel Delta	-	172	172
17	Hotel Edotel (hotel pelatihan siswa SMKN Sidoarjo)	-	3.259	3.259
18	Hotel Front One	-	1.566	1.566
19	Hotel Global INN	-	1.410	1.410
20	Hotel Griya Noumi	-	1.562	1.562
21	Hotel Halogen	326	7.410	7.736
22	Hotel Ibis Budget	294	4.259	4.553
23	Hotel Istana Permata	-	2.466	2.466
24	Hotel Karina	-	657	657
25	Hotel Kemuning	4	1.355	1.359
26	Hotel Laksana Indah	-	623	623
27	Hotel Medaeng	-	16.552	16.552
28	Hotel Menara Sakti Sejahtera	-	737	737
29	Hotel New Cahaya	-	1.143	1.143
30	Hotel Permata	-	3.176	3.176

31	Hotel Plaza Baru	-	4.397	4.397
32	Hotel Prisma	-	2.620	2.620
33	Hotel Santa Guest	-	425	425
34	Hotel Sarifah Zahrah	-	2.375	2.375
35	Hotel Sinar Express I	356	10.276	10.632
36	Hotel Sinar Express II	295	3.687	3.982
37	Hotel Sinar Express III	188	2.752	2.940
38	Hotel Sumber Dharmawan	-	401	401
39	Hotel Surya	-	272	272
40	Hotel Swiss Bell Inn Airport Juanda	179	3.113	3.292
41	Hotel Tilamas (PT. Juanda Cakrawala Nusantara)	48	8.732	8.780
42	Hotel Utami	-	26.463	26.463
43	Hotel Walan Syariah	80	1.492	1.572
44	Kartini Hotel	-	8.422	8.422
45	Losmen Laksana Indah Jaya	-	1.611	1.611
46	Losmen Nanda	-	2.128	2.128
47	Losmen Pentra	-	356	356
48	Losmen Rela Hati	-	292	292
49	Losmen Surya	-	373	373
50	Losmen Syariah	-	880	880
51	Losmen Tumbuh	-	660	660
52	New Sinar Hotel	-	669	669

53	Penginapan " Yuddys "	5	1.077	1.082
54	Penginapan Airi (Waru)	-	1.483	1.483
55	Penginapan Akor Jaya	-	400	400
56	Penginapan Are Jaya	-	348	348
57	Penginapan Armeda Jaya	-	3.509	3.509
58	Penginapan Assafak	-	3.919	3.919
59	Penginapan Bangkit.Hidayah	-	2.082	2.082
60	Penginapan Bungurasih Indah	-	5.245	5.245
61	Penginapan Buwono City	-	363	363
62	Penginapan Cendana	-	320	320
63	Penginapan Erisa (Waru)	-	2.498	2.498
64	Penginapan Galaxi	-	341	341
65	Penginapan Hafaro	-	1.399	1.399
66	Penginapan Hokki	-	3.350	3.350
67	Penginapan krisna	-	3.599	3.599
68	Penginapan Las Vegas	-	2.723	2.723
69	Penginapan Laurent	-	7.230	7.230
70	Penginapan Lezat	-	774	774
71	Penginapan Penantian	18	343	361
72	Penginapan Pendowo	-	3.423	3.423
73	Penginapan Perambanan 2	-	3.966	3.966
74	Penginapan Pondok Rizqi	-	512	512
75	Penginapan Rafa Zilda	-	2.064	2.064

76	Penginapan Raja Mulia	-	1.646	1.646
77	Penginapan Shofwa	-	602	602
78	Penginapan Situ Kurir	-	622	622
79	Penginapan sumber darmawati	-	3.217	3.217
80	Penginapan Wahyu Jaya	-	1.465	1.465
81	Penginapan Wahyu Jaya	-	831	831
82	Pondok Wisata Untung Suropati	-	3.856	3.856
83	Premier Inn Hotel	1.416	43.536	44.952
84	PT. Sukses Bina Mitra (Trans Hotel)	-	1.931	1.931
85	RR Maria K	-	4.036	4.036
86	The Sun Hotel (PT. Indraco)	33	8.354	8.387
87	Wisma Kartini	-	3.388	3.388
88	Wisma Nuansa (Transcity Tour & Trevel)	-	1.406	1.406
89	Wisma Perambanan 1	-	3.190	3.190
90	Wisma PKP RI	-	1.064	1.064
91	Wisma Tamrin	-	2.418	2.418
	Total	**3.364**	**289.376**	**292.740**

Sumber Data : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Perkembangan jumlah kunjungan wisata dari tahun 2015 sampai tahun 2018 menunjukkan trend meningkat sebagaimana terlihat pada grafik dibawah ini.

Grafik III.C.10

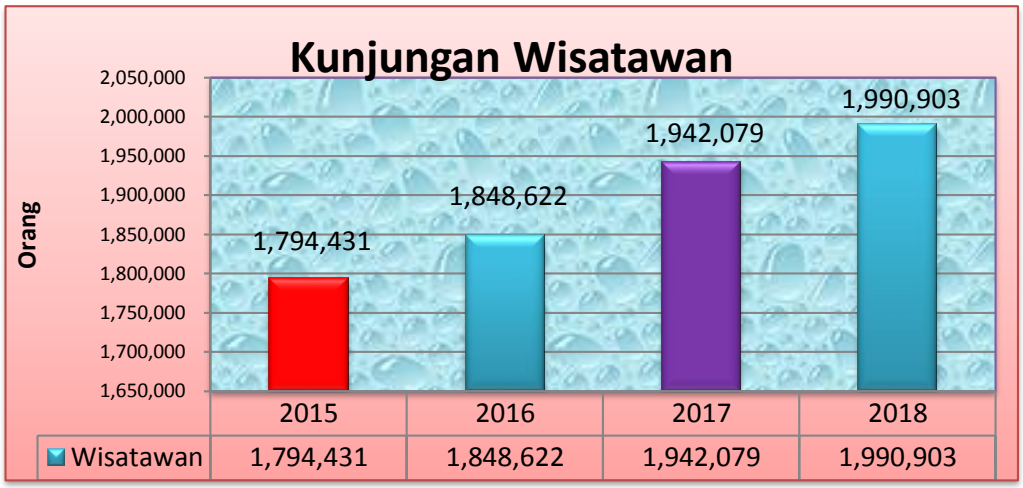

Sumber Data : Disporabudpar Kab. Sidoarjo

Jika dilihat dari Grafik diatas terjadi peningkatan realisasi jumlah pengunjung dari tahun 2017 ke tahun 2018 sebesar 93.457 pengunjung atau 2,45 %, dan sudah melampaui target RPJMD tahun 2018 yang direncanakan sebanyak **1.830.498** pengunjung.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kunjungan wisata, antara lain :

1) Meningkatkan sarana dan prasarana untuk menuju lokasi wisata.
2) Meningkatkan publikasi obyek-obyek wisata di wilayah Sidoarjo.
3) Meningkatkan pemasaran obyek wisata yang ada.
4) Meningkatkan sarana pendukung fasilitas obyek wisata.

2. Jumlah Industri Kreatif

Sebagaimana rencana Kabupaten Sidoarjo yang meningkatkan bidang pariwisata melalui penguatan sektor industri kreatif, maka dikembangkan usaha untuk meningkatkan jumlah industri kreatif.

Industri kreatif dapat diartikan sebagai kumpulan aktivitas ekonomi yang terkait dengan penciptaan atau penggunaan pengetahuan dan informasi.

Jumlah industri kreatif di Kabupaten Sidoarjo tahun 2018 sebanyak 76 unit usaha.

Berikut jenis industri kreatif dan jumlah unit usahanya :

Tabel III.C.6

Industri Kreatif

NO	NAMA USAHA	PEMILIK	ALAMAT	KERAJINAN YANG DIHASILKAN
1	Queen Art	Musdaliva	Perum Gebang Raya Blok AI-9	Accessories Batu
2	Raisa Collection	Alida Yusfidar	Jl. Belimbing IV/28 Pondok Chandra	Accessories Kabochon
3	Anfies Kraft	Dewi Kusumawati	Perum Citra Garden Blok D8/14	Accessories Rajut
4	Imuts Collection	Sunnaiyah (Acun)	Jl. Sultan Agung Magersari I No. 10	Accessories, Bros
5	Wildan Collection	Zulaika Rosida	Desa Sepande RT. 13 RW. 04	Accessories, Bros
6	R. K. A	Nenny	Puri Indah CA-26 Sidoarjo	Accessories, Bros, Sandal
7	Soris	Riesmiyati	Desa Ketegan Tanggulangin RT. 05	Accessories, Handycraft
8	Zfs	Sumiatin	Karangbong RT. 01 RW. 01 Kav. No. 4	Accessories, Souvenir
9	I-nung	Husnul Khotimah	Perum Bluru Permai Fg/13	Accessories, Tas Monte
10	Tyas Craft	Supriati	Ngelom 6 No.104 Taman	Akrilik
11	Diba Collection	Hj.RR.Etty	Perum Pesona Permata Gading 1 No.2	Aneka Sulam dan Lukis
12	Tresno Citra Batik	Citra Dewi Oktovani	Guyangan RT 10 RW 05 Ds.Krembung	Bahan Jumput
13	Csp Coll	Yuli Rahmawati	Tebel Barat No.33 Gedangan	Baju
14	Bunesia	Satrio Adi	Jl.Nusantara 3 No.46 Juanda	Baju Kemeja
15	An Nur Salam	Sri Wahyuni	Kalijaten 2/46 Sepanjang	Baju Lukis
16	Nabila Bordir	Henny	Serujo Gg.Leo No. 1 Sidoarjo	Baju, Bahan Bordir
17	Adam	Adenan	Jetis Gg II/66	Batik Jetis
18	Amali S	Safa'ah	Jetis Gg II/72 A	Batik Jetis

19	Amali CH	M.Zainul Chodim	Jetis Gg II/64	Batik Jetis
20	Amri	H.Amri dan Zainal Arifin	Jl. Pasar Jetis No. 25	Batik Jetis
21	Amri Jaya	H.Amri dan Zainal Arifin	Jl. Pasar Jetis No. 26	Batik Jetis
22	Azizah	H.Nurwahyudi	Jetis Gg III/115	Batik Jetis
23	Barokah	Akhiar	Jetis Gg III/103 A	Batik Jetis
24	Dahlia	H.Miftah	Jl.Pasar Jetis No. 14	Batik Jetis
25	Daun	Hj.M.Toha	Jetis Gg III/90	Batik Jetis
26	Dunia Wanita	Siti Maryam	Jetis Gg IV/166	Batik Jetis
27	HI	H.Ischak	Jetis Gg II/70	Batik Jetis
28	Ibrahim Salam	Ibrahim	Jetis Gg IV/158	Batik Jetis
29	Kamsatun	Zainal Abidin	Jetis Gg II/91 A	Batik Jetis
30	Namiroh	H.Musyafaah	Jetis Gg III/102	Batik Jetis
31	Rachmat	M.Yajid	Jetis Gg IV/150	Batik Jetis
32	Yassaroh	Nurul Tholiah	Jetis Gg III/119	Batik Jetis
33	Batik H.I	Yusri Edi	Jetis 2/70	Batik Tulis
34	Batik Namiroh	Ratna Tuty Musida	Jetis 3/102	Batik Tulis
35	Batik Parangmas	Eko Hadi	Jl.Kenongo Tulangan RT 01 RW 01	Batik Tulis
36	Batik Kunto	Asri Kunto	Jl.RA Kartini 18 Sidoarjo	Batik Tulis, Baju
37	Anugrah Collection	Sonny Herwanto	Gading Kirana A-50 Kesatriaan Buduran	Boneka Sulam,Aneka Sulam
38	Raddin	Syamsul	Tanggulangin Asri ZZ/17 Kalitengah	Boneka Tysu
39	Andriana Suwandini	Andriana Suwandini	Taman Puspa Anggaswangi F 1- 14	Bordir dan Lukis
40	Rania Collection	Nia Farida Wati	Perum Tawang Sari 8/114 Taman	Bros Accessories
41	Dinnar Handmade	Minarsih	Perumtas 2 Blok R6/26	Bros Bahan Flanel
42	Kyoza Handycraft	Evi Christiastutie	Jl. Jambu 1F/43 Pondok Chandra	Bros Rajut
43	Aafa Collection	Rossytasari Dita	Mutiara Citra Graha AI-17	Bros, Accessories
44	Kreasi Bu Kris	Dwi Krisnanto	BCF SS A-37	Bros, Accessories
45	Rita Collection	Morita	Tawangsari Permai A/130 Taman	Bros, Accessories
46	Crystal Accessories	Dwi Kriestin Natalia	Jl. Bawean 04 Perum Binangun	Bros, Gelang, Kalung
47	Mia Rose	Mia Rose	Jl. Pesantren 13 Porong	Bros, Gelang, Kalung
48	Mahesha	Aini Lutifah	Perum Citra Indah Blok 8 No.6	Handycraft
49	Sbr Relief Fiber	Sri Suyitno	Turi Sari IV/21 Sepanjang Taman	Kaligrafi

50	Bandeng Ambe Urang	Latif Dwi Nuryanto	Perum Cabean Asri Blok 12/19 Candi	Kaos Sablon
51	Permata Collection	Asih	Jl. Pesantren 13 Porong	Lampu Hias, Gelang, Bros
52	Alia Kraft	Laksmiwati Etty	Duku Ilca 215 Pondok Chandra Indah Waru	Lukis Gelas
53	Artist Drawing	Lufti Shakato	Kenep Junwangi	Lukisan
54	Athiyah	Etty Sulistyaning	Jl.Jeruk V/63 Wage Taman	Mukena
55	Almare Riandra	Ria Setyawati	Jl.Teuku Umar 1/5 Sidoarjo	Mukena Etnik
56	Rizs Collection	Rien Ernawati	Perum MCA Blok G 2/3 Candi	Mukena Etnik
57	Teratai Indah Bordir	Dimyati	Ketegan RT.04 RW.02 Tanggulangin	Mukena, Jilbab
58	Kirani Bordir	Anie Mudzakir	Jl.Randegan No. 20 Tanggulangin	Mukena,Baju
59	Mahakry Majapahit	Pudji Purwanto	Bogem RT. 04 RW. 01 Kebon Agung Sukodono	Olahan Buah Mojo
60	Athaya	Indriyati	Perumtas 2 Blok R2/40 Tanggulangin	Olahan Kain Perca
61	Batik Utami	Utami	Perum Citra Garden C 2 - 32	Penak - pernik Kraft
62	CV.Netha Art	Puji Astuti	Magersari Permai Blok A no.6	Produk Bahan Kaca
63	Kelap-kelip	Laily Masruro	Oma Pesona Buduran A4-17 Sidokepung	Rajutan, Talikur
64	Saba Craft	Irfan Syarifudin	Jl. Kemiri No.50	Replika dari kayu
65	N & R Art	Nur Rohmania	Perum Taman Anggun Sejahtera 4 B7 // 11	Souvenir, Tas, Bros dll
66	Rahayu Art	Rossy Utari	Perum Griya Nirwana I B /12 A Candi	Sulam dan Rajut
67	Zaputni	Naning	Perum Citra Garden Blok C2 /25 A	Tas
68	Viora Collection	Weny Indrasari	Perum Tas 2 Blok R3/37 Tanggulangin	Tas dari Kertas Semen
69	Occe	Ali Imron	-	Tas Kulit
70	Maqilla	Nur Khotimah	Perum Kedung Turi Tahap 2 Blok CC 22	Tas Kulit,Tas Tenun
71	Afmal	Eka Soviati	Pond Tanggulangin Asri VV-01	Tas Rajut, Talikur
72	Bies Craft	Ririen Ariyani	Mutiara Citra Graha B4 No.6	Tas Tali Kur
73	TAS Tikar	Liring	Istana Mentari Blok D 4 - 21/23	Tas Tikar

74	UD.Bella Belqis	Hj.Anna Efianti	Ds.Kedensari RT 05 /05 Tanggulangin	Tas, Dompet Kulit
75	Alya Handmade	Tiwi	Taman Permata Indah Blok H No.7-8 Taman	Tas, Hias Antaran
76	Mucciaa	Rini Kusuma Wardhani	Mutiara Cipta Asri P 1/14	Tas, Sandal,Sabuk,Talikur

Sumber Data : Disporabudpar Kab. Sidoarjo

c. SKPD Penyelenggara Urusan

Urusan pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata.

d. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia penyelenggara urusan pariwisata di Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo berjumlah 10 orang. Secara rinci SDM penyelenggara urusanpariwisata menurut golongan dan pendidikan sebagaimana terlampir. Sedangkan untuk jabatan fungsional tidak tersedia jabatan untuk urusan pariwisata.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran (per program)

Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program sebagaimana terlampir

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Pengembangan Objek,Promosi, dan Usaha Pariwisata	Rp 2,427,020,000.00	Rp 2,180,311,700.00	89.83%

f. Proses Perencanaan

Proses perencanaan urusan pariwisatamelalui sinkronisasi usulan dari hasil musrenbang kecamatan dan pelaku wisata dengan rencana kerja Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata.Penyelenggaran urusan pariwisatadari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo.

g. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan pariwisata pada Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata sebagaimana terlampir

4. Urusan Industri

a. Program

Program stratejik pembangunan yang dilaksanakan untuk urusan ini pada tahun 2018 adalah Program Penumbuhan dan Pengembangan IKM.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Hasil pelaksanaan program dapat ditunjukkan pada pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Jumlah Industri

Industri kecil dan mikro 14.318 unit. Industri menengah sebesar 2.234 unit. Industri besar sebesar 368 unit. Jumlah unit usaha industri yang ada tahun 2018 sebanyak 16.966 unit usaha. Jumlah ini meningkat 75 unit atau meningkat sebesar 0,45 persen dibandingkan dengan jumlah industri pada tahun 2017 yang sebanyak 16.891 unit.

Jenis Industri yang tumbuh dan berkembang di wilayah Kabupaten Sidoarjo utamanya adalah:

1. Kerupuk
2. Kulit dan Turunannya
3. Batik Tulis, Bordir & Aksesoris
4. Pengolahan Ikan, Produk Mamin lainnya

Perkembangan jumlah industri terlihat pada grafik berikut ini :

Grafik III.C.11

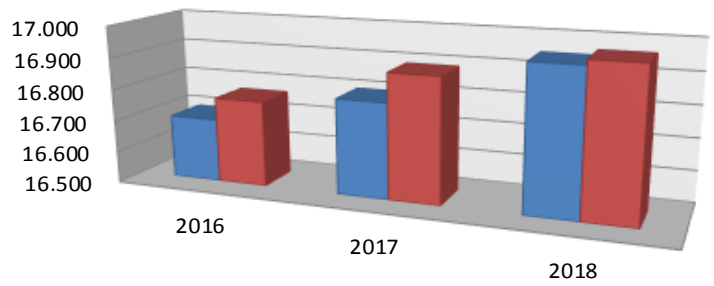

	2016	2017	2018
TARGET	16.700	16.800	16.950
Jumlah	16.770	16.891	16.966

Sumber Data : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Perkembangan jumlah unit usaha industri dari tahun 2017 sebanyak 16.891 unit usaha meningkat 0,45 persen atau 75 unit usaha menjadi 16.966 unit usaha di tahun 2018.

2. Persentase IKM yang terstandarisasi

Menurut PP nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional bertujuan untuk meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup. Selain itu juga sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing IKM juga agar mampu menembus pasar global serta dapat memenuhi permintaan sesuai dengan kebutuhan kosumen. Jumlah Industri Kecil dan Mikro di Kabupaten Sidoarjo sampai dengan tahun 2017 yang telah terstandardisasi adalah sebagai berikut :

Tabel III.C.7

Standarisasi IKM

Jenis Standar/HKI	2015	2016	2017	2018
SNI		2	1	
Barcode			5	
ISO 9001 : 2015			2	
Halal			6	4
Bimbingan Sertifikasi ISO			3	
Merk	25		81	22
PIRT	50			
Uji Nutrisi			6	
Uji Produk sesuai parameter SNI			1	
HACCP			1	
Batik Mark			1	
Uji Tar & Nikotin				45

Sumber Data : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Data perusahaan d Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017-2018 :

Tahun	2017	2018
Jumlah IKM yang telah terstandardisasi	107	71
Total Jumlah IKM	16.891	16.966
Persentase IKM yang telah terstandardisasi	0,6%	0,4%

Sumber Data : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Grafik III.C.12

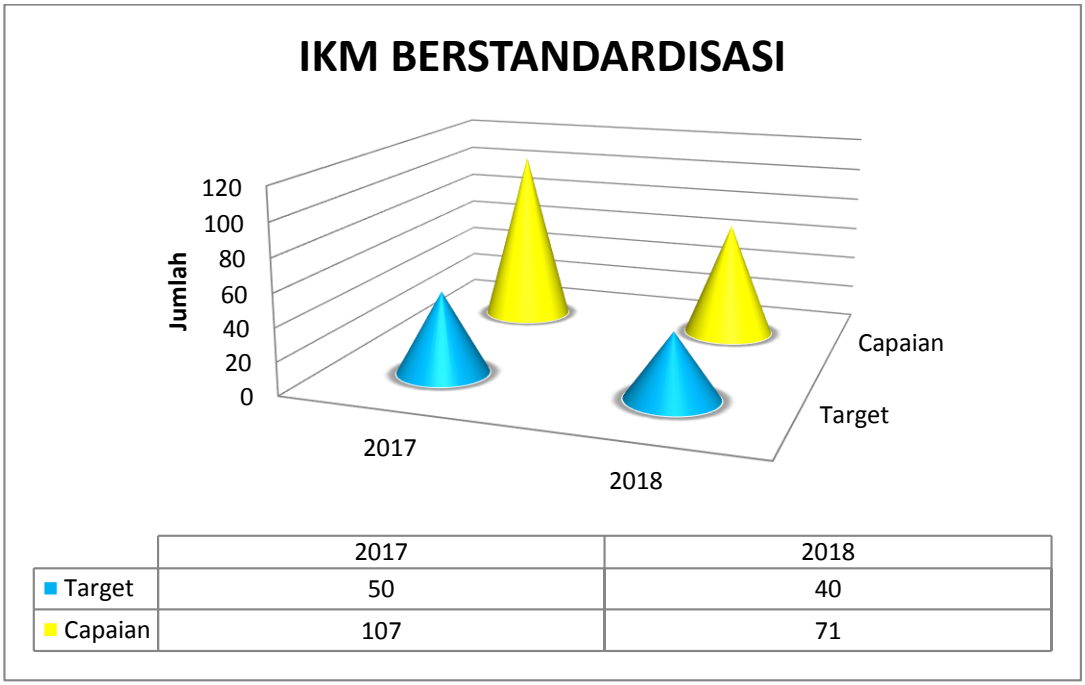

Sumber Data : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Dari daftar IKM diatas yang telah mendapatkan fasilitasi standardisasi melalui APBD Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Sidoarjo, di dokumentasikan dalam *database* industri berdasarkan nama perusahaan dan alamat.

Aspek – aspek yang mempengaruhi standarisasi IKM, diantaranya :

1. Regulasi pemerintah
2. Kebutuhan pasar
3. Kebijakan perusahaan

Jumlah IKM yang telah terstandardisasi masih relatif kecil disebabkan oleh :

1. Kurangnya kesadaran IKM terhadap pentingnya standarisasi
2. Persyaratan yang diwajibkan memberatkan IKM dan kondisi di lapangan sulit menyesuaikan dengan kondisi yang ada
3. Tidak adanya dukungan anggaran

Upaya untuk meningkatkan standarisasi IKM diantaranya :

1. Meningkatkan kesadaran IKM mengenai pentingnya standardisasi
2. Pemberian insentif bagi IKM yang menerapkan standardisasi
3. Memberikan fasilitasi dan kemudahan dalam pengurusan standardisasi

c. SKPD Penyelenggara Urusan

Urusan industri secara umum dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

d. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia penyelenggara urusan industri di Dinas Perindustrian dan Perdagangan berjumlah 25 orang. Secara rinci SDM penyelenggara urusan industri menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir. Untuk keterisian jabatan fungsional terdapat pranata komputer dan penyuluh perindustrian dan perdagangan.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran (per program)

Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program sebagaimana terlampir

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Penumbuhan dan Pengembangan IKM	Rp 3,739,014,000.00	Rp 566,113,100.00	15.14%

f. Proses Perencanaan

Proses perencanaan urusan industri melalui sinkronisasi usulan dari hasil musrenbang kecamatan dengan rencana kerja Dinas Perindustrian dann Perdagangan.

g. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo sebagaimana terlampir

5. Urusan Perdagangan

a. Program

Program stratejik pembangunan untuk urusan perdagangan yang dilaksanakan pada tahun 2018 meliputi :

1. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, peningkatan kerjasama dan pengembangan perdagangan serta pembinaan pedagang informal
2. Program Pengembangan, Penyediaan Sarana Prasarana dan Peningkatan Pelayanan infrastruktur melalui kemitraan serta Pendapatan Pasar rakyat

b. Realisasi Pelaksanaan ProgramSerta Permasalahan Dan Solusinya

Hasil pelaksanaan program tersebut dapat ditunjukkan pada pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Nilai ekspor dan Impor Non Migas

Realisasi Nilai Ekspor Non Migas Daerah Tahun 2018 sebesar US$1.753.114.803,22 atau meningkat sebesar 0,70 persen dibandingkan dengan nilai ekspor non-migas daerah tahun 2017 sebesar US$ 1.740.979.022,99.

Angka kenaikan tersebut disebabkan oleh meningkatnya permintaan luar negeri terutama komoditi hasil industri, komoditi hasil perikanan dan kelautan serta komoditi hasil hutan.

Perkembangan nilai ekspor ditunjukkan oleh grafik berikut ini :

Grafik III.C.13

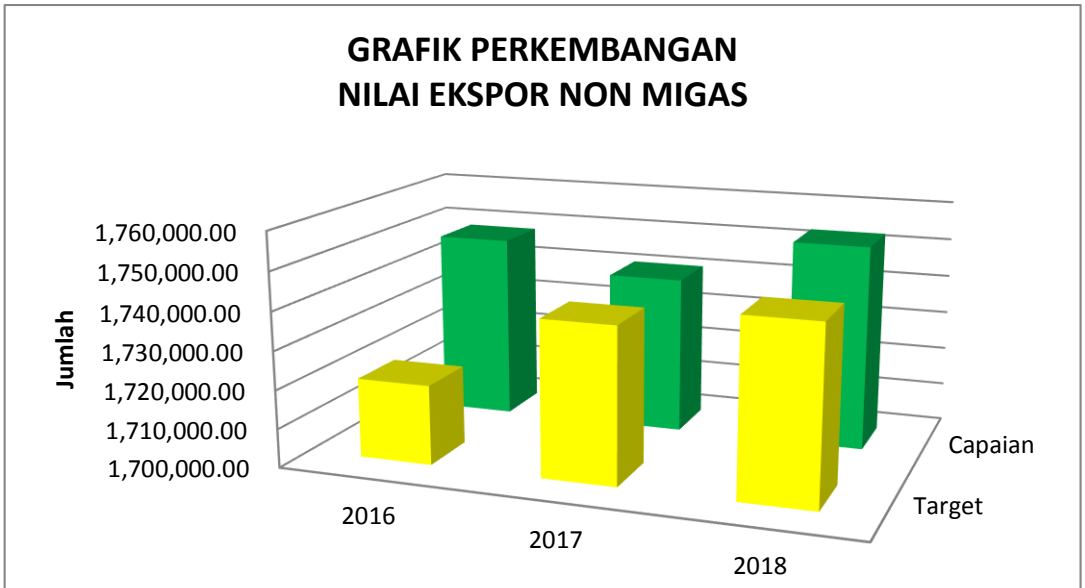

	2016	2017	2018
Target	1,720,587.00	1,740,212.00	1,745,253.00
Capaian	1,748,281.00	1,740,979.00	1,753,114.00

Sumber Data : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai kinerja tersebut antara lain :

1. Pengembangan pasar luar negeri salah satunya melalui Pameran / Expo baik yang diselenggarakan di Luar Negeri maupun Dalam Negeri.
2. SDM yang melakukan pengelolaan tatakelola ekspor secara jumlah dan kompentensi tidak sepenuhnya memadai.

2. Volume perdagangan

Realisasi volume perdagangan yang berhasil dicapai tahun 2018 sebesar Rp 17.885.626.090.815 meningkat sebesar 5,7 persen dari realisasi volume perdagangan tahun 2017 sebesar Rp. 16.908.099.687.085

Peningkatan ini disebabkan karena iklim usaha di Kabupaten Sidoarjo yang semakin kondusif dan peningkatan informasi di sektor perdagangan. Upaya yang dilakukan dalam pencapaian target adalah meningkatkan promosi produk unggulan daerah melalui kegiatan pameran, misi dagang dan temu bisnis, serta membantu pelaku usaha dagang meningkatkan daya saing produk melalui kegiatan pelatihan.

Perkembangan volume perdagangan terdapat pada grafik berikut ini :

Grafik III.C.14

Volume Perdagangan

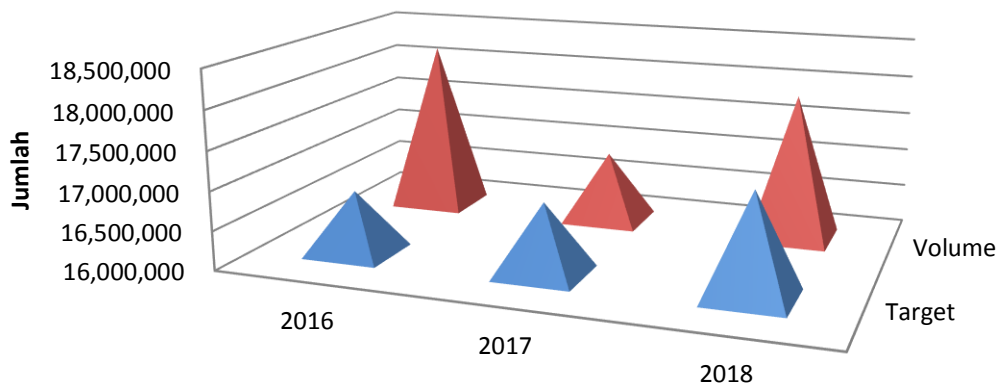

	2016	2017	2018
Target	16,800,000	16,900,000	17,300,000
Volume	18,218,829	16,908,099	17,885,626

Sumber Data : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan volume perdagangan, antara lain :

1. Melalui promosi dengan memfasilitasi pameran lokal dan nasional,
2. Pada tahun 2018 event pameran/misi dagang sebanyak 12 kali pameran.
3. Memfasilitasi legalitas usaha
4. Bantuan sarana usaha

3. Persentase Pasar SNI

Jumlah pasar yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebanyak 19 Pasar yang dikelola oleh 3 (tiga) UPTD yaitu UPTD Pasar Sidoarjo, UPTD Pasar Porong dan UPTD Pasar Taman.

Sesuai dengan sasaran Renstra SKPD periode 2016 - 2021 yaitu meningkatnya layanan pasar dengan indikator Pasar SNI adalah pasar yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Jumlah pedagang yang terdaftar
2. Ukuran luas ruang dagang
3. Jumlah pos
4. Zonasi
5. Area parkir
6. Area bongkar muat barang
7. Akses keluar masuk kendaraan
8. Lebar koridor
9. Kantor pengelola
10. Lokasi toilet dan kamar madi (terpisah antara laki2 dan perempuan)
11. Jumlah toilet pada satu lokasi
12. Tempat menyimpan bahan pangan basah
13. Tempat cuci tangan
14. Ruang menyusui
15. CCTV
16. Ruang peribadatan

17. Ruang bersama
18. Pos kesehatan
19. Pos keamanan
20. Area merokok
21. Ruang disenfektan
22. Area penghijauan
23. Tinggi anak tangga
24. Tinggi meja tempat berjualan
25. Akses untuk kursi roda
26. Jalur evakuasi
27. Tabung pemadam kebakaran
28. Hidran air
29. Pengujian kualitas air bersih
30. Pengujian limbah cair
31. Ketersediaan tempat sampah
32. Alat angkut sampah
33. TPS sementara
34. Pengelolaan sampah berdasarkan 3R
35. Sarana telekomunikasi
36. Informasi identitas pedagang
37. Informasi kisaran harga
38. Informasi zonasi pasar
39. Prosedur kerja / sop
40. Struktur pengelola
41. Jumlah pengelola
42. Pelaksanaan sidang tera/tera ulang
43. Program pengembangan dan aktivasi pasar
44. Program pemberdayaan komunitas pasar

Pada tahun 2018 Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengusulkan revitalisasi pasar sebanyak 3 (tiga) yaitu Pasar Gedangan, Pasar Loak dan Unggas, Pasar Tulangan.

Pemenuhan indikator Pasar ber SNI dari tahun 2017 ke 2018 mengalami peningkatan, dengan anggaran yang diterima untuk revitalisasi pasar baik dari APBD maupun APBN, maka semakin banyak pasar di Kabupaten Sidoarjo yang berhasil memenuhi beberapa kriteria SNI.

Dari 44 parameter kriteria pasar SNI untuk Kabupaten Sidoarjo pada 19 Pasar Rakyat tahun 2018, masing-masing hanya memenuhi beberapa kriteria pasar SNI, sedangkan untuk kekurangannya kriteria tersebut diusulkan pengadaan sarana prasarana pada tahun anggaran berikutnya.

Namun demikian, pada tahun 2017 Kabupaten Sidoarjo telah mendapatkan penghargaan sebagai Pasar Tertib Ukur dari Kementerian Perdagangan untuk Pasar Sukodono. Sedangkan Tahun 2018 Kabupaten Sidoarjo mendapat Penghargaan Daerah Tertib Ukur dan 19 Pasar Tertib Ukur dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

a. SKPD Penyelenggara Urusan

Urusan perdagangan secara umum dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

b. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di urusan perdagangan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan berjumlah 172 orang. Secara rinci SDM penyelenggara urusan perdagangan menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir. Sedangkan untuk jabatan fungsional terdapat jabatan penera yang tersebar baik di unit pasar maupun unit lainnya.

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran (per program)

Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program sebagaimana terlampir

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, peningkatan kerjasama dan pengembangan perdagangan serta pembinaan pedagang informal	Rp 7,816,617,000.00	Rp 6,764,982,937.00	86.55%
2	Program Pengembangan, Penyediaan Sarana Prasarana dan Peningkatan Pelayanan infrastruktur melalui kemitraan serta Pendapatan Pasar rakyat	Rp 20,639,527,150.00	Rp 19,083,352,607.00	92.46%

d. Proses Perencanaan

Proses perencanaan urusan perdaganganmelalui sinkronisasi usulan dari hasil musrenbang kecamatan dengan rencana kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo.Penyelenggaran urusan perdagangan dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo.

e. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo sebagaimana terlampir.

6. Urusan Transmigrasi

a. Program

Tidak ada Program pembangunan yang spesifik dilaksanakan untuk urusan transmigrasi pada tahun 2018, namun kegiatan tetap ada, yaitu kegiatan Penyelenggaraan Transmigrasi.

b. Realisasi Pelaksanaan ProgramSerta Permasalahan Dan Solusinya

Hasil pelaksanaan program ditunjukkan dengan keberhasilan transmigran yang telah diberangkatkan.

Untuk mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan transmigrasi, maka dilakukan monitoring terhadap para transmigran yang telah diberangkatkan, dimana terdapat 3 KK dari pemberangkatan transmigran di tahun sebelumnya yang telah memperoleh tingkat kesejahteraan dengan lebih baik dari sebelumnya.

Diharapkan dengan upaya transmigrasi ini dapat mendorong dan memperlancar proses pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

c. SKPD Penyelenggara Urusan

Urusan transmigrasi secara umum dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja.

d. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia penyelenggara urusan transmigrasi di Dinas Tenaga Kerja berjumlah 3 orang. Secara rinci SDM penyelenggara urusan transmigrasi menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir, dengan tidak tersedia posisi jabatan fungsional

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran (per program)

Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program sebagaimana terlampir.

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Penyelenggaraan Transmigrasi	Rp 8,990,000.00	Rp 8,690,000.00	96.66%

f. Proses Perencanaan

Proses perencanaan urusan transmigrasimelalui sinkronisasi usulan dari hasil musrenbang kecamatan dengan rencana kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo.

g. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo sebagaimana terlampir.

D. Unsur Penunjang

1. Unsur Penunjang Sekretariat Daerah

a. Program

Program pembangunan yang dilaksanakan untuk unsur penunjang sekretariat daera pada tahun 2018 adalah :

1. Program Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan Organisasi Perangkat Daerah dan Pelayanan Publik
2. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Bantuan dan Dokumentasi Hukum
3. Program Koordinasi Rumusan Kebijakan Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan
4. Program Koordinasi Kebijakan Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
5. Program Pembinaan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Kerjasama
6. Program Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Bidang Perekonomian, SDA, Penanaman Modal dan BUMD
7. Program Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa
8. Program pelayanan administrasi kegiatan, keprotokolan dan rumah tangga pimpinan daerah

b. Realisasi Pelaksanaan ProgramSerta Permasalahan Dan Solusinya

Hasil pelaksanaan program tersebut dapat ditunjukkan pada pencapaian beberapa sasaran, diantaranya :

1. Nilai SAKIP Kabupaten

Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan akuntabilitas kinerja menuju pemerintahan yang

berorientasi hasil, adalah dengan dilakukan suatu evaluasi terhadap implementasi SAKIP.

Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Kabupaten Sidoarjo yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2018 memperoleh kategori **A** (**Memuaskan**), hasil tersebut telah melampau dari target yang ditetapkan pada RPJMD yakni kategori **BB (Sangat Baik)** dan naik level dari tahun sebelumnya, dimana di tahun 2017 Nilai SAKIP Kabupaten Sidoarjo kategori **BB (Sangat Baik)**.

Berikut Perkembangan Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2012, sebagaimana grafik :

Grafik III.D.1

Perkembangan Nilai SAKIP Kabupaten Sidaorjo

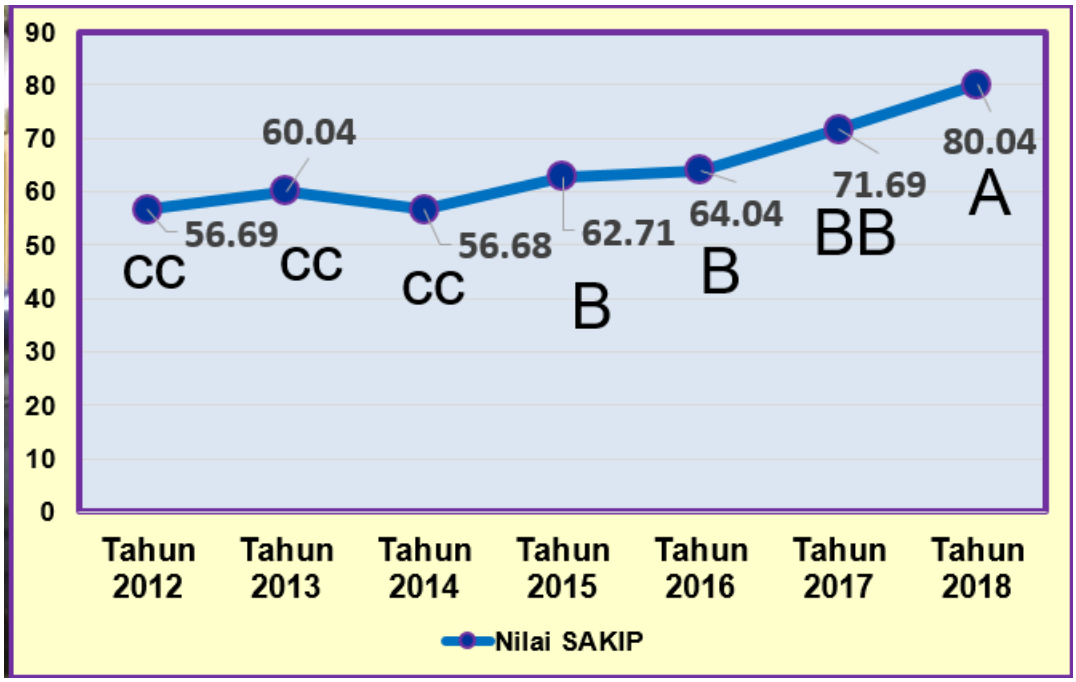

Sumber Data : Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pelaksanaan dari manajemen kinerja sektor publik. Terdapat peningkatan yang signifikan dalam penerapan SAKIP ini sehingga mampu mendorong penerapan budaya kinerja sejak proses perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan.

Hasil evaluasi SAKIP diberikan oleh Menteria Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bapak **SYAFRUDDIN** pada tanggal 6 Februari 2019 di Golden Tulip Galaxy Hotel, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mendapatkan Nilai A (Memuaskan) bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Lamongan.

Nilai SAKIP Kabupaten Sidoarjo melampaui target dan berhasil naik kelas menjadi A (Memuaskan) melalui langkah – langkah sebagai berikut :

- Melakukan perbaikan *cascading* dan *crosscutting* pada RPJMD menjadi bersifat lintas sektor dan fungsi
- Mengintegrasikan sistem perencanaan dan penganggaran melalui Sistem Aplikasi RDS (*Regional Development System*)
- Melakukan evaluasi SAKIP dengan metode *roadshow* ke OPD
- Melakukan pembinaan intensif ke OPD baik melalui bimtek, sosialisasi, pendampingan, maupun melalui media kelas SAKIP.

2. Nilai Kinerja EKPPD

Untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata kepemerintahan yang baik, salah satunya adalah dengan melakukan Evaluasi atas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) berdasarkan dari LPPD yang disusun.

Hasil EKPPD kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 memperoleh nilai (score) 3,5926 dengan status kinerja Sangat Tinggi (ST) dan bertahan mendapat peringat ke-**1 (pertama)** tingkat Nasional dan berhasil meraih predikat bintang 4 (empat) kinerja terbaik. Kabupaten Sidoarjo sudah pernah mendapatkan penghargaan Samkarya Nugraha Parasamya Purnakarya Nugraha dari Presiden Republik Indonesia yang diserahkan melalui Menteri Dalam Negeri pada peringatan Hari Otonomi Daerah ke XXI tahun 2017 yang diselenggarakan di Alun – Alun Kabupaten Sidoarjo, serta Satya Lancana Karya Bhakti Praja Nugraha oleh Presiden Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta pada tahun 2015. Sehubungan dengan telah berhasilnya Kabupaten Sidoarjo mendapatkan penghargaan tersebut, maka Kabupaten Sidoarjo harus tetap dapat mempertahankan prestasi kebanggannya.

Berikut Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana grafik :

Grafik III.D.2

Perkembangan Hasil EKPPD Kabupaten Sidoarjo

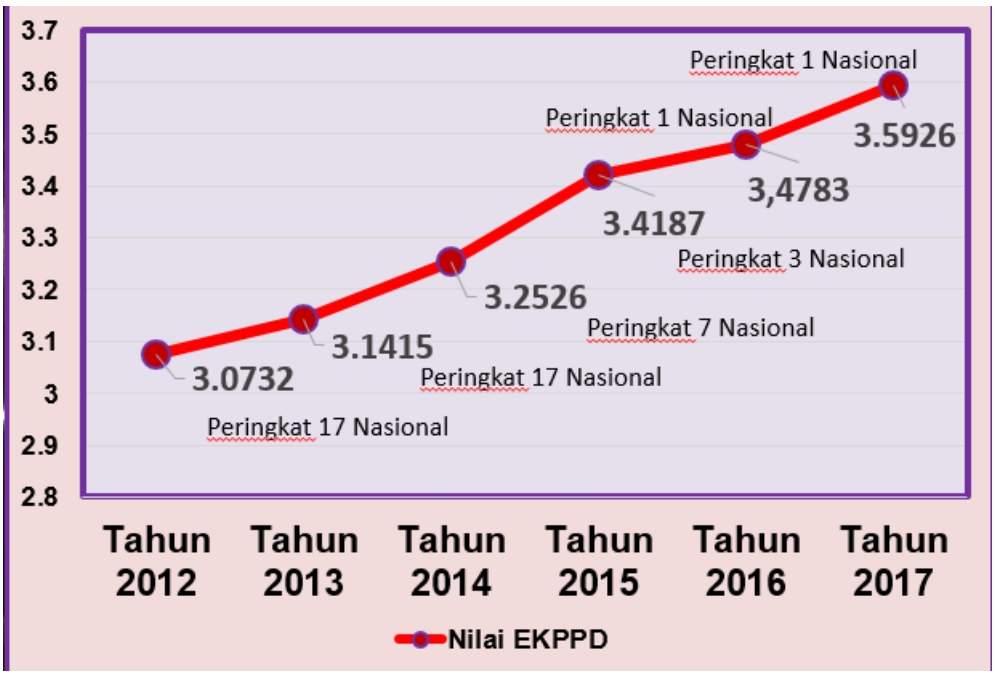

Sumber Data : Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Sidoarjo

Upaya yang dilakukan adalah membuat kebijakan satu OPD satu Inovasi, sehingga kinerja OPD menjadi sangat tinggi dan memiliki nilai lebih. Selain juga menjaga tren Pencapaian Kinerja dari setiap Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada LPPD Kabupaten Sidoarjo.

3. Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Pelayanan publik dapat diartikan pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan kepada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dengan demikian pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara.

Tujuan dari dilaksanakannya Evaluasi Pelayanan Publik, adalah :

- Sebagai percontohan bagi Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Instansi Pemerintah lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik
- Mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberi dampak bagi kesejahteraan masyarakat

Metodologi evaluasi dan penilaian adalah sebagai berikut :

Indikator dan Range Nilai Evaluasi Pelayanan Publik dengan menggunakan Indeks Pelayanan Publik

Range Nilai	Kategori	Makna
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
3,51 – 4,00	B	Baik
3,01 – 3,50	B-	Baik (DC)
2,51 – 3,00	C	Cukup
2,01 – 2,50	C-	Cukup (DC)
1,51 – 2,00	D	Buruk
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
0 – 1,00	F	Gagal

Setiap tahunnya kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo diupayakan selalu meningkat, hal ini sesuai dengan kebijakan satu OPD satu Inovasi yang ditetapkan oleh Bapak Bupati Sidoarjo. Selain itu banyak pula inovasi di Kabupaten Sidoarjo yang pernah mendapatkan penghargaan SINOVIK dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yaitu SIPPADU Aplikasi Perijinan Terpadu, SIMANIES Aplikasi untuk mencegah kematian ibu melahirkan, SIPEKAT Aplikasi kenaikan pangkat paperless, dan SIPANDU sistem untuk mendeteksi dini gangguan autis pada anak usia dini.

Melalui inovasi – inovasi yang berkembang, Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Sidoarjo di Tahun 2018 mendapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel III.D.1

Indeks Pelayanan Publik Unit Sampling

No.	Unit Pelayanan Yang di Sampling	Nilai (Indeks)	Konversi
1.	Rumah Sakit Umum Daerah	4,32	Sangat Baik (A-)
2.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3,8	Baik (B-)
3.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3,27	Baik (B) dengan Catatan
		3,8	**Baik (B-)**

Sumber Data : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sidoarjo

Pembangunan Mall Pelayanan Publik, Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), serta penerapan Kelompok Budaya Kerja (KBK) mendorong tercapainya kualitas pelayanan publik yang Sangat Baik. Diharapkan di tahun 2019 akan semakin banyak unit pelayanan yang mendapatkan sampling dan memiliki inovasi yang efektif, sehingga nilai Indeks Pelayanan Publik juga semakin meningkat.

Indeks Pelayanan Publik baru dilakukan evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di tahun 2018 ini, dan apabila dibandingkan dengan target tahun 2018 senilai 3.00 maka telah tercapai 126,67% dari target.

4. Jumlah Produk Hukum yang Dihasilkan

Untuk mengukur efektivitas jalannya pemerintahan salah satunya diukur dengan sampai sejauh mana kelengkapan peraturan perundangan sebagai kelengkapan hukum setiap aktivitas yang dilaksanakan. Kelengkapan hukum tersebut adalah keberadaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang sesuai dengan kebutuhan.

Jumlah produk Hukum yang dihasilkan selama tahun 2014 s.d 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel III.D.2

Produk Hukum Yang Dihasilkan

No	ProdukHukum	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Peraturan Daerah	10	11	17	10	9
2	Peraturan Bupati	62	64	102	104	116
3	Keputusan Bupati	1.545	1.268	1.443	721	855

Sumber Data : Bagian Hukum Setda

5. Jumlah Permasalahan Hukum yang Diselesaikan

Untuk mengukur kepastian hukum dalam menjalankan Pemerintahan maka Pemerintah Kabupaten Sidoarjo harus tetap berusaha agar setiap permasalahan hukum/sengketa hukum yang dihadapi dapat segera terselesaikan. Penyelesaian permasalahan tersebut dapat melalui jalur *Litigasi* (persidangan) maupun jalur *Non Litigasi* (di luar persidangan/ mediasi).

Jumlah sengketa hukum yang ditangani sampai dengan akhir tahun 2018 sebanyak 25 sengketa hukum. Adapun sengketa hukum yang ditangani tersebut, diantaranya yaitu :

Tabel III.D.3

Sengketa dan Permasalahan Hukum

No.	Nomor Aduan	SUBYEK	Keterangan
1	14/G/2017/PTUN.Sby	Slamet Wibisono, dkk (Para Tergugat)	INKRACHT
		Melawan	
		Bupati Sidoarjo (Tergugat)	
2	248/Pdt.G/2016/PN. Sda	Handy (Penggugat)	INKRACHT
		Melawan	
		Kepala Desa Keboan Sikep (Tergugat)	

No.	Nomor Aduan	SUBYEK	Keterangan
3	110K/PDT/2016	Solihin (Penggugat)	INKRACHT
		Melawan	
		Bupati Sidoarjo (Tergugat)	
4	186/Pdt.G/2017/PN.Sda	PT. Avilla Prima (Penggugat)	Pengajuan Banding
		Melawan	
		Bupati Sidoarjo (Tergugat)	
5	98/G/2017/PTUN.Sby	PKL (Para Penggugat)	INKRACHT
	65/B/2018/PT.TUN.Sby	Melawan	
		Satpol PP (Tergugat)	
6	113/G/2017/PTUN.Sby	Sumiarsih dkk (Para Penggugat)	KASASI
		Melawan	
		Kepala DPM&PTSP (Tergugat)	
7	260/Pdt.G/2017/PN.Sda	Sdr. Prayitno (Penggugat)	Proses BANDING
		Melawan	
		PG. Candi (Tergugat I), Bupati Sidoarjo (Tergugat II), BLH (Tergugat III)	
8	28/Pdt.G/2018/PN SDA	Sdr. Muhammad Chamim (Penggugat)	INKRACHT
		Melawan	
		Ketua BPD Panjunan Kecamatan Sukodono (Tergugat)	
9	42/G/2018/PTUN.Sby	Dra. Yuliani, Msi (Penggugat)	INKRACHT
		Melawan	
		Bupati Sidoarjo (Tergugat)	
10	44/G/2018/PTUN.Sby	Drs. Abdul Kholik, Mpd (Penggugat)	Banding
		Melawan	
		Bupati Sidoarjo (Tergugat)	

No.	Nomor Aduan	SUBYEK	Keterangan
11	63/G/2018/PTUN.Sby	Sdr. Supriadi SH (Penggugat)	Proses Peninjauan Kembali (PK)
		Melawan	
		BPD Trosobo (Terguugat I), Panitia Pilkades Trosobo (Tergugat II), Heri Ahmadi, SH (Tergugat III Intervensi)	
12	82/G/2018/PTUN.Sby	Suherno Widiyanto (Penggugat)	Proses Banding di PT TUN Sby
		Melawan	
		Bupati Sidoarjo (Tergugat)	
13	83/G/2018/PTUN.Sby	Samsul Huda (Penggugat)	INKRACHT
		Melawan	
		Bupati Sidoarjo (Tergugat), Elok Suciati (Kades Sidoakepung) (Tergugat II Intervensi)	
14	147/Pdt.G/2018/PN.Sda	H. Ahmadi dkk (Penggugat)	INKRACHT
		Melawan	
		H. Solihin (Tergugut I), Bupati Sidoarjo (Turut Tergugat I) dan Inspektur (Turut Tergugat II)	
15	106/Pdt.G/2018/PN.Sda	Rohmatul Hasanah (Penggugat)	INKRACHT
		Melawan	
		Kades Bajarsari (Tergugat I), Camat Tanggulangin (Tergugat II), Izzatul Khoiroh (Tergugat III)	
16	146/G/2018/PTUN.Sby	Aryawan Esa Putra ,Spd (Penggugat)	Masih Proses Persidangan
		Melawan	
		Bupati Sidoarjo (Tergugat)	

No.	Nomor Aduan	SUBYEK	Keterangan
17	19/P/FP/2018/PTUN.Sby	PT. Bhumi Kencana Sejahtera (Pemohon)	
		Melawan	INKRACHT
		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo(Termohon)	
18	20/P/FP/2018/PTUN.Sby	PT. Bhumi Kencana Sejahtera (Pemohon)	
		Melawan	Kalah
		Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo(Termohon)	
19	171/G/2018/PTUN.Sby	PT. Bhumi Kencana Sejahtera (Penggugat)	Masih Proses Persidangan
		Melawan	
		Bupati Sidoarjo(Tergugat)	
20	185/G/2018/PTUN.Sby	PT.Makmur Berkah Amanda (Safe n Lock) (Penggugat)	Masih Proses Persidangan
		Melawan	
		Bupati Sidoarjo(Tergugat)	
21	196/Pdt.G/2018/PN.Sda	Ilina Ganianto dkk (Penggugat)	Masih Proses Persidangan
		Melawan	
		Bupati Sidoarjo (Turut Tergugat I) dan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Turut Tergugat II)	
22	243/Pdt.G/2018/PN.Sda	Ikrima Bahmid dkk (Penggugat)	Masih Proses Persidangan
		Melawan	
		Bupati Sidoarjo (Turut Tergugat I)	
23	170/Pdt.G/2018/PN.Sda	Dayomo dkk (Penggugat)	Masih Proses Persidangan
		Melawan	

No.	Nomor Aduan	SUBYEK	Keterangan
		Bupati Sidoarjo (Turut Tergugat I) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo(Turut Tergugat II)	
24	199/Pdt.G/2018/PN.Sda	Budi Santoso Dkk (Para Penggugat)	Sepakat melakukan Perdamaian tertanggal 07 Desember 2018
		Melawan	
		Bupati Sidoarjo (Tergugat I),Sekretaris Daerah(Tergugat II),Kepala badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah(Tergugat III), Direktur RSUD (tergugat IV), Kepala BPN Sidoarjo (Turut Tergugat)	
25	199/Pdt.G/2018/PN.Sda	Casmudi, Dkk (Para Penggugat)	masih Proses persidangan tahap mediasi
		Melawan	
		PT. Young Tree Industries (Tergugat I) Bupati Sidoarjo (Tergugat II),Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Tergugat III),Kepala Desa Kepuh Kemiri(Tergugat IV), Camat Tulangan (Tergugat V), Kepala BPN Sidoarjo (Turut Tergugat)	

Sumber Data : Bagian Hukum Setda

7. Indeks Kepuasan Masyarakat

Pada tahun 2018, dilakukan pengukuran pelayanan bidang pemerintahan, kesehatan, perijinan, pelayanan publik dengan nilai rata-rata 84,84 atau kategori B (baik).

Rincian pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.D.4

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

NO.	INSTANSI PELAYANAN PUBLIK	KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	
1	2	3	4	
1	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	84,35	B	Baik
2	Sekretariat DPRD	76,84	B	Baik
3	Inspektorat Daerah	87,97	B	Baik
4	Bappeda	81,22	B	Baik
5	BPKAD	88,35	A	Sangat Baik
6	Bakesbangpol	88,62	A	Sangat Baik
7	BPBD	78,74	B	Baik
8	Dinas Koperasi dan UM	86,27	B	Baik
9	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	88,93	A	Sangat Baik
10	UPT RPH Krian Dinas Pangan dan Pertanian	84,98	B	Baik
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	82	B	Baik
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat desa, P3A dan KB	88,04	B	Baik
13	Puskesmas Balongbendo Dinas Kesehatan	86,39	B	Baik
14	Dinas Sosial	90,66	A	Sangat Baik
15	Dinas PU dan PR	83,89	B	Baik
16	Dinas Perikanan	83,56	B	Baik
17	UPT PAL Dinas Perumahan dan Permukiman	88,45	A	Sangat Baik
18	Dinas Tenaga Kerja	87,87	B	Baik
19	Kecamatan Porong	87,4	B	Baik

NO.	INSTANSI PELAYANAN PUBLIK	KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	
1	2	3	4	
20	Kecamatan Krian	91,4	A	Sangat Baik
21	Kecamatan Tulangan	86,48	B	Baik
22	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	85,17	B	Baik
23	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	85,11	B	Baik
24	Dinas Perhubungan (Uji KIR)	79,15	B	Baik
25	Dinas Perhubungan (Terminal Porong)	79,28	B	Baik
26	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	80,94	B	Baik
27	Badan Kepegawaian Daerah	80,05	B	Baik
28	Badan Pelayanan Pajak Daerah	88,21	B	Baik
29	Kecamatan Krembung	84,39	B	Baik
30	Kecamatan Balongbendo	80,192	B	Baik
31	Kecamatan Prambon	78,284	B	Baik
32	Kecamatan Gedangan	91,51	A	Sangat Baik
33	Kecamatan Tarik	83,41	B	Baik
34	Puskesmas Jabon	84,395	B	Baik
35	Puskesmas Waru	88,35	A	Sangat Baik
36	Puskesmas Tulangan	90	A	Sangat Baik
37	Puskesmas Krembung	81,15	B	Baik
38	Puskesmas Buduran	81,81	B	Baik
	RATA-RATA KONVERSI	**84,84**	**(B)**	**BAIK**

Sumber Data : Bagian Organisasi Setda

8. Manajemen Mutu Pelayanan

Suatu Sistem Manajemen Mutu merupakan sekumpulan prosedur terdokumentasi dan Praktek-praktek standar untuk manajemen sistem yang bertujuan menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk (barang/jasa) terhadap kebutuhan atau persyaratan itu ditentukan atau dispesifikasikan oleh pelanggan atau organisasi"

Sistem Manajemen Mutu mendefenisikan bagaimana organisasi menerapkan praktek-praktek manajemen mutu secara konsisten untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kabupaten Sidoarjo secara terus menerus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penerpan sistem manajemen mutu ISO. Berikut data OPD yang telah ber-sertifikat ISO sebagai berikut :

Tabel III.D.5

Manajemen Mutu Pelayanan ISO

Unit Pelayanan/ Unit Kerja Yang Disertifikasi	Jenis ISO	Ruang Lingkup Sertifikasi	Tahun Perolehan & Nama Lembaga Sertifikasi
1	2	3	4
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9001:2015	The Provision of Public Administration Service of Population and civil Regristrations	2016, PT. British Standart Institution (bsi) Group Indonasia
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	9001:2015	26 Layanan Perizinan	2018, Sucofindo
UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan	9001: 2015	Provision of affair regional transportation, including provision of service and the feasibility	2012, worlwide Quality Assurance Indonesia
Kecamatan Taman	9001:2015	Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pelayanan Umum, Fungsi Pendukung terkait	2018, Garuda Sertfikasi
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	9001:2015	Provision of Library Services	2017, Europead Quality Assurance Group Indonesia
Badan Kepegawaian Daerah	9001:2015	The provision service of public administration for ASN development and welfare division and ASN re-assisment divison	2018, PT TAFA Sertifikasi Indonesia
Kecamatan Wonoayu	9001:2015	Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pelayanan Umum, Fungsi Pendukung terkait	2018, Garuda Sertfikasi

Unit Pelayanan/ Unit Kerja Yang Disertifikasi	Jenis ISO	Ruang Lingkup Sertifikasi	Tahun Perolehan & Nama Lembaga Sertifikasi
1	2	3	4
Kecamatan Krian	9001:2015	Provision Of Public Services For Resident Regristation, General Public Service Activities And Related Support Function	2016, Worlwide Quality Assurance Indonesia
Badan Lingkungan Hidup	9001:2015		2016, Worlwide Quality Assurance Indonesia
Kecamatan Waru	9001:2015	Provision of public services for resident regristation, general public service activities and related support function	2016, Worlwide Quality Assurance Indonesia
Kecamatan Taman	9001:2015	Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pelayanan Umum, Fungsi Pendukung terkait	2018, Garuda Sertfikasi
Kecamatan Wonoayu	9001:2015	Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pelayanan Umum, Fungsi Pendukung terkait	2018, Garuda Sertfikasi
Kecamatan Krian	9001:2015	Provision Of Public Services For Resident Regristation, General Public Service Activities And Related Support Function	2016, Worlwide Quality Assurance Indonesia
Kecamatan Tulangan	9001:2015	Provision Of Public Services For Resident Regristation, General Public Service Activities And Related Support Function	2016, Worlwide Quality Assurance Indonesia
Kecamatan Tarik	9001:2015	Provision of Sub-Distric Administration and Permit Recommendation	2017, Sucofindo
SMP NEGERI 1 SIDOARJO	9001:2015	Provision of Junior High School Services	2016, European Quality Assurance Group Indonesia
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	27001:2013	Provision of Electronic Procurement Services Running on SPSE Aplication for Sidoarjo Regency Area	2016, Transpacific Certifications Limited

Sumber Data : Bagian Organisasi Setda

9. Inovasi Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintah

Inovasi pelayanan publik dikatakan sebagai inisiatif terobosan dari instansi/lembaga publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Inisiatif terobosan tersebut terletak pada kebaruan (novelty). Prinsip kebaruan tersebut dibedakan dengan inovasi dalam teknologi yang merupakan keunikan yang khas berbeda dengan yang lain. Kebaruan boleh merupakan pengembangan dari inovasi pelayanan publik yang telah ada, karena inovasi pelayanan publik terus diperbaharui dan bahkan ditiru dengan cara melakukan replikasi. Sedangkan inovasi tata kelola pemerintah merupakan jenis inovasi yang mendukung proses penyelenggaraan pemerintahan di lingkup internal yang diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja organisasi perangkat daerah. Berikut daftar inovasi pelayanan publik dan tata kelola pemerintah pada pemerintah Kabupaten Sidoarjo :

Tabel III.D.6

Inovasi Pelayanan Publik

NO	PELAKSANA	JUMLAH INOVASI	JUDUL INOVASI PELAYANAN PUBLIK
1	2	3	4
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3	Sipandu: Skrining Pendengaran Balita di Posyandu (UPT ABK)
			SIKeB (Sistem Informasi Kerusakan Bangunan)
			Calisline (Baca Tulis Online) SMPN 4 Sidoarjo
2	Dinas Kesehatan	6	Posbindu Penyakit Tidak Menular
			Desa Bebas Rokok
			Si Jari Emas
			Remiks (Rekam Medik)
			Pelayanan Konseling Orang Dengan HIV/Aids
			Si CANTIK (Sistem Informasi Cegah Kematian Ibu dan Anak)
3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1	Aplikasi SEMAR (Sistem Manajemen Arsip)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	M-BONK : Cara Cepat dan Akurat Penanganan Jalan Rusak

NO	PELAKSANA	JUMLAH INOVASI	JUDUL INOVASI PELAYANAN PUBLIK
1	2	3	4
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	3	SIKOLING (Sistem Informasi Dokumen Lingkungan)
			Pengelolaan Sampah Terpadu di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Kawasan (TPST)
			Ruang Terbuka Hijau (RTH)
6	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2	Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)
			E-NYANK Pasar (aplikasi retribusi pasar)
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3	Sistem Paket Pelayanan
			Salam 30 Menit
			One Day Service Jemput Bola
8	Dinas Perhubungan	2	Uji KIR Drive Thru
			Uji KIR Jemput Bola
9	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	3	Pelayanan Paket Perijinan Online
			SIPPADU berbasis Elektronik
			Smart Card Dan Tanda Tangan/Stempel Elektronik (SITTEK)
10	Sekretariat DPRD	1	Pelayanan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat (e-Parlemen)
11	Dinas PMDP3AKB	1	Pelayanan Tuntas Korban Mentas dari UPT P2TP2A
12	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2	Sistem Informasi Bantuan Desa (SiBD)
			Musrenbang Online
13	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1	Sistem Informasi Keuangan Kabupaten Sidoarjo (SIKSDA)
14	Badan Pelayanan Pajak Daerah	1	Pelayanan Pajak secara Online (e-SPTPD)
15	Badan Kepegawaian Daerah	5	SIPEKAT : Sistem Pengelolaan Kenaikan Pangkat paperless
			Sistem Penilaian Prestasi Kerja PNS (e-SKP)
			Unit Training Of Competence (UTC)
			Kenaikan Gaji Berkala Online
			Daftar Hadir Pegawai Online

NO	PELAKSANA	JUMLAH INOVASI	JUDUL INOVASI PELAYANAN PUBLIK
1	2	3	4
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	Rama Damkar : Rangkul Masyarakat Dalam Pemadaman Kebakaran
			Sidoarjo Tanggap (SIGAP)
17	Rumah Sakit Umum Daerah	6	SiMaNEis (Sidoarjo Maternal dan Neonatal Emergency SMS GATEWAY)
			Sistem Informasi Kamar Rawat Inap (InKam)
			e-Tamat (Elektronik Akta Kematian)
			SAntri (SMS ANTRIAN)
			Anak Lahir Membawa Akta dan KK (Alamak)
			Remic (Rekam Medis Elektronik)
18	Kecamatan Sukodono	1	BMW (Berkas Mlaku Dewe)
19	Kecamatan Buduran	1	SIPETEK
20	Kecamatan Krian	1	SICANTIK (Sistem Inovasi Cepat, Amanah, Nyaman, Tegas, Interaktif Dan Kerumah)
21	Kecamatan Tulangan	1	Cepet Mari (sistem pengelolaan keuangan desa yang cepat, tepat, mudah, akuntabel, relevan dan inovatif)
22	Puskesmas Kedungsolo	1	SMS Informasi Tubercolose Paru
23	Puskesmas Medaeng	1	Kegiatan Pos Gizi
24	Puskesmas Jabon	1	Selamatkan Jiwa Wanita dan Anak (SEJIWA)
25	Puskesmas Krembung	2	JUMantik kecil berAksi Nyamuk Jadi larI (JUMANJI)
			Krembung pEduli Catin, Usia suBur,ibU daN keluarGa (KECUBUNG)
26	Puskesmas Porong	1	Bersama Ingin Cuci Tangan Bersama Peduli Kesehatan (BINTANG BERLIAN)
27	Puskesmas Urangagung	1	Pos Pembinaan Kesehatan Haji Terpadu
28	Puskesmas Candi	1	Perangi Kanker Mulut Rahim (PeKan MuRah)
29	Puskesmas Tulangan	1	ASI Eksklusif
30	Puskesmas Tarik	9	KEMILAU CINTA (Kelas Ibu Hamil Andalan Utama Cegah Kematian Ibu Dan Neonatal di Tarik)
			SMART IS BEAUTY (Sistem Rekam Medis Puskesmas)
			SIAP Tarik (Sistem Informasi Antrian Puskesmas)
			JEDA LAYAR (Jemput Dampingi Antar Ibu Bersalin)
			SWEGER (Swadaya Air Bersih Layak Konsumsi Bagi Rakyat)

NO	PELAKSANA	JUMLAH INOVASI	JUDUL INOVASI PELAYANAN PUBLIK
1	2	3	4
			WARNA CINTA (Wahana Bermain Anak Cerdas di Tarik)
			CINTA HATI (Dacin Balita Sehat di Tarik)
			RUMAH CINTA (Ruang Menyusui Ramah Anak Cerminan Kasih Ibu di Tarik)
			HAI CINTA (Hallo Imunisasi Cerminan Peduli Balita di Tarik)
31	Puskesmas Waru	1	Gebyar geMpita MEngekspos Sisi Hati (GEMMESH)
32	Puskesmas Barengkrajan	1	Lentera Cinta Untuk Tunas Generasiku Melalui Paguyuban Penyelamatan Seribu Hari Pertama Kehidupan (P2SPK)
33	Puskesmas Krian	4	Sehat Selamat
			Penanganan Penderita HIV AIDS
			Klinik Inisiasi ARV
			Komunitas Peduli Kesehatan Mental (KOPISEMEL)
34	Puskesmas Prambon	1	Kampung UBM (Upaya Berhenti Merokok)
35	Puskesmas Sedati	1	Gerakan Semanggi (Selamatkan Yang Anda Sayangi)
36	Puskesmas Taman	6	Senyum Balitaku
			ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) Tuntas
			Posyandu Bina Warung Makan (POSNAWAR)
			Gerakan Masyarakat Kader Risti dan MKIA (GEMA KARISMA)
			Menabung dan Menyumbang di Bank Sampah
			Chat Box Keluhan Pelanggan
37	Puskesmas Buduran	1	Kelas Ibu Hamil Plus
38	Puskesmas Balongbendo	1	Gerakan Masyarakat Menyusui Sejak Dini (GEMA SUSI)
39	Puskesmas Sukodono	1	DELIA CERIA
40	Puskesmas Gedangan	1	Sabar Antri Kita dengarkan Tentang Informasi (SAKTI)
41	Puskesmas Wonoayu	1	DASI
42	Puskesmas Sidoarjo	1	Gerakan Jajan Enak Lan Sehat (GAK JELAS)
43	Puskesmas Ganting	1	Gerakan Polisi Sungai (GPS of STBM)
44	Puskesmas Sekardangan	1	Klas Ibu Menyusui Mom Loves Me (MLM)
45	Puskesmas Trosobo	1	PERMATA CINTA (PERiksa MATa Anda dan Cek Kondisi Kesehatan Anda)
	Jumlah Inovasi	89	

Sumber Data : Bagian Organisasi Setda

c. SKPD Penyelenggara Urusan

Unsur penunjang sekretariat daerah dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah yang terdiri dari 9 Bagian, yaitu : Bagian Pemerintahan, Bagian Kesra, Bagian Hukum, Bagian Perekonomian dan SDA, Bagian Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Bagian Organisasi, Bagian Umum, serta Bagian Protokol dan Rumah Tangga.

d. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia penyelenggara unsur penunjang sekretariat daerah seluruhnya berjumlah 178 orang. Secara rinci SDM penyelenggara unsur penunjang menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir.

Sedangkan untuk jabatan fungsional terdiri dari pranata komputer sejumlah 3 orang.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran (per program)

Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program sebagaimana terlampir

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan Organisasi Perangkat Daerah dan Pelayanan Publik	Rp 1,111,650,000.00	Rp 1,024,898,669.00	92.20%
2	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Bantuan dan Dokumentasi Hukum	Rp 1,526,466,900.00	Rp 1,194,969,568.00	78.28%
3	Program Koordinasi Rumusan Kebijakan Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan	Rp 1,317,955,837.00	Rp 1,290,587,565.00	97.92%

4	Program Koordinasi Kebijakan Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Rp 6,968,216,569.00	Rp 6,484,012,394.00	93.05%
5	Program Pembinaan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Kerjasama	Rp 4,972,396,079.00	Rp 3,114,780,944.00	62.64%
6	Program Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Bidang Perekonomian, SDA, Penanaman Modal dan BUMD	Rp 1,109,545,000.00	Rp 960,943,275.00	86.61%
7	Program Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 3,829,628,797.00	Rp 3,092,893,140.00	80.76%
8	Program pelayanan administrasi kegiatan, keprotokolan dan rumah tangga pimpinan daerah	Rp 9,287,883,972.00	Rp 8,176,771,208.00	88.04%

f. Proses Perencanaan

Proses perencanaan unsur penunjang sekretariat daerah melalui sinkronisasi usulan dari hasil musrenbang kecamatan dengan rencana kerja Sekretariat Daerah.

g. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan unsur penunjang sekretariat daerah pada Sekretariat Daerah sebagaimana terlampir.

2. Unsur Penunjang Sekretariat DPRD

a. Program

Program pembangunan yang dilaksanakan untuk unsur penunjang sekretariat DPRD pada tahun 2018 adalah :

1. Program Fasilitasi Penyelenggaraan Rapat-Rapat dan Kehumasan DPRD
2. Program Fasilitasi Penyusunan, Pembahasan, Penetapan dan Dokumentasi Peraturan Daerah dan Produk Hukum DPRD
3. Program Penyelenggaraan Keuangan DPRD

b. Realisasi Pelaksanaan ProgramSerta Permasalahan Dan Solusinya

Hasil pelaksanaan program tersebut dapat ditunjukkan pada pencapaian beberapa sasaran, diantaranya :

Nilai IKAD (Indikator Kepuasan Anggota DPRD)

Indeks ini digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD. Hal ini dilakukan dalam upaya meningkatkan dukungan Sekretariat DPRD terhadap peran DPRD sesuai dengan fungsinya.

Target yang ditetapkan di tahun 2018 dalam RPJMD untuk indeks nilai IKAD (Indikator Kepuasan Anggota DPRD) adalah 73. Realisasi Indeks nilai IKAD (Indikator Kepuasan Anggota DPRD) tahun 2018 tercapai sebesar 75,26, maka capaian Indeks nilai IKAD (Indikator Kepuasan Anggota DPRD) telah tercapai sebesar 103%.

Upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan Indeks nilai IKAD (Indikator Kepuasan Anggota DPRD), antara lain :

1. Mengembangkan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan, seperti:
   a. Memperbaiki konektivitas wifi
   b. Perbaikan dan pemeliharaan smart-TV
   c. Peningkatan kebersihan toilet

d. Penataan ruang dengan memanfaatkan meubeler yang tidak terlalu besar sehingga memakan banyak tempat

2. Pemeliharaan sarana dan prasarana di ruang rapat Paripurna dan Komisi untuk menunjang kinerja Anggota DPRD saat rapat ataupun sidang, seperti :
   a. Pemeliharaan LCD Proyektor
   b. Pemeliharaan sound system

   Sebelum rapat sebaiknya pegawai / staf menyiapkan dan melakukan pengecekan LCD Proyektor dan sound system.
3. Perlu dibuat SOP dalam pendistribusian undangan rapat maupun sidang, beserta materi rapat / sidang.
4. Perlu dibuat SOP dalam pembuatan dan pendistribusian hasil rapat notulensi hasil rapat oleh pendamping.
5. Sekretariat DPRD perlu mengadakan pembinaan dan pelatihan baik pelatihan berupa soft skill atau pelatihan menggunakan perangkat komputer dan peningkatan kompetensi yang dikhususkan bagi para pendamping Anggota DPRD.

Sekretariat DPRD perlu terus berkomitmen dan memberikan pelayanan terbaik, sesuai dengan prosedur pelayanan serta dijalankan tepat waktu kepada para Anggota DPRD.

c. SKPD Penyelenggara Urusan

Unsur penunjang sekretariat DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.

d. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia penyelenggara unsur penunjang sekretariat DPRD seluruhnya berjumlah 57 orang. Secara rinci SDM penyelenggara unsur penunjang menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir.

Sedangkan untuk jabatan fungsional terdiri dari pranata komputer dan arsiparis.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran (per program)

Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program sebagaimana terlampir

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Fasilitasi Penyelenggaraan Rapat-Rapat dan Kehumasan DPRD	Rp 6,460,363,600.00	Rp 4,735,216,895.00	73.30%
2	Program Fasilitasi Penyusunan, Pembahasan, Penetapan dan Dokumentasi Peraturan Daerah dan Produk Hukum DPRD	Rp 3,456,000,000.00	Rp 1,962,400,119.00	56.78%
3	Program Penyelenggaraan Keuangan DPRD	Rp 47,316,475,000.00	Rp 33,619,304,946.00	71.05%

f. Proses Perencanaan

Proses perencanaan unsur penunjang sekretariat DPRD melalui sinkronisasi usulan dari hasil musrenbang kecamatan dengan rencana kerja Sekretariat DPRD.

g. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan unsur penunjang sekretariat DPRD pada Sekretariat DPRD sebagaimana terlampir.

3. Unsur Penunjang Perencanaan Pembangunan

a. Program

Program pembangunan yang dilaksanakan untuk unsur penunjang Perencanaan Pembangunan pada tahun 2018 adalah :

1. Program perencanaan pembangunan daerah
2. Program Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan
3. Program Perencanaan Bidang Ekonomi
4. Program Perencanaan Bidang Pengembangan Wilayah, Permukiman dan Prasarana Wilayah

b. Realisasi Pelaksanaan Program Serta Permasalahan Dan Solusinya

Hasil pelaksanaan program tersebut dapat ditunjukkan pada pencapaian beberapa sasaran, diantaranya :

Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam rangka meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan sesuai sasaran yang tertuang dalam dokumen RPJMD, maka diperlukan pula meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan Indikator Kinerja Daerah yang diukur dengan capaian Nilai Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) sesuai dengan Indikator Kinerja Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD, maka pada Tahun 2018 Bappeda Kabupaten Sidoarjo mengikuti kompetisi dalam rangka Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD), yaitu kompetisi yang diadakan oleh BAPPENAS dalam rangka mengukur tingkat konsistensi dokumen perencanaan, inovasi dan capaian pembangunan daerah. Kompetisi ini sebelumnya bernama Anugrah Pangripta Nusantara (APN) yang hanya menilai indikator dan konsistensi dokumen RKPD mulai Tahun 2014-2017, sedangkan pada Tahun 2018 sudah ditambah kriterianya tidak hanya dokumen RKPD tetapi juga capaian pembangunan daerah dan inovasi pembangunan daerah. Tahapan penilaian terbagi dalam 3 tahap yaitu 1).

Penilaian dokumen perencanaan 2). Verifikasi lapangan dan wawancara 3). Presentasi.

Pada Tahun 2018 Kabupaten Sidoarjo meraih Nilai Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) sebesar yaitu 3,89. Nilai tersebut hanya pada nilai dokumen perencanaan yaitu RKPD dan RPJMD tetapi belum lolos pada tahapan berikutnya yaitu verifikasi lapangan dan wawancara (sesuai surat dari Bappeda Provinsi Jawa Timur, tanggal 12 Pebruari 2019, Nomor : 050/2437/201.5/2019). Raihan nilai tersebut termasuk dalam katagori 10 besar terbaik yang lolos penilaian dokumen perencanaan RKPD dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Pada Tahun 2016 Kabupaten Sidoarjo sempat meraih terbaik ke 2 tingkat Provinsi Jawa Timur penilaian perencanaan pembangunan yang saat itu masih bernama untuk Anugrah Pangripta Nusantara (APN).

Mulai Tahun 2018 Anugrah Pangripta Nusantara berubah Namanya menjadi Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD). Selain mengukur kedalaman dan tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan, diukur juga capaian dan hasil dari target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan RKPD dan RPJMD, yaitu dengan membandingkan antara target dan realisasi serta penambahan kriteria inovasi daerah sesuai tema RKP pusat.

Disamping menilai kualitas perencanaan melalui Nilai Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD), sesuai Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang tertuang dalam dokumen RPJMD, kualitas perencanaan juga diukur dari indikator:

1. Persentase PD yang menyusun dokumen perencanaan dengan kualitas baik;
2. Persentase program pembangunan PD dengan tingkat capaian hasil (outcome) > 76%;
3. Persentase usulan musrenbang kecamatan yang diakomodir menjadi RKPD;
4. Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW.

Capaian indikator **“ *Persentase PD yang menyusun dokumen perencanaan dengan kualitas baik* “** merupakan implementasi untuk mengukur tingkat konsistensi dan keselarasan antara dokumen perencanaan dan penganggaran antara dokumen daerah dan dokumen perangkat daerah. Kriteria yang digunakan adalah keselarasan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah yaitu RPJMD dengan Renstra PD, RKPD dan Renja PD serta keselarasan antara dokumen perencanaan dan penganggaran yaitu RKPD, KUA-PPAS dan APBD. Dari hasil evaluasi dan analisa dokumen konsistensi yang telah disusun, didapatkan hasil penilaian dari target 2018 sebesar 95% terealisasi sebesar 96,36 % atau 101,43 %, hal ini mengalami peningkatan dari Tahun 2017 yang tercapai sebesar 92,08 %. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat konsistensi dan keselarasan antar dokumen perencanaan dan penganggaran semakin lebih baik dan mendapatkan perhatian. Disamping itu pula dengan adanya aplikasi RDS (Regional Development System) yang sudah diterapkan semakin memperkecil deviasi program/kegiatan antara perencanaan dan penganggaran.

Dari hasil evaluasi dokumen konsistensi antara RKPD, KUA-PPAS dan APBD Tahun 2018 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel III.D.7

Konsistensi Dokumen Perencanaan Daerah

Dokumen	PROGRAM			KEGIATAN		
	Jumlah Program	Jumlah Program yang konsisten	Tingkat Konsistensi (%)	Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan yang Konsisten	Tingkat Konsistensi (%)
RKPD	329	321	97,57	2.287	2.176	95,15
KUA-PPAS	321			2.178		
APBD	321			2.176		
JUMLAH	329			2.287		
Rata-Rata Tingkat Konsistensi			**96,36 %**			

Sumber Data : Dokumen Evaluasi Konsistensi Tahun 2018

Beberapa hal yang diperlukan untuk meningkatkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran adalah sebagai berikut :

1. Diperlukan komitmen bersama antara DPRD dan Pemkab Sidoarjo untuk menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran;
2. Optimalisasi fungsi kelembagaan tim perencana pada masing-masing OPD
3. Peningkatan intensitas informasi dan komunikasi dengan pejabat perencana pada masing-masing OPD, BAPPEDA, dan Tim Anggaran.

Sedangkan untuk capaian indikator "***Persentase program pembangunan PD dengan tingkat capaian hasil (outcome) > 76%",*** pada tahun 2018 ini didapatkan hasil evaluasi monitoring dan evaluasi program yang dilaksanakan setiap triwulanan dan telah di entry pada aplikasi e-monev didapatkan dari hasil rata-rata realisasi program seluruh perangkat daerah telah terealisasi sebesar 93,72 %, lebih besar dari target dalam IKD RPJMD Tahun 2018 yang ditargetkan sebesar 85 % atau tingkat capaiannya sebesar 110,26 %. Jika dibandingkan capaian Tahun 2017 yang sebesar 95,83 %, capaian Tahun 2018 ini sedikit mengalami penurunan, hal ini disebabkan ada beberapa program yang tidak bisa direalisasikan karena regulasi yang berubah, dan penyelesaian pekerjaan diluar jadwal yang telah ditetapkan sehingga tidak dapat terealisasi.

Untuk indikator ***"Persentase usulan musrenbang kecamatan yang diakomodir menjadi RKPD"*** dari target 60 % terealisasi 60,87 % atau 101,45 %. Bila dibandingkan pada Tahun 2017 yang mencapai 64,07 %, hal ini sedikit mengalami penurunan. Hal ini disebabkan beberapa hal sebagi berikut :

1. Usulan hasil musrenbang kecamatan setelah dilakukan verifikasi oleh perangkat daerah ternyata bukan kewenangan dari Kabupaten tetapi merupakan kewenangan desa/propinsi/pusat, sehingga pembiayaannya tidak bisa diusulkan melalui APBD Kabupaten.
2. Kegiatan yang telah di usulkan ternyata akan direalisasikan oleh PD teknis pada tahun berjalan atau terjadi duplikasi dengan kegiatan lainnya yang sama

dari hasil perhitungan diaplikasi pada Tahun 2019 terdapat 1.858 usulan kegiatan dari Desa/Kelurahan dan yang lolos verifikasi oleh Perangkat Daerah sebanyak 1.131 kegiatan atau 60,87 %.

Dalam mengukur kualitas perencanaan pembangunan disamping indikator-indikator kinerja daerah tersebut diatas juga terdapat indikator ***"Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW",*** indikator ini untuk mengukur tingkat kesesuaian program/kegiatan dengan dokumen spasial/tata ruang sebagaimana diamanatkan dalam PP 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan system dengan perencanaan pembangunan nasional dan Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Dari hasil evaluasi dokumen tata ruang bahwa tingkat kesesuaian kegiatan dalam dokumen RKPD dengan dokumen tata ruang (RTRW) terealisasi sebesar 64,45 % dari target tahun 2018 sebesar 45 %. Capaian mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan capaian Tahun 2017 yang sebesar 59,51 %. Pengukuran ini berdasarkan perhitungan dari kesesuaian dengan struktur ruang dan pola ruang dari dokumen RKPD dengan RTRW.

c. SKPD Penyelenggara Urusan

Unsur penunjang Perencanaan Pembangunan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

d. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia penyelenggara unsur penunjang Perencanaan Pembangunan seluruhnya berjumlah 40 orang. Secara rinci SDM penyelenggara unsur penunjang menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir.

Sedangkan untuk jabatan fungsional terdiri dari pranata komputer, perencana dan statistisi.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran (per program)

Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program sebagaimana terlampir

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program perencanaan pembangunan daerah	Rp 2,344,206,000.00	Rp 1,889,960,060.00	80.62%
2	Program Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan	Rp 1,930,155,000.00	Rp 1,716,837,650.00	88.95%
3	Program Perencanaan Bidang Ekonomi	Rp 1,281,025,000.00	Rp 1,213,214,900.00	94.71%
4	Program Perencanaan Bidang Pengembangan Wilayah, Permukiman dan Prasarana Wilayah	Rp 3,884,365,500.00	Rp 3,854,869,000.00	99.24%

f. Proses Perencanaan

Proses perencanaan unsur penunjang Perencanaan Pembangunan melalui sinkronisasi usulan dari hasil musrenbang kecamatan dengan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

g. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan unsur penunjang Perencanaan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana terlampir.

5. Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan

a. Program

Program pembangunan yang dilaksanakan untuk unsur penunjang Penelitian dan Pengembangan pada tahun 2018 adalah Program Program Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Data Pembangunan Daerah.

b. Realisasi Pelaksanaan Program Serta Permasalahan Dan Solusinya

Hasil pelaksanaan program tersebut dapat ditunjukkan pada pencapaian beberapa sasaran, diantaranya :

Meningkatnya kualitas dokumen penelitian/kajian sebagai perumusan kebijakan pembangunan daerah

Salah satu Indikator Kinerja Daerah dalam RPJMD yang harus mendapatkan perhatian adalah *“ **Persentase dokumen Penelitian / kajian yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan pembangunan daerah”.*** Hal ini terkait dengan tindaklajut dari dokumen penelitian dan kajian yang disusun sebagai dasar kebijakan pembangunan daerah. Dokumen dimaksud adalah dokumen yang telah disusun pada Tahun n-2 (2016), hal ini mengingat untuk dapat ditindakjuti hasil rekomendasinya maka dibutuhkan perencanaan minimal dalam 2 tahun sebelumnya.

Dari data hasil monitoring dan evaluasi kelitbangan Tahun 2018, bahwa dari 37 dokumen penelitian dan kajian yang telah disusun oleh OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2016, yang dapat ditindaklanjuti sebagai bahan kebijakan adalah sebanyak 27 dokumen atau sebesar 73 %, lebih besar dari ditargetkan pada tahun 2018 yaitu sebesar 70 %. Capaian tahun 2018 ini mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan capaian tahun 2017 yang sebesar 70 %.

Disamping itu pada tahun 2018 Bappeda Kabupaten Sidoarjo telah menyusun dokumen perencanaan dan kajian/penelitian sebagai masukan dalam

penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah sebanyak 82 dokumen. Dari 82 dokumen yang telah disusun tersebut, sebanyak 57 dokumen adalah yang utama dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III.D.8

Dokumen Penelitian dan Pengembangan

No	Unit Kerja/Bidang	Jumlah Dokumen
1	Sekretariat	8
2	Penelitian, Pengembangan dan Data	5
3	Ekonomi	1
4	Pemerintahan dan Kemasyarakatan	12
5	Pengembangan Wilayah, Permukiman dan Prasarana Wilayah	31
JUMLAH		57

Sumber Data : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Dari data tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dari 82 dokumen perencanaan, kajian/penelitian yang telah disusun oleh Bappeda Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2018 sebesar 69,5% adalah dokumen yang dapat dimanfaatkan secara optimal dalam menunjang perumusan kebijakan pembangunan daerah sesuai dengan tahapan waktunya.

c. SKPD Penyelenggara Urusan

Unsur penunjang Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

d. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia penyelenggara unsur penunjang Penelitian dan Pengembangan seluruhnya berjumlah 8 orang. Secara rinci SDM penyelenggara unsur penunjang menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir.

Sedangkan untuk jabatan fungsional terdiri dari peneliti sebanyak 2 orang.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran (per program)

Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program sebagaimana terlampir

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Data Pembangunan Daerah	Rp 1,063,690,000.00	Rp 986,389,000.00	92.73%

f. Proses Perencanaan

Proses perencanaan unsur penunjang Penelitian dan Pengembangan melalui sinkronisasi usulan dari hasil musrenbang kecamatan dengan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

g. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan unsur penunjang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana terlampir.

6. Unsur Penunjang Pengawasan

a. Program

Program pembangunan yang dilaksanakan untuk unsur penunjang pengawasan pada tahun 2018 adalah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.

b. Realisasi Pelaksanaan Program Serta Permasalahan Dan Solusinya

Hasil pelaksanaan program tersebut dapat ditunjukkan pada pencapaian beberapa sasaran, diantaranya :

1. **Jumlah temuan/nilai pemeriksaan BPK dan tindak lanjutnya.**

   Untuk menilai efektivitas pengawasan oleh aparat pengawas fungsional maka jumlah rekomendasi hasil audit dapat mewakili kinerja pengawasan yang dilakukan.

   Perkembangan rekomendasi BPK pada angka baseline tahun 2016, sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel III.D.9

Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK

REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BPK 2016		
Rekomendasi BPK s/d Thn 2016	693	99,85%
Rekomendasi BPK s/d Thn 2016 yang telah ditindak lanjuti	689	
Yang belum ditindak lanjuti	4	
REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BPK 2017		
Rekomendasi BPK s/d Tahun 2017	746	99,86%
Rekomendasi BPK s/d Tahun 2017 yang telah ditindak lanjuti	744	
Yang belum ditindak lanjuti	2	
REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BPK 2018		
Rekomendasi BPK s/d Tahun 2018	625	94,24%
Rekomendasi BPK s/d Tahun 2018 yang telah ditindak lanjuti	589	
Yang belum ditindak lanjuti	36	

*Sumber Data : Inspektorat; *) Data Semester 1 tahun 2018*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rekomendasi BPK pada Tahun 2018 ada sejumlah rekomendasi yang belum ditindaklanjuti (data semester I), sedangkan data sampai dengan Desember 2018, sampai dengan hari ini belum diterima.

2. **Jumlah rekomendasi pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo dan tindak lanjutnya.**

   Sebagai bentuk upaya untuk memperbaiki tatakelola keuangan daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya telah melakukan tindak lanjut pengawasan/pemeriksaan.

   Perkembangan rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah dari Angka baseline tahun 2016, sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel III.D.10

Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat

REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT DAERAH 2016			
1	Rekomendasi Inspektorat Tahun 2016	860	100%
2	Rekomendasi Inspektorat Tahun 2016 yang telah ditindaklanjuti	860	
3	Yang belum ditindak lanjuti	0	
REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT DAERAH 2017			
1	Rekomendasi Inspektorat Daerah Tahun 2017	1796	79,84%
2	Rekomendasi Inspektorat Daerah Tahun 2017 yang telah ditindaklanjuti	1434	
3	Yang belum ditindak lanjuti	362	
REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT DAERAH 2018			
1	Rekomendasi Inspektorat Daerah Tahun 2018	773	72,18%
2	Rekomendasi Inspektorat Daerah Tahun 2018 yang telah ditindaklanjuti	558	
3	Yang belum ditindak lanjuti	215	

*Sumber Data : Inspektorat; *) data per Desember 2018*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ada sejumlah rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2017 dan Tahun 2018 yang belum ditindaklanjuti atau persentase nya cenderung turun, hal tersebut disebabkan karena :

Adanya perluasan entitas pemeriksaan, yang semula Desa tidak masuk dalam entitas tersendiri, namun merupakan bagian dari sample pada saat pemeriksaan OPD kecamatan. Mulai Tahun 2016, Desa menjadi entitas pemeriksaan tersendiri, mengingat Desa merupakan entitas pemeriksaan yang baru, maka desa masih belum terbiasa untuk melaksanakan tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.

Dalam rangka penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK maupun rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah, Inspektorat Daerah masih perlu meningkatkan koordinasi dengan BPK dan obyek pemeriksaan.

3. **Maturitas SPIP**

Tingkat Kematangan (maturity level) SPIP yang menggambarkan tahapan proses yang lebih diyakini akan mengarahkan pada output dan outcome yang lebih baik. Tingkat Maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan.

Sebagaimana dalam target RPJMN bahwa di tahun 2019 tingkat kematangan harus sudah menunjukkan level 3, Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2018 sesuai dengan hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP oleh Inspektorat telah menunjukkan level 3 (Terdefinisi) sesuai dengan target tahun 2018 level 3 (Terdefinisi) namun masih menunggu QA dari BPKP.

Hal ini menggambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah memiliki kebijakan dan prosedur pengendalian yang telah dikomunikasikan secara memadai serta telah diimplementasikan pada seluruh kegiatan. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga terdapat kelemahan yang belum ditangani secara memadai.

Tabel III.D.11

Maturitas SPIP Kabupaten Sidoarjo

No	Tahun	Level Kematangan
1	2015	Level 2 (Berkembang)
2	2016	Level 2 (Berkembang)
3	2017	Level 3 (Terdefinisi)
4	2018	Target Level 3 (Terdefinisi)

Sumber Data : Inspektorat Kabupaten Sidoarjo

Upaya untuk meningkatkan kematangan dalam pengendalian intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, yaitu dengan :

1. Sosialisasi SPIP
2. Identifikasi Resiko
3. Analisa Resiko
4. Rencana Tindak Pengendalian

c. SKPD Penyelenggara Urusan

Unsur penunjang pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten.

d. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia penyelenggara unsur penunjang pengawasan seluruhnya berjumlah 59 orang. Secara rinci SDM penyelenggara unsur penunjang menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir.

Sedangkan untuk jabatan fungsional terdiri dari auditor, auditor kepegawaian dan arsiparis.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran (per program)

Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program sebagaimana terlampir

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Rp 969,501,000.00	Rp 811,908,600.00	83.74%

f. Proses Perencanaan

Proses perencanaan unsur penunjang pengawasan melalui sinkronisasi usulan dari hasil musrenbang kecamatan dengan rencana kerja Inspektorat.

g. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan unsur penunjang pengawasan pada inspektorat sebagaimana terlampir.

7. Unsur Penunjang Keuangan

a. Program

Program pembangunan yang dilaksanakan untuk unsur penunjang keuangan pada tahun 2018 adalah :

1. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.
2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah
3. Program Pendataan, Peningkatan dan Pengembangan Pajak Daerah
4. Program Penetapan Pajak Daerah
5. Program Pengendalian Pajak Daerah

b. Realisasi Pelaksanaan Program Serta Permasalahan Dan Solusinya

Hasil pelaksanaan program tersebut dapat ditunjukkan pada pencapaian beberapa sasaran, diantaranya :

1. Opini Atas Audit BPK

Untuk menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah salah satunya adalah dengan menilai opini BPK atas laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah.

Untuk memperoleh kinerja keuangan yang baik, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah melakukan upaya yaitu pemantapan terhadap penatausahaan keuangan dengan pembinaan terhadap pegawai yang bertugas dibidang keuangan, penyempurnaan atas sistem aplikasi keuangan SIKSDA menjadi terintegrasi dengan RDS (*Regional Development Sistem*) dan yang terbaru adalah penerapan kebijakan transaksi non tunai dalam pengeluaran belanja daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan pembayaran non tunai dalam belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Selain itu pengelolaan aset daerah juga diupayakan perbaikan melalui upaya :

a. Menyelaraskan persepsi dan pemahaman serta peningkatan pengetahuan tentang pengelolaan barang milik daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui kegiatan bimbingan teknis, workshop serta pembinaan pengelolaan barang milik daerah;
b. Peningkatan koordinasi antar instansi terkait (Badan Pertanahan Nasinal Kabupaten Sidoarjo), dalam rangka proses pensertifikatan aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, serta dalam rangka penelusuran dokumen kelengkapan pengurusan sertifikat tanah;
c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan sewa barang milik daerah;
d. Penetapan/kode rekening pendapatan dan belanja secara tepat pada jenis pendapatan/belanja, obyek pendapatan/belanja, rincian obyek pendapatan

dan belanja sehingga realisasi pendapatan maupun belanja secara substansi tepat.

e. Optimalisasi tatakelola barang pakai habis berbasis akrual.

Dengan upaya tersebut diharapkan pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat terkelola dengan baik.

Perkembangan Opini BPK untuk laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel III.D.12

Opini BPK Atas Laporan Keuangan

No	Tahun	Opini
1	2014	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2	2015	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
3	2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
4	2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
5	2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dari opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan mengambarkan bahwa pengelolaan keuangan daerah sudah terlaksana secara baik sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD yaitu opini WTP. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah berkomitmen akan memperbaiki kinerja keuangan daerah sesuai dengan catatan yang telah dilakukan oleh BPK. Terlebih mulai tahun 2018 kemaren, BPK tidak hanya melakukan audit pada laporan keuangan saja, melainkan juga melakukan audit terhadap kinerja yang dimulai dari dokumen perencanaan, penganggaran, monev, hingga pelaporan.

2. **Persentase Penyerapan Anggaran Belanja**

Dalam 3 tahun terakhir, belanja di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pola karakteristik penyerapannya rendah di triwulan I dan triwulan II dan terjadi peningkatan penyerapan pada triwulan IV, hal tersebut dapat menyebabkan pelayanan publik pemerintah kepada masyarakat menjadi terhambat.

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, realisasi belanja langsung Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

URAIAN	2018 (Unaudited)
Anggaran	2.669.831.099.970,30
Realisasi	2.171.326.292.300,10
Capaian (%)	81,33

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa Rasio Realisasi Belanja Langsung terhadap Anggaran Belanja Langsung di tahun anggaran 2018 adalah 81,33%, apabila dibandingkan dengan capaian tahun anggaran 2016 sebesar 89,42 % dan pada tahun anggaran 2017 sebesar 76,87% maka terjadi peningkatan kinerja terkait dengan persentase penyerapan anggaran belanja langsung bila dibandingkan dengan tahun anggarana 2017.

Tabel III.D.13

Realisasi Belanja Langsung OPD Realisasi dibawah 80%

No.	OPD	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
1	Sekretariat DRPD	72,413,790,632.00	52,734,217,314.00	72.82%
2	Dinas Kesehatan	226,208,242,144.32	158,802,372,652.25	70.20%
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	731,543,493,917.00	502,496,124,100.93	68.69%
4	Dinas Perumahan dan Permukiman	125,365,577,386.00	94,117,028,353.45	75.07%

5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana	18,535,182,899.00	14,034,193,500.00	75.72%
6	Dinas Pangan dan Pertanian	27,827,752,311.00	16,359,013,496.00	58.79%

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi rendahnya penyerapan anggaran antara lain sebagai berikut:

a. Kurangnya pemahaman sejumlah aparatur terkait dengan mekanisme penyerapan/penggunaan anggaran;
b. Keterlambatan penetapan/pengesahan anggaran;
c. Perencanaan yang kurang sesuai dengan kegiatan.

Untuk meningkatkan kinerja terhadap penyerapan anggaran belanja maka dilakukan Upaya sebagai berikut :

a. Adanya Tunjangan yang berbasis kinerja yang didasarkan pada triwulan dengan berdasarkan penyerapan anggaran tiap triwulan, dengan demikian maka pelaksanaan kegiatan tidak menumpuk di akhir tahun anggaran;
b. Sosialisasi pedoman/ petunjuk teknis pelaksanaan APBD;
c. Pendampingan terhadap penyusunan perencanaan anggaran secara terus menerus.

3. Persentase Aset Tetap dengan Dokumentasi Legal

Persentase aset tetap yang didokumentasi legal meliputi aset tetap yang telah tercatat dalam laporan barang milik daerah dan telah dilakukan sensus serta untuk aset berupa tanah yang telah bersertifikat, berikut adalah persentase aset tetap milik daerah yang dokumentasi legal :

URAIAN	2018
Jumlah dokumentasi legal	428.602
Jumlah Aset Tetap	429.783
Realisasi (%)	99,73%
Target (%)	99,73%
Capaian (%)	100%

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa target persentase aset tetap dengan dokumentasi legal di tahun 2018 ditetapkan 99,73% dan terealisasi 99,73% sehingga capaianya sebesar 100%, pada tahun 2017 capaian persentase aset tetap dengan dokumentasi legal juga sebesar 100%.

Beberapa upaya dalam mengamanan terhadap barang milik daerah antara lain :

a. Bekerjasama dengan BPN untuk menerbitan sertifikat atas aset tetap (tanah) milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
b. Pemasangan papan nama aset milik daerah;
c. Dilaksanakan sensus terhadap Barang Milik Daerah

4. Peningkatan Penerimaaan Pajak Daerah

Berikut grafik perkembangan penerimaan pajak daerah :

Grafik III.D.3

Penerimaan Pajak Daerah

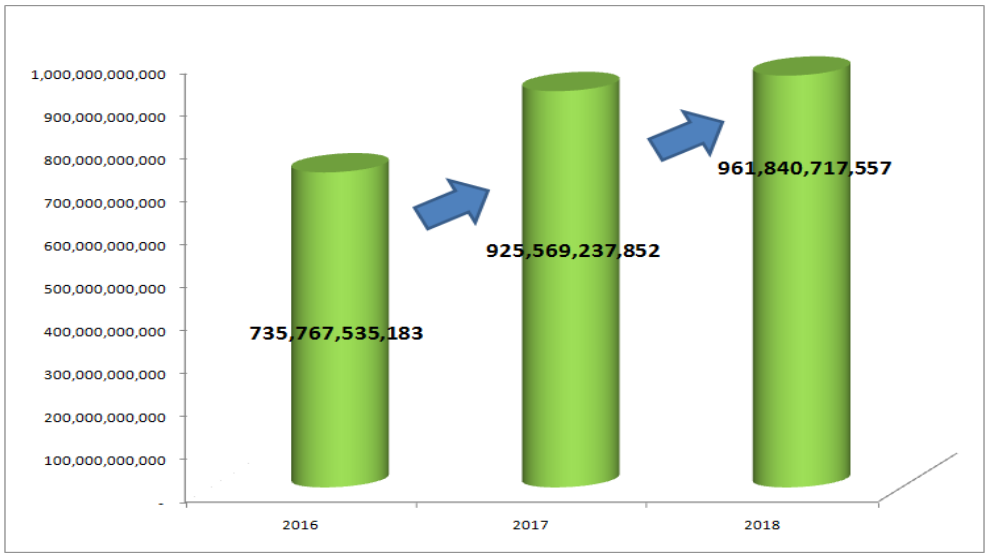

Sumber Data : Badan Pelayanan Pajak Daerah

Dari grafik tersebut disimpulkan bahwa dari tahun ke tahun penerimaan pajak daerah selalu meningkat. Hal ini diupayakan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi, yaitu :

A. Intensifikasi pada tahun 2018

1. Melakukan sosialisasi kepada wajib pajak
2. Pemutakhiran Pajak Bumi dan Bangunan secara massal di Kecamatan Taman dan Waru
3. Pemasangan alat perekam transaksi (mini pc dan web servis) kepada wajib pajak
4. Pemeriksaan Wajib Pajak dengan kerjasama dengan pihak terkait (Kantor Satpol PP dan Kejaksaan)

5. Pemutakhiran data (survey harga pasar properti baru)

B. Ekstensifikasi pada tahun 2018

1. Melaksanakan Pendataan Objek Pajak Baru bekerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dalam perijinan
2. Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan kepada calon wajib pajak

Penerimaan pajak pada tahun 2018, 3 (tiga) terbesar terdiri atas sektor :

1. BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) sebesar Rp. 307.416.332.941
2. Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp. 299.229.768.038
3. Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp. 219.141.718.065

Grafik III.D.4

Penerimaan BPHTB Tahun 2016 - 2018

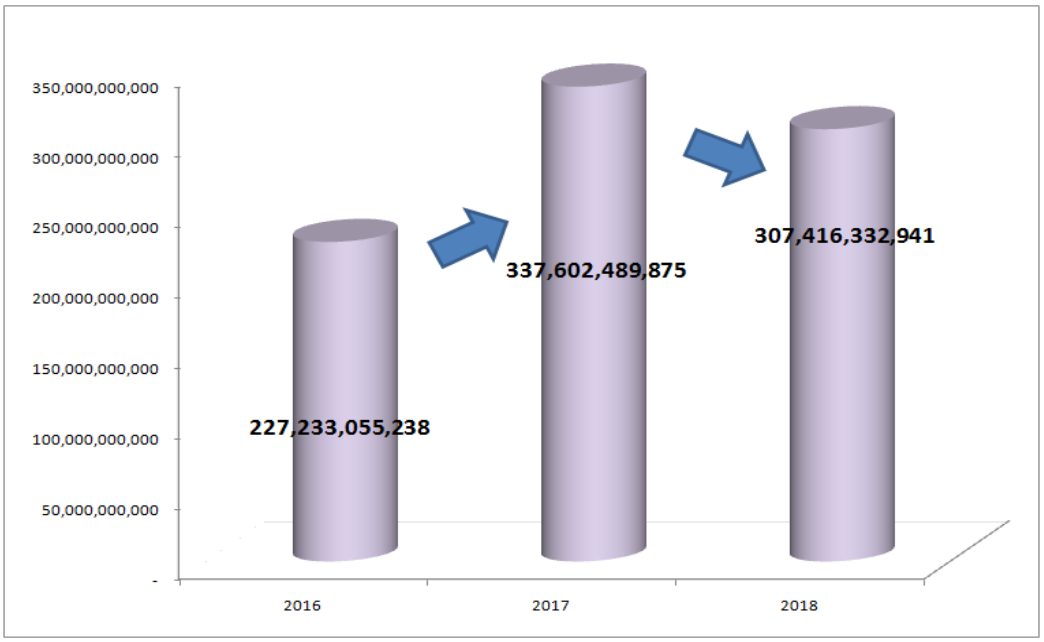

Sumber Data : Badan Pelayanan Pajak Daerah

Pada tahun 2018 terjadi penurunan penerimaan BPHTB dibandingkan dengan tahun sebelumnya hal ini dipengaruhi oleh berakhirnya kegiatan tax amnesty (pengampunan pajak), untuk mencapai target penerimaan BPHTB pada tahun 2018, dilaksanakan kegiatan :

- Kegiatan Ekstensifikasi
  - Sosialisasi kepada PPAT / Notaris untuk memberikan informasi kepada wajib pajak dalam melaporkan transaksi peralihan hak secara wajar
  - Survey lapang untuk mengidentifikasi objek pajak yang sudah beralih kepemilikan dan peruntukannya tetap belum melakukan balik nama BPHTB.
- KegiatanKegiatan Intensifikasi
  - Pelaksanaan Pemungutan BPHTB dilaksanakan dengan cara pemeriksaan NPOP (Nilai Perolehan Objek Pajak) di awal sebelum dilaksanakan pembayaran BPHTB, hal ini didasarkan pada Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Nilai Perolehan Objek Pajak BPHTB
  - Pemutakhiran informasi perumahan properti setiap tahun yang digunakan sebagai pembanding dalam pelaksanaan pemeriksaan BPHTB.

Grafik III.D.5

Realisasi PPJ Tahun 2016 - 2018

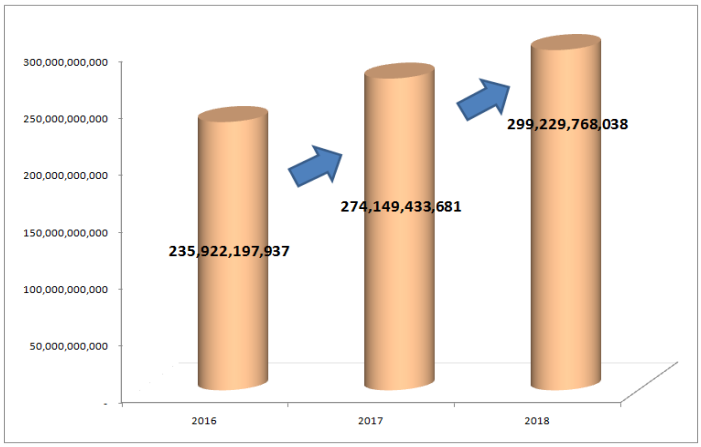

Sumber Data : Badan Pelayanan Pajak Daerah

Peningkatan penerimaan Pajak Penerangan Jalan tahun 2018 di pengaruhi oleh :

- Kegiatan Ekstensifikasi
  - Melaksanakan Pendataan Objek Pajak Baru PPJ bekerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah yang menangani perijinan.
  - Melaksanakan sosialisasi kepada Calon Wajib Pajak tentang Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan
- Kegiatan Intensifikasi
  - Melaksanakan sosialisasi kepada wajib pajak non PLN tentang Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan.
  - Melaksanakan rekonsiliasi dengan wajib pajak PLN dengan melakukan kegiatan
    (i) Koordinasi proses penagihan pajak kepada PLN
    (ii) Pengawasan Pembayaran PPJ (Melaksanakan penelitian data jumlah tagihan listrik dan besarnya PPJ dengan meminta laporan pembayaran listrik oleh pelanggan kepada PLN (sampling beberapa pelanggan)
    (iii) Evaluasi dan Pelaporan Penerimaan PPJ (Melakukan evaluasi besarnya penerimaan pajak penerangan jalan setiap bulan, menghimpun data besarnya tarif dasar listrik (TDL) setiap bulan dan melaporkan realisasi penerimaan PPJ setiap bulan
  - Melaksanakan pemeriksaan (pengecekan) wajib pajak PLN

Grafik III.D.6

Realisasi PBB Tahun 2016 - 2018

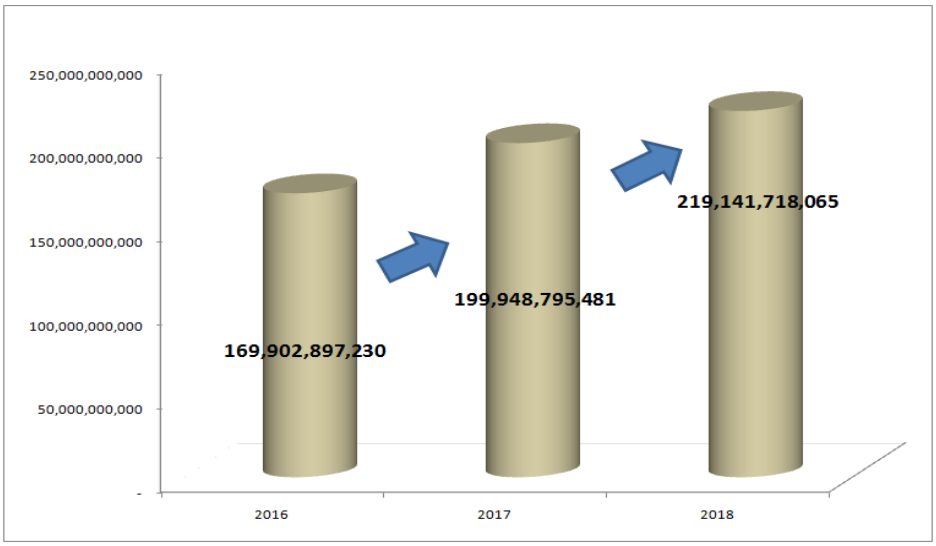

Sumber Data : Badan Pelayanan Pajak Daerah

Peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 di pengaruhi oleh :

- Kegiatan Ekstensifikasi
  - Melaksanakan Pendataan Objek Pajak Baru bekerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah yang mengeluarkan perijinan.
  - Melaksanakan sosialisasi kepada Calon Wajib Pajak tentang Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
- Kegiatan Intensifikasi
  - Melaksanakan kegiatan pemutakhiran massal pajak bumi dan bangunan di kecamatan taman dan waru sejumlah 131.000 objek pajak
  - Pelaksanaan kegiatan penilaian individu pajak bumi dan bangunan
  - Melaksanakan kegiatan penyesuaian Zona Nilai Tanah (Pemutakhiran ZNT) dan DBKB (Daftar Biaya Komponen Bangunan)

5. **Rasio Penerimaan Pajak Daerah terhadap total Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen pendapatan yang dapat menggambarkan kemampuan daerah dalam membiayai operasional dan pembangunan daerahnya. Semakin besar PAD yang mampu dihimpun akan semakin menunjukkan kemandirian daerah dalam membiayai kebutuhannya. Salah satu komponen utama yang memiliki kontribusi paling besar terhadap pencapaian PAD adalah sektor penerimaan pajak daerah

Berdasarkan Laporan Keuangan Daerah tahun 2018 (unaudited), struktur pendapatan asli daerah Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

Tabel III.D.14

Struktur Pendapatan Asli Daerah

KODE	URAIAN REKENING	ANGGARAN	REALISASI	%
41	*Pendapatan Asli Daerah*	*1.493.647.141.178,83*	*1.700.795.833.710,34*	*113,87*
411	Hasil Pajak Daerah	904.540.000.000,00	961.840.717.556,86	106,33
412	Hasil Retribusi Daerah	85.607.177.500,00	93.100.506.077,53	108,75
413	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	33.010.380.436,83	34.760.702.313,00	105,30
414	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	470.489.583.242,00	611.093.907.762,95	129,88

Sumber Data : Badan Pelayanan Pajak Daerah

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2018 sebesar Rp 1.700.795.833.710,34 atau tercapai sebesar 113,87% dari seluruh target PAD sebesar Rp 1.493.647.141.178,83 dan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar Rp 1.671.806.819.696,53 meningkat sebesar Rp 28.989.014.013,81 atau 1,73%. Sedangkan rasio penerimaan pajak terhadap total pendapatan asli daerah pada tahun 2018 adalah 56,55%, apabila dibandingkan dengan rasio pada tahun 2017 sebesar 55,36% maka mengalami peningkatan sebesar 1,19%.

Upaya untuk meningkatkan kontribusi pendapatan yang besar dari sektor PAD, antara lain :

d. Peningkatan kapasitas aparatur
e. Peningkatan kualitas pelayanan
f. Pemutakhiran data dan estimasi potensi pajak

6. Analisa Capaian Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berikut kami sampaikan data realisasi PAD dan Penerimaan pajak daerah dan capaian peningkatannya pada periode 2016-2018 :

Tabel III.D.15

Penerimaan Pajak Daerah dan Capaian Peningkatannya

URAIAN REKENING	2016 (Baseline)	2017		2018 (unaudited)	
		realisasi	% peningkatan	realisasi	% peningkatan
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.335.283.958.792,70	1.671.806.819.696,53	25,20%	*1.700.795.833.710,34*	1,73%
Pendapatan Pajak Daerah	735.767.679.182,50	925.569.237.852,49	25,80%	961.840.717.556,86	3,92%

Sumber Data : Badan Pelayanan Pajak Daerah

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa setiap tahun terdapat peningkatan perolehan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dikarenakan Realisasi penerimaan pajak daerah sebagai komponen utama penunjang Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, prosentase peningkatan PAD maupun Pendapatan pajak daerah mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 25,20 % untuk peningkatan PAD dan 25,80% untuk Pendapatan pajak daerah. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan pemerintah berupa TAX AMNESTY yang berimbas pada tingginya perolehan BPHTB.

Rasio penerimaan pajak daerah terhadap penerimaan asli daerah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pajak tetap menjadi komponen pendukung utama untuk mencapai kemandirian daerah dalam membiayai kebutuhannya. Berikut kami sajikan data trend peningkatan rasio penerimaan pajak terhadap Penerimaan Asli Daerah :

Grafik III.D.7

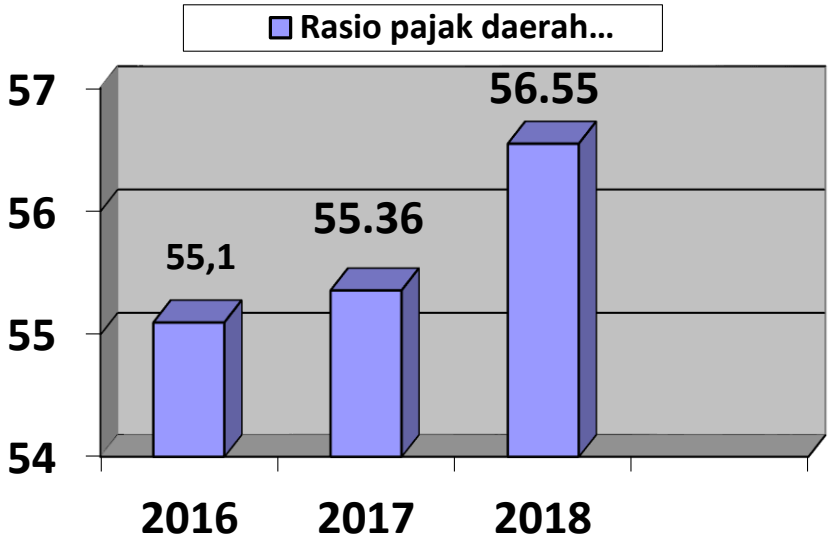

Sumber Data : Badan Pelayanan Pajak Daerah

c. SKPD Penyelenggara Urusan

Unsur penunjang keuangan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, serta Badan Pelayanan Pajak Daerah

d. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia penyelenggara unsur penunjang keuangan seluruhnya berjumlah 58 orang dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, serta 73 orang dari Badan Pelayanan Pajak Daerah. Secara rinci SDM penyelenggara

unsur penunjang menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir.

Sedangkan untuk jabatan fungsional terdapat pranata komputer pada Badan Pelayanan Pajak Daerah.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran (per program)

Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program sebagaimana terlampir

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Rp 4,227,388,450.00	Rp 3,752,252,539.00	88.76%
2	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Rp 1,264,583,100.00	Rp 1,199,629,241.00	94.86%

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Pendataan, Peningkatan dan Pengembangan Pajak Daerah	Rp 5,136,739,200.00	Rp 4,246,400,667.00	82.67%
2	Program Penetapan Pajak Daerah	Rp 1,734,452,200.00	Rp 1,705,935,434.00	98.36%
3	Program Pengendalian Pajak Daerah	Rp 1,132,248,100.00	Rp 1,063,539,730.00	93.93%

f. Proses Perencanaan

Proses perencanaan unsur penunjang keuangan melalui sinkronisasi usulan dari hasil musrenbang kecamatan dengan rencana kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, serta Badan Pelayanan Pajak Daerah.

g. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan unsur penunjang keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, serta Badan Pelayanan Pajak Daerah sebagaimana terlampir.

8. Unsur Penunjang Kepegawaian dan Diklat

a. Program

Program pembangunan yang dilaksanakan untuk unsur penunjang kepegawaian dan diklat pada tahun 2018 adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian.
2. Program Pengembangan ASN
3. Program Pembinaan dan Kesejahteraan ASN
4. Program Layanan KORPRI
5. Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur

b. Realisasi Pelaksanaan Program Serta Permasalahan Dan Solusinya

Dalam RPJMN 2015-2019 disebutkan bahwa pembangunan aparatur negara diarahkan pada peningkatan profesionalitas aparatur negara. Dengan adanya aparat negara yang profesional maka diharapkan mampu memberikan pelayanan yang maksimal guna mendukung pembangunan nasional. Untuk itu disusunlah Sistem Merit yang merupakan kebijakan dan manajemen SDM Aparatur yang berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, suku, agama, jenis kelamin, maupun jenis kecacatan.

Seiring sosialisasi Badan Kepegawaian Negara yang dilakukan tahun 2017 menginstruksikan kepada seluruh kabupaten dan kota di wilayah Indonesia untuk menghitung Indeks Profesionalitas dengan memasukkan unsur **kompetensi** (kualifikasi pengetahuan dari pendidikan dan pelatihan, keahlian dan

pengalaman); **kinerja** (target dan pencapaian) **kompensasi** (tingkat kebutuhan dan external equity) dan budaya kinerja yang didapatkan dari data **disiplin**. Adapun premis indikator profesionalitas adalah pegawai (individu) akan semakin profesional apabila kompetensinya semakin tinggi, kinerjanya semakin baik serta organisasinya semakin modern (diukur dengan tingkat kompensasi yang sesuai dan pegawai yang semakin disiplin). Dengan demikian maka Indeks Profesionalitas ASN digunakan sebagai indicator urusan kepegawaian sejak tahun 2017 sekaligus indicator Tujuan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk sasaran urusan kepegawaian Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan dalam rangka mendukung sasaran pertama RPJMD Kabupaten Sidoarjo yaitu **Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan.**

Namun premis terkait profesionalitas tersebut telah bergeser per tanggal 5 September 2018 dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Negara, yang menjelaskan bahwa **Indeks Profesionalitas** merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan, sehingga Indeks Profesionalitas ASN dihitung menggunakan 4 dimensi, yaitu :

a. **Kualifikasi** (diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai),bobot 25%;
b. **Kompetensi** (diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan) bobot 40%;
c. **Kinerja** (diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS), bobot 30%;
d. **Disiplin** (diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami), bobot 5%

Adapun seluruh dimensi tersebut diisikan secara online ke sistem yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara per November 2018 yang hingga saat ini belum didapatkan hasilnya. Dengan kondisi ini maka Indeks Profesionalitas ASN

di wilayah Kabupaten Sidoarjo tahun 2018 tetap menggunakan capaian tahun 2017 yaitu sebesar **86,57** (delapan puluh enam koma lima tujuh) dimana perhitungan dilakukan pada pejabat struktural sebagaimana data berikut :

Tabel III.D.16

Perhitungan Indeks Profesionalitas ASN

NILAI RATA -RATA DARI INDEKS VARIABEL KOEFISIENNYA				**INDEKS PROFESIONALITAS ASN**
GAP KOMPETENSI	KINERJA	GAP KOMPENSASI	GAP INDISIPLINER	
0,29	88,78	0,14	0,00	**86,57**
NILAI VARIABEL KOEFISIENNYA DALAM SKALA 1-100				
KOMPETENSI	KINERJA	KOMPENSASI	INDISIPLINER	
71	89	86	100	

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah

Hal ini menunjukkan **capaian Indeks Profesionalitas ASN adalah sebesar 110,99%** atas target yang ditetapkan sebesar 78 di tahun 2018. Untuk penjelasan lebih lanjut atas tiap komponen sebagai berikut :

A. KOMPETENSI

Ketidaksesuaian antara syarat jabatan dengan kondisi seseorang yang sedang menjabat disebut kompetensi gap. Semakin besar nilai gap dimaksud berarti semakin tidak profesional, sebaliknya semakin kecil gap menunjukkan semakin profesional personal pegawai yang secara maupun organisasi tersebut.

Data kompetensi didapatkan dari hasil uji kompetensi pegawai (assessment), dalam hal data permanen (assessment) belum tersedia dapat digunakan data potensi pegawai sebagai data proxy meskipun tidak sepenuhnya mewakili. Cara perhitungan yang disampaikan BKN masih menggunakan data proxy berupa Data potensi PNS didasarkan data PUPNS atau data elektronik lainnya (data individu mengenai pendidikan, pengalaman kerja, pelatihan teknis, dan pelatihan administratif) mengingat belum semua kabupaten/kota melaksanakan uji kompetensi walaupun assessment telah dilaksanakan

secara bertahap di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sejak tahun 2015. Penggunaan data proxy akan menyebabkan tingkat validitas berkurang karena terjadi deviasi. Walaupun demikian, deviasinya sudah dapat diperkirakan sebelumnya sehingga nilai validitas masih dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, premis dapat disesuaikan bahwa semakin profesional pegawai apabila semakin sesuai dengan potensinya.

Gap kompetensi rata-rata sebesar 0,29 dipengaruhi oleh riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yakni diklat kepemimpinan, diklat fungsional, diklat teknis dan seminar/workshop/konferensi/setara. Beberapa faktor yang berpengaruh pada capaian nilai tersebut adalah data pada tahun 2018 :

1. data pendidikan dan pelatihan banyak yang tidak lengkap;
2. beberapa jabatan kosong, sejumlah 36 pejabat atau 5,4 % dari jumlah pejabat pimpinan tinggi, administrator dan pengawas yang dievaluasi (dalam kondisi pejabat kosong, gap kompetensinya didefinisikan = 1); sedangkan kondisi tahun 2018 sebagaimana data dibawah.
3. beberapa pejabat belum mengikuti Diklat Kepemimpinan yang sesuai dengan jabatannya, karena promosi dan masih dalam pengusulan kepesertaannya.

Gap Kompetensi harus menjadi prioritas perbaikan kebijakan tata kelola, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Dengan implementasi penguatan data peningkatan kompetensi yang dapat terintegrasi sehingga dapat dengan mudah direncanakan, dimonitoring, dan dievaluasi untuk ditindaklanjuti dalam suatu kebijakan yang lebih komprehensif. Hal ini telah ditindaklanjuti dengan merestrukturisasi tupoksi Bidang Diklat ASN melalui Peraturan Bupati No. 90 tahun 2016, dan Peraturan Bupati No. 85 tahun 2017 tentang pengembangan kompetensi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Pengembangan kompetensi ASN didukung oleh Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur yang juga dapat menunjukkan gambaran pelaksanaan

urusan Pendidikan dan Pelatihan. Selama tahun 2018 diselenggarakan upaya peningkatan dan pengembangan kompetensi ASN sebagai berikut :

Tabel III.D.17

Jenis Kegiatan Bidang Diklat Tahun 2018

NO	JENIS KEGIATAN	JUMLAH PESERTA
1	Kepribadian	100
2	Pengiriman	131
3	Diklat Kepemimpinan Tk. III	30
4	Pembekalan Trainer	40
5	Unit Training of Competence	50
6	Keterangan Pendidikan	337
7	SCCD Karya Tulis	40
8	e-Learning	30
9	Diklat Kepemimpinan Tk. IV	30
10	Pembekalan PPK	100
11	Pelatihan dan Ujian PBJ	80
12	Registrasi sertifikat	192
13	Pengembangan motivasi kepala OPD	62
14	Talent Scouting	47
15	Pencantuman gelar	56
16	Pelatihan Bahasa Indonesia	100
17	Diklat Kesehatan Murnajati	60
18	SCCD Mandiri KKG Sedati	30
19	SCCD Mandiri K3S Taman	189
	TOTAL PESERTA tahun 2018	1,704

Sumber data : Bidang Diklat BKD Kab.Sidoarjo

Dengan total anggaran tahun 2018 pada Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur sebesar Rp. 3.097.938.750 (**0,1271% dari Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Sidoarjo**) namun harus menjawab amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pasal 21 huruf e bahwa “pengembangan

kompetensi adalah hak setiap PNS" dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS pasal 203 ayat (4) bahwa "pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 jam pelajaran dalam satu tahun", maka pada tahun 2018 selain menyelenggarakan sendiri pendidikan dan pelatihan serta pengiriman diklat fungsional ke instansi pembina masing-masing jabatan fungsional, Badan Kepegawaian Daerah juga memfasilitasi pengembangan kompetensi yang dilakukan mandiri melalui penerbitan rekomendasi Ijin Belajar, Pencatuman gelar, Keterangan Pendidikan serta mulai mengembangkan metode peningkatan kompetensi berbasis " **Smart Community for Competency Development"** – **SCCD** yang secara legal dan terintegrasi dalam satu system di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo secara efektif dan efisien. Dimana SCCD ini memberi kesempatan setiap PNS dalam rumpun jabatan fungsional / rumpun jabatan fungsional umum / ketrampilan teknis lainnya ataupun ketrampilan yang menunjang kinerja organisasi bisa memperoleh peningkatan kompetensi secara legal (mendapatkan sertifikat yang teregister) melalui kegiatan pengembangan kompetensi berkelompok dengan pola pembiayaan :

- **APBD** (pembiayaan honor pengajar, konsumsi dan sertifikat dari APBD)
- **Cost Sharing** (pembiayaan konsumsi dari peserta, honor pengajar dan sertifikat dari APBD)
- **Mandiri** (pembiayaan honor pengajar dan konsumsi dari peserta, sertifikat dari APBD)

SCCD ini merupakan pengembangan metode Unit Training of Competency - UTC yang mulai dilakukan di tahun 2014 dimana pembelajaran dilakukan secara berkelompok kecil dengan trainer berasal dari PNS Kabupaten Sidoarjo yang memiliki TOT / sertifikat kompetensi terdaftar di Surat Keputusan Bupati Sidoarjo, sehingga keterbatasan anggaran tidak membatasi peningkatan kompetensi yang dapat dilakukan. Dari seluruh peserta

pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan dilakukan monitoring dan evaluasi setelah kembali ke instansi melalui atasan langsungnya.

Perkembangan peningkatan kompetensi yang dilakukan setiap tahun :

No	Tahun	Jumlah pengembangan kompetensi yang dilakukan
1	2018	1704
2	2017	1230
3	2016	1349
4	2015	1351
5	2014	1230
6	2013	394
7	2012	515

Sumber Data : Badan Kepegawaian Daerah

Keterisian jabatan turut mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, diukur dengan melihat jumlah jabatan struktural yang ada dan jumlah jabatan struktural yang telah terisi. Jumlah jabatan di tahun 2018 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

	Tahun 2018	Tahun 2017
Jumlah jabatan structural	938	965
Jumlah jabatan yang terisi	772	762
% jabatan yang terisi	82,30%	78,9%

Sumber Data : Badan Kepegawaian Daerah

Pengisian pejabat struktural merupakan kebutuhan organisasi sesuai dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo dan berdasarkan data tersebut terlihat jumlah jabatan yang ada belum seluruhnya terisi yaitu sebesar 82,30 %, hal ini terjadi dikarenakan pengisian jabatan struktural memerlukan standar kompetensi yang sesuai sehingga tidak dapat

dilakukan secara spontan, pengisian jabatan struktural tidak bisa dilakukan setiap saat dan pelaksanaannya harus serentak, pengisian jabatan struktural tidak bisa secara otomatis mengikuti kekosongan akibat pejabat struktural yang purna tugas yang terjadi setiap saat sesuai batas usia pensiun, pensiun dini maupun meninggal.

B. KINERJA

Seorang pejabat harus memiliki kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Selain kuantitas, kualitas dan ketepatan waktu menyelesaikan pekerjaan juga menjadi dasar penghitungan kinerja. Oleh karena itu, data kinerja adalah hasil penilaian kinerja pegawai. Untuk pelayanan langsung kepada masyarakat, kinerja dapat dinilai langsung oleh masyarakat. Sementara untuk pelayanan yang tidak langsung (back office) kinerja akan sangat ditentukan oleh stakeholders secara kolektif.

Data kinerja juga dapat didasarkan pada penilaian prestasi kerja / SKP (Sasaran Kerja Pegawai). Meskipun data SKP telah tersedia dengan lengkap, substansi kinerja itu sendiri saat ini masih memerlukan perbaikan. Walaupun begitu, data SKP tetap dapat digunakan.

Nilai kinerja rata-rata adalah sebesar 88,78. Nilai kinerja dalam penghitungan Indeks Profesionalitas ASN adalah hasil evaluasi kinerja tahun 2017. Evaluasi kinerja didasarkan pada data elektronik yang terekam pada aplikasi e-kinerja (http://skp.sidoarjokab.go.id/). Nilai kinerja yang dievaluasi meliputi dua macam nilai, yakni :

a. evaluasi terhadap Penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan
b. evaluasi terhadap Penilaian Perilaku Kerja.

Beberapa faktor yang berpengaruh besaran nilai sebagaimana tersebut adalah ketertiban pelaporan kinerja secara online. Oleh karena evaluasi dilakukan terhadap obyek data elektronik yang direkam aplikasi sampai dengan akhir tahun anggaran tanggal 31 Desember 2018.

C. KOMPENSASI

Tingkat profesionalitas juga dapat didekati dengan pemberian kompensasi yang sesuai dengan beban kerja dan risiko, baik secara internal maupun eksternal. Sebaliknya, kompensasi merupakan satu persyaratan dalam mengukur tingkat profesionalisme suatu lembaga. Kondisi kompensasi yang belum sesuai akan mendorong terjadinya upaya-upaya legal maupun illegal untuk mengesuaikan pendapatan seorang pegawai. Setiap jenis pekerjaan akan memiliki tingkat kompensasi yang berbeda-beda tergantung resiko dan wilayah tempat dia bekerja.

Data kompensasi yang dapat digunakan adalah tunjangan dari berbagai tingkatan maupun lembaga. Pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan perbedaan kompensasi antarjabatan yang memiliki beban kerja dan risiko yang sama. Premisnya pegawai akan semakin profesional apabila kompensasi yang diterimanya semakin dekat pada beban kerja dan risiko yang sama, baik secara internal maupun eksternal. Sehingga kemudian kompensasi didasarkan data selisih tunjangan secara internal pada kompleksitas pekerjaan dan resiko yang setara (kelas jabatan yang sama).

D. DISIPLIN

Data organisasi yang modern juga dapat didekati dengan proxy tingkat disiplin pegawai. Dengan asumsi bahwa seseorang dinilai semakin profesional apabila tingkat pelanggarannya semakin rendah.Tingkat kedisiplinan merupakan upaya pengendalian yang bersifat preventif dan pengawasan yang bersifat pemberian hukuman. Tingkat kedisiplinan akan dinilai negatif apabila terjadi pelanggaran disiplin. Sehingga kemudian, data disiplin yang digunakan adalah jumlah pelanggaran disiplin dalam organisasi.

Atas penilaian dimensi disiplin, menunjukkan data sampling ASN yang dinilai (pejabat pimpinan tinggi, administrator maupun pengawas) tidak ada yang

melakukan pelanggaran disiplin, baik ringan, sedang maupun berat. Sehingga nilai pelanggaran disiplinnya adalah 0.

Adapun untuk pengendalian indispliner didukung oleh Program Pembinaan dan Kesejahteraan, dan didapatkan data sebagai berikut :

Keterangan	Tahun 2018	Tahun 2017	Tahun 2016	Tahun 2015
Jumlah Pelanggaran Indisipliner	10 kasus	27 kasus	23 kasus	18 kasus
Hukuman berat	7 kasus	12 kasus	16 kasus	8 kasus
Hukuman sedang	3 kasus	7 kasus	5 kasus	5 kasus
Hukuman ringan	-	3 kasus	2 kasus	6 kasus

Sumber Data : Badan Kepegawaian Daerah

Dari table tersebut diatas, menunjukkan bahwa pelanggaran disiplin pegawai pada tahun 2018 jauh berkurang dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 maka pembinaan dilaksanakan secara langsung oleh atasan langsung secara berjenjang. Atas penilaian indisipliner kebijakan penguatan dan pembangunan sistem Disiplin ASN yang berkarakter dan beretika senantiasa harus senantiasa mampu diwujudkan secara dalam setiap ASN. Hal ini diwujudkan melalui Peraturan Bupati No. 69 tahun 2017 tentang Kode Etik ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Hal-hal yang telah dilaksanakan dalam usaha pembinaan, peningkatan disiplin pegawai serta menekan tingkat pelanggaran disiplin, antara lain :

a) Meningkatan pengawasan melekat oleh atasan langsung,
b) Melakukan inspeksi mendadak secara periodik,
c) Melakukan tindak preventif / pencegahan apabila terjadi indikasi pelanggaran disiplin.
d) Penguatan fungsi agen kepegawaian pada OPD sehingga meminimalisir adanya indisipliner.

Jika dibandingkan dengan jumlah pegawai yang menurun maka dapat digambarkan sebagai berikut :

Tahun	Jumlah PNS Kab.Sidoarjo	IP ASN
2011	15.658	-
2012	15.105	-
2013	14.619	-
2014	14.608	-
2015	14.310	-
2016	12.752	84,90
2017	12.229	86,57
2018	**11.517**	**86,57**

Sumber Data : Badan Kepegawaian Daerah

Dari seluruh dimensi tersebut diukur atau dievaluasikan terhadap seluruh pejabat pimpinan tinggi, administrator dan pejabat pengawas pada setiap perangkat daerah. Dan sumber data adalah data elektronik yang terekam pada Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, yang diambil per tanggal 31 Desember 2017 sedangkan untuk tahun 2018 data diisikan ke aplikasi pada Badan Kepegawaian Negara secara online dan belum didapatkan hasilnya. Nilai 86,57 (tetap menggunakan hasil penilaian tahun 2017)menunjukkan bahwa profesionalitas aparatur Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sudah baik dan diatas target nasional (sebesar 76) maupun target RPJMD Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2018 yaitu sebesar 78.

Keberhasilan pencapaian indikator tujuan diatas didukung oleh pencapaian indikator – indikator sasaran Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo, sebagai berikut :

a. Prosentase penempatan ASN yang sesuai dengan kompetensinya

Pada tahun 2018 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo menetapkan target sasaran penempatan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang sesuai dengan kompetensinya sebesar 67%. Berdasarkan penempatan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, diperoleh data pengukuran kompetensi ASN, sebagai berikut :

Uraian	Jumlah ASN (31 Des 2018)	Terpetakan	ASN yang telah ditempatkan sesuai dengan kompetensinya		
			2018	**2017**	**2016**
Jumlah ASN JFT	7.507	7.507	7.507		
Jumlah ASN JFU	3.227	685	322		
Jumlah ASN J. Struktural	783	682	267		
Jumlah ASN Kab. Sidoarjo	11.517	8.874	8.096		
			70,29%	69,4%	63,8%

Sumber Data : Badan Kepegawaian Daerah

Sehingga capaian Badan Kepegawaian Daerah sebesar 104% atas target di tahun 2018.

b. Indeks Kepuasan Aparatur

Perbandingan Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Pelayanan Publik di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016, 2017 dan 2018

No	Unsur Pelayanan	Nilai SKM		
		2016	2017	2018
1	Persyaratan		76.55	78.21
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur		76.29	78.01
3	Waktu Penyelesaian		74.61	74.53
4	Biaya / Tarif		79.9	94.12
5	Produk Spesifikasi dan Jenis Pelayanan		77.77	77.87
6	Kompetensi Pelaksana		78.67	79.28
7	Perilaku Pelaksana		78.61	78.81
8	Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan		76.35	77.61
9	Sarana dan Prasarana		77.56	89.21
Nilai SKM		**77.28**	**77.56**	**80.05**

Sumber: Sekretariat BKD Kab.Sidoarjo, 2018

Dari data diatas jika disandingkan dengan data tahun sebelumnya akan terlihat sebagaimana tabel berikut :

Grafik III.D.8

Indeks Kepuasan Aparatur

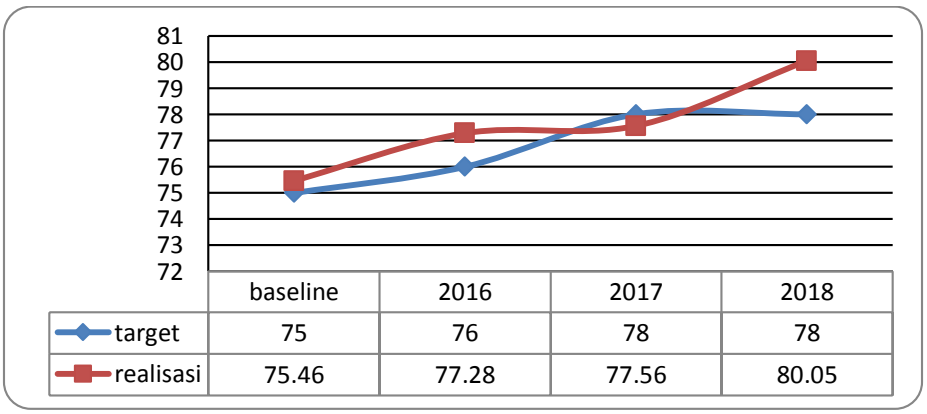

Sumber Data : BKD Kab. Sidoarjo

Hal ini dapat dilihat bahwa kondisi tahun 2017 jika dibandingkan dengan tahun 2018 terdapat kenaikan 2.49 point dan capaian sebesar 103 % atas target point 78 di tahun 2018, hal ini menunjukkan bahwa terdapat perubahan yang signifikan dikarenakan adanya berbagai macam perubahan aplikasi layanan yang telah tersosialisasikan atas implementasi SOP yang ada. Dan kondisi ini akan terus dilakukan perbaikan dari berbagai evaluasi internal sebagai usaha perwujudan meningkatkan layanan administrasi kepegawaian yang prima.

c. SKPD Penyelenggara Urusan

Unsur penunjang kepegawaian dan diklat dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah

d. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia penyelenggara unsur penunjang kepegawaian dan diklat seluruhnya berjumlah 81 orang dari Badan Kepegawaian Daerah. Secara rinci SDM penyelenggara unsur penunjang menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir.

Sedangkan untuk jabatan fungsional terdapat pranata komputer, arsiparis, dan assesor SDM Aparatur pada Badan Kepegawaian Daerah.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran (per program)

Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program sebagaimana terlampir

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Rp 816,177,450.00	Rp 250,194,598.00	30.65%
2	Program Pengembangan ASN	Rp 2,884,624,900.00	Rp 2,299,041,850.00	0.00%
3	Program Pembinaan dan Kesejahteraan ASN	Rp 1,011,754,250.00	Rp 959,048,300.00	94.79%

4	Program Layanan KORPRI	Rp -	Rp 46,181,650.00	0.00%
5	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	Rp 3,097,938,750.00	Rp 2,639,538,450.00	85.20%

f. Proses Perencanaan

Proses perencanaan unsur penunjang kepegawaian dan diklat melalui sinkronisasi usulan dari hasil musrenbang kecamatan dengan rencana kerja Badan Kepegawaian Daerah.

g. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan unsur penunjang kepegawaian dan diklat pada Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana terlampir.

BAB IV

STANDART PELAYANAN MINIMAL (SPM)

A. Urusan Pendidikan

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai Nasional (2025)	SKPD / Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2018			Keterangan
					Pembilang	Penyebut	Nilai	
1	Pendidikan Dasar	Persentase (%) Warga Kabupaten Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTs)		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	78756	296846	27%	Jumlah Warga Kabupaten/Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs) Jumlah Warga Kabupaten Usia 7-15 Tahun
2	Pendidikan Kesetaraan	Persentase (%) Warga Kabupaten Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesataraan		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	45061	90122	50%	Jumlah Warga Kabupaten Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan Jumlah Warga Kabupaten Usia 7 –18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase (%) Jumlah Warga Kabupaten Usia 5-6 Tahun Yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	87096	87287	99%	Jumlah Warga Kabupaten Usia 5-6 Tahun Yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD Jumlah Warga Kabupaten Usia 5-6 Tahun

B. Urusan Kesehatan

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai Nasional Tahunan	SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2018			Keterangan
					Pembilang	Penyebut	Nilai	
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang menerima layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	38.736	38.735	100%	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta / Jumlah semua ibu hamil di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama
2.	Pelayanan Kesehatan ibu Bersalin	Jumlah ibu Bersalin yang menerima layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	35.883	36.975	97%	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan / Jumlah semua ibu bersalin yang ada di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang menerima layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	33.550	33.933	98,9%	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar / Jumlah semua bayi baru lahir di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang menerima layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	153.992	175.393	87,8%	Jumlah balita 0–59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun. / Jumlah balita 0–59 bulan yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai Nasional Tahunan	SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2018			Keterangan
					Pembilang	Penyebut	Nilai	
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Usia Pendidikan Dasar yang menerima layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	66.091	66.839	98,9%	Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapat pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar / Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang ada di wilayah kerja di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Usia Produktif yang menerima layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	834.275	1.522.568	54,8%	Jumlah pengunjung usia 15 tahun keatas mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun / Jumlah warga negara usia 15–59 tahun yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Usia Lanjut yang menerima layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	142.162	168.738	84,3%	Jumlah pengunjung berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatansesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun / Jumlah semua penduduk berusia usia 60 tahun ke atas yang ada di wilayah Kabupaten/Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun perhitungan

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai Nasional Tahunan	SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2018			Keterangan
					Pembilang	Penyebut	Nilai	
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang menerima layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	134.015	377.161	35,5%	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun / Jumlah estimasi penderita hipertensi berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Jumlah Penderita Diabetes Melitus (DM) yang menerima layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	60.426	152.959	39,5%	Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun / Jumlah penyandang DM berdasarkan angka revalensi DM nasional di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang menerima layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	3.137	4.872	64,4%	Jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerja kab/kota yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun / Jumlah ODGJ berat (psikotik) yang ada di wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai Nasional Tahunan	SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2018			Keterangan
					Pembilang	Penyebut	Nilai	
11.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis (TB)	Jumlah Orang dengan Tuberculosis (TB) yang menerima layanan kesehatan	≥ 80%	Dinas Kesehatan	3.123	4.861	64,2%	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun / Jumlah orang dengan TB yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi HIV	Jumlah Orang dengan Resiko terinfeksi HIV yang menerima layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	27.724	45.182	61,4%	Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun / Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang ada di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama

C. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	PelayananDasar	Indikator SPM	Nilai Nasional (2025)	SKPD / Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2018			Keterangan
					Pembilang	Penyebut	Nilai	
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari - hari	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh kebutuhan pokok Pokok air minum sehari - hari	100%	PDAM Sidoarjo	822.564	2.207.600	37.26%	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari–hari _____ Seluruh warga kabupaten
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic						Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic_____ Seluruh warga kabupaten

D. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	PelayananDasar	Indikator SPM	Nilai Nasional (2025)	SKPD / Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2018			Keterangan
					Pembilang	Penyebut	Nilai	
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Persentase (%) Warga Kabupaten korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	BPBD	653	653	100%	Jumlah Warga Kabupaten korban bencana yang memperoleh rumah layak huni / Jumlah keseluruhan Warga Kabupaten korban bencana
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten	Persentase (%) Warga Kabupaten yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	–	–	–	–	–	Jumlah Warga Kabupaten yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni / Jumlah keseluruhan Warga Kabupaten yangterkenarelokasiakibatprogramPemerintahDaerah kabupaten

E. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai Nasional (2015)	SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2018			Keterangan
					Pembilang	Penyebut	Nilai	
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Persentase (%) Warga Kabupaten yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada		***Satpol PP Kab. Sidoarjo***	***85***	***85***	***100%***	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada Jumlah keseluruhan Warga Kabupaten yang terkena penegakan hukum Perda dan perkada
2	Pelayanan Informasi rawan bencana	Persentase (%) Warga Kabupaten yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100	2.223.002	0,004 %	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Jumlah Warga Kabupaten diwilayah rawan bencana
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase (%) Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	700	2.223.002	0,03 %	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Jumlah Warga Kabupaten diwilayah rawan bencana
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase (%) Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12.388	12.388	100 %	Jumlah korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (Orang) Jumlah korban bencana skala kabupaten/kota yang seharusnya dievakuasi dengan

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai Nasional (2015)	SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2018			Keterangan	
					Pembilang	Penyebut	Nilai		
								menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (Orang)	
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase (%) Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pemadaman, penyelamatan dan Evakuasi korban Kebakaran		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	118	359	32,87 %	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dampak kebakaran	Jumlah korban bencana yang menerima perlindungan dan jaminan sosial selama masa tanggap darurat (KK) dan pasca
								Jumlah kejadian kebakaran dengan menggunakan skala kabupaten/kota yang seharusnya diselamatkan dan dievakuasi menggunakan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamat lengkap (Orang)	Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima perlindungan dan jaminan sosial selama masa tanggap darurat (KK) dan pasca

F. Urusan Sosial

No	Pelayanan Dasar/ Indikator SPM / Sub Indokator SPM	Indikator SPM	Nilai Nasional (2015)	SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2018			Keterangan
					Pembilang	Penyebut	Nilai	
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang Disabilitas telantar diluar Panti							
	Jumlah Warga Kabupaten penyandang disabilitas yang memperoleh Rehabilitasi social diluar panti							
	Pelaksanaan dan pengembanganjaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial - Penyelenggaraan jaminan sosial skala Kabupaten/Kota	Presentase (%) penyandang cacat fisikdan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan Social	40%	Dinas Sosial	147	2.585	5,68%	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial dalam 1 tahun (Orang) / Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial (Orang)

No	Pelayanan Dasar/ Indikator SPM / Sub Indokator SPM	Indikator SPM	Nilai Nasional (2015)	SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2018			Keterangan
					Pembilang	Penyebut	Nilai	
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar diluar Panti							
	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti							
	a. Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial skala Kabupaten/Kota	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	80%	Dinas Sosial	4.764	41.008	11,62 %	Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang memperoleh bantuan sosial (Orang) / Jumlah PMKS yang seharusnya memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun (Orang)
	b. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala Kabupaten/Kota	Persentase (%) PMKS skala kab/kotayang menerima program pemberdayaansosial melalui Kelompok Usaha Bersama(KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	80%	Dinas Sosial	1.012	43.042	2,35%	Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis (Orang) / Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masya-rakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis (Orang)

No	Pelayanan Dasar/ Indikator SPM / Sub Indokator SPM	Indikator SPM	Nilai Nasional (2015)	SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2018			Keterangan
					Pembilang	Penyebut	Nilai	
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar Panti							
	Jumlah Warga Kabupaten lanjut usia terlantar yang memperoleh Rehabilitasi sosial diluar panti							
	Pelaksanaan dan pengembanganjaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial - Penyelenggaraan jaminan sosial skala Kabupaten/Kota	Presentase (%) penyandang cacat fisikdan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan Social	40%	Dinas Sosial	147	2.585	5,68%	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial dalam 1 tahun (Orang) / Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial (Orang)

No	Pelayanan Dasar/ Indikator SPM / Sub Indokator SPM	Indikator SPM	Nilai Nasional (2015)	SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2018			Keterangan
					Pembilang	Penyebut	Nilai	
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar Panti							
	Jumlah Warga Kabupaten yang gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi social dasar tuna sosial diluar panti							
	a. Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial skala Kabupaten/Kota	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	80%	Dinas Sosial	4.764	41.008	11,62 %	Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang memperoleh bantuan sosial (Orang) / Jumlah PMKS yang seharusnya memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun (Orang)
	a. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala Kabupaten/Kota	Persentase (%) PMKS skala kab/kotayang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	80%	Dinas Sosial	1.012	43.042	2,35%	Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis (Orang) / Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masya-rakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis (Orang)

No	Pelayanan Dasar/ Indikator SPM / Sub Indokator SPM	Indikator SPM	Nilai Nasional (2015)	SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2018			Keterangan
					Pembilang	Penyebut	Nilai	
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana							
	Jumlah korban bencana skala kabupaten yang menerima perlindungan dan jaminan sosial selama masa tanggap darurat & pasca							
	a. Bantuan sosial bagi korban bencana skala Kabupaten/Kota	Presentase (%) korban bencana skalakabupaten / kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	80%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (KK) / Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (KK)

No	Pelayanan Dasar/ Indikator SPM / Sub Indokator SPM	Indikator SPM	Nilai Nasional (2015)	SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2018			Keterangan
					Pembilang	Penyebut	Nilai	
	b. Evaluasi korban bencana skala Kabupaten/kota	Presentase (%) korban bencana skala kabupaten / kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	80%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	Jumlah korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (Orang) / Jumlah korban bencana skala kabupaten/kota yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (Orang)
6.	Penyediaan sarana dan prasarana sosial							
	Jumlah panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial							
	Jumlah wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan social							
	b. Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala kabupaten/kota	Presentase (%) panti sosial skala kabupaten / kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	80%	Dinas Sosial	67	98	68,36%	Jumlah panti sosial skala kota dalam 1 tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (Unit) / Jumlah panti sosial yang seharusnya menyediakan sarpras pelayanan kesejahteraan sosial (Unit)

No	Pelayanan Dasar/ Indikator SPM / Sub Indokator SPM	Indikator SPM	Nilai Nasional (2015)	SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2018			Keterangan
					Pembilang	Penyebut	Nilai	
	c. Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala kabupaten/kota	Presentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan social	60%	Dinas Sosial	2	2	100%	Jumlah WKSBM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (unit) / Jumlah WKSBM yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (unit)

BAB V
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pada tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mendapatkan 1 (satu) Program yang merupakan bantuan dari Pemerintah Pusat dalam bentuk tugas pembantuan. Hal ini ditetapkan dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Pembantuan Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2019. Pelaksanaan tugas pembantuan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui daftar isian pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja. Program / Kegiatan, Instansi pemberi tugas pembantuan, jumlah anggaran serta realisasinya dan Perangkat Daerah yang melaksanakan diuraikan sebagai berikut :

Program	:	**Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja**
Instansi Pemberi Tugas Pembantuan	:	Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Lokasi	:	Kabupaten Sidoarjo
Anggaran	:	Rp. 711.510.000,00
Realisasi	:	Rp. 704.859.750,00
OPD yang melaksanakan	:	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo
Kegiatan	:	Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan kerja

Adapun secara detail, kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja tersebut, dilaksanakan pada 6 (enam) aksi / sub kegiatan, dengan detail pelaksanaan dan output, sebagai berikut :

Tabel V.1

Penetapan Lokasi Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018

No.	JENIS KEGIATAN	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	JENIS KEGIATAN	JUMLAH PEKERJA
1.	Padat Karya Infrastruktur 1	TAMAN	TROSOBO	Normalisasi saluran air	88 orang
2.	Tenaga Kerja Mandiri Melalui Pola Pendampingan 1	WONOAYU	PAGERNGUMBUK	Pelatihan Sablon Digital	20 orang
3.	Tenaga Kerja Mandiri Melalui Pola Pendampingan 2	BALONGBENDO	SUWALUH	Pelatihan Sablon Digital	20 orang
4.	Tenaga Kerja Mandiri Melalui Pola Pendampingan 3	TARIK	KLANTINGSARI	Pelatihan Sablon Digital	20 orang
5.	Tenaga Kerja Mandiri Melalui Pola Pendampingan 4	BUDURAN	BUDURAN	Pelatihan Sablon Digital	20 orang
6.	Tenaga Kerja Mandiri Melalui Pola Pendampingan 5	SUKODONO	CANGKRINGSARI	Pelatihan Sablon Digital	20 orang

BAB VI
PENYELENGGARAAN
TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagai daerah otonom selain menyelenggarakan fungsi desentralisasi dan tugas pembantuan, juga harus menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Tugas ini bersifat koordinatif antar daerah otonom maupun instansi pemerintahan secara vertikal serta pelayanan dasar kepada masyarakat.
Selama tahun 2018, penyelenggaraan tugas umum pemerintahan yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

A. Kerjasama Antar Daerah

Kerjasama antar daerah merupakan sarana untuk memantapkan hubungan dan keterikatan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah dan mensinergikan potensi antar daerah.

Dengan memperhatikan esensi penyelenggaraan kerjasama termaksud, maka kebijakan kerjasama antar daerah diarahkan pada peningkatan kerjasama untuk menciptakan sinergitas antar daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, baik yang dilaksanakan secara bilateral maupun regional sesuai dengan arah kebijakan pembangunan kewilayahan.

Kerjasama Antar Daerah yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo selama tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Pemerintah Kabupaten Lahat tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi Kawasan Transmigran Desa Kebanagung Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Bersama Nomor : 188/09/404.1.1.2/2016 tanggal 17 Mei 2016;
2. Perjanjian Kerjasama atara Pemerintah Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi Kawasan

Transmigran Desa Kebanagung Kecamatan Kikim Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Bersama Nomor : 188/23/404.1.1.2/2015 tanggal 29 September 2015;

3. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Pemerintah Kota Pasuruan tentang Kerjasama Pembangunan Daerah dan Pelayanan Publik, sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Bersama Nomor : 188/03/404.1.1.2/2014 tanggal 30 Januari 2014;

Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1) Belum adanya panduan peraturan perundang-undangan dari Pemerintah Pusat yang mengikat semua Kementerian, Lembaga Negara maupun TNI, POLRI dalam pembuatan draft kerjasama, seperti istilah Kesepakatan Bersama (KSB), ada yang menyebut Nota Kesepahaman, dsb, kadang-kadang ini menghambat proses pembahasan kerjasama, karena semua pihak mempunyai dasar peraturan perundang-undangan masing-masing.
2) Belum adanya sinergitas perencanaan dan kebutuhan dalam pembangunan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam pelaksanaan kerjasama.
3) Kabupaten/kota belum sepenuhnya memahami tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerjasama daerah dan pihak ketiga.
4) Belum semua Perangkat Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota memhami tentang legal drafting Kesepakatan Bersama (KSB) dan Perjanjian Kerjasama (PKS).

b. Solusi

1) Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dapat mengusulkan peraturan pelaksanaan kerjasama yang mengikat semua Kementerian, Lembaga Negera maupun TNI POLRI tentang tentang peraturan pelaksanaan kerjasama.
2) Dilaksanakan Rapat koordinasi perencanaan pembangunan daerah khususnya terkait dengan kerjasama antar daerah.

3) Sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kerjasama.
4) Rapat teknis tentang pembuatan draft legal drafting mengenai Kesepakatan Bersama (KSB) dan Perjanjian Kerjasama (PKS).

B. Kerjasama daerah dengan Pihak Ketiga

Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahannya berdasarkan atas asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya yang pada hakekatnya mendorong untuk menyusun strategi pembangunan daerah yang terintegrasi dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan.

Untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Kerjasama yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Kerjasama dengan Lembaga Pemerintah

a. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kejaksaan Negeri Sidoarjo tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Sekolah-Sekolah di Wilayah Kabupaten Sidoarjo dalam rangka pencegahan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana tertuang dalam Kesepatan Bersama Nomor : 188/02/438.1.1.1/2018 tanggal 19 Januari 2018;
b. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tentang Peningkatan Program Puskesmas, sebagaimana tertuang dalam Kesepatan Bersama Nomor : 188/03/438.1.1.1/2018 tanggal 2 Januari 2018;
c. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Sidoarjo tentang Optimalisasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat/JKN-KIS) dalam mewujudkan Universal Health Coverage, sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Bersama Nomor : 188/.04/438.1.1.1/2018 tanggal 24 Januari 2018;

d. Kesepakatan Bersama antara Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tentang Pengkajian, Penerapan, dan Pemasyarakatan Teknologi untuk Mendukung Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Bersama Nomor : 188/10/438.1.1.1/2018 tanggal 22 Februari 2018;
e. Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tentang Pelaksanaan Program Penurunan Emisi Kota-Kota dalam rangka Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Bersama Nomor : 188/11/438.1.1.1/2018 tanggal 22 Februari 2018;
f. Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi untuk Rumah Tangga di Wilayah Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Bersama Nomor : 188/14/438.1.1.1/2018 tanggal 23 Maret 2018;
g. Piagam Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kodim 0816 Sidoarjo tentang Program Sidoarjo Siap 24 Jam Tahap IV Tahun Anggaran 2018, sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Bersama Nomor : 188/20/438.1.1.1/2018 tanggal 13 Juli 2018;
h. Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Dirjend Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tentang Pengelolaan Infrastruktur Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) & Tempat Pengelolaan Sampah dengan Pola Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) di Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Bersama Nomor : 188/21/438.1.1.1/2018 tanggal 8 Agustus 2018;

i. Kesepakatan Bersama Antara Badan Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota Batu, Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Pemerintah Kabupaten Sumenep tentang Program Inovasi Untuk Anak Sekolah Indonesia (Innovation Facility for Indonesia School Children) dalam Meningkatkan Mutu Hasil Pembelajaran Siswa di Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Bersama Nomor : 188/23/438.1.1.1/2018 tanggal 8 Agustus 2018;
j. Kesepakatan Bersama antara Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tentang Pengembangan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Bersama Nomor : 188/26/438.1.1.1/2018 tanggal 25 Agustus 2018;
k. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Kepolisian Resor Kota Sidoarjo tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi pada Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Bersama Nomor : 188/27/438.1.1.1/2018 tanggal 18 September 2018;
l. Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan PT. TASPEN (Persero) KCU Surabaya tentang Sinergi Pelayanan Pembayaran Tabungan Hari Tua (THT) dan Pensiun Berbasis Elektronik bagi ASN Di Lingkungan Pemkab Sidoarjo, sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Bersama Nomor : 188/28/438.1.1.1/2018 tanggal 25 Oktober 2018;
m. Nota Kesepakatan Bersama antara Bupati Sidoarjo dengan, Polresta Sidoarjo, Kantor Imigrasi Klas I Khusus TPA Surabaya, Badan Pendapatan Daerah Prov Jatim, Kantor Pertanahan Sidoarjo, Kementerian Agama Kab. Sidoarjo, BPJS Kesehatan Sidoarjo, dan

BPJS Ketenagakerjaan Sidoarjo tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu berupa Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Bersama Nomor : 188/30/438.1.1.1/2018 tanggal 5 Desember 2018;

2. Kerjasama dengan Universitas

a. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo tentang Kerja Sama Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 13 Februari 2018;
b. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Universitas Dr. Soetomo Surabaya tentang Kerjasama Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 20 Maret 2018;
c. Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur tentang Kerjasama Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 27 April 2018;
d. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Universitas Bhayangkara Surabaya tentang Kerjasama Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 5 Juli 2018;
e. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya tentang Pendampingan Dana Desa, pada tanggal 10 Juli 2018;

3. Kerjasama dengan Lembaga Non-Pemerintah / Swasta

a. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sdoarjo dengan PT Ecco Indonesia tentang Pemanfaatan Lahan dan Bangunan untuk Pos Pemadam Kebakaran (Damkar) Unit Candi, sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan bersama Nomor : 188/08/438.1.1.1/2018 tanggal 20 Februari 2018;

b. Nota Kesepahaman antara Bupati Sidoarjo dengan PT. Mitra Alur Sejati tentang Pembangunan dan Pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Non Chemical untuk Optimalisasi Pelayanan Perusahaan Daerah Air Mnum "Delta Tirta" Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan bersama Nomor : 180/24/438.1.1.1/2018 tanggal 16 Agustus 2018;
c. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Surabaya tentang Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan bersama Nomor : 188/25/438.1.1.1/2018 tanggal 16 Agustus 2018;
d. Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan PT. Jawa Pos Koran tentang Kerjasama Pengembangan Inovasi Pembangunan dan Pemanfaatan Potensi Daerah, sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Bersama Nomor : 188/29/438.1.1.1/2018 tanggal 19 Nopember 2018;
e. Nota Kesepakatan Bersama antara Bupati Sidoarjo dengan, PDAM Delta Tirta, PT. Bank Jatim Cab. Sidoarjo, PT. BPR Delta Artha, PT. PLN Unit Sidoarjo, PT. Telkom Sidoarjo, PT. Pos Indonesia Sidoarjo, PT.BNI Cab. Sidoarjo, PT. BTN Cab. Sidoarjo, PT. BRI tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu berupa Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Bersama Nomor : 188/31/438.1.1.1/2018 tanggal 5 Desember 2018;

Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1) Para pihak masih melakukan pengidentifikasian kegiatan yang dikerjasamakan
2) Ada pihak yang tidak hadir pada saat penanda tanganan
3) Peluang Kerjasama dengan Lembaga Internasional belum banyak dimanfaatkan secara merata oleh Kabupaten/Kota
4) Kurangnya pemahaman tentang arti penting Kerjasama dengan Lembaga Internasional;

5) Daerah kurang memahami tentang tata naskah perjanjian, sehingga banyak daerah yang telah membuat naskah perjanjian dengan Lembaga Internasional dengan banyak kekurangan, baik dalam substansi maupun pasal-pasal wajib seperti hak dan kewajiban, Unit Pelaksana, Working Group, perselisihan, dan lain-lain
6) Pemerintah Pusat masih beranggapan bahwa Pemerintah Daerah harus selalu menyetujui tentang daerah yang ditunjuk/dijadikan sebagai locus implementasi program Lembaga Internasional;
7) Dengan dasar otonomi daerah, masih ada Kab/kota yang menjalin kerjasama dengan lembaga internasional tanpa berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi.

b. Solusi

1) Melakukan koordinasi intens baik kepada OPD terkait maupun dengan mitra kerjasama;
2) Membuat surat Tindak Lanjut Kesepakatan Bersama;
3) Pembahasan Perjanjian Kerjasama dijadwalkan 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan Kesepakatan Bersama;

C. Pembinaan Batas Wilayah

Batas daerah merupakan salah satu unsur dasar eksistensi suatu daerah. Batas daerah baik itu provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan maupun desa pada hakekatnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari luas wilayah daerah di mana di dalamnya mengandung makna keberadaan teritorial daerah. Batas daerah selain sebagai penentu wilayah kerja administratif juga dapat berfungsi untuk mengetahui batas-batas pengelolaan kegiatan usaha suatu daerah. Mengingat tingginya nilai suatu wilayah bagi pemerintah daerah tersebut, maka nilai tata batas wilayah pun menjadi sangat penting dan krusial bagi daerah yang berbatasan. Penataan batas daerah seyogyanya dapat dijadikan sarana perekat dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai salah satu kebijakan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan menteri Dalam Negeri No. 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan batas Daerah. Hal ini menunjukan bahwa batas daerah itu penting dan strategis namun pelaksanaannya memerlukan adanya

pedoman pelaksanaan sebagai dasar pemahaman yuridis, teknis survei dan pemetaan, sehingga untuk melaksanakan penegasan batas daerah harus dilakukan secara sistematis dan terkoordinasi. Batas daerah yang akan diwujudkan adalah batas daerah yang jelas dan pasti di lapangan memenuhi aspek yuridis dan fisik. Dengan terbitnya Permendagri ini bukan berarti mengkotakkan wilayah, tetapi lebih pada penataan batas wilayah kerja Administrasi Pemerintahan, untuk mempermudah koordinasi pembangunan maupun pembinaan kehidupan masyarakat di wilayahnya.

Batas Wilayah menjadi penting bagi Daerah, termasuk bagi Kabupaten Sidoarjo, karena merupakan batas penyelenggaraan otonomi daerah. Wilayah Kabupaten Sidoarjo berbatasan langsung dengan empat daerah lainnya, yakni Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Mojokerto. Begitu pula dengan wilayah Desa, Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo, pembinaan batas wilayah menjadi batasan dalam menyelenggarakan tugas kewenangan antar wilayah.

Pada tahun 2018 telah dilaksanakan penetapan, penegasan, dan evaluasi batas daerah (kabupaten, kecamatan, desa dan kelurahan) dengan uraian sebagai berikut :

1) Pemasangan pilar batas Kecamatan sebanyak 58 Pilar, dengan lokasi di beberapa Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo, yang dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2018 dengan Sumber pendanaan dari APBD Kabupaten Sidoarjo;
2) Evaluasi Pilar Batas wilayah sebanyak 300 Pilar, dengan lokasi di beberapa Kecamatan, Desa, dan Kelurahan di Kabupaten Sidoarjo, yang dilaksanakan pada tanggal 03 Januari 2018 dengan Sumber pendanaan dari APBD Kabupaten Sidoarjo;

Selain Pembinaan batas wilayah, Kabupaten Sidoarjo juga melaksanakan Rupabumi di tahun 2018, dengan realisasi kegiatan Inventarisasi data Gasetir Rupabumi unsur buatan di Kecamatan Taman yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 2018 dengan Sumber pendanaan APBD Kabupaten Sidoarjo.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi antara lain :

- Ketidakjelasan Undang-Undang Pembentukan :

  Salah satu penyebab yang menonjol terdapat pada Undang-Undang pembentukan Pemda, klausul tentang batas hanya disebutkan sebagai berbatasan dengan derah tetangganya. Misalnya disebelah utara berbatasan dengan daerah A; di sebelah selatan berbatasan dengan daerah B dst. (sehingga muncullah perbedaan penafsiran antar Undang-Undang, perbedaan pasal-pasal dengan peta lampiran, ketidakjelasan peta lampiran).
- Perebutan Sumber Daya Alam (SDA) :

  Kalau di daerah itu ada sumber SDA maka batas bisa jadi rebutan. Masing-masing pihak biasanya akan berlomba melayani dan itulah awal sengketa.
- Pelayanan Publik :

  Hal ini dimaksudkan untuk lebih mendekatkan pelayanan publik kepada warganya. Diharapkan warga yang ada di daerah batas tersebut lebih dekat dengan pusat-pusat pelayanan.

Solusi terhadap permasalahan diatas melalui :

- Kerjasama antar daerah merupakan instrumen yang harus dipakai dalam mengatasi berbagai keterbatasan dan kendala yang dihadapi.
- Mediasi yang terus dilakukan dan komunikasi dengan kabupaten/kota.
- Meminimalisir munculnya ego daerah sebagai imbas dari kewenangan yang besar bagi daerah untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan daerahnya.
- Mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh daerah, terutama dalam mengatasi problem keterbatasan APBD dan sumber daya alam
- Efisiensi dan efektifitas dalam memberikan pelayanan publik.
- Meningkatkan daya saing daerah.

  Sinergitas antar daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

D. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah

Dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan selain melakukan kerjasama dengan daerah dan dengan pihak ketiga, dilakukan pula koordinasi dengan instansi vertikal di daerah yakni dengan Forum Pimpinan Daerah (FORPIMDA) sebagaimana diamanatkan di dalam Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1986 dengan melakukan koordinasi yang melibatkan unsur TNI, Kepolisian, Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Pengadilan Negeri Sidoarjo yang diarahkan untuk meningkatnya rasa aman dan damai tercermin dari menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antarkelompok maupun antargolongan masyarakat, menurunnya angka kriminalitas secara nyata di perkotaan dan perdesaan, serta menurunnya secara nyata angka perampokan dan kejahatan di lautan serta penyelundupan lintas batas.

1. Forum Koordinasi

Forum koordinasi dibentuk dalam rangka meningkatkan dan memperlancar sistem manajerial dan operasional pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah berupa rapat-rapat koordinasi, sinkronisasi dan kesepahaman.

2. Materi Koordinasi

1) Peningkatan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat;
2) Pengembangan kebudayaan yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur;
3) Peningkatan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas.

3. Instansi Vertikal yang Terlibat

Instansi vertikal yang terlibat yakni Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Pengadilan Negeri Sidoarjo, Kepolisian Resort Sidoarjo, Kodim 0816 Sidoarjo.

4. Hasil dan Manfaat Koordinasi

Hasil dan manfaat dari koordinasi ini adalah menggugah kembali kesadaran masyarakat akan keamanan lingkungan melalui penggiatan kembali sistem keamanan lingkungan (siskamling) sehingga dapat menjaga lingkungan dari tindakan-tindakan kriminalitas dan terorisme serta tercipta koordinasi yang baik antar Forum Pimpinan Daerah.

5. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi

Tindak lanjut hasil koordinasi dilaksanakan melalui kebijakan untuk memantapkan keamanan lingkungan masing-masing yang diinstruksikan melalui para camat dan kepala desa/lurah melalui rapat koordinasi sinergitas Pemerintah, Kepolisian, TNI-AD, TNI-AL, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, DPRD bersama stake holder.

E. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana

Selama tahun 2018, di Kabupaten Sidoarjo terjadi bencana alam yang memerlukan penanganan oleh pemerintah kabupaten sidoarjo. Bencana alam yang terjadi sebagai berikut :

1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya

Tabel VI.1

DATA DAN PENANGANAN AKIBAT BENCANA DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2018

No	JENIS BENCANA	KAB/KEC/DESA	AKIBAT BENCANA										
			DATA KORBAN JIWA						DATA KERUSAKAN				KETERANGAN
			Mggl	Hilang	Luka Berat	Luka Ringan	Pengungsi	Ketinggian Air	Jenis Sarana	Kondisi Rusak			
										RR	RS	RB	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	BENCANA ALAM												
I	Laka Air												
	Minggu , 14 Januari 2018	Kecamatan Jabon											
		1 Desa Kedungpandan	1										* BPBD Sidoarjo Berkoordinasi

														dengan Polsek Jabon, Satbrimob Porong dan pemerintah desa * Tim Resque BPBD Sidoajo melakukan pencarian korban a/n Supri (28 th) Desa Kenongo kecamatan Tulangan
II	**Laka Air**													
	Minggu , 04 Februari 2018	**Kecamatan Jabon**												
		1	**Desa Tambak kalisogo**	**1**										* BPBD Sidoarjo Berkoordinasi dengan Polsek Jabon, Basarnas dan Pemerintah desa setempat * Tim Resque BPBD Sidoajo,Basarnas, Tagana Sidoarjo, Relawan serta masyarakat Sekitar melakukan pencarian korban a/n A/n Udin Jaelani (25 th) Dusun Timur Jurang RT 01 RW 04 Desa Wonokerto kecamatan Dukuh Rejo Kabupaten Pasuruan.
III	**Banjir**													
	Jumat, 09 Februari 2018	**Kecamatan Porong**												
		1	**Raya Porong**						±20-50 cm					*Koordinasi dengan dinas terkait * Koordinasi dengan BBWS dan PUPR untuk penyedotan air ke Kali Ketapang

		2	**Desa**	**Candipari** RT.01 RW.01 RT.06 RW.03						±20-50 cm ±20-50 cm ±20-50 cm					* BPBD Sidoarjo melakukan kaji cepat dan pendataan secara berkala * BPBD Sidoarjo melakukan koordinasi dengan pemerintahan Desa setempat untuk melakukan monitoring wilayah banjir * RT 01 RW 01 yang terdampak 20 rumah * RT 06 RW 03 Yang terdampak 10 rumah
		3	**Desa**	**Pesawahan** RT 01 - RT 05						±20-50 cm ±20-50 cm					* BPBD Sidoarjo melakukan kaji cepat dan pendataan secara berkala * BPBD Sidoarjo melakukan koordinasi dengan pemerintahan Desa setempat untuk melakukan monitoring wilayah banjir
		4	**Desa**	**Kedungsolo** RT.04 RW.01 RT.02 RW.02 RT.01 RW.04						±20-50 cm ±20-50 cm ±20-50 cm ±20-50 cm					* BPBD Sidoarjo melakukan kaji cepat dan pendataan secara berkala * BPBD Sidoarjo melakukan koordinasi dengan pemerintahan Desa setempat untuk melakukan monitoring wilayah banjir * RT 01 RW 04 yang terdampak 10 Rumah * RT 04 RW 01 Yang terdampak 4 Ha Sawah

														* RT 02 RW 02 Yang terdampak 4 Rumah
		5	**Desa Kesambi** Dusun Sumorejo						±20-50 cm ±20-50 cm					* BPBD Sidoarjo melakukan kaji cepat dan pendataan secara berkala * BPBD Sidoarjo melakukan koordinasi dengan pemerintahan Desa setempat untuk melakukan monitoring wilayah banjir * Dusun Sumorejo Yang terdampak 30 Rumah
IV	**Banjir**													
	Kamis, 15 Februari 2018	**Kecamatan Porong**												
		1	**Raya Porong**						±30-60 cm					*Koordinasi dengan dinas terkait * Koordinasi dengan BBWS dan PUPR untuk penyedotan air ke Kali Ketapang
		2	**Desa Pesawahan** RT.01 RW.02 RT.02 RW.02						±20-30 cm ±20-30 cm ±20-30 cm					*Koordinasi dengan dinas terkait * Koordinasi dengan BBWS dan PUPR untuk penyedotan air ke Kali Ketapang

			3	**Desa**	**Candipari**						±20-30 cm					*Koordinasi dengan dinas terkait
					RT.02 RW.01						±20-30 cm					* Koordinasi dengan BBWS dan PUPR untuk penyedotan air ke Kali Ketapang
			Kecamatan Tanggulangin													
			1	**Desa**	**Gempolsari**						±30-50 cm					* BPBD Sidoarjo melakukan kaji cepat dan pendataan secara berkala * BPBD Sidoarjo melakukan koordinasi dengan pemerintahan Desa setempat untuk melakukan monitoring wilayah banjir * Ketinggian Air mencapai 30-50 CM
					RT.07 RW.02						±30-50 cm					
					RT.08 RW.02						±30-50 cm					
					RT.09 RW.02						±30-50 cm					
					RT.11 RW.03						±30-50 cm					
					RT.12 RW.03						±30-50 cm					
					RT.13 RW.03						±30-50 cm					
					RT.14 RW.04						±30-50 cm					
					RT.15 RW.04						±30-50 cm					
					RT.16 RW.04						±30-50 cm					
			2	**Desa**	**Banjarpanji**						±10-30 cm					* BPBD Sidoarjo melakukan kaji cepat dan pendataan secara berkala * BPBD Sidoarjo melakukan koordinasi dengan pemerintahan Desa setempat untuk melakukan monitoring wilayah banjir * Ketinggian Air mencapai 10-30 CM
					RT.01 RW.01						±10-30 cm					
					RT.03 RW.01						±10-30 cm					
					RT.04 RW.01						±10-30 cm					
					RT.05 RW.02						±10-30 cm					
					RT.06 RW.02						±10-30 cm					
			3	**Desa**	**Sentul**						±10-30 cm					* BPBD Sidoarjo melakukan kaji cepat dan pendataan secara berkala
					RT.01 RW.01						±10-30 cm					
					RT.02 RW.01						±10-30 cm					

				RT.03 RW.01 RT.04 RW.01 RT.05 RW.01						±10-30 cm ±10-30 cm ±10-30 cm					* BPBD Sidoarjo melakukan koordinasi dengan pemerintahan Desa setempat untuk melakukan monitoring wilayah banjir * Ketinggian Air mencapai 10-30 CM
		Kecamatan Jabon													
		1	**Desa**	**Semambung** RT.01 RW.03 RT.01 RW.02 RT.02 RW.02						±5-15 cm ±5-15 cm ±5-15 cm ±5-15 cm					* BPBD Sidoarjo melakukan kaji cepat dan pendataan secara berkala * BPBD Sidoarjo melakukan koordinasi dengan pemerintahan Desa setempat untuk melakukan monitoring wilayah banjir * Ketinggian Air mencapai 10-15 CM
		2	**Desa**	**Kupang** RT.02 RW.04 RT.03 RW.04 RT.01 RW.05 RT.02 RW.05 RT.03 RW.05						±5-15 cm ±5-15 cm ±5-15 cm ±5-15 cm ±5-15 cm ±5-15 cm					* BPBD Sidoarjo melakukan kaji cepat dan pendataan secara berkala * BPBD Sidoarjo melakukan koordinasi dengan pemerintahan Desa setempat untuk melakukan monitoring wilayah banjir * Ketinggian Air mencapai 10-15 CM
		3	**Desa**	**Kedungpandan** RT.13 RW.05 RT.14 RW.05						±30-50 cm ±30-50 cm ±30-50 cm					* BPBD Sidoarjo melakukan kaji cepat dan pendataan secara berkala

			RT.15 RW.05 RT.16 RW.05						±30-50 cm ±30-50 cm					* BPBD Sidoarjo melakukan koordinasi dengan pemerintahan Desa setempat untuk melakukan monitoring wilayah banjir * Ketinggian Air mencapai 30-50CM
V	**Angin Kencang**													
	Selasa, 20 Februari 2018	**Kecamatan Sedati**												
		1	**Desa Sedati Agung**											*1 Pohon Besar Tumbang *Koordinasi Dengan DLHK dan Relawan Rapi Untuk Membersihkan Sisa Bencana
VI	**Angin Kencang**													
	Rabu, 21 Februari 2018	**Kecamatan Taman**												
		1	**Desa Wage**				1							*1 Orang Luka Ringan *1 Ruang Sekolahan Dasar Rusak Ringan *1 Balaidesa Rusak Ringan *1 Balai RW Rusak Ringan
VII	**Angin Kencang**													
	Jumat, 23 Februari 2018	**Kecamatan Waru**												
		1	**Desa Ngingas**			1								*Tim BPBD Sidoarjo Melakukan Pendataan di TKP *BPBD Sidoarjo Memberikan Bantuan 20 Terpal *BPBD Sidoarjo Melakukan

														Koordinasi dengan Pemerintah Desa *RT.04 RW.01 : 17 Rumah Rusak Ringan *RT.09 RW.03 : 22 Rumah Rusak Ringan *1Orang Luka Berat a.n Habibi umur 11 tahun
VIII	**Angin Kencang**													
	Jumat, 2 Maret 2018	**Kecamatan Jabon**												
		1	**Desa Kupang**											*Tim BPBD Sidoarjo Melakukan Pendataan di TKP *BPBD Sidoarjo Melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Desa *RW.03 RT.01 : 6 Rumah dan 1 mushola Rusak Ringan *RW.03 RT.02 : 4 Rumah Rusak Ringan *RW.03 RT.03 : 3 Rumah Rusak Ringan *RW.03 RT.04 : 4 Rumah Rusak Ringan
IX	**Angin Kencang**													
	Minggu, 18 Maret 2018	**Kecamatan Sedati**												
		1	**Desa Sedati Gede**											*Tim BPBD Sidoarjo Melakukan Pendataan di TKP *BPBD Sidoarjo Memberikan Bantuan 10 Terpal *RT.23 RW.11 : 42 Rumah

														*RT 32 RW 13 : 3 Rumah *RT.02 RW.15 : 23 Rumah
		2	**Desa Pabean**				1							*Tim BPBD Sidoarjo Melakukan Pendataan di TKP *BPBD Sidoarjo Memberikan Bantuan 5 Terpal *RT.14 RW.05 : 12 Rumah Rusak Ringan *RT.52 RW.16 : 3 Rumah Rusak Ringan *RT.51 RW.16 : 3 Rumah Rusak Ringan *RT.15 RW.06 : 4 Rumah Rusak Ringan *RT.13 RW.05 : 3 Rumah Rusak Ringan Korban Luka Ringan An/Nunik 28th
		Kecamatan Gedangan												
		1	**Desa Semambung**											*Tim BPBD Sidoarjo Melakukan Pendataan di TKP *RT.14 RW.04 : 2 Rumah Rusak Ringan *RT.15 RW.04 : 12 Rumah dan 1 Mushola Rusak Ringan *RT.17 RW.05 : 8 Rumah *RT.18 RW.05 : 2 Rumah dan 1 Pos Kampling Rusak Ringan *RT.19 RW.05 : 1 Rumah Rusak Ringan

X	**Angin Kencang**													
	Senin, 19 Maret 2018	**Kecamatan Krembung**												
		1	**Desa Tambak Rejo**											*Tim BPBD Sidoarjo Melakukan Pendataan di TKP *BPBD Sidoarjo Memberikan Bantuan 5 Terpal *RT.02 RW.01 :1 Rumah Rusak Ringan *RT.04 RW.02 :1 Rumah Rusak Ringan *RT.06 RW.03 : 5 Rumah Rusak Ringan *RT.07 RW.04 : 12 Rumah Rusak Ringan *RT.08 RW.04 : 2 Rumah Rusak Ringan *RT.09 RW.05 : 9 Rumah Rusak Ringan
XI	**Angin Kencang**													
	Minggu, 25 Maret 2018	**Kecamatan Balongbendo**												
		1	**Desa Seketi**											*Tim BPBD Sidoarjo Melakukan Pendataan di TKP *BPBD Sidoarjo Memberikan Bantuan 2 Terpal * Tim BPBD Melakukan Pembersihan sisa-sisa bencana bersama warga setempat * 36 Rumah rusak ringan

XII	**Angin Kencang**													
	Senin, 02 April 2018	**Kecamatan Prambon**												
		1	**Desa Wonoplintahan**											*Tim BPBD Sidoarjo Melakukan Pendataan di TKP * Tim BPBD Melakukan Pembersihan sisa-sisa bencana bersama warga setempat * 31 Rumah rusak ringan
XIII	**Angin Kencang**													
	Senin, 19 November 2018	**Kecamatan Tulangan**												
		1	**Desa Kajeksan**											*Tim BPBD Sidoarjo Melakukan Pendataan di TKP *BPBD Sidoarjo Melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Desa *RW.01 RT.01 : 24 Rumah *RW.01 RT.01 : 18 Rumah *RW.01 RT.03 : 35 Rumah dan 1 Pondok Pesantren *RW.01 RT.04 : 22 Rumah *RW.02 RT.05 : 19 Rumah *RW.02 RT.06 : 28 Rumah *RW.02 RT.07 : 14 Rumah

															*RW.02 RT.08 : 9 Rumah *RW.02 RT.09 : 14 Rumah
		2	**Desa Grabagan**												*Tim BPBD Sidoarjo Melakukan Pendataan di TKP *BPBD Sidoarjo Melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Desa *RW.04 RT.02 : 1 Rumah *RW.04 RT.04 : 1 Rumah *RW.04 RT.21 : 2 Rumah *RW.04 RT.22 : 6 Rumah *RW.03 RT.20 : 3 Rumah
		3	**Desa Grinting**				1								*Tim BPBD Sidoarjo Melakukan Pendataan di TKP *BPBD Sidoarjo Melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Desa *RW.04 RT.12 : 2 Rumah *RW.04 RT.13 : 7 Rumah
		4	**Desa Kemantren**												*Tim BPBD Sidoarjo Melakukan Pendataan di TKP *BPBD Sidoarjo Melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Desa *RW.01 RT.01 : 20 Rumah
		5	**Desa Kepadangan**												*Tim BPBD Sidoarjo Melakukan Pendataan di TKP *BPBD Sidoarjo Melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Desa

															*RW.01 RT.01 : 4 Rumah *RW.01 RT.02 : 2 Rumah *RW.02 RT.05 : 4 Rumah
			6	**Desa Kepuh Kemiri**											*Tim BPBD Sidoarjo Melakukan Pendataan di TKP *BPBD Sidoarjo Melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Desa *RW.02 RT.06 : 2 Rumah *RW.03 RT.09 : 2 Rumah *RW.04 RT.10 : 6 Rumah *RW.04 RT.11 : 3 Rumah *RW.04 RT.12 : 1 Rumah
			7	**Desa Kepunten**											*Tim BPBD Sidoarjo Melakukan Pendataan di TKP *BPBD Sidoarjo Melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Desa
															*RW.03 RT.02 : 1 Rumah *RW.03 RT.06 : 1 Rumah *RW.04 RT.01 : 2 Rumah *RW.04 RT.02 : 2 Rumah *RW.04 RT.03 : 5 Rumah *RW.04 RT.04 : 7 Rumah
			8	**Desa Tlasih**											*Tim BPBD Sidoarjo Melakukan Pendataan di TKP

														*BPBD Sidoarjo Melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Desa *RW.01 RT.05 : 4 Rumah
XIV	**Angin Kencang**	**Kecamatan Gedangan**												
	Selasa, 20 November 2018	**1**	**Desa Kragan**											*Tim BPBD Sidoarjo Melakukan Pendataan di TKP *BPBD Sidoarjo Melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Desa *RW.01 RT.03 : 3 Rumah
		2	**Desa Punggul**											*Tim BPBD Sidoarjo Melakukan Pendataan di TKP *BPBD Sidoarjo Melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Desa *RW.01 RT.03 : 1 Rumah
		3	**Desa Sawotratap**											*Tim BPBD Sidoarjo Melakukan Pendataan di TKP *BPBD Sidoarjo Melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Desa *RW.12 RT.07 : 1 Rusunawa
XV	**Angin Kencang**	Kecamatan Balongbendo												
	Sabtu, 15 Desember 2018	**1**	**Desa Bakungpringgodani**											* Tim BPBD Sidoarjo Melakukan Pendataan di TKP * BPBD Sidoarjo Melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Desa * BPBD Sidoarjo Memberikan bantuan berupa terpal

														* BPBD Sidoarjo melakukan pengkajian pasca bencana * BPBD Sidoarjo Melakukan pemotongan pohon tumbang 82 rumah
		2	**Desa Wonokarang**											* Tim BPBD Sidoarjo Melakukan Pendataan di TKP * BPBD Sidoarjo Melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Desa * BPBD Sidoarjo melakukan pengkajian pasca bencana 16 rumah
		3	**Desa Sukodani**											* Tim BPBD Sidoarjo Melakukan Pendataan di TKP * BPBD Sidoarjo Melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Desa * BPBD Sidoarjo melakukan pengkajian pasca bencana 6 rumah

XVI	**Laka Air**													
	Selasa , 18 Desember 2018	**Kecamatan Prambon**												
		1	**Desa Prambon**	**1**										* BPBD Sidoarjo Berkoordinasi dengan Polsek Prambon, Basarnas dan Pemerintah desa setempat * Tim Resque BPBD Sidoajo,Basarnas, Tagana Sidoarjo, Relawan serta masyarakat Sekitar melakukan pencarian korban a/n Choirul Anam (39 th) Desa Gampang RT 06 RW 02 kecamatan prambon

Sumber Data : BPBD Kabupaten Sidoarjo

2. Penanganan Kejadian Kebakaran di Tahun 2018 :

No	Jenis Bangunan	Jumlah Kejadian	Penanganan (Tepat / Tidak)
1.	Industri	33	Tepat
2.	Perkantoran	7	Tepat
3.	Unit Dagang / Jasa	34	Tepat
4.	Kendaraan Bermotor	14	Tepat
5.	Rumah Penduduk	43	Tepat
6.	Lain – Lain (Lahan Kering, Lahan Tebu, Lahan Terbuka, dll)	228	Tepat

Total kejadian kebakaran di dalam Kabupaten Sidoarjo tahun 2018 adalah sebanyak 359 kejadian, dimana 118 kejadian ditangani dalam waktu tanggap / respon time 15 menit. Sehingga persentase kejadian kebakaran yang ditangani dalam waktu tanggap adalah : 118 / 359 * 100% = 32,87%.

Rata –rata waktu penanganan kebakaran tahun 2018 adalah 21.57 Menit sejak laporan diterima, dengan jumlah kejadian sebanyak 359 kejadian.

3. Upaya / Penanggulangan yang telah dilakukan antara lain :

- Koordinasi dengan instansi terkait (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Kesehatan dan lain-lain);
- Melakukan kesiapsiagaan Pemadam kebakaran;
- Pengembangan WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran) atau menambah pos Pemadam kebakaran;
- Inventarisasi Data kasus kebakaran;
- Pemberdayaan masyarakat di daerah rawan bencana melalui pembentukan kelompok / komunitas kebencanaan;
- Peningkatan kapasitas SDM aparatur.

4. Antisipasi daerah dalam menghadapi kemungkinan bencana

- Mendirikan posko kesiapsiagaan bencana;
- Pengadaan sarana prasarana kebencanaan;
- Pengadaan bahan bangunan untuk kebutuhan darurat pasca bencana;

- Penguatan kapasitas SDM aparatur;
- Pemanfaatan teknologi dalam Sistem Peringatan Dini melalui prakiraan cuaca dari BMKG Juanda
- Pemetaan potensi ancaman bahaya kebakaran dengan melakukan kajian resiko kebakaran
- Melakukan sosialisasi / pelatihan / pemberdayaan masyarakat (Sekolah aman bencana , Desa Tangguh Bencana, Sekolah Sungai)
- Mengadakan sarana prasarana penanganan kebakaran (Mobil Damkar, Pompa air dll)
- Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIGAP (Sidoarjo Tanggap – Adalah Aplikasi berbasis Android yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dalam melaporkan kejadian bencana secara real time di Kabupaten Sidoarjo)

5. Permasalahan dan solusi

Permasalahan secara umum terhadap penanggulangan bencana adalah :

- Lalu lintas semakin padat terutama pada jam-jam sibuk;
- Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan
- Luasnya daerah rawan bencana di Kabupaten Sidoarjo dan kapasitas BPBD yang terbatas (SDM yang fleksibel, logistik dan sarana prasarana);
- Kegiatan Penanggulangan Bencana belum masuk ke dalam Urusan Wajib Layanan Dasar pada penganggaran APBD TA 2018 sehingga pada kegiatan PB belum sesuai dengan SPM;
- Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) masih dalam taraf proses pembentukan dan belum secara rutin teragendakan dengan baik;
- Dokumen Kajian resiko bencana belum masuk dalam skala prioritas program pembangunan di Kabupaten Sidoarjo;
- Terbatasnya personil dan sarana prasarana Pemadam Kebakaran sehingga target *respon time* belum terpenuhi;
- Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Pemerintah Kabupaten Sidoarjo belum berbasis PRB dan RPB;
- Terbatasnya *tools* pengukuran Indeks Resiko Bencana sehingga belum sesuai dengan karakteristik ancaman bencana untuk Kabupaten Sidoarjo

Solusi yang telah dilakukan untuk menanggulangi bencana adalah :

- Peningkatan sinergitas antar *stakeholder* dalam penanggulangan bencana baik pra, tanggap darurat dan pasca bencana;
- Terbitnya Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembagian Kewenangan, Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Sidoarjo;
- Melakukan koordinasi secara intens dengan OPD terkait perubahan dari Penunjang Urusan menjadi Urusan Wajib Layanan Dasar;
- Pengembangan aplikasi SIGAP dan website BPBD (*maintenance*, update aplikasi dan diklat teknis bagi operator) dan sosialisasi pemanfaatan aplikasi SIGAP kepada masyarakat ;
- Melibatkan dunia usaha dalam pembangunan Pos Damkar baru;
- Konsistensi antara perencanaan, pengelolaan dan pelaksanaan anggaran kebencanaan;
- Peningkatan kerjasama dengan *Non Government Organization* (NGO) seperti APIK dan JICA terkait pelaksanaan kegiatan kebencanaan di Kabupaten Sidoarjo;
- Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui pembentukan komunitas / kelompok relawan diantaranya :
  1. Sekolah Aman Bencana;
  2. Sekolah Sungai;
  3. Desa Tangguh Bencana;
  4. Gladi Posko, Simulasi

F. Pengelolaan Kawasan Khusus

Di Kabupaten Sidoarjo tidak terdapat daerah kawasan khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada penjelasan umum tentang pembentukan daerah dan kawasan khusus.

G. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Selama tahun 2018, di Kabupaten Sidoarjo tidak terjadi gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang mengarah kepada konflik yang berbasis SARA, separatisme dan anarkisme. Gangguan yang terjadi sangat bersifat lokal dan individual yang secara keseluruhannya masih mampu diselesaikan oleh masyarakat sendiri maupun aparat pemerintah mulai tingkat desa / kelurahan, kecamatan dan kabupaten.

BAB VII
PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 disusun sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa "Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah" dan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi, urusan tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. Dari penyelenggaraan urusan tersebut, dapat dilihat hasil dari capaian program dan kegiatan serta permasalahan dan pemecahan masalahnya. Permasalahan yang dihadapi dan hal-hal yang tidak tercapai dalam pelaksanaan program/kegiatan tahun anggaran 2018 menjadi masukan bagi penyelenggaraan pemerintahan tahun selanjutnya. Selain LPPD ini, masukan dari masyarakat dalam memberikan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan, juga menjadi bahan pertimbangan sekaligus memberikan arti tersendiri dalam penyelenggaraan kepemerintahan yang baik. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kepada Menteri Dalam Negeri secara akuntabilitas disajikan dalam dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018.

Perkembangan pendapatan tahun 2018 dapat dilihat dari perbandingan antara target dan realisasi penerimaan secara keseluruhan, dimana pada anggaran tahun 2018 APBD Kabupaten Sidoarjo ditargetkan sebesar Rp.4.124.471.103.455,83 terealisasi sebesar Rp.4.332.764.066.737,47 atau 105,05%. Pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menargetkan pendapatan dari pendapatan asli daerah sebesar Rp.1.493.647.141.178,83, terealisasi sebesar Rp.1.685.633.193.244,34 atau 112,85%; dana perimbangan sebesar Rp.1.834.890.492.000,00 terealisasi sebesar Rp.1.793.474.341.790,00 atau 97,74%; dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp.795,933,470,277.00 terealisasi sebesar

Rp.853,656,531,703.13 atau 107,25%. Perkembangan belanja daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2018, jika dilihat dari target belanja daerah sebesar Rp.5.005.097.845.031,35 terealisasi sebesar Rp.4.188.722.747.338,10 atau sebesar 83,69%. Belanja daerah ini terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung, pada tahun 2018 belanja tidak langsung dengan target sebesar Rp.2,335,266,745,061.05 terealisasi sebesar Rp.2,032,559,095,504.00 atau 87,04%, dan untuk belanja langsung terealisasi sebesar Rp.2,156,163,651,834.10 atau 80,76% dari jumlah target sebesar Rp.2,669,831,099,970.30. Dari keseluruhan belanja ini jika di bandingkan dengan realisasi pendapatan terjadi defisit sebesar Rp.895.950.741.575,52.

Dari 10 (delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 - 2021, yaitu : Indeks Good Governance, Indeks Reformasi Birokrasi, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks GINI, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Kebahagiaan, Indeks Infrastruktur, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Tingkat Kemiskinan, dapat disimpulkan bahwa pada Tahun Anggaran 2018, kesepuluh indikator utama dimaksud telah mencapai target yang telah ditetapkan dan bahkan melampaui. Keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran 2018 tersebut patut disyukuri, mengingat pencapaiannya diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, baik jajaran Eksekutif maupun Legislatif, serta masyarakat secara luas.

Hasil-hasil yang telah dicapai selama ini mengindikasikan adanya komitmen yang kuat dari seluruh elemen Pemerintahan Daerah yang dapat dijadikan pondasi kokoh untuk meraih kinerja yang lebih optimal di masa mendatang. Di samping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu saja masih terdapat celah kekurangan yang perlu diperbaiki. Demikian penyampaian LPPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 ini, diiringi harapan semoga di tahun-tahun mendatang, keberhasilan senantiasa mengiringi segala upaya dan perjuangan kita demi kemajuan Kabupaten Sidoarjo. Semoga Allah SWT memberkati kita semua. Amiin.

LAMPIRAN III.1: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018

KABUPATEN SIDOARJO

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	Capaian KInerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH	Peraturan tentang ketertiban penataan ruang	1	Keberadaan PERDA IMB	Ada/tidak ada PERDA	ADA : **PERDA Nomor : 04 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB)**	**Ada**	
			2	Rasio Rumah ber IMB	Jumlah Rumah ber IMB dibagi jumlah rumah [1] seluruhnya	- Jumlah rumah ber IMB s.d akhir Tahun 2018, sebanyak **477.365** unit. - Jumlah seluruh rumah s.d akhir Tahun 2018, sebanyak **630.822** Unit.	**75,67%**	
			3	Keberadaan PERDA RTRW	Ada/tidak ada PERDA RTRW	ADA : **PERDA Nomor : 06 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029**	**Ada**	
		Peraturan ttg kependudukan	4	Pengurusan E-KTP	Jumlah Penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP dibagi jumlah penduduk yang wajib ber-KTP	- Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP = **1.495.386** jiwa - Jumlah penduduk yang wajib ber-KTP = **1.652.408** jiwa	**90,50%**	
			5	Biaya KTP	Biaya KTP dalam PERDA	Dasar hukum : **PERDA Nomor : 02 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Sidoarjo**	**Rp. 0,- / Tidak dipungut biaya**	

[1] Rumah adalah Bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga yang berdomisili dikawasan permukinan maupun rumah liar yang berdomisili dikawasan lindung.

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	Capaian KInerja	Keterangan
		Personil Satpol PP (Kebijakan Ketersediaan aparat Trantibum)	6	Rasio personil SatpoL PP terhadap jumlah penduduk	Jumlah personil Satpol PP pada akhir tahun 2018 dibagi 10.000 penduduk x 100 %	- Personil Satpol PP (PNS) pada Tahun 2018, sebanyak = **151** orang - Penduduk pada akhir tahun 2018, berjumlah = **2.238.069** orang	**0,67**	
		Kebijakan bidang penanganan PSK, PKL, atau PMKS.	7	Keberadaan PERDA tentang PSK, PKL, atau PMKS	Ada atau tidak ada PERDA PSK dan PKL	ADA : **PERDA Nomor : 10 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat**	**Ada**	
		Peraturan tentang Kebersihan Kabupaten	8	Keberadaan peraturan tentang kebersihan Kabupaten	Ada atau tidak ada PERDA Kebersihan Kabupaten	ADA : **PERDA Nomor : 06 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan**	**Ada**	
2	KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAH, SERTA ANTARPEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH	Penyampaian laporan kepada pemerintah	9	Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP Nomor 3 tahun 2007,	Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan	Bukti Pengiriman LPPD Tahun 2018 **disampaikan pada tanggal xx Maret 2019 sesuai surat pengantar Nomor : 130/xxxx/438.1.2.2/2019 tanggal xx Maret 2019**.	**Tepat**	
		Penyampaian laporan keuangan dan kinerja	10	Ketepatan waktu penyampaian Laporan keuangan dan Laporan kinerja berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2006	Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan	Bukti Pengiriman: - **Laporan Keuangan tahun 2018, disampaikan pada tanggal xx Maret 2019 sesuai surat pengantar Nomor : 900/xxxx/438.5.2/2019 tanggal xx Maret 2019** - **Laporan Kinerja tahun 2018, disampaikan pada tanggal xx Maret 2019 sesuai surat pengantar Nomor : 130/xxxx/438.1.2.2/2019 tanggal xx Maret 2019**	**Tepat** **Tepat**	

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	Capaian KInerja	Keterangan
		Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	11	Urusan yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah.	Jumlah urusan wajib yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan Penetapan oleh Menteri/ Pimpinan LPND.	Urusan yang diterapkan SPM nya oleh Pemda sebanyak **6** Urusan, yang terdiri dari : **1) Urusan Pendidikan** **2) Urusan Kesehatan** **3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang** **4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman** **5) Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat** **6) Urusan Sosial**	**6 Urusan**	
		Hubungan antar daerah	12	Kerjasama dengan daerah lain	Jumlah MOU yang masih berlaku per tahun 2017	Jumlah MOU yang masih berlaku pada tahun 2018, sebanyak **26** MOU yang terdiri dari: 1) MOU antar daerah dan dengan Lembaga Pemerintah sebanyak **16** MOU 2) MOU dengan universitas sebanyak **5** MOU. 3) MOU dengan Lembaga Non Pemerintah / Swasta sebanyak **5** MOU	**26 MOU**	
3	KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH	Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah	13	Kesesuaian prioritas pembangunan	Jumlah prioritas pembangunan daerah dibagi Jumlah prioritas pembangunan nasional [2]	- Prioritas pembangunan daerah (RKPD) mendukung prioritas pembangunan nasional, sebanyak **9** program prioritas. - Prioritas pembangunan nasional, sebanyak **9** program / agenda prioritas.	**100%**	
		Kewenangan	14	Urusan wajib yang diselenggarakan daerah	Jumlah urusan yang dilaksanakan daerah dibagi 24 (Jumlah urusan wajib di UU Nomor 23 Tahun 2014) X 100%	Urusan Wajib yang dilaksanakan pada Tahun 2018 (APBD) = **24** urusan.	**100%**	

[2] Program prioritas pembangunan nasional: (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Penanggulangan kemiskinan; (5) Ketahanan pangan; (6) Infrastruktur; (7) Iklim investasi dan iklim usaha; (8) Energy; (9) Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; (10) Daerah tertingggal, terdepan, terluar dan pasca konflik; dan (11) Kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknlogi

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	Capaian KInerja	Keterangan
		Keuangan	15	Waktu penetapan PERDA APBD 2018	Tepat atau tidak tepat waktu penetapan PERDA APBD 2018	TEPAT : **PERDA Nomor : 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 tanggal 29 Desember 2017.**	**Tepat**	
			16	Keberadaan PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP Nomor 58 tahun 2005	Ada atau tidak adanya PERDA ttg pengelolaan keuangan daerah	ADA : **PERDA Nomor : 04 Tahun 2007 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah**.	**Ada**	
			17	Belanja untuk pelayanan dasar	Jumlah belanja untuk pelayanan dasar dibagi Jumlah total belanja X 100%	Belanja pelayanan dasar APBD Tahun 2018. 1) Urusan Pendidikan **Rp.1.313.461.445.332,41** 2) Urusan Kesehatan **Rp.867.059.426.598,30** 3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang **Rp. 748.883.539.240,00** 4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman **Rp.130.591.563.178,00** 5) Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat **Rp.38.432.179.649,00** 6) Urusan Sosial **Rp. 10.883.159.460,00** Total Belanja pelayanan dasar **Rp.3.109.311.313.457,71** Total Belanja APBD 2017, sebesar **Rp.5.005.097.845.031,35**	**62,12%**	
			18	Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan	Jumlah belanja untuk kesehatan dan pendidikan dibagi Jumlah total belanja X 100%	Belanja Pendidikan dan Kesehatan APBD Tahun 2018. 1) Urusan Pendidikan **Rp.1.313.461.445.332,41** 2) Urusan Kesehatan **Rp.867.059.426.598,30** Total Belanja Pendidikan dan Kesehatan **Rp.2.180.520.871.930,71**	**43,57%**	

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	Capaian KInerja	Keterangan
		Pelayanan Publik	19	Keberadaan PERDA tentang Standar Pelayanan Publik [3] sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Ada atau tidak adanya standar pelayanan publik	ADA : **PERBUP nomor 14 tahun 2012 tentang prosedur layanan informasi publik** **PERBUP nomor 12 tahun 2015 tentang Pusat Pelayanan Pengaduan Masyarakat Kabupaten Sidoarjo**	**Ada**	
		Kepegawaian	20	Ratio PNS terhadap penduduk	Jumlah PNS kabupaten dibagi jumlah penduduk	Jumlah PNS kabupaten tahun 2017 sebanyak **11.517** orang. Jumlah penduduk kabupaten tahun 2017 sebanyak **2.238.069** orang.	**0,51%**	
			21	Sistem Informasi Kepegawaian	Ada atau tidak adanya data base kepegawaian	ADA : **1. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)** **PERBUP Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo** **2. SKP Online / e-Kinerja (Sistem Informasi Penilaian Kinerja PNS)** **3. DHP Online (Sistem Informasi Daftar Hadir Pegawai Online)** **4. KP Online / SIPEKAT (Sistem Informasi Kenaikan Pangkat Online)** **5. Cuti Online**	**Ada**	

[3] Standar Pelayanan Publik adalah Sebagai tolok ukur yang terukur secara kuantitas dan kualitas penyediaan barang dan jasa diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat. Standar Pelayanan Publik merupakan komitmen pemerintahan daerah yang penetapan Indikator capaian kinerja dalam rangka penerapan pencapaian standar pelayanan minimal dituangkan dalam RPJMD dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan Menteri / Pimpinan LPNK.

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	Capaian KInerja	Keterangan
		Kelembagaan	22	Penataan Perangkat Daerah	. Jumlah pembentukan Perangkat Daerah berdasarkan PP Nomor 18 tahun 2016	Jumlah Perangkat Daerah, sbb : **1) Bagian (Setda) = 9 unit** **2) Dinas = 18 unit** **3) Badan = 6 unit** **4) Kantor = 0 unit** **5) Rumah Sakit = 1 unit** **6) Lembaga Teknis Lainnya = 3 unit** **7) Kecamatan / Distrik = 18 unit+** **Jumlah SKPD = 57 unit** **Lembaga Teknis Lainnya :** **1. Inspektorat** 2. **Sekretariat DPRD** 3. **Satuan Polisi Pamong Praja**	**57 unit**	
4	EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD	Produk peraturan perundangan	23	PERDA yang ditetapkan	Jumlah PERDA yang ditetapkan dalam tahun 2018	PERDA yang ditetapkan dalam Tahun 2018, sebanyak **9** PERDA	**9 PERDA**	
		RAPERDA yang diajukan tahun berjalan	24	RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2018	Jumlah RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2018 dibagi Jumlah RAPERDA yang diusulkan tahun 2018	- RAPERDA yang diusulkan tahun 2018, sebanyak **9** RAPERDA. - RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2018, sebanyak **9** PERDA. -	**100%**	
5	EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	25	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti .	Jumlah keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dibagi jumlah keputusan DPRD yang dihasilkan dalam tahun 2018 x 100%	- Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dalam tahun 2018, sebanyak **100** keputusan. - Keputusan DPRD dalam tahun 2018, sebanyak **100** keputusan.	**100%**	
6	EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KEPALA DAERAH BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN	Tindaklanjut keputusan Bupati	26	Keputusan Bupati yang ditindaklanjuti	Jumlah keputusan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah keputusan Bupati dalam tahun 2018 x 100%	- Keputusan Bupati tahun 2018, sebanyak **851** keputusan. - Keputusan Bupati tahun 2018 yang ditindaklanjuti, sebanyak **851** keputusan.	**100%**	

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	Capaian KInerja	Keterangan
		Tindaklanjut Peraturan Bupati	27	Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti	Jumlah Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti dibagi jumlah Peraturan Bupati dalam tahun 2018 x 100%	- Peraturan Bupati dalam tahun 2018, sebanyak **115** PERBUP. - Peraturan Bupati dalam tahun 2018 yang ditindaklanjuti, sebanyak **115** PERBUP.	**100%**	
7	KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PERDA yang dibatalkan	28	Jumlah PERDA yang dibatalkan	Jumlah PERDA yang dibatalkan dibagi Jumlah PERDA yang dikirim ke pemerintah untuk dievaluasi x 100%	- PERDA yang dibatalkan, sebanyak **0** PERDA. - PERDA yang dikirimkan untuk dievaluasi oleh Pemerintah sebanyak **9** PERDA	**0%**	
8	INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH	PERDA tentang konsultasi publik	29	Keberadaan PERDA/PERBUP tentang konsultasi publik	Ada/tidak PERDA/PERBUP	ADA : **PERBUP nomor 14 tahun 2012 tentang prosedur layanan informasi publik** **PERBUP nomor 12 tahun 2017 tentang Pusat Pelayanan Pengaduan Masyarakat Kabupaten Sidoarjo**	**Ada**	
		Media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik	30	Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik (website Kabupaten, pos, bag/biro humas, leaflet/brosur)	Ada atau tidak ada media Informasi yang ditetapkan dengan PERBUP	ADA : - Website : http://www.sidoarjokab.go.id/ - Selayang Pandang Kabupaten Sidoarjo - Leaflet / Brosur - Radio Siaran Pemerintah Kabupaten (RSPK) Sidoarjo (Radio Suara Sidoarjo) - Media Cetak : Majalah "Gema Delta" - Media Center Kabupaten Sidoarjo - Pusat Pelayanan Pengaduan Masyarakat (P3M) - Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) - Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) - *Command* Center - Data Center	**Ada**	

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	Capaian KInerja	Keterangan
9	TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL	Serapan dana perimbangan	31	Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan	Jumlah dana perimbangan yang terserap dibagi jumlah dana perimbangan x 100%	Dana perimbangan yang terserap Tahun 2018 sebesar **Rp.1.793.474.341.790,00** Dana perimbangan yang direncanakan sesuai dengan APBD Tahun 2018 sebesar **Rp.1.834.890.492.000,00**	**97,74%**	
		Alokasi Belanja pada APBD dari DAU	32	Belanja Publik terhadap DAU	Jumlah belanja publik dibagi DAU x 100%	- Belanja langsung APBD tahun 2018, sebesar **Rp.2.669.831.099.970,30** - DAU Tahun 2018, sebesar **Rp.1.203.737.401.000,00** -	**221,80%**	
		Alokasi Belanja pada APBD	33	Belanja Langsung terhadap total APBD	Total belanja Langsung dibagi APBD x 100%	- Total Belanja langsung APBD tahun 2018, sebesar **Rp.2.669.831.099.970,30** - Total Belanja APBD Tahun 2018, sebesar **Rp.5.005.097.845.031,35**	**53,34%**	
10	INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBER-SUMBER PAD DAN PINJAMAN / OBLIGASI DAERAH	Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)	34	Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD (Realisasi)	Jumlah PAD dibagi jumlah total pendapatan APBD (realisasi) X 100%	- PAD APBD (Realisasi) Tahun 2018, sebesar **Rp. 1.685.633.193.244,34** - Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2018, sebesar **Rp.4.332.764.066.737,47**	**38,90%**	
11	EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD	Kewajaran Laporan Keuangan (Lapkeu)	35	Opini BPK terhadap LapKeu Daerah	Jenis opini BPK terhadap Hasil Laporan Keuangan Daerah untuk 2 tahun terakhir	- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2017, dengan opini: **WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)** - Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2018, dengan opini: **WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)** -	**Opini tahun 2017 = WTP** **Opini tahun 2018 = WTP**	
		Besaran SILPA	36	Rasio SILPA thd total pendapatan	Besaran SILPA dibagi jumlah pendapatan x 100%	- SILPA Tahun 2018, sebesar **Rp.1.028.219.155.162,74** - Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2018, sebesar **Rp.4.332.764.066.737,47**	**23,73%**	

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	Capaian KInerja	Keterangan
		Realisasi belanja	37	Rasio realisasi belanja thd anggaran belanja	Realisasi belanja dibagi total anggaran belanja APBD X 100%	- Realisasi Belanja Tahun 2018, sebesar **Rp.4.188.722.747.338,10** - Total Anggaran Belanja dalam APBD Tahun 2018, sebesar **Rp. 5.005.097.845.031,35**	**83,69%**	
		Pengawasan Inspektorat Kabupaten	38	Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	Jumlah temuan BPK RI yang ditindaklanjuti dibagi dengan temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2018	- Temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2018 sebanyak **625** temuan. - Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sampai dengan Tahun 2018, sebanyak **589** temuan.	**94,24%**	
12	PENGELOLAAN POTENSI DAERAH	Peta potensi daerah	39	Rasio realisasi PAD 2018 terhadap potensi PAD [4]	Jumlah realisasi PAD 2018 dibagi dengan potensi PAD X 100%	- Realisasi PAD Tahun 2018, sebesar **Rp.1.685.633.193.244,34** - Potensi PAD pada APBD Tahun 2018 **Rp. 1.422.737.000.000,00**	**118,48%**	
		Peningkatan PAD	40	Peningkatan PAD	Kenaikan/penurunan PAD dibagi PAD tahun lalu x 100% (PAD 2018 - PAD 2017) : PAD 2017 X 100%	- Total PAD pada Tahun 2018 sebesar **Rp.1.685.633.193.244,34** - Total PAD pada Tahun 2017 sebesar **Rp. 1.671.806.819.696,53**	**0,83%**	
13	TEROBOSAN / INOVASI BARU DALAM PENYELENGGRAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Penghargaan	41	Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2018.	Jumlah penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam Tahun 2018	Penghargaan yang diterima, sebanyak **31** penghargaan, yang terdiri dari : **1) Tanggal 12 Januari 2018 : Peringkat ke-3 Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2017.** **2) Tanggal 24 Januari 2018 : Penghargaan Pelayanan Publik "Sangat Baik" kepada RSUD Kab Sidoarjo serta Pelayanan publik kategori "Baik" kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (DPMPTSP) Kab Sidoarjo dan Dispendukcapil Kab Sidoarjo dari Kementerian Pendayagunaan**	**31 Penghargaan**	

[4] Angka Potensi daerah diambil dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercantum dalam RPJMD atau RKPD

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	Capaian KInerja	Keterangan
						Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 3) Tanggal 31 Januari 2018 : Predikat BB di Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) tahun 2017 dari Kemenpan RB. 4) Tanggal 23 Maret 2018 : Kabupaten Sidoarjo ditetapkan masuk dalam Calon Daerah Tertib Ukur Tahun 2018 dari Kementerian Perdagangan. 5) Tanggal 29 Maret 2018 : kategori Terpopuler di Media Nasional sub kategori Kabupaten dalam ajang Penghargaan PR Indonesia Awards (PRIA) 2018 penyelenggara Public Relation Indonesia. 6) Tanggal 14 April 2018 : Penghargaan Indonesia Market Festival 2018 untuk kategori pelayanan publik terbaik 2018 untuk RSUD Sidoarjo dalam Public Service Of The Year Jawa Timur 2018 penyelenggara Markplus. 7) Tanggal 25 April 2018 : Daerah dengan "Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah" Tertinggi Nomor 1 tingkat nasional dengan predikat ST (Sangat Tinggi) saat Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-22 Dirjen Otoda Kemendagri. 8) Tanggal 3 Mei 2018 : Penghargaan Indonesia Smart Nation Award (ISNA) 2018 kategori Best Smart Readiness penyelenggara Citiasia 9) Tanggal 25 Mei 2018 : Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK Perwakilan Jatim atas Laporan Hasil Pemeriksaan APBD T.A. 2017.		

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	Capaian KInerja	Keterangan
						10) Tanggal 20 Juli 2018 : Wonderful Indonesia Tourism Award 2018, Sidoarjo masuk 10 Kabupaten destinasi terbaik Nasional untuk Wisata alternatif Geologi Lumpur Sidoarjo dan Wisata Belanja Intako dari Kementerian Pariwisata R.I. 11) Tanggal 23 Juli 2018 : Kabupaten Layak Anak 2018 kategori Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 12) Tanggal 14 September 2018 : Kabupaten Terbaik kategori Infrastruktur dalam ajang Indonesia's Attractiveness Award 2018. 13) Tanggal 28 September 2018 : Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan RI. (WTP 5 x untuk Kab Sidoarjo). 14) Tanggal 2 OKtober 2018 : Kabupaten Sidoarjo diwakili Kelompok Budaya Kerja (KBK) Calisline SMPN 4 Sidoarjo masuk Top 20 Nominator KBK Tingkat provinsi Jawa Timur. 15) Tanggal 12 Oktober 2018 : Penghargaan Diklat Award 2018 sebagai Kabupaten Terbaik se-Jawa Timur dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) oleh Badan Diklat Provinsi Jawa Timur. 16) Tanggal 12 Oktober 2018 : Kabupaten Ramah bagi Lanjut Usia Peringkat III dari Provinsi Jawa Timur dalam upacara Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke-73. 17) Tanggal 17 Oktober 2018 : Tim Penggerak PKK Kab Sidoarjo (wakil Provinsi Jawa Timur) meraih Juara Umum Lomba Cipta		

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	Capaian KInerja	Keterangan
						Menu Bergizi Tingkat Nasional dalam Lomba Cipta Menu Beragam Bergizi Seimbang Aman dan Sehat (B2SA) dalam rangka Hari pangan Sedunia XXXVIII di Banjarmasin Kalimantan Selatan. 18) Tanggal 18 Oktober 2018 : Kabupaten Sidoarjo diwakili dua (2) PNS menjadi Nominator Top 50 Terbaik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Teladan (dr Atok Irawan, Sp.P dan Nominator Top 50 Terbaik PNS Inspiratif (Rolis Awang Widodo) dalam Anugerah ASN Tahun 2018, Kemenpan dan RB. 19) Tanggal 22 Oktober 2018 : Penghargaan Good Practices Awards Top 25 Kovablik (Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik) dan Otonomi Award 2018 dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur kategori inovasi pelayanan Puskesmas Jabon "Sejiwa dengan Jempol" dan penghargaan Otonomi Award 2018 Kategori Khusus Daerah dengan Profil Menonjol Bidang Pembangunan Inklusif kepada Kopisemel (Komunitas Peduli Kesehatan Mental) Puskesmas Krian. 20) Tanggal 30 Oktober 2018 : Penghargaan National Procurement Award berupa 17 Standar LPSE dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) Republik Indonesia, atas capaian Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang telah memenuhi standardisasi LPSE 2014. 21) Tanggal 31 Oktober 2018 : Terbaik Kedua Kompetisi Budaya Kinerja (SIYAKIN) Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 diraih Kabupaten Sidoarjo diwakili Kelompok		

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	Capaian KInerja	Keterangan
						Budaya Kinerja (KBK) Baca Tulis Online atau disingkat Calisline SMPN 4 Sidoarjo. 22) Tanggal 2 November 2018 : Pemecahan rekor MURI melalui pembuatan Mural Single Line Art (teknik menggambar dengan garis yang tidak terputus) terbanyak di Satu Gedung yaitu Koperasi INTAKO. Melibatkan 740 orang, meliputi perajin, pelajar PAUD s.d SMU, mahasiswa, aparatur sipil negara (ASN), desainer, dan guru. 23) Tanggal 15 November 2018 : Penghargaan Natamukti dari International Indonesia Council for Small Bussiness (ICSB) dalam bidang pengelolaan dan peningkatan kemajuan UMKM di Kabupaten Sidoarjo diserahkan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) RI, A Puspayoga. 24) Tanggal 15 November 2018 : Penghargaan IGH (Implementasi Green Hospital) Tingkat Nasional dari Kementerian Kesehatan R.I diraih RSUD Sidoarjo, serta penghargaan Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Propinsi Jawa Timur yang berhasil diraih Puskesmas Jabon. 25) Tanggal 27 November 2018 : Penghargaan Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik (A) Tahun 2018 kepada RSUD Sidoarjo dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam ajang Penyampaian Hasil Evaluasi dan Apresiasi Unit Pelayanan Publik 2018 di Balai Kartini, Jakarta.		

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	Capaian KInerja	Keterangan
						26) Tanggal 6 Desember 2018 : Penghargaan Daerah Tertib Ukur Tahun 2018 dengan Kategori Sangat Memuaskan dan Pasar Tertib Ukur (19 Pasar Rakyat) kepada Kabupaten Sidoarjo dari Kementerian Perdagangan. Diserahkan Menteri Perdagangan di Bandung. 27) Tanggal 7 Desember 2018 : Penghargaan Innovative Government Award (IGA) Tahun 2018 kepada Kab Sidoarjo sebagai Kabupaten yang Sangat Inovatif (19 Inovasi) dari Kementerian Dalam Negeri yang diserahkan oleh Mendagri di Jakarta. 28) Tanggal 10 Desember 2018 : Pemkab Sidoarjo diwakili Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sidoarjo dan Kecamatan Sukodono ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menjadi Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). 29) Tanggal 11 Desember 2018 : Kabupaten Sidoarjo diwakili Direktur RSUD Sidoarjo, dr. Atok Irawan dinobatkan sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama Teladan (3 Terbaik) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam Anugerah Aparatur Sipil Negara (ASN) 2018. 30) Tanggal 19 Desember 2018 : Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2018 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan		

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	Capaian KInerja	Keterangan
						dan Perlindungan Anak (PPPA) untuk keenam kalinya. Tiga kali kategori Pratama dan tiga kali kategori Madya, Penyerahan berlangsung di Istana Wakil Presiden, Rabu (19/12/2018). Selain mendapat anugerah APE, Sidoarjo juga meraih Anugerah Festival Kota Layak Anak (KLA) kategori Kampung Anak Sejahtera (KAS). **31) Tanggal 6 Februari 2019 : Penghargaan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Predikat A pada Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) tahun 2018 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang diserahkan oleh Bapak Menteri Syafruddin kepada Bupati Sidoarjo bertempat di Golden Tulip Galaxy Hotel, Banjarmasin – Kalimantan Selatan.n**		
		Pengadaan barang dan jasa	42	Keberadaan E-procurement	Ada/Tidak	ADA : Penerapan E-procurement mulai operasi pada **tanggal 1 Nopember 2010**.	**Ada**	
		Daya saing daerah	43	Jumlah persetujuan investasi	Jumlah ijin investasi dalam tahun 2018	Persetujuan ijin investasi pada Tahun 2018, sebanyak 2**7.734** ijin	**27.734 ijin**	

LAMPIRAN III.3: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018

KABUPATEN: SIDOARJO

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
URUSAN WAJIB						
1	**Pendidikan**	**1**	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak ---------- x 100 % Jumlah anak usia 4 – 6 tahun	**92,80%**	69.240 orang 74.610 orang
		2	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Jumlah Penduduk usia 15 thn ke atas dapat baca tulis ---------- x 100 % Jumlah penduduk usia 15th ke atas	**100%**	1.774.741 orang 1.774.741 orang
		3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Jumlah siswa usia 7-12 thn dijenjang SD/MI/Paket A ---------- x 100 % Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 thn	**107,97%**	213.902 orang 198.117 orang
		4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Jumlah siswa usia 13-15 thn dijenjang SMP/MTs/Paket B ---------- x 100 % Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 thn	**99,01%**	94.573 orang 95.514 orang
		5	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SD/MI ---------- x 100 % Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SD/MI pd tahun ajaran sebelumnya	**0,12%**	252 orang 213.902 orang
		6	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SMP/MTs ---------- x 100 % Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SMP/MTs	**0,25%**	237 orang 94.573 orang

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		7	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI ---------- x 100 % Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya	**100%**	33.613 orang 33.613 orang
		8	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs ---------- x 100 % Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya	**100%**	31.034 orang 31.034 orang
		9	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs ---------- x 100 % Jumlah lulusan pd jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya	**92,21%**	30.993 orang 33.613 orang
		10	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV ---------- x 100 % Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA	**97,57%**	11.352 orang 11.635 orang
2	**Kesehatan**	**11**	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Jumlah komplikasi kebidanan yg mendpt penanganan difinitif di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertetu ---------- x 100 % Jumlah ibu dgn komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja Pada kurun waktu yg sama	**100%**	6.508 penanganan 6.508 kasus
		12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan Di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu ---------- x 100 % Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah Kerja dalam kurn waktu yg sama	**100%**	36.827 bulin 36.827 bulin
		13	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Jumlah Desa / Kelurahan UCI x 100 % Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan	**98%**	346 desa UCI 353 desa
		14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana Pelay. Kes. Di sati wil. Kerja pd kurun wkt tertentu ---------- x 100 %	**100%**	12 balita 12 balita

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Jumlah seluruh balita gizi buruk buruk yang ditemukan Di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama		
		15	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang Ditemukan dan diobati di satu wil. Kerja selama 1 thn ---------- x 100 % Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam Kurun wkt yang sama	**100%**	9.139 penderita 9.139 penderita
		16	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. Kerja selama 1 thn ---------- x 100% Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun wkt yang sama	**100%**	516 penderita 516 penderita
		17	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan Strata 1 ---------- x 100 % Jumlah seluruh masyarakat miskin di Kab/Kota	**100%**	136.790 kunjungan 136.790 orang
		18	Cakupan kunjungan bayi	Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kes. sesuai standar di satu wilayah kerja pd Kurun waktu tertentu ---------- x 100 % Jumlah seluruh bayi lahir hidupdi satu wilayah kerja pd Kurun waktu yang sama	**100%**	33.809 kunjungan 33.809 bayi
3	**Lingkungan Hidup**	**19**	Penanganan sampah	Volume sampah yang ditangani (ton) ---------- x 100 % Volume produksi sampah (ton)	**90,01%**	5.001,9 ton/hr 5.557 ton/hr
		20	Kebersihan	Jumlah pasar tradisional tergolong baik ---------- x 100 % Jumlah seluruh pasar tradisional	**100%**	18 unit 18 unit

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		21	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	Jumlah daya tampung TPS (ton) ---------- x 1000 Jumlah penduduk	**55,13%**	123.337,99 ton **2.238.069** penduduk
		22	Penegakan hukum lingkungan	Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemda ---------- x 100 % Jumlah kasus lingkungan yang ada	**100%**	35 kasus 35 kasus
4	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**23**	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ---------- x 100 % Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut	**93,06%**	941,83 km' 1.012,08 km'
		24	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik ---------- x 100 % Luas irigasi kabupaten	**100%**	381.096 ha 381.096 ha
		25	Rumah Tangga Per Sanitasi	Jumlah rumah tangga ber sanitasi ---------- x 100 % Jumla total rumah tangga	**90,65%**	611.335 RT 674.391 KK
		26	Kawasan Kumuh	Luas Kawasan Kumuh ---------- x 100 % Luas Wilayah	**0,43%**	303,97 ha 71.424 ha
		27	Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	Luas ruang terbuka hijau ---------- x 100 % Luas wilayah ber HPL/HGB	**35,00%**	10.711,756 m2 30.604,93 m2
5	**Perumahan Rakyat dan Kawasn Permukiman**	**28**	Rumah tangga pengguna air bersih	Jumlah rumah tangga pengguna air bersih ---------- x 100 % Jumlah seluruh rumah tangga	**92,10%**	621.114 unit 674.391 unit
		29	Lingkungan pemukiman kumuh	Luas lingkungan permukiman kumuh ---------- x 100 % Luas wilayah	**0,43%**	303,97 ha 71.424 ha

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		30	Rumah layak huni	Jumlah rumah layak huni ---------- x 100% Jumlah seluruh rumah di wilayah pemda ybs.	**94,75%**	638.985 unit 674.391 unit
6	**Kepemudaan & Olahraga**	**31**	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	Jumlah gelanggang/balai remaja di kabupaten ---------- x 1000 Jumlah penduduk	**0,41**	916 unit **2.238.069** penduduk
		32	Lapangan olahraga .	Jumlah lapangan olahraga di kabupaten ---------- x 1000 Jumlah penduduk Lapangan olah raga adalah: 1. lap sepakbola, = 1.047 lapangan 2. lap basket, = 5 lapangan 3. lap volley, = 46 lapangan 4. lap. bulu tangkis, = 23 lapangan 5. kolam renang = 1 lapangan Jumlah = 1.122 lapangan	**0,501**	1.122 lapangan **2.238.069** penduduk
7	**Penanaman Modal**	**33**	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	Realisasi PMDN thn 2018 – Realisasi PMDN 2017 ---------- x 100 % Realisasi PMDN 2017	**33,25%**	2018 : Rp. 23.832.580.166.842,00 2017 : Rp. 17.885.626.090.815,89
8	**Koperasi & UKM**	**34**	Koperasi aktif	Jumlah Koperasi aktif ---------- x 100 % Jumlah seluruh koperasi	**89,14%**	1.289 koperasi 1.446 koperasi
		35	Usaha Mikro dan Kecil	Jumlah usaha mikro dan kecil ---------- x 100 % Jumlah seluruh UKM	**100%**	206.934 UMK 206.934 UKM

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9	**Administrasi Kependudukan & Catatan Sipil**	**36**	Kepemilikan KTP	Jumlah Penduduk yang memiliki KTP ---------- x 100 % Jumlah penduduk wajib KTP (>17 dan atau Pernah/sudah menikah)	**90,50%**	1.495.386 KTP 1.652.408 Penduduk
		37	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	Jumlah penduduk memiliki akta kelahiran ---------- x 1000 Jumah penduduk	**87,98%**	1.969.010 AK **2.238.069** penduduk
		38	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah/belum	**Sudah**	
10	**Tenaga Kerja**	**39**	Pelayanan kepersertaan Jaminan Sosial bagi pekerja/buruh	Jumlah pekerja/buruh peserta program Jamsostek aktif ---------- x 100 % Jumlah pekerja/buruh	**63,16%**	182.201 pekerja/buruh 288.459 pekerja/buruh
		40	Pencari kerja yang ditempatkan	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan ---------- x 100 % Jumlah pencari kerja yang mendaftar	**59,80%**	5.158 orang 8.626 orang
11	**Pangan**	**41**	Regulasi ketahanan pangan	Ada/tidak peraturan tentang kebijakan ketahanan pangan dalam bentuk perda,perkada, dsb.	**Ada**	PERBUP no 21 thn 2011 SK BUPATI no 1057 thn 2010 SK BUPATI no 521 thn 2011 SK BUPATI no 413 thn 2012 SK BUPATI no 469 thn 2017
		42	Ketersediaan pangan utama	Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (kg) ---------- x 1000 Jumlah penduduk	**385,91**	863.684,47 kg **2.238.069** jiwa

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	**43**	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Pekerja perempuan di lembaga pemerintah ---------- x 100 % Jumlah pekerja perempuan	**14,55%**	30.448 orang 209.320 orang
		44	Angka melek huruf perempuan usia 15th keatas	Jumlah anak perempuan usia > 15 yg melek huruf ---------- x 100 % Jumlah anak perempuan usia > 15 tahun	**100%**	789.917 anak 789.917 anak
		45	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan ---------- x 100 % Jumlah angkatan kerja perempuan	**52,23%**	219.609 orang 420.466 orang
13	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**46**	Prevalensi peserta KB aktif	Jumlah peserta program KB aktif ---------- x 100 % Jumlah pasangan usia subur	**81,29%**	306.116 PA 376.576 PUS
		47	Rasio petugas lapangan KB/penyuluh KB (PLKB/PKB) di setiap desa/kelurahan	Jumlah PKLB/PKB ---------- x 100 % Jumlah desa/kelurahan	**27,48**	353 desa/kelurahan 97 PKLB/PKB
14	**Perhubungan**	**48**	Angkutan darat	Jumlah angkutan darat ---------- Jumlah penumpang angkutan darat	**0,001**	3.687 angkutan 2.852.252 orang
15	**Komunikasi & Informatika**	**49**	Web site milik pemerintah daerah	Ada / tidak	**Ada**	http://www.sidoarjokab.go.id/
		50	Pameran/expo	Menunjukkan Jumlah pameran/expo per tahun	**20 kali**	20 kali

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16	**Pertanahan**	**51**	Luas lahan bersertifikat	Luas lahan bersertifikat di suatu daerah ---------- x 100 % Luas lahan yang seharusnya bersertifikat di suatu daerah	**76,04%**	54.312 ha 71.424 ha
		52	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	Jumlah kasus yang diselesaikan ---------- x 100 % Jumlah kasus yang terdaftar	**100%**	5 kasus 5 kasus
		53	Penyelesian Ijin Lokasi	Jumlah Ijin Lokasi ---------- x 100 % Permohonan Ijin Lokasi	**100%**	517 ijin 517 ijin
17	**Pemberdayaan Masyarakat & Desa**	**54**	PKK aktif	Jumlah PKK aktif ---------- x 100 % Jumlah PKK	**100%**	593.514 unit 593.514 unit
		55	Posyandu	Jumlah Posyandu Aktif ---------- x 100 % Total Posyandu	**100%**	1.779 buah 1.779 buah
18	**Sosial**	**56**	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Menunjukan jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah dll yang terdapat di suatu daerah	**120 buah**	120 buah
		57	Persentase penyandang cacat baik fisik dan mental serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan social	Jumlah penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan social dalam satu tahun ---------- x 100 % Jumlah penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan social dalam satu tahun	**100%**	78 orang 78 orang
		58	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	Jumlah PMKS yg diberikan bantuan ---------- x 100 % Jumlah PMKS yg seharusnya menerima bantuan	**100%**	31.667 PMKS 31.667 PMKS

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
19	**Budaya**	**59**	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	**17 kali**	17 kali
		60	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	**376 buah**	376 buah
		61	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan ---------- x 100 % Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah	**100%**	23 benda,situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan 23 benda,situs dan kawasan cagar budaya yang dimiliki
20	**Statistik**	**62**	Buku ”kabupaten dalam angka”	Ada atau tidak	**Ada**	Ada
		63	Buku ”PDRB kabupaten”	Ada atau tidak	**Ada**	Ada
21	**Kearsipan**	**64**	Penerapan pengelolaan arsip secara baku	Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku ---------- x 100 % Jumlah SKPD	**100%**	47 SKPD 47 SKPD
		65	Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	Menunjukkan jumlah Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	**20 kali**	Dilaksanakan **20** kegiatan
22	**Perpustakaan**	**66**	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Jumlah koleksi judul buku yg tersedia di perpustakaan daerah ---------- Jumlah koleksi jumlah buku yg tersedia di perpustakaan daerah	**37,10%**	37.100 judul 99.998 buku
		67	Pengunjung perpustakaan	Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun ---------- Jumlah orang dalam populasi yg harus dilayani	**100%**	1.625.661 orang 1.625.661 orang
URUSAN PILIHAN.						
1	**Kelautan dan Perikanan**	**1**	Produksi perikanan	Jumlah Produksi Ikan (Rp) ---------- x 100% Target Daerah (Ton)	**100%**	112.342.084 kg 112.42.084 kg

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2	Konsumsi ikan	Jumlah Konsumsi Ikan (Kg) ---------- x 100% Target Daerah (Kg)	**100%**	32,20 kg/kapita/th 32,20 kg/kapita/th
2.	**Pertanian**	**3**	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainya (ton) ---------- Luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainya (ha)	**52,14**	2.234.240,50 ton 42.853 ha
		4	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Tahun 2018**)	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian ---------- x 100% Jumlah total PDRB	**2,12%**	2.654.505,09 Juta **125.039.056,37** Juta
3	**Pariwisata**	**5**	Kunjungan wisata	Menunjukkan total jumlah wisatawan per tahun	**1.990.903 orang**	1.990.903 orang
		6	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Tahun 2018**)	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pariwisata ---------- x 100% Jumlah total PDRB	**3,68%**	4.344.217,83 Juta **118.043.869,90** Juta
4	**Perindustrian**	**7**	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Tahun 2018**)	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor industri ---------- x 100% Jumlah total PDRB	**52,18%**	61.596.911,10 Juta **118.043.869,90** Juta
		8	Pertumbuhan Industri	Jumlah Industri tahun 2018 - Jumlah Industri tahun 2017 ---------- x 100% Jumlah Industri s/d tahun 2017	**0,35%**	Industri tahun 2018 = 16.950 Industri tahun 2017 = 16.891

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	**Perdagangan**	**9**	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2018**)	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor perdagangan ---------- x 100% Jumlah total PDRB	**17,17%**	20.271.721,91 Juta **118.043.869,90** Juta
		10	Ekspor Bersih Perdagangan	Nilai ekspor bersih = nilai ekspor ---------- x 100% nilai impor	**925.601.133,28**	Nilai ekspor 2018 = 1.753.114.000,00 US$ Nilai Impor 2018 = 827.512.866,72 US$
6	**Transmigrasi**	**11**	Transmigran swakarsa	Jumlah transmigran swakarsa ---------- x 100% Jumlah transmigran	**0%**	0 KK 0 KK
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
		1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Ada/tidak	**Ada**	PERDA Nomor 5 Tahun 2006
		2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Ada/tidak	**Ada**	PERDA Nomor 8 Tahun 2018
		3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada/tidak	**Ada**	PERBUP Nomor 39 Tahun 2018
		4	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	Jumlah program RKPD tahun berkenaan ---------- x 100 % Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan	**100%**	346 program 346 program
		5	Sistim Informasi Manajemen Pemda	Menunjukkan Jumlah Sistim Informasi Manajemen Pemda yang telah dibuat oleh pemda ybs	**61 buah**	61 buah

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		6	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Ada atau tidaknya survey IKM di Pemda	**Ada**	Ada
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						
		1	Kegiatan pembinaan politik daerah	Menunjukan Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah	**35 Kegiatan**	35 kegiatan
		2	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Menunjukkan Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	**18 Kegiatan**	18 kegiatan

Keterangan
*) Pilih salah satu
**) Apabila belum tersedia, gunakan PDRB Tahun 2017.